ISBN: 978-602-74335-0-2

Jilid II
Seminar Nasional
Ekonomi dan Bisnis
Global Competitive Advantage

2016



"Membangun Ekonomi dan Bisnis Inklusif"

PROSIDING

Palembang, 06-07 April 2016

Universitas Bina Darma

Supported by:

BANK INDONESIA

Universitas Bina Darma

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS
GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
Palembang 6-7 April 2016

Penerbit :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Darma
Palembang
2016

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS
GLOBAL COMPETITIVE ADVANTAGE

© Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Bina Darma

Cetakan Pertama Tahun 2016
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Reviewer
Dr. H. Hardiansyah, M.Si
Dr. Kristina Setyastuti, M.M.
Verawaty, S.E., Ak., M.Sc
Cirtra Indah M, S.E., Ak., M.M.
Asmanita, S.E., M.Si

Editor
M. Titan Terzaghi, S.E., Ak., M.Si
Irwan Septayuda, S.E., M.Si

Penerbit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universias Bina Darma
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 3 Palembang
Kode Pas 302264
Telepon (62-711) 515679, 515581, 515582
Faksimile (62-711) 515581
http://fekon.binadarma.ac.id

ISBN : 978-602-74335-0-2

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selayaknya tercurah kehadirat Allah SWT, karena atas kemudahan yang diberikan-NYA maka Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis *Global Competition Advantage* (GCA) dapat diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma pada tanggal 6-7 April 2016. Adalah suatu kebanggaan dan rasa syukur yang tinggi dapat menghimpun dan menyatukan serta menyebarkan berbagai ide, pemikiran, dan hasil riset ilmiah maupun pengalaman praktis yang terhimpun dalam Prosiding Seminar ilmiah GCA yang pertama dengan mengangkat tema "Membangun Ekonomi dan Bisnis Inklusif".

Tema tersebut dipilih, karena kami berharap bahwa pembangunan ekonomi dan bisnis tidak hanya terbatas kepada bidang tertentu dan hanya memberikan manfaat kepada sebagian pihak saja, melainkan dapat memberikan manfaat yang menyentuh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Prosiding ini berisi makalah dengan ruang lingkup bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, bisnis, dan kewirausahaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan nasional yang kompleks dan menuntut peran aktif seluruh pihak.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para tamu undangan, DR. Fahmi Idris, S.E., M.H. (Menteri Perindustrian dan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Bersatu), Prof. DR. Basu Swasta Dharmmesta M.B.A. (Direktur MM UGM Yogyakarta), Slamet Edi Purnomo S.E., M.M (Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional OJK), dan DR. Ekowati Retnaningsih, SKM., M.Kes (Kepala Bappeda Sumsel) yang telah menghadiri pembukaan dan memberikan sambutan pada seminar ini sebagai *keynote speaker*. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih pada para peserta, pemakalah, dan presenter seminar atas partisipasinya, serta penghargaan juga patut diberikan kepada seluruh panitia pelaksana dan pihak - pihak terkait dalam seminar nasional ini atas jerih payahnya sehingga seminar dapat berlangsung dengan baik sampai tersusunnya prosiding ini. Akhir kata, semoga prosiding ini dapat memberikan konsep dan aplikasi yang bermanfaat khususnya dalam mensukseskan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga Allah SWT meridhai semua langkah dan perjuangan kita, serta berkenan mencatatnya sebagai amal ibadah. Aamiin.

Palembang, April 2016

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii

PENGARUH DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA
Agung Oktani, Verawaty, Rolia Wahasusmiah 1

TERNYATA TINDAKAN PENDETEKSIAN, PENCEGAHAN DAN AUDIT FRAUD DAPAT MEMINIMALISASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN
Angga Diotama, Siti Nurhayati Nafsiah, Ade Kemala Jaya 9

PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING
Arum Sri Hartati, Poppy Indriani, Ade Kemala Jaya 17

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, PROFITABILITAS,DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI BEI
Bella Pratiwi, Poppy Indriani, Citra Indah Merina 24

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY
Dekko Ade Dinata, Poppy Indriani, Jaka Darmawan 31

PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KELELAHAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN
Dessy Oktasari, Sitti Nurhayati Nafsiah, Ade Kemala Jaya 40

IMPLEMENTASI PPN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA DEALER ASTRA HONDA PALEMBANG
Deti Okta Riani, Henni Indriyani, Jaka Darmawan 48

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Dewi Sagita, Henni Indriyani, M. Titan Terzaghi. 59

ANALISIS METODE Z-SCORE UNTUK MEMPREDIKSI POTENSI TERJADINYA FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
Dian Ramadani, Poppy Indriani, Ade Kemala Jaya 66

PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY PT. VADENSIL
Dina Mayang Sari, Wiwin Agustian, Yeni Widyanti..... 74

ANALISIS PERUBAHAN PTKP TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
Doddy Sadewo, Fitriasuri, Yeni Widyanti 80

PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WPOP TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PPH
Edi Junaidi, Fitriasuri, Yeni Widyanti..... 87

PENGARUH ASPEK BUDAYA TERHADAP PRINSIP AKUNTANSI BERTERIMA UMUM PADA PEDAGANG MODEL DAN TEKWAN
Effri Diantara, Siti Nurhayati Nafsiah, Jaka Darmawan 95

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH
Eko Herminto, Poppy Indriani, Citra Indah Merina..... 102

PENERAPAN PMK-91/PMK.03/2015 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK 2015 DI KPP PRATAMA PALEMBANG
Eko Rusdianto, Henni Indriyani, Yeni Widyanti 110

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL
Elsha Yelya, Siti Nurhayati Nafsiah,dan Andrian Noviardy 118

PENGARUH VOLUNTARY DISCLOSURE TERHADAP AUDIT VERIFICATION (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BEI)
Eramalasari, Henni Indriyani, Ade Kemala Jaya 124

PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN DI BEI
Etisa Maharati, Henni Indriyani, Yeni Widyanti 133

PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN SALES GROWTH TERHADAP SENGKETA PAJAK
Halimatussakdiyah, Verawaty, Yeni widyanti..... 140

PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING
Hermayanti Agustina, Henni Indriyani, Ade Kemala Jaya 147

PERANAN ANGGARAN PRODUKSI SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PRODUKSI
Jera Feromita, Poppy Indriani, Ade Kemala Jaya 153

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DI KOTA PALEMBANG
Ketut Dwi Puji Lestari, H. Hasan Kuzery, Yeni Widyanti..... 162

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK ATAS RUMAH KOS TERHADAP PENDAPATAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG
Kiki Gustriani, Hasan Kuzery, Jaka Darmawan 171

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PERSEDIAAN SUKU CADANG PADA PT KARYA SEMESTA INVESTAMA
Kms Muhammad Idris, Poppy Indriani, Jaka Darmawan..... 178

PEMAHAMAN WP TERHADAP PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK UKM PADA KEPATUHAN WP
Linda Sari, Hasan Kuzery, Jaka Darmawan 184

ANALISIS BEDA PENERIMAAN PENDAPATAN LISTRIK TERHADAP KECEPATAN ALIRAN KAS PADA PT. PLN (PERSERO)
M.Rachmansya, Poppy Indriani, M. Titan Terzaghi 190

PENGARUH PENGETAHUAN KONSUMEN MENGENAI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH
Maria Susi Winarni, Fitriasuri, Ade Kemala Jaya 198

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG
Mastarino, Fitriasuri, Andrian Noviardy 204

ANALISIS PENERAPAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
Megaria, Hasan Kuzery, Yeni Widyanti..... 209

PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT
Meta Oktaria, Poppy Indriani, Andrian Noviardy..... 217

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA PEGAWAI

Muhammad Ridho Akbar, Henni Indriyani, Septiani Fransisca 224

PENGARUH PMK NO.91/PMK 03/2015 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
Muhammad Whisnu Nirwansyah, H. Hasan Kuzery, Yeni Widyanti..... 231

PENGARUH PENGELOLAAN MODAL KERJA, RASIO KEUANGAN DAN FIRM SIZE TERHADAP PROFITABILITAS
Muhammad Yahya, Fitriasuri, Muhammad Titan Terzaghi 239

ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN ADD DUA DESA KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR
Muhammad Yoggy, Verawaty, Citra Indah Merina..... 248

TERNYATA MANAJEMEN LABA PERBANKAN SYARIAH LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN PERBANKAN KONVENSIONAL
Nadya Ayu Satriani, Henni Indriyani, Jaka Darmawan 255

PENGARUH INVESTASI ASET TETAP TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. KARYA JAYA MANDIRI PERKASA
Nita Liana Sari, Siti Nurhayati Nafsiah, AndrianNoviardy..... 264

PENERAPAN TARGET COSTING SEBAGAI ALAT PERENCANAAN BIAYA UNTUK MENINGKATKAN LABA PADA BIMBINGAN BELAJAR GSC PALEMBANG
Novita Dasmarlina, Verawaty, Yeni Widyanti 328

ANALISIS PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MELAPORKAN SPT
Novita Sari, Hasan Kuzery, Septiani Fransisca 280

PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP RETURN ON ASSETS PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI
Okta Malinda, Siti Nurhayati Nafsiah, Andrian Noviardy 287

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG PADA PT. BINTANG MULTI SARANA PALEMBANG
Okta Ristia, Fitriasuri, Septiani Fransisca 296

PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH
Oktari Azalea Putri, Henni Indriyani, Andrian Noviardy..... 303

FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA INFRASTRUKTUR
Reni Pitriah, Verawaty, Citra Indah Merina 310

ANALISIS SISTEM PEMBELIAN BAHAN BAKU TERHADAP PROSES PRODUKSI PADA CV. SUMBER TERANG MULIA
Resti Wulan Sari, Poppy Indriani, Andrian Noviardy..... 317

PENGARUH PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA
Ricky Arbiansyah, Siti Nurhayati Nafsiah, Jaka Darmawan..... 324

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG
Rifita Mayasari, Henni Indriayani, Rolia Wahasusmiah..... 333

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN BBM TERHADAP EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN
Ririn Anggraini, Henni Indriyani, Andrian Noviardy..... 340

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
Rista Bella, Hasan Kuzery, Yeni Widyanti 344

PENGARUH PROFITABILITAS, FREE CASH FLOW, LEVERAGE DAN KESEMPATAN INVESTASI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN
Rizki Aditya Putra, Verawaty, Ade Kemala Jaya 354

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PBB-P2 TERHADAP PAJAK DAERAH PADA DISPENDA KOTA PALEMBANG
Sinta Nurdiana, H. Hasan Kuzery, Jaka Darmawan..... 362

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN LQ45 TERDAFTAR DI BEI 2014
Siti Sahara, Poppy Indriani, M. Titan Terzaghi 368

PENGARUH KOMPENSASI BONUS DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PT. TUNAS CIPTA PROFITA (TCP) PADA PENGOPERASIAN CONTACT CENTER PLN 123 PALEMBANG
Syafrial, Siti Nurhayati Nafsiah, dan Jaka Darmawan 377

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN PUBLIK, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP KONSERVATISME DI BEI
Tri Dewi Astuty, Henni Indryani, Yeni Widyanti..... 386

PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, ASIMETRI INFORMASI, KESESUAIAN KOMPENSASI, SPI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI
Tri Heri Mulyo, Henni Indriyani, M. Titan Terzaghi 394

PENERAPAN PSAK 109 ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
Utari Indriani, Fitriasuri, Ade Kemala Jaya 401

PENERAPAN PSAP KE 2 DALAM PP NO 71 TAHUN 2010 TENTANG LRA ATAS BELANJA PEGAWAI
Wahyu Eka Putra, Verawaty, Ade Kemala Jaya 408

EFEKTIVITAS PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KAYU AGUNG TAHUN 2013-2014
Wiwid Ega Mentari, Hasan Kuzery, Yeni Widyanti 415

DETERMINAN KINERJA BPD DI PULAU SUMATERA
Yolanda Widiati,Verawaty, Ade Kemala Jaya 422

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 13/1/PBI/2011 TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
Zainal Heripin, Poppy Indriani, Andrian Noviardy 428

PENGARUH DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Agung Oktani[1)], Verawaty[2)], Rolia Wahasusmiah[3)]
[1,2,3]Ekonomi Universitas Bina Darma
[1]Email: agungoktanie@gamil.com
[2]Email: verawaty_mahyudin@yahoo.com
[3]Email: rolia.wahasusmiah@binadarma.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the transfer of funds to the regions to the capital expenditure in the provincial government in Indonesian . This study uses a quantitative approach that is explanatory research . The population in this study were all provincial governments in Indonesia period 2012-2014 as many as 34 Province . The number of samples taken in this study is as much as 54 2012-2014 . The sampling technique in this research is the technique of Non-Probability Sampling with purposive sampling approach . Analysis technique used is multiple linear regression . Results of the analysis showed simultaneous variable DAU , DAK , DBH , DID , BOS and TPG PNSD jointly effect on capital spending , and in partial DAU , DAK and DID effect on capital spending while DBH , BOS , TPG PNSD no effect on capital expenditure.

***Keywords** : Balance Funds , Fund Adjustments, and capital expenditures*

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan desentralisasi ini tentu memerlukan pendanaan yang besar. Penyelenggaran fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelanggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai pasal 5 UU No. 33 tahun 2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan dalam desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Penyerahan urusan dan pemberian sumber pendanaan dalam bentuk kebijakan perimbangan keuangan pada daerah otonom, pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah guna mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, serta secara lebih luas diharapkan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan daerah.

Jumlah transfer ke daerah sebesar Rp 528,6 triliun atau 31,41% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.683 triliun pada tahun 2013. Angka pengeluaran untuk transfer ke daerah meningkat menjadi Rp 592,6 triliun atau sekitar 32,16% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp 1.842,6 triliun (www.djkp.depkeu.go.id). Jumlah transfer ke daerah terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Pelaksanaan transfer ke daerah belum sepenuhnya membangkitkan kemandirian daerah, besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dan dana penyesuaian mengindikasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memiliki peran dalam pembangunan daerah. Pemerintah terus berupaya memberi perhatian yang besar terhadap penerapan desentralisasi fiskal melalui dana transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian dan dana perimbangan. Penelitian ini berusaha ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dana transfer ke daerah terhadap belanja modal.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun ekspilisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi penyerahan wewenang) menurut Abdul & Syukri (2006) menyatakan pendelegasian terjadi ketika seseorang atau satu kelompok lain (prinsipal) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Menurut Zimmerman (1977) dalam Mela (2014), *agencyproblem* juga ada dalam konteks organisasi pemerintahan. Rakyat sebagai prinsipal memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut prinsipal karena menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat, implikasi dari teori ini, prinsipal yaitu rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agen, baik pemerintah maupun para politisi, politisi sebagai prinsipal juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.

Dikaitkan dengan belanja modal maka pemerintah daerah atau eksekutif mengalokasikan belanja modal harus sesuai dengan kepentingan publik. Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari saat ini (asas maksimal). Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung mengusulkan target lebih rendah (asas minimal) agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih muda dicapai. Usulan anggaran yang mengandung perbedaan anggaran (*slack)* seperti ini merupakan gambaran antara eksekutif dan legislatif.

2. Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan derah.

Penelitian yang dilakukan Yovita (2011), kadafi (2013) dan Susetyo (2014) menunjukan hasil bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Kusnandar dan Siswantoro (2012) variabel DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut.

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal

Penelitian yang dilakukan Kadafi (2013) dan Wandira (2014) Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan Ardhani (2011) DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut.

H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal

Secara teoritis pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) semakin kecil. Penelitian yang dilakukan Kadafi (2013), Pratama (2014) dan Sumardjoko dan Irwanto (2015) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengeruh signifikan terhadap belanja modal. Berbeda dengan Jwitami (2013) menemukan bukti empiris bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian belanja modal ke dalam hipotesis sebagai berikut.

H3: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

4. Pengaruh Dana Insentif Daerah terhadap belanja modal

Menurut penelitian Sumardjoko dan Irwanto (2015) dan Yadia (2014) Dana Insentif Daerah (DID) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah. Sedangkan Mustari (2010) menyatakan bahwa dana penyesuaian tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menguji Dana Insentif Daerah (DID) dalam mempengaruhi belanja modal dengan hipotesis.

H4: Dana Insentif Daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

5. Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap belanja modal

Transfer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak menghilangkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tanggung jawab pendidikan dasar. Menurut Penelitian Yadia (2014) menemukan bahwa dana transfer lainnya berpengaruh terhadap belanja modal. Sumardjoko dan Irwanto (2015), dan Mustari (2010) menemukan bahwa BOS tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menguji Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mempengaruhi belanja modal dengan hipotesis:

H5: Bantuan Operasional Sekolah berpengaruh terhadap belanja modal.

6. Pengaruh Tunjangan Profesi Guru PNSD terhadap belanja modal

Menurut Yadia (2014) menemukan bahwa dana transfer lainnya berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan Mustari (2010) menemukan bahwa TPG PNSD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menguji Tunjangan Profesi Guru PNSD dalam mempengaruhi belanja modal dengan hipotesis:

H6: Tunjangan Profesi Guru PNSD berpengaruh terhadap belanja modal.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini seluruh variabel menggunakan sekala nominal dan indikator Laporan realisasi APBD dan laporan keuangan transfer ke daerah tahun 2012-2014.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi dari tahun 2012-2014. sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan syarat sehingga disesuaikan dengan obyek penelitian. Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah 1) Merupakan Provinsi di Indonesia, 2) Memiliki laporan keuangan tahun 2012-2014, dan 3) Memiliki kelengkapan data dan informasi keuangan mengenai-mengenai variabel-variabel yang diteliti.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan dependen, sebelum dilakukan analisis regresi peneliti melakukan pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, dapat dilihat melalui grafik *normal probability plot* bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dengan variabel dependen belanja modal telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji multikolineritas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat bahwa nilai DW lebih kecil dari nilai du dan lebih besar dari nilai dl. Jadi hasil dari uji autokorelasi ini menunjukan bahwa penelitian ini tidak terganggu oleh autokorelasi karena nilai. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukan nilai signifikan untuk setiap variabel bebas terhadap nilai absolute lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji koefesien determinasi dapat dilihat menunjukan nilai (*adjusted R-square*) sebesar 0,237 yang memiliki arti bahwa 23,7 % perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, DBH, DID, BOS dan TPG PNSD. Sedangkan sisanya 76,3 % dipengaruhi variabel lain di luar model.

Tabel 4.1
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.082	6	.014	3.948	.003[a]
	Residual	.162	47	.003		
	Total	.244	53			

Hasil Uji statistik F untuk menguji pengaruh DAU, DAK, DBH, DID, BOS, TPG PNSD yang mempunyai F-hitung sebesar 3.948 dengan nilai signifikansi 0,003 hal ini berarti tingkat signifikansi < 5% ($\alpha = 0{,}05$). Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal atau dapat dikatakan variabel DAU, DAK, DBH, DID, BOS, TPG PNSD secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu Belanja Modal

Analisis Regresi

Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1062786816408.716	487212121479.807		2.181	.000
	Dana Alokasi Umum	.247	.287	1.474	.861	.076
	Dana Alokasi Khusus	-1.890	2.005	-.829	-.943	.019
	Dana Bagi Hasil	-.028	.075	-.064	-.375	.202

	DID	-2.057	4.277	-.084	-.481	.074
	BOS	.390	.622	.268	.628	.785
	TPGPNSD	-.656	.572	-.905	-1.146	.228

Pembahasan

1. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,076 dimana tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,10 (a = 10%) dan nilai t sebesar 861. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Yovita (2011), Kadafi (2013) dan Susetyo (2014) menunjukan hasil bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal. Karena DAU bertujuan menciptakan keseimbangan fiskal daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah dan kebutuhan fiskalnya tinggi maka alokasi DAU daerah tersebut menjadi besar. Dengan demikian transfer DAU berpengaruh yang besar lebih ditunjukan untuk menutup kebutuhan fiskal daerah melalui belanja modal. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya Kusnandar dan Siswantoro (2012) bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal

Hasil penellitian ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal, dengan nilai signifikan 0,019 dimana tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,10 (a = 10%) dan nilai t sebesar -.943. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang di lakukan Kadafi (2013) dan Wandira (2014) bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal. karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Ardhani (2011), yaitu DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

3. Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,202 dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,10 (a = 10%) dengan niali t sebesar -.375. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Jwitami (2013) menemukan bukti empiris bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Karena DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase bersumber dari pajak dan sumber daya alam daerah itu sendiri jadi DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Kadafi (2013), Pratama (2014) dan Sumardjoko dan Irwanto (2015) Dana Bagi Hasil (DBH) berpengeruh signifikan terhadap belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak karena DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4. Dana Insentif Daerah berpengaruh terhadap belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dana Insetif Daerah (DID) berpengaruh terhadap belanja modal dengan arah negatif dengan nilai signifikan 0,074 dimana tingkat signifikansi lebih besar dari 0,10 (a = 10%) dan nilai t sebesar -.481. Hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Sumardjoko dan Irwanto (2015) dan Yadia (2014) Dana Insentif Daerah (DID) berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DID yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar juga. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian

yang dilakukan Mustari (2010) menyatakan bahwa dana penyesuaian tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena DID berpengaruh terhadap belanja modal.

5. Bantuan Operasional Sekolah berpengaruh terhadap belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bantuan opersional sekolah tidak berpengaruh terhdap belanja modal dengan nilai signifikan 0,785 dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,10 (*a* = 10%) dan nilai t sebesar 628. hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Sumardjoko dan Irwanto (2015), dan Mustari (2010) menemukan bahwa BOS tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Karena BOS belum mampu memberikan keleluasaan untuk penggunaan belanja modal, karena BOS dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya mengarah ke belanja modal dalam rangka peningkatan layanan pendidikan, namun pemanfaatan BOS masih banyak digunakan untuk belanja operasional non investasi. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Yadia (2014) menemukan bahwa dana transfer lainnya berpengaruh terhadap belanja modal. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak karena BOS tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

6. TPG PNSD berpengaruh terhadap belanja modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tunjangan perofesi guru PNSD tidak berpangaruh terhadap belanja modal dengan nilai signifikan 0,228 dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,10 (*a* = 10%) dan nilai t sebesar -1.146. Hasil penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan Mustari (2010) menemukan bahwa TPG PNSD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Karena TPG PNSD belum mampu memberikan keleluasaan untuk penggunaan belanja modal, karena TPG PNSD dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya mengarah ke belanja modal dalam rangka peningkatan layanan guru dan dosen. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Yadia (2014) menemukan bahwa dana transfer lainnya berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat dikarenakan penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak karena TPG PNSD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

5. SIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana transfer terhadap belanja modal pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2012-2014. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan menunjukan secara simultan variabel DAU, DAK, DBH, DID, BOS dan TPG PNSD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal, dan secara parsial variabel DAU, DAK dan DID berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan DBH, BOS, TPG PNSD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas dana penyesuian yang tidak hanya pada dana insentif daerah, bantuan opersional sekolah dan tunjangan profesi guru PNSD melainkan pada jenis dana penyensuian lainnya dan menambahkan variabel non keuangan perlu dilibatkan di dalam peneltian ini dan memperbanyak jumlah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja*

Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

[2] Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Laporan Realisasi Pengeluaran Pemerintah provinsi*. www.bps.go.id. Diakses Pada 10 November 2015

[3] Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntasi Keuangan Daerah, Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.

[4] Halim, Abdul & Syukriy, Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah; Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi, Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2 (1) :53-64.*

[5] Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. *Pengaruh Kemendarian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012).* Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado.

[6] Kadafi, Muhammad Edwin. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap belanja Modal*. Skripsi. Universitas Widyatama.

[7] Kementrian keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Perimbangan Keuangan*. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada 10 November 2015.

[8] Kusnandar, dan Siswantoro, Dodik. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.* SNA XV. Banjarmasin.

[9] Maryadi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiyayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi.

[10] Mustari, Wilhelmus. 2010. *Hubungan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana penyesuaian dengan belanja modal dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. TESIS. Yogyakarta.

[11] Pratama, Caesario. 2014. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Aloksi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal*. Universitas Bengkulu.

[12] Setyadi, Yusuf. 2013. *Pengertian dan Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*.http://www.bos.kemdikbud.go.id. Diakses pada 11 November 2015.

[13] Sulistyowai, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Aloksi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Universitas Diponogor. Semarang.

[14] Sumardjoko, Imam & Irwanto, Andry. 2015. *Peran Transfer Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan Terhadap Peningkatan Belanja Modal Daerah Untuk Menciptakan Quality Spending.* Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan.

[15] Susetyo, Dino Rian Verri. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Pengalokasian Belanja Modal.* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah.* Jakarta.

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.* Jakarta.

[18] Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Negri Semarang.

[19] Yadia, Ilham Sukma. 2014. *Pengaruh Variabel penerima Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Kalimantan Timur).* Skripsi. Malang.

[20] Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbahan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Universita Diponogoro.

TERNYATA TINDAKAN PENDETEKSIAN, PENCEGAHAN DAN AUDIT *FRAUD* DAPAT MEMINIMALISASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN

Angga Diotama[1], Siti Nurhayati Nafsiah[2], Ade Kemala Jaya[3]
[1,2,3]Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Email :anggadt@yahoo.com[1],
Siti_nurhayati@binadarma.ac.id[2],
Jaya_ade@yahoo.com[3]

Abstract

This study is to analyze the influence of the detection, prevention and fraud audit in minimizing fraudulent financial statements. This study uses primary data distributing questionnaires on the object of research, namely, Department of Communication and information of South Sumatra and with the help of the opinions of Drs, Ahamad Nuroni. The samples were done using convenience sampling. Questionnaires were distributed thirty-five but only thirty were returned. Analyzing data on the hypothesis using multiple regression test. The research proves the hypothesis that the author of the detection, prevention, and fraud auditing positive significant effect.

Keywords: *Detection, Prevention and Fraud Audit and minimize fraudulent financial statements.*

1. PENDAHULUAN

Media informasi akuntansi yaitu laporan keuangan yang dimana sangat penting dalam memberikan informasi bagi penggunanya, informasi laporan keuangan yang wajar yaitu yang mengikuti standar akuntansi keuangan yang ada, Baik perusahaan kecil menengah maupun perusahaan besar juga harus meggunakan dan menyajikan laporan keuangan yang bersifat transfaran dan dapat di pertanggung jawabkan.

Laporan keuangan memberikan segala informasi keuangan mengenai bagaimana posisi keuangan perusahaan, bagaimana kinerja perusahaan selama ini, serta bagaimana arus kas entitas perusahaan yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tidak hanya sekadar kumpulan angka-angka, namun menjadi alat untuk beberapa pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Gitman dan widyatama (2012:55), pengguna laporan keuangan adalah para pemegang saham, investor lain, dan kreditor

Tujuan perusahaan menerbitkan laporan keuangan sesungguhnya ingin menampilkan keadaan perusahaan yang terbaik. Namun, motivasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Tindakan kecurangan pada laporan keuangan tersebut menyebabkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan menyebabkan salah saji material, yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

Pihak Audit internal sangat bertanggung jawab dalam menanggani semua pengawasan dari setiap pekerjaan yang berlangsung dalam sebuah perusahaan, baik dari transaksi, pencatatan bahkan sampai terbentuknya suatu laporan keuangan yang sering sekali di temukan salah saji yang mengakibatkan merugikan pihak lain.

Dinas Perhubungan Kota Palembang yang ternyata diduga diselimuti banyak kasus, seperti kasus restribusi parkir, kasus pemeliharaan kapal dan kasus pembangunan dermaga BKB. Anehnya, ketiga dugaan kasus ini belum ada kejelasan dari pihak penegak hukum baik kejati maupun Polresta Palembang.

Mulai dari hal inilah penulis memiliki gagasan pertanyaan, tindakan seperti apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kerugian di suatu perusahaan, kalau memang tindakan fraud itu terjadi, pendeteksian dan Pencegahan seperti apa yang harus dilakukan oleh auditor internal atau external untuk mengetahui dimanakah letak tindak kecurangan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab tersebut dan juga apakah audit Fraud juga bermanfaat dan dapat meminimalisasi kecurangan tersebut .

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang tindakan seperti apa yang harus dilakukan untuk meminilaisasi kecurangan yang berada di Indonesia Khususnya di Sumatera Selatan, sehingga penulis mengambil judul "Pengaruh pendeteksian, pencegahan dan audit *fraud* dalam meminimalisasi kecurangan laporan keuangan (Studi kasus Dinas Perhubungan komunikasi dan informasi sumatera selatan)

2. TINJAUANLITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.1 Pengertian Kecurangan

Menurut Albrecht (2012:6), dalam Yulifah (2014:5), tindakan kecurangan atau *fraud* merupakan istilah umum, dan mencakup segala bentuk kecerdikan manusia dalam hal perancangan, yang dipaksakan oleh satu individu, untuk mendapatkan keuntungan lebih melalui pernyataan palsu. Tidak ada aturan yang pasti serta tidak ada yang bisa ditetapkan sebagai usulan umum dalam mendefinisikan *fraud*, karena mencakup hal-hal yang mengejutkan, penipuan, kelicikan atau kecerdikan, serta cara-cara yang tidak adil. Satu-satunya batas yang mampu mendefinisikan *fraud* adalah hal-hal yang dapat membatasi ketidak jujuran manusia. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan kecurangan atau *fraud* merupakan tindakan yang salah serta dinilai tidak bertanggung jawab, karena *fraud* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menghalalkan segala cara namun konsekuensinya adalah merugikan bagi kepentingan pihak yang lain *Black's Law Dictionary*, mendefinisikan (*A misrepresentation made recklessly without belief in its truth toinduce other person to act*) yaitu, Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/ tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi orang lain atau menyebabkan orang lain bertindak dan berbuat.

2.1.2 Pengertian Pendeteksian

Tindakan lanjutan yang dilakukan oleh investor, audit internal, para pengguna lainnya, apabila dicurigai atau ditemukan adanya indikasi kecurangan. Resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah *Integrity risk*, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau karyawan perusahaan, tindakan ilegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik/reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupya.

2.1.3 Pengertian Pencegahan

Menurut Albrecht (2012:120) dalam Yulifah (2014), sebagai basis teori atau acuan utama, karena dalam teori tersebut telah merumuskan serangkaian upaya pencegahan yang sifatnya lebih komprehensif. Upaya tersebut terdiri dari dua determinan (faktor) utama, yakni menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan *(creating a culture of honesty, openness, and assistance)* serta mengeliminasi peluang terjadinya tindakan kecurangan *(eliminating fraud opportunities).*

2..1.4 Pengertian Audit *Fraud*

Menurut KENNISH (1986) Audit Kecurangan ialah berbagai prosedur yang dilakukan untuk memeriksa apakah suatu laporan keuangan perusahaan terindikasi telah terjadi suatu bentuk

kecurangan/ *Fraud* yang dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan salah saji yang material sehingga bisa menipu para pengguna laporan keuangan

2.1.5 Pengertian Meminimalisasi Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, meminimalisasi kecurangan ialah Melakukan Berbagai upaya untuk mengantisipasi dan menghilangkan tindak kecurangan pada laporan keuangan,

2..1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian mengenai meminimalisasi kecurangan laporan keuangan yaitu, Santi yustini (2009),Pengaruh peranan Komite Audit dan Audit Internal dalam Mendeteksi KecuranganKomite audit dan auditor internal berpengaruh signifikan.Ismayanti, Pengaruh Keahlian dan Tanggung dewan Auditor Internal terhadap Mendeteksi Kecurangan serta Pencegahan Tindakan Kecurangan (2009), menggunakan Regresi Berganda dan hasilnya Keahlian Auditor dan tanggung jawab auditor tidak berpengaruh signifikan.

Ahmad Iqbal (2010), Pengaruh Tindak Pencegahan, Pendeteksian dan Audit Investigasi Terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan (fraud) 2010, Pengaruh tindak pencegahan kompetensi , tindak pendeteksian , Audit investigasi dalam Meminimalisasi kecurangan, menggunakan Regresi Berganda, Tindakan pendeteksian, audit investigasi berpengaruh signifikan positif sedangkan penceghan berpengaruh signifikan negative. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas mengenai meminimalisasi kecurangan maka hipotesis dalam penelitian ini mengenai tindakan apa yang berpengaruh signifikan positif dalam meminimalisasi kecurangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pengukuran dan Variabel

a. Variabel independen (X)
   Pengaruh Pendeteksian, pencegahan dan audit *fraud*,setiap variabel masing-masing semuanya memiliki lima pertanyaan, dan mewakili indicator yang ada, Respon dari responden menggunakan skala Likert.
b. Variabel dependen (Y)
   Meminimalisasi kecurangan laporan keuangan juga memiliki lima pertanyaan, Respon dari responden menggunakan skla Likert

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Sumatera Selatan dan dengan bantuan pendapat dari salah satu kantor akuntan public yang berada di Palembang yaitu , Kantor akuntan public Ahmad Nuroni.

3.3 Sumber Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan ialah data Primer, yaitu penulis secara langsung melakukan observasi dan menyebarkan kuesioner padaobjek penelitian. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis Kuantitatif. Metode analisis menggunakan metode Regresi Berganda, Kemudian uji kualitas data yaitu terdiri dari , uji Validitas, dan Reabilitas. Uji Asumsi klasik yakni uji heterokedatisitas, normalitas dan multikolinearitas. Uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi(R_2), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji f), tetapi dalam jurnal ini, penulis hanya menampilkan uji regresi berganda, parsial dan simultan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.

4.1.1 Uji Regresi Berganda

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi berganda. Model regresi linear berganda diformulasikan seperti berikut ini

$$Y = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 X3 + \beta_4 X4 + e$$

Tabel 4.6

Uji Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial
1	(Constant)	10,324	3,584		-2,880	,008		
	Pendeteksian	,319	,086	,388	3,711	,001	,965	1,037
	Pencegahan	,077	,106	,080	2,726	,004	,872	1,147
	Audit FRAUD	1,111	,164	,740	6,785	,000	,888	1,126

a. Dependent Variable: Meminimalisasi Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel tersebut pada kolom B, tercantum nilai konstanta dan nilai-nilai koefisien regresi linear berganda untuk masing-masing variabel bebas. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat ditentukan model regresi linear berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut.

$$Y = 10{,}324 + 0{,}388X_1 + 0{,}080X_2 + 0{,}740X_3.$$

Tabel 4.7

Uji Signifisi Secara Parsial (t_{hitung})

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial
1	(Constant)	10,324	3,584		-2,880	,008		
	Pendeteksian	,319	,086	,388	3,711	,001	,965	1,037
	Pencegahan	,077	,106	,080	2,726	,004	,872	1,147
	Audit FRAUD	1,111	,164	,740	6,785	,000	,888	1,126

a. Dependent Variable: Meminimalisasi Kecurangan Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

Uji Signifikan Secara Parsial (t)

1. Tindakan pendeteksian (X1) berpengaruh signifikan terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel}. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig < α 0,05. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 < α 0,05 dan nilai t_{hitung} 3,711 >

t_{tabel} 1,706. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,319. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H1 dapat diterima. Dimana semakin baik tindak pendeteksian maka semakin tinggi upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa pendeteksian (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan.

2. Variabel pencegahan (X_2) terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel}. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig < α 0,05. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,004 < α 0,05 dan nilai t_{hitung} 2,726 > t_{tabel} 1,706. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,077. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H2 dapat diterima. Dimana semakin tinggi pencegahan maka semakin tinggi juga upaya terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan pencegahan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan.
3. Variabel audit *fraud* (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel}. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig < α 0,05. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 < α 0,05 dan nilai t_{hitung} 6,785 > t_{tabel} 1,706. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 1,111. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H3 dapat diterima. Dimana semakin tinggi tindakan audit fraud semakin tinggi juga terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan audit *fraud* (X_3) berpengaruh positif terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan.

4.1.2 Uji Signifikan Secara Simultan (f_{hitung})

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak. Berdasarkan nilai sig 0,000[a] menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Rumus Ftabel yaitu, df1 = k-1 jadi , df1= 3-1= 2, sedangkan df2= n-k jadi, df2= 30-3= 27. Sehingga Ftabelnya =3,354.

Dari hasil analisis data yang diperoleh mengenai pendeteksian, pencegahan dan audit *fraud* dalam meminimalisasi kecurangan laporan keuangan, dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan. Hasil pengolahan statistik analisis regresi menunjukkan nilai F = 22,546 yang signifikan pada level 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 22,546 > 3,354 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < α = 1% (0,01). Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,01 maka Ho ditolak, kesimpulannya sama dengan pengujian yang dilakukan dengan memakai f_{hitung}.

Tabel 4.3

Uji Signifikan Secara Simultan (f_{hitung})

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115,690	3	38,563	22,546	,000[a]
	Residual	46,181	27	1,710		
	Total	161,871	30			

a. Dependent Variable: Meminimalisasi Kecurangan Laporan Keuangan
c. Predictors: (Constant), Audit FRAUD, Tindakan Pendeteksian, Tindakan Pencegahan

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendeteksian Terhadap Meminimalisasi Kecurangan laporan keuangan

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan persamaan regresi berganda Y= 10,324 + 0,388X1 + 0,080X2 + 0,740X3 . Untuk hasil pengujian hipotesis nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , t_{hitung} 3,711> t_{tabel} 1,706 maka H0 ada di daerah penolakan, berarti H_1 diterima artinya pendeteksian berpengaruh signifikan terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan. Selain itu dilihat dari nilai signifikansi pada uji t variabel pendeteksian lebih kecil daripada nilai signifikan yang ditetapkan (0,001 < α 0,05) sehingga H_1 diterima dengan koefisien regresi (β) pendeteksian bernilai positif yaitu 0.319 menunjukkan bahwa pendeteksian mempunyai arah pengaruh positif terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan, dan pengaruhnya signifikan artinya apabila tindakan pendeteksian pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan semakin meningkat, bisa meningkatkan upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan dan peningkatannya sangat signifikan.

4.2.2 Pengaruh pencegahan Terhadap terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan persamaan regresi berganda Y= 10,324 + 0,388X1 + 0,080X2 + 0,740X3. Untuk hasil pengujian hipotesis nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (2,726 > t_{tabel} 1,706) maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_2 diterima artinya pencegahan berpengaruh signifikan terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan. Selain itu dilihat dari nilai signifikansi pada uji t variabel Pencegahan lebih kecil daripada nilai signifikan yang ditetapkan (0,004 < α 0,05) sehingga H_2 diterima dengan koefisien regresi (β) pencegahan yaitu 0,077 menunjukkan pencegahan mempunyai arah pengaruh positif terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan, dan pengaruhnya signifikan artinya pencegahan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan semakin meningkat, bisa meningkatkan upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan dan kenaikannya sangat signifikan.

4.2.3 Pengaruh Audit *Fraud* Terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan persamaan regresi berganda Y= 10,324 + 0,388X1 + 0,080X2 + 0,740X3. Untuk hasil pengujian hipotesis nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (6,785 > t_{tabel} 1,706)maka H0 ada di daerah penolakan, berarti H3 diterima artinya artinya audit *fraud* berpengaruh signifikan terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan. Selain itu dilihat dari nilai signifikansi pada uji t audit *fraud* lebih kecil daripada nilai signifikan yang (0,000 < α 0,05) sehingga H3 diterima dengan koefisien regresi (β) audit *fraud* bernilai positif yaitu 1,111 menunjukkan bahwa audit *fraud* mempunyai arah positif terhadap meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan, dan pengaruhnya signifikan positif artinya apabila upaya audit fraud pada Dinas

Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan meningkat, maka upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan dan akan meningkat, peningkatannya ke arah signifikan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh maupun hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pengaruh tindakan Pendeteksian, Pencegahan dan Audit *Fraud* dalam meminimalisasi kecurangan laporan keuangan dinas perhubungan komunikasi dan informasi sumatera selatan, yaitu :

Parsial

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendeteksian berpengaruh secara signifikan positif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan.
2. Hasil ini membuktikan bahwa tindakan Pencegahan berpengaruh secara signifikan positif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan.
3. Hasil ini membuktikan bahwa tindakan Audit *fraud* berpengaruh secara signifikan positif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan

Simultan

Hasil ini membuktikan bahwa tindakan Pendeteksian Pencegahan dan audit *fraud* semuanya berpengaruh signifikan positif terhadap upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan pada Dinas Perhubungan komunikasi dan informasi Sumatera Selatan dengan menggunakan pengujian simultan sehingga sesuai pada hipotesis yang penulis telah buat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, Penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan evaluasi pada dinas Perhubungan komunikasi dan informasi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1) Meningkatkan lagi insting pendeteksian yang dilakukan oleh auditor internal, mempelajari segala macam gerak-gerik perilaku pelaku kecurangan agar tidak kecolongan dan terjadi lagi pada gejala farud. Membangun Sistem operasional perusahaan yang lebih tegas dan memberikan penghargaan jika karyawan memiliki record kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan tindakan pencegahan itu sendiri. Lebih insentif/ berfokus terhadap gejala fraud, membangun mental baik,independen dan bekerja sama dengan karyawan aparat dan yang dapat membantu menghilangkan gejala fraud, sehingga Audit fraud lebih efektif lagi.
2) Bagi peneliti selanjutnya, dengan keterbatasan penulis agar dapat menambah variabel-variabel lain yang mungkin dapat membantu penelitian ini lebih baik khususnya mengenai gejala *fraud* , contohnya variabel ketaatan akuntansi profesi, budaya etis organisasi dan vaiabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh kuat dengan upaya meminimalisasi kecurangan laporan keuangan.

6. REFERENSI

[1] Amrizal. “Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Auditor Internal Artikel. Jakarta :2004. Dari http://www.pdf.com (diakses pada 20-11-2015).
[2] Albrecht. “ Pengertian Kecurangan (*Fraud)* dalam kutipan yulifah (2014)
[3] Albrecht. “ Pengertian Pencegahan dalam kutipan yulifah (2014).

[4] Gitman dalam widyatama " Pengertian Laporan Keuangan" dalam kutipan jurnal widyatama dari http/www.respository.widyatama.acc.id. (diakses pada tanggal 20-11-2015)
[5] Ikatan Akuntan Indonesia, 2011, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta.
[6] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Pengertian meminimalisasi kecurangan , Melalui http://Kbbi.web.id/ yang diakses 20-11-205.
[7] KENNISH (1986), " Definisi Audit Kecurangan" dalam jurnal.
[8] Morton, Sanford "Stategic Auditing for Fraud". The Accounting Riview Journal. Vol 68, No 4, pp 825-839 dari http:// www.jstor.org (diakses pada 20- 11-2015).
[9] Saripedia, " Cara cepat menyusun skripsi yang baik dan benar ", sumber di dapatkan pada https://saripedia.wordpress.com/tag/skripsi-yang-baik-dan-benar/, (diakses pada tanggal 25-11-2015).
[10] Siggih Santoso, ' Buku panduan lengkap SPSS V20".
[11] SPSS Indonesia," Belajar SPSS cepat dan mudah dengan spss v 20",dari http://www.spssindonesia.com, (diakses pada tanggal 05-01-2016).
[12] Sumsel Post Online. Dishub kota Palembang diselimuti kasus (*http;/sumselpostonline.comdishub-kota-palembang-diselimuti-kasus.phd*).

PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TRANSFER PRICING*

Arum Sri Hartati[1], Poppy Indriani[2], Ade Kemala Jaya[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Darma
arumsrihartati@gmail.com[1]
poppy.Indriani@binadarma.ac.id[2]
jaya_ade@yahoo.com[3]

Abstract

Effect of Taxes, Foreign Ownership and Company Size Of Transfer Pricing. This study aims to verify and analyze the effect of tax, foreign ownership, and the size of the company transfer pricing. Taxes were measured using a proxy for income tax expense, foreign ownership is measured using a proxy of the percentage of foreign ownership of 20% or more, company size was measured using a proxy of total assets, and transfer pricing is measured using a proxy ratio of the transaction value of related party (related party transaction / RPT) receivables total receivables of the company. The population in this study were 141 companies listed on the Stock Exchange in 2012-2014. Based on purposive sampling method, samples obtained by 12 companies. The data used in this study is a secondary archival data. Secondary archive data obtained from annual reports of companies manufacturing in 2012-2014 sourced from www.idx.co.id. The hypothesis in this study were tested using multiple linear regression analysis. The results showed that the variable tax negatively affect transfer pricing, foreign ownership negatively affect transfer pricing, and the size of the company's positive effect on transfer pricing.

Keyword: *Tax, foreign ownership, size of the companys, transfer pricing*

1. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional.

Meningkatnya laju pertumbuhan sektor manufaktur adalah hasil dari permintaan domestik, terutama untuk logam, makanan, bahan kimia, dan suku cadang otomotif. Konsumsi domestik meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, sementara data investasi terkini menunjukkan laju pertumbuhan sektor manufaktur menjadi semakin cepat. Investor asing pun kini mulai banyak melirik ke Indonesia karena potensi kelas menengahnya yang begitu besar dan upah buruhnya yang relatif lebih kompetitif.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut.

Transfer pricing merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak asing, sehingga kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Pada saat kontrol yang dimiliki pemegang saham pengendali asing akan berusaha mengalokasian sumber daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam berbagai keputusan penting, termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah pada transaksi *transfer pricing* (Sari, 2012:162).

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki suatu

peusahaan. Semakin besar jumlah total asset yang dimiliki maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Total asset yang besar menunjukan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh pajak, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukankan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti baru dan membuktikan dari penelitian terdahulu apa saja faktor-faktor yang mendorong dilakukannya praktik *transfer pricing,* baik dengan alasan pajak maupun non pajak.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Transfer Pricing*

Transfer Pricing *Transfer pricing* sering juga disebut dengan *intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional* atau *internal pricing.* Pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-932/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga *transfer pricing* sebagai *penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.*

2.2 Pajak

Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) mendefisnisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.3 Kepemilikan Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional (Anggraini, 2011:28). Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, kepemilikan yang di maksud adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing.

2.4 Ukuran Perusahaan

Suatu perusahaan bisa dikatakan perusahaan besar, jika asset yang dimilikinya besar. Demikian pula sebalikna, perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika asset yang dimilikinya sedikit. Biasanya masyarakat akan menilai besar kecilnya perusahaan dengan melihat bentuk fisik perusahaan. Dapat dibenarkan bahwa perusahaan yang dari luar terlihat megah dan besar diartikan sebagai perusahaan berskala besar. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kekayaan yang besar (Sulistiono, 2010:36).

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Di Indonesia, transaksi antar anggota perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*. Dalam *transfer pricing,* perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkantarif pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup. Oleh karena itu, beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2011) menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing.*

Ha_1: Semakin tinggi tingkat beban pajak maka semakin tinggi tingkat *transfer pricing.*

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Dynaty dkk, 2011:2). Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali bersama-sama manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal ini dimungkinkan dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Ha_2: Semakin besar tingkat kepemilikan asing semakin tinggi tingkat *transfer pricing.*

2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan total aset sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama.

Transaksi *transfer pricing* merupakan salah satu upaya manajemen laba atau pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (Choutrou et al., 2001 dalam Pujiningsih, 2011: 46). Dengan demikian, kecil kemungkinan dilakukannya *transfer pricing.*

Ha_3: Semakin besar ukuran perusahaan semakin rendah tingkat *transfer pricing.*

3. OBJEK DAN METODOLGI PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel yang digunakan sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014.
2. Perusahaan sampel yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan kepemilikan 20% atau lebih dan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan asing dengan kepemilikan 25% atau lebih.
3. Perusahaan mengungkapkan transaksi *transfer pricing* dalam laporan tahunan.
4. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

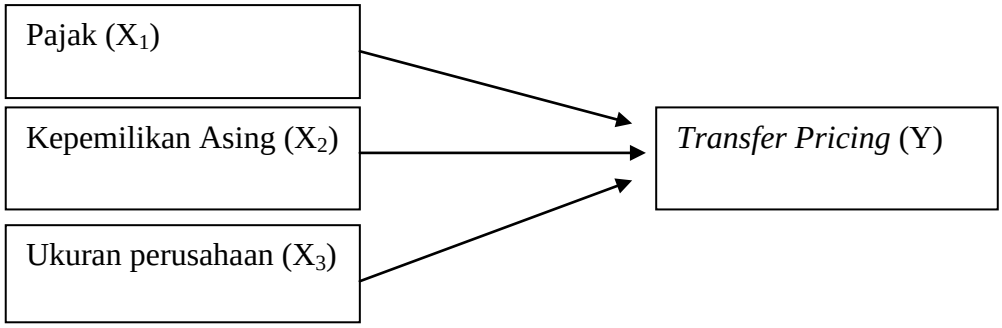
Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak dilambangkan dengan X1. Pajak diukur menggunakan proksi beban pajak penghasilan.

2. Kepemilikan asing dilambangkan dengan X2. Kepemilikan asing diukur menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih.
3. Ukuran perusahaan dilambangkan dengan X3. Ukuran perusahaan diukur menggunakan proksi total aset.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* yang dilambangkan dengan Y. *Transfer pricing* diukur menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*related party transaction*/RPT) piutang atas total piutang.

Model penelitian ini melihat kedudukan variabel dependen dan variabel independen sekaligus menggambarkan hubungan pengaruh antara variabel seperti digambarkan berikut ini :



Data yang digunakan adalah data arsip sekunder. Periode data yang digunakan adalah dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Dalam penelitian ini, data arsip sekunder yang dimaksud adalah:

a. Data beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak penghasilan tahun 2012-2014.
b. Data persentase kepemilikan saham perusahaan asing tahun 2012-2014.
c. Data total aset perusahaan tahun 2012-2014.
d. Data nilai *related party transaction* (RPT) piutang dan total piutang perusahaan tahun 2012-2014.

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik melalui analisis regresi linier berganda. Analisis statistik dilakukan dengan bantuan program *SPSS for Windows versi 16.0*. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e}$$

Keterangan:
Y = Variabel Dependen (*Transfer Pricing*)
α = Konstanta
β = Koefisien
X1 = Variabel Independen (Pajak)
X2 = Variabel Independen (Kepemilikan Asing)
X3 = Variabel Independen (Ukuran Perusahaan)
e = Error

4. Analisis Dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Penarikan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan jumlah perusahaan manufaktur sebanyak 141 perusahaan. Sedangkan sampel data yang memenuhi kriteria untuk dapat digunakan sebagai sampel penelitian ini sebanyak 12 perusahaan manufaktur dari 141 perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI tahun 2012-2014. Sehingga jumlah keseluruhan unit yang dijadikan objek penelitian dari tahun 2012-2014 adalah sejumlah 36 *annual report* perusahaan manufaktur.

Agar model regresi yang dipakai dalam penelitian ini secara teoritis menghasilkan nilai parametrik yang sesuai maka terlebih dahulu data harus memenuhi uji normalitas dan uji asumsi klasik (Ningsaptiti, 2010). Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.1.1 Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Regresi Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13453621963.960	33153406202.867		-.406	.688
	Pajak	1.230	.728	.275	1.691	.101
	Kepemilikan Asing	-4359357.181	7650537.531	-.080	-.570	.573
	Ukuran Perusahaan	.102	.034	.542	3.023	.005

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Output SPSS 22, diolah tahun 2016

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$Y= -13453621963{,}960 +1{,}230X_1 + -4359357{,}181X_2 + 0{,}102X_3 + e$

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa variabel pajak (X1), berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, kepemilikan asing (X2) berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan (X3) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square)* digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. Dari hasil koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,520. Hal ini berarti bahwa 52 % variabel *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 48% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis.

Uji statistik t diperlukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X_1) terhadap variabel terikat (Y) (Sanusi, 2011:138). Dan untuk menemukan pengaruh yang paling determinan antara masing-masing variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen tingkat signifikasi 0,05. Jika probabilitas nilai t signifikan > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial.

Penelitian ini memiliki tiga hipotesis yang diajukan untuk meneliti praktik *transfer pricing* perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil hipotesis-hipotesis tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Hipotesis pertama (Ha1) adalah pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai koefisien pajak sebesar 1,691dengan tingkat signifikansi sebesar 0,101 yang lebih besar dari 0,05 maka variabel pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* yang berarti **Ha1 ditolak**.

Hipotesis kedua (Ha2) adalah kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai koefisien kepemilikan asing sebesar 0,570 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,573 yang lebih besar dari 0,05 maka variabel kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* yang berarti **Ha2 ditolak**.

Hipotesis ketiga (Ha3) adalah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Dari hasil pengujian analisis regresi diperoleh nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar 3,023 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 yang lebih kecil sama dengan 0,05 maka variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* yang berati **Ha3 ditolak**.

4.1.2 Pembahasan

4.1.2.1 Pengaruh Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan alat bantu SPSS versi 22 bahwa variabel independen yaitu pajak menunjukan hasil tidak berpengaruh signifian terhadap *transfer pricing.* Hal ini dibuktikan variabel X_1 atau pajak memiliki nilai t_{hitung} 1,691, dan nilai signifikan sebesar 0,101 (lebih besar dari 0,05), artinya pajak secara simultan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini dan Wirakusuma (2011). Beban pajak yang besar tidak memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing.*

4.1.2.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan nilai variabel X_2 atau kepemilikan asing memiliki nilai t_{hitung} -0,570, dan nilai signifikan sebesar 0,573 (lebih besar dari 0,05), artinya kepemilikan asing secara simultan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa ketika pihak asing telah menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% maka pihak asing tidak bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan yang dibuat perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yang melibatkan pihak asing. Dengan demikian semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka tidak berpengaruh dalam menentukan banyak sedikitnya *transfer pricing* yang dilakukan.

4.1.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel X_3 atau pajak memiliki nilai t_{hitung} 3,203, dan nilai signifikan sebesar 0,005 (lebih kecil dari 0,05), artinya ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak menunjukan, bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap dilakukannya *transfer pricing* oleh perusahaan tersebut.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Diharapkan menggunakan jenis perusahaan lain yang tidak hanya sebatas pada perusahaan manufaktur untuk membuktikan apakah diperoleh hasil yang sama dan menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap *transfer pricing.*

6. REFERENSI

[1] Anggraini, Ririn Dwi, 2011, Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan Dalam *Annual Report*, Skripsi, universitas Diponegoro, Semarang..

[2] Dynaty, Vera, Sidharta Utama, Hilda Rossieta dan Sylvia Veronica, 2011, *Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir Terhadap Transaksi Pihak Berelasi*, *Skripsi*, diakses dari http://journal.ac.id

[3] Mardiasmo. 2008. *Advance Pricing Agreement Dalam Kaitannya Dengan Upaya Meminimalisasi Potential Tax Risk, Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2008.

[4] Ningsaptiti, Restie. 2010. *Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba*, *Skripsi*, Diakses dari http://eprints.undip.ac.id

[5] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

[6] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 15 tentang Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

[7] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/Pj/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

[8] Pujiningsih, Andiany Indra. 2011. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Praktik Corporate Governence dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba, Skripsi*, diakses dari http://eprints.undip.ac.id.

[9] Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

[10] Sanusi, Anwar. 2011. *Methodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.

[11] Sulistiono. 2010. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2006-2008*, *Skripsi*, diakses dari http://journal.unnes.ac.id.

[12] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

[13] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

[14] Yuniasih, Ni Wayan, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma. 2011. *Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*, *Skripsi*, Diakses dari http://ojs.unud.ac.id.

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, PROFITABILITAS,DAN *LEVERAGE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR PERBANKAN DI BEI

Bella Pratiwi, Poppy Indriani, Citra Indah Merina
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
Email: pratiwibella34@yahoo.com
Email: Poppy.Indriani@binadarma.ac.id
Email: citra_ims@yahoo.com

ABSTRACT

This study discusses the variables that affect the corvorate value perbankan companies in Indonesia Stock Exchange (IDX). The variables are Kebijakan Dividen, Profitabilitas, and Leverage. The population of this research is perbankan companies listed on Indonesia Stock Exchanges for 2013-2014. The sample used are 30 by using specified criterias. The hypothesis result show that kebijakan dividen, profitabilitas, and leverage do not have signifikant influences to the corporate value. The adjusted R^2 is at 0,8% meaning that there is 92,8% of other variables that explains the value of corporate value.

Keywords: *Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Leverage and Corporate Value.*

1. PENDAHULUAN

Dunia bisnis dari tahun ke tahun selalu mengalami kemajuan yang juga selalu diikuti oleh persaingan yang sangat ketat antar perusahaan demi tercapai tujuan perusahaan. Persaingan bisnis di Indonesia saat ini juga telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dari hari ke hari. Dimana salah satu tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaannya selain mensejahteraan pemilik perusahaan, dimana dalam hal ini dapat tercipta bila suatu perusahaan dengan tepat mengimplementasikan keputusan keuangannya.

Perusahaan yang bergerak di sektor bisnis itu sendiri terdiri dari berbagai macam bidang, mulai dari yang bergerak di bidang usaha perdagangan, industri, pertanian, manufaktur, peternakan, perumahan, perbankan dan usaha-usaha lainnya. Masing-masing bidang usaha tersebut termasuk lembaga keuangan perbankan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dan khas, sehingga dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut tidaklah gampang, selalu saja terjadi hambatan dalam pelaksanaannya sehingga sebuah perusahaan harus lebih cermat lagi dalam menjalankan usahanya.

Lembaga keuangan sektor perbankan merupakan investasi masyarakat yang diharapkan mampu melancarkan perekonomian negara. Hal ini ditunjukkan pada fenomena tahun 1998 , ketika perbankan mengalami masa-masa krisis, sejumlah bank umum bermasalah, maka stabilitas sektor-sektor riilpun ikut terpuruk. Sejumlah perusahaan besar dalam negeri mengalami kebangkrutan dan yang masih mampu survive-pun sulit melakukan pengembangan usaha akibat menipisnya cadangan dana untuk investasi dari perbankan.

Perbankan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah sangat memperhatikan nilai perusahaan. Kegagalan bank dalam menjaga nilai perusahaannya akan menyebabkan kepercayaan dari nasabah beserta lembaga-lembaga yang menyimpan dana atau menginvestasikan modalnya di bank berkurang, sehingga dana yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan pun berkurang. Hal ini menyebabkan bank harus menjaga setiap kegiatannya demi meningkatkan nilai perusahaan.

Untuk itu, Perusahaan sektor perbankan harus melakukan suatu analisis yang sangat baik mengenai keputusan keuangannya sehingga kegiatan perusahaan berjalan dengan baik dan perusahaan mencapai tujuan secara efesien dan efektif, dimana setiap keputusan keuangan itu masing-masing

terdapat faktor dominan yang mempengaruhinya seperti dari keputusan investasi yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dividen, profitabilitas, serta tingkat *leverage* perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Literatur

2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Brigham dan Houston (2001:36) dalam Kurniawati (2014), menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan modal baru dengan cara-cara lain seperti dengan menggunakan hutang.

2.1.2 Bird in the Hand Theory

Brigham dan Houston (2006:71) dalam Cecilia (2015), mengemukakan bahwa dalam *Bird in the Hand Theory* terdapat hubungan antara nilai perusahaan dengan kebijakan dividen. Mereka mengemukakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimumkan oleh rasio pembayaran dividen yang tinggi, karena investor menganggap bahwa resiko dividen tidak sebesar resiko kenaikan modal. Dengan kata lain investor lebih menyukai keuntungan dalam bentuk dividen daripada keuntungan yang diharapkan dari kenaikan modal. *Bird in the Hand Theory* menyatakan bahwa dengan memberikan dividen yang tinggi, maka harga saham perusahaan juga akan semakin tinggi yang akan berdampak pada nilai perusahaan.

2.1.3 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menggambrakan hubungan *agency* sebagai suatu kontrak di bawah satu atau lebih (*principal*) yang melibatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan yang menerima wewenang (agen).

2.1.4 Teori Dividen Irelevan MM (Miller-Modigliani)

Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berdampak pada harga saham maupun biaya modal suatu perusahaan, karena nilai perusahaan hanya ditentukan oleh profitabilitas dasar dan risiko usahanya. Dengan kata lain nilai perusahaan hanya bergantung pada laba yang dihasilkan oleh asetnya, bukan pada bagaimana laba itu dipecah antara dividen dan laba ditahan. Karena rasio pembayaran dividen hanyalah rincian dan tidak mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Mandagi (2010) dalam Kurniawati (2014), kebijakan dividen menentukan berapa banyak laba yang harus dibayar kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali di dalam perusahaan (laba ditahan). Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana internal. Menurut Gayatri dan Mustanda (2013) dalam Kurniawati (2014), kekhawatiran yang dihadapi oleh perusahaan dalam kebijakan dividen adalah seberapa banyak pendapatan yang bisa dibayarkan sebagai

dividen dan seberapa banyak dapat dipertahankan, karena terkadang pembagian dividen bagi sebagian investor bukanlah sinyal positif.

Penelitian Lestari (2012),, dan Analisa (2011), menyatakan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian Wahyudi dan Pawestri (2006), mandagi (2010), dan Kurniawati (2014), menyatakan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan ke dalam hipotesis:

H1. *Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan*

2.1 *Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan*

Profitabilitas menurut Weston dan Copeland (1996) merupakan efektifitas manajemen yang ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan atau investasi perusahaan. Dalam melakukan investasi sebaiknya investor mempertimbangkan profit dari perusahaan mana yang akan memberikan return tinggi (Jusriani, 2013).

Menurut hasil penelitian Cecilia (2015), Astriani (2014), Abdillah (2013), Lestari (2012), dan Analisa (2011), menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari penelitian terdahulu, beberapa peneliti konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan ke dalam hipotesis:

H2. *Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan*

2.2.3 *Pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan*

Keputusan pendanaan dalam bentuk tingkat kebijakan utang *(leverage)* dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Peningkatan utang dapat diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar (Brigham, 1999 dalam Wahyudi dan Hartini, 2006).

Menurut hasil penelitian Pasadena (2013), Astriani (2014), Abdillah (2013), Lestari (2012), dan Analisa (2011), menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dari penelitian terdahulu, beberapa peneliti konsisten sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian leverage terhadap nilai perusahaan ke dalam hipotesis:

H3. *leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan*

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Secara umum, objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 38 perusahaan dan sampel 30 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *Purposive Sampling.*

3.3 Teknik Analisis

Untuk menguji hipotesis metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, karena menyangkut 3 variabel independen dan satu variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$NP = \propto + B1DPR + B2ROE+B3Lev$$

4. HASIL PEMBAHASAN

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan nilai signifikansi 0,623 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Lestari (2012), Analisa (2011) dan Kurniawati (2014) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Wahyudi dan Pawestri (2006), Mandagi (2010) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Kebijakan dividen menentukan berapa banyak laba yang harus dibayar kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus ditanamkan kembali di dalam perusahaan. Pembayaran deviden dapat dilakukan setelah kewajiban terhadap pembayaran bunga dan cicilan hutang dipenuhi. Adanya kewajiban tersebut, akan membuat manajer berbuat lebih hati-hati. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kebijakan dividen relevan yang menyatakan bahwa dividen yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kebijakan dividen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan desebabkan karena investor tidak membutuhkan dividen untuk mengonversi saham mereka menjadi uang tunai, mereka tidak akan membayar harga yang lebih tinggi untuk perusahaan dengan pembayaran dividen yang lebih tinggi.

Selain itu kekhawatiran yang dihadapi oleh perusahaan dalam kebijakan dividen adalah seberapa banyak pendapatan yang bisa dibayarkan sebagai dividen dan seberapa banyak yang dapat dipertahankan, karena terkadang pembagian dividen bagi sebagian investor bukanlah sinyal positif. Investor menganggap perusahaan tidak peka pada peluang investasi yang akan mendatangkan keuntungan namun lebih memilih membagikan dividen. Sehingga, nilai perusahaan dapat turun karena kurangnya keinginan pemegang saham untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Kemampuan perusahaan daam membayarkan dividen tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, kebijakan dividen tidak akan berdampak pada nilai perusahaan jika perusahaan tidak memahami keinginan investor yang bisa berdampak pada penurunan nilai perusahaan.

4.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,849 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Cecilia (2015), Astriani (2014), Abdillah (2013), Lestari (2012), dan Analisa (2011), menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang ada, dimana Rasio profitabilitas menunjukan efektifitas perusahaan dalam menghasilkan tingkat keuntungan dengan serangkaian pengelolaan aset yang dimiliki perusahaan, sehingga profitabilitas mampu untuk mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan mengenai prospek perusahaan dimasa yang akan datang karena dengan tingkat

profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi juga minat investor terhadap harga saham perusahaan. Seharusnya profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan namun hal ini tidak sesuai dengan penelitian ini yang menyatakan profitabilitas tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena menurut Brigham & Houston dalam bukunya mengatakan bahwa jika perusahaan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan ROE-nya, maka belum tentu kekayaan pemegang saham akan meningkat karena meskipun ROE telah digunakan secara luas dan adanya kenyataan bahwa ROE dan kekayaan pemegang saham seringkali sangat berkorelasi, dan terdapat beberapa masalah yang mungkin timbul ketika perusahaan menggunakan ROE sebagai ukuran kinerja. Hal ini dikarenakan ROE tidak mempertimbangkan resiko dan jumlah modal yang diinvestasikan, sedangkan pemegang saham jelas-jelas sangat memperhatikan selain memerhatikan pengembalian juga memperhatikan resiko.

4.4.3 Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dengan nilai signifikansi 0,110 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Hasil Pasadena (2013), Astriani (2014), Abdillah (2013), Lestari (2012), dan Analisa (2011), menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya *leverage* yang tinggi tidak menjamin bahwa Nilai Perusahaan akan menjadi rendah. Besarnya *Leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Deviyanti:2012). Secara otomatis setelah seorang kreditor meminjamkan dana kepada perusahaan, maka mereka berkepentingan atas keamanan dana yang dipinjamkan dan serta mengharapkan keuntungan dari dana yang dpinjamkannya. Sudah sewajarnya, kreditor selalu berupaya untuk melindungi dirinya dari tindakan manajemen yang mungkin kurang menguntungkan.

Keputusan pendanaan dalam bentuk tingkat pembiayaan yang dibiayai oleh hutang *(leverage)* tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena, Peningkatan utang dapat juga diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, sehingga hal ini tidak akan mempengaruhi persepsi investor mengenai Nilai Perusahaan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengaruh Kebijakan Dividen, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang penulis sajikan dalam Bab IV, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial variabel kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan disebabkan karena terkadang pembagian dividen yang tinggi bagi sebagian investor bukanlah sinyal positif. Investor menganggap manajer perusahaan tidak peka pada peluang investasi yang akan mendatangkan keuntungan namun lebih memilih membagikan dividen. Hal ini berarti pembayaran dividen yang tinggi, maka tidak berpengaruh terhadap tingginya nilai perusahaan.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel profitabilitas (ROE) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan disebabkan karena ROE tidak mempertimbangkan resiko dan jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh investor. Sejauh ROE hanya berfokus pada tingkat pengembalian, peningkatan ROE mungkin tidak konsisten

dengan peningkatan kekayaan pemegang saham sehingga hal ini akan sangat mempengaruhi investor mengenai nilai perusahaan.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa secara parsial variabel keputusan pendanaan dalam bentuk *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Besarnya *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or founds*) untuk memperbesar penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan dan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang merupakan indikasi tingkat keamanan untuk investor dan juga dapat diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, sehingga hal tersebut tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan.

6. Referensi

[1] Abdillah, Andinto. 2013. *Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, dan Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2009-2012.* Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, semarang.

[2] Afzal, Arie & Rohman, Abdul. 2012. *Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan.* Dipenogoro, *Journal of Accounting* Volume 1, Nomor 2.

[3] Analisa, Yangs. 2011. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, leverage, Profitabilitas dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan.* Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi: Universitas Diponegoro Semarang.

[4] Asriani, Eno Fuji. 2012. *Pengaruh Kepemilikan manajerial, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Investment Opportunity Set terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi: Universitas Negeri Padang.

[5] Brigham & Houston, 2009. *Fundamentals Of Financial Management (Dasar-Dasar Manajemen Keuangan).* Buku 1, Salemba Empat

[6] Bursa Efek Indonesia, 2014. Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Perusahaan 2013-2014. http//www.idx.co.id. Diakses terakhir 16 nopember 2015 pukul 19.30 WIB

[7] Cecilia, Rambe, Bahri, 2014. *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Probabylitas dan Ukuran Perusahaan terhada Nilai Perusahaan, Simposium Nasional Akuntansi Vol. 18*. Medan.

[8] Darminto, 2010. *Pengaruh Faktor Eksternal dan Berbagai Keputusan Keungan terhadap Nilai Perusahaan, Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 8, No. 1, pp. 138-150.

[9] Deviyanti, Dyahayu Artika. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme dalam Akuntasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).* Universitas Diponegoro. Semarang.

[10] Ghozali, imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20.* Semarang; BP Universitas Diponegoro

[11] Kasmir. 2014. *Dasar-dasar Perbankan.* Jakarta, Rajawali Pers

[12] Lestari, Rosi Setiana. . *Pengaruh Kebijakan Utang, Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahan. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi.*

[13] Melisa, Eka santi. 2014. *Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi*

[14] Murhadi, Werner R. 2013. *Analisis Laporan Keuangan. Proyeksi dan Evaluasi Saham.* Salemba empat.

[15] Pasadena, Rizka Persia, 2013. *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhada Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.* Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

[16] Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Salemba Empat

[17] Sugiono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian.* Alfabeta. Bandung.

[18] Sumandjaja, Hendy Bunadi. 2010. *Pengaruh Kebijakan Dividen, Profitabilitas, Solvabilitas, suku bunga, dan inflasi terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.* Skripsi Sarjana Jurusan Manajemen, Universitas Widyatama, Bandung.

[19] Triminarni, Feni. 2015. *Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas, Manajemen Laba Terhadap Praktik Manajemen Laba. Simposium Nasional Akuntansi Vol. 18*. Medan

[20] Verawaty, Merina, Kurniawati. 2015. *Analisis Pengembangan Corporate Value berdasarkan Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan, Struktur Kepemilikan, Serta Kebijakan Dividen. Simposium Nasional Akuntansi, Vol. 18.* Medan.

[21] Wahyudi, U. & Pawestri, H. P. 2006. *Implikasi Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan; dengan Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening. Simposium Nasional Akuntansi 9,* Padang, pp. 1-25.

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KONSEP *VALUE FOR MONEY*

Dekko Ade Dinata[1], Poppy Indriani[2], Jaka Darmawan[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
decoadedinata@gmail.com[1]
poppy.indriani@binadarma.ac.id[2]
jakadarmawan@yahoo.co.id[3]

Abstract

This study used a qualitative approach, thus the analysis observed is the work behavior, work performance, the concept of value for money (economy, efficiency, and effectiveness). The collection of data is done using interviews and observation. This research was conducted at the Department of Trade and Industry Lahat located in Bandar Jaya subdistrict 8 Lahat, Lahat, South Sumatra. From these calculations it turns correlation coefficient is positive, that is equal to 1.10543, which means the relationship between ratings allowance income improvements to employee performance with the concept of value for money is very high or very strong reliable. It turned out that the value of t is greater than t table so that Ho refused and Hi accepted. This means a significant difference between the variable income improvement allowance votes to variable employee performance with the concept of value for money. In Repairs Allowance Income ratings applied by the Department of Industry and Trade Lahat have an influence on employee performance with the concept of value for money, it is expected that the implementation can help improve employee performance so as to facilitate the settlement of obligations and service to the community could be better.

Keywords: *Allowance, Performance, Value For Money*

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi pemerintah untuk senantiasa tanggap dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik pemerintah haruslah bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan serta kebijakan yang diambil untuk diberitahukan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabilitas.

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri maka Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya, untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri maka Pemerintah Kabupaten Lahat dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai pada beberapa tahun terakhir ini menetapkan kebijakan memberikan tunjangan perbaikan/tambahan penghasilan pegawai (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, Salah satunya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme kinerja sektor publik dapat dinilai dengan konsep *Value For Money* dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan menggunakan konsep *Value For Money*, capaian diukur dari kepuasan masyarakat, operasi bisnis internal, dan aspek tumbuh dan berkembang.

Namun hasil observasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat saat Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diberikan mengacu pada peraturan pemerintah tidak mempengaruhi terhadap konsep *Value For Money*, sehingga ada beberapa permasalahan yang terjadi antara lain: pegawai di instansi ini belum melaksanakan kinerja yang baik sesuai dengan konsep *Value*

For Money, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum profesional dan bertanggung jawab, masih adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan pegawai terhadap fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab pekerjaan, ada beberapa pegawai yang bersikap pasif terhadap pekerjaan, kecepatan penyelesaian tugas pegawai belum efisien dan efektif, dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan kedisiplinan pegawai yang tidak stabil dan masih belum terciptanya akuntabilitas publik.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Konsep *Value For Money* Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lahat

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah pengaruh penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap kinerja pegawai dengan konsep *value for mone*y pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lahat.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara bahwa dalam rangka usaha meningkatkan prestasi kerja untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka dipandang perlu meningkatkan penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Sedangkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat. Tunjangan Perbaikan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara reguler kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Kriteria Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara. Besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud ialah :

a. Untuk Pegawai Negeri :
   1. Bagi golongan I sebesar 6% (enam puluh persen) dari penghasilan.
   2. Bagi golongan II sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan.
   3. Bagi golongan III sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan.
   4. Bagi golongan IV sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan.

b. Untuk Pejabat Negara Sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan.

c. Untuk Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak merangkap Anggota Dewan Perwalian Rakyat sebesar 40% (empat puluh persen) dari uang kehormatan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 03 Tahun 2012 “Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan jenjang jabatan structural, jabatan fungsional kependidikan tertentu dan golongan gaji”.

Kinerja

Kinerja bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan suatu organisasi perusahaan, semakin baik kinerja yang di tunjukan oleh para pegawai akan sanat membantu dalam perkembangan organisai atau perusahaan tersebut. Menurut Marmansyah (2012:228) bahwa kinerja adalah “Pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dapat pula dipandang

sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya)".

Perilaku kerja adalah tanggapan atau reaksi individu yang timbul baik berupa perbuatan atau sikap maupun anggapan seseorang terhadap pekerjaannya, kondisi kerja yang dialami di lingkungan kerja serta perlakuan pimpinan terhadap orang dengan tipe ini. (Theedens, 1996, p.16) Definisi perilaku kerja menurut Robbins (2002, pp.35-39) yaitu bagaimana orangorang dalam lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam kerja. Dimana pendapat Robbins ini menekankan pada sikap yang di ambil oleh pekerja untuk menentukan apa yang akan orang dengan tipe ini lakukan di lingkungan tempat kerja orang dengan tipe ini.

Value For Money

Menurut Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti (2014:160) yaitu Indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Dalam konsep ini indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisiensi, dan efektif. Menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Value For Money* adalah suatu konsep pengukuran kinerja sektor publik yang memilikitiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, di mana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah:

1. Ekonomi

Menurut Mardiasmo (2009:4) adalah pemerolehan sumber daya *(input)* tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan perbandingan *output input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah diterapkan.

3. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134), jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari uraian ketiga elemen tersebut, dapat disimpulkan bahwa: (1) ekonomi terkait dengan *input*, (2) efisiensi terkait dengan *input* dan *output*, dan (3) efektivitas terkait dengan *output* dan tujuan.

Hipotesis

Munurut Anwar Sanusi (2014:44), Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti benar. Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis termasuk salah satu proposisi di samping proposisi-proposisi lainnya. Hipotesis dapat dideduksi dari prosposisi lainnya yang tingkat keberlakuannya lebih universal. Oleh karena itu, hipotesis merupakan hasil pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum, dan sebagainya yang sudah ada sebelumnya. Hipotesis dapat juga berupa pertanyaan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran. Maka dapat penulis kemukakan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Tidak terdapat perbedaan kinerja setelah diberikannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap kinerja pegawai dengan konsep *Value For Money* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lahat.
2. Terdapat perbedaan kinerja setelah diberikannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap kinerja pegawai dengan konsep *Value For Money* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lahat.

3. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah penilaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap kinerja pegawai dengan konsep *Value For Money* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat pada periode bulan Juli-September tahun 2015. Metode dalam penelitian ini mengunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diteliti terdiri dari berbagai sumber yaitu dilakukan dengan cara:

1. Data Primer, terdiri dari Survei, Observasi, dan Wawancara
2. Data sekunder, terdiri dari Dokumentasi

Operasional Variabel

Untuk meneliti bagaimana pengaruh penilaian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) terhadap kinerja pegawai dengan konsep *value for money* ada dua operasional variabel dalam penelitian ini. Variabel, konsep variabel, indikator dan skala pengukuran yang digunakan baik untuk variabel X maupun variabel Y dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Variabel Independent (X) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP)	Insentif yang diberikan berupa tambahan penghasilan berdasarkan atas hasil pencapaian kinerja selama satu bulan diluar gaji yang diterima dengan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1. Prestasi Kerja 2. Perilaku Kerja	Ordinal
Variabel Dependent (Y) Kinerja Pegawai Dengan Konsep *Value For Money*	Kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas	1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas	Ordinal

Teknik Analisis Data

Adapun pengujian hipotesis yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis dan mengevaluasi data dalam penelitian ini antara lain dengan Rumus Regresi Linier Sederhana, Koefesien Korelasi Sederhana, Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel independent terhadap perubahan variabel dependent, kemudian dengan Uji t-test, ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis dari penelitian ini, yaitu diduga ada

pengaruh signifikan. Dengan menggunakan uji-t, pada tingkat kepercayaan 95 % atau α = 0,05, lalu Konsep *Value For Money* dengan pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

a. Analisis Kualitatif

Untuk mengukur seberapa pengaruh variabel penilaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan terhadap variabel kinerja pegawai dengan konsep *value for money* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat, maka penulis menganalisa dengan menggunakan rumus regresi dan korelasi sederhana.

a. Analisis Regresi Linier

Dapat menghitung regresi dengan menggunakan rumus:

$$Y = a + bX$$

Untuk menghitung nilai b menggunakan rumus sebagai berikut:

$$b = \frac{n\left(\sum XY\right) - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{n\left(\sum X^2\right) - \left(\sum X\right)^2}$$

$$b = \frac{33(6536) - (360)(593)}{33(3887) - (360)^2}$$

$$b = \frac{215688 - 213480}{128271 - 129600}$$

$$b = \frac{2208}{1329}$$

$$b = 1{,}6614$$

Dan untuk menghitung nilai a (Konstanta) dengan menggunakan rumus:

$$a = \frac{\sum Y - b\left(\sum X\right)}{n}$$

$$a = \frac{593 - 1{,}6614(360)}{33}$$

$$a = \frac{593 - 598{,}104}{33}$$

$$a = \frac{5{,}104}{33}$$

$$a = 0{,}155$$

Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai a dan b tersebut ke dalam persamaan berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0{,}155 + 1{,}6614\ X$$

Dari perhitungan regresi linier sederhana diatas di dapat nilai persamaan Y = 0,155 + 1,6614 X. Persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa bila tanpa adanya variabel penilaian tunjangan perbaikan penghasilan maka nilai variabel kinerja pegawai dengan konsep *value for money* sebesar 0,155. Nilai regresi 1,6614, bermakna jika variabel penilaian tunjangan perbaikan penghasilan

dinaikan 100 kali maka variabel kinerja pegawai dengan konsep *value for money* naik sebesar 166,14 atau terdapat pengaruh positif dan signifikan.

b. Analisis Koefesien Korelasi

Analisis ini merupakan analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n.\sum XY - \sum X.\sum Y}{\sqrt{\left(n\left(\sum X^2\right) - \left(\sum X\right)^2\right)\left(n\left(\sum Y^2\right) - \left(\sum Y\right)^2\right)}}$$

$$r = \frac{33(6536) - (360)(593)}{\sqrt{(33(3887) - (360)^2)(33(10747) - (593)^2)}}$$

$$r = \frac{215688 - 213480}{\sqrt{(128271 - 129600)(354651 - 351649)}}$$

$$r = \frac{2208}{\sqrt{(1329)(3002)}}$$

$$r = \frac{2208}{\sqrt{3989658}}$$

$$r = \frac{2208}{1997{,}413}$$

$$r = 1{,}10543$$

Dari perhitungan tersebut ternyata koefisien kolerasi bernilai positif, yaitu sebesar 1,10543 yang artinya hubungan antara penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap kinerja pegawai dengan konsep *value for money* sangat tinggi atau kuat dan dapat diandalkan.

c. Analisis koefesien determinasi

Untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat, maka perlu diketahui nilai koefesien determinan dengan rumus:

KD = $r^2 x$ 100 %

KD = $(1{,}10543)^2$

KD = 1,222 x 100 %

KD = 122,2 %

Nilai koefesien determinasi dalam analisis ini 1,222 berarti dapat disimpulkan kontribusi pengaruh variabel penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap variabel kinerja pegawai dengan konsep *value for money* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat sebesar 122,2 %.

d. Uji Hipotesis

Uji hipotesis, bertujuan untuk mengetahui kebenaran hipotesis yang diambil. Rumus yang digunakan yaitu:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{1{,}10543\sqrt{33-2}}{\sqrt{1-1{,}222}}$$

$$t = \frac{1{,}10543(5{,}568)}{0{,}471}$$

$$t = \frac{6{,}155}{0{,}471}$$

$$t = 13{,}068$$

Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel. Untuk pengandaian taraf kesalahan α = 5 % uji dua pihak dan dk = n – 1 = 33 - 1 = 32, maka diperoleh t tabel sebesar 2,471. Ternyata nilai t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H_o ditolak dan H_i diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap variabel kinerja pegawai dengan konsep *value for money*.

Pembahasan

1. Pengaruh Penilaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berpengaruh Positif Terdahap Kinerja Pegawai

Hasil Uji Hipotesis Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel. Untuk pengandaian taraf kesalahan α = 5 % uji dua pihak dan dk = n – 1 = 33 - 1 = 32, maka diperoleh t tabel sebesar 2,471. Ternyata nilai t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H_o ditolak dan H_i diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap variabel kinerja pegawai dengan konsep *value for money*.

Hasil analisis hipotesis variabel Penilaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan menunjukkan berpengaruh positif terhadap kinerja Pegawai dengan Konsep *value for money*. Hal tersebut dijelaskan bahwa nilai t hitung, berada pada daerah penerimaan Ho karena t hitung 13,068 lebih besar dari t tabel 2,471 maka Ho ditolak dan Hi diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya pengaruh penilaian tunjangan perbaikan penghasilan yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan konsep *value for money*, hipotesis tabel penelitian terbukti.

Hasil penelitian sesuai dengan kebijakan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan dapat meningkatkan tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kinerja seluruh pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat.

2. **Konsep *Value For Money***

Pengukuran Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari pengukuran ekonomi dalam penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap kinerja pegawai dengan konsep *value for money,* kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat, telah menjalankan keseluruhan programnya dengan ekonomis, sesuai dengan target anggaran yang ditetapkan. Suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) sesuai dengan yang ditetapkan atau 100%.

Pengukuran Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari pengukuran efisiensi penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap kinerja pegawai dengan konsep *value for money*, kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat, telah menjalankan keseluruhan programnya dengan

efisien, karena hasil telah mencapai target yang direncanakan. Suatu kinerja organisasi dikatakan efisien apabila keluaran *(output)* yang dihasilkan mencapai target yang direncanakan atau lebih besar daripada sumber daya *(input)* yang telah digunakan.

Pengukuran Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari pengukuran efektivitas penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap kinerja pegawai dengan konsep *value for money*, kinerja pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat, dikatakan efektif karena telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kinerja organisasi dikatakan efektif apabila mencapai tujuan yang ditetapkan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan tentang pengaruh penilaian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) terhadap kinerja pegawai dengan konsep *value for money* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dari perhitungan regresi linier sederhana diatas di dapat nilai persamaan Y = 0,155 + 1,6614 X. Persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa bila tanpa adanya variabel penilaian tunjangan perbaikan penghasilan maka nilai variabel kinerja pegawai dengan konsep *value for money* sebesar 0,155. Nilai regresi 1,6614, bermakna jika variabel penilaian tunjangan perbaikan penghasilan dinaikan 100 kali maka variabel kinerja pegawai dengan konsep *value for money* naik sebesar 166,14 atau terdapat pengaruh positif dan signifikan.
2. Dari perhitungan tersebut ternyata koefisien kolerasi bernilai positif, yaitu sebesar 1,10543 yang artinya hubungan antara penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap kinerja pegawai dengan konsep *value for money* sangat tinggi atau kuat sekali dapat diandalkan.
3. Nilai koefesien determinasi dalam analisis ini 1,222 berarti dapat disimpulkan kontribusi pengaruh variabel penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap variabel kinerja pegawai dengan konsep *value for money* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat sebesar 122,2%.
4. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel. Untuk pengandaian taraf kesalahan α = 5 % uji dua pihak dan dk = n – 1 = 33 - 1 = 32, maka diperoleh t tabel sebesar 2,471. Ternyata nilai t hitung lebih besar dari t tabel sehingga H_o ditolak dan H_i diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel penilaian tunjangan perbaikan penghasilan terhadap variabel kinerja pegawai dengan konsep *value for money*.

6. REFERENSI

[1] Mangkunegara, A. A, Anwar Prabu. 2012. "*Evaluasi Kinerja SDM"*, Cetakan Keenam. PT. Refika Aditama, Bandung.

[2] Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta

[3] Marwansyah. 2012. *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, Edisi Kedua. Penerbit Alfabeta, Bandung.

[4] Nordiawan Deddi, Hertianti Ayuningtyas. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta

[5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara

[6] Peraturan Bupati Lahat Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lahat

[7] Sanusi Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta

[8] Sugiyono. 2012. *Statika untuk Penelitian.* Penerbit Alpabeta, Bandung.

[9] Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitiatif dan R & B.* Alpabeta, Bandung.
[10] http://www.google.com
[11] http://www.google.Tunjangan perbaikan penghasilan.com

PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KELELAHAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Dessy Oktasari[1)], Sitti Nurhayati Nafsiah[2)], Ade Kemala Jaya[3)].
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
Dessyoktasari@yahoo.com [1)]
sititantointanapik@yahoo.co.id [2)]
jaya_ade@yahoo.com [3)]

Abstract

This research is aimed to gain an empirical proof about the impact of emotional intelligence and emotional exhaustion toward the performance of financial administration section at Muhammadiyah Hospital Palembang. This research use survey method through primary data which gained by questionary. Population in this research are consist of the employees of financial administration section by using sample method, the amount of sample which take part in this research are 25 employees of financial administration section. The data then analysed by using the double regresion analysis. The result of this research shows that emotional intelligence and emotional exhaustion are both simultaneously have a significant impact toward the performance of financial administration section. Meanwhile in partial, only the emotional exhaustion that have a significant impact toward the performance of financial administration section.

Keywords: *emotional intelligence, emotional exhaustion, performance of financial administration section at hospital.*

1. PENDAHULUAN

Di dalam perkembangan ilmu akuntansi seiring dengan perkembangan dunia bisnis saat ini. Pada perkembangannya, akuntansi berperan dalam menghasilkan informasi keuangan maupun non-keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang terbaik guna mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari para pengambil keputusan.

Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Jadi, akuntansi bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan sesuatu yang akan selalu berkembang sepanjang waktu seiring dengan perkembangan lingkungannya agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya.

Selain itu hal yang membutuhkan perhatian khusus ialah mengenai kelelahan kerja. Kelelahan merupakan proses alami tubuh makhluk hidup yang mampu bergerak bebas dan merupakan proses yang sedapatnya dihindari oleh para pekerja karena bisa mengurangi kualitas dan konsentrasi dalam bekerja, sehingga pada akhirnya mengurangi produksi serta *income* perusahaan. Kelelahan kerja tidak hanya terjadi pada para pekerja yang sebagian besar menggunakan kekuatan fisik seperti buruh bangunan atau kuli angkut, tetapi juga terjadi pada pekerja yang bekerja di belakang meja terutama pekerja bagian administrasi keuangan.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan memiliki kemampuan yang tinggi pula dalam mengetahui dan memahami perasaan sendiri dan perasaan orang lain serta menuntun pikiran dan perilakunya sehingga akan terdorong untuk meningkatkan kinerja kerjanya ataupun lebih bijaksana dalam cara pemecahan masalah yang pada akhirnya akan berujung pada kinerja yang tinggi. Keberhasilan dan kinerja perusahaan dapat dilihat

dari kinerja yang dicapai karyawannya, oleh karena itu perusahaan menuntut karyawannya dapat menampilkan kinerja yang optimal karena baik dan buruknya kinerja yang dicapai oleh karyawan akan berpengaruh pada kinerja dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini menjadi:

1. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja Bagian Administrasi Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang ?
2. Apakah kelelahan emosional berpengaruh terhadap kinerja Bagian Administrasi Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang ?

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi berperan dalam menghasilkan informasi keuangan atau non keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dan memilih tindakan yang terbaik guna mengalokasikan sumber daya pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari para pengambil keputusan. Oleh karena itu, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Menurut Lubis (2010:12), akuntansi keperilakuan merupakan subdisiplin ilmu akuntansi yang melibatkan aspek-aspek keperilakuan manusia terkait dengan proses pengambilan keputusan ekonomi.

2.2 Teori Disonansi Kognitif

Teori disonansi kognitif dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1950-an. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh Ikhsan dan Ishak (2010:39) yang menyebutkan bahwa teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif mengacu pada inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya, atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Teori ini dapat membantu memprediksikan kecenderungan untuk mengambil bagian dalam perubahan sikap dan perilaku.

2.3 Teori Sikap

Stephan mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai bentuk pernyataan suka atau tidak suka yang merupakan daya tarik atau engganan menghadapi situasi, orang, kelompok, atau komponen yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan termasuk ide yang abstrak atau sosial politik (*Cookie White Stephan*, 1985). Teori sikap yang dikemukakan oleh Azwar dan dikembangkan oleh Ghozali (2012:17) menyatakan bahwa terdapat dua klasifikasi tentang sikap.

2.4 Kecerdasan emosional dan Kelelahan Emosional

Kecerdasan emosional merupakan konsep yang menerima banyak perhatian dalam literatur ilmu sosial beberapa tahun belakangan ini. Seperti pendapat dari Matthews dari bukunya "*Mythological Proportions*" yang menerangkan bahwa tentang pentingnya kepuasan hidup, pencapaian pribadi dan khususnya menjadi sukses dalam dunia bisnis (Matthews dalam adinda 2015:16). Pada umumnya, pendapat tersebut berkaitan baik hasil pribadi atau profesional dan setiap bidang penting dipertimbangkan bagi seorang pendidik. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kelelahan adalah perihal (keadaan) lelah, kepenatan, kepayahan. Lelah pada setiap orang akan memiliki arti tersendiri dan tentu saja subyektif sifatnya. Lelah pada umumnya diartikan dengan menurunnya efisiensi dan berkurangnya ketahanan dalam bekerja. Kadangkala istilah ini

digunakan untuk menunjukan rasa payah dan letih yang menunjukan menurunnya output dan menunjuk pada kondisi fisiologis kelelahan sebagai akibat dari aktifitas yang terus-menerus.

2.5 Tinjauan Tentang Kinerja

Dalam konsep akuntansi, manusia sebagai sumber daya dalam organisasi diharapkan mampu untuk memanfaatkan dan meningkatkan tenaga dengan sepenuhnya atau seoptimal mungkin untuk meningkatkan produktifitas yang diikuti oleh terciptanya hubungan kerja yang bermutu dengan konotasi yang menyenangkan, penuh tenggang rasa dan saling membangun. Memanfaatkan sumber daya manusia mengandung pengertian pembinaan struktur organisasi dan mengembangkan mutu tenaga kerja baik secara aktual maupun potensial.Menurut Simanjuntak (2011:1) Kinerja adalah pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangkamewujudkan tujuan perusahaan.

2.6 Hipotesis

2.6.1 Kecerdasan Emosional berpengaruh terhadap kinerja Bagian Administrasi Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Dunia kerja mempunyai banyak masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh pekerja, misalnya persaingan yang ketat, tuntutan tugas, suasana yang tidak nyaman dan masalah hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor yang penting karena kecerdasan emosional yang baik dapat mengatur kita untuk menjaga diri menghadapi sesuatu dengan tenang. maka kecerdasan emosional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bagian administrasi keuangan rumah sakit muhammadiyah palembang.

H1 : Terdapat Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap kinerja bagian administrasi keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.

2.6.2 Kelelahan Emosional berpengaruh terhadap kinerja Bagian Administrasi Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang

Kelelahan emosional salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Masalah kelelahan emosional yang biasanya dialami oleh pegawai maka dapat berujung negatif yang dapat mengganggu sebuah pekerjaan. Banyak peneliti sebelumnya menyatakan juga jika masalah kelelahan emosional sudah mengganggu sebuah pekerjaan maka pegawai menjadi tidak maksimal mengerjakan tugasnya. Maka kelelahan emosional berpengaruh terhadap kinerja bagian administrasi keuangan rumah sakit muhammadiyah palembang.

H2 : Terdapat Pengaruh Kelelahan Emosional terhadap kinerja bagian administrasi keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian dan Desain Penelitian

Secara umum objek penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 13 Palembang. Sedangkan yang menjadi unit penelitian dalam Penulisan ini adalah Bagian Administrasi Keuangan Rumah Sakit. Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil penelitiannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berikut adalah tahap-tahapnya, yaitu:

1. Observasi
2. Kuesioner

3.2 Variabel Terikat *(Dependent Variable)*

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Bagian Administrasi Keuangan. Menurut Wibowo (2010:7) Kinerja berasal dari pengertian *Performance*, ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja/prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja tetapi juga termasuk bagaimana proses pekerja berlangsung.

3.3 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Kecerdasan Emosional (X1), dan Kelelahan Emosional (X2).

1. Kecerdasan Emosional
   Seorang ahli kecerdasan emosi, Goleman (2009:13) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan emosi adalah kemampuan mengontrol diri, memacu, tetap tekun, serta dapat memotivasi diri sendiri. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat.
2. Kelelahan Emosional
   Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kelelahan adalah perihal (keadaan) lelah, kepenatan, kepayahan. Lelah pada setiap orang akan memiliki arti tersendiri dan tentu saja subyektif sifatnya

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 25 orang dan kesemuanya merupakan seluruh karyawan administrasi keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang.Menurut Sugiyono (2010:81), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Karena sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan semua anggota populasi yaitu sebanyak 25 orang.

3.5 Teknik Sampling

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Kuesioner tersebut disebarkan untuk diisi oleh responden yang menjadi sampel penelitian untuk memperoleh data yang lengkap pada semua variabel yang diteliti, Kemudian dihitung menggunkana alat SPSS.

3.6.1 Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif
2. Uji validitas
3. Uji Reliabilitas
4. Analisa regresi linear berganda
5. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
6. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)
7.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa kuesioner yang dibagikan sebanyak 25 kuesioner kepada karyawan bagian administrasi keuangan rumah sakit muhammadiyah. Berikut ini tabel statistik deskriptif :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja Bagian ADM Keuangan	3,7360	,67754	25
Kecerdasan Emosional	4,1360	,48208	25
Kelelahan Emosional	4,0880	,63003	25

4.2 Uji validitas

Uji validitas digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu *kuesioner*. Suatu *kuesioner* dapat dikatakan valid atau sah, jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Tabel 4.2
Tabel Correlations

Correlations

		Kecerdasan Emosional	Kinerja Bagian ADM Keuangan	Kelelahan Emosional
Kecerdasan Emosional	Pearson Correlation	1	,635**	,716**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000
	N	25	25	25
Kinerja Bagian ADM Keuangan	Pearson Correlation	,635**	1	,701**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000
	N	25	25	25
Kelelahan Emosional	Pearson Correlation	,716**	,701**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	25	25	25

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data diolah, 2016

4.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu indeks tentang sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Jika suatu alat ukur dapat digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran diproses relatif secara konsisten, maka alat ukur disebut dianggap *reliable* atau handal.

Tabel 4.3
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	25	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	25	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 4.4
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,856	3

Sumber : Data diolah, 2016

4.4 Analisa regresi linear berganda

Tabel 4.5
Tabel regresi linear berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,073	,859		-,085	,933
	Kecerdasan Emosional	,384	,295	,273	1,300	,207
	Kelelahan Emosional	,544	,226	,505	2,407	,025

a. Dependent Variable: Kinerja Bagian ADM Keuangan

4.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4.7
Hasil Regresi Simultan
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,813	2	2,906	12,284	,000[b]
	Residual	5,205	22	,237		
	Total	11,018	24			

a. Dependent Variable: Kinerja Bagian ADM Keuangan

b. Predictors: (Constant), Kelelahan Emosional, Kecerdasan Emosional

Sumber : Data diolah, 2016

4.6 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Tabel 4.8
Hasil Regresi Parsial
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,073	,859		-,085	,933
	Kecerdasan Emosional	,384	,295	,273	1,300	,207
	Kelelahan Emosional	,544	,226	,505	2,407	,025

a. Dependent Variable: Kinerja Bagian ADM Keuangan

Sumber: Data diolah, 2016

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Bagian Administrasi Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian uji t bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bagian administrasi keuangan. Dari hasil kuesioner tentang kecerdasan emosional diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden rata-rata menjawab cukup baik dan netral bahwa responden memiliki kesadaran diri yang tinggi, responden dapat mengendalikan emosional dalam kegiatan sehari-hari, responden dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain (rasa empati), responden dapat bekerja sama dengan sesama teman yang bekerja di bagian administrasi keuagan.

4.7.2 Pengaruh Kelelahan Emosional Terhadap Kinerja Bagian Administrasi Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian uji t bahwa kelelahan emosional berpengaruh signifikan terhadap kinerja bagian administrasi keuangan. Dari hasil kuesioner tentang kelelahan emosional diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden rata-rata menjawab netral dan setuju.

4.7.3 Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Kelelahan Emosional Terhadap Kinerja Bagian Administrasi Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian uji f bahwa kecerdasan emosional dan kelelahan emosional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja bagian administrasi keuangan. Dimana item atau pertanyaan yang memiliki rata-rata nilai terkecil

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa kecerdasan emosional dan kelelahan emosional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja bagian administrasi keuangan, sedangkan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bagian administrasi keuangan dan Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan bahwa kelelahan emosional berpengaruh signifikan terhadap kinerja bagian administrasi keuangan. Hasil simpulan di atas menunjukan bahwa kecerdasan emosional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bagian administrasi keuangan.. Maka peneliti menyarankan agar perusahaan meningkatkan cara mengelola rasa empati terhadap sesama pekerja bagian admnistrasi dan kelelahan emosional yang dimiliki oleh pekerja bagian administrasi keuangan Rumah sakit Muhammadiyah Palembang akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkannya, peneliti menyarankan agar perusahaan selalu memperhatikan para karyawannya dalam bekerja. Dan Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperhatikan kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini, seperti kurangnya jumlah sampel penelitian, serta terbatasnya kemampuan peneliti dalam menyampaikan hasil dari penelitian.

6. REFERENSI

[1] Adinda, Kezia. 2015. *Pengaruh kecerdasan emosional dan Kecerdasan intelektual terhadap Perilaku etis mahasiswa akuntansi Dalam praktik pelaporan laporan Keuangan.* Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

[2] Amisye Manansal, Arnike. 2013. *Kecerdasan emosi mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Pengaruhnya terhadap tingkat pemahaman akuntansi*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.

[3] Arfan Ikhsan Lubis. 2010. *Pengertian Akuntansi Keperilakuan*. Jagakarsa: Jakarta, Salemba Empat.

[4] A.W. Widjaja. 2008 *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali

[5] Chiko, Selwin Olaudio Mantiri. 2008. *Pengaruh Kecerdasan Emosional Mahasiswa Akuntansi Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi*. Manado: Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.

[6] Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison Jr., 2007.*Akuntansi.Diterjemahkan oleh Pearson Education.*Edisi 7 Jilid 1.Erlangga. Jakarta.

[7] Fahrianta, Syam, & Syahdan, 2012).*Pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual mahasiswa akuntansi tingkat pemahaman akuntansi*.Skripsi

[8] Ghozali & Setiawan, 2012:16 *Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual terhadap kinerja karyawan administrasi rumah sakit daerah* jawa barat.

[9] Gibson et al (dalam Yani Suci Indah, 2007:9 "Organizations *(Behavior, Structure, Processes*)," Twelfth Edition, McGrow Hill.
[10] Golemen, Daniel. 2009. *Working With Emotional Intelligence.* (Terjemahan Alex Tri Kancono Widodo), PT Gramedia : Jakarta.
[11] Goleman. 2009. *Pengaruh Kecerdasan Emosional*.: PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
[12] Ikhsan dan Ishak (2010:39) *hubungan antara sikap dan perilaku.* Teori Disonansi kognitif.
[13] Indah Yani Suci, 2011. *Studi Kelelahan Kerja pada Tenaga Kerja Buru Bagasi di Pelabuhan Makassar,*Skripsi Jurusan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat.
[14] Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2010). *"performance"* kamus bahasa Indonesia *Limit Cognitive Ability Test Scores InSelection.*
[15] Lona, Tisya Wowor. 2009. *Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa Fakultas Ekonomi* Universitas Sam Ratulangi. Manado.
[16] Nurlaila (2010). *Akuntansi Sumber Daya Manusia I*. Penerbit LepKhair.
[17] Poppy Anjelisa Z., Hsb, M.Si, Apt, 2009. *dalam sebuah artikel mengenai kelelahan.*
[18] Rachmi, Filia. 2010. *Pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan Spiritual, dan perilaku belajar terhadap tingkat Pemahaman akuntansi(Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta).* Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
[19] Risma, Devi. 2012. *Pengaruh kecerdasan emosional terhadap Kinerja karyawan : penelitian eksperimen*. Jurnal. Universitas UNRI.
[20] Robbins, S. P. 2009 . Organoizational Theory : Stucture, Design, and Applications. Prentice Hall Inc.
[21] Sedarmayanti, 2010. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja,* Penerbit CV Mandar Maju : Bandung.
[22] Suartana, I Wayan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Andi. Jakarta.
[23] Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.* Yogyakarta.
[24] Soelaiman. (2007). *Langkah Efektif untuk Membangun,Mengendalikan dan Evaluasi Kerja, Cetakan Kedua*, Jakarta: PT.Intermedia Personalia Utama
[25] Soemarsono S.R. 2009.*Pengertian Akuntansi*. American Accounting Association.
[26] Sucitro Shanty. (2012). *Pengaruh Kemampuan,Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai* Tesis Pada PT.Prima Unggas Celebes di Propinsi Sulawesi Selatan..
[27] Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
[28] Suma'mur. (2009). *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.* PT. Toko Gunung Agung, Jakarta
[29] Sudana (2009*).Penelitian analitik mengenai perbedaan kelelahan kerja pada operator SPBU,* Skripsi Jurusan Akuntansi.
[30] Tony Kristian, 2010. *Skripsi Faktor-faktor ang berhubungan dengan Kejadian kelelahan Kerja pada Sopir Bus Litha & CO. Skripsi* , Fakultas Kesehatan Unhas

IMPLEMENTASI PPN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA DEALER ASTRA HONDA PALEMBANG

Deti Okta Riani[1], Henni Indriyani[2], Jaka Darmawan[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
dhetty_ochari4ny@yahoo.com[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
jakadarmawan@yahoo.com[3]

Abstract

Astra Honda Dealer Palembang conduct trading activities of motor vehicles are subject to VAT, Implementation of the Value Added Tax which is not in accordance with the applicable policies or delay that occurs continuously will affect the financial statements. The formulation of the problem in this research is how the implementation of Value Added Tax and Its Effect on Financial Statements at Astra Honda Dealer Palembang. This study aims to analyze the application of value added tax and its effect on the financial statements. The method used is descriptive research method with data that is quantitative, and from secondary data. The results of the discussion can be seen that the implementation of the Value Added Tax on Dealer Astra Honda Palembang during 2014 in outline almost in line with the policy of tax law in force, namely in terms of doing the calculations, remittance, reporting, and if there is an overpayment will direstitusi each financial year end, and by levying a VAT rate of 10%. In its application, the company never did any delay in depositing the VAT, thus penalized tax of Rp 611,070.00. That will affect the financial statements and as a result will have an impact on the company's gross profit decline.

Keywords*: Value Added Tax, Tax Input, Output Tax, Income Statement*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan dari penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pajak, yang berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Dealer Astra Honda Palembang. Merupakan salah satu dari sub-sub cabang main dealer untuk wilayah palembang, yang sebenarnya merupakan anak cabang dari PT Astra Internasional Tbk, Dealer Astra Honda Palembang adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dengan kegiatan operasional melakukan pembelian dan penjualan kendaraan bermotor atau yang dikoordinasi dalam divisi *retail* Astra Motor. dalam kegiatannya sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan Dealer Astra Honda wajib memungut PPN sebesar 10%, membuat faktur pajak, menyetorkan PPN yang dipungut, kemudian melaporkan PPN yang dipungut dalam bentuk SPT Masa PPN ke kas Negara terhadap kegiatan pembelian dan penjualan atas penyerahan Barang / Jasa kepada sektor swasta yang selain pemungut PPN, dimana barang tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional pihak selain pemungut PPN tersebut. Dalam melakukan pembayarannya Dealer Astra Honda pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sehingga dikenakan denda/sanksi Adm sebesar 2%. Kebijakan perlakuan akuntansi atas transaksi yang mengharuskan Pengusaha Kena Pajak memungut Pajak Pertambahan Nilai harus diterapkan sesuai

dengan peraturan yang berlaku untuk membantu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang bersifat wajar kepada para pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. salah satu dari transaksi tersebut yaitu pembayaran pajak, pembayaran pajak merupakan transaksi yang harus dicatat dalam laporan keuangan khususnya pada laporan neraca.

Karena masih banyak pengusaha yang belum memahami betul perlakuan sebenarnya atas Pajak Pertambahan Nilai, seperti mengabaikan PPN masukan dari transaksi pembelian yang dilakukan, tidak mengetahui bagaimana memperlakukan PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan dan melakukan keterlambatan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sehingga akan dikenakan denda pajak sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang dan apabila perusahaan terlambat juga dalam melaporkan pajak, maka akan dikenakan denda pajak lagi.

Maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan, yang awalnya mempengaruhi laporan laba rugi dan akhirnya juga berdampak pada penurunan Laba Kotor Perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiaan dengan judul "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Dealer Astra Honda Palembang". Maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dan pengaruhya terhadap laporan keuangan pada Dealer Astra Honda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk "Menganalisis Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada Dealer Astra Honda Palembang". Menurut UU PPN No 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) dan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengertian implementasi

a. Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan (KBBI)
b. Implementasi menurut mazmanian dan sebastiar (dalam jurnal wahab, 2010:68) merupakan pelaksanaan kebijakan dasar yang berbentuk undang-undang dan juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting, seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU PPN No 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) dan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 4 (UU No 42 tahun 2009) dalam buku Fitriandi,dkk (2014:192) Objek pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahn BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor BKP (PPN = 10% x Nilai Impor)
3. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP yang dilakukan PKP □ PPN 0%
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
8. Ekspor JKP oleh PKP

2.2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 7 (UU No.42 tahun 2009) dalam buku Fitriandi,dkk (2014:201), tarif PPN adalah:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen)
   Tarif 10 persen dikenakan atas setiap penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean/Impor BKP dan JKP di dalam daerah pabean atau pemanfatan BKP dan JKP di dalam daerah pabean.
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
   a. Ekspor BKP berwujud
   b. Ekspor BKP tidak berwujud; dan Ekspor JKP

2.2.4 Klasifikasi Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Masukan
   Pajak masukan yaitu pajak yang dibayar atau dikenakan atas terjadinya transaksi pembelian.
2. Pajak Keluaran
   Pajak keluaran yaitu pajak yang dipungut atau disetorkan ke kas negara dari adanya transaksi penjualan.

2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk merperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali (Murhardi, 2013:4).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, (dalam jurnal vivi, 2010) Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan putusan ekonomi.

2.3.1 Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Pada Laporan Keuangan

Dalam laporan posisi keuangan, terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas. Nama - nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi –transaksi diatas dalam buku IAI (2012:143) adalah

a. Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut : Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar yang disajikan pada pos piutang Kas , Persediaan, Perlengkapan Kantor dan Piutang Usaha
b. Kewajiban Lancar :
   1. Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar yang disajikan pada pos hutang,
   2. Hutang Usaha dan
   3. Pendapatan diterima dimuka

Yang termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif menurut buku IAI (2012:143) adalah :

1. Penjualan
2. Potongan Penjualan
3. Retur Penjualan
4. Harga Pokok Penjualan
5. Sanksi bunga akibat terlambat membayar pajak masuk dalam pos rugi lain-lain
6. Pajak Pertambahan Nilai masukan yang tidak dapat dikreditkan, masuk dalam *cost of inventory*

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jefta Israelka (2009) universitas Gunadarma Bekasi, yang berjudul "Analisis Penerapan Pajak Pertamabahan Nilai Pada PT. Kaltimex Lestari Makmur tahun 2008". Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Prosedur penerapan PPN telah berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008.
2. Christina (2012) Sekolah tinggi STIE MDP Palembang, yang berjudul "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengaruhnya terhadap laporan neraca Pada Cv. Kamdatu palembang tahun 2011". Hasil penelitian menunjukan bahwa Cv. Kamdatu belum menerapkan akuntansi pajak pertambahan nilai, karna tidak adanya penjurnalan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai, tidak adanya penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai mengakibatkan dalam laporan keuangan tidak muncul akun hutang PPN.
3. Iis Nuraisy (2013) Universitas Surabaya, yang berjudul "Implementasi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada CV Arjuna Securitas Abadi tahun 2012. Hasil penelitian menjunjukkan bahwa : Implementasi Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Arjuna Securitas Abadi selama tahun 2012 secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku (UU No. 42 tahun 2009) Dalam penerapannya, Pajak Pertambahan Nilai tidak berpengaruh terhadap Laporan Keuangan perusahaan. Karena PPN Masukan dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran. Hal tersebut dibuktikan dari hasil uji pengaruh PPN menunjukkan bahwa PPN tidak mempengaruhi laba kotor perusahaan.
4. Joko Priyanto (2011) Universitas Bina Nusantara Jakarta Barat, yang berjudul " Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kontruksi Pada PT MRC tahun 2008-2010. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT MRC belum sepenuhnya melakukan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berakibat terdapat kesalahan – kesalahan seper ti Faktur Pajak Standar cacat baik Pajak Masukan ataupun Pajak Keluaran dan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.
5. Selviyana (2013) Sekolah tinggi STIE MDP Palembang, yang berjudul " Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV.Kusuma Agung Mandiri Palembang tahun 2011-2012. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Penerapan PPN pada CV. Kusuma Agung Mandiri selama tahun 2011 dan 2012 telahsesuai dengan UU yang berlaku baik dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Dalam melakukan kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN, hampir memenuhi peraturan UU yang berlaku. Namun terjadi keterlambatan pada penyetoran yang dilakukan perusahaan pada bulan Februari 2011 dan bulan September 2012, sehingga menyebabkan sanksi dan denda di KPP.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dealer Astra Honda yang beralamat di Jl. Kol Haji Burlian No 2735 Palembang Pada tahun 2015.

3.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini dibatasi pada kajian permasalahan Pada Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada Dealer Astra Honda Palembang untuk tahun 2014.

3.3 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

3.4 Operasional Variabel

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2012:60) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

3.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, menurut Sanusi (2012).

1. Data sekunder

   Pengambilan data sekunder ini dengan cara studi pustaka yaitu :

   a. Data yang bersumber dari kepustakaan, seperti : membaca buku, artikel, karangan, ilmiah, jurnal, catatan-catatan dan lain sebagainya, berhubungan dengan masalah penelitian.
   b. Data yang bersumber dari perusahaan, seperti: laporan penjualan, pembelian, faktur pajak, SSP, dan laporan keuaran kususnya (laporan laba rugi) pada tahun 2014.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif, adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena - fenomena yang ada untuk menemukan *generalisasi* berdasarkan data yang bersifat kuantitatif (angka), yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel tetapi menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya.Dalam metode ini dibagi menjadi dua yaitu meneliti Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dan perlakuan akuntansi pada Dealer Astra Honda Palembang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis data

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kuantitatif, analisis data ini dibagi menjadi dua yaitu Implementasi Pajak Pertambahan Nilai dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pada Dealer Astra Honda Palembang.

Pada implementasi Pajak Pertambahan Nilai, penulis akan menjabarkan penerapan–penerapan PPN yang terjadi selama bulan januari 2014 hingga desember 2014 pada Dealer Astra Honda Palembang yaitu :

1. Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai : Berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data penjualan dan data pembelian, kemudian data tersebut diolah untuk menghitung selisih pajak, apakah terdapat lebih bayar atau kurang bayar dari rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
2. Analisa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai : Berdasarkan dari data surat setoran pajak, penulis mengevaluasi ketepatan waktu pada saat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai
3. Analisa Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai : Penulis akan mengevaluasi apakah atas setoran pajak pertambahan nilai dilaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat perusahaan dikukuhkan.

Pada pengaruhnya terhadap laporan keuangan, penulis akan menjabarkan bahwa pengaruhnya terhadap laporan keuangan dapat dibuktikan dan dilihat pada laporan laba rugi atas keterlambatan dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.

4.2 Implementasi Pajak Pertambahan Nilai

Pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Dealer Astra Honda Palembang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009 yaitu:

a. Membuat Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan BKP atau JKP.
b. Memunggut PPN sebesar 10% dari nilai DPP dan transaksi atas Penyerahan BKP atau JKP.
c. Menyetorkan Pajak Terutang ke kas negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak melalui Bank persepsi.
d. Menyampaikan laporan perhitungan PPN ke kantor pelayanan pajak melaui Pengusaha Kena Pajak yang berstatus Pemungut pajak dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
e. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan
f. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan Teratur.

4.3 Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Analisa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, perhitungan pajak pertambahan nilai pada Dealer Astra Honda telah dilakukan dengan benar dan mengguanakan tarif PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak / Harga Jual, perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk merekap pajak masukan dan pajak keluaran dalam menentukan kurang bayar atau lebih bayar pajak yang terutang, berdasarkan hasil rekap bulan januari sampai desember 2014 pada Dealer Astra Honda terdapat total PPN Masukan sebesar Rp 1.887.555.236 dan total PPN Keluaran sebesar Rp 1.825.111.778 dengan perhitungan sebagai berikut :

PPN Masukan Tahun 2014	Rp 1.887.555.236
PPN Keluaran Tahun 2014	Rp 1.825.111.778 -
Lebih Bayar	Rp 62.443.458

Pada Dealer Astra Palembang untuk tahun 2014 terdapat lebih bayar sebesar Rp 62.443.458 dan akan direstitusi setiap akhir tahun buku.

4.3.1.1 Analisis Lebih Bayar atau Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Pada Dealer Astra Honda Palembang

Rekapitulasi perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran selama tahun 2014 digunakan untuk menganalisis apakah dalam pelaporan pajak pertambahan nilai terdapat lebih bayar atau kurang bayar, dengan menggunakan rumus :

Selisih Pajak = Pajak Keluaran – Pajak Masukan

PK > PM = Kurang Bayar
PK < PM = Lebih Bayar
PK = PM : Nihil

Ket :
PK : Pajak Keluaran
PM : Pajak Masukan

Sumber : UU PPN Pasal 9 (UU No 42 Tahun 2009)

Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan pada Dealer Astra Honda Palembang akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Dealer Astra Honda Palembang
Rekapitulasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Kurang/Lebih Bayar

Masa Pajak	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kompensasi	Kurang / Lebih Bayar
Januari	298.132.190,00	368.318.971,00	-	(70.186.781,00)
Februari	104.549.000,00	122.538.676,00	70.186.781	(17.989.676,00)
Maret	91.709.640,00	83.372.400,00	17.989.676	8.337.240,00
April	98.659.440,00	90.690.400,00	-	7.969.040,00
Mei	145.715.130,00	162.468.300,00	-	(16.753.170,00)
Juni	95.223.053,00	95.700.747,70	16.753.170	(477.694,70)
Juli	172.733.720,00	135.947.089,80	477.695	36.786.630,20
Agustus	225.647.090,00	215.460.348,00	-	10.186.742,00
September	126.500.117,30	153.850.100,50	-	(27.349.983,20)
Oktober	99.554.450,00	99.889.050,00	27.349.983	(334.600,00)
November	112.525.000,00	100.272.500,00	334.600	12.252.500,00
Desember	254.162.947,70	259.046.653,00	-	(4.883.705,30)
Total	**1.825.111.778,00**	**1.887.555.236,00**		

Sumber : Data diolah penulis

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran Dealer Astra Honda pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.825.111.778,00 dan Pajak Masukan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.887.555.236,00, dimana dapat disimpulkan bahwa Dealer Astra Honda pada tahun 2014 terdapat Lebih Bayar sebesar Rp. 133.091.905.

4.3.2 Analisa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak atau Perusahaan mempunyai kewajiban dalam hal melakukan penyetoran. Besarnya PPN yang terutang Kurang Bayar atau Lebih Bayar yang disetorkan ke Kas Negara, atau Lebih Bayar bisa dikompensasikan atau direstitusi pada akhir tahun buku. Dealer Astra Honda melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Surat Setoran Pajak melalui Bank Persepsi yaitu Bank OCBC NISP dan apabila terdapat lebih bayar maka akan direstitusi setiap akhir tahun buku.

Menurut Undang-Undang No.42 tahun 2009, untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat dilakukan akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan. Namun apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan peraturan perundang - undangan No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per-bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran. Pada Dealer Astra Honda pernah melakukan keterlambatan dalam menyetorkan

pajak pertambahan nilai, total biaya denda yang dikumpulkan selama tahun 2014 sebesar Rp 611.070,00.

Berikut penjabaran mengenai penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Dealer Astra Honda apakah sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dari ketepatan waktu dalam menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak periode tahun 2014.

Tabel 4.2
Dealer Astra Honda Palembang
Ketepatan Waktu Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Periode Tahun 2014

Masa Pajak	Tanggal Setor	Tanggal Berdasarkan UU PPN	Keterangan Ketepatan Waktu
Januari	11 Februari 2014	28 Februari 2014	Tepat Waktu
Februari	02 April 2014	31 maret 2014	Tidak Tepat Waktu
Maret	05 Mei 2014	30 april 2014	Tidak Tepat Waktu
April	03 Juni 2014	31 Mei 2014	Tidak Tepat Waktu
Mei	03 Juni 2014	30 Juni 2014	Tepat Waktu
Juni	13 Juli 2014	31 Juli 2014	Tepat Waktu
Juli	12 Agustus 2014	31 Agustus 2014	Tepat Waktu
Agustus	15 September 2014	30 September 2014	Tepat Waktu
September	10 Oktober 2014	31 Oktober 2014	Tepat Waktu
Oktober	14 November 2014	30 November 2014	Tepat Waktu
November	12 Desember 2014	31 Desember 2014	Tepat Waktu
Desember	11 Januari 2015	31 Januari 2015	Tepat Waktu

Sumber : Data Diolah Penulis

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pada Dealer Astra Honda Palembang dalam penerapan menyetorkan pajak sudah hampir sesuai dengan kebijakan undang – undang pajak yang berlaku, tetapi pada bulan februari, maret, dan april perusahaan menyetorkan pajak pertambahan nilainya tidak tepat waktu dikarenakan kelalaian perusahaan yaitu keterlambatan yang tidak disengaja.

4.3.3 Analisa Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Setiap Pengusaha Kena Pajak yang telah memungut dan melakukan penyetoran atas pajak Pertambahan Nilai harus melakukan pelaporan atas seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukan, pada Dealer Astra Honda melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang sesuai dengan *system* perpajakan di Indonesia yaitu *Self Assesment system* dimana perhitungan, penyetoran, pelaporan dan serta tanggungjawab dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Menurut UU No 42 Tahun 2009, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yang mulai direalisasikan pada bulan April tahun 2010, Dealer Astra Honda melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan mengirimkan jumlah nominal atau bukti setoran pajaknya kepada bagian pusat. Kemudian bagian pusat akan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya ke kantor Pelayanan Pajak dengan melalui aplikasi e – SPT.

4.3.4 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi)

Berdasarkan Harnanto (dalam jurnal Nuraisy, 2012) bahwa Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan unsur pembentuk laba karena PPN Masukan merupakan uang muka PPN, sehingga bukan dianggap biaya dan PPN Keluaran merupakan hutang PPN bukan merupakan pendapatan. tetapi apabila penerapan PPN yang tidak sesusai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka akan

berpengaruh terhadap laporan keuangan khususnya pada laporan laba rugi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Dealer Astra Honda Palembang Laporan Laba Rugi
Untuk tahun yang berakhir pada 31 desember 2014

Pendapatan dari penjualan :			
Penjualan		Rp 18.251.117.780,00	
Retur dan potongan penjualan	Rp 289.235.000,00		
Penjualan bersih			Rp17.961.882.780,00
Harga Pokok Penjualan			
Pembelian	Rp18.875.552.360,00		
Persediaan Akhir	Rp 5.035.698.750,00		
Harga pokok penjualan		Rp13.839.853.610,00	
Laba Kotor			Rp 4.122.029.170,00
Beban Operasi :			
Beban penjualan :			
Beban Gaji staf penjual	Rp 1.354.900.000,00		
Beban iklan	Rp 8.750.000,00		
Ongkos kirim penjualan	Rp 4.550.000,00		
Jumlah beban penjualan		Rp 1.368.200.000,00	
Beban Admistrasi :			
Beban gaji staff administrasi	Rp 1.081.870.000,00		
Beban Insentif Karyawan	Rp 54.000.000,00		
Beban Air, Listrik, Telepon	Rp 129.472.000,00		
Peralatan Kantor	Rp 12.472.000,00		
Beban penyusutan	Rp 31.215.000,00		
Beban asuransi	Rp 46.800.000,00		
Administrasi Bank	Rp 6.500.000,00		
Bunga Pinjaman	Rp 39.450.000,00		
Beban sewa	Rp 120.000.000,00		
Beban Denda Pajak	Rp 611.070,00		
Beban administrasi Lain-lain	Rp 146.750.000,00		
Jumlah beban adm		Rp 1.669.140.070,00	
Jumlah Beban Operasi			Rp 3.037.340.070,00
			Rp 1.084.689.100,00
Pendapatan Non Operasi :			
Pendapatan lain – lain	Rp 45.436.590,00		
Jumlah Pendapatan Non Operasi			Rp 45.436.590,00
Laba bersih (komersial) sebelum pajak			Rp 1.130.125.690,00
Pajak Penghasilan			Rp 145.463.832,00
Laba bersih (komersial) setelah pajak			Rp 984.661.858,00

Sumber : Dealer astra honda sales office km 9 palembang

Pada tabel laporan laba rugi diatas terdapat akun “Beban Denda Pajak”, yang artinya bahwa perusahaan pernah melakukan kelalaian dalam menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai sehingga dikenakan denda pajak sebesar Rp 611.070,00 yang dilaporkan pada laporan laba rugi menjadi biaya

pengurang pendapatan sehingga akan mempengaruhi laporan laba rugi dan akibatnya akan berdampak pada penurunan laba kotor perusahaan.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Pajak Pertambahan Nilai pada Dealer Astra Honda Palembang selama tahun 2014 secara garis besar hampir sesuai dengan kebijakan Undang-Undang perpajakan yang berlaku yaitu dalam hal melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan dan apabila terdapat lebih bayar akan direstitusi setiap akhir tahun buku, dan dengan memungut tarif PPN sebesar 10 % (sepuluh persen).
2. Dalam penerapannya, perusahaan pernah melakukan keterlambatan dalam menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda pajak sebesar Rp 611.070,00. Maka atas denda tersebut akan berpengaruh terhadap Laporan Keuangan perusahaan khususnya pada laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi dealer astra honda dapat dilihat bahwa atas denda administrasi pajak dimunculkan dan dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan, kemudian atas perlakuan tersebut akibatnya berdampak terhadap penurunan laba kotor perusahaan.

5.2 Saran

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan, disarankan :

1. Penerapan atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sudah diterapkan dengan cukup baik, yaitu sesuai dengan kebijakan undang – undang PPN yang berlaku. tetapi perlu disiplin dan lebih di tingkatkan lagi agar tidak terjadi kelalaian yang berulang.
2. Agar dapat menghindari sanksi Administrasi pajak dan terhindar dari dampak pada penurunan laba kotor perusahaan, sebaiknya perusahaan haruslah lebih teliti lagi dalam mengurusi masalah Pajak Pertambahan Nilai dan Perusahaan sebaiknya selalu mengikuti perubahan yang terjadi terhadap peraturan kebijakan undang-undang perpajakan yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam menyetorkan pajak. Apabila tidak dihentikan maka lama kelamaan penurunan laba kotor akan semakin meningkat.

6. REFERENSI

[1] Agoes, Sutrisno.2013.*Akuntansi Perpajakan.*Jakarta : Salemba Empat

[2] Cristhina Dkk.2014. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada Cv. Kamdatu Palembang*.Jurnal Ilmiah.Stie Mdp Palembang

[3] *Http://Rintosusantotempirai.Blogspot.Com*

[4] *Http://Dokumen.Tips/,Http://Elib.Inikom.Ac.Id*

[5] Israelka.2008. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt Kaltimex Lestari Makmur. Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

[6] Nuraisy Iss. 2013. *Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengarunya Terhadap Laporan Keuangan Pada Cv.Arjuna Securitas Abadi Surabaya.* Skripsi. Universitas Surabaya.

[7] Priyanto Joko.2011. *Analisis Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kontruksi Pada Pt. Mrc.*Skripsi.Universitas Bina Nusantara Jakarta Barat

[8] Republik Indonesia. *Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Sebelumnya Atas Perubahan Kedua Dari Uu Nomor 18 Tahun 2000.*

[9] *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*
[10] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakanteori Dan Kasus*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
[11] Resmi, Siti.2015. *Perpajakn Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
[12] Selviyana .2013. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv Kusuma Agung Mandiri Palembang*.Jurnal Ilmiah.Stie Mdp Palembang.
[13] Soemitro, Rochmat. (2012). *Perpajakan Teori Dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu
[14] Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Kualitatif Dan R&B.* Bandung : Alfabet.

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP *RETURN SAHAM* PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Dewi Sagita[1)], Henni Indriyani[2)], Titan Terzaghi[3).]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang
[1]dewisagita26@yahoo.com [2]Henniinayah@yahoo.com [3]mtitant4@gmail.com

Abstract

This purpose was conducted to examine the effect of Financial Performance Return on Equity in the company LQ45 Indonesia Stock Exchange period in 2014. The independent variables used in this study is the Earning Per Share (EPS), Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) , Price Earning Ratio (PER), Return on Equity (ROE) and the dependent variable used is stock return. The is population in this experiment are all companies LQ45 in LQ45 index period 2014. The sampling is done by using a sampling method saturated. where all members of the by population is sampled. The data used in this study were obtained from pubilkasi official website www.idx.co.id and www.sahamok.com. This experiment uses linear regression. Result of this research show that: 1) Earning Per Share (EPS) has no effect on stock return, 2) Return on Assets (ROA) did not affect stock return, Debt to Equity Ratio (DER) did not affect stock return, Price Earning Ratio (PER) affects stock return, Return on Equity (ROE) has no effect on stock return.

Keywords: *Earning Per Share* (EPS), *Return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Price Earning Ratio* (PER), *Return on Equity* (ROE), *stock return*

1. PENDAHULUAN

Pasar modal adalah wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki dana lebih (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (emiten). Salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak dikenal masyarakat adalah saham. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Untuk para investor dapat memilih objek investasi atas saham yang diperoleh dengan tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang beragam pula dimana semakin tinggi tingkat risiko maka semakin tinggi pula tingkat pengembaliannya terhadap *return* saham

Investor tertarik dengan *return* saham yang memiliki *return* positif dan tinggi karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (investor) dalam berinvestasi pada saham, untuk menarik investor perusahaan harus mampu menunjukan kinerja keuangannya. Metode umum yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan adalah analisis Rasio keuangan adalah studi tentang informasi yang menggambarkan hubungan diantara berbagai akun dari laporan keuangan yang mencerminkan keadaan serta hasil operasional perusahaan. Menurut Fahmi (2012:2)**.** Adapun beberapa Analisis rasio keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, antara lain: *Earning Per Share* (EPS), *Return on Equity* (ROE), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Price Earning Ratio* (PER), dan *Return on Assets* (ROA).

Pengambilan keputusan investasi akan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya ke perusahaan mana modal akan ditanamkan. Perusahaan yang dipilih tentu saja perusahaan yang memiliki saham yang paling aktif diperjualbelikan sehingga investor berminat untuk berinvestasi pada perusahaan yang aktif diperdagangkan di pasar modal, terutama perusahaan terbuka (*Go Public*), salah satu nya adalah perusahaan LQ45.

Perusahaan LQ45 adalah Perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi dan merupakan saham-saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Indeks dari 45 saham yang terpilih di mana saham ini sangat diunggulkan, karena pergerakannya paling aktif. Indeks LQ45 diupdate

setiap enam bulan sekali, dengan demikian anggota indeks LQ45 akan selalu berubah-ubah, karena indeks LQ45 berfungsi sebagai patokan naik turunnya harga saham di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul ”Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”

2. LANDASAN TEORI

Return saham

Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang (Yogiyanto, 2010:109). Return yang didapatkan diperoleh jika harga saham sekarang lebih tinggi dari harga saham periode lalu maka terjadi keuntungan modal (*capital gain*), dan sebaiknya apabila harga saham sekarang lebih rendah dari harga saham periode lalu maka terjadi kerugian modal (*capital loss*).

Jogiyanto (2010), untuk menghitung return saham dapat dihitung dengan Formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rit} = \frac{\text{Pit} - \text{Pit} - 1}{\text{Pit} - 1}$$

Keterangan:
R it = Tingkat keuntungan saham i periode t
P it = Harga saham penutupan i pada periode t
P it −1 = Harga saham penutupan i pada periode sebelumnya
Dalam penelitian ini return saham dihitung dengan cara mengurangkan harga saham pada waktu tertentu dengan harga saham pada periode sebelumnya.

Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2011:2) Kinerja keuangan adalah suatu analisis rasio keuangan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Langkah yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio yang menunjukan hubungan tertentu antara faktor satu dengan lainnya dari suatu laporan keuangan (Kusumo, 2011:2).

Analisis rasio keuangan dapat dilihat dengan mengukur rasio EPS, PER, DER, ROA, dan ROE dapat kita lihat sebagai berikut: (Werner R, 2013:61-65).

1. EPS (*Earning per share*)
   Rasio *Earning Per Share* dhitung dengan rumus:
   $$= \frac{Laba\ Bersih}{\text{Jumlah saham beredar}}$$
2. PER (*Price Earning Ratio*)
   Rasio *Price Earning Ratio* dihitung dengan rumus:
   $$\text{PER} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Laba per lembar saham}}$$
3. DER (*Debt to Earning Ratio*)
   Rasio *Debt to Earning Ratio* dihitung dengan rumus:
   $$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$
4. ROA (*Return on Assets)*

Return on Assets dihitung dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total } Asset}$$

5. ROE (*Return on Equity*), dihitung dengan rumus:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{Total\ Equity}$$

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan data objek kuantitatif yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui laporan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui media internet. Data dalam penelitian ini diperoleh homepage BEI yaitu www.idx.co.id, www.sahamok.com.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014, penarikan sampel yang dilakukan adalah dengan mengunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel sehingga diperoleh 45 perusahaan sampel. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Teknis analisis regresi berganda.

Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
1	*Return* Saham	Merupakan selisih harga saham periode sekarang dengan periode lalu	$Actual\ return = \frac{\text{Pt} - \text{Pt} - 1}{\text{Pt} - 1}$	Rasio
2	*Earning Per Share* (EPS)	Merupakan perbandingan antara laba berish dengan jumlah saham yang beredar	$= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah saham beredar}}$	Rasio
3	*Price Earning Ratio* (PER)	Merupakan perbandingan harga saham dengan laba bersih	$= \frac{\text{Harga saham}}{\text{Harga Per lembar saham}}$	Rasio
4	*Debt to Equity Ratio* (DER)	Merupakan perbandingan total debt dengan total equity	$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio

5	*Return on Asset* (ROA)	Merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aktiva	$\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Assets}}$	Rasio
6	Return on Equity (ROE)	Merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri	$\frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Equity}}$	Rasio

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas

Uji grafik Histogram menunjukan bahwa data berdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan grafik yang lonceng. Hasil ini didukung pula dengan garfik *Normal Probability Plot* menunjukan bahwa melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal mengikuti arah garis diagonal. Apabila Asymp. Sig (2-tailed) > α (0,05) maka dikatakan data terdistribusi normal. Dari hasil uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,796 (0,796>0,05). Hal ini berarti model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas

Nilai Tolerance untuk variabel *Earning Per Share, Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio dan Return on Equity,* secara berturut-turut sebesar 0,808 atau 80.8 persen; 0,204 atau 20,4 persen, 0,561 atau 56,1 persen, 0,951 atau 95,1 persen, dan 0,250 atau 25 persen. Nilai VIF dari variabel *Earning Per Share, Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Price Earning Ratio dan Return on Equity* secara berturut-turut sebesar 1,237; 4,913; 1,782; 1,951; dan 4,003 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Tolerance Value* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diuji dengan *scaterplots.* Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik tersebar dan dibawa angka nol. Titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur. sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini homokedastisitas atau dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Uji simultan

Hasil perhitungan analisis regresi menunjukkan koefisien determinasi (R2) adalah 0,213 atau 21,3 persen dari variasi *return* saham dipengaruhi oleh variasi EPS, ROA, DER, PER, dan ROE. Sisanya sebesar 78,7 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang ada di luar model analisis. Dengan probabilitas F = 0,012; yang lebih kecil dari α = 0,05. Probabilitas F = 0,012 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel EPS, ROA, DER, PER, dan ROE, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan LQ45di Bursa Efek Indonesia periode 2014.

Uji parsial

1. Pengaruh EPS (X1) terhadap *return* saham (Y)
   Pada tabel hasil Uji Statistik t yang dilakukan dengan pengujian satu arah, menunjukkan bahwa, nilai koefisien dari variabel (X1) EPS adalah 0.450 siginifikasi sebesar 0.756 atau lebih besar dari P-Value=0,05. sehingga H1 ditolak, artinya secara parsial EPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. karena nilai EPS nya yang tidak konstan sehingga tidak mempengaruhi daya tarik investor akan harapan nilai *Return* saham yang tinggi, hal ini disebabkan oleh adanya data perusahaan yang mengalami fluktuasi. Hasil pengujian ini didukung dengan penelitian Dhimas (2012) yang menunjukkan bahwa EPS tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* saham.
2. Pengaruh ROA (X2) terhadap *return* saham(Y)
   Pada tabel hasil Uji Statistik t yang dilakukan dengan pengujian satu arah, menunjukkan bahwa, nilai koefisien dari variabel (X1) ROA adalah 0.000, siginifikasi sebesar 0.199 atau lebih besar dari P-Value=0,05, sehingga H2 ditolak, artinya secara parsial ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini berarti investor tidak hanya mempertimbangkan faktor kinerja perusahaan atas aset yang dimilikinya saja untuk memutuskan berinvestasi saham pada suatu perusahaan. Walaupun rasio ROA mencerminkan indikator profitabilitas, namun hasilnya dapat tidak sesuai oleh karena ketidakpastian keuntungan yang diperoleh. Hasil pengujian ini didukung dengan penelitian Mia (2014) meneliti *Eva Momentum*, ROA, ROE dan NPM terhadap *return* saham, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *return* saham.
3. Pengaruh DER (X3) terhadap *return* saham (Y)
   Pada tabel hasil Uji Statistik t yang dilakukan dengan pengujian satu arah, menunjukkan bahwa, nilai koefisien dari variabel (X3) DER adalah 0.060, siginifikasi sebesar 0.279 atau lebih besar dari P-Value=0,05. sehingga H3 ditolak, artinya secara parsial DER tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Tidak bepengaruhnya DER terhadap *return* saham dikarenakan sebagian investor hanya menganggap bahwa perusahaan yang memiliki prospek keberanian yang baik untuk menggunakan hutang yang tinggi dalam struktur modalnya. Proporsi hutang yang semakin tinggi akan menyebabkan *fixed payment* yang tinggi dan akan menimbulkan risiko kebangkrutan atau terlikuidasi, sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Hasil pengujian ini didukung dengan penelitian (Ulupui dalam, Ika, 2013) yang menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh siginifkan terhadap *return* saham.
4. Pengaruh PER (X4) terhadap return saham (Y)
   Pada tabel hasil Uji Statistik t yang dilakukan dengan pengujian satu arah, menunjukkan bahwa, nilai koefisien dari variabel (X4) PER adalah 0.006, siginifikasi sebesar 0.040 atau lebih kecil dari P-Value=0,05. sehingga H4 diterima, artinya secara parsial PER memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini diidentifikasikan Price Earning Ratio (PER) dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan dimasa lalu dan prospek dimasa yang akan datang, karena Price Earning Ratio (PER) menggambarkan kesediaan investor membayar lembar per saham dalam jumlah tertentu untuk setiap rupiah perolehan laba perusahaan. Secara umum perkembangan perusahaan di Bursa yang dapat dilihat dari perkembangan harga dan sekaligus mengindikasikan tingkat kepercayaan pasar terhadap tingkat pertumbuhan laba suatu emiten dimasa yang akan datang, selain itu pergerakan harga saham dapat digunakan dalam menilai return berupa *capital gain*. Hasil Pengujian ini didukung dengan penelitian Farkhan (2013) yang menunjukan bahwa PER berpengaruh signifikan terhadap return saham.

5. Pengaruh ROE (X5) terhadap return saham (Y)
   Pada tabel hasil Uji Statistik t yang dilakukan dengan pengujian satu arah, menunjukkan bahwa, nilai koefisien dari variabel (X5) ROE adalah 0.013, siginifikasi sebesar 0.148 atau lebih besar dari P-Value=0,05. sehingga H4 ditolak, artinya secara parsial ROE tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini dikarenakan dari beberapa data perusahaan menunjukan tingkat nilai ROE yang tidak stabil. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian (Sriwidodo, dalam Arta, 2012) dan Mia (2014), yang menunjukkan bahwa ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada penelitian ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Uji Deskriptif statistik di dapat hasil perusahaan – perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini rata–rata mengalami perubahan positif dan negatif dalam mengalami peningkatanya.
2. Hasil Uji analisis regresi linear berganda secara parsial menunjukkan bahwa hanya variabel PER berpengaruh secara signifikan terhadap return saham.
3. Hasil Uji secara simultan menunjukan bahwa kinerja keuangan EPS, ROA, DER, PER, dan ROE berpengaruh secara bersama-sama terhadap return saham.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia, berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian statistik di dapat hasil tingkat pengembalian saham (Rate of Return) tidak dipengaruhi oleh EPS, DER, ROA, dan ROE yang merupakan ukuran kinerja keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu untuk memperoleh investor yang memadai dengan tingkat pengembalian saham yang tinggi maka perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangan dengan mepublikasikan kinerja keuangan yang jelas dan akurat sehingga para investor dapat memahami laporan kinerja keuangan yang dipublikasikan karena menjadi pertimbangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi.
2. Laba bukanlah indikator yang akurat untuk menilai baik buruknya kinerja perusahaan. Oleh karena itu, disamping penggunaan laba sebagai komponen indikator kinerja keuangan, perusahaan disarankan untuk memperhatikan tingkat likuiditas keuangannya melalui laporan arus kas yang merupakan satu-satunya sumber keluar masuknya kas (uang tunai) perusahaan.
3. Pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia, berdasarkan hasil pembahasan dan pengujian statistik di dapat hasil tingkat pengembalian saham (Rate of Return) tidak dipengaruhi oleh ROE yang merupakan ukuran kinerja keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu untuk memperoleh investor yang memadai dengan tingkat pengembalian saham yang tinggi maka perusahaan perlu meningkatkan kinerja keuangan terutama dengan cara mempertimbangkan biaya modal karena menjadi pertimbangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

[1] Ghozali, Imam, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

[2] Hartono, Jogiyanto. 2010. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta : BPFE.
[3] Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Rajawali Pers.
[4] Fahmi, Irham 2012 Analisis Laporan Keuangan Cetakan ke-2 Bandung Alfabet
[5] Tandelilin, Eduardus. 2010. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta : BPFE.
[6] Weston. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
[7] Farhan Ika 2013. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *return* saham Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* (September) hlm.1-15.
[8] Ulupui, I.G.K.A. 2007. Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas, dan Profitabilitas terhadap Return Saham (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman dengan Kategori Industri Barang Konsumsi di BEJ". AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis,Vol. 2, No.1.
[9] Wijaya, David. 2008. Pengaruh Rasio Modal Saham Terhadap Return Saham Perusahaan-Perusahaan Telekomunikasi Go Public di Indonesia Periode 2007. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.10, No.2, Hal. 136-152.
[10] Tinneke, Raden, 2007. "Analisis Pengaruh *Economic Value Added* (EVA) dan Faktor-faktor Fundamental Perusahaan Lainnya Terhadap *Return* Saham. Semarang: Universitas Diponegoro.
[11] Sugiyono, 2010. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta.
[12] Ferawati, 2010. "Pengaruh *Economic Value Added* dan Rasio Profitabilitas Terhadap *Return* Saham Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". Medan: Universitas Sumatera Utara.
[13] Helvert, A. Erich. 1997. "Teknik Analisis Keuangan". Jakarta: Erlangga
[14] Prihadi, Toto. 2011. "Analisis Laporan Keuangan Teori dan Aplikasi". Jakarta:PPM.
[15] Nurfadillah, Mursidah. 2011. Analisis Pengaruh *Earning Per Share, Debt To Equity Ratio* dan *Return On Equity* Terhadap Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk. April 2011, Volume 12 Nomor 1
[16] Kusumo, Ismoyo.2011. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap *Return* Saham Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Universitas Diponegoro.
[17] Hermy Ary Kuriawan. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Return* saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* (Juli) hlm.1-7.
[18] Dhimas Ari Mahardhika Putra. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Return* Saham Perusahaan Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* (Juli) hlm.1-20.
[19] Diensa Primayanti.2013. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* (Juli) hlm.1-11.
[20] Komang Arta.2012. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Return* Saham Pada Perusahaan Sektor Food And Beverages Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi* (Juli) hlm.1-18.
[21] Kusumo, Ismoyo.2011. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap *Return* Saham Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi Universitas Diponegoro.
[22] Mia Hediyanasari.2014.Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Return* Saham (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ 45 Bursa Efek Indonesia. Skripsi Universitas Brawijaya.

ANALISIS METODE Z-SCORE UNTUK MEMPREDIKSI POTENSI TERJADINYA FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

[1]Dian Ramadani, [2]Poppy Indriani, [3]Ade Kemala Jaya
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang
[1]Email: dianramadani20@gmail.com
[2]Email: poppy.indriani@binadarma.ac.id,
[3]Email: Jaya_ade@yahoo.com

ABSTRACK

This study aims to determine the financial condition of the Company Manufacturing Basic and Chemical Industry Sector Subsector cement by using Altman Z-Score approach in the period 2010-2014, to predict the potential bankruptcy at the company. The data used in this research is secondary data on Manufacturing Company Basic and Chemical Industry Sector Subsector cement, namely PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Semen Holcim Indonesia Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, and PT Wijaya Karya Beton Tbk. The data analysis technique used is the discriminant analysis Atlman Z-score. The final results of this study indicate that the Company Manufacturing Basic and Chemical Industry Sector Subsector cement in the period 2010-2014 are classified into two categories of companies, ie companies experiencing grey area and Non Distress. The analysis showed that there is two company that is experiencing grey area from years 2012, 2013 and years 2014.

***Keywords*:** *Financial Distress, Alman Z Score*

1. PENDAHULUAN

Dunia bisnis selalu mengalami perkembangan setiap tahun, dengan keadaan yang selalu berkembang perusahaan harus mempersiapkan perusahaan yang kuat dan tangguh. Didalam perusahaan seiring perkembangan zaman, permasalahan akan selalu datang dan resiko akan selalu ada di setiap keputusan yang diambil untuk memajukan perusahaan. Karna persaingan antar perusahaan yang semakin ketat menyebabkan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan semakin tinggi, dan hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Apabila suatu perusahaan tidak mampu untuk bersaing maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian, yang pada akhirnya bisa membuat suatu perusahaan mengalami *financial distress*. *Financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan. *Financial distress* dapat terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan kinerja keuangan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian operasional dan kerugian bersih untuk tahun yang berjalan. Untuk itu, pengenalan lebih awal kondisi *financial distress* dalam suatu perusahaan bisa dikatakan penting, karena bisa menjadi informasi yang berguna untuk manajemen, pemilik, investor, regulator, dan para *stakeholder* lainnya untuk melakukan upaya-upaya yang relevan dalam mengendalikan *financial distress* itu sendiri. Dimana *financial distress* itu sendiri dapat dikenali dengan menggunakan suatu model sistem peringatan dini, yaitu z-score atau biasa disebut dengan metode altman z-score.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari peneliti adalah untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan *Altman Z-score* untuk menganalisis *financial distress* pada Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen guna memprediksi potensi terjadinya kebangkrutan dimasa yang akan datang.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan Mengambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan posisi Keuanan. Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi atau kondisi ekonomis suatu perusahaan, karena laporan keuangan inilah yang akan menjadi bahan sarana informasi (*screen*) bagi analis dalam proses pengambilan keputusan (Harahap, 2007:105).

2.1.2 Tujuan Lapoan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Harahap, 2012:125).

2.1.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Djalil (2015:10), laporan keuangan yang berguna bagi pemakai informasi bahwa harus terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

2.1.4 Pengguna Laporan Keuangan

Harahap (2007:120) Pengguna laporan keuangan adalah sebagai berikut, yaitu para pemegang saham, investor, analisis pasar modal, manajer, instansi pajak, Karyawan dan Serikat Pekerja, pemberi dana, *Supplier*, Pemerintahan atau Lembaga Pengatur Resmi dan langganan atau lembaga konsumen.

2.2 Analisis Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Analisis Laporan keuangan

Menurut Dunia dalam Djalil (2015:22) analisis Laporan keuangan adalah meneliti hubungan yang ada diantara unsur-unsur dalam laporan keuangan, dan membandingkan unsur-unsur pada laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-unsur yang sama pada laporan keuangan tahun yang lalu atau angka pembanding lain serta menjelaskan sebab perubahannya

2.2.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Harahap (2007:18) Sebuah laporan keuangan memiliki nilai lebih ketika memberikan artian atau gambaran tertentu kepada pihak yang menggunakannya. Karena akan memberikan manfaat yang berbeda untuk setiap penggunanya, analisis keungan juga dilakukan dengan tujuan berbeda. Jadi tujuan analisis laporan keuangan adalah *Screening, Forcasting, Diagnosis, Evaluation*.

2.3 Analisis Rasio Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Harahap (2007:297) Analisis rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

2.3.2 Jenis Rasio Keuangan

Harahap (2007:307) Jenis-jenis rasio keuangan adalah sebagai berikut, Rasio Likuiditas, rasio *solvabilitas*, *rentabilitas/profitabilitas*, rasio *leverage* dan Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasinya seperti kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya

2.4 Financial Distress

2.4.1 Pengertian *Financial Distress*

Menurut Platt dalam Burhannudin (2015:17) mendefinisikan bahwa *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatuperusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi ini pada umumnya ditandai antara lain dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan pembayaran tagihan dari bank.

2.4.2 Penyebab Terjadinya *Financial Distress*

penyebab terjadinya *financial distress* bisa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro.

2.4.3 Manfaat Informasi *Financial Distress*

Informasi kondisi *financial distress* suatu perusahaan menjadi perhatian banyak pihak. Pihak-pihak yang menggunakan model tersebut (Helmy dalam Djalil 2015:23) yaitu, bagi para pemberi pinjaman, investor, pembuat peraturan, pemerintah, akuntan, Auditor, dan manajemen.

2.5 Metode Prediksi Financial Distress

2.5.1 Altman (Z-score)

Harahap (2007:353) *Z-Score* adalah sekor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula *Z-Score* untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah *multivariate formula* yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Fungsi diskriminan Z yang ditemukan oleh Altman adalah sebagai berikut:

$$Z\text{-}Score = 1{,}2\ X1 + 1{,}4\ X2 + 3{,}3\ X3 + 0{,}6\ X4 + 1{,}0\ X5$$

Dimana:

X1 = *Working Capital to Total Assets* (Modal Kerja/Total Aset)
X2 = *Retained Earning to Total Assets* (Laba Ditahan/Total Aset)
X3 = *Earning Before Interest and Taxes (EBIT) to Total Assets* (Pendapatan Sebelum Dikurangi Biaya Bunga/Total Aset)
X4 = *Market Value of Equity to Book Value of Total Liabilities* (Harga Pasar Saham Dibursa/Nilai Total Utang)
X5 = *Sales to Total Assets* (Penjualan/Total Aset)

Dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

a. *Z-Score* > 2,99 dikategorikan sebagai perusahaan yang sangat sehat sehingga tidak mengalami kesulitan keuangan.
b. 1,81 <*Z-Score* < 2,99 berada di daerah abu-abu sehingga dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan, namun kemungkinan terselamatkan dan kemungkinan bangkrut sama besarnya tergantung dari keputusan kebijaksanaan manajemen perusahaan sebagai pengambil keputusan.
c. *Z-Score* < 1,81 dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan yang sangat besar dan beresiko tinggi sehingga kemungkinan bangkrutnya sangat besar.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

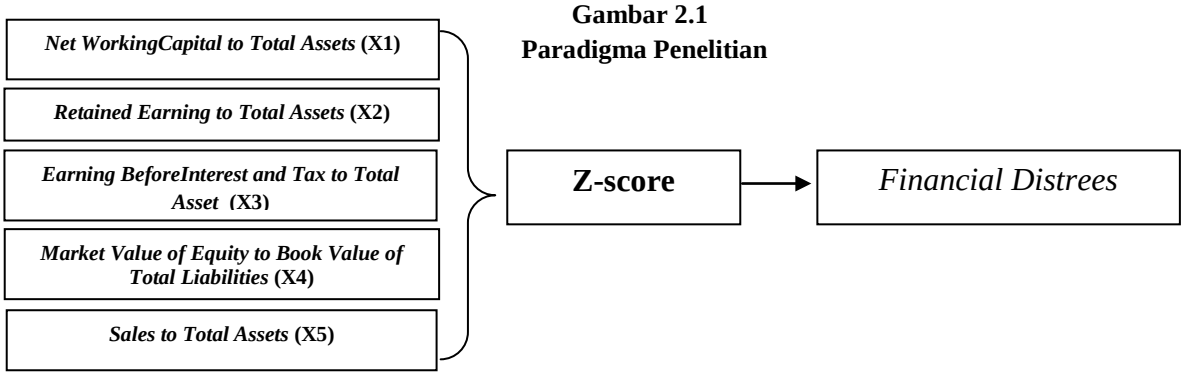
Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rizky Amalia Burhanuddin (2015)	Analisis Penggunaan Metode Altman *Z-score* dan Metode *Springate* untuk mengetahui potensi terjadinya *Financial Distress* Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Semen Periode 2009-2013	Hasil penelitian ini menunjuk kan bahwa PT. Semen Indonesia (persero) dari tahun 2009-2013 tidak mengalami financial distress. Sebagian besar berada pada kondisi tidak mengalami kesulitan keuangan (*Non Financial Distress*). Perbedaan pada kedua metode tersebut disebabkan oleh perbedaan penggunaan rasio keuangan. Seperti pada model *Springate* rasio *solvabilitas* adalah *earning before interest taxes to current liability* sedangkan Altman yang digunakan *earning before interest taxes to total asset.* Selain itu perbedaan bobot yang diberikan pada setiap rasio yang dijadikan indikator juga sangat berpengaruh. Kedua analisis tersebut, terlihat bahwa Altman dengan Z-scorenya lebih ketat dalam menilai tingkat kebangkrutan dibandingkan Model *Springate*.
Yuliastary dan Wirakusuma (2013)	Analisis *Financial Distress* Dengan Metode *Z-Score* Altman, *Springate, Zmijewski*	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dianalisis dengan metode *Z-score Altman, Springate, Zmijewski* pada PT. Fast Food Indonesia Tbk Periode 2008-2012 diklasifikasikan dalam keadaan sehat atau tidak berpotensi bangkrut.
Kamal (2012)	Analisis prediksi kebangkrutan pada perusahaan perbankan *Go Public* di Bursa Efek Indonesia (dengan menggunakan model Altman *Z-Score*)	Selama Periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian sebanyak 20 bank *go public* masih ada beberapa yang berada dalam keadaan bangkrut. 95% bank mengalami prediksi kebangkrutan dengan nilai di bawah 1,88 dan 5% berada pada *grey area*.
Titi Kurniati Djalil (2015)	Analisis *Financial Distress* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Keramik, Porselen, dan Kaca Priode 2009-2013 Dengan Pendekatan Altman Z-score Untuk Memprediksi Potensi terjadinya Kebangkrutan.	Selama Periode pengamatan menunjukkan bahwa, Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia subsektor keramik, porselen, dan kaca pada periode 2009-2013 secara umum diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan di masa yang akan datang. Adapun secara khusus, terdapat satu perusahaan yang diprediksi berpotensi mengalami kebangkrutan yaitu PT Mulia Industrindo Tbk, karena selama periode tersebut mengalami *Financial distress.*

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Platt dalam Burhanuddin (2015:17) mendefinisikan bahwa *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Jika suatu perusahaan tidak mampu untuk keluar dalam kondisi *financial distress* maka perusahaan tersebut akan mengalami kepailitan atau pun kebangkrutan. Untuk itu melalukan pengenalan lebih awal kondisi *financial distress* ini perlu dilakukan agar para pemengang kepentingan disuatu perusahaan dapat mencari upaya pencegahan yang tepat dan relevan. dengan menggunakan suatu model sistem peringatan dini, yaitu salah satu model yang dikemukakan oleh altman, dan model tersebut dikenal dengan Altman z-score. Karena model ini dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi *financial distress* atau menjadi sebuah Multivariate formula yang digunakan untuk mengukur kesehatan *financial distress* dari sebuah perusahaan. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen sebagai populasi dan sampelnya.

2.8 Paradigma Penelitian

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



3. METODE PENELITIAN

3.1 Pengukuran dan Variabel

a. Variabel Independen (X)

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu sebagai berikut: *Net Working Capital to Total Assets, RetainedEarnings to Total Assets, Earning Before Interest and Tax to Total Asset, BookValue of Equity to Total Liabilitie,* dan *Sales to Total Assets.*

b. Variabel Dependent (Y)

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah financial distress. Dimana *financial distress* merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahaan,

3.2 Populasi dan Sampel

populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia sub sektor semen di Indonesia. Dimana sampel yang digunakan peneliti ialah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

3.3 Sumber, Teknik Pengumpulan, dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah dari berbagai sumber buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian. Sedangkan untuk sumber data yang akan diolah dalam analisis penelitian adalah laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan tahunan perusahaan yang diambil dari www.idx.co.id

4. PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data dan Interpretasi Hasil Analisis

4.1.1 Hasil Analisis *Financial distress* Model *Altman Z-Score*

Table 4.1
Hasil Analisis Financial Distress Dengan Pendekatan Altman Z-score Tahun 2010

Perusahaan	X1	X2	X3	X4	X5	Z-Score	Kondisi
PT. Indocement Tunggal Prakarsa	0,400	0,557	0,277	26,1	0,726	18,59	Non Distress
PT. Holcim Indonesia Tbk	0,086	0,048	0,110	4,8	0,571	3,97	Non Distress
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	0,310	0,640	0,303	16,4	0,922	13,01	Non Distress

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen berada pada kondisi keuangan yang baik (*non distress*). sedangkan untuk PT. Semen Baturaja dan PT. Wijaya Karya Beton ditahun 2010 ini tidak ada laporan keuangan yang dikeluarkan karena tidak masuk kedalam kriteria, hal tersebut disebabkan karena PT. Semen baturaja (Persero) Tbk dan PT. Wijaya Karya Beton Tbk terdaftar di BEI atau Tahun IPO nya yaitu pada tahun 2013, jadi laporan keuangan yang berada dibawah tahun tersebut tidak ada, atau tidak dikeluarkan.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Financial Distress Dengan Pendekatan Altman Z-score Tahun 2011

Perusahaan	X1	X2	X3	X4	X5	Z-Score	Kondisi
PT. Indocement Tunggal Prakarsa	0,487	0,615	0,259	26,0	0,765	18,64	Non Distress
PT. Semen Holcim Indonesia Tbk	0,072	0,111	0,140	4,9	0,687	4,31	Non Distress
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	0,242	0,631	0,259	13,5	0,833	10,94	Non Distress

Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa kondisi yang sama pada tahun 2010, kembali terjadi pada tahun 2011. Dimana pada tahun ini perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Sub Sektor Semen berada pada kondisi keuangan yang baik juga (*non distress*). Sedangkan untuk PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dan PT. Wijaya Karya Beton Tbk masih sama seperti ditahun 2010, dimana ditahun ini perusahaan tersebut tidak ada laporan keuangan yang dipublikasikan.

Tabel 4.3
Hasil Analisis Financial Distress Dengan Pendekatan Altman Z-score Tahun 2012

Perusahaan	X1	X2	X3	X4	X5	Z-Score	Kondisi
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	0,534	0,653	0,274	25,0	0,760	18,21	Non Distress
PT. Semen Holcim Indonesia Tbk	0,052	0,171	0,154	5,9	0,741	5,10	Non Distress
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	0,128	0,575	0,237	11,1	0,737	9,12	Non Distress
PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk	0,408	0,262	0,330	-	0,915	2,85	Grey Area

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2012 ini, perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen berada pada kondisi Keungan yang baik (*Non Distress*) atau bisa diartikan tidak terjadinya *Financial Distress*(> 2,99). Hanya saja ditahun ini PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk, mengalami grey area dengan nilai Z yaitu 2,85.

Tabel 4.4
Hasil Analisis Financial Distress Dengan Pendekatan Altman Z-score Tahun 2013

Perusahaan	X1	X2	X3	X4	X5	Z-Score	Kondisi
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	0,530	0,684	0,248	20,3	0,702	15,29	Non Distress
PT. Semen Holcim Indonesia Tbk	-0,079	0,160	0,090	2,8	0,650	2,78	Grey Area
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	0,152	0,600	0,225	9,3	0,796	8,14	Non Distress
PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk	0,706	0,165	0,148	63,9	0,431	40,34	Non Distress
PT. Wijaya Karya Beton Tbk	0,035	0,130	0,113	-	0,906	1,50	Financial Distress

Dari perhitungan table diatas, menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen pada tahun 2013 ini memiliki kondisi keuangan yang kurang baik. Artinya terjadi *Financial Distress* (> 2, 99) pada salah satu perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen. Dimana berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini PT. Wijaya Karya Beton Tbk sdh bisa memperlihatkan hasil laporan keuangannya.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Financial Distress Dengan Pendekatan Altman Z-score Tahun 2014

Perusahaan	X1	X2	X3	X4	X5	Z-Score	Kondisi
PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	0,444	0,695	0,235	22,4	0,692	16,42	Non Distress
PT. Semen Holcim Indonesia Tbk	-0,088	0,138	0,059	1,9	0,612	2,03	Grey Area
PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	0,186	0,630	0,207	10,3	0,786	8,75	Non Distress
PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk	0,737	0,239	0,135	127,6	0,415	70,64	Non Distress
PT. Wijaya Karya Beton Tbk	0,162	0,019	0,108	7,19	0,862	5,75	Non Distress

Dari perhitungan tabel diatas menunjukkan perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Sub Sektor Semen pada tahun 2014 yaitu PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT. Semen Baturaja (persero) Tbk dan PT. Wijaya Karya Beton Tbk berada pada kondisi Keungan yang baik (*Non Distress*) artinya tidak terjadinya *financial distress* (> 2,99).

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disumpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen periode 2010-2014, secara umum tidak mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan). Hanya saja dari kelima perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen, ada 2 perusahaan yang masuk kedalam kondisi *grey area*, dimana perusahaan tersebut meliputi, PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk ditahun 2012 dan PT. Semen Holcim Indonesia Tbk ditahun 2013 dan 2014. Dan ditahun 2013 juga ditemukan satu perusahaan yang berada dalam kondisi financial distress yaitu PT. Wijaya Karya Benton Tbk.
2. Prediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen pada periode 2010-2014, secara umum diprediksi tidak berpotensi mengalami kebangkrutan di masa yang akan datang berdasarkan metode Altman Z-score. Walaupun pada tahun 2013 PT. Wijaya Karya Beton Tbk, mengalami kesulitan keuangan atau financial distress, tetapi perusahaan tersebut mampu menaikkan kembali keuangan perusahaan pada tahun 2014, hal itu membuktikan bahwa PT. Wijaya Karya Beton Tbk masih tergolong perusahaan yang tidak akan mengalami financial distress.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraiakan, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan evaluasi :

1. Bagi perusahaan yang masuk kedalam kondisi *grey area*, sebaiknya para manajemen lebih mengontrol lagi dalam mengelolah kondisi keuangan perusahaan. Agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil atau bahkan bisa mengalami kenaikan lagi agar perusahaan tersebut bisa masuk kedalam kondisi keuangan yang sehat dan terhindar dari financial distress.

2. Pihak manajemen perusahaan harus lebih berhati-hati dalam hal manajemen assetnya jangan sampai arus modal kerja dihasilkan bernilai negatif. Dan perusahaan juga harus terus mampu menjaga likuiditasnya dalam memenuhi semua kewajibannya pada saat jatuh tempo agar dapat menjaga kredibilitas perusahaan sehingga dapat menarik minat para investor dan kreditor

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperbanyak perusahaan untuk diuji, sehingga akan diperoleh sampel yang lebih banyak dan hasil yang lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil sampel di perusahaan Industri ataupun perusahaan perbankan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui seberapa sehat perusahaan-perusahaan tersebut ditahun berikutnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

[1] Burhanuddin, Rizky Amalia. 2015. *Analisis Penggunaan Metode Altman Z-Score Dan Metode Springate Untuk Mengetahui Potensi Terjadinya Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Semen Periode 2009-2013*. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

[2] Djalil, Titi Kurniati. 2015. *Analisis Financial Disstres Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Sub Sektor Keramik, Porselen, Dan Kaca Periode 2009-2013 Dengan Pendekatan Altman Z-Score Untuk Memprediksi Potensi Terjadinya Kebangkrutan*. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

[3] Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

[4] Harahap, Sofyan Syafri. 2012. *Teori Akuntansi*. Jakarta : Rajawali Pers.

[5] Kamal, St. Ibrah Mustafa. 2012. *Analisis Prediksi Kebangkrutan Pada Perusahaan Perbankan Go Public Di Bursa Efek Indonesia (Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score)*. Makassar : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

[6] Murhadi, Warner R. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
[7] Nugroho, 2012. *Analisis Prediksi Financial Distress Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score Modifikasi 1995 (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di Indonesia Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2010)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
[8] Peter Dan Yoseph, 2011. *Analisis Kebangkrutan Dengan Metode Z-Score Altman, Springate Dan Zmijewski Pada Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2005 – 2009*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Nomor 04 Tahun Ke-2 Januari-April 2011. Universitas Kristen Maranatha.
[9] Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit salemba Empat.
[10] Yuliastary, Etta Citrawati dan Made Gede Wirakusuma. (2013). *Analisis Financial Distress Dengan Metode Z-Score Altman, Springate, Zmijewski*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 6, No. 3

PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY PT. VADENSIL

Dina Mayang Sari[1], Wiwin Agustian[2], Yeni Widyanti[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
Radindinams@yahoo.com[1]
wiwinagustian@binadarma.ac.id [2]
yeniwidyanti@binadarma.ac.id [3]

ABSTRACT

This study aimed to analyze the Application of Tax Accounting Financial Statements On Property Company PT. Vadensil on activities in 2014 and see how changes to the financial statements and tax accounting. Data is done by observation, interviews, and documentation. The research used in this research is to use a descriptive approach, and the analytical techniques used are qualitative and descriptive. The results showed that overall PT. Vadensil Palembang has implemented tax accounting reasonably well although there is some confusion in the conduct of fiscal correction. Where PT. Vadensil Palembang in correcting fiscal (reconciliation) commercial financial report into the financial statements of the fiscal is not in accordance with the tax regulations in force today, as well as affect the amount of taxes to be paid to the company in the end is not subject to tax penalties.

***Keywords**: Tax Accounting, Financial Statements, the Company Property*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan yang sangat penting untuk perkembangan ekonomi suatu negara. Besar kecilnya pajak pada suatu negara sudah ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan rakyat negara tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan didalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan didalam pajak ini sangat penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Dengan adanya pajak keperluan pembangunan dapat dibiayai, sedangkan dana lebih dari pendapatan pajak yang tidak termasuk dalam biaya pembangunan merupakan tabungan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara demi keadilan yang merata. Jadi, kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara sangat tergantung dari pajak. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pajak merupakan suatu kewajiban sekaligus bentuk pengabdian dan peran aktif warga negara dalam rangka ikut melaksanakan pembangunan nasional.

Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) perusahaan. Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan prinsip perpajakan disebut akuntansi pajak, namun akuntansi ini dibatasi oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat disebut juga sebagai akuntansi statutori (Dian, 2014).

Laporan keuangan dalam suatu perusahaan sangatlah diperlukan bagi para Pemangku kepentingan *Stakeholder's*, seperti Manajer, Pegawai, Pemerintah, Kreditur, Analis keuangan, dan Akademisi. Laporan Keuangan yang handal dapat memberikan pengaruh positif bagi penggunanya. Karena fungsi dari laporan keuangan itu sendiri adalah memberikan informasi keuangan, dari mana saja modal diperoleh lalu penggunaan modalnya,lalu memberikan informasi berapa pendapatan dan laba setelah dikurangi beban-beban terutama beban pajak.

Dalam menganalisis laporan keuangan, maka diperlukanlah 3 laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Adanya beban pajak , restitusi pajak, dan pajak dibayar dimuka dan beban tangguhan pajak, menjadi hal yang menentukan penambahan

atau pengurangan laba dan mempengaruhi pula pada analisis laporan keuangan. Seperti yang telah dibahas, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak perlu di catat dalam laporan keuangan, agar laporan tersebut handal dan para pengguna laporan tidak meleset dalam hasil analisisnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis termovitasi untuk membahas masalah ini dengan judul penelitian "Penerapan Akuntansi Pajak Atas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Properti PT. Vandensil".

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Akuntansi Pajak

Akuntasi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah (Agoes, 2013).

Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan (Muljono, 2012).

2.2 Pajak Atas Penjualan Properti

Secara umum properti dapat didefinisikan dengan segala sesuatu benda yang dapat kita miliki. Properti sendiri dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu *real property, personal property, businesses property dan financial interests*. Menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI) properti didefinisikan sebagai konsep hukum yang meliputi seluruh kepentingan, hak dan keuntungan dari suatu kepemilikan. Terhadap pengertian tersebut maka kita dapat membedakan antara penguasaan fisik atas tanah dan atau bangunan yang dalam hal ini disebut dengan real estat serta kepemilikan secara hukum atau penguasaan yuridis yang disebut *real property* (Eddywahyudi, 2015).

2.3 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan selama satu periode, mengenai aktivitas perusahaan. Yakni berupa:

1. Aktivitas Bisnis
2. Aktivitas Perencanaan
3. Aktivitas Pendanaan (Financing Activities)
4. Aktivitas Investasi (Investing Activities)
5. Aktivitas Operasi (Operating Activities)

"Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut."

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa dokumentasi, observasi dan wawancara dan data sekunder berupa data PT. Vandensil Palembang khususnya pada kegiatan tahun 2014. Data dikumpulkan dari instansi terkait dan buku/literature yang relevan.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskritif kualitatif. Menurut Sanusi (2013 : 115) deskritif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis dan menilai semua data yang relevan dan fakta yang diperoleh dari objek yang dipilih serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum kemudian dari hasil analisis tersebut penulis mencoba menarik kesimpulan yang mewakili masalah-masalah yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Properti Pada PT. Vadensil Palembang

Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu Self Assesment System, PT. Vadensil Palembang bersifat aktif yaitu mendapatkan kewenangan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang ke kantor Pelayan Pajak (KPP) setempat, dimana PT. Vadensil Palembang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak. Adapun pajak yang dikenakan pada saat terjadinya transaksi penjualan rumah type RSS Type 36/90 serta RSH 42/100 pajak yang dikenakan yaitu :

Tabel 4.2
DATA PEMOTONGAN PAJAK BERDASARKAN TYPE RUMAH
PT. VADENSIL PALEMBANG
TAHUN 2014

NO	Type LB/LT	Harga Jual/ Unit	BPHTB (5%x(NPOP–NPOPTKP)	PPh Final	PPN
1	RSH 36/90	85.000.000	1.250.000	850.000 (PPh 1%)	0% (Tidak di kenakan PPN karena Mendapat Fasilitas)
2	RS42/100	150.000.000	4.500.000	15.000.000 (PPh 10%)	15.000.000 (10%)

Perubahan yang mendasar dengan adanya pemotongan pajak yang bersifat final adalah potongan pajak tersebut dianggap sebagai pembayaran atas pajak penghasilan terhutang, sehingga atas potongan tersebut tidak dapat dikreditkan kembali dengan PPh Badan tahun yang bersangkutan.Hal ini berbeda dengan ketentuan PPh Pasal 23 UU PPh, dimana potongan pajak merupakan pajak yang dibayar dimuka, sehingga atas potongan tersebut dapat diperhitungkan kembali dengan PPh Badan Tahun yang bersangkutan.

Pemotongan PPh sebesar 1 % dari harga jual rumah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 125/PMK.011/2012 pasal (2) yaitu

1. Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
2. Bagi Wajib Pajak Badan lainnya dan bagi Wajib Pajak Badan yang usahanyamelakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di luarkegiatan usaha pokoknya, pembayaran PPh-nya merupakan pembayaran PPhPasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan PPh Badan terutang.

Dengan demikian, tarif dan dasar pengenaan pajak baik berdasarkan PPNomor 79 Tahun 1999 maupun PP Nomor 71 Tahun 2008 adalah tetap 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan, kecuali untuk RSH, RS, dan rumah susun sederhana.

Analisis Perbandingan antara penerapan PPh Final PT. Vadensil Palembang dengan PP No 71 tahun 2008.

Penerapan akuntansi pajak properti yang ada pada perusahaan PT. Vadensil Palembang pada dasarnya sudah mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku untuk perusahaan property.

Dalam hal ini terutang pajak penghasilan terjadi pada saat pengakuan pendapatan, yaitu pada saat penerimaan uang muka. Perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas

tanah dan/atau bangunan pada PT. Vadensil Palembang telah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2008 yaitu :

1. 1% (dua persen) dari jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana.
2. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai penjualan atau pengalihanhak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah menengah ke atas..

Perhitungan-perhitungan tersebut membuktikan bahwa PT. Vadensil Palembang mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan. Dengan melihat tersebut tampak bahwa untuk pengenaan pajak penghasilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan, sehingga memenuhi unsur-unsurazas keadilan, kepastian hukum dan sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi dan perpajakan. telah mulai diterapkannya tarif pajak penghasilan final.

Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008, Pajak Penghasilan terutang wajib pajak badan termasuk PT. Vadensil Palembang yang dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2008, pengenaan 5% dari bruto nilai pengalihan hak dan/atau bangunan benar-benar bersifat final.

Analisis Laporan Keuangan Komersial PT. Vadensil Palembang

Berdasarkan data yang diperoleh di bagian Akunting PT. Vadensil Palembang diketahui laporan Laba Rugi perusahaan selama tahun berjalan 2014 yaitu disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Laporan Laba Rugi PT. Vadensil Palembang
Periode tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2014

PENDAPATAN USAHA	9.386.250.000
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG	3.908.735.880
LABA KOTOR	5.477.514.120
BEBAN USAHA	
Penjualan	459.760.000
Penyusutan Aset Tetap	91.250.000
Umum dan Administrasi	574.715.000
Jumlah Beban Usaha	1.125.725.000
LABA USAHA	4.351.789.120
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	
Penghasilan Bunga	611.992.857
Laba (Rugi) Selisih	15.000.000
Jumlah Pendapatan (Beban) lain-lain- Bersih	626.992.857
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.724.796.263
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	
Pajak Penghasilan	37.247.963
Taksiran Beban Pajak Penghasilan – Bersih	37.247.963
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	**3.687.548.300**

Sumber : PT. Vadensi Palembang

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa laba bersih perusahaan adalah sebesar Rp. 3.724.796.263,- dimana besarnya beban pajak penghasilan berdasarkan penjualan yaitu Rp. 37.247.963,-

Berdasarkan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal yang dimiliki oleh PT. Vadensil Palembang, terdapat beberapa koreksi fiskal yang dilakukan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan laporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perpajakan sehubungan dengan pembayaran pajaknya sebagai Wajib Pajak Badan dalam negeri, seperti pada biaya penyusutan (koreksi negatif), penghasilan bunga (koreksi negatif). Adanya pengkoreksian tersebut menyebabkan biaya yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan lebih dari yang sebelumnya. Penjelasannya yakni sebagai berikut:

1. Penyusutan Aset Tetap

Beban penyusutan pada laporan keuangan komersial PT. Vadensil Palembng adalah sebesar Rp 91.250.000,-. Akan tetapi, di dalam biaya penyusutan tersebut perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp.(26.875.000) sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi Rp 64.375.000 Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengelompokan aktiva tetap menurut laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut ketentuan perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun-tahun pertama, sedangkan menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) besarnya penyusutan sama setiap tahunya.

2. Penghasilan Bunga

Penghasilan bunga sebesar Rp 611.992.857,- dikeluarkan dalam perhitungan laporan laba rugi fiskal karena penghasilan bunga ini merupakan beban yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan usaha dari PT. Vadensil Palembang. Hal ini dikarenakan penghasilan bunga ini merupakan biaya yang dikeluarkan merupakan pengurang dari penghasilan usaha PT. Vadensil Palembang.

Bunga Deposito dan Jasa Giro yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut telah dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sehingga tidak boleh ditambahkan pada pendapatan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, yang menjelaskan bahwa bunga deposito, tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia(SBI) yang diterima baik oleh Wajib Pajak Badan maupun pribadi dipotong Pajak Penghasilan dan bersifat final.

Oleh karena itu PT. Vadensil Palembang perlu melakukan koreksi fiskal negatif untuk bunga deposito sebesar Rp. 611.992.857,-

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulakan bahwa pada perusahaan Properti PT. Vadensil Palembang melakukan koreksi fiskal(rekonsiliasi) laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal inidapat dilihat pada adanya perbedaan nilai penyusutan aktiva tetap pada daftar penyusutan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang dimana perusahaan belum mengikuti peraturan perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang penyusutan aktiva tetap.

6. REFERENSI

[1] Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Pepajakan edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat

[2] Anwar Sanusi, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

[3] Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

[4] Dewan Pengurus Pusat REI, 2014. *Perpajakan di Sektor Real Estate*. Jakarta: DPP REI.
[5] Dian Indah. 2014. *Akutansi Pajak*. (online) http://dianindahmasyithoh. blogspot.co.id /2012/06/pendahuluan-akuntansi-perpajakan.html
[6] Eddywahyudi, 2015. *Pajak Properti*, (online) http://eddiwahyudi.com/ 2014/04/property.jpg?w=770
[7] Fidelia Christina. 2011. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang* (online). http://eprints.mdp.ac.id/ 704/1/Jurnal%20 2009210043% 20Christina_Mahasiswa.pdf. diakses tanggal 10 Desember 2015. Jurnal : Universitas MDP
[8] Ika Lestaryanto .2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertamban Nilai Pada PT. Roman Indah Furnitama*. (online). http://www.academia.edu/9615106/Penerapan_Akuntansi_Pajak_Pertambahan_Nilai_PPn_Pada_Pthtml. diakses tanggal 05 Desember 2015
[9] Mulyono, Djoko. 2012. *Panduan Brevet Pajak - Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi.
[10] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 125/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar,Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
[11] Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
[12] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
[13] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
[14] Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 merupakan Perubahan Keempat atas undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
[15] Yohanes William Wijaya (2013), *Tax Review atas Penjualan Tanah dan Bangunan pada Sebuah perusahaan Properti*. Online. http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/456. Jurnal.

ANALISIS PERUBAHAN PTKP TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Doddy Sadewo [1)], Fitriasuri [2)], Yeni Widyanti [3)]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
[1]sadewododdy97@gmail.com
[2]fitriasuri@binadarma.ac.id
[3]yeniwidyanti@binadarma.ac.id

Abstract

Purpose of this study was to analyze changes in the Finance Minister Regulation No. PMK122 / PMK.010 / 2015 of taxable income adjustments on growth Revenue Income Tax (VAT) on KPP East Ilir Palembang and KPP Sekayu. This research uses descriptive quantitative method, the data source is a source of primary data and secondary data, where the source of this research is obtained from interviews and documentation. Results from this study showed that the growth rate of income tax revenue 21 does not affect the change in the taxable income of the tax office due WPOP number increases and salary increases and UMK also play a role in reducing the impact of the increase in taxable income to the Income Tax 21. As for article 25 of the year in both KPP 2014 decreased by 38%, but by 2015 after the change PTKP predetermined Minister of Finance Regulation No. PMK122 / PMK.010 / 2015 has increased. This is because this is due to the personal income who work as wiswasta / free work there is a tendency income is not fixed or fluctuating.

***Keywords**: changes in taxable income, Income Tax Revenue*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia sejak *Tax Reform* pada tahun 1983 telah menetapkan bahwa pajak akan dijadikan tulang punggung dalam membiayai pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang dasar 1945. Reformasi perpajakan diharapkan dapat mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menyempurnakan kebijakan perpajakan dan system perpajakan. Adanya reformasi perpajakan diharapkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dioptimalkan dengan menjunjung asas keadilan social serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun penerimaan pajak, yang dibawahi langsung Menteri Keuangan menetapkan beberapa jenis pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang hingga akhir tahun 2015 jenis pajak yang terbesar memberikan pemasukan kepada Negara. Sampai pada akhir tahun 2015 Pajak Penghasilan PPh memiliki kontribusi terbesar. Direktorat jendral Pajak dalam proses menghimpun pajak menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak yang berlapis yang dikenakan terhadap Penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi.

Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pertama kali terjadi pada tahun 1993 dengan terbitnya KMK No. 928/KMK.04/1993 tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai efektif pada tahun 1994. Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Berturut-turut setelah tahun 1994 perubahan itu terjadi sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1998 (KMK No.361/KMK.04/1998), 2000 (UU No.17 Tahun 2000), 2004 (KMK No.564/KMK.03/2004), 2005 (PMK No.137/PMK.03/2005), 2008 (UU No.36 Tahun2008), 2012 (PMK No 162/PMK.011/2012), dan yang terakhir 2015 (PMK.No 122/PMK.010/2015).

Tabel 1.1
Dasar Hukum

Dasar Hukum	UU No.7 Tahun 1983	UU No.10 Tahun 1994	UU No.17 Tahun 2000	564/KMK.03/2004	PMK 137.03/2005	UU No.36 Tahun 2008	PMK 162/PMK.011/2012	PMK 122/PMK.010/2015
Status WP	PTKP Setahun	PTKP setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun
TK/0	960	1.728.000	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000	24.300.000	36.000.000
TK/01	1.440.000	2.592.000	4.320.000	13.200.000	14.400.000	17.160.000	26.325.000	39.000.000
TK/02	1.920.000	3.456.000	5.760.000	14.400.000	15.600.000	18.480.000	28.350.000	42.000.000
TK/03	2.400.000	4.320.000	7.200.000	15.600.000	16.800.000	19.800.000	30.375.000	45.000.000

Sumber:Direktorat Jendral Pajak

Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilan dalam bentuk konsumsi maupun *saving*/tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPN dan pajak atas bunga dari *saving*/tabungan akan meningkat. Apabila terjadi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka hal ini akan dinikmati oleh masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/pegawai, dan buruh maupun WPOP yang memiliki pekerjaan bebas atau wiraswasta. PTKP yang disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut berada diatas Upah Minimum Kota (UMK). UMK yang rata-rata masih berkisar antara 1,5-2,5 Juta setiap bulannya, mengakibatkan masyarakat yang bekerja sebagai karyawan/ pegawai dan buruh di Palembang melaporkan SPT dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp.0,- atau nihil, apabila penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan namun tetap dibawah PTKP. Setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar WP dengan adanya kenaikan PTKP ini dari kota di Indonesia pada umumnya bagi Orang Pribadi yang baru berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh atau yang belum memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga pertumbuhan wajib pajak baru akan mengalami penurunan,dampak yang kemudian akan timbul adalah penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan mengalami penurunan. Hal ini sama yang dilakukan oleh penelitian Michael salim (2008) “Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasil pada KPP Pratama Ilir barat Palembang”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan KPP Pratama Sekayu

Rumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini akan merumuskan permasalahan adalah bagaimana Analisis perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Tingkat Pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 2012-2014 dan 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan KPP Pratama Sekayu?

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2009 (perubahan keempat) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut (mardiasmo,2013:169) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi,dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor17 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep. 545 Tahun 2003 tentang PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah Pajak yang dikenakan sehubungan dengan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk dalam pengertian imbalan berupa gaji upah, honorarium, tunjangan, uang pesangon, uang pensiun, bonus, hadiah, uang saku beasiswa, komisi dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Priabadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau bekerja sebagai wiraswasta/ pengusaha untuk setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Dasar Hukum PPh Pasal 25 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimanadiubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang yang beralamatkan di A.Rivai No. 4 dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau yang beralamatkan di jln.garuda

Operasional Variabel

Menurut Sugiyono, (2012:58) operasional Variabel adalah segalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut,kemudian ditarik kesimpulan.jadi dapat disederhanakan bahwa yang dimaksud variabel adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan penelitian tersebut.Data yang digunakan penulis adalah menggunakan data Kuantitatif yang sesuai dengan judul yang penulis yaitu analisis perubahan PTKP terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan

Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2012:58) Variabel bebas atau *Independent variabel* (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel Independen adalah PTKP.

Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2012:58) Variabel terikat atau *dependent variabel* (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen adalah Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan.

Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu dengan cara wawancara dan menggunakan Sekunder yaitu berupa buku/literature yang relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif Kuantitatif. Deskriptif Kuantitatif yaitu menjelaskan fakta dengan angka-angka menggunakan rumus-rumus rasio atau persentase dari rasio tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan.

Uji Beda

Uji-t dua sampel independen (*Independen Sampel t-Test*) digunakan untuk membandingkan selisih dua purata (*mean*) dari dua sampel yang idenpenden dengan asumsi data terdistribusi normal. Menurut Sugiyono (2012), tetapi karena datanya tidak berdistribusi normal. Maka peneliti menggunakan Uji beda Non Parametrik yaitu Uji beda Mann-Whitney U

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pertumbuhan

Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan

Tabel 4.1
Tingkat Perumbuhan Penerimaan Pajak KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Tahun	Dasar Hukum	PPh 21	Pertumbuhan%	PPh 25	Pertumbuhan %
2011	UU No.36 tahun 2011	220.582.275.722		12.619.399.954	
2012	PMK162/PMK.011 /2012	224.087.156.175	1,58%	14.123.859.418	11,92%
2013	PMK162/PMK.011 /2012	238.133.157.456	6,26%	13.131.585.207	-7,02%
2014	PMK162/PMK.011 /2012	252.056.532.961	5,85%	8.121.588.978	-38,15%
2015	PMK122/PMK.010 /2015	254.929.724.427	1,14%	8.861.507.026	9,11%
Rata-rata			3,70%		-6,03%

Sumber:KPP Pratama Ilir Timur Palembang 2011-2015

Tabel 4.2
Tingkat Perumbuhan Penerimaan Pajak KPP Pratama Sekayu

Tahun	Dasar Hukum	PPh 21	Pertumbuhan%	PPh 25	Pertumbuhan%
2011	UU No.36 tahun 2011	51.583.089.362		320.610.900	

2012	PMK162/PMK.011 /2012	63.708.212.454	23,50%	523.246.868	63,20%
2013	PMK162/PMK.011 /2012	67.290.946.416	5,62%	340.677.427	-34,89%
2014	PMK162/PMK.011 /2012	220.421.507.218	64.05%	209.338.453	-38,55%
2015	PMK122/PMK.010 /2015	225.364.696.819	2,24%	296.669.415	41,71%
Rata-rata			23,85%		7,86%

Sumber: KPP Pratama Sekayu 2011-2015

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan menunjukan bahwa KPP Pratama Ilir Timur Palembang dari tahun 2012-2015 terus mengalami kenaikan dengan tingkat rata-rata 3,70% untuk PPh pasal 21 dan 6,03 untuk PPh pasal 25. Hal ini sama dengan KPP Pratama Sekayu yang dari tahun 2012-2015 terus mengalami kenaikan dengan tingkat rata-rata 23,85 untuk PPh pasal 21 dan 7,86 untuk PPh pasal 25.

Uji Beda Mann-Whitney U

Berdasarkan hasil uji beda Mann-Whitney U adalah Nilai Z -630 dengan Asymp Sig.(2-tailed 0,529 lebih besar dari Nilai alphanya yaitu 0,05 sehingga diputuskan tidak terdapat perbedaan antara tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sekayu dan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Analisa Perubahan PTKP terhadap tingkat pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang dan KPP Pratama Sekayu

Dilihat dari penjelasan diatas, maka peneliti menganalisa bahwa perubahan PTKP tersebut tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Untuk Penerimaan Pajak penghasilan PPh pasal 21 di kedua KPP tersebut dari tahun ke tahun terus konsisten mengalami kenaikan ditahun 2015 setelah berubahnya PTKP yang baru sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 sebesar 1% untuk KPP Pratama Ilir Timur Palembang dan 2% untuk KPP Pratama Sekayu. Sedangkan penerimaan PPh pasal 25 orang Pribadi (Wajib Pajak yang bekerja sebagai sebagai wiraswasta/pengusaha/ pekerjaan bebas. terjadi penurunan ditahun 2013 sampai dengan 2014 sebesar 38% tetapi untuk tahun 2015 setelah ditetapkan PTKP yang baru menurut peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 mengalami kenaikan sebesar 41% untuk KPP Pratama Sekayu dan 9% untuk KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Artinya perubahan PTKP yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 menunjukkan bahwa, perubahan PTKP tersebut tidak mengakibatkan laju pertumbuhan PPh pasal 21 dan 25 orang pribadi di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang mengalami penurunan,malah semakin menaik.

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh perubahan PTKP terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

a. Berdasarkan hasil Analisis Tingkat Pertumbuhan yang dilakukan menunjukan bahwa perubahan PTKP mengakibatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (wajib, pajak, karyawan, pegawai, buruh) di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang mengalami kenaikan. Untuk KPP Pratama Sekayu rata-rata tingkat pertumbuhannya sebesar 23% dan untuk

KPP Pratama Ilir Timur Palembang sebesar 3% lebih kecil dibandingkan KPP Pratama Sekayu. Sedangkan penerimaan pajak penghasilan PPh pasal 25 di KPP Pratama Sekayu dan Ilir Timur Palembang mengalami penurunan ditahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar 38%, akan tetapi ditahun 2015 setelah ditetapkannya dalam peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 yang mulai berlaku pada 1 januari 2015 malah mengalami kenaikan sebesar 41 % di KPP Pratama Sekayu dan sebesar 9% di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

b. Berdasarkan hasil Analisis komperatif Uji beda Mann Whitney U yang dilakukan menunjukan bahwa Nilai Z -630 dengan Asymp Sig.(2-tailed 0,529 lebih besar dari Nilai alphanya yaitu 0,05 sehingga diputuskan tidak terdapat perbedaan antara tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Sekayu dan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Artinya perubahan PTKP yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 menunjukkan bahwa, perubahan PTKP tersebut tidak mengakibatkan laju pertumbuhan PPh pasal 21 dan 25 orang pribadi di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang mengalami penurunan,malah semakin menaik.

Saran

Berdasarkan hasil dari simpulan penelitian, penulis akan mencoba memberikan beberapa saran, yaitu:

a. Disarankan di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang agar tetap mempertahankan konsistensi dalam hal meningkatan pertumbuhan pernerimaan pajak penghasilan dan perlu melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak atau perluasan subjek pajak yang berkala, contohnya dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah KPP untuk mewajibkan semua karyawan memiliki NPWP atau menjadi Wajib Pajak.

b. Disarankan di KPP Pratama Sekayu dan KPP Pratama Ilir Timur Palembang meningkatkan kinerja pelayanan petugas saat menerima laporan pajak dari Wajib Pajak, hal tersebu untuk menghindarkan Wajib Pajak dari sikap malas untuk membayar pajak dikarenakan pelayanan yang kurang baik.

6. REFERENSI

[1] Andriyanto, Dimas. 2013. *Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan (Studi kasus pada KPP Pratama Malang dan KPP Pratama Banyuwangi)*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. Malang.

[2] Jonathan, Gorby. 2014. *Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat daerah kabupaten Kediri*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. Malang.

[3] Mardiasmo (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

[4] Nuritomo. 2011. *Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yogyakarta.

[5] Ramli. 2009. *Analisis perubahan PTKP terhadap penerimaan PPh pasal 21 dan ekonomi*. Jurnal Ilmiah Universitas Sumatra Utara. Medan.

[6] Republik Indonesia. *Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

[7] ---------- *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

[8] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

[9] Salim, Michel. 2008. *Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang*. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Palembang.
[10] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke-16. Bandung*: Alfabeta Bandung.
[11] Susyanti, 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang

PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WPOP TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PPH

Edi Junaidi[1], Fitriasuri[2], Yeni Widyanti[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
edy_junaidi92@yahoo.co.id[1]
fitria7878@yahoo.com[2]
yeniwidyanti@yahoo.co.id[3]

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an influence extending the tax and tax compliance levels partially or simultaneously on the level of income tax revenue. This study used secondary data obtained from the Tax Office (KPP) Primary Seberang Ulu Palembang and the Central Statistics Agency (BPS) of Palembang. Data analysis method used is the classic assumption test and subsequent testing of hypotheses. The statistical method used is multiple linear regression analysis. The results showed that partially, extending the tax does not affect the level of income tax revenue and the level of compliance of individual taxpayers a significant effect on the rate of income tax revenue to the Tax Office Primary Seberang Ulu Palembang. Extending the tax and compliance of individual taxpayer affect the level of tax revenue by 29.9%, while the remaining 70.1% is influenced by other factors not described in the regression.

Keywords*: Tax Extensification, Level Compliance, individual taxpayer, and the rate of Income Tax Receipts.*

I. PENDAHULUAN

Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi negara, karena saat ini pemerintah mengandalkan penerimaan sektor dari pajak untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negara seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, dan kemakmuran warga negara. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan masyarakat yang tentunya akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu melalui Ekstensifikasi pajak dan Intensifikasi pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dalam rangka memenuhi rencana penerimaan pajak yang terutang dalam APBN-P maka salah satu cara yang harus ditempuh oleh Dirjen Pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Selain kegiatan ekstensifikasi pajak, pemerintah mengharapkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima penghasilan. Indonesia menganut *self assessment system* atau sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak untuk melakukan sendiri penghitungan, penyetoran, dan pelaporan terhadap pajak terutang sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tingkat penerimaan pajak adalah ukuran seberapa besar pajak yang diterima oleh negara dari pembayaran pajak yang dilakuan Wajib Pajak terdaftar.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGENBANGAN HIPOTESIS

Ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi

Menurut SE-06/PJ.9/2001, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Syahputra dalam Wella Adrianti (2013:3), kepatuhan Wajib Pajak dapat definisikan sebagai berikut: "Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Wella Adrianti (2013:6) Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan adalah ukuran pajak yang diterima oleh pemerintah atau *fiscus* yang disetorkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah yang dibayarkan ke KPP yang sesuai dengan daerah tempat Wajib Pajak berada atau bank yang dapat menerima pembayaran pajak.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Wella Adrianti (2013) dalam studinya yang berjudul Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Kota Tanjung Pinang Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Tidak terdapat pengaruh ekstensifikasi pajak OP terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Ekstensifikasi pajak WP OP memiliki signifikansi lebih besar dari 0.05, yaitu 0.233. Sehingga H0 tidak dapat ditolak dan H1 tidak dapat diterima. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima.

Rahmat Alfian (2012) Universitas Negeri Surabaya dalam studinya yang berjudul Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak hanya mempengaruhi 30% penerimaan pajak. Sedangkan sisanya 70% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Divianto (2013) Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang dalam studinya yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Baturaja, Hasil pengujian Hipotesis kesatu (H1) dalam studinya ini yang menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 terdaftar dan SPT Tahunan PPh 21 yang dilaporkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja, dinyatakan Hipotesis kesatu (H1) dapat diterima. Nilai koefisien determinan (adjusted R2) diperoleh hanya sebesar 0.944 atau 94.4%.

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Operasional Variabel

1) Variabel independen dalam penelitian ini adalah ekstensifikasi pajak (X_1) dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X_2)
2) Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penerimaan pajak penghasilan (Y).

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Teknik Observasi
2. Studi Kepustakaan

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah data yang dimasukan dalam pengujian ini sebanyak 36 data (3 tahun penelitian) dan dapat diketahui bahwa:

Tabel 4.2
Profil Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

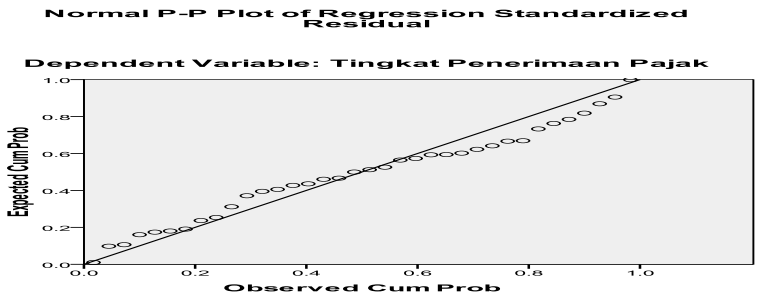
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ekstensifikasi Pajak	36	.1155	.3915	.227294	.0779974
Tingkat Kepatuhan WP OP	36	.0014	3.2361	.294298	.8092148
Tingkat Penerimaan Pajak	36	.0962	2.7052	.787756	.4189052
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data primer diolah

1. Variabel ekstensifikasi pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0,227294, hal ini menunjukan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menjadi sampel mempunyai standar deviasi 0,0779974, dari 36 sampel variabel ekstensifikasi pajak yang memiliki nilai maksimum 0,3915, nilai minimum 0,1155.
2. Variabel tingkat kepatuhan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,294298, hal ini menunjukan bahwa sebagian besar Waji Pajak yang menjadi sampel mempunyai standar deviasi 0,08092148, dari 36 sampel variabel tingkat kepatuhan yang memiliki nilai maksimum 3,2361, nilai minimum 0,0014.
3. Variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,787756, hal ini menunjukan bahwa sebagian besar Wajib Pajak yang menjadi sampel mempunyai standar deviasi 0,4189052, dari 36 sampel variabel tingkat penerimaan pajak penghasilan yang memilki nilai maksimum 2,7052, nilai minimum 20,962.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Berikut Grafik 4.1 yang menggambarkan Hasil Uji Normalitas pada penelitian ini.



Grafik 4.1
Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan grafik hasil uji normalitas di atas, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil pengujian multikolonieritas sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.901	.188		4.790	.000		
Ekstensifikasi Pajak	.868	.796	.162	1.090	.283	.967	1.034
Tingkat Kepatuhan WP OP	.286	.077	.553	3.732	.001	.967	1.034

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan Pajak

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil multikolonieritas pada tabel 4.3 diatas diinterpretasikan sebagai berikut

1. Variabel ekstensifikasi pajak OP menunjukan nilai *tolerance* sebesar 0,967 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,034 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ekstensifikasi pajak OP yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.
2. Variabel tingkat kepatuhan menunjukan nilai *tolerance* sebesar 0,967 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1,034 < 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kepatuhan yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil pengujian autokorelasi sebagai berikut:

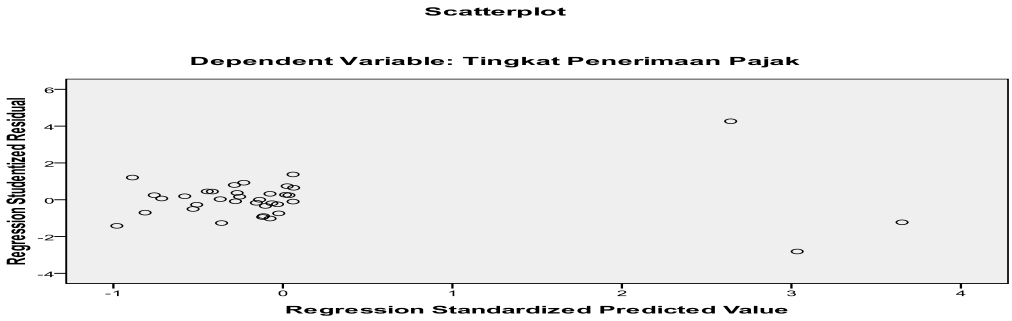
Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.904

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai durbin watson sebesar 1,904, nilai dL sebesar 1,354 dan dU sebesar 1,587 (tabel DW; K=2, N=36). Oleh sebab itu dapat dikategorikan bahwa nilai d terletak antara dU dan 4-dU (1,587 < 1,904 < 2,413).

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas terlihat penyebaran titik – titik tidak membentuk pola hal ini berarti tidak adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Regresi Berganda

Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Berganda

Model		B	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.901		4.790	.000
	Ekstensifikasi Pajak	.868	.162	1.090	.283
	Tingkat Kepatuhan WP OP	.286	.553	3.732	.001

a. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel 4.3 didapat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0{,}901 + 0{,}868X1 + 0{,}286\ X2$$

Berdasarkan persamaan di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,901 berarti bahwa tanpa adanya ekstensifikasi pajak (X1) dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X2), maka tingkat penerimaan pajak tidak akan mencapai target pajak yang direncanakan.
2. Nilai koefisien regresi variabel ekstensifikasi pajak (X1) sebesar 0,868 yang berarti bahwa jika nilai variabel ekstensifikasi pajak meningkat sebesar 1% maka tingkat penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,868% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X2) sebesar 0,286 yang berarti bahwa jika nilai variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat sebesar 1% maka tingkat penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,286% dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil pengujian hipotesis berganda sebagai berikut;

Tabel 4.6
Hasil Uji Hipotesis Berganda

Model		df	F	Sig.
1	Regression	2	7.054	.003[a]
	Residual	33		
	Total	35		

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepatuhan WP OP, Ekstensifikasi Pajak
b. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,003 (F hitung sebesar 7,054) lebih kecil dari standar nilai signifikansi sebesar 0,05.

Uji Korelasi (Uji R) dan Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh hasil pengujian korelasi dan koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.547[a]	.299	.257

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepatuhan WP OP, Ekstensifikasi Pajak
b. Dependent Variable: Tingkat Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 0.547 artinya terdapat hubungan yang cukup erat antara variabel ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak.

Pembahasan

Ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi variabel ekstensifikasi pajak sebesar 0,283 (t hitung sebesar 1.090) lebih besar dari standar nilai signifikansi 0,05.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adrianti (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan ekstensifikasi pajak OP terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Menurut SE-06/PJ.9/2001, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Sedangkan untuk Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Hal ini terlihat bahwa signifikansi variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,001 (t hitung sebesar 3,732) lebih kecil dari standar nilai signifikansi sebesar 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Divianto (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama Palembang seberang ulu secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,003 (nilai F hitung sebesar 7,054) lebih kecil dari standar nilai signifikansi sebesar 0,05.

Nilai korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 0.547 artinya terdapat hubungan yang cukup erat antara variabel ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak.

Kemudian diperoleh nilai *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0.299 artinya variabel ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempengaruhi variabel penerimaan pajak sebesar 29,9%. Hal ini berarti sekitar 29,9% tingkat penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak ora9ng pribadi, sedangkan sisanya sebesar 70,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kemudahan proses perpajakan dan lain sebagainya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara deskriptif Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi direktorat jenderal pajak(ekstensifikasi pajak) masih kurang optimal. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel ekstensifikasi pajak OP dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh ekstensifikasi pajak OP terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
2. Secara deskriptif tingkat kepatuhan WP OP yang terdatar pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu belum memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Berdasarkan pengujian hipotesis secara parsial untuk variabel tingkat kepatuhan WP OP dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan untuk variabel ekstensifikasi dan tingkat kepatuhan WP OP dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari standar nilai signifikansi sebesar 0,5 terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Sehingg$_{a\ H0}$ ditolak dan Ha diterima dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Dan nilai koefesien determinasi *(Adjusjted R Square*) Variabel ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempengaruhi variabel penerimaan pajak sebesar 29,9%. Hal ini berarti sekitar 29,9% tingkat penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sisanya sebesar 70,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kemudahan proses perpajakan dan lain sebagainya.

6. REFERENSI

[1] Adrianti, Wella. 2013. *Pengaruh Ekstensifikasi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (Pratama) Kota Tanjungpinang, (online), (http://jurnal.umrah.ac.id/?=1488*, diakses 16 januari 2014). Tanjungpinang Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

[2] Alfian, Rahmat 2012. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhaap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembanga*. Studi. Universitas Negeri Surabya.
[3] Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001, Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.
[4] Direktorat Jenderal Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-175/Pj./2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikas Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.
[5] Divianto (2013). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja. Studi.* Politeknik Negeri Sriwijaya.
[6] Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
[7] Rahayu, Kurnia, Siti. 2013. *Perpajkan Teori dan Teknis Perhitungan*, Edisi Kedua, Graha Ilmu. Yogyakarta.
[8] Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
[9] Rusniasari, Nopa. 2013. *Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak.* Dalam Studinya Universitas Komputer Indonesia.
[10] Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Peneletian Bisnis*. Salemba Empat: Jakarta
[11] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
[12] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang "*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"*.
[13] Waluyo. 2014. *Perpajkan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

PENGARUH ASPEK BUDAYA TERHADAP PRINSIP AKUNTANSI BERTERIMA UMUM PADA PEDAGANG MODEL DAN TEKWAN

[1]Effri Diantara, [2]Siti Nurhayati Nafsiah, [3]Jaka Darmawan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Darma
Email :[1]efridiantara@yahoo.co.id,[2]siti_nurhayati@binadarma.ac.id,[3]jakadarmawan@yahoo.co.id

ABSTRACK

This study aims to determine the effect of Cultural Aspects Against General Acceptable Accounting Principles In the Merchant Model And Tekwan In the town of Pangkalan Balai Banyuasin. The population in this study is a model and tekwan traders in the City Hall Banyuasin Base . Based on qualitative analysis , with the approach of observation and interviews , unnoticed by traders models and tekwan City Hall Base Banyuasin , they have been using one of the General Acceptable Accounting Principles , namely sustainability (going concern) .

Keywords : *General Acceptable Accounting Principles and Going Concern*

1. PENDAHULUAN

Telah kita ketahui, bahwa Indonesia masih sangat kental unsur budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari termasuk didalamnya kegiatan berbisnis. Latar belakang budaya seseorang dapat menentukan perilaku dan sikapnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, serta perspektif dalam mengambil keputusan. Misalkan dalam berbisnis kita dapat mengetahui perbedaan cara berbisnis etnis tertentu dengan etnis yang berbeda. Sebagai contohnya di indonesia sendiri, setiap etnis memiliki karakteristik tersendiri dalam berbisnis. Salah satunya etnis Melayu yang mementingkan pencitraan dalam sehari-harinya, menjunjung tinggi kebersamaan dan selalu menjalin hubungan silahturahmi.

Jika dilihat lebih mendalam, pengaruh budaya bisnis tersebut nantinya juga akan mempengaruhi bentuk praktik akuntansi yang dijalankan. Hal ini lah yang menyebabkan praktik akuntansi mengalami sejarah dan perkembangan yang unik seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Budaya lokal suatu masyarakat akan memberikan gaya praktik akuntansi yang sedang berjalan. Ide-ide yang muncul atas praktik akuntansi yang dipengaruhi oleh budaya lokal suatu kelompok jelas berbeda dengan praktik akuntansi yang dipengaruhi budaya lokal kelompok lainya.

Hampir sebagian besar wilayah di Indonesia beretnis melayu, salah satu wilayah di Indonesia tersebut yang beretnis Melayu adalah Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Pangkalan Balai Banyuasin. Etnis Melayu di Kota Pangkalan Balai Banyuasin dalam melakukan bisnis memiliki ritme yang lebih lambat dibandingkan etnis Minang dan Tionghoa. Menurut Raden Gunawan S.Sos dan Lili Hambali (2005), yang mereka tulis dalam lagu sedulang setudung, *Urang Belei* atau sebutan untuk orang Pangkalan Balai Banyuasin adalah orang yang *bedulur*, *rejin*, dan *akor*. Yang mana jika diartikan orang Pangkalan Balai Banyuasin adalah orang yang menjunjung persatuan dan kesatuan.

Kesatuan merupakan tata cara atau aturan perilaku yang menjadi kesepakatan bersama dalam suatu masyarakat tertentu. Karena itu dapat ditarik kesimpulan, budaya juga berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian disuatu daerah. Hal itu dapat dipengaruhi oleh perbedaan etnis, filosofi, maupun pendidikan yang didapatkan sejak pertama dalam keluarga. Sehingga membangun watak dan karakteristik tertentu dan menentukan bagaimana budaya tersebut berkembang di masyarakat dan implikasinya terhadap beberapa faktor di kehidupan sehari-hari.

Terutama pada usaha mikro yang notabene adalah industri rumahan, yang tentu saja dalam perkembangan bisnisnya akan selalu terbawa lingkungan sekitar yang turut mempengaruhi perilaku

usaha. Usaha model dan tekwan di kota Pangkalan Balai Banyuasin menjadi salah satu penggambaran usaha mikro yang berhasil berkembang di kota tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Ada banyak fenomena yang terjadi pada usaha model dan tekwan di kota Pangkalan Balai Banyuasin. Beberapa dari fenomena tersebut ialah para pedagang tidak mencatat semua kegiatan usaha mereka, dengan alasan ribet kalau mencatat transaksi tersebut. Fenomena lainya yang terjadi ialah mereka tidak menggunakan hitung-hitungan tertentu dalam penentuan harga pokok produksinya, mereka hanya menggunakan hitungan kira-kira, dan masih banyak lagi beberapa fenomena-fenomena yang ditemukan penulis di lapangan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahnya yaitu "Bagaimana Interaksi Aspek Budaya Terhadap Prinsip Akuntansi Berterima Umum Pada Pedagang Model dan Tekwan Tahun 2015 ?"

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Interaksi Aspek Budaya Terhadap Prinsip Akuntansi Berterima Umum Pada Pedagang Model dan Tekwan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Budaya

Menurut Fahmi (2014:49), budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan selama waktu yang lama akan mempengaruhi pola pembentukan dari suatu masyarakat, seperti kebiasaan rajin bekerja, dan kebiasaan ini berpengaruh secara jangka panjang yaitu pada semangat rajin bekerja yang terus terjadi hingga di usia senja, begitu pula sebaliknya jika sudah terbiasa malas dan tidak suka bekerja maka itu yang akan terbawa hingga pada saat menjadi kakek nenek.

2.2 Prinsip Akuntansi Berterima Umum

1. Prinsip Entitas Ekonomi (*Economic Entity Principle*)

Prinsip Entitas Ekonomi atau yang sering juga disebut prinsip kesatuan entitas merupakan konsep kesatuan usaha dimana akuntansi menganggap bahwa perusahaan adalah sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan pribadi pemilik ataupun entitas ekonomi yang lain. Akuntansi memisahkan dengan jelas kekayaan atau aset perusahaan tidak boleh dicampur dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Jadi seluruh pencatatan atas seluruh transaksi yang terjadi tidak diperbolehkan bercampur antara pencatatan usaha dengan transaksi pemilik.

2. Prinsip Periode Akuntansi

Pada Prinsip Periode Akuntansi atau yang juga disebut prinsip kurun waktu, penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu, hal ini bertujuan supaya informasi keuangan bisa dihasilkan tidak harus menunggu usaha yang tengah dijalankan tutup. Umumnya, perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode periode akuntansi semisal dimulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember.

3. Prinsip Biaya Historis

Prinsip Biaya Historis mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Apabila terjadi proses tawar menawar, yang dinilai adalah harga jadi sesuai kesepakatan. Berbagai cara bisa digunakan dalam menilai sebuah aset yang dibeli meliputi nilai buku, nilai pasar, nilai ganti ataupun nilai tunai. Dalam

standar GAAP, Prinsip ini harus mempergunakan harga perolehan atau yang juga disebut juga harga akuisisi didalam pencatatan perolehan aset (aktiva), Hutang, Modal (equitas) dan biaya.

4. Prinsip Satuan Moneter

Prinsip Satuan Moneter menyatakan bahwa pencatatan transaksi hanya yang dinyatakan didalam bentuk mata uang tanpa melibatkan bagian non-kualitatif semisal mutu, prestasi, kestrategisan usaha dan lain lainnya yang tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang tidak bisa dilaporakan pada laporan keuangan walau informasi informasi ini bisa jadi sangat relevan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dengan satuan uang.

5. Prinsip Kesinambungan Usaha (Going Concern)

Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas bisnis berjalan secara terus menerus berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya

6. Prinsip Pengungkapan Penuh (Full Disclosure Principle)

Laporan keuangan harus menyajikan informasi informasi yang informatif serta dimaklumkan sepenuhnya. Prinsip Pengungkapan Penuh merupakan prinsip dimana akuntansi menyajikan informasi yang sangat lengkap dalam laporan keuangan. Namun, dikarenakan informasi infrmasi yang disajikan adalah berupa ringkasan atas seluruh transaksi transaksi yang terjadi dalam satu periode dan juga terdapat pada saldo saldo dari rekening tertentu, maka tidak mungkin seluruhnya bisa tercover semua didalam laporan keuangan.

7. Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle)

Pendaptan adalah kenaikan harta yang diakibatkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, persewaan dan yang lainnya. Adanya aliran masuk aktiva atau harta yang ditimbulkan dari penyerahan baran ataupun jasa yang dilakukan oleh sebuah entitas usaha selama periodetertentu. Dasar yang dipergunakan untuk mengukur besar kecilnya pendapatan adalah jumlah kas ataupun setara kas (ekuivalennya) yang diperoleh atas transaksi penjualan dengan pihak yang lain.Pendapatan diakui ketika terjadi penjualan barang ataupun jasa, dan ada kepastian tentang jumlah besar kecilnya yang bisa diukur handal dengan harta yang diperoleh. Namun ketentuan ini tidak selalu bisa diterapkan sehingga akhirnya muncul ketentuan ketentuan lain untuk bisa mengakui pendapatan. Ketentuan lain ini semisal pengakuan pendapatan ketika produksi telah selai, selama barang diproduksi serta ketika kas atau yang setara kas telah diterima.

8. Prinsip Mempertemukan(Matching Principle)

Prinsip Matching dalam akuntansi maksudnya adalah biaya yang dipertemukan / di''matching''kan dengan pendapatan yang diterima, ini dimaksudkan untuk menetukan besar kecilnya penghasilan bersih ditiap periode. Dalam prinsip ini sangat bergantung pada penentuan pendapatan, jika pengakuan pendapatan ditunda contohnya, maka pembebanan baya juga tidak bisa dlakukan hingga pendapatan diakui.

9. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

Prinsip Konsistensi adalah prinsip dimana metode metode atau prinsip akuntansi yang dipergunakan dalam pelaporan keuangan tetap digunakan secara konsisten, tidak berubah ubah

metode dan prosedur. Metode dan prosedur yang dipergunakan perusahaan dalam proses akuntansi harus dilakukan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, sehingga bisa dengan cepat diketahui apabila ada perbedaan perbedaan dengan metode yang sama.

10. Prinsip Materialitas

Penerapan akuntansi didasarkan pada teori untuk menyeragamkan seluruh aturan, namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori teori yang ada, Maka dari itu tak jarang terjadi adanya pengungkapan informasi yang sifatnya material ataupun mmaterial Prinsip Prinsip Akuntansi tersebut diatas semestinya diterapkan dengan kesuaian dan ranah akuntansi yang berorientasi kepada pengguna laporan keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

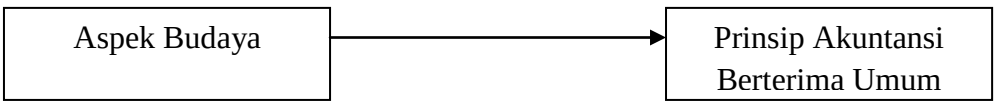
Penelitian terdahulu menggambarkan bentuk praktek akuntansi yang terpengaruh oleh tema budaya dan karakteristik masyarakat. Mereka tidak akan berfokus, bagaimana mencari laba sebesar-besarnya. Tetapi yang mereka cari adalah bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara mengolah dan menjual olahan kedelai dan raginya tersebut. Selain itu walaupun tingkat persaingan yang sangat tinggi, mereka dapat menangani hal tersebut dengan bijak dan percaya bahwa nilai-nilai religius akan membantu dalam usaha mereka, Galuh Purbaningtyas (2013).

Shavira Zalshabila dan Aji Dedi Mulawarman (2012) dengan penelitian mereka yang berjudul *javanese price setting*: refleksi fenomenologis penentuan harga pokok produksi pedagang bakso di kota malang mengungkapkan, Pedagang bakso, yang sebagian besar adalah orang Jawa, selalu berusaha menepati norma-norma budaya yang telah disepakati, untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang penuh ketentraman, kedamaian dan ketenangan. Norma norma ini melahirkan berbagai falsafah dan prinsip hidup, misalnya *sepi ing pamrih rame ing gawe*, falsafah dan prinsip hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat Jawa menganggap menafkahi keluarga adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai kepala keluarga. Karenanya, upah yang secara teori seharusnya dibebankan dalam usaha, malahan dianggap sebagai suatu kewajiban.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Dapat dilihat dari gambar di atas maka penulis akan meneliti apakah interaksi yang terjadi antara Aspek Budaya dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3.2 Operasional Variabel

Adapun Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aspek budaya. Dan yang menjadi variabel terikat atau variabel tergantung (*dependent variable*) adalah variabel yang di pengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini Prinsip Akuntansi Berterima Umum digunakan sebagai variabel terikat.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang model dan tekwan di kota Pangkalan Balai Banyuasin. Jumlah pedagang model dan tekwan yang berada di kota pangkalan balai yaitu kurang lebih 35 pedagang model dan tekwan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini dapat dilakukan pengumpulan data-data yang memiliki hubungan dengan pokok masalah yang dibahas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Teknik pengumpulan menggunakan :

a. Observasi
b. Wawancara

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian lalu menganalisis unsur-unsur yang termasuk dalam interaksi aspek budaya dalam akuntansi serta menganalisa interaksi aspek budaya dalam akuntansi terhadap Prinsip Akuntansi Berterima Umum pedangang model dan tekwan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Masyarakat Pangkalan Balai Banyuasin

Dari hasil penelitian dan berbagai sumber yang di dapatkan oleh peneliti maka dapat diketahui karakteristik masyarakat Kota Pangkalan Balai Banyuasin yaitu :

a. *Bedulur* (Kekeluargaan) ; Masyarakat Pangkalan Balai sangat menjaga hubungan silahturahmi antara sesama, dan mereka sangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Untuk menjalin hubungan silahturahmi mereka terus dan tetap menggunakan adat *manggel* (kumpul dan berbagi cerita di rumah warga yang mengadakan hajatan).

b. *Rejin*. Yang dimaksud dengan *Rejin* adalah gotong royong. Masyarakat Pangkalan Balai Banyuasin dalam melaksanakan pekerjaan selalu dengan gotong royong. Hal ini terlihat pada kegiatan yang dilakukan masyarakat Pangkalan Banyuasin yang selalu mereka lakukan dengan gotong royong. Gotong royong masyarakat Pangkalan Balai Banyuasin juga tertuang dalam lagu daerah Banyuasin yang berjudul ngudang, yang berbunyi *ede gewe mintak digeweke, ade makanan mintak dimakanke, ebis dek katik yang nak dimakanke kite bekumpol besame-same*. Dari potongan lagu tersebut kita dapat mengetahui sifat gotong royong mereka.

c. *Akor*. Yang dimaksud dengan akor adalah rukun. Masyarakat Pangkalan Balai Banyuasin selalu saling menghormati satu sama lainya, dengan saling menghormati mereka selalu hidup rukun, aman dan tentram. Selain itu masyarakat Pangkalan Balai Banyuasin juga sangat rukun dengan para pendatang, Seperti yang tertuang dalam lagu daerah Banyuasin yang berjudul *Sedulang Setudung* yang berbunyi : *urang detang nan jedi bedulor, jedi penduduk rejin dan akor* yang mana artinya mereka sangat menerima dan menghormati para pendatang di Kota mereka.

Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi, khususnya akuntansi, masyarakat Pangkalan Balai Banyuasin menganut prinsip keberlangsungan usaha dengan pemahaman yang berbunyi *kalu hari ini jedila lain dengen hok pegi, hok pegi kite nyari pule*, Ini bisa diartikan bahwa para pedagang modeldan tekwan di kota Pangkalan Balai Banyuasin secara tidak langsung memahami dan menggunakan prinsip akuntansi tersebut dalam menjalankan usahanya.

4.2 Realita Praktek Akuntansi pada Usaha model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin

Usaha model dan tekwan ini dapat dikategorikan sebagai usaha mikro kecil menengah. Dalam perkembangannya di Kota Pangkalan Balai Banyuasin usaha ini mengalami perkembangan yang

sangat pesat, tercampur oleh budaya yang berkembang di dalam masyarakatnya dan mempengaruhi aspek usaha termasuk di dalamnya praktek akuntansi. Disertai dengan saratnya budaya kekeluargaan dan tingginya tingkat kepercayaan, membuat kesadaran akan praktek akuntansi sangat kurang di sebagian besar para pemilik usaha. Kenyataan ini diketahui ketika peneliti menanyakan praktek akuntansi yang dijalani, dan tidak ada satu pun informan yang memahami prinsip dan praktek akuntansi semacam apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Sehingga peneliti harus menjabarkan lebih rinci gambaran prinsip dan praktek akuntansi yang dimaksud,ke pedagang model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin.

4.2.1 Keberadaan Prinsip Akuntansi Kesinambungan Usaha (*Going Concern*) pada Pedagang model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai

Para pedagang model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin, tanpa disadari menggunakan prinsip akuntansi berlaku umum yaitu, kesinambungan usaha (*Going Concern*). Hal ini dilihat dari hasil obsevasi dan beberapa ungkapan dari para pedagang model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin. Seperti yang diungkapkan oleh Jok Rudi sebagai berikut :

"...Ye yang penting asak hok tu pegi pacak juelan legi jeng."

Yang mana arti dari ungkapan tersebut pedagang menginginkan kesinambungan dari usaha mereka.

Prinsip akuntansi berlaku umum kesinambungan usaha (*Going Concern*) yang dilakukan oleh pedagang model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin dapat dilihat juga dari ungkapan Bek Lina sebagai berikut yang maksut dari ungkapanya ingin membiayai anak sekolah ;

"...ye kalu tuk belenje budek sekolah jedilah..."

"...Ye kalu hari ini jedilah, hok pegi kite nyari yang lain pule."

Dapat peneliti simpulkan dari ungkapan di atas, mereka ingin usahanya tetap berjalan, dengan alasan mereka ingin anaknya tetap bersekolah dengan usahanya tersebut.

Dan masih banyak lagi beberapa perilaku dan ungkapan yang ditemukan peneliti dan dilakukan oleh pedagang model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin, yang membuktikan mereka melakukan prinsip akuntansi berlaku umum kesinambungan usaha (*Going Concern*).

Selanjutnya para pedagang model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin mengaku tidak melakukan praktek akuntansi apapun dalam usaha yang dijalankannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang mendasarinya, contohnya adalah merasa tidak praktis dalam penggunaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Wak Roh sebagai berikut ;

" ...Yah dek tegewe jeng yang cak itu tu, sare, melembetke gewe be. La tebiese juge ken dek nyatat tu".

Peneliti sempat berpendapat jika hal ini terjadi pada usaha model dan tekwan dalam skala yang lebih kecil saja. Di mana produksi masih dalam skala terbatas. Tetapi ternyata, proses pencatatan juga tidak dilakukan pada pemilik dengan usaha yang lebih besar, seperti yang diungkapkan Cek Yar sebagai berikut ;

"...Mane pule jeng tegewe yang cak itu, asak sok pegi pacak bejelen legi bererti lancar usaha kite tu ken."

Dalam penelitian sebelumnya, praktek akuntansi dalam rumah tangga maupun usaha mikro terbagi menjadi dua yaitu, akuntansi dengan tulisan dan akuntansi tanpa tulisan. Maka hal tersebut juga menjadi acuan peneliti dalam mengklasifikasikan praktek akuntansi yang ada pada usaha model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin. Yang selanjutnya peneliti menemukan bahwa praktek akuntansi tanpa catatan lebih menonjol dibandingkan dengan akuntansi dengan catatan.

Jacob dan Kemps menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan akuntansi pada usaha mikro, dalam studi kasusnya di Bangladesh. Terdapat empat faktor yang dijabarkan untuk menjelaskan ketiadaan maupun keberadaan akuntansi di Bangladesh yaitu pertama

ketiadaan permintaan institusi atau negara mengenai bentuk akuntasi pada usaha mikro. Kedua tingkat melek huruf yang masih rendah di Bangladesh. Ketiga, orientasi bisnis usaha mikro yang masih cenderung berbasis kas sehingga cenderung membatasi penggunaan akuntansi. Keempat budaya masyarakat yang kental akan rasa percaya dan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan kepadanya membuat akuntansi menjadi tidak berguna.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang Pengaruh Aspek Budaya Terhadap Prinsip Akuntansi Berterima Umum Pada Pedagang Model dan Tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Para pedagang model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin, tanpa disadari menggunakan prinsip akuntansi berlaku umum yaitu, kesinambungan usaha (*Going Concern*).
2. Walaupun Para pedagang model dan tekwan di Kota Pangkalan Balai Banyuasin mengaku tidak melakukan pencatatan dalam kegiatan usahanya, tetap tanpa mereka sadari, mereka telah melakukan praktik akuntansi usaha mikro tanpa catatan. Hal ini dilihat dari hasil obserbasi yang mana mereka melakukan hal tersebut.

6. REFERENSI

[1] Arifin, Andiza. 2014. *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik*. Universitas Hasanudin.

[2] Fahmi, Irham . 2014. *Perilaku Organisasi*. CV Alfabeta, Jakarta.

[3] IAI. 2012. *Pengantar Akuntansi (berbasis SAK ETAP).* Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Palembang.

[4] Kreitner, Robert dan Kinicki, Angelo. 2014. *Perilaku organisasi*. Salemba Empat, Jakarta.

[5] Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Salemba Empat. Jakarta Selatan.

[6] Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi.* PT Rineka Cipta, Jakarta.

[7] Pangabean, Hana, dkk. 2014. *Kearifan Lokal Keunggulan Global*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

[8] Purbaningtyas, galuh. 2013. Interaksi Aspek Budaya Dalam Akuntansi Pada Industri Kripik Tempe Di Kota Malang. Universitas Brawidjaya.

[9] Ramadhan, Aditya. 2012. *Pengaruh Dimensi Nilai Budaya Terhadap Nilai Akuntansi*. Universitas Diponegoro Tika, Mohammad Pabunda. 2010. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan.* PT Bumi Aksara, Jakarta.

[10] Sanusi, Anwar. 2013. *Methodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.

[11] Suartana, Wayan. 2010. Akuntansi Keperilakuan. CV Andi Offset. Yogyakarta.

[12] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung.

[13] Tripambudi, Norman. 2014. *Pengaruh Budaya Organisasi Dan Struktur Organisasi Pada Sistem Informasi Akuntansi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Akuntansi*. Universitas Diponegoro.

[14] Zalshabila, Shavira, dkk. 2012. *Javanese Price Setting: Refleksi Fenimenologis Harga Pokok Produksi Peagang Bakso Di Kota Malang*. Universitas Brawidjaya.

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH

Eko Herminto[1], Poppy Indriani[2], Citra Indah Merina[3]
[1,2,3]Universitas Bina Darma Palembang
[1]Ekoherminto@yahoo.com
[2]poppy.indriani@binadarma.ac.id
[3]Citra_ims@yahoo.com

Abstract

This study aimed to test the local financial independence and balance funds as DAU, DAK, DBH to the expenditure areas in the counties and cities in the province of South Sumatra in 2011 - 2013, data used in this research is data quantitative secondary. Based on the results of hypothesis testing, local financial independence has significant positive effect on local expenditure, general allocation fund has significant positive effect on regional spending, and revenue sharing fund has significant positive effect on regional spending. whereas positive special allocation funds not significant to the expenditure area. The simultaneous independent variables such as Local Financial Independence, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and DBH Impact of regional expenditure .

Keywords*: local financial independence, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund.*

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir tahun 1998 di Indonesia telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi. Atas perubahan ini dikeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di revisi dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar, 2012 dalam Wulandari 2014).

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 17 mendefinisikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengandung unsur Pendapatan dan Belanja. Pendapatan yang dimaksud adalah sumber-sumber penerimaan untuk membiayai daerah tersebut, sedangkan Belanja adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui belanja daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor publik. Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah merupakan perkiraan beban pegeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian layanan umum. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah itu sendiri, maupun sumber daya penerimaan dari luar, berupa Dana Perimbangan dari pusat. Pada prinsipnya semakin besar PAD terhadap APBD maka akan

menunjukkan semakin kecilnya ketergantungan daerah kepada pusat, maka daerah daerah tersebut sudah memiliki kemandirian daerah, begitu juga sebaliknya.

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Jumlah keseluruhan dana alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara kepada Provinsi kota/kabupaten tertentu dengan tujuan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) ini diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dengan Pemerintah Daerah dan PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam belanja daerahnya yang diberikan melalui mekanisme pengalokasian Dana Khusus yaitu kriteria khusus, kriteria umum, dan kriteria teknis. Dana bagi hasil (DBH) bersumber dari anggaran APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentasi tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (sumber daya alam).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mangunkusumo (2012) dengan variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan variabel dependen Alokasi Belanja Daerah menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kota/Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yaitu : pertama, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dimana daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi maka pengeluaran sebagai Alokasi Belanja Daerahnya tinggi juga. Kedua, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah dimana daerah yang memperoleh Dana Alokasi Umum yang tinggi maka pengeluaran sebagai Alokasi Belanja Daerahnya semakin tinggi juga. Ketiga, secara simultan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif terhadap Alokasi Belanja Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Nuraina (2012) memberikan bukti empiris pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum dan variabel dependen Alokasi Belanja Daerah, menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang paling besar.

Dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari tiga belas kabupaten dan empat kota. Setiap kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber utama Pemerintah dalam melakukan pengembangan pembangunan dan pengelolaan serta pengaturan keuangan daerah. Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah tidak hanya diukur oleh besarnya PAD, namun juga yang paling penting ditentukan oleh besarnya PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah. Selain dana dari pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dari setiap Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan mendapat dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Perimbangan yakni DAU, DAK dan DBH pada APBN yang sudah ditentukan setiap tahun. Penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten dan Kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatera Selatan secara umum PAD mengalami perkembangan setiap tahunnya. Jika diamati perkembangan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010-2011 terjadi peningkatan di semua Kabupaten dan Kota kecuali Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Oku Timur, dan pada tahun 2011-2012 terjadi peningkatan PAD di seluruh kabupaten dan kota kecuali Kabupaten Oku Timur, PAD terbesar dihasilkan oleh Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut (1) Apakah terdapat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap belanja daerah?; (2) Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah?; (3) Apakah terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah?; (4) Apakah terdapat pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah?; (5) Apakah terdapat pengaruh kemandirian keuangan daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah?

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dijelaskan sebagai berikut (1) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap belanja daerah; (2) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah; (3) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah; (4) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah; (5) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENEGMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Daerah

Penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhini (2011) bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hidayat (2013) dan Kusumawati (2012) dalam Melasari (2015), bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Berdasarkan penelitian Mustika (2014) bahwa DAU lebih besar pada PAD, hal ini berarti bahwa telah terjadi *flypaper effect*, jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kab/Kota di Pulau Sulawesi masih kurang, hal ini dikarenakan masih tergantungnya Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat yaitu DAU dalam membiayai belanja daerahnya. Dari beberapa Penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pengujian kembali ke dalam Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

H1: Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Holzt-eakin et al (1985) dalam Prakosa (2004), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja daerah suatu Pemerintahan. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah dalam membiayai anggaran biaya daerah khususnya mempercepat pembangunan dan merupakan sumber dana yang paling dominan dalam menigkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011) di Jawa tengah variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Prakosa (2004) bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mangunkusumo (2012) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Daerah, dimana daerah yang memperoleh Dana Alokasi Umum yang tinggi maka pengeluaran sebagai Alokasi Belanja Daerahnya akan semakin tinggi juga. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pengujian kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana aloaksi khusus merupakan salah satu dana perimbangan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam penerapan desentralisasi fiskal. Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah. Nugraeni (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dana alokasi umum, dan alokasi khusus dan pendapatan asli daerah sebagai variabel independen merupakan faktor yang signifikan untuk prediksi anggaran belanja daerah sebagai variabel dependen pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Nuraina (2012) menyimpulkan bahwa Dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pajak daerah dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Dari beberapa Penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pengujian kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut :

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Dana bagi hasil merupakan dana yang diperoleh Pemerintah Daerah dari dana perimbangan yang tujuannya untuk desentralisasi fiskal dan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pemenuhan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah. Sehingga dana bagi hasil bepengaruh terhadap belanja daerah. Berdasarkan penelitian Jiwatami (2013) dalam Melasari (2015) menemukan bukti empiris bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) DBH berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, pemerintah daerah yang memiliki DBH tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tingi. Dari beberapa Penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pengujian kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H4: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Kemandirian keuangan daerah dan dana perimbangan akan menentukan bagaimana suatu daerah dalam memenuhi dan melaksanakan setiap program dan aktivitas yang telah dianggarkan. Kedua variabel ini secara bersamaan akan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah suatu Pemerintah daerah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhini (2011) bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Argi (2011) dalam penelitian analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi di kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah dengan variabel independen Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen Belanja Daerah, menyimpulkan pertama bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian peneliti perlu melakukan pengujian kembali ke dalam hipotesis sebagai berikut :

H5: Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3. METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini seluruh kabupaten/ kota yang telah membuat dan mempublikasikan laporan Realisasi Anggarannya. Populasi dalam penelitan ini adalah sebanyak 17 Kabupaten/ Kota. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*

Mengingat sebagian Kabupaten/kota yang menjadi Populasi dalam penelitian merupakan Kabupaten/Kota pemekaran yang belum menyajikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 kabupaten dan kota Penelitian ini memiliki dimensi waktu 3 tahun, sehingga jumlah amatan berjumlah 15 kabupaten/kota x 3 tahun= 45 sampel amatan yang memiliki LRA tahun 2011-2013, yang menyajikan data mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Daerah (BD) yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan 2011 - 2013, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel dan situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id).

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan *sofware* SPSS.

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah berupa kemandirian daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan terhadap pengeluaran Pemerintah daerah berupa belanja daerah adalah analisis berganda linier. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

$$DB = \alpha + \beta_1 KKD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + e$$

Diminta: α adalah Konstanta; BD Belanaja Daerah; KKD Kemandirian Keuangan Daerah; DAU Dana Alokasi Umum; DAK Dana Alokasi Khusus; DBH Dana Bagi Hasil; β = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X; dan e merupakan *error.*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik seperti Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi dan penelitian ini telah melakukan pengujian pada Uji Normalitas di atas 0,05 atau 5% dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal, Uji Multikolinearitas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas untuk variabel independen tidak ada yang yang signifikan dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi Oleh karena nilai DW lebih besar dari du 1528 dan kurang dari 4-dl(4-1156 =2844), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya atau tidak terdapat autokolerasi. Dan pada pengujian hipotesis menggunakan Uji Koefisien Determinasi menunjukan nilai adjusted R^2 sebesar 0,937 yang memiliki arti bahwa 93,7% perubahan belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel KKD, DAU, DAK, DBH. Sedangkan sisanya 6,3% dipengaruhi variabel lain di luar model dan Uji Statistik F Berdasarkan tabel nilai F hitung sebesar 163,712 dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima.

Setelah melakukan analisis regresi linier berganda, maka nilai-nilai koefisisen regresi tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang disusun dalam persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$BD = -1{,}058 + 0{,}009\ KKD + 0{,}587\ DAU + 0{,}077\ DAK + 0{,}466\ DBH + e$$

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Variabel kemandirian keuangan daerah (KKD)
   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,000 < *level of signifikan (α)* = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara KKD terhadap pengalokasian belanja daerah.
2. Variabel dana alokasi umum (DAU)
   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,000 < *level of signifikan (α)* = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap pengalokasian belanja daerah.
3. Variabel dana alokasi khusus (DAK)
   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,102 > *level of signifikan (α)* = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap pengalokasian belanja daerah.
4. Variabel dana bagi hasil (DBH)
   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,000 < *level of signifikan (α)* = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara DBH terhadap pengalokasian belanja daerah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan pada tahun 2011-2013. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah dimana kemandirian keuangan daerah (KKD) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah dimana dana alokasi umum (DAU) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah dimana dana alokasi khusus (DAK) memiliki nilai signifikan sebesar 0,102 lebih besar dari 0,05.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah dimana dana bagi hasil (DBH) memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.
5. Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima (H5) menyatakan secara simultan seluruh variabel independen yakni kemandirian keuangan daerah (KKD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Dari hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Sumber keuangan pemerintah daerah diperoleh dari PAD itu sendiri dan dana transfer dari pusat, dari penggunaan sumber pendapatan pemerintah daerah ini akan dapat dilihat kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam mengelola dan mengembangkan daerah pemerintahannya, sehingga kemandirian keuangan daerah dan dana perimbangan bepengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan lebih mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran daerah berupa belanja daerah. Hal ini berdasarkan kesimpulan sebelumnya bahwa Dana Bagi Hasil memberikan pengaruh atau kontribusi yang kuat terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel pendukung lainnya yang mempengaruhi pendapatan daerah untuk memenuhi pengeluaran daerah dan memperpanjang jangka waktu penelitian dengan objek yang berbeda sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang lebih berpengaruh dalam pengalokasian belanja daerah.

6. REFERENSI

[1] Ardhani, Pungky. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemeriintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah).*

[2] Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanaj Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keuangan Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah.* Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang

[3] Argi, Ridho. 2011. *Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi yang mempengaruhinya Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009*. Jurnal.

[4] Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatra Selatan*. Palembang

[5] Handayani, Dwi dan Elva Nuraini. 2012. *Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun*. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Volume 1 Nomor 1.

[6] Kementrian keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Perimbangan Keuangan*. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada 10 November 2015.

[7] Mangunkusumo, Srikandi. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Wilayah Pulau Jawa Periode 2009-2011).* Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

[8] Melasari. 2015. *Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Universitas Bina Darma Palembang.

[9] Mustika, Devi. 2014. *Analisisi Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Sulawesi.* Jurnal. Universitas Gunadarma

[10] Nugraeni. 2011. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dab Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. AKMENIKA UPY Vol. 8.

[11] Prakosa, Bambang, 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY).* JAAI VOLUME 8 NO. 2.

[12] Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007. *Perubahan Atas Pertauran Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta

[13] Wulandari, Yolanda. 2014. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia*

PENERAPAN PMK-91/PMK.03/2015 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK 2015 DI KPP PRATAMA PALEMBANG

Eko Rusdianto[1], Henni Indriyani[2], Yeni Widyanti[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
ekorusdianto86.er@gmail.com[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
yeniwidyanti@yahoo.co.id[3]

Abstract

This research aims to know how much the effect of applying minister of finance no. 91 / PMK.03 / 2015 on the level of tax revenue in 2015 in KPP Pratama Palembang Ilir West. Analysis data method used this research is descriptive analysis method qualitative and quantitative methods of solving the problem with giving descriptions and explore the data obtained in the research. Before conducting the analysis , the first collecting the tax revenue data in 2012 until 2015. After that , an analysis of the level of tax revenue comparing the tax revenues with tax revenues plan multiplied one hundred percent . Results of the analysis of the level of tax revenues in 2015 amounted to 88.33 % with criteria quite effective , but the tax revenues over the previous fiscal year increased by 16.40 % .

Keywords: *Tax,Regulation Minister of Finance No. 91/PMK.03/2015*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan terpenting dalam pendapatan negara.

Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak, kewajiban perpajakan yang terutang dimiliki oleh Wajib Pajak atas sanksi administrasi pajak mendapatkan kebijakan tentang penghapusan sanksi administrasi, *sunset policy* jilid dua dikeluarkan kembali oleh Menteri Keuangan. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 pada tanggal 30 April tahun 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 merupakan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 4 Mei 2015, peraturan Menteri Kuangan tersebut mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan *sunset policy* tahun 2015, umumnya dikenal dengan istilah *sunset policy* jilid dua.

Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan di tahun 2015 sebagai tahun pembinaan Wajib Pajak, dengan program pembinaan Wajib Pajak di tahun 2015 dan sejalan dengan diterbitkannya kebijakan *sunset policy* jilid dua di tahun 2015 diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun sebelumnya, dengan adanya kebijakan ini, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, pembetulan Surat Pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak atas tahun ke belakang dan akan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Mengingat pentingnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengambilan judul ***"Pengaruh Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Tahun 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat".***

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan masalah yaitu, Bagaimana Pengaruh Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Tahun 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 terhadap tingkat penerimaan pajak tahun 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

2. LANDASAN TEORI

a. Pengertian Pajak

Menurut Djajadiningrat dalam Halim, Bawono, dan Dara (2014:2) pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Wardoyo, Subiyakto, dan Argo (2013:2) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

c. Jenis Dan Pembagian Pajak

Menurut Wardoyo, Subiyakto, dan Argo (2013:8) terdapat tiga kelompok yaitu:

- Menurut golongan, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
- Menurut sifatnya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
- Menurut pungutannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Halim, Bawono, dan Dara (2014:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System.*

e. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Halim, Bawono, dan Dara (2014:6) cara pemungutan pajak didasarkan oleh tiga stelsel, yaitu stelsel nyata (*Riel Stelsel*), stelsel anggapan (*Fictive Stelsel*), dan stelsel campuran.

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 merupakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, pembetulan Surat Pemberitahuan**,** dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrumen kebijakan di bidang perpajakan.

g. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpajangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp

100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

h. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Menurut Pasal 14 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

i. Tata Cara Penggunaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

Wajib Pajak yang ingin menggunakan fasilitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 harus mengetahui batasan yang dapat diajukan permohonan penghapusan sanksi adalah yang pelaporan SPT maupun Pembetulan SPT, dan pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan pada tahun 2015, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, diatur sebagai berikut:

- Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
- Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
- Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, persyaratan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, sebagai berikut:

- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- Ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak Badan, dan tidak dapat dikuasakan;
- Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

j. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian, yaitu Rina Haerani (2008) meneliti mengenai analisis persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Terhadap *Sunset Policy* menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan diantara WPOP dan WP Badan terhadap kebijakan penghapusan sanksi perpajakan berupa bunga sebesar dua persen. Berbeda dengan penilitian Christina Susanti (2011) meneliti mengenai pengaruh kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kebijakan *Sunset Policy* terhadap kesadaran membayar pajak.

3. METODE PENELITIAN

a. Objek Penelitian

Objek penelitian dilaksanakan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamat di Jl. Tasik Kambang Iwak Palembang.

b. Operasional Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah PMK-91/PMK.03/2015 sebagai variabel independen, dan tingkat penerimaan pajak sebagai variabel dependen.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian, data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menggunakan data prmier dan sekunder, sebagai berikut:

- Data Primer

  Adapun cara yang dipakai untuk pengumpulan data primer dari penelitian ini, yaitu:
  - Wawancara

    Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syafril Arifin, S.E. sebagai Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, hal ini agar bisa memberikan informasi mengenai pembahasan dalam penelitian ini.
- Data Sekunder

  Adapun data sekunder dapat diperoleh berupa:
  - Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2015 di KPP Pratama Palembang;
  - Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015;
  - Penerimaan pajak terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015;
  - Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda yang dihapuskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015;
  - Data rencana dan realisasi penerimaan pajak tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015.
  - Data penerimaan pajak atas tahun pajak sebelumnya mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menghitung rasio tingkat penerimaan pajak tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015. Serta membandingkan penerimaan pajak berdasarkan tahun pajak terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

Sumber penghitungan tingkat penerimaan pajak adalah realisasi dibagi rencana dikali seratus persen. Dasar hukum terdapat pada Surat Edaran -26/PJ/2011 tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan SE-98/PJ/2011 tanggal 29 Desember 2011. Surat Edaran tersebut mengatur mengenai Laporan Evaluasi Penerimaan Pajak, dimana pada laporan tersebut terdapat bagian untuk menghitung tingkat penerimaan pajak yaitu dengan membandingkan rencana dan realisasi penerimaan pajak. Perhitungan menggunakan rumus tingkat penerimaan pajak, yaitu:

$$\text{Tingkat Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Rencana Penerimaan Pajak}} \text{ X } 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/Pmk.03/2015 Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Tahun 2015

Berikut ini merupakan data Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, penerimaan pajak terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, dan sanksi administrasi berupa bunga dan denda sebagai berikut:

Tabel 4.1
Wajib Pajak yang Menggunakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015

Uraian	Jumlah
Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2015	83.762
Wajib Pajak yang memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015	3.799
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015	Rp 960.158.826.798
Penerimaan Pajak terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015	Rp 157.465.329.349
Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda yang dihapuskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015	Rp 34.006.004.097

Berdasarkan data diatas, ternyata jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebanyak 83.762, Wajib Pajak yang memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebanyak 3.799 atau sebesar 4,5% dari Wajib Pajak keseluruhan yang terdaftar tahun 2015, penerimaan pajak terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 sebesar Rp 157.465.329.349 atau sebesar 16,40% dari total penerimaan pajak tahun 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, sedangkan sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang dihapuskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 sebesar Rp 34.006.004.097.

Berikut ini merupakan data penerimaan pajak atas pajak tahun terkait dan sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang dibayar ditahun 2012 sampai dengan tahun 2015, adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penerimaan Pajak Atas Tahun Pajak Terkait dan Sebelumnya
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015
Periode Tahun 2012 s.d. 2015 Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Rencana penerimaan pajak	527.716.650.000	764.762.620.000	707.805.550.000	1.087,012.594.020
2	Realisasi penerimaan pajak	576.886.390.000	633.149.220.000	746.880.070.000	960.158.826.798
3	Penerimaan pajak atas tahun pajak terkait	516.332.501.901	583.348.271.872	665.758.357.709	802.693.497.449
4	Penerimaan pajak atas tahun pajak sebelumnya	60.553.888.099	49.800.948.128	81.121.712.291	157.465.329.349
5	Kenaikan (penurunan) penerimaan pajak atas tahun pajak sebelumnya dalam persen	10,50%	(7,87%)	10,86%	16,40%

Berdasarkan dari tabel 4.2, penerimaan pajak atas tahun pajak sebelumnya mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, hal ini menerangkan bahwa ditahun 2015, penerimaan pajak atas tahun pajak sebelumnya yang dibayar ditahun 2015 mengalami pengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di tahun 2015 sebesar Rp 157.465.329.349 atau sebesar 16,40%.

b. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak di Tahun Pajak 2012 Sampai Dengan Tahun Pajak 2015

Penerimaan pajak yang dibayar ditahun pajak 2012 sampai dengan tahun pajak 2015 . Berikut ini disajikan data-data penerimaan pajak tahun 2012 sampai dengan 2015 yang akan digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Tingkat penerimaan pajak dihitung berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak dikali seratus persen. Tingkat penerimaan pajak dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Tingkat penerimaan pajak} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Rencana penerimaan pajak}} \text{x} 100\%$$

Klasifikasi kriteria persentase tingkat penerimaan pajak berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006, yaitu:

- Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
- Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
- Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
- Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

Berikut ini merupakan data realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Tabel 4.3
Penerimaan Pajak Periode Tahun 2012 s.d. Tahun 2015
Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun Pajak	Rencana	Realisasi	Persentase Tingkat Penerimaan Pajak	Kriteria
2012	Rp 527.716.650.000	Rp 576.886.390.000	109,32%	Sangat Efektif
2013	Rp 764.762.620.000	Rp 633.149.220.000	82,79%	Cukup Efektif
2014	Rp 707.805.550.000	Rp 746.880.070.000	105,52%	Sangat Efektif
2015	Rp 1.087.012.594.023	Rp 960.158.826.798	88,33%	Cukup Efektif

Berdasarkan tingkat penerimaan pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengalami kenaikan dan penurunan, maka peneliti melakukan wawancara mendalam terkait kenaikan dan penurunan penerimaan pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Peneliti mewawancarai Bapak Syafril Arifin, S.E sebagai Seksi Pengawas dan Konsultasi III di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Melalui wawancara tersebut didapatkan keterangan mengenai penyebab adanya perkembangan kenaikan dan penurunan penerimaan pajak tahun 2012 sampai dengan 2015, sebagai berikut:

1. Adanya acara nasional dan internasional di Palembang;
   Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah Islamic Solidarity Games ke 3 tahun 2013, Palembang ditunjuk sebagai tuan rumah Hari Pangan Sedunia ke 35 tingkat nasional tahun 2015.
2. Ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di berbagai negara;
   Harga komoditas di sumatera selatan salah satunya adalah karet, harga komoditas karet yang mengalami penurunan.
3. Adanya kondisi sektor tertentu seperti dibidang perkebunan, dan pertambangan sedang mengalami kenaikan dan penurunan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab empat, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar Rp 157.465.329.349 sebesar 16,40% dari total penerimaan pajak tahun 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, Wajib Pajak yang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK,03/2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat sebanyak 3.799.
2. Realisasi penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp 576.886.390.000 atau sebesar 109,32%, realisasi penerimaan pajak tahun 2013 sebesar Rp 633.149.220.000 atau sebesar 82,79%, realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 746.880.070.000 atau sebesar 105,52%, dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 960.158.826.798 atau sebesar 88,33%.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan oleh penulis kepada KPP Pratama Palembang Ilir Barat yaitu:

1. Penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat untuk disetiap tahunnya harus meningkat dari tahun sebelumnya walaupun rencana penerimaan pajak setiap tahunnya

mengalami kenaikan. KPP Pratama Palembang Ilir Barat harus cermat membaca kondisi penerimaan pajak setiap tahunnya.

2. KPP Pratama Palembang Ilir Barat harus bisa meningkatkan penerimaan pajak walaupun tidak menggunakan kebijakan *sunset policy*.
3. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 mendapat respon baik dari Wajib Pajak, melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka pemerintah dapat mengadakan kembali peraturan *sunset policy* guna menambah Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, pelaksanaan program kebijakan semacam ini harus diimbangi dengan penegasan sanksi, agar pelaksanaan sanksi tetap dipandang adil oleh Wajib Pajak yang senantiasa melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 berpengaruh meningkatkan penerimaan pajak tahun 2015, mengacu pada hal tersebut disarankan agar dalam perundang-undangan ke depan memberikan kebijakan ini kembali, sehingga penerimaan pajak mencapai rencana penerimaan pajak.

6. REFERENSI

[1] _____. 2011. Surat Edaran 26/PJ/2011 tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran 98/PJ/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Laporan Evaluasi Penerimaan Pajak.

[2] _____.2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

[2] Haerani Rina. 2008. *Analisis Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Terhadap Sunset Policy (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama).* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

[3] Halim Abdul, Bawono Icuk Rangga, dan Dara Amin. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

[4] Sanusi, Anwar. 2014.*Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.

[5] Susanti Chiristina. 2011. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jember: Universitas Jember.

[6] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[7] Wardoyo Teguh Hadi, dkk. 2013. *Pemahaman Terapan dalam Kerangka Hukum Pajak Edisi 2013*. PT Taxsys Indonesia. Jakarta.

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL CAPITAL*

Elsha Yelya[1], Siti Nurhayati Nafsiah[2],dan Andrian Noviardy[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi, Universitas Bina Darma
[1]Elshayelya13@gmail.com
[2]Siti_nurhayati@binadarma.ac.id
[3]Andrian_noviardy@binadarma.ac.id

Abstract

The aim of this study to find out intellectual capital disclosures in the annual report issued by companies listed on the BEI. This research was conducted by examining the effect of IFRS convergence, firm size, leverage, and profitability on the disclosure of intellectual capital. The sample used in this study were 12 companies listed on the BEI in 2012-2014. These samples were selected using purposive sampling method. Statistical analysis showed that the average information about intellectual capital that dungkapkan by companies only 8%. Based on the partial test results show that the size of the company's significant positive effect on Intellectual Capital Disclosures. While IFRS Convergence, Leverage and Profitability significant negative effect on the Intellectual Capital Disclosures. Based on the test results show that the simultaneous convergence of IFRS, Company Size, Leverage and Profitability affect the Intellectual Capital Disclosures.

***Keywords**: Intellectual Capital Disclosure, IFRS Convergence, Size, Leverage, Profitability*

1. PENDAHULUAN

Kemampuan suatu perusahaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor daya saing yang sangat penting saat ini. Sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan telah menciptakan nilai tambah dan keunggulan bersaing pada perusahaan modern (Ulrich dalam Puasanti, 2013). Nilai tambah yang dihasilkan tersebut merupakan aset tak berwujud (*intangible asset)* yang tidak selalu tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Salah satu bentuk dari aset tak berwujud itu adalah *intellectual capital* (IC) atau modal intelektual.

Laporan keuangan harus mampu memberikan informasi lain yang bersifat non keuangan untuk mendukung terciptanya laporan keuangan yang relevan dan reliabel. Salah satu masalah yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan untuk meningkatkan daya guna yang dimiliki perusahaan adalah pengungkapan *intellectual capital* (Chrisdianto dalam Awalya, 2014). Melalui pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan keuangan, investor dapat menilai apakah pengelolaan dan pemanfaatan *intellectual capital* dalam rangka menciptakan nilai perusahaan berkelanjutan dalam jangka panjang sehingga investor dapat menggunakan informasi ini untuk mengoptimalkan portofolio investasi mereka dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puasanti (2013) dengan variabel independen Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Komisaris Independen, *Leverage* dan variabel dependen Tingkat Pengungkapan Modal Intelektual. Ada lima simpulan yang merupakan hasil penelitian yaitu : pertama, Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual; kedua, Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual; ketiga Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual; keempat Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual; dan kelima, *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dalam penelitian dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Apakah Konvergensi IFRS berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual*

capital?; (2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*?; (3) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*?; (4) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*?; (5) Apakah Konvergensi IFRS, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*?

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh standar akuntansi dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan *intellectuall capital*, yang akan dijelaskan sebagai berikut (1) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konvergensi IFRS terhadap pengungkapan *intellectual capital*; (2) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *intellectual capital*; (3) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan intellectual capital terhadap pengungkapan *intellectual capital*; (4) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *intellectual capital*; (5) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konvergensi IFRS, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konvergensi IFRS berpengaruh terhadap pengungkapan *Intellectual Capital*

Sebagai standar akuntansi berbasis prinsip, IFRS menyediakan fleksibilitas pada perusahaan untuk secara sukarela mengungkapkan informasi keuangan maupun non keuangan dalam rangka mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pengguna laporan keuangan.

H1 : Konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan. Perusahaan besar lebih banyak mengungkapkan informasi perusahaannya dibanding dengan perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan akan semakin tinggi tingkat pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan keuangan perusahaan.

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Leverage* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital

Leverage mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan hidup selama jangka waktu yang panjang. *Leverage* juga diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang saham terhadap dipenuhinya hak – hak mereka sebagai kreditur. salah satu cara untuk meyakinkan pemegang saham bahwa mereka memliki kondisi yang baik adalah dengan mengungkapan *intellectual capital.*

H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Rasio profitabilitas memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian (*rate of return*) dan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari aktivitas operasional perusahaan akan penggunaan aset yang dimiliki perusahaan dalam pengkreasian nilai perusahaan.

H4 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Konvergensi IFRS, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Sebagai standar akuntansi berbasis prinsip, IFRS menyediakan fleksibilitas pada perusahaan untuk secara sukarela mengungkapan informasi keuangan maupun non keuangan. Semakin besar perusahaan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan keuangan perusahaan. *Leverage* juga diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang saham terhadap

dipenuhinya hak – hak mereka sebagai kreditur di perusahaan. Profitabilitas juga diperlukan untuk memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian akan penggunaan aset yang dimiliki perusahaan dalam menilai perusahaan.

H5 : Konvergensi IFRS, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*

3. METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor kimia dan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 19 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Mengingat sebagian perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian merupakan perusahaan yang belum menyajikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 perusahaan. Penelitian ini memiliki dimensi waktu 3 tahun, sehingga jumlah amatan berjumlah 12 perusahaan x 3 tahun = 36 perusahaan sampel amatan yang memiliki laporan keuangan yang berakhir pada periode 31 Desember dan disajikan dalam rupiah pada laporan tahunan.

Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif berupa laporan tahunan, yang diperoleh dari situs resmi Bursa efek Indonesia (www.idx.co.id)

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan *sofware* SPSS.

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh konvergensi IFRS, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *intellectual capital* adalah analisis berganda linier. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

IC disclosure = $\alpha + \beta 1POST + \beta 2SIZE + \beta 3LEV + \beta 4ROA + e$

Dimana : α = konstanta; POST konvergensi IFRS; SIZE ukuran perusahaan; LEV leverage; ROA profitabilitas; β = koefisien regresi untuk masing – masing variabel X; dan e = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa *annual report* pada tahun 2012-2014. Berikut ini hasil statistik deskriptif pada penelitian ini :

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan Intellectual Capital	36	,03	,16	,0852	,04031
POST	36	,00	1,00	,5556	,50395
SIZE	36	25,61	30,15	27,6886	1,31163
LEV	36	,07	,89	,3329	,20149
ROA	36	,00	,36	,1068	,09639
Valid N (listwise)	36				

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik seperti Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi dan penelitian ini telah melakukan pengujian pada pada Uji Normalitas diatas 0,05 atau 5% dalam hal ini residual berdistribusi normal, Uji Multikolinearitas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolenaritas, Uji Heteroskedastisitas untuk variabel kovergensi IFRS, *leverage*, dan profitabilitas terhadap nilai *absolute residual* > 0.,05 dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi oleh karena DW lebih besar dari du 1043 dan kurang dari 4-dl(4-1513 = 2487), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya atau tidak terdapat autokerelasi.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pada pengujian hipotesis menggunakan Uji Koefisien Determinasi menunjukan nilai adjusted R^2 sebesar 0,259 yang memiliki arti bahwa 25,9% sedangkan sisanya 74,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Uji Simultan (Uji f)

Berdasarkan pegujian hipotesis menggunakan uji f menunjukkan nilai f hitung sebesar 4,064 dengan probabilitas sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,1 maka hipotesis alternatif diterima.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dapat diketahui hasil uji t :

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,300	,135		-2,225	,033
	POST	-,004	,014	-,054	-,312	,757
	SIZE	,014	,005	,458	2,762	,010
	LEV	,023	,044	,114	,518	,608
	ROA	-,085	,077	-,203	-1,110	,275

Setelah melakukan pengujian hipotesis, maka nilai-nilai koefisien regresi tersebut dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang disusun dalam persamaan regresi sebagai berikut :

IC disclosure = -0,300 - 0,004 POST + 0,014 SIZE + 0,023 LEV - 0,085 ROA + e

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Variabel Konvergensi IFRS

   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,757 < *level ofsignificant (α)* = 0,1. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara konvergensi IFRS terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

2. Variabel Ukuran Perusahaan (*SIZE*)
   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,010 < *level ofsignificant (α)* = 0,1. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
3. Variabel *Leverage*
   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,608 *level of significant (α)* = 0,1. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *leverage* terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
4. Variabel Profitabilitas
   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikan 0,275 *level of significant (α)* = 0,1. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa variabel independen Konvergennsi IFRS pada penelitian ini masih kurang baik karena memiliki nilai rata-rata dari 36 perusahaan sebesar 55% yang menerapkan IFRS, Ukuran perusahaan dan profitabilitas pada penelitian ini cukup baik karena memiliki nilai rata – rata diatas nilai standar industri, sedangkan *leverage* pada penelitian ini juga sudah cukup baik karena memiliki nilai rata-rata dibawah nilai standar industri.
2. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diketahui bahwa variabel dependen Pengungkapan IC memiliki nilai rata – rata sebesar 8% yang memiliki arti bahwa perusahaan selama masa penelitian merupakan perusahaan-perusahaan yang masih sedikit mengungkapan *intellectual capital*.
3. Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sedangkan variabel konvergensi IFRS, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
4. Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa konvergensi IFRS, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk kedepannya agar perusahaan manufaktur yang telah *go public* dalam penelitian ini dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan karakteristik perusahaan, sedangkan untuk perusahaan yang belum menerapkan konvergensi IFRS pada laporan tahunan sebaiknya menerapkan IFRS pada laporan tahunan agar dapat meyakinkan dan menarik lebih banyak para investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut.
2. Untuk tahun selanjutnya perusahaan manufaktur dapat melakukan pengungkapan secara wajib dan penuh 100%. Sedangkan dalam menentukan jumlah dan penilaian item pengungkapan sebaiknya dilakukan oleh para ahli dibidangnya sehingga dapat menunjukan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan secara tepat.

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperbanyak perusahaan untuk diuji, sehingga akan diperoleh sampel yang lebih banyak dan hasil yang lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil sampel sektor perkebunan. Hal ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk di luar perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini.
4. Peneliti berikutnya sebaiknya juga menambah variabel struktur kepemilikan dan umur perusahaan karena struktur kepemilikan dan umur perusahaan juga merupakan karakteristik perusahaan.

6. REFERENSI

[1] Awalya, Aisha Achda 2014. *Pengaruh Kepatuhan Perusahaan Pada Standar Akuntansi Terhadap Tingkat Pengungkapan Intellectual Capital*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

[2] Puasanti, Ariva 2013. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Konsentrasi Kepemilikan, Komisaris Independen, Dan Leverage Terhadap Tingkat Pengungkapan Modal Intelektual*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

[3] Wardhani, Mari 2009. *Intellectual Capital Disclosure: Studi Empiris Pada Perusahaan Perusahaan Yang Terdaftar Di Ursa Efek Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

[4] www.idx.co.id

PENGARUH VOLUNTARY DISCLOSURE TERHADAP AUDIT VERIFICATION (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan di BEI)

Eramalasari[1], Henni Indriyani[2], Ade Kemala Jaya[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
eramalasari2104@gmail.com[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
jaya_ade@yahoo.com[3]

Abstract

The purpose of this research is to analyse the impact of voluntary reveal of a company which listed on Indonesia Stock Exchange in the period of 2010-2014. The company which their annual report is audited by public accountant and published by the independent auditor's report. Those sample is gained by using purpose sampling method. The datas which use in this research is annual report that published on the observation period and another sources which connected with the research. To analysing the data of this research, writer use statistic examination which helped by SPSS program for windows. In order to examinate the hypothesis, writer use the F examination for symultan hypothesis and the T examination for partial hypothesis. The result of this research shows that voluntary disclosure which measured by using few indicators like the index of voluntary reveal have an impact toward audit verification which measured by using audit fee as an indicator on banking company which listed in Indonesia Stock Exchanges.

Keywords : *Voluntary Disclosure, Audit Verification, Signalling Theory*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan informasi yang berlangsung sangat cepat dalam era globalisasi membuat setiap *stakeholder* membutuhkan informasi tambahan antara lain informasi pada laporan tahunan yang sangat penting untuk membantu investor dalam mengambil keputusan melakukan investasi pada suatu perusahaan. Laporan tahunan itu sendiri merupakan perangkat untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Kualitas informasi dapat dilihat dari sejauh mana pengungkapan laporan tahunan yang dibuat oleh perusahaan.

Berbagai pertimbangan dapat dilakukan oleh para investor sebelum melakukan penanaman modal di salah satu perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan para investor yang ingin melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan yaitu melihat kondisi yang ada sebagai upaya untuk menilai prospek dari perusahaan tersebut, dimana dengan harapan prospek perusahaan yang dijadikan tempat penanaman modal akan terus meningkat sehingga akan memberikan keuntungan bagi investor. Dalam menilai prospek suatu perusahaan, investor harus melakukan berbagai analisis baik analisis keuangan maupun analisis non keuangan. Analisis yang dilakukan oleh para investor tidak terlepas dari berbagai informasi yang disampaikan oleh perusahaan melalui pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan, yang menggambarkan prospek perusahaan dan kinerja manajeman.

Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan informasi yang membantu para investor dan kreditor dalam menilai resiko dan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang di inginkan.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Menurut Prasetyaningrum (2008) dalam Alvionita (2014:31) *signalling theory* mampu menjelaskan penyebab perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan tahunan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut dikarenakan asimetri informasi yang timbul antara manajeman perusahaan dan pihak eksternal, sehingga dibutuhkan pengungkapan informasi untuk menangani masalah tersebut.

2.2 Voluntary Disclosure

Menurut Subramanyam (2010: 88) terdapat beberapa motivasi yang mendasari *Voluntary Disclosure*. Mungkin motivasi yang terpenting adalah tuntunan hukum. Manajer yang dengan sukarela mengungkapkan berita penting, terutama yang sifatnya merugikan, memiliki kemungkinan yang lebih kecil dalam menghadapi tuntunan investor . motivasi lainnya adalah penyesuaian prediksi.

2.3 Audit

Ada banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai audit. Salah satunya menurut Agoes (2011:4) sebagai berikut:

> "Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajeman, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut."

2.4 Audit Verification

Audit verification merupakan suatu proses pengkajian kebasahan data- data akuntansi yang diperoleh dari laporan keuangan dan pengungkapan manajeman. Menurut Russel (2008), audit verification ditujukan untuk mengkonfirmasi dan mengotentifikasi tindakan keuangan yang dilakukan manajeman selama periode akuntansi. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat digambarkan dengan melakukan interprestasi terhadap data akuntansi yang disajikan perusahaan dalam laporan keuangan. Dasar pengauditan adalah data laporan keuangan harus bisa diverivikasi.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasakan permasalahan, tujuan penelitian, dan kajian teoritis sebagai kaitan dengan keseluruhan maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: Ketersediaan pengungkapan informasi yang memadai dan relevan diharapkan mampu meningkatkan level *audit verification*. Oleh karena itu, informasi tersebut haruslah diungkapkan lebih spesifik, tepat waktu, dan akurat agar pengguna laporan keuangan dapat menganalisis sinyal sekaligus menilai komitmen manajeman terhadap level aduit verification.

H_1 = *Voluntary Disclusre* berpengaruh terhadap *Audit Verification.*

H_0 = *Voluntary Disclosure* tidak berpengaruh terhadap *Audit Verification.*

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang mengeluarkan *anual report* selama periode 2010-2014 yang terdaftar di bursa efek indonesia.

3.2 Ruang Lingkup Penilitian

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek inodnesia dengan mlihat laporan tahunan yang telah dikeluarkan selama periode 2010 sampai dengan 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiono (2010:205), apabila dilihat dari sumber datanya, maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Voluntary Disclosure (X)	Informasi yang diungkapkan oleh manajemen secara sukarela diluar pengungkapan mandatory. Secara garis besar, voluntary disclosure merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku (Tulus, 2012).	- Instrumen indeks pengungkapan Sukarela	- Dummy
Audit veridfication (Y)	Suatu proses pengkajian keabsahan data-data akuntansi yang diperoleh dari laporan keuangan dan pengungkapan manajeman. Menurut Russel (2008) *audit verification* ditujukan untuk mengkonfirmasi dan mengotentikasi tindakan keuangan yang dilakukan manajeman selama periode akuntansi.	- Audit fee	Nominal

Sumber : Data diolah, 2015

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sanusi (2011:88) "Teknik pengambilan sampel (sampling) adalah cara peneliti mengambil sampel atau contoh yang representative dari populasi yang tersedia". Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 sebanyak 39 perusahaan yang merupakan populasi dalam penelitian.

3.4.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability* jenis *purposive sampling.* Menurut Sanusi (2011:89) pengambilan sampel secara tidak acak atau dengan menggunakan jenis *purposive sampling* adalah cara pengambilan sampel yang menggunakan kriteria

tertentu sebagai bahan pertimbangan. Bersumber pada metode tersebut maka penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 – 2014.
2. Perusahaan perbankan yang mengeluarkan *annual report*.
3. Perusahaan yang melakukan *voluntary disclosure*.
4. Perusahaan yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian antara lain *audit fee*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010:194), Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan membaca semua hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapai untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.

3.5.1 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode atau alat tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis yaitu :

3.5.1.1 Statistik Deskriptif

Menurut sugiono (2010:147-148) Statitik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisi data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat keismpulan yang berlaku atau generalisasi.

3.5.1.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Sanusi (2011:131) Teknik analisis regresi linear sederhana, yang terdiri atas dua variabel. Satu variabel yang berupa variabel terikat diberi symbol Y dan variabel kedua yang berupa variabel bebas diberi symbol X. Analisis regresi linear sederhana sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = a + bX + e}$$

3.6 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini juga akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model regresi linier yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS yang meliputi :

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk apakah model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat diketahui dengan cara melihat jumlah sampel penelitian apakah berada pada sekitar garis plot atau malah membentuk pola tertentu.

3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan melihat Grafik plot. Pada Grafik plot jika ada pola tertetu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik meyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Sugiyono 2010:168).

3.6.3 Uji Autokorelasi

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW). Pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. du < dw < 4 – du, maka Ho diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
2. dw < dl atau dw > 4 – dl, maka Ho ditolak, artinya terjadi autokorelasi

dl < dw < du atau 4 – du < dw < 4 – dl, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

3.7 Uji Hipotesis

Menurut Wijaya (91:2011) pengujian hipotesis bertujuan menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien dari determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima (Sugiyono, 2010:169).

3.7.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan sempel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Tabel 4.1
Output SPSS Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VOL_DIS	80	.06	.39	.1840	.10217
Ln_Audit_Fee	80	18.40	23.54	21.0421	1.51121
Valid N (listwise)	80				

Hasil pengujian statistik deskriptif pada 16 perusahaan dapat dilihat dari tabel 4.3 bahwa nilai *minimum* dalam variabel x yang diukur dengan indikator penelitian indeks pengungkapan sukarela yang memiliki nilai *minimum* sebesar 0,06 yaitu pada Bank Capital Indonesia Tbk, Bank Mayapada Internasional Tbk dan Bank Victoria International Tbk. Indeks pengungkapan sukarela yang memiliki nilai maximum sebesar 0,39 yaitu pada BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. Indeks pengungkapan sukarela memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1840 dengan standar deviasi 0,10217.

Hasil penelitian variabel y *audit verification* dengan indikator penelitian menggunakan *audit fees* memiliki nilai *minimum* sebesar 18,40 yaitu pada Bank Mandiri tahun 2010 dan memiliki nilai *maximum* sebesar 23,54 yaitu pada BPD Jawa Barat dan Banten Tbk tahun 2014. *Audit fee* memiliki nilai rata-rata sebesar 21,0421 serta memilki standar deviasi sebesar 1,51121.

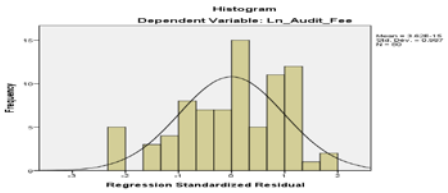
4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik *Kolmogrov-Sminov*.

Gambar 4.2
Uji Normalitas Grafik Histogram



Pada grafik histogram, jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung seimbang, baik pada sisi kiri maupun kanan dan kurva menyerupai lonceng (*bell – shaped*) yang hampir sempurna maka data dinyatakan terdistribusi normal.

4.2.2 Uji Autokorelasi

Tabel 4.3
Output SPSS Uji Autokorelasi
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.756[a]	.571	.566	.99600	1.794

a. Predictors: (Constant), VOL_DIS
b. Dependent Variable: Ln_Audit_Fee

Berdasarkan tabel 4.7, nilai Durbin-Watson model penelitian ini adalah sebesar 1,363. Dari tabel statistik Durbin-Watson dengan α = 5%, nilai 1,363 terletak di antara *upper bound* / du = 1,61143 dan 4 – du = 2,38857. Kesimpulan yang dapat diambil adalah model penelitian ini tidak terganggu oleh autokorelasi bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai dl < dw < 4 – du (1,61143 < 1,363 < 2,38857).

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wijaya (dalam Sarjono dan Julianita, 2013 : 66), heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan/observasi.

Tabel 4.4
Output SPSS Uji Heteroskedastisitas
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.985	.231		82.357	.000
	VOL_DIS	11.178	1.097	.756	10.192	.149

a. Dependent Variable: Ln_Audit_Fee

Apabila nilai absolute residual diregresi dengan variabel bebas,ternyata untuk variabel x pengukuran dengan menggunakan indikator IPS (Indeks Pengungkapan Sukarela, memiliki nilai probabilitas (Sig.) > 0,05 (0,149 > 0,05). Artinya variabel bebas *Voluntary Disclosure* signifikan

pengaruhnya terhadap variabel *Audit Varification.* Oleh karena itu, dapat disimpulkan model regresi linear sederhana bebas dari gejala heterokedatisitas.

4.4 Uji Regresi Sederhana

Untuk mengungkap pengaruh variabel lain yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi sederhana.

$Y = \alpha + \beta X + e$

Tabel 4.5
Uji Regresi Sederhana
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.985	.231		82.357	.000
	VOL_DIS	11.178	1.097	.756	10.192	.000

a. Dependent Variable: Ln_Audit_Fee

Berdasarkan nilai – nilai tersebut, maka dapat ditentukan model regresi linear berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut.

Ln_Audit_Fees = 18,985 + 11,178 VOL_DIS + e

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi R^2

Menurut (Ghozali, 2006) Koefisien determinasi R^2 mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Untuk mengujinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Output SPSS Uji Koefesien Determinasi R^2
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.756[a]	.571	.566	.99600	1.794

a. Predictors: (Constant), VOL_DIS
b. Dependent Variable: Ln_Audit_Fee

Nilai adjusted R Square dikatakan baik apabila berada di atas 0,5 karena nilai R Square berkisar 0 sampai 1. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen adalah sebesar 0,571 atau sebesar 57,1% dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen di luar kasus ini adalah sebesar 42,9%.

4.5.2 Uji Signifikan Secara Parsial (t_{hitung})

Berikut adalah hasil output SPSS versi 20 untuk melakukan pengujian uji t :

Tabel 4.7
Output SPSS Uji T
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.985	.231		82.357	.000
	VOL_DIS	11.178	1.097	.756	10.192	.000

a. Dependent Variable: Ln_Audit_Fee

Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :
Indeks pengungkapan skarela berpengaruh signifikan terhadap audit fees. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel}. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha = 0{,}05$. Pada tabel 4.10 t_{hitung} sebesar 10,192 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,667. Pada tabel 4.10 dapat dilihat pengukapan sukarela memiliki signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengakuan sukarela adalah 0,000 < 0,05 artinya hipotesis pertama diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan terhadap *Audit Fee*.

4.2.2 Hasil Pembahasan
H1 = Pengaruh Voluntary Disclosure terhadap Audit Verification

Variabel voluntary disclosure yang diwakili dengan indikator indeks pengungkapan sukarela (IPS) dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dengan siginifikansi indeks pengungkapan 0,000 yang mendukung penelitiang (Alvionita, 2014) bahwa *voluntary disclosure* berpengaruh signifikan terhadap *audit verification.* Hasil penelitian disajikan untuk membahas pengaruh *voluntary disclosure* terhadap *audit verification*. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengungkapan sukarela adalah 0,000 < 0,05 artinya hipotesis pertama diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan terhadap *Audit Verification.*

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dengan tabel uji parsial t dengan t hitung lebih besar dari t tabel dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05 yang artinya bahwa pengaruh *voluntary disclosure* dengan indikator Indeks Pengungkapan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap *audit verification* dengan indikator yang digunakan penelitian yaitu *audit fee*. Berdasarkan tabel *Model Summary* menunjukkan bahwa variabel independen (indeks pengungkapan sukarela terhadap variabel dependen *audit verification* dengan indikator (audit fees) adalah sebesar 57,1% sisanya sebesar 43,9% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat memasukkan variabel tambahan lain sehingga hasil penelitian sehubungan *audit fee* pada suatu perusahaan dapat menunjukkan hasil yang lebih jelas, dan lebih terarah. Peneliti selanjutnya memakai sampel (objek penelitian) yang jumlahnya lebih banyak dan memperpanjang periode waktu penelitian sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih jelas. Peneliti selanjutnya yang meneliti sebaiknya menambahkan variabel dan menambahkan pengukuran indikator yang tepat agar hasil penelitian menjadi penelitian yang maksimal.

6. REFERENSI

[1] Alvionita, Janet. 2014. Pengaruh *Voluntary Disclosure* dan Reaksi Pasar Modal terhadap *Audit Verification*. Sarjana Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.

[2] Anisykurlillah, Indah. 2014 . Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dan Implikasinya terhadap Asimetri Informasi. Universitas Mataram, SNA 17 Mataram, Lombok.

[3] Bursa Efek Indonesia, 2014. Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Perusahaan 2013-2014. *http//www.idx.co.id.* Diakses Terakhir 9 November 2015 Pukul 16.45 WIB.

[4] Caramanis. 2008. *Hours – Worked of BIG4 clients* terhadap *Quality of Audit Verification.* Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi.

[5] Ghozali, imam.2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 20 Semarang; BP Universitas Diponegoro.

[6] Hardiningsih, Pancawati. 2008. *Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Voluntary Disclosure Laporan Tahunan Perusahaan, Jurnal Bisnis dan Ekonomi,* Vol. 15, No. 1, ISSN: 1412 - 3126.

[7] Purwanto, Eko. 2014. *Analisis Voluntary Disclosure Perusahaan Telekomunikasi di BEI, Jurnal Neo-Bis,* Vol 8, No 2.

[8] Sanusi, Anwar. 2011. *Metodelogi Penelitian dan Bisnis*. Jakarta, Salemba Empat

[9] Suta, Anita Yolanda dan Herry Laksito. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela Laporan tahunan". Jurnal Vol.1, No.1, Tahun 2012, hal 1-15.

[10] Yoga. 2010. "Hubungan Teori Signalling dengan Under Pricing Saham pada Penawaran Perdana (IPO) di Bursa Efek Jakarta". Eksplorasi Vol.5, No.1, Edisi Maret 2010.

PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN DI BEI

Etisa Maharati[1], Henni Indriyani[2], Yeni Widyanti[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeritas Bina Darma
etisaliwarsa@gmail.com[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
yeniwidyanti@binadarma.ac.id[3]

Abstract

This research attempts to analyze whether longterm debt and equity patialy and simultaneously affect the company's corporate income tax payable. The sample in this study represents the food and beverage company in Imdonesian Stock Exchange from 2013 until 2014. The method of analisis using multiple linier regression analysis using SPSS 22. The test result generated by the F test that longterm liabilities and capital influence affect the corporate income tax payable. As for the t test shows that the first hypothesis of this study accepted that longterm debt have no significant influence against to the servant expenditure budgeting. Furthermore, the second hypothesis of this study is acceptable, stating that the equity has positive influence on enterprise income tax payable.

Keywords *: Longterm Debt, Equity, Tax*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan persaingan dunia bisnis semakin pesat, banyak perusahaan yang tumbuh dan berkembang dalam menjalankan usahanya diberbagai bidang. Persaingan dunia bisnis tersebut, mengharuskan sebuah perusahaan untuk menjadi lebih unggul dan lebih baik dari perusahaan lain agar tetap bisa bertahan dan bersaing dalam dunia bisnis yang dijalani. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar bisa menjadi lebih baik seperti mencapai keuntungan maksimal perusahaan, memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik pemegang saham, dan memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Hal tersebut juga merupakan tujuan dari berdirinya sebuah perusahaan, karena berdirinya suatu perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas. Pencapaian tujuan perusahaan tersebut, diiringi dengan adanya perkembangan manajemen keuangan.

Sejalan dengan perkembangan manajemen keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan, setiap perusahaan harusnya dapat mempertimbangkan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Keputusan untuk memilih sumber pembayaran atau struktur permodalan merupakan keputusan di bidang keuangan yang paling penting bagi perusahaan. Menurut Kamaludin (2011:303), kombinasi sumber pembiayaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan menurunkan biaya modal bukanlah pekerjaan yang mudah. Jika tersedia pilihan sumber pembiayaan maka bagi perusahaan akan lebih mudah untuk mencapai target struktur modal, akan tetapi jika tidak ada pilihan maka akan lebih sulit untuk mecapai tujuan tersebut.

Struktur modal merupakan salah satu bagian dari struktur keuangan perusahaan yang selalu dikaji sepanjang waktu, pengkajian struktur modal selalu dilakukan untuk meletakkan komposisi yang paling optimal agar menghasilkan nilai perusahaan yang baik. Struktur modal yang optimal adalah adanya keseimbangan yang baik antara resiko dan tingkat pengembalian modal yang akhirnya akan memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang efektif tidak bersifat statis karena akan berubah terus menerus seiring dengan perubahan-perubahan yang dialami perusahaan. Struktur modal itu sendiri secara umum memiliki beberapa komponen.

Menurut Warsono dalam Rahmadani, struktur modal suatu perusahaan terdiri dari dua komponen yakni utang jangka panjang *(Longterm Deb)* dan modal sendiri *(equity).* Utang jangka

panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan. Utang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka dan penerbitan obligasi, sedangkan modal sendiri *(equity)* merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Kedua komponen tersebut juga merupakan sumber dana dari sebuah perusahaan.

Secara umum sumber dana perusahaan berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Dana yang bersumber dari dalam perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk dana dimana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dengan kata lain dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Dana dari dalam perusahaan terdiri dari dana yang berasal dari pemilik perusahaan dan saldo keuntungan yang ditanam kembali dalam perusahaan. Selain dana yang bersumber dari dalam perusahaan, dana juga bersumber dari luar perusahaan. Dana dari luar perusahaan yaitu pemenuhan kebutuhan dana diambil atau berasal dari sumber-sumber dana yang ada di luar perusahaan. Dana yang berasal dari luar perusahaan adalah dana yang berasal dari pihak bank, asuransi, dan kreditur lainnya.

Dana yang didapat dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan dan bisa membuat ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar. Utang merupakan kewajiban perusahaan yang timbul karena tindakan atau transaksi-transaksi di masa lampau untuk memperoleh aktiva atau jasa. Pendanaan dengan utang dapat meningkatkan kinerja dan performa manajer, sehingga mereka akan lebih berusaha untuk memperoleh laba yang tinggi yang akan digunakan untuk membayar cicilan bunga. Menurut Riyanto dalam Septiani (2009:02), dalam model struktur modal disebutkan bahwa untuk menentukan struktur modal atau bauran dari utang dan ekuitas, terdapat pedoman yang bersifat vertikal.

Pedoman yang bersifat vertikal dalam menentukan struktur modal menetapkan bahwa besarnya jumlah utang perusahaan dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh melebihi besarnya jumlah ekuitas. Jadi, koefisien utang yaitu perbandingan antara jumlah utang terhadap modal tidak boleh lebih dari 100% (Riyanto dalam Septiani, 2009:02). Penggunaan hutang jangka panjang sebagai sumber dana selain didorong oleh kebutuhan perusahaan juga didorong oleh sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut Soemitro dalam Agoes dan Trisnawati (2013:06), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, sehingga membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang tidak dapat terhindarkan. Namun, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah.

Salah satu manajemen pajak yang berkaitan dengan penggunaan hutang adalah adanya beban bunga atas hutang yang termasuk biaya usaha yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan, sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Berdasarkan teori Modigliani dan Miller dalam (2012:03), mengenai struktur modal, pengurangan beban bunga dalam perhitungan pajak akan sangat bermanfaat bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi.

Melihat dari hasil penelitian sebelumnya dimana terjadinya ketidakkonsistenan antara beberapa hasil penelitian, penulis ingin melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh dari struktur modal yaitu hutang jangka panjang dan modal sendiri terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan makanan dan minuman dijadikan objek penelitian karena perusahaan tersebut salah satu perusahaan yang memiliki struktur modal yang kuat yang mana bisa berhubungan dengan proses produksinya, dan pada penelitian sebelumnya mengenai struktur modal belum ada yang menjadikan

perusahaan makanan dan minuman sebagai objek penelitian sehingga hal ini bisa merupakan salah satu perbedaan dari peneliti sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah utang jangka panjang dan modal sendiri berpengaruh terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah utang jangka panjang dan modal sendiri memiliki pengaruh secara parsial terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2014.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Struktur Modal

Menurut Sudana, Struktur modal berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Teori struktur modal menjelaskan apakah kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga pasar saham perusahaan.

Menurut Warsono dalam Rahmadani, struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri dari dua komponen yakni hutang jangka panjang dan modal sendiri. Hutang jangka panjang meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang lebih dari 12 bulan. Pinjaman hutang jangka panjang dapat berupa pinjaman berjangka (pinjaman yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk melunasi hutang lain, atau membeli mesin dan peralatan) dan penerbitan obligasi (hutang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi, dalam surat obligasi ditentukan nilai nominal, bunga per tahun, dan jangka waktu pelunasan obligasi tersebut). Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo. Ada dua sumber utama dari modal sendiri yaitu modal saham preferen dan modal saham biasa.

Pajak dan struktur modal secara tidak langsung memiliki keterkaitan, karena struktur modal tersebut memiliki dua komponen yaitu utang jangka panjang dan modal sendiri. Dalam perhitungan pajak penghasilan itu sendiri, ditetapkan dari besarnya perbandingan antara utang dan modal. Nilai utang perusahaan merupakan faktor pengurang pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP (UU No. 28 Tahun 2008).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.1.1 Pengaruh Utang Jangka Panjang terhadap PPh Badan Terutang

Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak-pihak tertentu seperi bank, asuransi, dan kreditur lainnya yang harus dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih. Hutang jangka salah satu sumber pendanaan perusahaan yang didorong oleh kebutuhan perusahaan, selain itu juga didorong oleh sistem perpajakan yang berlaku dimana setiap perusahaan wajib membayar pajak pengasilan (PPh) badan tanpa bisa dihindari.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lisa menunjukkan bahwa variabel Hutang Jangka Panjang memiliki hubungan linier terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Berdasarkan keterkaitan antar variabel Hutang Jangka Panjang terhadap PPh Badan Terutang maka hipotesis yang diajukan yaitu :

H_1 : Hutang jangka panjang berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

2.1.2 Pengaruh Modal Sendiri terhadap PPh Badan Terutang

Modal sendiri merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Modal sendiri dengan pajak penghasilan secara tidak langsung saling berkaitan, dimana penghitungan pajak penghasilan ditetapkan dari besarnya perbandingan antara hutang dan modal bagi wajib pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbatas atas saham-saham.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dimana penelitiannya tersebut dilihat dari sisi rasio yaitu *Debt To Equity Ratio* (DER) menunjukkan bahwa variabel DER memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Berdasarkan keterkaitan antar variabel DER terhadap PPh Badan Terutang m aka hipotesis yang diajukan yaitu :

H_2 : Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono, jenis data kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

3.2 Operasional Variabel

3.1.1 Utang Jangka Panjang

Menurut Warsono dalam Rahmadani, Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak tertentu akibat adanya transaksi di masa lampau yang harus dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan atau lebih.

3.1.2 Modal Sendiri

Menurut Warsono dalam Rahmadani, Modal sendiri merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham.

3.1.3 PPh Badan Terutang

Menurut UU No. 28 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

3.3 Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan uji statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai keseluruhan data sampel penelitian, selanjutnya akan dilakukan uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* dengan signifikansi 0,05. Kemudian melakukan pengujian hipotesis dan uji simultan dan parsial dengan melihat nilai signifikan 0,05.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Utang Jangka Panjang	24	52166	3139430961141	403898947436.42	866284383620.632
Modal Sendiri	24	264778	4100554992789	725936039569.54	1179080109103.482
PPh Badan Terutang	21	1049	342515257778	38794779750.19	79884973110.181
Valid N (listwise)	21				

Hasil uji statistic di atas menunjukkan bahwa Utang Jangka Panjang mempunyai nilai *mean* 403898947436.42 standar deviasi 866284383620.632 nilai minimum 52166 dan nilai maksimum 3139430961141. Modal Sendiri mempunyai nilai *mean* 725936039569.54 standar deviasi 1179080109103.48 nilai minimum 264778 dan nilai maksimum 4100554992789. PPh badan terutang mempunyai nilai *mean* 38794779750.19 standar deviasi 79884973110.181 nilai minimum 1049 dan nilai maksimum 342515257778.

Tabel 4.2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Utang Jangka Panjang	Modal Sendiri	PPh Badan Terutang
N		24	24	24
Normal Parameters[a,b]	Mean	656.7122	878.7457	361.8077
	Std. Deviation	402.97975	494.38470	263.39765
Most Extreme Differences	Absolute	.133	.156	.149
	Positive	.133	.156	.149
	Negative	-.127	-.128	-.103
Kolmogorov-Smirnov Z		.133	.156	.149
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200	.137	.178

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Hasil pengujian statistik menemukan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) seluruh variabel diatas α = 0,05. Hal ini berarti data yang diuji terdistribusi normal.

4.2 Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) diperoleh hasil tingkat signifikansi pada tabel 4.14 untuk variabel Utang Jangka Panjang sebesar 0,177 lebih besar dari 0,05 (α=5%) atau lebih besar dari tingkat signifikasi yang digunakan. Artinya utang jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014.

Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitan Yulianti dimana rasio utang jangka panjang tidak memiliki pengaruh terhadap PPh badan terutang sehingga jika perusahaan meningkatkan atau menurunkan rasio utang jangka panjang nya maka tidak akan membawa dampak apapun bagi PPh badan terutang. Begitu juga dengan hasil penelitian Rahmadani yang menunjukkan bahwa rasio utang jangka panjang berpengaruh negatif terhadap PPh badan terutang, hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan dibiayai oleh hutang maka akan merendahkan jumlah PPh badan terutang.

Akan tetapi hasil analisis ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad yang menunjukkan bahwa rasio hutang jangka panjang yaitu *longterm debt to asset ratio* (LDAR) memiliki pengaruh secara positif terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiani juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara hutang jangka panjang dengan pajak penghasilan badan terutang.

Alasan utang jangka panjang tidak memiliki pengaruh terhadap PPh badan terutang, karena apabila perusahaan makanan dan minuman ini menaikkan atau menurunkan rasio utang jangka panjangnya maka tidak akan membawa dampak apapun terhadap PPh badan terutangnya (Yulianti, 2010:65).

Variabel Modal Sendiri memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap variabel PPh Badan Terutang. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikan t sebesar 0,000 yang lebih kecil dari

tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Artinya modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap PPh badan terutang.

Hasil pengujian hipotesis kedua pada perusahaan makanan dan minuman di BEI tahun 2013-2014 menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad yang menunjukkan bahwa rasio modal sendiri yaitu *debt to equity ratio* tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap informasi pengungkapan pajak penghasilan. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil peneliian yang dilakukan oleh Septiani menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linier antara modal sendiri dengan pajak penghasilan badan terutang.

Akan tetapi, hasil analisis ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti yang menunjukkan bahwa rasio modal sendiri yaitu *debt to equity ratio* (DER) memiliki pengaruh terhadap PPh badan terutang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani juga menunjukkan bahwa rasio modal sendiri berpengaruh positif terhadap PPh badan terutang. Hal ini dikarenakan semakin besar sebuah perusahaan dibiayai oleh modal sendiri dari pemilik perusahaan atau pemegang saham maka semakin tinggi pula jumlah PPh badan terutang.

5. SIMPULAN

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Hutang Jangka Panjang dan Modal Sendiri terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Berikut adalah simpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial variabel Hutang Jangka Panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang, dimana besar kecilnya jumlah PPh badan terutang juga ditentukan oleh seberapa besar sebuah perusahaan dibiayai oleh hutang. Semakin besar perusahaan dibiayai oleh hutang maka akan menurunkan jumlah PPh badan terutang, begitu pula sebaliknya.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang, dimana semakin besar perusahaan dibiayai oleh modal sendiri dari pemilik perusahaan atau pemegang saham maka akan menaikkan jumlah PPh Badan Terutang.

6. REFERENSI

[1] Agoes, Sukrisno, dan Estralia Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan.* Salemba Empat: Jakarta.

[2] Bursa Efek Indonesia. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan 2013-2014. http://www.idx.co.id. Diakses terakhir pada tanggal 26 November 2015 pukul 10.00 WIB.

[3] Fitriandi, Primandita, dkk. 2014. *Undang-Undang Perpajakan.* Salemba Empat: Jakarta.

[4] Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program UMB SPSS 20.* Universitas Diponegoro: Semarang.

[5] Kamaludin. 2011. *Manajemen Keuangan.* CV. Mandar Maju: Jakarta.

[6] Muhammad, Imam. 2006. *Analisis Struktur Modal Terhadap Harga Saham Perusahaan Obat-Obatan Terbuka di Bursa Efek Jakarta.* Universitas Terbuka: Medan.

[7] Rahmadani, Endah Nilam. 2010. *Analisis Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tedaftar dalam Bursa Efek Indonesia).* Universitas Islam Negeri: Jakarta.

[8] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan.* Salemba Empat: Jakarta.

[9] Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian.* Salemba Empat: Jakarta.

[10] Septiani, Mutria Lisa. 2012. *Analisis Pengaruh Modal Sendiri dan Hutang Jangka Panjang Terhadap PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada Peusahaan Industri Kimia yang Terdaftar di BEI).* Universitas Islam Negeri: Jakarta.
[11] Sudana, I Made. 2011. *Manajemen Keuangan.* Erlangga: Surabaya.
[12] Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Peneltian.* CV. Alfabeta: Bandung.
[13] Warsono. 2011. *Manajemen Keuangan.* Umm Press: Malang.
[14] Wildani, Anastasia Rizka. 2012. *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Listing di BEI Periode 2006-2010.* Universitas Indonesia: Jakarta.
[15] Yulianti, Nur Machida. 2008. *Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang Terdaftar di BEI).* Universitas Islam Negeri. Jakarta.

PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI DAN *SALES GROWTH* TERHADAP SENGKETA PAJAK

Halimatussakdiyah[1], Verawaty[2], Yeni widyanti[3]
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang[1,2,3]
[1]all.lima95@yahoo.com
[2]verawaty_mahyudin@yahoo.com
[3]yeniwidyanti@binadarma.ac.id

Abstract

Profit information as part of the financial statements is often the target of engineering through the actions of management opportunism. The company always strives to minimize income tax, misuse of information can be detrimental to various interested parties, it will indicate the occurrence of a tax litigation. This study aims to examine the impact of accounting conservatism and sales growth of the tax litigation on the property and real estate companies listed in the Indonesia Stock Exchange. The Population in this study are property and real estate companies listed in the Indonesia Stock Exchange and continues to publish financial statements in 2014. The samples obtained were 31 observations by using purposive sampling method. This study uses multiple linear regression as a data analysis tool. The results of this study indicate that accounting conservatism and sales growth effect on the tax litigation.

Keywords: *Conservatism Accounting, Sales Growth, Indication Tax Litigation*

1. PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk mampu bersaing guna meningkatkan nilai perusahaan. Persaingan bisnis di Indonesia saat ini telah menunjukkan kemajuan yang pesat dengan semakin bertambahnya jumlah perusahaan dari hari ke hari. Berbagai jenis perusahaan bermunculan yang bergerak di bidang yang berbeda-beda seperti bidang jasa, manufaktur ataupun dagang yang saling bersaing untuk dapat bertahan dan menjadi yang terbaik. Hal ini mendorong masing-masing perusahaan untuk melakukan berbagai strategi agar terhindar dari kebangkrutan.

Bagi perusahaan, negara adalah pemegang saham utama dengan porsi sebesar 25% (tarif pajak yang berlaku). Sebelum laba dibagikan kepada para pemegang saham, perusahaan terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar 25% ke kas negara sebagai kewajiban pajak. Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak, namun lain halnya dengan pihak fiskus atau aparat pajak yang merupakan pihak yang berwenang dalam mengawasi pemenuhan kewajiban pajak serta diberi target untuk mengumpulkan pajak untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam posisi yang saling berlawanan kepentingan ini, kedua pihak seringkali berbeda pendapat dalam hal-hal tertentu. Perbedaan ini biasa disebut sengketa pajak.

Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan pajak penghasilannya, metode-metode untuk menghitung laba dalam laporan keuangan. Manajer berusaha menemukan cara untuk mengelola baik laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan maupun laba

untuk pembayaran pajak berjalannya dalam menghadapi *trade-off* untuk mencapai dua tujuan yang bersifat *mutually exclusive*, yaitu memaksimalkan laba akuntansi dengan meminimalkan pembayaran pajak.

Konservatisme dalam akuntansi dapat diterapkan berupa metode ataupun estimasi didalam laporan keuangan, karena prinsip konservatisme lebih condong mengandung arti berjaga-jaga maka biaya atau rugi yang terjadi pasti diakui lebih dahulu dibandingkan keuntungan atau pendapatan dimasa yang akan datang walau kemungkinan pendapatan ataupun keuntungan ini ada di tingkat *probable*, hal ini akan berakibat pada menurunnya laba dan aset perusahaan. Konservatisme akuntansi diharapkan perusahaan dapat menjadi cara untuk mengecilkan laba perusahaan sehingga pembayaran pajak perusahaan akan semakin rendah.

Sales growth adalah pertumbuhan atas penjualan yang merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan (Swastha dan Handoko, 2001). Apabila pertumbuhan penjualan negatif maka mengindikasikan penurunan dalam kegiatan operasi yang akan berdampak pada penurunan laba perusahaan yang mempengaruhi pelaporan laba akuntansi, penurunan laba akan berdampak terhadap semakin rendahnya pembayaran pajak. Hal ini mengindikasikan akan semakin memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan perusahaan sehingga memungkinkan terjadinya sengketa pajak.

Motivasi penelitian ini untuk mengetahui apakah konservatisme akuntansi dan *sales growth* dapat menyebabkan timbulnya sengketa pajakpada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiapada tahun 2014. Hal ini dapat dinyatakan dengan pertanyaan: "Apakah konservatisme akuntansi dan *sales growth* berpengaruh terhadap sengketa pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014?"

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan *(Agency Theory)*

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Meckling, 1976).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, dengan melihat kepentingan perusahaan yang berusaha menghindari kewajiban membayar kewajiban kepada investor, maka perusahaan akan cenderung menerapkan manajemen laba dengan menggunakan praktik penurunan laba. Praktik penurunan laba yang akan mengakibatkan pembayaran pajak penghasilan menjadi rendah yang dapat mengindikasi terjadinya sengketa pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Terdapat beberapa penelitian yang menguji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap sengketa pajak. Penelitian yang berkaitan dengan sengketa pajak telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan Dwimulyani (2010) melakukan penelitian tentang hubungan antara konservatisme akuntansi dan sengketa pajak penghasilan dan meneliti apakah konservatisme akuntansi dapat menjadi pemicu terjadinya sengketa pajak penghasilan. Jamaluddin (2011) melakukan penelitian tentang hubungan konservatisme akuntansi terhadap sengketa pajak penghasilan dan disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap sengketa pajak penghasilan. pajak penghasilan.

Suprianto dan Dewi (2014) melakukan penelitian untuk menganalisis bagaimanakah pengaruh konsep agensi, konsep pajak, dan biaya politik terhadap akuntansi konservatisme serta

pengaruhnya terhadap pajak penghasilan perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pajak berpengaruh terhadap akuntansi konservatisme sedangkan konsep agensi dan biaya politik tidak berpengaruh terhadap akuntansi konservatisme. Penelitian terakhir, yaitu yang Warsa dan Noviari (2015) melakukan penelitian tentang dampak konservatisme akuntansi pada indikasi munculnya sengketa pajak penghasilan yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berdampak positif pada indikasi munculnya sengketa pajak penghasilan.

2.2.1 Konservatisme Akuntansi Terhadap Sengketa Pajak

Untuk merumuskan hipotesis, penelitian ini menggunakan teori akuntansi positif yang mendasarkan pada teori keagenan untuk menjelaskan dan memprediksi pemilihan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer perusahaan untuk tujuan tertentu. Prinsip konservatisme akuntansi diartikan sebagai pencatatan aktiva milik perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga perolehannya *(cost)* atau mencatat utang lebih tinggi (*over-stated)*, selain itu mengakui kemungkinan rugi yang terjadi namun tidak mengantisipasi laba yang belum direalisasi atau tidak diakui sebagai pendapatan periode itu sehingga bisa mengindikasikan terjadinya sengketa pajak. Penelitian Dwimulyani (2010), Warsa dan Noviari (2015), Suprianto dan Dewi (2014) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap sengketa pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian menurut Jamaluddin (2011) yang menyatakan konservatisme berpengaruh negatif terhadap sengketa pajak. Berdasarkan uraian tersebut, konservatisme bisa menjadi pemicu dan mengindikasikan terjadinya sengketa pajak sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap sengketa pajak

2.2.2 *Sales Growth* terhadap sengketa pajak

Sales growth atau pertumbuhan penjualan menunjukan tingkat penjualan perusahaan. Variabel *sales growth* didugadapat menjadi pemicu dan mengindikasikan terjadinya sengketa pajak dengan alasan apabila pertumbuhan penjualan positif maka mengindikasikan laba yang besar tapi dilain pihak menurut pandangan perpajakan, perusahaan ingin pembayaran pajaknya menjadi kecil sehingga memperbesar utang perusahaan, hal ini yang dapat memicu dan mengindikasikan terjadinya sengketa pajak. Semakin tinggi *sales growth* maka semakin besar pula penggunaan modal pinjaman yang mengakibatkan utang perusahaan menjadi tinggi sehingga laba perusahaan menjadi rendah yang akan memicu terjadinya sengketa pajak (Darmawan dan Sukartha, 2014). Penurunan laba mengindikasikan peningkatan penggunaan akuntansi menurunkan laba sehingga akan mempengaruhi pelaporan laba akuntansi serta besarnya pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah dibanding perhitungan menurut fiskus (Suprianto dan Dewi, 2011). Dalam hal perbedaan perhitungan menurut wajib pajak dan fiskus maka mengindikasikan akan semakin memicu terjadinya sengketa pajak penghasilan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Sales Growth* berpengaruh terhadap sengketa pajak

3.METODE PENELITIAN

3.2.1 Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Independen Konservatisme Akuntansi (X1)	Secara tradisional, konservatisme dalam akuntansi dapat diterjemahkan melalui pernyataan yaitu tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi mengantisipasi semua kerugian (Watts, 2003).	-Laba bersih -Depresiasi	Rasio

		-Arus kas operasi -Total aset	
Sales Growth	Menurut Swastha dan Handoko (2001), pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.	-Penjualan tahun 2013 -Penjualan tahun 2014	Rasio
Sengketa Pajak Dependen (Y)	Menurut Pasal 1 angka 5 UU No.14 Tahun 2002, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak	-Beban pajak penghasilan -Laba sebelum pajak	Rasio

3.2 Populasi dan Sampel

Berdasarkan *Indonesia Stock Exchange* (IDX) *Fact Book* 2014, sektor-sektor yang tergolong sebagai perusahaan *property* dan real estate yaitu sebanyak 46 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling. Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan.

3.3 Teknik Analisis

Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda *(Multivariate Regression).* Penggunaan model persamaan tersebut dengan aplikasi program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* (Ghozali, 2011). Berikut ini adalah model persamaan regresinya sebagai berikut :

$SNKTi = \alpha + \beta1\ CONi + \beta2\ SALESGROWTHi + \varepsilon$

Keterangan :

SNKT = Sengketa Pajak
α =konstanta
β1, β2 =koofisien regresi
CONi =Konservatisme Akuntansi
*Sales Growth*i =Pertumbuhan Penjualan
εi =Standar Eror

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan seluruh variabel diatas α = 0,05 yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menyatakan nilai tolerance untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk

setiap variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.2 Koofisien Determinasi (R2)

Tabel 4.1
Uji Koofisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,764[a]	,584	,554	,08001

Pada tampilan tabel 4.1 model summary besarnya koofisien determinasi ditunjukkan pada nilai adjusted R^2 yaitu 0,554, hal ini berarti 55,4% variabel sengketa pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel konservatisme akuntansi dan *sales growth*, sedangkan sisanya 44,6% merupakan pengaruh dari sebab-sebab atau faktor lain dibuat model penelitian.

4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4.2
Hasil Regresi Simultan
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,251	2	,126	19,626	,000[b]
	Residual	,179	28	,006		
	Total	,431	30			

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test diatas, didapat F hitung sebesar 19,626 dengan probabilitas sebesar 0,000 (signifikan). Tabel 4.2 yaitu hasil uji F (regresi simultan) juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi dan *sales growth* berpengaruh secara bersama terhadap sengketa pajak.

4.4 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 4.3
Hasil Regresi Parsial
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,350	,033		10,673	,000
	KONSERVATISME AKUNTANSI	-2,034	,393	-,660	-5,180	,000
	SALES GROWTH	,019	,010	,237	1,858	,074

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.3, terlihat bahwa variabel konservatisme akuntansi menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu sengketa pajak dengan tingkat signifikansi 5% dan variabel *sales growth* menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu sengketa pajak dengan tingkat signifikansi 10%. Hal ini dapat

dilihat dari nilai probabilitas signifikan untuk konservatisme akuntansi dan *sales growth* masing-masing sebesar 0,000 (sig.<1%) dan 0,074 (sig.<10%).

4.5 Pembahasan

4.5.1 Konservatisme Akuntansi Berpengaruh Terhadap Sengketa Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan program SPSS dalam penelitian ini untuk mengolah hipotesis-hipotesis sehingga dapat memberikan gambaran hasil penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yakni dengan melakukan uji asumsi klasik yang kemudian dilakukan persamaan regresi dan uji hipotesis, hasil pengujian signifikansi parsial dengan sampel sebanyak 31 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi memilki pengaruh signifikan terhadap sengketa pajak dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,01 (α = 1%). Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Jamaluddin (2011) yang menyatakan bahwa konservatisme tidak memiliki pengaruh terhadap sengketa pajak. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan hasil penlitian Dwimulyani (2010), Warsa dan Noviari (2015), Suprianto dan Dewi (2014) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap sengketa pajak.

Dengan praktik konservatisme akuntansi maka akan menurunkan laba yang diperoleh perusahaan, apabila laba yang diperoleh perusahaan semakin rendah, maka pembayaran pajak penghasilan juga menjadi rendah (Dwimulyani, 2010). Pernyataan (Dwimulyani, 2010) mendukung hasil penelitian ini, yaitu smeakin perusahaan menggunakan konsep konservatisme akuntansi dalam menyusun laporan keungan maka akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak pengahsilan perusahaan yang kemudian akan memicu terjadinya perbedaan pencatatan antara fiskus dan perusahaan yang mengindikasi terjadinya sengketa pajak

4.5.2 *Sales Growth* Berpengaruh Terhadap Sengketa Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan program SPSS dalam penelitian ini untuk mengolah hipotesis-hipotesis sehingga dapat memberikan gambaran hasil penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yakni dengan melakukan uji asumsi klasik yang kemudian dilakukan persamaan regresi dan uji hipotesis, hasil pengujian signifikansi parsial dengan sampel sebanyak 31 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 menunjukkan bahwa *sales growth* memilki pengaruh signifikan terhadap sengketa pajak dengan nilai signifikansi 0,074 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,1 (α = 10%).

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial konservatisme akuntansi dan *sales growth* memiliki pengaruh signifikan terhadap sengketa pajak. Hal ini berarti semakin tinggi prinsip konservatisme akuntansi dan *sales growth* yang tinggi akan mengindikasi terjadinya sengketa pajak.. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel konservatisme akuntansi dan *sales growth* memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap sengketa pajak. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan konservatisme akuntansi dan semakin tinggi tingkat *sales growth* maka berpengaruh akan laba yang didiapat perusahaan, laba tersebut akan semakin rendah dan akan memicu terjadinya sengketa pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperbesar jumlah sampel, menggunakan sektor-sektor lain sebagai objek penelitian, dan menambahakan variabel-variabel lainnya. Dapat dilihat dari nilai adjusted R^2 hanya sebesar 55,4% yang berarti 44,6% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lainnya untuk menjelaskan sengketa pajak, seperti profitabilitas atau faktor eksternal perusahaan. Peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas periode pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

6. DAFTAR PUSTAKA

[1] Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan dan laporan tahunan Perusahaan 2014. http://www.idx.co.id. Diakses terakhir 18 November 2015 pukul 19.30 WIB.

[2] Darmawan, I Putu Hendy dan Sukartha, I Made. 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Leverage, Return On Asset, Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak.* Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

[3] *Dwimulyani, Susi. 2010. Konservatisme Akuntansi dan Sengketa Pajak Penghasilan: Suatu Investigasi Empiris. Simposiun Nasional Akuntansi 13. Purwokerto.*

[4] FASB. 1980. *Statement of Financial Accounting Concept Nomor 2. Qualitative Characteristics of Accounting Information.*

[5] *Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program UBM SPSS 20. Semarang: Universitas Doponegoro.*

[6] Jamaluddin, Rendra Jastika. 2011. *Hubungan Konservatisme Akuntansi dan Sengketa PPh pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Makasar.

[7] Jensen, M.C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics. Vol.3, No. 4,pp.305-306.

[8] Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 1 angka 5 Tentang Pengadilan Pajak.

[9] Suprianto, Edi dan Dewi, Arum Kusuma. 2014. *Relevansi Konsep Konservatisme Wajib Pajak melakukan Tax Avoidance Sebelum dan Sesudah Pelaksaan International Financial Reporting Standard (IFRS).* Smposium Nasional Akuntansi (SNA) 17. Mataram Lombok.

[10] Supriyanto, Eko dan Falikhatun. 2008. *Pengaruh Tangibility, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Keuangan*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

[11] Suwardjono. 2010. *Pengungkapan dan Sarana Interpretatif*. Edisi Ketiga. BPFE: Yogyakarta.

[12] Swastha, Basu dan Handoko Hani. 2001. *Manajemen Pemasaran dan Analisa Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: BPFE.

[13] Swastha, Basu. *1997. Azas-Azas Marketing*, Liberty : Jakarta.

[14] Swingly, Calvin dan Sukartha, I Made. 2015.*Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance.* Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali

[15] Warsa, Prasetya Jaya dan Noviari Naniek. 2015. *Pengeruh Konservatisme Akuntansi Pada Indikasi Timbulnya Sengketa Pajak Penghasilan Badan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali.

[16] Watts, R.L. 2003. *Conservatism in accounting part I: explanations and implications.* Accounting Horizons 17, 207–221.

PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE* DAN BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING*

Hermayanti Agustina[1], Henni Indriyani[2], Ade Kemala Jaya[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
Hermayantieaugustinahmc@yahoo.com[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
Jaya_ade@yahoo.com[3]

Abstract

Transfer pricing could be happened on the company that want high profit and use the tax avoidance become the way to reach it. Ownership structure is also affect management to transfer wealth to themself or to majority stakeholder. Bonus used by the company to get high profit. This study aimed to examine the effect of tax, tunneling incentives, and bonus on the company's decision to do transfer pricing. The sample used on this study is manufacturing company sector industry consumption product listed on the Indonesia Stock Exchange for years 2013 – 2014 totaling 40 companies, and 14 sample with purposive sampling method. The analysis technique used on this study is a binary logistic regression. The result of this study shows that tax, tunneling incentives, and bonus significantly effect as simultaneous on transfer price. Tunneling incentive and bonus have low significantly effect as parsial on transfer pricing The determination coefficient is 0,551 that means 55,1% transfer pricing affected by independent variable, while the rest is explained by other variable. This result shows that is many other variable in outside of this study that can explain transfer pricing.

Keywords*: tax, transfer pricing, tunneling incentives, bonus*.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini sudah semakin maju baik dalam teknologi, transfortasi, ataupun komunikasi. Adanya kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi perusahaan multinasional salah satunya adalah perusahaan manufaktur ini dalam menempatkan usaha mereka dinegara maupun di belahan dunia. Namun, dengan adanya kemudahan bagi perusahaan multinasional dalam menempatkan usahanya di suatu negara, terdapat sebuah permasalahan perpajakan yang timbul dari kegiatan ini. Permasalahan tersebut adalah penentuan harga transfer *(transfer pricing).*

Transfer pricing merupakan alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus di tanggung perusahaan. Oleh karena itu, *transfer pricing* bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi.

Adanya peluang penyalagunaan tersebut perusahaan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan, salah satu caranya yaitu dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak yang rendah atau yang berstatus *tax heaven country*. *Tax heaven country* adalah suatu istilah yang menyatakan bahwa negara surga pajak.

Tax heaven country pada dasarnya adalah suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak berupa tarif pajak yang rendah kepada wajib pajak negara lain agar penghasilan dari wajib pajak negara lain tersebut dialihkan ke negara mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus menerbitkan aturan mengenai kategori negara mana saja yang dimaksudkan sebagai negara *tax heaven country*. Apabila ada wajib pajak yang mengalihkan penghasilannya ke negara yang masuk dalam kategori *tax heave country*, maka penghasilan yang dialihkan tersebut dapat dikenakan pajak atas dasar tarif yang berlaku berdasarkan ketentuan pajak di Indonesia . Hal lain lagi tentunya adalah dengan meningkatkan kecakapan maupun jumlah petugas auditor pajak.

Selain pajak, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Pramana, 2014:29). Masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen dan mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan dari pada pemegang saham minoritas.

Pemegang saham mayoritas dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, tanpa memperdulikan adanya kepentingan lainnya pada pemegang saham minoritas. Maka para pemilik saham mayoritas akan melakukan cara-cara yang dapat menghasilkan laba yang tinggi dan mengorbankan hak-hak pemegang saham minoritas dengan cara melakukan *transfer pricing*.

Selain itu salah satu yang berpengaruh dari keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yaitu bonus pada perusahaan. Menurut Purwanti (2010) dalam Hartati (2014:3) bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba.

Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima. Bonus berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan meningkatkan laba periode sekarang, salah satunya yaitu dengan melakukan praktek *transfer pricing* (Lo, Wong, & Firth, 2010 dalam Pramana 2014:6).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan bonus terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang *listing* di BEI tahun 2013-2014 sebagai sampel. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pajak, *tunneling incentive* dan bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan (berdasarkan undang-undang) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Tunneling Incentive

Menurut Zhang (2004) dalam Pramana (2014:29) *tunneling incentive* adalah perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset atau profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas.

Bonus

Menurut Irpan (2010) dalam Hartati (2014:6) bonus adalah pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri.

Transfer Pricing

Menurut PER-32/PJ/2011 pasal 1 ayat (8) *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *annual report* perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dengan populasi 40 Perusahaan dan Sampel

14 Perusahaan dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dalam rentang waktu 2013-2014. Data dikumpulkan dari www.idx.co.id

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik kuantitatif. Menurut Sanusi (2013 : 115) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Simultan (Uji-F)

Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji F dengan hasil nilai signifikan F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen: Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Bonus berpengaruh signifikan terhadap variabel *Transfer Pricing.*

Uji Statistik F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	444150243625017050000000.000	5	1480500812083390000000000.000	15.331	.000
	Residual	309013702758470800000000.000	22	9656678211202212000000.000		
	Total	753163946383487800000000.000	27			

a. Dependent Variable: Pihak Berelasi

b. Predictors: (Constant), Saham Bonus, Saham Pengendali, Beban Pajak Penghasilan

Sumber : Spss 22 (diolah penulis 2016)

Uji Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel Pajak, *Tunneling Incentive* dan Bonus berpengaruh secara parsial terhadap *Transfer Pricing*. Hasil Perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dari variabel Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* sedangkan variabel *Tunneling Incentive* dan Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	74855803095.277	60039881322.949		1.247	.222
	Beban Pajak Penghasilan	5.312	.791	.772	6.713	.000
	Saham Pengendali	-3.790	9.991	-.043	-.379	.707
	Saham Bonus	-1.759	1.275	-.158	-1.380	.177

a. Dependent Variable: Pihak Berelasi

Sumber : SPSS 22, diolah penulis 2016

Koefisien Determinasi $\square$

Berdasarkan Koefisien dereminasi adalah Nilai koefisien determinasi adjusted $\square$ sebesar 0,551 dimana menunjukkan variasi *transfer pricing* dijelaskan oleh variabel Pajak, *Tunneling*

Incentive dan Bonus sebesar 55,1% sedangkan 44,9% dijelaskan oleh variabel yang tidak dianalisis oleh model.

Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square	Adjusted R Square
1	.590	.551

Sumber : Spss 22, (diolah penulis 2016)

Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan *transfer pricing*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,001 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (α=5%). Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Made Gede Wirakusuma (2014), Aviandhika (2014), Nur Azlina (2014) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Pramana (2014:26) pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena dengan adanya *transfer pricing* beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin kecil.

Berdasarkan tabel 4.7 yang telah dilakukan membuktikan bahwa semakin tinggi beban pajak semakin tinggi pula perusahaan untuk melakukan *transfer pricing.* Perusahaan akan membuat anak perusahaan ke negara yang tarif pajaknya rendah atau yang berstatus *tax heaven country.*

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan *Transfer Pricing*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,707 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (α=5%).

Menurut Zhang 2004 dalam Pramana (2014:29) *tunneling incentive* adalah perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas.

Berdasarkan tabel 4.7 yang telah dilakukan tidak membuktikan semakin besar laba yang diterima pemegang saham mayoritas dalam melakukan tunneling semakin besar pemegang saham mayoritas melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan *Transfer Pricing*

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan nilai signifikansi 0,177 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (α=5%).

Menurut Irfan (2010) dalam Hartati (2014:6) bonus adalah pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat potensi kerja direksi itu sendiri.

Berdasarkan tabel 4.7 yang telah dilakukan tidak membuktikan semakin besar laba yang diterima perusahaan semakin besar pula manager perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan Pajak, *Tunneling Incentive* dan Bonus bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* tetapi secara parsial *Tunneling*

Incentive dan Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tranfer Pricing*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Wayan Yuniasih, dkk (2011) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu Pajak sebagai variabel yang bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* tapi tidak dengan *Tunneling Incentive* dan Bonus yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil Pengujian Hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Perusahaan mambuat anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah atau yang berstatus *tax heaven country* agar beban pajak yang dikeluarkan perusahaan semakin kecil. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pajak yang jumlahnya besar sehingga berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Hasil Pengujian Hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.
3. Hasil Pengujian Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa secara parsial bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* . Hal ini berarti menunjukkan bahwa penerimaan bonus dari perushaan berdasarkan laba yang dihasilkan sehingga tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing.*

Saran

1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Hasil Penelitian menunjukkan *tunneling incentive* dan bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya, kedua variabel diatas adalah variabel yang cukup memungkinkan berkaitan dengan alokasi *transfer pricing*. Hal ini dimungkinkan karena variabel-variabel pendukung lainnya yang tidak menjadi variabel penelitian. Proksi yang digunakan dalam perhitungan juga mungkin kurang tepat sebagai data yang siap untuk diolah lebih lanjut.
3. Bagi Peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak jumlah sampel, menggunakan sektor-sektor lain sebagai objek penelitian dan menambahkan variabel-variabel lainnya. Dapat dilihat dari adjusted □ hanya sebesar 55,1% yang bearti ada 44,9% merupakan pengaruh dari variabel-variabel lainnya untuk menjelaskan *transfer pricing*. Peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas periode pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun

6. REFERENSI

[1] Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan dan laporan tahunan Perusahaan 2013-2014. http://www.idx.co.id

[2] *Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program UBM SPSS 20. Semarang: Universitas Doponegoro.*

[3] Harahap, Sofyan Syafri. *2008. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Raja*. Grafindo Persada, Jakarta.

[4] Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.*

[5] Jensen, M.C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics. Vol.3, No. 4,pp.305-306.

[6] Kiswanto, Nancy dan Purwaningsi, Anna. 2014. *pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2010-2013.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya.

[7] Kurniawan Mury Anang. 2015. *Transfer Pricing Untuk Kepentingan Pajak*. Yogyakarta: CV. ANDI.

[8] Lingga, Salsalina, Ita. 2012. *Aspek Perpajakan dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).* Jurnal Ekonomi Akuntansi. Vol.1. No.3. Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Kasmini, Made Gede Wirakusuma. 2011. *Pengaruh Pajak Tunneling Incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

[9] Nurhayati, Dewi, Indah. 2013. *Evaluasi Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol.2, No. 1.

[10] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

[11] Resmi Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1. (Edisi 7).* Jakarta: Salemba Empat.

[12] Sanusi, Anwar. 2012. *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

[13] Sari, Candra, Ratna dan Baridwan Zaki. 2013. *Current Asset Tunneling Through Related Party Transaction Empirical Evidence in Indonesia.* Simposium Nasional Indonesia (SNA) XVI. Manado.

[14] Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

[15] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

PERANAN ANGGARAN PRODUKSI SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PRODUKSI

Jera Feromita[1], Poppy Indriani[2], Ade Kemala Jaya[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
Email: Jera_feromita@yahoo.com[1]
Email: poppy.indriani@binadarma.ac.id[2]
Email: Jaya_ade@yahoo.com[3]

ABSTRACT

The role of Production Budget as management tools Support the Effectiveness of Production" This study aims to a) determine the production budget is used by companies already meet the characteristics, b) find out the ways undertaken by the company in managing the production budget in order to support the effectiveness of production, c) determine the increase in the effectiveness of the company by using the production budget. In this study, the authors use the case study method in which data used consist of primary data and secondary data. Secondary data were obtained from the theories and literature, while the primary data obtained through observation, documentation, and interviews with relevant parties. Analysis of the data by the author is using qualitative methods. Based on the research results obtained show that the effectiveness of the production cost does not exceed the effectiveness of the standards set by the company, which is 10%. Which states that the production budget contributes to the cost-effectiveness of production

***Keywords** : Budget Cost of Production, Role, Effectiveness Product*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian pada saat ini sangatlah tidak menentu, hal tersebut disebabkan oleh gejolak politik yang berpengaruh besar dalam perekonomian bangsa kita. Dapat dilihat dalam situasi yang baru-baru ini melanda bangsa kita, dimulai dari krisis moneter yang berkepanjangan yang mengakibatkan dunia usaha kita banyak yang mengalami keterpurukan. Situasi ini terjadi pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar, bahkan beberapa perusahaan telah mengalami kebangkrutan. Salah satunya adalah masalah tingginya biaya operasi perusahaan.

Setiap perusahaan, terutama perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha untuk mempertahankan keberadaannya dan terus berkembang untuk jangka waktu yang panjang dengan melakukan usaha-usaha yang sesuai dengan keadaan perusahaan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menciptakan suatu sistem pengendalian manajemen sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan efektif.

Para pemimpin perusahaan sekarang ini dihadapkan pada suatu keadaan yang mengharuskan mereka mempunyai kemampuan bersaing dengan perusahaan yang sejenis, terutama dalam menghadapi pesaing baru yang mengelola perusahaannya dengan cara yang lebih baik, dalam arti telah mengikuti dan menerapkan perkembangan ilmu dan teknologi serta menerapkan metode pengawasan sedemikian rupa sehingga efisiensi dan efektivitas usaha dapat dicapai guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Oleh karena itu, manajemen dituntut untuk melakukan perencanaan anggaran produksi dan pengendalian produksi yang efektif dan efisien sesuai dengan fungsi-fungsi manajerialnya. Sehingga akan menghasilkan produk yang optimum serta keputusan yang tepat untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai.

Dengan adanya perencanaan anggaran biaya produksi diharapkan perusahaan dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang dianggarkan oleh perusahaan,

sehingga tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap anggaran produksi. Pengendalian produksi yang didukung oleh *controller* yang membantu manajer perusahaan menganalisis, melakukan penilaian dan rekomendasi serta memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi diharapkan kemungkinan penyimpangan yang terjadi dapat ditekankan semaksimal mungkin, sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu dalam mencapai efektivitas terhadap produksi.

Untuk dapat melaksanakan pengendalian produksi dengan baik, maka pada umumnya manajemen perusahaan akan mempergunakan anggaran sebagai alat untuk pengendalian produksi tersebut. Pada dasarnya anggaran yang di pergunakan untuk mengadakan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan yang bersangkutan. Di dalam pelaksanaan proses produksi di suatu perusahaan ada beberapa jenis anggaran yang berkaitan erat di dalamnya, yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik (Ahyari , 2012).

CV.Prama Agro Sentosa merupakan sebuah pabrik penggilingan padi (*ricemill)* yeng memproduksi beras, dimana beras yang dihasilkan beraneka ragam jenis dan kualitasnya, tergantung dari bahan baku utamanya yaitu padi. Sebagaimana perusahaan penggilingan padi yang lainnya, perusahaan ini juga mempunyai pesaing-pesaing yang cukup banyak dipasaran sehingga perusahaan ini di tuntut untuk dapat bertahan dan bersaing di tengah ketatnya persaingan. Adapun tujuan perusahaan dalam melakukan kegiatannya yaitu mendapatkan laba semaksimal mungkin guna mempertahankan kelangsungan operasional dan memungkinkan perusahaan melakukan ekspansi di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis penelitian dengan judul **"Peranan Anggaran Produksi Sebagai Alat Bantu Manajemen dalam Menunjang Efektivitas Produksi pada CV. Prama Agro Sentosa".**

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Peranan

Agar suatu perusahaan dapat dijalankan secara efektif maka manajemen perusahaan membutuhkan suatu alat bantu yang berperan dalam menggerakkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan tersebut. Berikut beberapa Pengertian peranan. Menurut Soerjono Soekarto (2011) adalah sebagai berikut : peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia akan menjalankan suatu peranan.

2.2 Pengertian Anggaran dan Penyusunan Anggaran

Menurut Sasongko dan Parulian (2013) Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoeh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

2.3 Jenis-jenis Anggaran

Menurut Nafarin (2010) Anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang sebagai berikut:

1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari:
   a) Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.
   b) Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan sutu tingkat kapasitas tertentu.
2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari:

a) Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu umumnya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.
b) Anggaran kontinu e adalah anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah dibuat. Misalnya tiap bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan.

3. Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari
   a) Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek.
   b) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut anggaran modal *(capital budget)*. Anggaran jangka panjang tidak berupa anggarana modal. Anggaran jangka panjang diperluhkan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek.
4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran induk *(master budget)*. Anggaran induk merupakan konsolidasi rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan dipecah menjadi anggaran triwulan. Anggaran triwulan kemudian dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.
   a) Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari :
      - Anggaran penjualan
      - Anggaran biaya pabrik yangterdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik.
      - Anggaran beban usaha
      - Anggaran laporan laba rugi
   b) Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyususn anggaran neraca. Anggaran keuangan, antara lain terdiri dari:
      - Anggaran kas
      - Anggaran piutang
      - Anggaran persediaan
      - Anggaran utang
      - Anggaran neraca.
5. Menurut kemampuan menyusun , anggaran teridiri dari:
   a. Anggaran komprehensif merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operaional dengan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap.
   b. Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Misalnya karena keterbatasan kemampuan, maka yang dapat disusun hanya anggaran operasional.
6. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari;
   a. Anggaran apropriasi *(appropriation budget)*, adalah anggaran yang dibentuk bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
   b. Anggaran kinerja *(performance budget)*, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi (perusahaan) misalnya untuk menilai apakah biaya/beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

2.4 Karakteristik Anggaran

Anthony dan Govindarajan (2011) mengemukakan bahwa anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit-unit bisnis tersebut.
2. Dinyatakan dalam istilah moneter
3. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun.
4. Merupakan komitmen manajemen, dimana manajemen setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran.
5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran
6. Setelah di setujui, anggaran hanya dapat diunbah dalam kondisi-kondisi tertentu.
7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan.

2.5 Manfaat Anggaran

Anggaran mempunyai beberapa macam manfaat. Manfaat anggaran menurut Supriyono (2011) antara lain untuk :

1. Perencanaan kegiatan organisasi pusat atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek.
2. Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek.
3. Alat komunikasi rencana kepada manajer pusat pertanggung jawaban.
4. Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggung jawaban yang dipimpin.
5. Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat pertanggung jawaban dan para manajernya.
6. Alat pendidikan para manajer.

2.6 Tujuan Anggaran

Menurut Sukarno (2012) tujuan anggaran adalah :

1. Untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari keracuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.
2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
4. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perluh tidaknya tindakan koreksi.

2.7 Keterbatasan Anggaran

Meskipun anggaran memiliki beberapa keunggulan, namun anggaran juga memiliki beberapa keterbatasan atau kelemahan. Keterbatasan anggaran menurut Supriyono (2011) adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang ketepatannya tergantung pada kemampuan pengestimasi atau pemproyeksi, yang di mana ketidaktepatan estimasi mengakibatkan manfaat perencanaan tdak dapat tercapai.

2. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada kondisi dan asumsi tertentu, yang dimana jika kondisi asumsi yang mendasarinya berubah maka perencanaan dan anggaran harus di koreksi.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak, terutama para manajer terus bekerja sama secara terkoordinasi dan berusaha mencapai tujuan.
4. Perencanaan dan anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen dan pertimbangan manajemen.

2.8 Anggaran Produksi

.Jumlah barang yang akan dijual akan mencerminkan pendekatan yang berbeda yaitu kebijaksanaan tingkat produksi yang menekankan kepada stabilitas produksi persediaan yang mengambang, dan jika kebijaksanaan ditekankan pada tingkat penjualan maka pengendalian tingkat persediaan yang mengambang. Kombinasi keduanya akan memunculkan produksi dan persediaan akan berubah dalam batas waktu tertentu. (Ahyari,2012)

2.8.1 Pengertian Anggaran Produksi

Menurut Sasongko dan parulian (2013), anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada dianggaran penjualan.

2.9 Efektivitas Produksi

Efektivitas tidak bisa disamakan dengan efisien, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Menurut Komarudin (2011) pengertian efektivitas yaitu efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pada CV.Prama Agro Sentosa yang berlokasi di jalan raya Tugu Mulyo, RT 02 Kel. Karang ketuan Lubuk Linggau. Waktu penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis mulai dari bulan november 2015 sampai selesai.

Operasional Variabel

1. Variabel Independen (Variabel X)
   Dalam penelitian ini variabel independennya adalah peranan anggaran produksi
2. Variabel Dependen (Variabel Y)
   Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah efektivitas produksi.

3.2 Sumber, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

4. PEMBAHASAN

4.1 Penyusunan Anggaran Produksi pada CV. Prama Agro Sentosa

Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat bahwa prosedur penyusunan anggaran produksi pada CV. Prama Agro Sentosa telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari terlaksananya penyusunan anggaran yang sesuai dengan karateristik anggaran, yaitu:

a. Dinyatakan dalam satuan moneter atau keuangan

Anggaran yang terdapat pada CV. Prama Agro Sentosa tidak hanya anggaran yang berdasarkan quantity (jumlah) saja, tetapi juga dinyatakan dalam satuan moneter (keuangan), yang dimana satuan moneter ini adalah rupiah.

b. Mencakup jangka waktu tertentu

Anggaran produksi yang terdapat didalam perusahaan CV. Prama Agro Sentosa disusun untuk jangka waktu satu tahun yang dibagi empat triwulan.

c. Mencakup komitmen manajemen

Didalam penyusunannya, anggaran produksi pada perusahaan CV. Prama Agro Sentosa melibatkan elemen manajemen. Hal ini dapat terlihat dalam keikutsertaan manajer produksi yang terkait dengan proses penyusunan anggaran. Yang dimaksudkan agar anggaran yang dibuat sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing - masing manajer yang terkait.

d. Adanya otorisasi anggaran produksi

Usulan anggaran produksi yang telah dibuat oleh manajer produksi sebelumnya disahkan menjadi anggaran sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu, setelah ada persetujuan oleh pihak yang lebih tinggi, yaitu pimpinan barulah anggaran yang telah disusun tersebut dapat digunakan.

e. Revisi anggaran

Anggaran yang telah disahkan tidak dapat diubah, kecuali perusahaan berhadapan pada situasi khusus baru diadakan revisi anggaran. Situasi khusus tersebut seperti perekonomian yang memburuk atau dikarenakan adanya kebijakan pemerintah.

f. Adanya pengukuran atas pelaksanaan produksi

Realisasi produksi jika dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan kemudian selisihnya dianalisis, maka dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan dan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Dari hasil yang ada pada tahun yang bersangkutan selalu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhannya.

4.2 Analisis Tahun 2012

Biaya Bahan Baku

Berdasarkan tabel 4.5 diatas pada tahun 2012 antara anggaran biaya bahan baku dengan realisasi biaya bahan baku mengalami selisih yang positif, karena realisasi untuk biaya bahan baku ternyata lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. yaitu dengan selisih sebesar Rp125.000 dan dengan persentase selisihnya sebesar 0,3%.

Biaya Tenaga Kerja Langsung

Pada tahun 2012 biaya tenaga kerja langsung pada CV.Prama Agro Sentosa antara realisasi biaya tenaga kerja langsung dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung mengalami selisih positif dimana realisasi biaya tenaga kerja langsung lebih rendah sebesar Rp.50.000 dibandingkan dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung dan dengan persentase selisih sebesar Rp.2,2%.

Biaya Overhead Pabrik

Pada tahun 2012 antara anggaran dan realisasi CV. Prama Agro Sentosa mengalami selisih yang positif, dimana realisasi biaya overhead pabrik lebih rendah dibandingkan dengan anggaran biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp.1.675.324 dan dengan persentase selisih sebesar Rp. 14,7%.

4.3 Analisis Tahun 2013

Biaya Bahan Baku

Berdasarkan tabel 4.5 dan uraian diatas dapat disimpulkn pada tahun 2013 antara anggaran biaya bahan baku dan realisasi biaya bahan baku mengalami selisih yang positif juga, karena realisasi untuk biaya bahan baku ternyata lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya yaitu dengan selisih Rp67.000 dan dengan persentase sebesar 0,1% .

Biaya Tenaga Kerja Langsung

Pada tahun 2013 biaya tenaga kerja langsung pada CV. Prama Agro Sentosa antara realisasi dan anggaran nya mengalami selisih yang negatif, dimana realisasi biaya tenaga kerja langsungnya lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran biaya tenaga langsungnya yaitu sebesar Rp.25.000 dan dengan persentase selisih sebesar -1,1%.

Biaya Overhead Pabrik

Pada tahun 2013 anggaran biaya overhead pabrik pada CV. Prama Agro Sentosa antara realisasi biaya overhead pabrik dengan anggaran biaya overhead pabrik mengalami selisih yang positif, dimana realisasi biaya overhead pabrik lebih rendah dibandingkan dengan anggaran biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp. 1.633.834 dengan persentase selisih sebesar 8,8%.

4.4 Analisis Tahun 2014

Biaya Bahan Baku

Berdasarkan tabel 4.6 dan uraian diatas, maka dapat disimpulkan tahun 2014 antara anggaran biaya bahan baku dan realisasi biaya bahan baku mengalami selisih yang positif juga, karena realisasi untuk biaya bahan baku ternyata lebih rendah dibandingkan dengan
realisasi biaya bahan baku yaitu dengan selisih Rp 2.100.000 dan dengan persentase 3,1% meskipun pada triwulan ke 2 dan ke 4 mengalami musim paceklik.

Biaya Tenaga Kerja Langsung

Pada tahun 2014 biaya tenaga kerja langsung pada CV. Prama Agro Sentosa antara realisasi dan anggarannya mengalami selisih yang positif, dimana realisasi biaya tenaga kerja langsungnya lebih rendah dibandingkan dengan anggaran biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar Rp. 210.500 dan dengan persentase selisih sebesar 8,2%.

Biaya Overhead Pabrik

Pada tahun 2014 anggaran biaya overhead pabrik pada CV. Prama Agro Sentosa antara realisasi biaya overhead pabrik dengan anggaran biaya overhead pabrik mengalami selisih yang positif, dimana realisasi biaya overhead pabrik lebih rendah dibandingkan dengan anggaran biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp. 600.500 dengan persentase selisih sebesar 4,7%.

4.5 Efektivitas Produksi Pada CV. Prama Agro Sentosa

CV. Prama Agro Sentosa menentukan tolok ukur efektivitas sebesar 10% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika selisih anggaran dengan realisasi dibawah 10% maka perusahaan telah dinilai efektif. Sebaliknya jika anggaran dengan realisasi melebihi 10% dari anggaran maka dinilai tidak efektif. Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dari tahun 2012 sampai dengan 2014 selisih anggaran biaya produksi dengan realisasi tidak melebihi batas standar penilaian efektivitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian Anggaran Produksi pada CV. Prama Agro Sentosa dapat dikatakan efektif.

4.6 Peranan Anggaran Produksi Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Menunjang Efektivitas Produksi

Anggaran biaya produksi pada CV. Prama Agro Sentosa telah dapat dikatakan memadai karena telah didukung oleh unsur-unsur dari pengendalian biaya produksi itu sendiri seperti: penentuan standar anggaran, perbandingan selisih, pencarian penyebab penyimpangan, dan perbaikan.

Maka dapat dikatakan bahwa anggaran biaya produksi berperan terhadap efektivitas biaya produksi yang diterapkan oleh CV. Prama Agro Sentosa karena anggaran biaya produksi yang diterapkan oleh CV. Prama Agro Sentosa telah mencapai target yang di tetapkan perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai anggaran produksi terhadap efektivitas biaya produksi, maka penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut;

1. Prosedur dan kebijakan penyusunan anggaran produksi yang dilaksanakan oleh CV. Prama Agro Sentosa telah efektif, karena:
   a. Pada saat penyusunan anggaran produksi, perusahaan menganalisis faktor-faktor intern, seperti informasi di masa lalu, serta perubahan lingkungan eksternal.
   b. Kegiatan produksi diawasi langsung oleh manajer produksi
   c. Setiap bagian yang terkait selalu mengkomunikasikan rencana kegiatan mereka kepada berbagai manajer pusat pertanggung jawaban didalam proses penyusunan anggarannya.
   d. Manajer anggaran produksi dibuat untuk mengetahui efektivitas biaya diperlukan maka manajer produksi membuat pula anggaran mengenai biaya-biaya yang diperluhkan didalam berlangsungnya proses produksi. Biaya-biaya tersebut meliputi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Usulan anggaran telah dapat ditetapkan jika memperoleh pengesahan dari direktur utama. Apabila ternyata usulan tersebut belum dapat disahkan, maka manajer produksi perluh menganalisis kembali untuk dilakukan revisi.
   e. Anggaran dapat diubah, jika perusahaan dalam situasi khusus.
2. Anggaran produksi pada CV. Prama Agro Sentosa dapat dikatakan efektif dan memadai karena disamping telah tercapai target terhadap standar penilaian efektivitas yang telah ditetapkan (dalam hal ini standarisasi efektivitas yang telah ditetapkan sebesar 10% dari anggaran yang telah ditentukan).
3. Anggaran biaya produksi yang disusun dengan baik merupakan langkah yang memberikan informasi dan standar pengukuran yang jelas sehingga dapat memudahkan manajemen dalam melakukan pengendalian biaya produksi yang efektif dan dapat kembali dijadikan acuan dalam pembuatan anggaran tahun berikutnya dengan lebih baik lagi. Dalam hal ini anggaran biaya produksi yang disusun CV. Prama Agro Sentosa memiliki peranan terhadap tercapainya target standarisasi kinerja efektivitas anggaran biaya produksi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah dibuat, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada CV. Prama Agro Sentosa dimasa mendatang.

1. Sebaiknya diadakan pergantian mesin dari mesin tradisional ke mesin yang lebih modern, yang bertujuan agar biaya gaji lembur dapat berkurang.
2. Diperlukan adanya penambahan mesin oven untuk membantu mempercepat proses pengeringan bahan baku, sehingga mempelancar proses produksi.

3. Karena umur mesin yang sudah cukup lama, sebaiknya diadakan pergantian mesin yang baru, yang bertujuan untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan reparasi mesin yang harus dikeluarkan perusahaan.

6. REFERENSI

[1] Anthony dan Govindarajan (2011). *Karakteristik anggaran*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Nomor 04 Tahun ke-2.

[2] Firdaus dan wasilah (2012). *Akuntansi biaya*, Jakarta: Salemba empat.

[3] Julita (2015). *Analisis anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian biaya produksi pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.* Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No.1/Maret 2015.

[4] Komarudin (2011). *Pengertian Peranan.* Ensiklopedia manajemen. Jakarta Bumi Aksara. *Macam-Macam Anggaran Perusahaan*.diakses dari *http://onankost. Blogspot.com/2010/04* macam-macam anggaran perusahaan.hmtl pada tanggal 26 Oktober 2010.

[5] Nafarin (2010). *Penganggaran Perusahaan.* Jakarta: Salemba empat.

[6] Rosidah, Euis dan Krisnandi, Cepi (2011). Peranan Anggaran Biaya Produksi Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Biaya Produksi (Studi Kasus pada PT. Bineatama KayoneLestari Tasikmalaya).*Jurnal Ilmiah Akuntansi FE Unsil*, Vol. 3, No. 1, 2008.

[7] Sasongko dan Parulian (2010). *Anggaran.*Jakarta: Salemba empat.

[8] Sanusi,Anwar (2011). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Salemba empat.

[9] Sutikno, Adelia, dan Tin Se.(2011). Peranan Anggaran Produksi Sebagai alat Bantu Manajemen Dalam Menunjang Efektifitas Produksi (Studi Kasus Pada PT. Timbul Jaya Pekalongan). *Jurnal ilmiah Akuntansi*. Nomor 04 Tahun ke-2 Januari-April.

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS DI KOTA PALEMBANG

Ketut Dwi Puji Lestari [1)], H. Hasan Kuzery [2)], Yeni Widyanti [3)]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
dwiketut91@gmail.com [1]
hasankuzery@binadarma.ac.id [2]
yeniwidyanti@binadarma.ac.id [3]

Abstract

The purpose from this research is for knows the inhibiting factors of hotel tax on boarding houses in Dinas Pendapatan Daerah of Palembang city. The data used are primary data and secondary data. Technical of collection data is using observation, interview,documentation and literature. Analysis technical used is qualitative descriptive. The results of this research showed that there are several factors inhibiting of hotel tax on boarding house such as unregistered taxpayers: the low awareness and the level of discipline and lack of knowledge entrepreneurs boarding houses, the level of understanding businessman bording houses against the tax system is still low, lack of support to the dispenda and socialization is not maximized, the owner of boarding houses is difficult to find, businessman boarding houses cover up thr truth, and they object to the predertemined rates.

Keywords: *Local Tax, Hotel Tax, Hotel Tax Boarding House, Inhibitors Factors of Withholding Hotel Tax of Boarding House*

1. PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan yang dapat dimaksimalkan dan telah diatur oleh Undang-Undang yaitu Pajak dan Retribusi daerah (Siahaan, 2010). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah tidak diperbolehkan melakukan pemungutan pajak daerah selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota ada 11 (sebelas) jenis pajak yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, yang dimaksud Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencangkup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Kota Palembang merupakan kota yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung kekota ini dengan berbagai alasan seperti bekerja, belajar, berwisata maupun berbisnis. Banyaknya masyarakat dari luar yang datang kekota palembang menimbulkan permasalahan terutama tempat tinggal yang mereka perlukan. Penduduk asli kota palembang memanfaatkan situasi ini dengan mendirikan usaha rumah kos. Untuk mendukung dan memanfaatkan potensi yang ada, pihak Dinas

Pendapatan Daerah kota Palembang mencantumkan rumah kos sebagai salah satu objek pajak daerah dalam Pajak Hotel.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai lembaga pemerintah yang terkait dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemungutan pajak hotel atas rumah kos dikota Palembang, perlu melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemungutan pajak hotel atas rumah kos dikota Palembang sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah kota palembang. Untuk lebih jelasnya pendapatan asli daerah kota palembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang 2012-2014

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2012	287.152.544.690,00	333.104.821.406,80	116,00
2.	2013	322.113.406.602,00	357.230.028.259,12	110,90
3.	2014	359.888.500.000,00	463.574.599.151,32	117,10

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2015.

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2012 realisasinya mencapai 116,00%, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 110,90%, kemudian tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 117,10%. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kota Palembang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	20.000.000.000,00	19.851.876.671,50	99,26
2013	23.000.000.000,00	30.720.894.276,20	133,57
2014	35.750.000.000,00	38.869.545.560,00	108,73

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa realisasi dibandingkan targetnya penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2012 sebesar 99,26%, di tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 133,57%, kemudian ditahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi 108,73%. Tabel diatas menunjukan penurunan persentase dari realisasi terhadap target, hal ini disebabkan karena wajib pajak hotel atas rumah kos belum mengetahui dan belum memenuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2013: 8) faktor-faktor penghambat pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang bukan berasal dari wajib pajak. Perlawanan pasif ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan moral dan intelektual penduduk, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang berasal dari wajib pajak yang disebabkan oleh penghindaran pajak dan pengelakan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **"Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah di Kota Palembang".**

1. KAJIAN LITERATUR

Definisi Pajak

Definisi pajak menurut para ahli memiliki pengertian yang berbeda- beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut memiliki tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Menurut beberapa ahli dalam bukunya Resmi (2011: 1) pajak di definisikan sebagai berikut:
   a. Menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
   b. Menurut Andriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang akan dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk, dan berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
   c. Menurut Smeeth Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluran pemerintah.

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 8) hambatan pemungutan pajak diantaranya perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif adalah Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi karena ada keadaan yang ada disekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan yang erat hubungannnya dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit di pahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada dua cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:

a. Penghindaran pajak *(Tax avoidance*), usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
b. Pengelakan pajak *(Tax evasion)*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Pengertian Pajak Hotel

Menurut Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Ayat (21) Undang-Undang tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencangkup

juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari (10) sepuluh.

Pengertian Rumah Kos

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui:

a. In-de-kos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan); memondok;
b. Meng-in-de-kos-kan adalah menumpangkan seseorang tinggal dan makan dengan membayar; memondokkan

3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang yang beralamat di Jl.Merdeka No. 21 Kota Palembang, 3013

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan interview dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan pengusaha rumah kos. Data sekuder dalam penelitian ini didapat dari data yang telah diolah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang berupa target dan realisasi penerimaan pajak hotel atas rumah kos pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka

Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan oleh peneliti karena peneliti melakukan analisis-analisis yang menjelaskan atau mentransformasikan, menterjemahkan, dan menjelaskan makna data atau fenomena-fenomena yang didapati oleh peneliti secara langsung dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pemungutan pajak hotel atas rumah kos yang disebabkan oleh perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan jumlah wajib pajak hotel atas rumah kos pada Dinas Pendapatan Daerah Kota palembang mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini

Tabel 4.1
Perkembangan jumlah wajib pajak hotel atas rumah kos pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2012-2014

Tahun	Jumlah wajib pajak hotel atas rumah kos pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
2012	35
2013	39
2014	51

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.1 menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak hotel atas rumah kos pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah rumah kos paling banyak yaitu pada tahun 2014 sebanyak 51. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya masyarakat yang berasal dari luar daerah terutama mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Kota Palembang.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, belum ada peraturan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai peraturan khusus rumah kos, sampai saat ini peraturan untuk rumah kos masih membaur menjadi satu dengan peraturan pajak hotel. Meningkatnya jumlah wajib pajak hotel atas rumah kos pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menyebabkan kontribusi yang diberikan oleh rumah kos juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya target dan realisasi penerimaan pajak hotel atas rumah kos pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2012-2014 dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Target dan realisasi penerimaan pajak hotel atas rumah kos pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2012-2014

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2012	2.000.000.000	1.985.187.667.12	99,26%
2013	2.300.000.000	3.072.089.427,62	133,57%
2014	3.570.500.000	3.886.954.556,00	108,86%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2015.

Realisasi penerimaan pajak hotel atas rumah kos terhadap target penerimaannya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang 2012-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana tahun 2012 persentasenya mencapai 99,26%, kemudian tahun 2013 persentasenya mengalami peningkatan menjadi 133,57% dan tahun 2014 persentasenya kembali mengalami penurunan menjadi 108,86%. Hal ini terbukti bahwa dengan semakin banyaknya jumlah rumah kos yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menyebabkan penerimaan pajak hotel atas rumah kos juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Faktor-faktor penghambat pemungutan pajak hotel atas rumah kos pada dinas pendapatan daerah kota palembang

1. Perlawanan pasif

Perkembangan moral dan intelektual penduduk

Perkembangan moral dan intelektual penduduk merupakan perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya moral dan tingkat kesadaran masyarakat. Rendahnya pengetahuan perpajakan dalam masyarakat merupakan suatu kendala tersendiri yang membutuhkan perhatian. Perlawanan untuk tidak membayar pajak terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap pengetahuan perpajakan. Masyarakat secara tidak sadar sudah melakukan suatu perlawanan dalam bentuk tidak membayar pajak. Lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, sebagian diantara rakyat tidak pernah sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab perlawanan pasif dalam perkembangan moral dan intelektual penduduk dikota Palembang adalah ditandai dengan masih rendahnya kesadaran dan tingkat kedisiplinan pengusaha rumah kos karena mereka beralasan tidak memiliki waktu untuk mendaftarkan usaha dan melakuan pembayaran pajak yang terutang atas rumah kos milik mereka serta kurangnya pengetahuan pengusaha rumah kos terhadap peraturan pajak rumah kos. Dengan demikian hal ini akan menghambat proses pemungutan pajak hotel atas rumah kos yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat

Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit dan sulit untuk dipahami oleh wajib pajak, hal ini akan membuat wajib pajak malas untuk membayar pajak dan akan memicu rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus perlawanan terhadap pajak. Sistem perpajakan yang belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat serta cara penghitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan banyaknya wajib pajak yang belum menyetorkan pajaknya.Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak hotel atas rumah kos di kota Palembang adalah *self assessment system.*

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab perlawanan pasif dalam sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat adalah pengusaha rumah kos belum memahami sepenuhnya tentang *self assessment system.* Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengusaha rumah kos terhadap sistem perpajakan yang diterapkan untuk rumah kos masih rendah khususnya pengusaha rumah kos.

Sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

Sistem kontrol merupakan hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak. Untuk melaksanakan sistem kontrol yang baik diperlukan pengawasan dari aparat-aparat dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak untuk menghadapi kendala-kendala dalam pemungutan pajak. Sistem kontrol yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada pengusaha rumah kos tentang pemungutan pajak hotel atas rumah kos dan melakukan pendataan secara langsung dengan terjun kelapangan untuk mendata rumah kos yang seharusnya terdaftar sebagai objek pajak. Sistem kontrol memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pemungutan pajak. Jika sistem kontrol dapat dilaksanakan dengan baik hal ini akan berdampak pula terhadap jumlah penerimaan pajak serta meningkatnya jumlah wajib pajak rumah kos yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab perlawanan pasif dalam sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik karena kurangnya dukungan dari pengusaha rumah kos kepada pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam menjalankan sistem kontrol untuk mendata jumlah rumah kos sehingga masih banyak rumah kos yang belum didata oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk dikenakan pajak rumah kos serta sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang belum maksimal karena mereka hanya memberikan himbauan kepada pengusaha rumah kos untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak tanpa ada sosialisasi secara langsung mengenai pemungutan pajak rumah kos yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan ketidaktahuan pengusaha rumah kos yang merupakan wajib pajak terhadap pemungutan pajak yang dikenakan atas rumah kos.

2. Perlawanan aktif

Penghindaran pajak *(tax avoidance)*

Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak yang

terjadi dikota Palembang disebabkan oleh pengusaha rumah kos tersebut Pengusaha rumah kos yang tidak berada ditempat atau berada diluar daerah menyebabkan pihak Dinas Pedapatan Daerah mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan terhadap rumah kos yang seharusnya menjadi objek pajak.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab perlawanan aktif dalam penghindaran pajak *(tax avoidance)* yang dilakukan oleh pengusaha rumah kos diantaranya pengusaha rumah kos sulit ditemui, dengan alasan pemiliknya tidak ditempat atau bahkan berada diluar kota dan biasanya mereka hanya menggunakan jasa keamanan dan kebersihan yang digunakan untuk menjaga keamanan dan kebersihan kos-kosan milik mereka. Hal ini menjadi penghambat bagi pihak pihak Dinas Pendapatan Daerah bagian pajak hotel dalam melakukan pendataan terhadap rumah kos.

Pengelakan pajak *(tax evasion)*

Pengelakan pajak *(Tax evasion)* merupakan usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya juga melakukan hal yang sama. Suatu hal yang wajar apabila seorang wajib pajak membayar pajaknya tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan mengingat asumsi yang dibuat pada waktu merencanakan undang-undang tersebut bahwa wajib pajak akan melaporkan semua penghasilannya dengan benar dan mengklaim semua potongan yang diperkenankan undang-undang, sehingga secara moral pun dianggap tidak salah apabila pengurangan beban pajak melalui pengelakan pajak tersebut masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan yang berlaku.

Pengusaha rumah kos yang ada dikota Palembang yang seharusnya menjadi objek pajak menutupi kebenaran dengan mengatakan hal yang tidak benar. Ini cukup menyulitkan pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk melakukan pemungutan sekaligus pendataan rumah kos yang menjadi objek pajak. Sulitnya dukungan terutama informasi tentang jumlah rumah kos yang mereka miliki akan berdampak terhadap penerimaan pajak hotel atas rumah kos yang ada di kota Palembang.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab perlawanan aktif dalam pengelakan pajak *(tax evasion)* adalah pengusaha rumah kos berusaha menutup-nutupi kebenaran dengan mengatakan jumlah kamar yang mereka miliki kurang dari 10 (sepuluh) serta mereka keberatan dengan tarif yang telah ditentukan dalam pemungutan pajak hotel atas rumah kos yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan menyewakan rumah kos, mereka mengharapkan agar tarif rumah kos tidak disamakan dengan hotel.

5. SIMPULAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan pengusaha rumah kos dikota Palembang, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penghambat pemungutan pajak hotel atas rumah kos pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah:

1. Perlawanan pasif sangat erat kaitannya dengan masih rendahnya kesadaran dan tingkat kedisiplinan pengusaha rumah kos serta kurangnya pengetahuan pengusaha rumah kos terhadap peraturan pajak rumah kos, tingkat pemahaman pengusaha rumah kos terhadap sistem perpajakan yang diterapkan masih rendah dan kurangnya dukungan dari pengusaha rumah kos kepada pihak

Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pendataan wajib pajak rumah kos serta sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang belum maksimal

2. Perlawanan aktif yang sangat erat kaitannya dengan pengusaha rumah kos sulit ditemui, dengan alasan pemiliknya tidak ditempat atau bahkan berada diluar kota dan pengusaha rumah kos menutup-nutupi kebenaran serta mereka keberatan dengan tarif atas pajak rumah kos yang telah ditentukan dalam pemungutan pajak hotel atas rumah kos.
3. Penerimaan pajak hotel atas rumah kos pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mengalami peningkatan, pada tahun 2012 persentasenya mencapai 99,26%, tahun 2013 persentasenya mencapai 133,57% dan tahun 2014 persentasenya mencapai 108,86%. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya rumah kos yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang membuat penerimaan pajak hotel atas rumah kos juga mengalami peningkatan.

SARAN

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang seharusnya meningkatkan kinerja petugas pajak hotel atas rumah kos dengan memberikan pelatihan kepada petugas mengenai pemeriksaan dan peraturan perpajakan daerah agar penerimaan pajak hotel atas rumah kos meningkat dari tahun-tahun sebelumnya serta pihak dinas pendapatan daerah lebih memaksimalkan sosialisasi tentang pajak hotel atas rumah kos.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang seharusnya membuatkan peraturan khusus mengenai pajak rumah kos sehingga peraturan pajak rumah kos tidak disamakan dengan pajak hotel mengenai tarif dan perlakuannya, sehingga tarifnya bisa lebih disesuaikan dengan kondisi yang ada dikota Palembang saat ini.

6. REFERENSI

[1] Anugrah, Nunu. 2013, *Kendala Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah kost di Kelurahan Sei Bangkong Kecamatan Pontianak Kota*, Jurnal Penelitian Universitas Tanjungpura, Pontianak.

[2] Astuti, Indah. P. 2009, *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

[3] Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. 2009, *Pajak Hotel*, Diakses pada Tanggal 05 November 2015, dari http://dispenda.palembang.go.id

[4] Fitriandi, Primandita, dkk. Undang-Undang Perpajakan,. Salemba Empat: Jakarta.

[5] Mardiasmo. 2011, *Perpajakan:* Yogyakarta.

[6] Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

[7] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[8] Rachmawati, Rika 2014. *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Yang Terdaftar Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*, Jurnal Penelitian STIE Multi Data Palembang.

[9] Resmi, Siti. 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat: Jakarta.

[10] Safitri, Nabila. 2014**,** *Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Tingkat Realisasi pajak Hotel Atas Rumah Kos Dari Tahun 2012-2014 (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)*, Jurnal Penelitian Universitas Negeri Surabaya.

[11] Safitri, Mona Ratna. 2015, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*, Jurnal Penelitian Universitas Brawijaya, Malang.

[12] Sanusi, Anwar. 2011, *Metodologi Penelitian dan Bisnis,* Salemba Empat: Jakarta.
[13] Siahaan, Marihot . P. 2010, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
[14] Setiawan, I Putu dan Devi, *Penyebab Terhambatnya Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang*, Jurnal Penelitian Universitas Brawijaya Malang.
[15] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK ATAS RUMAH KOS TERHADAP PENDAPATAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG

[1]Kiki Gustriani, [2]Hasan Kuzery, [3]Jaka Darmawan
[1,2,3] Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Darma
Palembang, indonesia
[1] gustrianikiki@rocketmail.com
[2] hasan_kuzery@gmail.binadarma.ac.id
[3]jakadarmawan@yahoo.ac.id

Abstrak

Research in this thesis aims to find out how effective taxation boarding house in the city of Palembang and how big the contribution to income tax on hotel in the city of Palembang. This type of research is descriptive with quantitative approach. Data obtained using the method of documentation and interviews. Based on the research conducted, the tax collection system boarding house in Surakarta is in conformity with applicable regulations. Boarding house tax collection for the financial year 20011 less effective with a percentage of 78.86%, for the year 2012 is said to be effective with a percentage of 99.36%, and for the years 2013 to 2014 reach a level very effectively to the achievement of more than 100%. Their tax boarding house can be one of the components to increase the hotel tax revenue. Although the contribution is not reached 1%, but the tax contribution boardinghouse against region income always experience an average increase of 0.73%.

Keywords*: boarding house tax, hotel tax, Dipenda city of Palembang*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahnya. Di dalam Undang-undang pemerintah daerah mengelolah jenis pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak pemunggutan bahan galian golongan C.

Salah satu Pajak Daerah adalah Pajak Hotel. Hotel terdiri dari berbagai macam tingkatan, termasuk di dalamnya terdapat sebuah usaha Rumah Kos. Pajak Rumah Kos ditetapkan dalam Pajak Hotel dikarenakan tidak adanya peraturan yang lebih spesifik mengenai Pajak Rumah Kos tersebut. Selama ini penerapan Rajak Kos-kosan hanya diberlakukan pada Rumah Kos-kosan yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar yang ditarik Pajak. Tarif yang diberlakukan dalam Pembayaran Pajak Rumah Kos adalah 10% dari jumlah nilai bruto persewaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 33 menyatakan, Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi dan Badan usaha yang mengusahakan Hotel.

Pembangunan yang pesat di Kota Palembang seperti kantor-kantor, sekolahan, dan universitas di kota Palembang menyebabkan banyaknya usaha-usaha rumah kos yang sangat baik bagi investasi didirikan disekitar daerah tersebut. Hal ini seharusnya membuat penerimaan yang cukup besar dengan pajak rumah kos tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, tetapi tingkat kesadaran Wajib Pajak rumah kos dalam membayar iuran pajak rumah kos masih rendah sehingga target yang ditetapkan tidak bisa terpenuhi dengan baik di karenakan Wajib Pajak masih menanyakan kemana alokasi iuran pajak yang mereka bayarkan. Perlunya sosialisasi pemerintah

terkait dengan Wajib Pajak rumah kos sehingga Wajib Pajak dapat membayarkan iuran pajak tersebut terhadap dinas pendapatan daerah.

Wajib Pajak Hotel dibedakan menjadi 9 jenis, yaitu Hotel Bintang Lima, Bintang Empat, Bintang Tiga, Bintang Dua, Bintang Satu, Melati Tiga, Melati Dua, Melati Satu, Dan Kos/Penginapan. Salah satu Pajak Hotel yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan kota palembang seperti kantor-kantor, sekolahan, dan universitas adalah Pajak Hotel katagori Rumah Kos.

masih banyaknya rumah kos yang belum didata karena saat pihak dispenda melakukan pendataan langsung kelapangan banyak pemilik rumah kos yang tidak ada ditempat. Dinas pendapatan daerah merencanakan tahun 2016 akan dilakukan Update data atau pendataan ulang, dispenda akan lebih memfokuskan melakukan pendataan di daerah sekitaran Plaju dan Bukit karena daerah ini dirasa memiliki potensi pajak rumah kos lebih banyak mengigat banyak nya universitas yang berdiri disekitaran daerah tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak rumah kos dan kontribusi pajak rumah kos terhadap pendapatan pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kota palembang tahun 2011-2014.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Sukrisno (2013:6) pengertian pajak sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang olehh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siahaan (2013:10) dengan demikian, Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggarakan pemerintahan dan pembangunandi daerah.

2.2 Pajak Hotel

Siahaan (2013 : 299-300) Sesuai dengan Undang-undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencangkup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

2.3 Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang beralamat di Jalan Merdeka No.21 Palembang.Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan suatu instansi pemerintahan di Kota Palembang yang memiliki tugas dan fungsi untuk memungut pajak daerah.

3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang yang pendeskripsiannya difokuskan pada pajak rumah kos dan pajak hotel. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak rumah kos, dan tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel atas rumah kos serta kontribusi pajak rumah kos terhadapat pajak hotel. Data yang diperoleh menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, kemudian data disusun, dijelaskan, dianalisis, dan akhirnya diperoleh kesimpulan dengan menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Penelitian ini akan mencari tingkat efektivitas pajak hotel atas rumah kos, serta menghitung besaran kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap pendapatan pajak hotel pada dinas pendapatan daerah kota palembang tahun 20011-2014, kemudian dibandingkan tingkat efektivitas dan besaran kontribusinya pada masing-masing tahunnya. Hasil perhitungan kontribusi pajak hotel atas rumah kos akan memberikan gambaran besaran kontribusi pajak rumah kos terhadap pendapatan pajak hotel serta perkembangan kontribusinya dari tahun ke tahun.

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Kepala Dinas beserta seluruh staf pegawai Dinas Pendapatan daerah kota palembang dan Kepala Bagian beserta seluruh staf pegawai Bagian Keuangan Sekretariat kota palembang Sedangkan obyek penelitian adalah sumber-sumber PAD yang berguna bagi peningkatan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber PAD yang diteliti adalah Pajak Hotel atas rumah kos, bagaimana efektivitas, laju pertumbuhannya dan kontribusinya terhadap pendapatan pajak hotel.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dokumentasi dari instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan daerah kota palembang. Dokumen yang dimaksud adalah laporan target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak hotel atas rumah kos, payung hukum pemungutan pajak hotel, serta data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode wawancara dilakukan sebagai pendukung dari teknik dokumentasi diatas. Teknik wawancara digunakan ketika ada hal yang kurang dimengerti oleh peneliti atau kurang jelas dari data yang didapatkan.

Langkah-langkah dalam menganalisis datanya adalah sebagai berikut :

a. Menyusun tabel tingkat efektivitas pemunggutan pajak hotel atas rumah kos, untuk mengetahui apakah suatu pemungutan pajak dikatakan efektif harus diperlukan suatu kriteria sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu pajak. Untuk menghitung efektivitas pajak hotel atas rumah kos maka rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$tingkat\ efektivitas = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak rumah kos}}{\text{target penerimaan pajak hotel}} \times 100\%$$

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (dalam Elbi)

Tabel 1 Kriteria efektivitas

Klasifikasi Efektivitas	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber ; Departemen Dalam Negeri, Kepdagri No.690.900.327 Tahun 1996 (dalam Elbi)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat da apabila kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

b. Menyusun tabel kontribusi realisasi pajak atas rumah kos terhadap pendapatan pajak hotel, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak atas rumah kos terhadap pendapatan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut :

$$tingkat\ kontribusi = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak rumah kos}}{\text{target penerimaan pajak rumah kos}} \times 100\%$$

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (dalam Elbi)

Tabel 2 Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,00 % - 20 %	Kurang
20,00 % - 30 %	Sedang
30,00 % - 40 %	Cukup Baik
40,00 % - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

Sumber :Depdagri, kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Elbi)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai di atas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kutang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan pajak rumah kos dengan target pajak rumah kos. Koefisien efektivitas merupakan hasil rasio antara realisasi pajak rumah kos dengan target pajak rumah kos yang telah ditentukan. Hasil penghitungan efektivitas pemungutan pajak rumah kos di kota palembang dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dapat dilihat pada

Tabel 3 dibawah ini.

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Keterangan
2011	Rp 143,000,000.00	Rp 112,760,667.03	78.86%	Kurang Efektif
2012	Rp 151,876,000.00	Rp 150,896,774.18	99.36%	Efektif
2013	Rp 200,379,457.00	Rp 234,769,817.67	117.16%	Sangat Efektif
2014	Rp 300,000,000.00	Rp 311,756,000.00	103.92	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, data di olah penulis

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa efektivitas penerimaan pajak rumah kos ini setiap tahun mengalami peningkatan. Dibandingkan dari tahun 2011 yang kriteria nya masih kurang efektif dan di tahun 2014 sudah mencapai kriteria Sangat Efektif.

Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp 112,760,667.03, sedangkat Target Penerimaan Pajak Rumah Kos pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 143,000,000.00. hal ini menunjukan bahwa Penerimaan Pajak Rumah Kos untuk Tahun 2011 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 78.86 % dan ini dalam katagori kurang efektif, untuk Tahun 2012 adalah sebesar Rp 150,896,774.18, sedangkat Target sebesar Rp 151,876,000.00. hal ini juga menunjukan bahwa Penerimaan Pajak Rumah Kos untuk tahun 2012 masih tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.36%. tahun 2013 adalah sebesar Rp 234,769,817.67, Target sebesar Rp 200,379,457.00. hal ini juga menunjukan bahwa penerimaan Pajak Rumah Kos untuk tahun 2013 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 117.16 %. Dan tahun 2014 adalah sebesar Rp 311,756,000.00, Target sebesar Rp 300,000,000.00. hal ini juga menunjukan bahwa Penerimaan Pajak Rumah Kos untuk tahun 2014 juga sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 103.92 %.

Berdasarkan data yang diterima dari dinas pendapatan daerah kota Palembang, jumlah rumah kos yang sudah terdaftar Tahun 2011-2014 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah yang terdaftar	Yang aktif membayar
2011	40	18
2012	54	25
2013	78	39
2014	99	50

Dari data di atas hanya sekitar 50% - 60% yang baru aktif dalam mebayar pajak rumah kos, berarti masih ada sekitar 40% lagi kewajiban pembayaran pajak rumah kos yang masih terpendam. masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak rumah kos karena sejauh ini sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak rumah kos ini belum diterapkan dan masih banyak rumah kos yang belum terdaftar.

Hasil penghitungan kontribusi penerimaan pajak rumah kos terhadap Pendapatan pajak hotel di dinas pendapatan daerah kota palembang dari tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tahun	Target	Realisasi	Kontribusi	Keterangan
2011	Rp 112,760,667.01	Rp 18,596,699,903.00	0.61%	Tidak Berkontribusi
2012	Rp 150,896,774.18	Rp 19,851,876,671.50	0.76%	Tidak Berkontribusi
2013	Rp 234,769,817.67	Rp 30,720,894,276.20	0.76%	Tidak Berkontribusi
2914	Rp 311,756,000.00	Rp 38,869,545,660.00	0.80%	Tidak Berkontribusi

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa Kontribusi Penerimaan Pajak Rumah Kos terhadapat Penerimaan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang setiap tahun sebagai berikut : pada tahun 2011 sebesar 0.61% atau dengan kriteria Tidak

Berkontribusi, pada tahun 2012 Kontribusi Pajak Rumah Kos terhadap Penerimaan Pajak Hotel sebesar 0,76% atau dengan kriteria Tidak Berkontribusi, pada Tahun 2013 Kontribusi Pajak Rumah Kos terhadap Penerimaan Pajak Hotel sebesar 0.76% atau masih dengan kriteria Tidak Berkontribusi, dan pada tahun 2014 Kontribusi Pajak Rumah Kos terhadap Penerimaan Pajak Hotel sebesar 0.80% atau Tidak Berkontribusi.

Hasil perhitungan diatas menunjukan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah melakukan Pemunggutan Pajak Rumah Kos dengan Efektif tetapi masih menunjukan Tidak Berkontribusi, hal ini karna target yang ditetapkan oleh DISPENDA memang kecil mengingat masih banyaknya rumah kos yang tidak aktif membayar pajak mereka dan juga masih banyaknya rumah kos yang belum memiliki izin dan belum terdaftar di DISPENDA, Target yang ditetapkan berdasarkan realisasi tahun lalu (incremental) bukan berdasarkan potensi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dikatakan bahwa kos-kosan yang memiliki lebih dari 10 kamar akan dikenakan pajak. Hal ini menimbulkan kecemburuan pada pengusaha rumah kos yang memiliki 10 kamar tetapi beromzet kecil dengan rumah kos yang memiliki kurang dari 10 kamar tetapi beromzet cukup besar.

Meskipun kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Pajak Hotel sangat kecil bahkan tidak mencapai 1%, namun adanya pajak rumah kos ini juga berperan dalam peningkatan Pendapatan Pajak Hotel. Apalagi prospek ke depan untuk rumah kos di Kota Palembang cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya beberapa Universitas Negeri maupun Swasta yang cukup digemari, Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Swasta, serta Pabrik dan Mall yang ada di Palembang menyebabkan banyaknya rumah kos yang didirikan di wilayah tersebut.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil Pembahasan dan Analisis dari Bab IV, Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos terhadap Targetnya dan Kontribusi Penerimaan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas pencapaian Target Penerimaan Pajak Rumah Kos untuk
   - Tahun 2011 sebesar 78.86 % (Cukup Efektif)
   - Tahun 2012 sebesar 99.36 % (Efektif)
   - Tahun 2013 sebesar 117.16 % (Sangat Efektitif)
   - Tahun 2014 sebesar 103.92 % (Sangat Efektif)
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Rumah Kos terhadap Penerimaan Pajak Hotel untuk Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 semuanya Tidak Berkontribusi atau kontribusinya sangat kecil.
3. Masih banyak WP yang belum membayar Pajak Rumah Kos hal ini karena belum diterapkan sanksi untuk WP yang terlambat/tidak membayar Pajak Rumah Kos tersebut
4. Banyaknya Potensi Pajak Rumah Kos yang masih terpendam karena masih banyaknya rumah kos yang belum didata oleh pihak DISPENDA.

SARAN

1. Kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, agar lebih meningkatkan lagi kinerja dari karyawannya supaya pencapaian target penerimaan pajak rumah kos ditahun-tahun berikutnya bisa selalu tercapai dan berada dalam kriteria Sangat Efektif.
2. Kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, agar Penerimaan Pajak Rumah Kos ditingkatkan lagi secara keseluruhan sehingga berada pada kriteria lebih tinggi dari Tidak Berkontribusi.

3. Kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, agar segera diterapkan Sanksi untuk WP rumah kos atas keterlambatan pembayaran. Hal ini dilakukan agar Penerimaan Pajak Rumah Kos meningkat.
4. Kepada kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, agar memerintahkan kepada petugas untuk mendatangi langsung kerumah-rumah kos untuk melakukan pendataan ulang. Berusaha menggali potensi pajak rumah kos yang masih terpendam.

6. DAFTAR PUSTAKA

[1] Agous, Sukrisno.2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat

[2] Halim, Abdul.2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

[3] Kusdianto, Elbi.2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Kota Palembang.*

[4] Pawilo, Andi Mahmudin. 2014. *Analisis kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota makassar.*

[5] Peraturan daerah kota palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

[6] Prasetya, dkk. 2015. *Pelaksanaan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di surakarta.*

[7] Primandita, dkk 2014. *Undang-undang perpajakan.*

[8] Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi penelitian bisnis*. Cetakan kelima. Jakarta: salemba empat.

[9] Sedana, dkk. 2013. *Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten gianyar.*

[10] Setianty, Illona. 2012. *Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos selama tahun 2010.*

[11] Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak daerah & restribusi daerah. Edisi revisi Jakarta: Rajawali Pers*

[12] Sulistyo, Dian Indra. 2013. *Potensi dan efektivitas pajak hotel di kabupaten semarang.*

[13] Resmi, siti. 2013. Edisi 7, buku 1. *Perpajakan*. Jakarta: salemba empat.

[14] Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PERSEDIAAN SUKU CADANG PADA PT KARYA SEMESTA INVESTAMA

Kms Muhammad Idris [1)], Poppy Indriani[2)] , Jaka Darmawan[3)]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
[1]kms.idris@yahoo.com
[2]Poppy.Indriani@binadarma.ac.id
[3]Jakadarmawan@yahoo.ac.id

Abstract

Inventory is one of the important asset had by company. Because inventory represent asset of hence must be done internal control which is good to taking care of the inventory from bad things is which is possible happened the. System of internal control of stock to control and manage the stock. Especial target from operation to the inventory is protect the inventory and report it precisely in financial statement. Method used by is approach method qualitative that is, descriptive analysis. Analysis of internal control over inventory has been running quite effective, but there is manual accounting procedures so that the implementation of the tasks yet to be effective.. Monitoring to merchanidise stock is also conducted routinely each;every one month once by warehouse shares through the stock opname.

***Keywords**: analysis, internal control structure, inventory.*

1. PENDAHULUAN

Sistempengendalian intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pengendalian intern sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi) dan manajemen secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan.

Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri. Persediaan yang dimiliki oleh setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung dari jenis usahanya. Modal yang tertanam dalam persediaan sering kali merupakan harta lancar yang paling besar dalam perusahaan, dan merupakan bagian yang paling besar dalam harta perusahaan. Penjualan akan menurun jika barang tidak tersedia dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang diinginkan pelanggan.

Pengendalian intern persediaan dapat dilakukan dengan tindakan pengamanan untuk mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, maupun tindakan penyimpangan lainnya.Kerusakan, pemasukan data yang tidak benar, lalai untuk mencatat permintaan, barang yang dikeluarkan tidak sesuai pesanan, dan semua kemungkinan lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dengan persediaan sebenarnya ada di gudang.

PT. Karya Semesta Investama Palembang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif penjualan produk jenis motor *merk* KAWASAKI dimana kegiatan operasionalnya terbagi menjadi tiga divisi yaitu divisi penjualan unit (motor), penjualan suku cadang (*spare part*), dan penjualan jasa (*service*). Sebagai salah satu main dealer Kawasaki yang sedang mengalami perkembangan di Indonesia dan telah memiliki jangkauan yang luas, penjualan suku cadang (*spare part*) mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga diperlukannya sistem pencatatan yang akurat, agar dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan apakah akan dilakukannya penambahan persediaan suku cadang (*spare part*) digudang, agar stok suku cadang tidak mengalami kekosongan yang dapat menggangu operasional perusahaan dalam penjualan suku cadang (*spare part*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis struktur pengendalian intern terhadap persediaan suku cadang (*spare part*) pada PT Karya Semesta Investama.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengertian Persediaan

Persediaan diterjemahkan dari kata "*inventory*" yang merupakan timbunan barang (bahan baku, komponen, produk setengah jadi, atau produk akhir, dll) yang secara sengaja disimpan sebagai cadangan (*safety* atau *buffer-stock*) untuk menghadapi kelangkaan pada saat proses produksi sedang berlangsung.

Menurut Rangkuti (2004;1) menyatakan bahwa persediaan merupakan bahan-bahan,bagian yang disediakan, dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu".

Menurut Assauri (2004;169) 'Persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari komponen atau langganan setiap waktu."

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah material yang berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu.

2.2 Sistem Pencatatan Persediaan

Menurut Martani (2012:250) ada dua macam metode dalam menetapkan jumlah persediaan:

a. Sistem periodik *(Periodical System)*
   Sistem Periodik adalah untuk mengetahui jumlah persediaan (*inventory*) pada suatu waktu atau periode tertentu, diadakan perhitungan di tempat atau di gudang penyimpanan persediaan (*inventory*).
b. Sistem perpetual *(perpetual sistem)*
   Sistem perpetual adalah suatu metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus menerus, setiap ada transaksi baik pembelian maupun penjualan dilakukan pencatatan terhadap persediaan sebesar harga pokoknya dengan demikian setiap saat saldo perkiraan persediaan menunjukkan saldo persediaan yang sebenarnya maka pada akhir periode akuntansi (pada saat menyusun laporan keuangan) tidak diperlukan ayat jurnal penyesuaian terhadap persediaan.

2.3 Metode Nilai Persediaan

Menurut Martani (2012:252) terdapat tiga metode yang dapat digunakan dalam menetapkan nilai persediaan:

a. Metode Identifikasi Khusus
b. Metode Biaya Masuk Pertama Keluar Pertama atau *First In First Out* (FIFO)
c. Metode Rata-Rata Tertimbang atau *Weight Average* (WA)

2.4 Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Mardi (2011:59) Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah.

Menurut IAPI dalam Agoes (2011:319.2) Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efesiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.5 Tujuan Pengendalian Intern

Menurut COSO *(the committee of sponsoring organizations)* dalam Setiawati (2011:83) tujuan pengendalian intern adalah :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Reabilitas pelaporan keuangan
3. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada

Menurut AICPA *(American Institute Certified Public Accountants)* dalam Mardi (2010:59) tujuan pengendalian internal adalah :

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan;
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi;
3. Meningkatkan efiseiensi operasional perusahaan; dan
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal bertujuan untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan setiap aktivitas akan dicapai dan tanggung jawab hukum telah terpenuhi serta mengurangi resiko-resiko yang akan dihadapi.

2.6 Komponen Pengendalian Intern

Komponen pengendalian intern menurut COSO *(the committee of sponsoring organizations)* dalam Setiawati (2011:83) adalah :

1. Lingkungan pengendalian
2. Aktivitas pengendalian
3. Penaksiran resiko
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan

3 METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Karya Semesta Investama yang beralamat di jalan Kapten A. Rivai No. 221 Palembang.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan ini yaitu: Menurut Sanusi (2011:104) ada dua sumber pengumpulan data yaitu:

1. Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan peneliti. Data primer pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara berikut ini :
   a. Observasi, yaitu peneliti mendatangi dan mengamati objek yang akan diteliti, yaitu PT Karya Semesta Investama.
   b. Wawancara, yaitu peneliti memberikan angket yang berisi beberapa pertanyaan yang terkait dengan stok persediaan suku cadang kepada Kepala Gudang yang bertanggung jawab terhadap pencatatan stok persediaan yang ada digudang, dan bagian Akuntansi terhadap sistem pencatatan persediaan.
2. Data Sekunder

   Data sekunder (kuncoro 2011) adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

3.3 Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu, analisis deskriptif.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Struktur Pengendalian Intern Persediaan Suku Cadang (Spare Part)

Persediaan merupakan unsur yang sangat penting bagi perusahaan distributor. Persediaan memiliki jumlah yang banyak baik jenisnya maupun nilainya. Sebagian besar *asset* perusahaan

tertanam dalam persediaan sehingga masalah pengelolaan serta pengendaliannya menjadi sangat penting. Usaha-usaha yang dilakukan oleh PT. Karya Semesta Investama Palembang untuk mengelola persediaan *spare part* adalah dengan menerapkan unsur-unsur pengendalian intern sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian

   Lingkungan pengendalian PT. Karya Semesta Investama Palembang telah tersusun dengan baik.Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi dimana terdapat pembagian tugas dan kewajiban.

2) Penaksiran Resiko

   Penaksiran resiko suku cadang (*spare part*) dilakukan oleh bagian gudang dengan hitungan tertentu lalu dicek ulang oleh bagian *accounting*.Penaksiran resiko dalam pengawasan internal suku cadang dapat berupa penilaian terhadap anggaran suku cadang dengan kebutuhan yang diminta oleh pelanggan bengkel.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan.Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tingkat dan fungsi organisasi.

a. Pemisahan tugas

   Pada PT. Karya Semesta Investama Palembang khususnya bagian suku cadang (*spare part*) belum ada pemisahan antara divisi servis dan *spare part*.

b. Otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas

   Otorisasi atas transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan suku cadang (*spare part*) dilakukan dengan pemberian tandatangan hanya oleh Adm. *Service* dan *Spare part* dan Manager tiap cabang.

c. Dokumen dan catatan yang memadai

   PT. Karya Semesta Investama (Main Dealer Kawasaki) Palembang untuk pengendalian intern atas setiap suku cadang (*spare part*) memiliki dokumen-dokumen dan catatan yang memiliki nomor urut tercetak hal ini bertujuan untuk pengawasan persediaan suku cadang (*spare part*).

4. Informasi dan Komunikasi

Adapun informasi yang diberikan mengenai posisi suku cadang (*spare part*) di gudang, informasi tersebut dapat dihasilkan melalui prosedur pencatatan dan pelaporan suku cadang (*spare part*) kawasaki.

5. Pemantauan

Dalam proses pengadaan dan pendistribusian serta pelaporan disusun beberapa kebijakan oleh pihak perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan pihak perusahaan.

4.2 Pembahasan Analisis Struktur Pengendalian Intern Terhadap Persediaan Suku Cadang (spare part)

Bedasarkan permasalahan yang dihadapi PT. Karya Semesta InvestamaPalembang dalam menerapkan pengendalian intern yang efektif. Pengendalian intern merupakan alat bantu bagi manajemen dalam pengendalian perusahaan termasuk untuk pengelolaan suku cadang (*spare part*). Pengendalian intern pada PT. Karya Semesta Investama Palembang adalah sebagai berikut :

1) Lingkungan pengendalian

   Struktur organisasi PT. Karya Semesta Investama Palembang yang baik telah mencerminkan suatu arah dalam pengawasan persediaan secara terkoordinir dan berjalan berdasarkan fungsi dan tugas yang telah tertera dalam struktur organisasi.

2) Penaksiran Resiko

   Penaksiran resiko persediaan dilakukan oleh pihak PT. Karya Semesta Investama (Main Dealer Kawasaki) Palembang adalah membuat analis dan laporan terhadap catatan-catatan suku cadang

(*spare part*) yang ada pada gudang suku cadang (*spare part*). Sistem yang digunakan PT Karya Semesta Palembang dalam pencatatan suku cadang (*spare part*) menggunakan sistem *periodikal* dan dalam hal penilaian persediaan, PT Karya Semesta Investama Palembang menggunakan FIFO.

3) Aktivitas Pengendalian
PT. Karya Semesta Investama Palembang dalam aktivitas pengendaliannya
melakukan pengendalian fisik dengan melakukan kegiatan rutin Opname suku cadang (*spare part*) yang ada di gudang. Kegiatan Opname ini dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk mengecek dan mengontrol jumlah suku cadang (*spare part*) yang ada sudah sesuai fisiknya dengan yang terdapat didalam gudang.

4) Informasi dan Komunikasi
Prosedur manual yang dilakukan oleh PT Karya Semesta Investama Palembang akan berdampak terlambatnya informasi dan komunikasi yang hendak disampaikan dibandingkan dengan sistem terkomputerisasi yang bersifat *online* antar setiap cabang. Dengan prosedur tersebut akan lebih mudah terjadi kekurangan ketelitian dalam penilaian dan pengelolaan suku cadang (*spare part*), sehingga kinerja pengawasan persediaan menjadi terhambat akibat informasi dan komunikasi yang kurang memadai.

5) Pemantauan
Pemantauan yang dilakukan pada PT. Karya Semesta Investama Palembang dimulai dari bagian gudang suku cadang (*spare part*).Bagian gudang suku cadang (*spare part*) merupakan sumber keluar masuknya suku cadang (*spare part*) yang kemudian dilakukan oleh bagian akuntansi dan bagian *finance* untuk mencatat persediaan, baik yang masuk maupun yang keluar. Namun kinerja dari bagian akuntansi dan *finance* hanya dipantau oleh pihak manajer cabang secara keseluruhannya dan secara umum diawasai oleh Pusat.

5 SIMPULAN

Simpulan

Pada dasarnya PT. Karya Semesta Investama Palembang masih menggunakan prosedur akuntansi yang bersifat manual sehingga pelaksanaan tugas belum dapat berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan karena pembagian tanggung jawab pelaksanaan tugas atau semua transaksi antara servis dan *spare part* dipegang oleh satu orang, sehingga keakuratan pengawasan suku cadang (*spare part*) menjadi berkurang, sedangkan pemeriksaan dokumen dilakukan melalui prosedur manual sehingga tingkat ketelitian pun menjadi berkurang.

Pemantauan yang dilakukan pada PT. Karya Semesta Investama Palembang dimulai dari bagian gudang suku cadang (*spare part*).Bagian gudang suku cadang (*spare part*) merupakan sumber keluar masuknya suku cadang (*spare part*) yang kemudian dilakukan oleh bagian akuntansi dan bagian *finance* untuk mencatat persediaan, baik yang masuk maupun yang keluar. Namun kinerja dari bagian akuntansi dan *finance* hanya dipantau oleh pihak manajer cabang secara keseluruhannya dan secara umum diawasai oleh Pusat.

PT. Karya Semesta Investama Palembang *stock* nya masih belum lengkap atau masih banyak yang tidak *ready stock*, apa lagi untuk kendaraan tipe Kawasaki keluaran tahun-tahun yang lama, sehingga hal ini mengharuskan pelanggan untuk *indent* atau *order* terlebih dahulu *spare part* yang tidak *ready* tersebut. Proses pemesanan *spare part* yang *indent* biasanya harus menunggu paling cepat 2 minggu dan paling lambat bisa sampai 1 bulan.

Saran

PT. Karya Semesta Investama Palembang perlu memperbaiki sistem dan mempergunakan program akuntansi terkomputerisasi yang lebih memadai dan program tersebut dapat *linkan* kebagian

service dan bagian *accounting* perusahaan hal ini bertujuan untuk pengolahan data yang dilakukan dapat berjalan efektif dan menghasilkan laporan yang akurat.

PT. Karya Semesta Investama Palembang perlu membentuk bagian pengendalian yang bertugas untuk mengontrol dan mengatur sistem pengawasan internal semua bagian agar semua transaksi yang ada dapat teridentifikasi dan diinformasikan secara akurat.

Perusahaan disarankan bekerja sama dengan pihak ketiga berupa perusahaan yang menjual dan menyediakan suku cadang (*spare part*) yang sama. Hal ini untuk mensosialisasikan *genuine parts* Kawasaki, mengurangi keterlambatan dan kelangkaan akan suku cadang (*spare part*) dan meningkatkan jumlah penjualan suku cadang (*spare part*) di PT Karya Semesta Investama Palembang.

6 REFERENSI

[1] Agoes, 2012. Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik", Jilid 1, Edisi Keempat, Salemba Empat

[2] Martani,2012. Akuntansi Keuangan Menengah,Salemba Empat

[3] Sanusi,2011,Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat

[4] IAI,2012. Pengantar Akuntansi,IAI

[5] Mardi, 2011, Sistem Informasi Akuntansi, Ghalia Indonesia

[6] Mulyadi, 2011, Sistem Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat

[7] Poerwadarminta,2010, Kamus Besar Bahasa Indonesia

[8] Fadly, 2012. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Persediaan Makanan dan Perlengkapan Pada Hotel The Graha Cakra, Universitas Hasanuddin, Makassar

[9] *http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-persediaan-.html*

PEMAHAMAN WP TERHADAP PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK UKM PADA KEPATUHAN WP

[1]Linda Sari, [2]Hasan Kuzery, [3]Jaka Darmawan
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Bina Darma
[1] Lindasari010594@gmail.com
[2] hasankuzery@gmail.binadarma.ac.id
[3] Jakadarmawan@yahoo.ac.id

Abstrak

This regulation was held to facilitate taxpayers in paying taxes . These regulations simplify them so that the taxpayers do not have to calculate their earnings , taxes to be paid directly multiplied by 1 % of turnover alone . But people assume that the taxation of SMEs amounted to 1 % of turnover is considered unfair for SMEs . This study aims to determine the level of understanding of the taxpayer of Government Regulation No. 46 Year 2013 and the government's efforts need to be done so that taxpayers understand and are willing to pay taxes based on Government Regulation No. 46 Year 2013.Scope of this research is the STO Palembang Seberang Ulu. The overall test results show that the understanding of taxpayers collectively influence on tax compliance . This shows that the understanding of taxpayers is very influential in terms of tax compliance in paying taxes .

Keywords : *Government Regulation No. 46 and Tax SMEs*

1. PENDAHULUAN

Tingginya populasi usia produktif di Indonesia yang tak berbanding lurus dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan, mendorong orang Indonesia berlomba-lomba menciptakan terobosan untuk meningkatkan daya saing demi memajukan perekonomian masing-masing. Tidak heran semakin banyak bermunculan pelaku usaha sektor industri Usaha Kecil Menengah (UKM). Jumlah UKM Tahun 2013 mencapai 57.900.787, UKM (Usaha Kecil Menengah) selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Pajak memiliki fungsi budgethair yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgeter, maka diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarkat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia. Pemahaman tersebut meliputi, pengetahuan NPWP, pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak, pemahaman mengenai prosedur perpajakan dan pemahaman melalui sosialisasi pajak. Kepatuhan meliputi, tepat waktu dalam penyampaian SPT dan tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak. Apabila WP memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal tersebut, maka semua kettentuan pemenuhan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan baik oleh WP. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran membayar pajak.

Wajib pajak yang dimaksud PP 46 2013 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Objek pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto yang dimaksud adalah jumlah

peredaran bruto semua gerai/*counter*/*outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar diperoleh dengan perhitungan 1% dari jumlah peredaran bruto (omset). Penerapan PP No 46 Tahun 2013 ini sepertinya lebih ditujukan pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah, karena dikenakan pada Wajib Pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8 Miliar setahun.

Dengan Adanya PP 46 ini tidak menjadikan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi lebih sedikit. Peraturan ini diadakan untuk mempermudah para wajib pajak dalam membayar pajak. Selama ini, mereka harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak yang mereka bayar berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif-tarif yang ditentukan. Peraturan ini mempermudah mereka sehingga para wajib pajak tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari omset saja. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Dimana masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pengusaha UKM. Omset belum tentu untung. Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset, hal ini akan memberatkan para wajib pajak UKM.

Berdasarkan uraian diatas masih adanya pro dan kontra terhadap peraturan PP 46 ini. Oleh sebab itu membuat saya tertarik mengambil judul **"Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM pada Kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus Pada 4 Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Sebrang Ulu)"**

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu kepatuhan Wajib Pajak (2010:138), menyatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

2.3 Tinjauan Tentang Pajak

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

PP No.46 Tahun 2013 ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 di tetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau

memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.

2.5 Kriteria Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang kriteria usaha mikro kecil menengah yaitu:

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
   a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai yang paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah).
3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
   a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebihh dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengann paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan peratuan presiden.

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Sebrang Ulu yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani No.59. 14 Ulu palembang. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman wajib pajak (UKM) yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu terhadap PP Nomor 46 Tahun 2013.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini para pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Sebrang Ulu yang berjumlah sekitar 105. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah UKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

3.2.2 Sampel

Sampel jenuh adalah teknik sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dimana sampel yang diambil adalah 105 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan statistik deskriptif, pengujian instrumen, uji asumsi klasik, uji t, dan uji R^2.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif data yang diambil untuk penelitian ini adalah jumlah dari yang didapat dari kuesioner yang telah disebarkan ke responden, dimana kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 lembar dan yang kembali sebanyak 73 lembar. Rata-rata pemahaman wajib pajak adalah: 4,16 dimana dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemahaman wajib pajak terhadap PP 46 2013 tergolang baik. Rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah: 4,28 dimana dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak terhadap PP 46 2013 tergolang baik.

4.2 Pengujian Instrumen

4.2.1 Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas yang dilakukandiperoleh nilai r hitung untuk semua item pernyataan variabel pemahaman wajib pajak bernilai lebih besar dari r tabel. Hal ini berarti semua item pertanyaan variabel pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid dan layak untuk disebarkan keresponden.

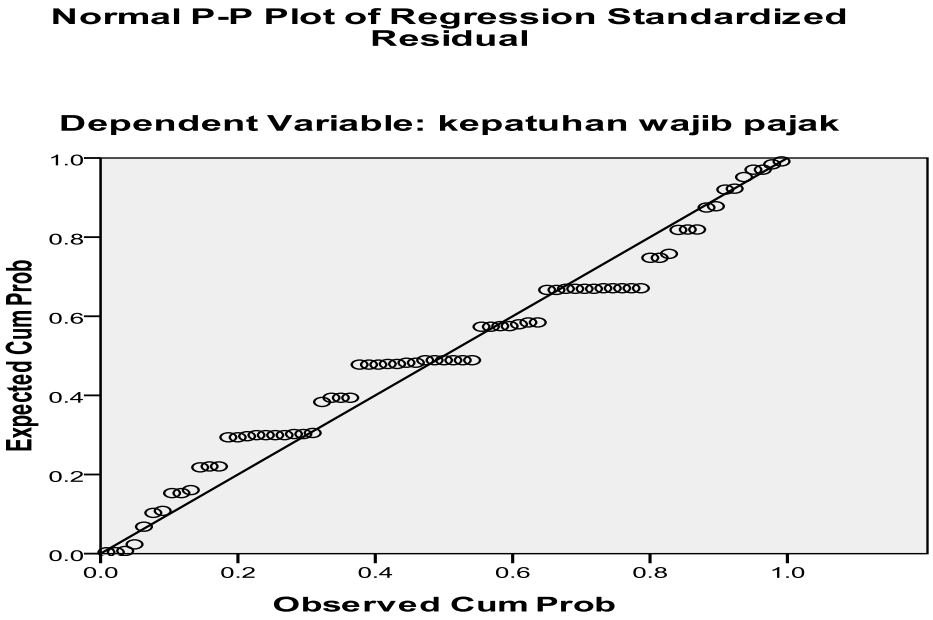
4.2.2 Uji Realiebilitas

Dinyatakan reliabel jika hasil yang diperoleh diatas 0,6, dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemahanam dan kepatuhan wajib pajak reliabel dimana hasil dari uji yang dilakukan yaitu 0,934 dan 0,870.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Dari pengujian normalitas diperoleh hasil yaitu sebagai berikut:

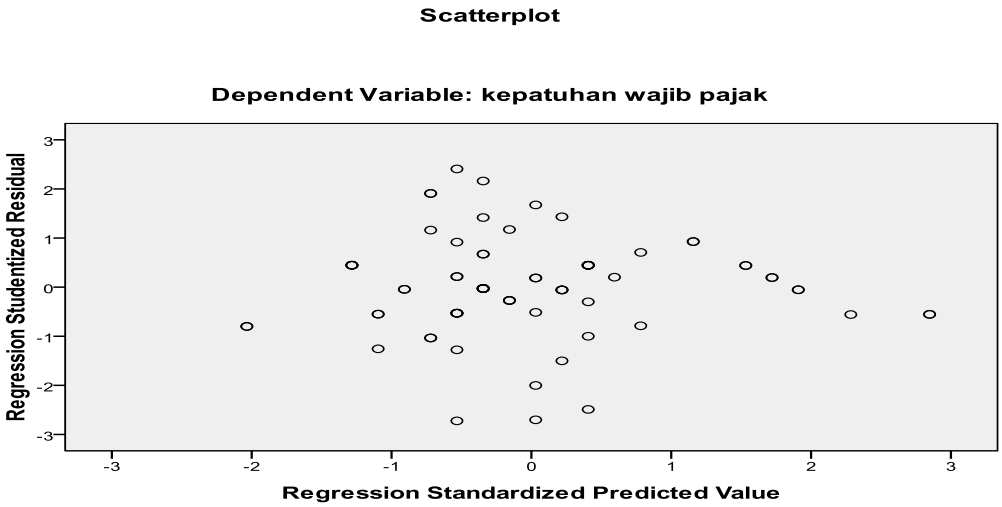


Berdasarkan gambar diatas hasil pengelolaan data menujukkan penyebaran titik-titik mendekati garis diagonal hal ini berarti bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Heterokedastisitas

Dari pengujian heteroskedastisitas diperoleh hasil yaitu sebagai berikut:

Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan, grafik *Scatterplot* menunjukan bahwa penyebaran titk-titik menyebar (acak) tanpa membentuk pola dimana hal ini berarti bahwa data yang diuji tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini.

4.4 Uji t

Uji t secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen). Dari pengujian secara parsial diperoleh hasil yaitu sebagai berikut:

Uji t

Coefficients[a]

Model				t	Sig.
		B	Beta		
1	(Constant)	.128		.336	.738
	pemahaman para pelaku UKM	.998	.791	10.892	.000

Tabel diatas menunjukkan dimana tingkat standar signifikansinya 5% (0.05) sedangkan hasil dari uji yang dilakukan 0,00, dimana hal ini berarti bahwa ada pengeruh yang signifikan antara variabe X dan variabel Y.

4.5 Uji R^2

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Koefesien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.791[a]	.626	.620

Tabel menunjukan variabel X mempengaruhi variabel Y nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,626 yang memiliki arti bahwa 62,6% dimana sisanya 100% - 62,6% = 37,4% dipengaruhi oleh variabel lain dari penelitian ini. Dimana variabel pemahaman wajib pajak memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara menyeluruh menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh secara bersama terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak sangat berpengaruh dalam hal kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dimana dengan adanya PP 46 juga meningkatkan pendapatan pajak final yang diterima KPP Pratama Sebrang Ulu Palembang.
2. Variabel pemahaman wajib pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 62,6 %, dimana nilai *adjusted* R^2 sebesar 62,6% yang memiliki arti bahwa 100% - 62,6% = 37,4% dipengaruhi oleh variabel lain dari penelitian ini. Dimana variabel pemahaman wajib pajak memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel kepatuhan wajib pajak.
3. Dari sampel yang diambil 100 responden yang kembali 73 dimana menyatakan bahwa, pemahaman wajib pajak terhadap PP 46 2013 pada kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tergolong baik dimana rata-rata wajib pajak paham apa itu PP 46 dan tingkat kepatuhannya juga baik dalam membayar pajak. Dimana semakin baik pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan berpengaruh.

5.2. SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu dan peneliti selanjutnya, saran yang penulis dapat sampaikan sebagai berikut:

1. Hasil uji t yang dilakukan ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Diharapkan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu lebih mensosialisasikan lagi baik secara lisan maupun tulisan guna untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan dan penerimaan pajak penghasilan final (pasal 4 ayat 2).
2. Dimana hasil uji R^2 yang didapat menunjukan variabel pemahaman wajib pajak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 62,6 %, dimana sisanya 37,4% dari variabel lain. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan variabel-variabel lainnya seperti sanksi dan pengetahuan, dan juga variabel yang lainnya.

6. REFERENSI

[1] Diatmika, I Putu Gede, 2013. Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Universitas Pendidikan Ganesha. Desember 2013.

[2] Fitriadi, Primandita, Yudha Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2014. *Undang-undang Perpajakan.* Jakarta, Salemba Empat.
[3] Furi, Yuliya Ratna. 2014. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Batang (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang pribadi Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Batang. Universitas Muhamadia Surakarta.
[4] Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Fungsi Pajak.* Jakarta.
[5] Peraturan Mentri keuangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperboleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
[6] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun2007. *Pengertian Pajak.* Jakarta.
[7] Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: teori dan kasus.* Edisi ke-8 Buku 1. Jakarta, Salemba Empat.
[8] Resyniar, Gandhys. 2013. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP 46 Tahun 2013.
[9] Sanusi,A.2014. *metodelogi Penelitian Bisnis.* Edisi ke-5. Jakarta, Salemba Empat.
[10] Siregar,Sofyan. 2010. *Statistik Deskripti untuk penelitian.* Jakarta, Raja Grafindo.
[11] Suandy, Erly. 2013. *Perencanaan Pajak.* Edisi ke-5. Jakarta, Salemba Empat.
[12] Susilo, Eunike Jacklyn dan Betri Sirajudin. 2013. Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak UKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak pratama ilir barat).
[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan.
[14] Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta,Salemba Empat.
[15] Wulansari, Ayuningtyas. 2012. Analisis Tingkat Kesadaran Pajak pada Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM). Universitas Indonesia. Juli 2012.

ANALISIS BEDA PENERIMAAN PENDAPATAN LISTRIK TERHADAP KECEPATAN ALIRAN KAS PADA PT. PLN (PERSERO)

M.Rachmansya[1], Poppy Indriani[2], M. Titan Terzaghi[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
M.Rachmansya@yahoo.co.id[1]
PoppyIndriani@binadarma.ac.id[2]
Mtitant4@gmail.com[3]

Abstract

Growth in the number of customers along with increased electricity bills cause cash flow of PT PLN (Persero) Area WS2JB Palembang increased. With conventional systems implemented before 2010 requires a relatively long time to send the cash inflows from the customer to the account of the reception of PT PLN (Persero) Head Office. Therefore, PT PLN (Persero) Area WS2JB Palembang in 2010 introduced a system of payment of electricity bills, called Payment Point Online Bank (PPOB). Because Payments Online Payment Point Bank (PPOB) is applied, and then the cash inflows into account reception PT PLN (Persero) have been quicker. The purpose of this study was to determine differences in revenue receipts of electricity before and after Payment Point Online Bank (PPOB) to speed cash flow. The sample in this study is 2010 and 2015 with the observation of the month average cash remittances received from customers to the Head Office of PT. PLN (Persero) Center. The data used is secondary data and analysis techniques are Wilcoxon test. Results of analysis using SPSS version 18 indicates that there is a difference between Online Payment Point Bank (PPOB) and conventional systems in accelerating cash inflows to 0.000 <0.05 of significance value.

Keywords**:** *Payment Point Online Bank* (PPOB), *Conventional dan Cash flow.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, tuntutan aliran kas merupakan sebuah keharusan yang harus ditempuh perusahaan demi tetap menjaga kelangsungan dan eksistensi perusahaan dalam melayani seluruh pelanggan.Sebelum tahun 2012 PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang menerapkan sistem pembayaran konvensional yang banyak melibatkan Petugas *Payment Point* (PP) untuk membantu mengumpulkan dana dari pelanggan seperti KUD (Koperasi Unit Desa). Untuk Penerimaan Pendapatan Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara *Online*, maka PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang bekerja sama dengan mitra kerja dalam menerima pelunasan rekening listrik oleh pelanggan melalui sistem konvensional. Namun, uang pembayaran rekening listrik tersebut yang diterima petugas *Payment Point* tidak langsung disetor ke rekening bank *receipt* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), tetapi melalui proses penyetoran fisik uang dan memerlukan waktu yang lama. Hal tersebut dapat memberikan peluang untuk melakukan penggelapan serta keamanan selama penyetoran kas sangat berisiko seperti perampokan yang dapat memperlambat aliran kas masuk ke rekening PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kantor Pusat.

Akan tetapi seiring dengan perubahan yang dilakukan PT. PLN (Persero) dengan adanya keluhan yang dialami pelanggan guna meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap penerimaan pendapatan listrik maka pihak perusahaan terutama PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang dalam penerimaan pendapatan listrik menggunakan system *Payment Point Online Bank*. *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah sistem pembayaran rekening secara tunai melalui teknologi tinggi dengan menggunakan perangkat lunak yang didesain secara khusus dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat, supaya pihak PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang tidak lagi menggunakan bagian penagihan terhadap penerimaan pendapatan listrik. tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analisis

Beda Penerimaan Pendapatan Listrik Sebelum dan Sesudah PPOB (*Payment Point Online Bank*) Terhadap Kecepatan Aliran Kas pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Payment Point Online Bank (PPOB) adalah sistem pembayaran rekening secara tunai melalui teknologi tinggi dengan menggunakan perangkat lunak yang didesain secara khusus dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat (Rani:2008). Sistem *Payment PointOnline Bank* (PPOB) sendiri merupakan pengembangan dari sistem konvensional, dimana transaksi berlangsung secara berjenjang, dan memiliki jeda waktu sehingga aliran kas perusahaan sedikit terhambat dan memerlukan waktu. Sedangkan pada sistem *Payment PointOnline Bank* (PPOB), semua berlangsung secara *online*, dimana transaksi manual hanyaterjadi pada pelanggan dan loket *Payment Point Online Bank* (PPOB), sehingga *update* datadan arus keuangan berlangsung *real time*dan hanya memerlukan waktu 1 hari untuk mengirim penyetoran uang tersebut ke kantor PLN Pusat.

Terdapat dua jenis layanan *Payment Point Online Bank* (PPOB), yaitu *Downline Bank* dan *Delivery Channel Bank*. Pada *Downline Bank* pelanggan *non* nasabah bank dapatterlayani karena pembayaran melalui *collecting agent* atau *downliner* seperti KUD,Toko/Supermarket, Yayasan maupun perorangan, dengan kata lain setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi *downliner*. Pada *Delivery Channel* terbatas hanya untuk nasabah bank dengan memanfaatkan mitra kerja melalui *(ATM, Teller, Autodebet, Internet Banking, SMS Banking dan Transfer)*. Penerimaan pendapatan listrik sebelum dan sesudah PPOB (*Payment Point Online Bank*) sangat memberikan perbedaan terhadap kecepatan aliran kas. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan tagihan pelanggan yang tidak tertagih hingga mengakibatkan laba perusahaan menurun sehingga berdampak kerugian yang dialami perusahaan.Tujuan menggunakan penerimaan pembayaran listrik terhadap aliran kas dari manual menjadi sistem online dimaksudkan agar dapat memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu agar aliran kas yang diterima perusahaan tidak mengalami hambatan karena dengan adanya sistem ini tagihan piutang semua pelanggan langsung diterima PT. PLN (Persero).

2.1 Kas

Kas adalah harta yang dapat digunakan untuk membayar kegiatan operasional perusahaan atau dapat digunakan untuk membayar kewajiban saat ini. Wujud dari kas dpat berupa uang kertas/logam, simpanan bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik, dana kas kecil, cek, bilyet giro, dsb. Kas *(cash)* adalah uang meliputi uang logam, uang kertas, cek giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya (Warren, 2011:397).

2.2 Sistem Penerimaan Kas

Mulyadi (2001:500) menyebutkan Sistem penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat oleh perusahaan untuk melaksanakan prosedur penyerahan barang dan menerima kas dari penjualan ditempat usaha. Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang.

2.3 Aliran Kas(Cash Flow)

Arus Kas mencerminkan penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan. Ukuran kas mengakui arus kas masuk saat kas diterima walaupun belum dihasilkan dan mengakui arus kas keluar saat kas dibayarkan walaupun beban belum terjadi. Menurut Harnanto (2002:228) Arus Kas (*Cash Flow*) terdiri dari arus kas masuk (*Cash In Flow*) dan Arus Kas Keluar (*Cash Out Flow*), aliran ini memperlihatkan darimana sumber kas diperoleh dan untuk apa kas itu digunakan oleh perusahaan.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian mengenai penerimaan pendapatan listrik khususnya penelitian komparatif, yaitu Yunus (2013) meneliti mengenai pengaruh *payment point online bank*

terhadap percepatan aliran kas yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan payment point online bank terhadap percepatan aliran kas.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas mengenai penerimaan pendapatan listrik, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah penerimaan pendapatan listrik konvensional lebih rendah dibandingkan penerimaan pendapatan listrik PPOB.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis hanya menganalisa Analisis Penerimaan Pendapatan Listrik Sebelum dan Seudah PPOB (*Payment Point Online Bank*) Terhadap Kecepatan Aliran Kas pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang**.**

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskripftif Kualitatif. Menurut Sanusi (2011:13) penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Unit analisis yang dituju adalah penerimaan pendapatan listrik sebelum dan sesudah *Payment Point Online Bank* (PPOB) pada PT PLN (Persero) WS2JB Area Palembang.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang yang bergerak dalam bidang jasa kelistrikan. Beralamat di Jl. Kapten A.Rivai No.37 Palembang.

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data untuk memberikan gambaran dan jawaban yang jelas dan akurat dari perumusan masalah dan melakukan perbandingan terhadap teori-teori yang ada dengan masalah yang dibahas untuk kemudian membuat kesimpulan dan saran yang dipandang penting.

3.5 Uji Wilcoxon

Uji *Wilcoxon* digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. *Wilcoxon signed Rank test* ini digunakan hanya untuk data bertipe interval atau *ratio,* namun datanya tidak mengikuti distribusi normal.

Uji hipotesis :

H0 : d = 0 (tidak ada perbedaan diantara dua perlakuan yang diberikan)

H1 : d ≠ 0 (ada perbedaan diantara dua perlakuan yang diberikan)

Dengan d menunjukkan selisih nilai antara kedua perlakuan.

Statistik Uji

$$Z = \frac{T - [\frac{1}{4N(N+1)}]}{\sqrt{\frac{1}{24N(N+1)(2N+1)}}}$$

N = banyak data yang berubah setelah diberi perlakuan berbeda

T = jumlah ranking dari nilai selisih yang negatif (apabila banyaknya selisih yang positif lebih banyak dari banyaknya selisih negatif) = jumlah ranking dari nilai selisih yang positif (apabila banyaknya selisih yang negatif > banyaknya selisih yang positif).Daerah kritis H0 ditolak jika nilai absolute dari Z hitung diatas > nilai Z 2 / α.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Sistem Konvensional adalah salah satu mekanisme penerimaan pendapatan listrik dengan cara konvensional dimana proses pelimpahan dana ke rekening *receipt* PLN dilakukan dengan cara melakukan penyetoran dana ke Bank secara *cash*. Penerimaan Pendapatan Listrik yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang secara konvensional belum dapat mengendalikan aliran kas dengan cepat dan aman dikarenakan secara keseluruhan sistem konvensional disini dalam hal kecepatan aliran kas perusahaan menjadi terhambat karena penerimaan pendapatan listrik dari tanggal transaksi di KUD ke Kantor Pusat PT. PLN memerlukan waktu yang berjenjang. Berikut ini penulis menyajikan sampel rentang waktu penerimaan pendapatan listrik mulai dari pembayaran oleh pelanggan sampai ke rekening *receipt* PT PLN (Persero) Kantor Pusat.

Tabel 4.1
Rentang Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatandari PT. PLN (Persero) Rayon Rivai ke PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Melalui Bank MandiriBulan Januari 2010

Tanggal Transaksi di KUD Payment Point	Diterima di Rek. Rec. Rayon Rivai	Diterima di Rek. Rec. Area PLB	Diterima di Rek. Rec. WS2JB	Diterima di Rek. Rec. Kantor Pusat	Rentang Waktu
01-Jan-10	04-Jan-10	04-Jan-10	05-Jan-10	06-Jan-10	5 Hari
04-Jan-10	05-Jan-10	05-Jan-10	06-Jan-10	07-Jan-10	3 Hari
05-Jan-10	06-Jan-10	06-Jan-10	07-Jan-10	08-Jan-10	3 Hari
06-Jan-10	07-Jan-10	07-Jan-10	08-Jan-10	11-Jan-10	5 Hari
07-Jan-10	08-Jan-10	08-Jan-10	09-Jan-10	12-Jan-10	5 Hari
08-Jan-10	11-Jan-10	11-Jan-10	12-Jan-10	13-Jan-10	5 Hari
11-Jan-10	12-Jan-10	12-Jan-10	13-Jan-10	14-Jan-10	3 Hari
12-Jan-10	13-Jan-10	13-Jan-10	14-Jan-10	15-Jan-10	3 Hari
13-Jan-10	14-Jan-10	14-Jan-10	15-Jan-10	18-Jan-10	5 Hari
14-Jan-10	15-Jan-10	15-Jan-10	18-Jan-10	19-Jan-10	5 Hari

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa ada penyetoran fisik uang dari KUD *payment point* ke rekening *receipt* Rayon. Kurun waktu yang diperlukan dalam mengendalikan kas masukmulai dari pelanggan hingga ke rekening *receipt* PT PLN (Persero) Kantor Pusat kurang lebih3 sampai 5 hari. Hal ini dikarenakan adanya penyetoran penerimaan kas secara berjenjang mulai darirekening *receipt* Rayon Rivai ke rekening Area PLB ke rekening WS2JB dan ke rekening PT PLN(Persero) Kantor Pusat

Deskripsi Penerimaan Pendapatan SesudahPPOB (*Payment Point Online Ban*k)

PPOB ini merupakan sistem yang digunakan oleh PLN dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan listrik, dimana setiap loket pembayaran memiliki deposit pada bank. Dalam sistem PPOB proses penerimaan pendapatan listrik tidak dilakukan oleh petugas PLN namun langsung diterima oleh

colecting agent dan secara otomatis di transfer ke *account receipt* PLN. Dengan berjalannya sistem PPOB, maka beberapa proses bisnis yang selama ini sudah berjalan dapat lebih disederhanakan.

Tabel 4.2
Rentang Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatan PT. PLN (Persero) Melalui *Payment Point Online Bank* (PPOB) Bulan Januari 2015

Tanggal Transaksi di Collecting Agent	Diterima di Bank Penyelenggara PPOB	Diterima di Rek. Rec. Kantor Pusat	Rentang Waktu
01-Jan-15	01-Jan-15	02-Jan-15	1 Hari
02-Jan-15	02-Jan-15	03-Jan-15	1 Hari
03-Jan-15	03-Jan-15	04-Jan-15	1 Hari
05-Jan-15	05-Jan-15	06-Jan-15	1 Hari
06-Jan-15	06-Jan-15	07-Jan-15	1 Hari
07-Jan-15	07-Jan-15	08-Jan-15	1 Hari
08-Jan-15	08-Jan-15	09-Jan-15	1 Hari
09-Jan-15	09-Jan-15	10-Jan-15	1 Hari
11-Jan-15	11-Jan-15	12-Jan-15	1 Hari
12-Jan-15	12-Jan-15	13-Jan-15	1 Hari
13-Jan-15	13-Jan-15	14-Jan-15	1 Hari
14-Jan-15	14-Jan-15	15-Jan-15	1 Hari
15-Jan-15	15-Jan-15	16-Jan-15	1 Hari

Berdasarkan Tabel 4.2, aliran kas masuk yang berasal dari pelunasan tagihan rekening listrik melalui *Payment Point Online Bank* (PPOB) ke rekening *receipt* PT PLN (Persero) Kantor Pusat membutuhkan waktu lebih kurang 1 hari karena pada pukul 24.00 WIB adanya rekonsiliasi antara pihak bank dan PLN melalui *network* atau jaringan. Berbeda dengan sistem konvensional yang memerlukan waktu kurang lebih 3 sampai 5 hari. Karena pada saat *collecting agent* menerima uang pelunasan dari pelanggan maka sistem bank secara otomatis mendebet dari *depositcollecting agent* tersebut. Dengan begitu aliran kas masuk akan cepat masuk ke rekening *receipt* PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Keuntungan lainnya yaitu pelanggan dapat melakukan transaksi pelunasan pada hari libur melalui *downliner* maupun fasilitas bank seperti ATM, *e-banking*, sms *banking*, *auto debet* dan *phone banking*.

Uji Wilcoxon

Uji bertanda *wilcoxon* adalah suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua sampel dependen yang berpasangan atau berkaitan dan digunakan sebagai alternatif pengganti uji *Paired Sample T Test* jika data tidak berdistribusi normal. Uji *wilcoxon* berfungsi untuk menguji perbedaan antar data berpasangan, menguji komparasi antar 2 pengamatan sebelum dan sesudah (*before after design*) dan mengetahui efektivitas suatu perlakuan.

Tingkat Signifikansi $\alpha = 0{,}05$

Uji Hipotesis

H0 : *Payment Point Online Bank* (PPOB) tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kecepatan aliran kas.

H1 : *Payment Point Online Bank* (PPOB) memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kecepatan aliran kas.

Test Statistics[a]

	Sesudah – Sebelum
Z	-3.938[b]
Asymp. Sig. (2tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

Berdasarkan hasil pengujian *wilcoxon* menunjukkan asymp sig = 0,000 < 0,05 menandakan bahwa ada perbedaan kecepatan aliran kas sebelum dan sesudah diterapkannya *Payment Point Online Bank* (PPOB). *Payment Point Online Bank* (PPOB) sangat berpengaruh terhadap aliran kas pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang.

4.2 Pembahasan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis adakah perbedaan pendapatan listrik sebelum dan sesudah *Payment Point Online Bank* terhadap kecepatan aliran kas. Selain itu penelitian ini juga bermaksud membandingkan penerimaan pendapatan listrik keduanya dengan asumsi penerimaan pendapatan listrik sebelum PPOB *(Payment Point Online Bank)* lebih rendah dibandingkan dengan sesudah PPOB *(Payment Point Online Bank).*

Penerimaan pendapatan listrik PPOB terhadap kecepatan aliran kas sangat memberikan perbedaan yang positif dikarenakan hasil rentang waktu penyetoran uang ke PLN Pusat lebih cepat karena semua transaksi langsung otomatis ke bank dan langsung disetorkan uang tersebut ke kantor pusat dibandingkan dengan sistem konvensional yang melibatkan KUD pada saat tanggal transaksi yang kemungkinan bisa terjadi penyalahgunaan terhadap uang tersebut. Selain itu dengan PPOB aliran kas perusahaan tetap terjaga demi kebutuhan kegiatan operasional perusahaan karena dapat mengontrol ekonomi perusahaan, antara penerimaan pendapatan listrik PPOB dan konvensional dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan listrik PPOB lebih besar dibandingkan konvensional dikarenakan pada saat konvensional sedikit mengalami resiko penggunaan kas yang menghambat penyetoran uang ke kantor pusat dan berakibat aliran kas perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya untuk aktivitas operasi perusahaan sedangkan dengan PPOB hanya memerlukan waktu 1 hari untuk penyetoran uang ke kantor pusat dan uang tersebut bisa digunakan untuk biaya operasional perusahaan.

Penelitian ini berasumsi penerimaan pendapatan listrik konvensional atau sebelum PPOB (*PaymenT Point Online Bank*) kurang cepat terhadap aliran kas karena sering terjadi penggunaan kas atau penyelewengan pada saat pengiriman dari koperasi hingga kekantor wilayah pada saat penyetoran uang ke kantor pusat yang mengambat aliran kas.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Beda Penerimaan Pendapatan Sebelum dan Sesudah *Payment Point Online Bank* (PPOB) terhadap kecepatan aliran kas pada PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang melalui Uji *Wilcoxon*, maka nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya terdapat perbedaan percepatan aliran kas masuk sebelum dan sesudah diterapkannya *Payment Point Online Bank* (PPOB) di PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang. Setelah diterapkannya *Payment Point Online Bank* (PPOB) aliran kas menjadi lebih cepat sampai ke rekening *receipt* PT PLN (Persero) Kantor Pusat, keakuratan data dan dana pelunasan karena rekonsiliasi terjadi *real time* serta keamanan kas masuk dapat terjaga.

6. REFERENSI

[1] Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.: 010.E/012/DIR/2002 tentang *Mekanisme Arus Dana Receipt*.Jakarta.

[2] Edaran Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 003.K/8712/DIR/1997

[3] Harnanto, 2002, *Analisis Laporan Keuangan***,** Percetakan AMP-YKPN, Jakarta, 2002.

[4] Hery, 2014. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.

[5] Hery, 2013, *Akuntasi Keuangan Menengah*, CPAS, Yogjakarta, 2013.

[6] Kieso, dkk, 2009, *Akuntansi Intermediate Jilid1*, Erlangga, Jakarta, 2009.

[7] Kusriyanto, Bambang dan Suwarjoyo,2000, *Teknik ManajemenKeuangan***,** seri Manajemen No. 85, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta ,2000.

[8] Murhadi, R, Werner. 2013. *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

[9] Mulyadi,2001, *SistemAkuntansi*, SalembaEmpat, Jakarta, 2001.

[10] Purwanto S.K., Suharyadi,2008.*Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Kedua, Jilid I, Salemba Empat, Jakarta, 2013.

[11] Riyanto, Bambang, 2001, *Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan***,**Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, 2001.

[12] Ridwan S. Sundjaya dan Inge Barlian, 2001, *Manajemen Keuangan I edisi kedua*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.

[13] Sanusi, Anwar, 2011, *MetodologiPenelitianBisnis*, SalembaEmpat, Jakarta, 2011.

[14] Soemarso, S.R., 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Jilid 1, Salemba Empat, Jakarta, 2014.

[15] Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung, 2011.

PENGARUH PENGETAHUAN KONSUMEN MENGENAI PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH

Maria Susi Winarni[1], Fitriasuri[2], Ade Kemala Jaya[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
maria_susiwinarni@yahoo.co.id[1]
fitriasuri@binadarma.ac.id[2]
adekemalajaya@binadarma.ac.id[3]

ABSTRACT

The purpose of this research is to create a new variable of consumer knowledge regarding Islamic banking in order to determine the effect of consumer knowledge regarding Islamic banking to a customer's decision to the State Savings Bank Syariah Palembang. This research method is done by means of interviews with leaders and Islamic State Savings Bank customer then analyze berdasa1rkan existing theories.Results from this study is the Customer save in the State Savings Bank Syariah because knowledge of various types of products of Islamic banks offer (product knowledge), knowledge of various information processed by consumers to obtain a product (knowledge of purchase), knowledge of the use of such products (knowledge application) would be more expensive banking operations system and a tendency to identify the weaknesses and advantages of the bank.

Keywords: ***Islamic banking, knowledge, products of Islamic banks***

1. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan yang kini banyak dihadapi dan paling berat adalah banyaknya tudingan yang menyatakan bahwa bank syariah hanya sekedar perbankan konvensional yang ditambah dengan label syariah. Tantangan lainnya adalah bagaiman menonjolkan ciri khas perbankan syariah, yakni bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan . selain itu dari aspek eksternal, sektor perbankan syariah memiliki tantangan dari sisi pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap operasional bank syariah. Mereka sederhana menganggap bahwa dengan tidak dijalankannya bunga, bank syariah tidak akan memperoleh keuntungan. Konsekuensinya adalah bank syariah akan sulit untuk *survive* (MR Pranata: 2011). Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dengan prinsip utama kemitraan dan kebersamaan dalam sistem syariah baik pihak bank maupun nasabah mendapatkan keuntungan, karena kegiatan yang dilakukannya tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Perbankan bisnis perbankan syariah masih belum bisa berkembang pesat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masih ada persoalan yang menghambat bisnis perbankan syariah tersebut. Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank – Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana menjelaskan hingga saat ini asset industry perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar dibawah 4 persen dibandingkan dengan keseluruhan perbankan nasional. “Sebenarnya ada tiga masalah besar di perbankan syariah. Ini yang menghambat perkembangan bisnis syariah sampai saat ini,” kata Achmad saat diskusi “Menguak Krisis Sumber Daya Insani di Perbankan Syariah” di D Consulate Resto Jakarta, Senin (13/08/2012). Pertama, ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standarisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi produk bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim. Kedua, tingkat pemahaman (*awareness*) produk bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk – produk perbankan syariah dan istilah – istilah di perbankan syariah. “hanya sekitar 30 persen dari sumber daya yang direkrut mengetahui istilah perbankan syariah serta tingkat *awareness*nya,” tambahnya. Selain itu,

masalah ketiga industry perbankan syariah adalah sumber daa manusia (SDM). Masalah yang terjadi adalah pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang berkompeten dan mumpuni. “Kami justru banyak mengambil SDM untuk perbankan syariah dari perbankan konvensional dan SDM yang potensial. Sangat sedikit SDM yang diambil atau lulusan perguruan tinggi syariah,” katanya (JAKARTA, KOMPAS.com). PT Bank Tabungan Negara Palembang adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan, dimana dalam sistem operasionalnya perusahaan ini menganut sistem syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang telah memiliki nama yang besar dalam skala nasional serta memiliki tingkat kredibilitas yang sangat tinggi, perusahaan ini harus mampu menggunakan dana yang telah dititipkan oleh para nasabah secara baik dan benar. Penduduk Palembang yang sebagian besar beragama Islam, merupakan pasar yang sangat besar bagi sebuah bank syariah, Namun demikian Bank BTN Syariah menghadapi beberapa kendala dalam mengembangkan bank syariah. Salah satu penyebabnya adalah disisi konsumen yaitu masih terbatasnya pengetahuan mayarakat tentang perbankan syariah. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan konsumen mengenai perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank Tabungan Negara Syariah Palembang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalahnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “apakah pengetahuan konsumen mengenai perbankan syariah berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah?”

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengetahuan Konsumen

Menurut Mowen dan Engel yang dikutup oleh Sumarwan (2011) definisi pengetahuan konsumen adalah tingkat informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.Adapun jenis-jenis pengetahuan konsumen adalah sebagai berikut: pengetahuan produk, pengetahuan pembelian dan pengetahuan pemakaian.

Bank Syariah

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 21, dinyatakan bahwa: “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008).

Produk Bank Syariah

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan sebagai berikut: (Kasmir, 2011: 217)

a) Al-wadi’ah (Simpanan)
b) Pembiayaan dengan Bagi hasil

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu: *Al-musyarakah, Al-mudharabah, Al-muzara’ah, Al-musaqah, Bai’al-Murabahah, Bai’as-salam, Bai’al-istishna’, Al-Ijarah* (Leasing), *Al-Wakalah* (Amanat), *Al-Kafalah* (Garansi), *Al-Hawalah, Ar-Rahn.*

Keputusan Konsumen

Pengertian pengambilan keputusan konsumen adalah proses pemecahan masalah yang diarahkan pada sasaran (Peter dan Olson, 1999: 164). Dalam memperlakukan pengambilan keputusan konsumen sebagai pemecahan masalah, kita mengasumsikan bahwa konsumen memiliki sasaran yang ingin dicapai atau dipuaskan.Seseorang menganggap bahwa sesuatu adalah "masalah" karena konsekuensi yang diinginkannya belum dapat dicapai.Konsumen membuat keputusan perilaku mana untuk mencapai sasaran mereka dan dengan demikian memecahkan masalah mereka.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Data yang digunakan

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang bukan merupakan bilangan, atau bisa diartikan juga kualitatif merupakan data berupa ciri – ciri, sifat – sifat, data keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti dan disebut juga kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan dengan cara wawancara kepada pimpinan bank dan salah satu nasabah Bank Tabungan Syariah Palembang.

Teknik Analisis Data

Anwar Sanusi (2011:115), teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknis analisis data yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis dan menilai semua data yang relevan dan fakta yang diperoleh dari objek yang dipilih serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum kemudian dari hasil analisis tersebut penulis mencoba menarik kesimpulan yang mewakili masalah – masalah yang ada. Dari Kesimpulan tersebut dapat dijadikan saran – saran yang dianggap perlu bagi perkembangan Bank Tabungan Negara Syariah Palembang

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Triangulasi Sumber Data

Penelitian ini juga menggunakan uji triangulasi sumber data (Norman K.Denkin) adalah mengali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bias menggunakan observasi terlibat (*participant observation)*, dokumen tertulis, arsip, documen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau poto. Masing – masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights)* yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Untuk tahap analisis, (Simanjuntak, 2011) yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisa data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh pimpinan dan nasabah Bank Tabungan Syariah Palembang dapat memberikan jawaban yang sifatnya ilmiah untuk itu peneliti menggunakan beberapa tahap:

1. Pertama menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur – unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada narasumber yang memang terpercaya.
2. Kedua, melakukan wawancara dengan pimpinan dan tiga nasabah Bank Tabungan Negara Syariah Palembang.
3. Ketiga melakukan dokumentasi langsung di lapangan untuk melengkapi data – data yang berhubungan dengan penelitian
4. Keempat, memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber

5. Kelima, menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan dan dibandingkan dengan data sekunder yang sudah peneliti miliki yang sifatnya kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.
6. Agar pembahasan lebih sistematis dan jelas maka peneliti membagi ke dalam 2 pembahasan, yaitu:
   1) Analisis Deskriptif Hasil Penelitian
   2) Pembahasan

Analisis deskriptif data penelitian adalah analisis pada data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan dan tiga orang nasabah sebagai kunci yang peneliti yakini dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yang ada atau pemberi informasi. Maka peneliti dapat menganalisis tentang pernyataan tentang pengaruh pengetahuan perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank Tabungan Negara Syariah Palembang

Hasil dari wawancara yang penulis tampilkan diatas sesuai dengan fakta yang penulis dapatkan dari narasumber seperti yang (Kuncoro) katakan salah satu pendukung dalam penelitian kualitatif adalah kebenaran dari hasil wawancara yang tidak menutupi semua fenomena – fenomena yang ada disesuaikan dengan waktu yang berbeda tapi mendapatkan jawaban yang relatife hampir sama.

Pengetahuan konsumen meliputi: pengaruh pengetahuan produk, pengetahuan pembelian dan pengetahuan pemakaian terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Engel et al. (1994.60) yang berpendapat bahwa konsumen dapat dipengaruhi perilakunya menurut kehendak pihak yang berkepentingan.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan dan tiga nasabah Bank Tabungan Negara Syariah Palembang penulis dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan konsumen mengenai perbankan sudah sangat baik. Nasabah mengetahui berbagai jenis produk bank syariah diantaranya Tabungan BTN Batara iB, Tabungan BTN Prima iB, Tabungan BTN Haji iB, Tabunganku iB dan selain itu juga terdapat jenis pembiayaan yang ditawarkan yaitu pembiayaan murabahah, istishna', mudharabah, musyarakah dan lain – lain. Meskipun pada dasarnya produk – produk yang ditawarkan pada perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional namun adanya akad, nama – nama produk yang syariah serta kinerja operasional yang berlandaskan syariah, maka perbankan syariah menjadi berbeda dan hal tersebut memberikan peluang untuk menarik minat nasabah dalam menabung. Sehingga pilihan nasabah menabung pada perbankan syariah yang utama dikarenakan adanya produk yang inovatis sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga dikarenakan adanya pertimbagan akan adanya daya tarik bagi hasil dan keringan pada biaya administrasi.

Nasabah menabung di Bank Tabungan Negara Syariah karena pengetahuan berbagai jenis produk bank syariah yang ditawarkan (pengetahuan produk), pengetahuan berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk (pengetahuan pembelian), pengetahuan penggunaan produk tersebut (pengetahuan pemakaian) akan lebih mempertimbangkan sistem operasional perbankan dan kecenderungan untuk lebih mengetahui kelemahan serta kelebihan bank tersebut. Selain itu konsumen juga mempertimbangkan adanya pengalaman teman/saudara/keluarga serta informasi dari media. oleh karena itu mereka pasti akan mencari tahu tentang hal tersebut dan secara tidak sengaja dapat menambah pengetahuan konsumen tentang perbankan syariah.

5. Simpulan

Simpulan

1. Pengetahuan konsumen terhadap keputusan Bank Tabungan Negara Syariah cukup baik. Dari hasil wawancara dengan Pimpinan dan Tiga Orang Nasabah Bank Tabungan Negara Syariah dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pemakaian memiliki peranan yang paling besar yang kemudian disusul oleh pengetahuan produk dan pengetahuan pembelian.
2. Keputusan menjadi nasabah tabungan di Bank Tabungan Negara Syariah Palembang cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari pencapaian target yaitu 15% sampai 20% per tahun. Hal ini juga didorong oleh kebutuhan keuangan dan lembaga syariah, kemudian informasi yang diberikan oleh pihak bank Tabungan Negara Syariah Palembang sehingga calon nasabah merasa tertarik dan akin dengan keputusannya untuk menjadi nasabah Bank Tabungan Negara Syariah, terlebih responden merasa puas setelah menggunakan tabungan Bank Tabungan Negara Syariah, bahkan mereka bersedia merekomendasikan Bank Tabungan Negara Syariah kepada orang terdekatnya.
3. Pengaruh pengetahuan konsumen mengenai perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah pada Bank Tabungan Negara Syariah berdasarkan hasil wawancara cukup baik. Pengaruh ini memberikan arti bahwa keputusan untuk menjadi nasabah Bank Tabungan Negara Syariah selain karena faktor pengetahuan konsumen tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Seperti, kelemahan dan keuntungan bank syariah, pengalaman teman/saudara/keluarga/ serta informasi dari media.

Saran

1. Untuk lebih meningkatkan pengaruh pengetahuan konsumen hendaknya Bank Tabungan Negara Syariah lebih banyak memberikan informasi yang berhubungan dengan keunggulan produk – produk yang berupa tabungan itu sendiri, hal ini diperlukan agar masyarakat lebih memikirkan pada keuntungan yang diperoleh.
2. Keputusan menjadi nasabah pada Bank Tabungan Negara Syariah dapatj lebih ditingkatkan lagi dalam hal kuantitas diantaranya dengan cara membuka jaringan operasi yang lebih luas, meningkatkan institusi pendukung yang lebih lengkap dan efektif, mengoptimalkamn efisiensi operasional bank syariah dan meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam perbankan syariah.
3. Pengaruh pengetahuan konsumen untuk menjadi nasabah Bank Tabungan Negara Syariah hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi menjadi lebih besar antara lain dengan cara meningkatkan promosi yang lebih efektif seperti promosi pada media elektronik, disosialisasikannya perbedaan antara tingkat suku bungan dengan pembagian hasil, kualitas pelayanan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kenyamanan dan ketersediaan sarana dan prasarana, melakukan program promosi yang lebih gencar dan lain – lain.
4. Penelitian selanjutnya agar dapat mencari pengaruh lain yang sekiranya mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih suatu produk dalam hal ini menjadi nasabah suatu perbankan.

6. REFERENSI

[1] Achmad, 13/08/2012, *Menguak Krisis Sumber Daya Insani di Perbankan Syariah*, D Consulate Resto Jakarta.
[2] Sumarwan, (2010), *Pengetahuan konsumen (Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran)*, Bogor:Ghalia Indonesia.
[3] Setiadi, (2011), *Pengetahuan Konsumen*, Yogyakarta.
[4] Nitisusastro, (2012), *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif*, Bandung.
[5] Engel; Blackwell; Miniard, (2010), *Perilaku Konsumen*, Jilid I.Tanggerang: Binarupa Aksara Publisher (Bahasa Indonesia).
[6] Sumarwan, (2011), *Perilaku Konsumen (Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran)*, Bogor,:Ghalia Inodoneisa.

[7] http://www.ayobukabloggerku.blogspot.com/2013/PengertianAkuntansiPerbankan
[8] Muhammad, (2005), *Konsep Dasar Sistem Pakar*, Yogyakarta.
[9] Kasmir, (2011), *Manajemen Perbankan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
[10] Ristiani dan John, (2010), *Perilaku Konsumen*.Edisi Kesatu, Yogyakarta.
[11] Umar, (2010), *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta.
[12] ejournal.undiksha.ac.id/2014/analisisfaktor-faktorangmempengaruhikeputusan
[13] Peter, J.Paul; Olson, Jerry.C, (2010), *Consumer behavior: Perilaku Konsumen dan Strategi* Pemasaran Jilid 1, Yogyakarta.
[14] Sugiyono, (2010), *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung
[15] Suharyadi dan Purwanto, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung.
[16] Ginting, (2010), *Filsafat Ilmu dan Metode*, Medan.
[17] MR Pranata, (2011), *Ekonomi Syariah Dalam Teori dan Praktek*, Sunan Gunung Djati Bandung
[18] JAKARTA, KOMPAS.com, *D Consulate Resto Jakarta*, Senin (13/08/2012), Menguak Krisis Sumber Daya Insani di Perbankan Syariah" , Jakarta
[19] UU No.21, 2008, *Perbankan Syariah*, Bank Syariah
[20] Tulving; Blackwell; Miniard, (2010), *Perilaku Konsumen*, Jilid I.Tanggerang: Binarupa Aksara Publisher (Bahasa Indonesia).
[21] Bruck; Mitchell dalam Peter & Olson, 1999, *Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran* Edisi 9, Jogjakarta
[22] Durgee dan Stuardt dalam Peter & Olson, 1999, *Keputusan Pembelian*, Tanggerang
[23] Rivai, 2010, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Edisi Empat, Jakarta
[24] Kotler dan Susanto, 1999, *Manajemen Pemasaran Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
[25] Setiadi, 2011, *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen,*Yogyakarta.
[26] Fenti Rismayanti, 2011, *Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada PT.Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Bandung*, Bandung
[27] Mazz Reza Pranata, 2011, *Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Wadiah pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Medan*, Medan
[28] Yuliawan, 2011, *Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada PT.Bank Syariah Cabang Bandung*, Bandung
[29] Nitisusastro, 2012, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung
[30] Anwar Sanusi, 2011, *Metode Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta
[31] Kuncoro, 2011, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis*, Erlangga, Jakarta
[32] Simanjuntak, 2011, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG

Mastarino[1], Fitriasuri[2], Andrian Noviardy[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
rinobanget@yahoo.co.id[1],
fitriasuri@binadarma.ac.id[2],
andrian.noviardy@binadarma.ac.id[3]

Abstract

This study aims to determine whether the original income and Fund Balance significant effect on regional expenditure in Palembang. The local government allocated funds in the form of local budget in the budget to increase fixed assets. During this shopping areas more widely used for routine spending relatively less productive. The purpose of this study was to determine whether there is influence revenue (PAD) and Fund Balance (DP) of the Regional Shopping Palembang either simultaneously or partially. Based on the results of this study concluded that in partial regional revenue significantly influence regional expenditure. While Balance Fund no significant effect on regional expenditure. Simultaneous variables Local Revenue and Fund Balance significant effect on its budget.

***Keywords**: Regional Income, Balance Funds and Expenditure.*

1. PENDAHULUAN

Masa Pemerintah saat ini untuk memperkuat posisi kekuasaannya adalah memberikan peran dan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif di daerah, hal ini biasa dikenal dengan sebutan kepala daerah sebagai "penguasa tunggal" di daerah. Tidak mengherankan jika kedudukan kepala daerah sangat sentral dan dominan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala daerah merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk mengamankan setiap kebijakan pemerintah daerah.

Anggaran daerah merupakan realisasi keuangan yang menjadi acuhan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesejahteraan publik atau masyarakat. Di Indonesia, anggaran daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, jasa dan barang pada tahun anggaran yang berjalan yang harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang penyusunan APBD Tahun anggaran 2014 didasarkan dengan prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya, Tepat waktu (sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan), transparan (untuk memudahkan masyarakat mengetahui mendapat akses informasi seluas – luasnya tentang APBD), partisipatif (dengan melibatkan masyarakat), memperhatikan asas kepatutan dan keadilan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Menurut Hariadi (2010 : 3) menyatakan APBD merupakan inti pengurusan umum dan anggaran daerah. Anggaran dalam arti luas meliputi siklus yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran. Anggaran daerah memiliki beberapa fungsi, diantaranya :

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola daerah selama periode tertentu,
2. Sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah karena persetujuan DPRD harus didapatkan terlebih dahulu sebelum anggaran dijalankan.

3. Sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya karena anggaran pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintah kepada DPRD.

Untuk melaksanakan hak dan kewajiban serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana – rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran.

Sebagai pertimbangan dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah kota dituntut untuk mampu membiayai penyelengaraan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) yang merupakan tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD dan DP terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Sesuai dengan data yang didapat dari Bagian Sekretariat Keuangan Daerah Kota Palembang Realisasi Penerimaan Daerah dan Belanja Daerah selama 11 tahun (periode 2004-2014) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kontribusi PAD dan DP terhadap Belanja Daerah
Kota PalembangTahun 2004 – 2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (%)	Dana Perimbangan (%)
2004	10,15	80,91
2005	12,01	90,26
2006	10,60	91,36
2007	11,68	81,67
2008	11,13	75,24
2009	13,46	73,84
2010	16,36	89,85
2011	19,20	58,39
2012	24,55	58,87
2013	21,18	55,24
2014	26,10	74,48
Rata-rata	17,64	83,01

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palembang tahun 2004-2014

Berdasarkan Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2004-2014 realisasi pendapatan asli daerah kota Palembang terus meningkat setiap tahunnya dan menunjukan setiap periode dana perimbangan merupakan sumber terbesar dalam membiayai Belanja Daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya masih kurang optimal. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan anggaran

pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal. Namun tidak dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangang fluktuasi terhadap belanja daerah.

Untuk peningkatkan pendapatan asli daerah diupayakan dari pendapatan pajak dan retribusi daerah dengan tidak menambahkan beban bagi masyarakat. Pendapatan asli daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang sangat penting peranannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pembelanjaan, maka pendapatan asli daerah adalah alternatif pilihan utama dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari fenomena diatas dalam kontes otonomi daerah, semestinya kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut ditunjukan dengan peranan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang signifikan didalam membiayai Belanja Daerahnya yang tercermin pada kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap APBD daerah yang bersangkutan. Melihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap APBD kota Palembang, maka penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kota Palembang tahun 2004-2014.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pendapatan Daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambahkan ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Dana Perimbangan

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer kedaerah berupa dana perimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*) dan kesenjangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*).

c. Belanja Daerah

Menurut Hariadi dkk, (2010 : 14) belanja daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemeritahan provinsi/kabupaten/kota) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang bersangkutan. Belanja daerah untuk penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui persentasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan ketetapan dalam peraturan daerah setempat.

3. METODOLOGI PENELITIAN

a. Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data APBD kota Palembang dalam rentang waktu 2004-2014. Data dikumpulkan dari instansi terkait dan buku/literature yang relevan.

b. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik kuantitatif. Menurut Sanusi (2013 : 115) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Uji Simultan (Uji-F)

Berdasarkan hasil perhitungan statistic uji F dengan hasil nilai signifikan F sebesar 0,000 diatas 0,00 yang berarti secara simultan seluruh variebel independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap variable belanja daerah.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menguji dan mengetahui pengaruh variable Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Daerah. Hasil Perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dari variable Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah sedangkan variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Koefisien dereminasi adalah Nilai koefisien determinasi adjusted (R^2) sebesar 0,098 dimana menunjukkan variasi belanja daerah dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebesar 97,4 persen sedangkan 2,6 persen dijelaskan oleh variabel yang tidak dianalisis oleh model.

d. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukan berpengaruh signifikan terhadap variable belanja daerah. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikan t sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Rahmawati (2010), yang menemukan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sampel penelitian Nur Indah Rahmawati (2010) ini adalah penelitian kabupaten/kota di Jawa Tengah dari tahun 2007-2010. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuriko Ferdian (2013) yang menujukan bahwa variable Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap variable Belanja Daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian Yuriko Ferdianini adalah Kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2007-2011. Sesuai dengan hasil diatas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus disalurkan lewat belanja daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan pembangun desentralisasi daerah.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah hal ini disebabkan oleh standar deviasi Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dari Mean yang berarti bahwa fluktuasi data Pendapatan Asli Daerah rendah.

e. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama untuk peningkatan pelanyan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil pendelitian ini menunjukan bahwa secara simultan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah sedangkan secara parsial dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan dana perimbangan akan meningkatkan belanja daerah. Dalam hal ini kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan dana perimbangan yang diterima.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer kedaerah berupa dana perimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*) dan kesenjangan fiscal vertikal (*vertical fiscal imbalance*). Kepentingan tersebut terjadi akibat dari pembagian kewenangan antara tingkat pemerintah, Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Instrumen dalam mengatasi ketimpangan

fiscal tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana AlokasiUmum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Yuriko Ferdian (2013) yang menunjukan variable dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

f. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah tetapi secara parsial Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah dan DAU, DAK dan DBH sebagai variabel yang bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah tapi tidak dengan Dana Perimbangan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

5. SIMPULAN

a. Simpulan

1. Secara deskriptif menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja daerah cenderung meningkat dan dapat dilihat keterkaitan terhadap pendapatan asli daerah cukup bagus. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah pada penelitian ini memberikan hasil bahwa terdapat Pengaruh signifikan yang kuat antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah..
2. Secara deskriptif Dana Perimbangan menunjukkan kontribusi yang cenderung menurun karena semakin baik pendapatan asli daerah maka ketergantungan terhadap pusat tidak terlalu tinggi. Pengaruh Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan yang kuat dengan belanja daerah tetapi secara parsial Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berarti jika pendapatan asli daerah dan dana perimbangan meningkat maka belanja daerah juga meningkat dan belanja daerah secara persentase kenaikan cenderung fluktuatif karena dengan seiringnya peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Saran

1. Untuk meningkatkan belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan bisa mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga pemerintah daerah agar terus mengupayakan untuk dapat bisa menarik Dana Perimbangan untuk dialokasikan pada sektor publik agar penggunaanya menjadi efisien dan menjadi penerimaan daerah. Dan pemerintah mesti objektif dan selektif dalam pelaksanaan belanja daerah agar sesuai dengan yang di harapkan masyarakat setempat, pemerintah diharapkan bisa mempertahankan peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai belanja daerah, harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran yang direncanakan penting dilakukan. Pemerintah daerah seharusnya lebih selektif dalam mengeluarkan anggaran yang dipergunakan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengeluaran anggaran belanja daerah.
3. Sebaiknya pemerintah daerah lebih transfaran dalam penggunaan belanja daerah yang lebih produktif. Sehingga dengan adanya peningkatan belanja daerah memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan partumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambah jangka tahun yang akan diteliti dan tidak mengambil

objek yang sama. Hal ini dimaksudkan agar membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk di kota lain.

6. REFERENSI

[1] Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pemerintah Kota Palembang.

[2] Devita, Andri, Arman Delis dan Junaidi. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. Universitas Jambi, Jambi.

[3] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pelengkap Buku Pegangan 2014 Penyelengaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah*. Jakarta.

[4] Ferdian, Yuriko. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Belanja Daerah*. Universitas Negeri Padang, Padang.

[5] Fitriadi, Primadita, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. 2014. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap.* Salemba Empat, Jakarta.

[6] Hariadi, Pramono, Yanuar E. Restianto dan Icuk Rangga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.

[7] Kuriawan, Albert. 2014. *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, konsep dan Praktik Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.

[8] Martini, Ni Luh Duna Selvia, Wayan Cipta dan Iwayan Suwendra. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng 2006-2012*. Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.

[9] Panggabean, Hendri Edison H. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir.*Universitas Sumatera Utara, Medan.

[10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

[11] Rahmawati, Nur Indah. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah).* Universitas Diponerogo, Semarang.

[12] Sanusi, Anwar. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.

[13] Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

[14] *Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.* Presiden Republik Indonesia.

[15] *Undang-undang No. 33 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* Presiden Republik Indonesia.

[16] *Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daaerah.* Presiden Republik Indonesia.

[17] *Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Presiden Republik Indonesia.

[18] Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Universitas Negeri Semarang, Semarang.

[19] Wahyuni, Nadia Dewi. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.*Universitas Bina Darma, Palembang.

ANALISIS PENERAPAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

Megaria [1], Hasan Kuzery [2], Yeni Widyanti [3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
megaria63.mr@gmail.com[1]
hasan_kuzery@mail.binadarma.ac.id[2]
yeniwidyanti@binadarma.ac.id[3]

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the application of the sunset policy analysis of the level of tax compliance on the submission of their annual tax return to the Tax Office Pratama Palembang Ilir Barat. This study munggunakan qualitative descriptive analysis method, the data source is primary and secondary data sources. Discussion of the results showed that: Percentage Level of Individual Taxpayer compliance in reporting their annual tax return in the year 2013-2015 was 28.14%, 26.55%, 27.56% for the agency, and for the individual taxpayer 36.65%, 40.85%, 42.76%. letter of reprimand and forced letter decline when their policies sunset policy.perbedaan number of warning letters and letters forcibly before and after sunset policy amounted to 3,503 sheets. disbursement of arrears of income tax with a letter of reprimand and forced the acceptance letter STO PPH in Palembang Ilir Barat, before the sunset policy amount of income tax arrears with a letter of reprimand and forced letter amounted to 92,078,901,675 and the amount of arrears paid amounted to 9,912,055,084. While after sunset policy and the amount of income tax arrears amounting to 16,451,995,556 and the amount of arrears paid amounted to 13 342 866 469.

Keywords: *Sunset Policy, the level of tax compliance, SPT*

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak terutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban ini dinyatakan dalam bentuk pembayaran pajak terutang untuk menghapuskan utang pajak. Oleh sebab itu, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang dalam batas waktu yang telah ditentukan, hal ini harus diperhatikan oleh Wajib Pajak karena keterlambatan pembayaran dalam masa tersebut berakibat dikenakannya sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak. Maka Wajib Pajak dikenakan bunga keterlambatan sebesar dua persen per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Tahunan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan

diberikannya fasilitas sunset poicy terhadap wajib pajak yang belum mempunyai NPWP maupun yang sudah mempunyai NPWP. Fasilitas tersebut terdapat dalam Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2009.

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Adapun Pasal 37A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut Pasal 37A Ayat 1 berbunyi Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2014, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 91/PMK 03/2015

Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak di tahun 2015 dan untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar, atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015.

Melalui adanya kebijakan *Sunset Policy* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Tahunan, dan menimbulkan rasa keinginan Wajib Pajak untuk membayar pajak yang belum dibayar dan dilaporkan pada tahun 2014 dan sebelumnya.

Mengingat pentingnya *sunset policy* seperti yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengambilan judul **"Analisis Penerapan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat".**

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Penerapan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 *Sunset Policy*

Kebijakan *sunset policy* dilatarbelakangi oleh sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *Self Assessment System.* Pelaksanaan pemenuhan perpajakan oleh Wajib Pajak diserahkan seluruhnya pada Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga kemungkinan untuk melakukan ketidakpatuhan akan besar. Dengan adanya indikasi ketidakpatuhan bagi Wajib Pajak, terdapat peraturan perpajakan yaitu UU KUP Pasal 35 yang memberikan kewenangan DJP untuk melakukan penelusuran data pada Wajib Pajak.

Sehinnga bagi Wajib Pajak yang ditemukan ketidakbenaran pelaporan perpajakannya akan dikenakan sanksi. Untuk menghindari hal tersebut maka diluncurkanlah bentuk pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melaporkan kekurangan pajak ditahun sebelumnya.

2.2 Definisi Kepatuhan

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2.2.1 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada umumnya kepatuhan Wajib Pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, telah dilakukan dengan benar sesuai peraturan yang berlaku atau belum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan berikut: a. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga keuangan pengawasan pemerintah dengan pendapat " Wajar Tanpa Pengecualian " selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.3 Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang hanya ada pada Pajak Penghasilan. Surat Pemberitahuan Tahunan dalam Pasal 1 (UU No.28 Tahun 2007) menyebutkan, "SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak".

2.4 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
RISSA WIDYAWATI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013	Pengaruh program *sunset policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta)	1. *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak badan di Surakarta. Hal ini diperoleh dari nilai thitung sebesar 5,171 dan sig. sebesar 0,000. Karena nilai sig < 0,05, maka H1 diterima.
SORAYA UNIVERSITAS	Penerapan *sunset policy* dalam meningkatkan	1. Penerapan kebijakan *sunset policy* memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak

KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2010	kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama cilandak	dengan arah positif. Artinya semakin baik penerapan *sunset policy* akan meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak. Penerapan *sunset policy* memberikan dampak sebesar 49,3% dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 50,7% dijelaskan variable lain di luar variabel penerapan kebijakan *sunset policy*, seperti kemauan wajib pajak itu sendiri, *compliance cost*, kejelasan peraturan perpajakan, dan sikap dari aparat pajak.
DAHLIANA HASAN UNIVERSITAS GAJHA MADA TAHUN 2008	*sunset policy* dan implikasinya terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan di daerah Istimewa Yogyakarta	Pelaksanaan *sunset policy* pada dasarnya berimplikasi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan di DIY dalam kurun waktu Januari-Oktober 2008. Namun demikian, kontribusi yang diberikan belum optimal karena masih sedikitnya jumlah wajib pajak yang menggunakan fasilitas *sunset policy* , yaitu kurang dari target internal yang telah ditetapkan sekitar 10%-20% dari jumlah wajib pajak.

3.METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamat di Jl. Tasik Kambang Iwak Palembang tahun 2015.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa data primer dan sekunder . di mana sumber dari penelitian ini didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dan data yang diproleh dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

3.3 Operasional Variabel

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2012:61) adalah sebagai berikut:

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Penerapan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Tahunan.

Berdasarkan rumus maka dapat direkapitulasi kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Tahunan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Tahunan}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar}} \times 100\%$$

\Tabel 4.1

No	Tahun	Wp terdaftar		Persentase badan	Persentase kenaikan	Wp lapor SPT		Persentase OP	Perwntase kenaikan
		Badan	Op			Badan	Op		
1	2013	7.607	94.255	28.14%	-	2.141	34.543	36.65%	-
2	2014	8.421	103.481	26.55 %	1.59%	2.236	42.275	40.85%	4.2%
3	2015	9.104	111.667	27.56 %	1.01%	2.509	47.751	42.76%	1.92%

Sumber : data yang diolah

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) meningkat disaat sebelum dan sesudah adanya sunset policy. Pada tahun 2013-2014 tingkat kepatuhan menurun, akan tetapi pada tahun 2015 saat dikeluarkannya kebijakan sunset policy persentase tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Tahunan kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya program *sunset policy* yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2015 dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

4.2 Analisis dengan surat teguran dan surat paksa

Selain diukur dengan jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP,dan wajib pajak yang lapor SPT kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini juga diukur dengan jumlah Surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Pada tabel 4.2 merupakan jumlah surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Tabel 4.2

Tahun	2013	2014	2015
Surat teguran dan surat paksa	2.310	4.541	1.038

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Berdasarkan jumlah surat teguran dan surat paksa mengalami penurunan saat adanya kebijakan sunset policy pada kantor pelayanan pajak pratama palembang ilir barat. terdapat perbedaan jumlah surat teguran dan surat paksa sebelum dan sesudah sunset policy sebesar 3.503 lembar.

4.5 Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan

pajak KPP Pratama Palembang ilir barat akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Tabel 4.3
Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
KPP Pratama Palembang Ilir Barat

No	Tahun	Tunggakan pajak penghasilan	Tunggakan pajak penghasilan yang dibayar
1	2013	Rp 92.078.901.675	Rp 9.097.195.685
2	2014	Rp 16.451.995.556	Rp 9.912.055.084
3	2015	Rp 6.869.391.278	Rp 13. 342.866.469

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Disaat sebelum adanya sunset policy 2013-2014 jumlah tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa sebesar 92.078.901.675 dan jumlah tunggakan yang dibayar adalah sebesar 9.912.055.084.

Sedangkan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2014-2015. Disaat sesudah sunset policy jumlah tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa sebesar 16.451.995.556 dan jumlah tunggakan yang dibayar adalah sebesar 13. 342.866.469.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat sebelum sunset policy pada tahun 2013 yaitu 28.14% untuk badan dan 36.65% untuk Op sedangkan tahun 2014 yaitu 26.55% untuk badan dan 40.85%. adapun tingkat kepatuhan wajib pajak sesudah sunset policy pada tahun 2015 yaitu 27.56 % untuk badan dan 42.76% wajib pajak orang pribadi.
2. Surat teguran dan surat paksa mengalami penurunan saat adanya kebijakan sunset policy pada kantor pelayanan pajak pratama palembang ilir barat. terdapat perbedaan jumlah surat teguran dan surat paksa sebelum dan sesudah sunset policy sebesar 3.503
3. Pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Disaat sebelum adanya sunset policy 2013-2014 jumlah tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa sebesar 92.078.901.675 dan jumlah tunggakan yang dibayar adalah sebesar 9.912.055.084. dan Disaat sesudah sunset policy jumlah tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa sebesar 16.451.995.556 dan jumlah tunggakan yang dibayar adalah sebesar 13. 342.866.469.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah, kebijakan *sunset policy* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengacu pada hal tersebut disarankan kepada pejabat setingkat menteri untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang *responsive* terhadap tuntutan perkembangan jaman seperti halnya *sunset policy* ini. Mengingat penerimaan pajak yang masih minim, maka program *sunset policy* dapat diadakan

kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar.

2. Bagi DJP, Sebaiknya DJP mensosialisasikan kebijakan-kebijakan seperti *sunset policy* lebih baik lagi. DJP dapat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan seperti ini melalui media cetak maupun elektronik yang ditayangkan sesering mungkin, melalui booklet atau penyuluhan langsung kepada wajib pajak agar wajib pajak tertarik dan tidak melewatkan kesempatan untuk mengikuti kebijakan ini.
3. Bagi penelitian selanjutnya, untuk lebih melengkapi kekurangan dari penelitian ini.

6. REFERENSI

[1] Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan.* Salemba Empat : Jakarta.

[2] Fitriandi, Primandita, dkk. *Undang-Undang Perpajakan*. Salemba Empat : Jakarta

[3] Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat. 2015. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar: Palembang.

[4] Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat. 2015. Jumlah Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan: Palembang.

[5] Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

[6] Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat : Jakarta.

[7] Dewi, Febriliya sari. 2014. Skripsi, *Evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2011-2013 di KPP Pratama Purworejo.* Universitas Negeri Yogyakarta.

[8] Widyawati, Rissa. 2013. Skripsi, *Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Study Kasus Pada Wajib Pajak Badan Surakarta).* Universitas Muhammadiyah Surakarta.

[9] _____PER- 29/PJ/2014 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) dengan Empat Cara

[10] _____192/PMK.03/2007 Kriteria Wajib Pajak Yang di Nama kan Patuh.

[11] Resmi,Siti. 2014. *Praktikum Perpajakan*. Salemba Empat : Jakarta.

[12] Soraya.2010. Skripsi, *Penerapan Sunset Policy Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak.* Universitas Komputer Indonesia Bandung.

[13] _____PMK No.91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetor pajak.

[14] Resmi, Siti. 2013.*Perpajakan*. Salemba Empat : Jakarta.

[15] _____SE-36/MK.03/2013 Tentang himbauan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak dengan menggunakan e-filling.

PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT

Meta Oktaria[1], Poppy Indriani[2], Andrian Noviardy[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisinis, Universitas Bina Darma Palembang
Metaoktaria890@gmail.com[1]
Poppy.indriani@binadarma.ac.id[2]
Andrian.noviardy@binadarma.ac.id[3]

Abstract

The internal audit function is very important in helping the management in internal control processes for enterprises which row of the various risks that may occur, if a company does not have the internal audit problems will arise both an administrative nature to the detriment of cheating. For finance companies, the role of internal audit can not be separated internal control lending. Internal control of credit has a goal to minimize the risks that may occur, so the purpose of lending to customers both in terms of cash flow and stabilits keuntungn obtained from the credit granting process. This study uses descriptive analysis and simple regression anlaisis with a sample of 36 respondents. The purpose of the study to analyze the influence of internal audits of the effectiveness of internal control at PT Bank lending Babel Palembang of South Sumatra. Internal audit results showed a significant effect on the effectiveness of internal control of credit at PT Bank of South Sumatra Palembang babel of 24.4% and 75.6% influenced by other factors beyond research.

***Keywords**: Effect, Internal Audit, Control Iternal, Credit*

1. PENDAHULUAN

Peranan bank sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, mempunyai kegiatan utama yaitu kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan alokasi dana, dimana salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Resiko yang muncul atas pemberian kredit adalah kredit macet. Kredit macet dalam jumlah yang besar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bank tersebut. Dengan adanya kredit macet, kegiatan bank akan terhambat sebab keuntungan utama bank diperoleh dari selisih bunga simpanan bank kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. PT Bank Sumsel Babel Palembang merupakan salah satu perbankan yang ikut serta menyediakan fasilitas pemberian kredit. PT Bank Sumsel Babel Palembang perlu menerapkan suatu pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik perusahaan dengan meminimkan kemungkinan terjadinya penyelewengan, pemborosan, kemacetan kredit, serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerja. Dengan pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit akan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan yang akan terjadi.

Pengendalian internal memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu perlu dilakukannya evaluasi terhadap pengendalian internal. Audit internal adalah fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan oleh organisasi, yang hasil pemeriksaanya berupa saran, rekomendasi, analisis, dan informasi akan bermanfaat bagi manajemen dalam mengusahakan agar perusahaan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yeng telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pendahuluan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap efektifitas pengendalian internal pemberian kredit pada PT Bank Sumsel Babel Palembang.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Audit Internal

Audit internal adalah pegawai dari suatu organisasi/ perusahaan yang bekerja diorganisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mebantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan ,Suhayati (2010:14).

Efektifitas

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya, Kurniawan (2010:109).

Pengendalian Internal

Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah, Mardi (2014:59).

Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

3. METODE PENELITIAN

Populasi, Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah staff divisi kredit kantor cabang dan kantor cabang pembantu PT Bank Sumsel Babel yang ada di Palembang. Responden dalam penelitian ini adalah staff pemberi kredit di kantor cabang dan kantor cabang pembantu PT Bank Sumsel Babel yang ada di Palembang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah bentuk sampel jenuh dimana responden adalah seluruh bagian divisi staff pemberi kredit.

Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdapat variabel dependen (Y) adalah efektifitas pengendalian internal pemberian kredit, variabel independen (X) audit internal.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber primer, yaitu menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likret (1-5). Kuesioner yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu seluruh staff pemberi kredit.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, Sanusi(2012:76).

Uji Reliabilitas

Sanusi (2012:81) “reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk”. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen secara parsila. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen terhadap variabel dependen, maka nilai signifikan dibandingkan dengan derajat kepercayaan.

Uji Regresi

Uji koefisien determinasi(R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2009).

Uji Normalitas Data

Menurut Sanusi (2012:90)" uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak".

Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

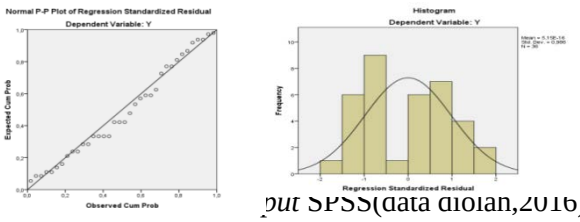
Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan tiap-tiap item pernyataan kuesioner untuk variabel efektifitas pengendalian internal pemberian kredit(Y) yang berjumalh 8 butir pernyataan dari pernyataan 1 sampai 8 dinyatakan valid dan sesuai dengan data yang dibutuhkan dan variabel independen (X) audit internal yang berjumlah 20 butir pernyataan dinyatakan valid dan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan tiap-tiap item pernyataan kuesioner untuk variabel efektifitas pengendalian internal pemberian kredit(Y) yang berjumalh 8 butir pernyataan dari pernyataan 1 sampai 8 dinyatakan *reliabel* dan sesuai dengan data yang dibutuhkan dan variabel independen (X) audit internal yang berjumlah 20 butir pernyataan dinyatakan *reliabel* dan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah datayang digunakan terdistribusi normal dan menyebar disekitar garis diagonal. Berikut ini data normalitas yang diolah dengan SPSS.

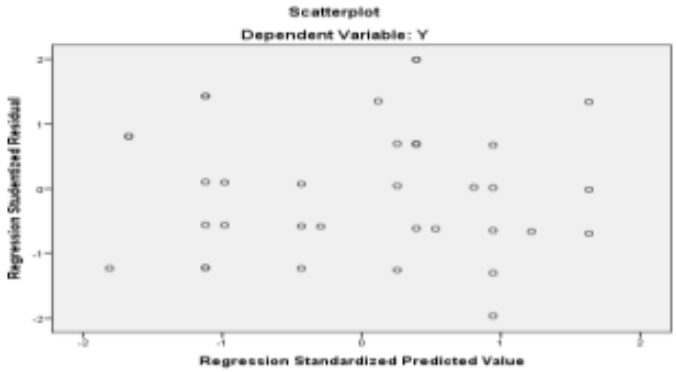


put SPSS(data diolah,2016)

Gambar 4.1 Normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*

Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui gejala kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *varians* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam model regresi, dapat digunakan uji heteroskedastisitas dengan gambar *Scatterplot* yang menggambarkan ada tidaknya hubungan nilai residual model regresi (yakni selisih nilai prediksi dengan nilai rill) dengan prediksi variabel dependen (Y).



Sumber : *Output* SPSS(data diolah,2016)

Gambar 4.2 *Scatterplot*

Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah regresi bersifat linier atau tidak. Uji penelitian ini menggunakan ANOVA Variabel X dan Y, dapat dilihat dari nilai signifikan dari *deviation of linearity* untuk X terhadap Y. Hasil pengujian menggunakan SPSS versi 20 dan secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
OUTPUT SPSS LIEARITAS X terhadap Y

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Between Groups	(Combined)	1,343	3	,448	3,743	,021
		Linearity	**1,263**	**1**	**1,263**	**10,557**	**,003**
		Deviation from Linearity	,080	2	,040	,336	,717
	Within Groups		3,828	32	,120		
	Total		5,172	35			

Terlihat pada table 4.10 bahwa nilai signifikan sebesar 0,003. Nilai siginifikan < 0,05 yang berarti hubungan bersifat linier. Hal ini menunjukan bahwa data variabel audit internal (X) terhadap efektivitas pengendalian internal pemberian kredit (Y) berpola linier.

Uji t

Untuk uji statistik t, hipotesis nol (H_o) ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau dengan perkataan lain menerima hipotesis alternatif (H_a).

Tabel 4.2
OUTPUT SPSS TENTANG UJI SIGNIFIKASI PARSIAL
(Uji Statistik t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,115	1,023		6,954	,000
	X	,869	,262	,494	**3,314**	**,002**

a. Dependent Variable: Y

Sumber : *Output* SPSS(data diolah,2016)

Berdasarkan uji statistik pada tabel 4.6 tersebut di atas dapat dilihat tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel bebas/independen. Dari variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi variabel Audit Internal (X) memilki nilai signifikansi dibawah 0,05 (p <0,05) yang berarti variabel efektivitas pengendalian internal pemberian kredit dapat dipengaruhi oleh variabel X.

Koefisien Determinan (R *Squere*)

Tabel 4.7
OUTPUT SPSS TENTANG KOEFISIEN DETERMINAN (R SQUERE)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,494[a]	**,244**	,222	,33907

Sumber: *Output* SPSS (data diolah,2016)

Jika dilihat dari table 4.7 nilai *R Square* sebesar 0,244 dapat dinyatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat secara simultan hanya sebesar 24,4%. Dengan kata lain kemampuan variabel audit internal (X) secara simultan sebesar 24,4%, sisanya sebesar 75,6% (100% – 24,4%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian internal pemberian kredit pada PT Bank Sumsel Babel Palembang

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian internal pemberian kredit signifikan. Pengaruh secara signifikan ini terlihat dari koefisien regresi dari seluruh komponen audit internal sebesar 0,869 dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal pemberian kredit terlihat dari hasil regresi linier, tingkat signifikansi atau peluang ralat untuk variabel X (audit internal) adalah p = 0,003 yang artinya nilai *p- value* 0,000 < 0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh secara signifikan, berarti koefisien persamaan regresi sesuai dengan teori bahwa pengaruh audit internal adalah searah dengan efektivitas

pengendalian internal pemberian kredit dengan kata lain audit internal akan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal pemberian kredit pada PT Bank Sumsel Babel Palembang.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Tomi Ginting (2013) peranan *internal audit* berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengendalian *internal processs credit granting and collection* sebesar 13,9 % dan sisanya sebesar 81,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Lidia Mawikere (2012) pengaruh kinerja auditor internal terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan di kota Manado dimana didapatkan hasil bahwa secara parsial pengelolaan fungsi audit internal dan komunikasi hasil penugasan, tidak berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur pemberian kredit, sedangkn lingkup penugasan, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, resolusi penerimaan resiko oleh manajemen berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap efektivitas pengendalian internal prosedur kredit.

5. SIMPULAN

Simpulan

1. Secara Parsial (Uji t), audit internal (X) memiliki nilai signifikan sebesar 0,002, dengan kata lain audit internal berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal pemberian kredit pada PT Bank Sumsel Babel Palembang.
2. Nilai *R Square* dalam penelitian ini sebesar 0,244 dapat dinyatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat secara simultan hanya sebesar 24,4%. Dengan kata lain kemampuan variabel audit internal (X), secara simultan sebesar 24,4%, sisanya sebesar 75,6% (100% – 24,4%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Saran

1. Kualifikasi audit internal terus menerus dikembangkan dengan mengikuti seminar-seminar juga pelatihan-pelatihan dan melanjutkan jenjang pendidikan yang berhubungan dengan *internal auditor* agar wawasan dan pengetahuan auditor semakin luas dan dengan demikian jenjang karir *internal auditor* juga dapat meningkat.
2. PT Bank Sumsel Babel Palembang sebaiknya melakukan audit internal secara rutin terutama terhadap kebijakan pemberian kredit sehingga semakin hari kualitas kebijakan semakin membaik

6. REFRENSI

[1] Agoes, Sukrisno.2012. *Auditing*.Penerbit Salemba Empat.Jakarta

[2] A.Arens James K.Loebbecke, Alvin.2010. *Auditing*.Penerbit Erlangga.Jakarta

[3] Akbari, Azom.2014.*Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Perkreditan pada Bank Saudara Kantor Cabang Palembang*.Skripsi.Universitas Muhammadiah Palembang.Palembang

[4] Korompis, Claudia Wanda Melati.2013.*Pengaruh KinerjaAuditor Internal Terhadap Efektifitas Pengendalian Internl Prosedur Kredit Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Manado*.Jurnal Ilmiah.Universitas Manado.Manado

[5] Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisi Multivariante dengan SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang.

[6] Irjanti.2010. *Sistem Informasi Akuntansi*.Penerbit C.V Andi Offset.Yogyakarta

[7] Kasmir.2012. *Dasar-Dasar Perbankan*.Penerbit Rajagrafindo Persada.Jakarta

[8] Kurniawan.2010.*Sistem Informasi Akuntansi*.Penerbit Erlangga.Jakarta

[9] Desyani, Ni Putu Eka.2010.*Pengaruh Independensi,Kompetensi Profesional, dan pengalaman kerja internal controller teradap Efektifitas Penerapan Struktur Pengendalian*

Internal pada Bank Perkreditan Rakyat Bandung.Skripsi.Universitas Pasundan Bandung.Bandung

[10] Mardi.2014. *Sistem Informasi Akuntansi*.Penerbit Salemba Empat.Jakarta

[11] Priyatno, Dwi.2014. *SPSS 22*.Penerbit C.V Andi Offset.Yogyakarta

[12] Sanusi, Anwar.2012. *Metodelogi Penelitian Bisnis*.Penerbit Salemba Empat.Jakarta

[13] Suhayati, Ely.2010. *Auditing*. Penerbit Graha Ilmu. Yoyakarta

[14] Ginting, Tommi.2013.*Pernan Auditor terhdap Efektifitas Pengendalian Internal Process Credit Granting and Collection*.Skripsi.Universitas Diponogoro.Yogyakarta

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA PEGAWAI

Muhammad Ridho Akbar[1], Henni Indriyani[2], Septiani Fransisca[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
ridhoakbar11@yahoo.com[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
Septiani.Fransisca@binadarma.ac.id[3]

Abstrack

Percentage of the servant expenditure against to total local expenditure in District/Municipality Province of South Sumatera from 2011 until 2014 amount 60 %. This case indicate that the most absorption of expenditure allocation in servant expenditure. Based on this data, this research aimed to give empirical edivence about this influences Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), Special Allocation Fund (DAK) the servant expenditure allocation.The reserach method use quantitative method with linear regression analysis. The secondary data is used in this research consist PAD, DAU, DBH, DAK, and servant expenditure. The analysis result show that PAD and DBH have positive influence and significantly against to the servent expenditure in α = 5 % whreas, analysis result of DAU and DAK show that it have no significant influence against to the servant expenditure budgeting.This research conclusion is PAD and DBH give influence against to the servant expenditure to district/municipality area in Province of South Sumatera.

Keywords: *Local Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Special Allcoation Fund and Servent Expenditure.*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhususan serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah.

Potensi daerah seperti dari Sektor Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di daerah tersebut. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran untuk Belanja Pegawai, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu sektor yang paling Dominan yang ada di setiap daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.2
Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Sumatera Selatan 2010-2014

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja Daerah	Persentase
2011	7.577.804	13.701.480	55,3. %
2012	9.239.778	15.872.712	58,2 %
2013	11.805.736	19.771.436	59,7 %
2014	14.886.140	24.267.081	61,7 %

Sumber : hasil olah data

Tabel 1.2 terlihat bahwa perbandingan antara Belanja Pegawai dengan total belanja daerah yang semakin meningkat. Meningkatnya alokasi belanja pegawai dikarenakan jumlah pegawai pemerintahan yang semakin meningkat setiap tahunnya.Pemerintahan beranggapan dengan menambah jumlah pegawai pemerintahan dapat mengingkatkan kualitas pelayanan masyarakat, namun peningkatan alokasi belanja pegawai tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.Fenomena Belanja pegawai juga terdapat pada kasus pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah.Pemekaran daerah seharusnya fokus terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak menambah infisiensi biaya birokrasi lokal. Pada prakteknya, pemekaran daerah dapat menambah pengeluaran pada daerah otonom terutama alokasi belanja pegawai dari dana perimbangan

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap pengalokasian Belanja Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Provinsi sumatera Selatan".

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Dalam sudut pandang keagenan sektor publik, legislatif yaitu DPRD berperan sebagai pihak prinsipal dan eksekutif yaitu pemerintah daerah berperan sebagai agen. Berdasarkan program yang akan dijalankan pemda akan menyusun anggaran daerah. Sebagai pelayanan kepada publik, legislatif yaitu DPRD berperan sebagai agen sedangkan publik yaitu masyarakat berperan sebagai prinsipal.Sebagai perwakilan yang dipercaya masyarakat dapat menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya yaitu legislatif bertindak berdasarkan keinginan rakyat dan rakyat memantau kinerja dari legislatif. Legislatif akan menjadi agen ketika berhubungan dengan publik tetapi disisi lain legislatif akan menjadi prinsipal. Jadi legilatif mendapatkan tugas dari publik sebagai agen dan akan memantau kinerja pemda melalui anggaran sebagai pihak principal.

2.2 Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintahan daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan (KSAP, 2010:34).Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2011:23).Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil sumber daya alam.Dana alokasi khusus menururt UU. No 23 tahun 2014 merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang dialokokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tertentu dan sesuai dengan prioritas nasional,

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Besarnya Kewenangan legislatif (*principal*) dalam proses penyusunan anggaran (Undang-undang No.23/2014) membuka ruang bagi legislatif untuk "memaksakan" kepentingan pribadinya. Studi Abdullah (2010) dalam Darwanto (2011), mengemukakan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* Pendapatan Asli Daerah ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami penurunan.Abdullah (2010) dalam Darwanto (2011), menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spreed* Pendapatan Asli Daerah.Spead Pendapatan Asli Daerah merupakan selisih hasil dari pengalokasian daerah untuk pendidikan dan kesehatan terhadap belanja daerah. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

H1 :*Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi realisasi Belanja pegawai*

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kurnia dan sulistyowati (2010) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pegawai. Secara spesifik mereka menegaskan variabel – variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima. Sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan symmetric .Berdasarkan Landasan teoristis dan temuan – temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja pegawai

2.3.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi, 2009:45).

Penelitian yang dilakukan oleh Indra (2010): menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana bagi hasil secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap belanja pegawai di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Landasan Landasan teoritis dan temuan diatas maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh Positif terhadap alokasi belanja Pegawai

2.3.4 Pengaruh Dana alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Pegawai

DAK bertujuan untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.Diarahan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Askam tuasikal (2011) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) , Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja langsung pada Pemerintah kabupaten di indonesia, Secara simultan DAU, DAK, PAD, PDRB berpengaruh positif terhadap belanja langsung Pemerintah kabupaten di indonesia. Kedua secara parsial DAU, DAK, PAD, berpengaruh terhadap belanja langsung sedangkan PDRB tidak berpengaruh posisitif terhadap belanja langsung pemerintah provinsi di indonesia. Berdasarkan Landasan Landasan teoritis dan temuan diatas maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

H4: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder.Data sekunder dari penelitian ini dikumpulkan dari sumber – sumber tercetak, dimana data itu telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya.Data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD yang diperoleh BPS (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan).

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Teknik analisis kuantitatif.

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku atau generalisasi (Sugiyono, 2012)

3.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas

Gejala Heteroskedastisitas diuji dengan metode Gletser dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing – masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ($\alpha = 0{,}05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

3.3.4 Uji Autokerelasi

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pengganggupada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama yang lainnya.

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin- Watson *(d)*. Hasil perhitungan Durbin – Watson *(d)* dibandingkan dengan nilai d_{tabel} pada $\alpha = 0{,}05$. Table d memiliki dua nilai, yaitu nilai batas atas *(d_U)* dan nilai batas bawah *(d_L)* untuk berbagai nilai n dan k.

Jika $d < d_L$; maka terjadi autokorelasi positif

$d > 4 - d_L$; maka terjadi autokotelasi negatif

$d_U < d < 4 - d_U$; maka tidak terjadi autokorelasi

$d_L \leq d \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$; maka pengujian tidak meyakinkan

3.3.5 Uji multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar Variabel bebas (independen) . Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orgonal. Variabel orgonal adalah variabel independen yang menilai korelasi anatar sesama variabel independen sama dengan nil (Ghozali, 2010, 65).

Pendeteksian terhadap multikolonieritas dapat dilakukan dengan nilai *variance Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat gejala multikolonieritas yang tinggi.

3.4 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesia (Ha) metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, karena menyangkut lima variabel independen dan satu buah variabel dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi berikut ini:

$$Y = a + b_1 X1 + b_2 X2 + b_3 X3 + b_4 X4 + e$$

Keterangan:
Y = Belanja Pegawai
a = Konstanta
X1 = Pendapatan Asli daerah
X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
X3 = Dana Bagi Hasil (DBH)
X4 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
b1 = Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah
b2 = Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum
b3 = Koefisien Regresi Dana Bagi Hasil
b4 = Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus
e = Standar Error (pengganggu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3660,052	7479,429		,489	,627
	Pendapatan Asli Daerah	,115	,032	,370	3,597	,001
	Dana Alokasi Umum	-,008	,020	-,048	-,407	,686
	Dana Bagi Hasil	,060	,005	,750	11,100	,000
	Dana Alokasi Khusus	,222	,117	,161	1,897	,063

Sumber : hasil output spss

4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pegawai

Dari Tabel diatas yang telah dilakukan membuktikan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh pemerintah provinsi sumatera selatan akan meningkatkan alokasi belanja pegawai. Hal ini terbukti semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung dari pusat, Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki dan akan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan perspektif teori keagenan dimana terdapat hubungan *spread* PAD antara pihak ekskutif dan legislatif untuk memprioritaskan preferensinya dalam pengganggaran.

Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, dimana posisi legslatif sebagai *principal* dan pihak eksekutif sebagai agen sehingga akan mempengaruhi pihak eksekutif untuk menaikkan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang mendukung kepentingannya yaitu dengan meningkatkan alokasi belanja pegawai Dengan demikian hipotesis PAD berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai diterima.

4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Berdasarkan tabel diatas yang telah dilakukan tidak membuktikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengalokasian belanja pegawai akan semakin besar. Alasan DAU tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja pegawai karena DAU merupakan dana transfer yang bersifat *block grant* yang penggunaanya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang dialokasikan pun tidak terlalu besar sehingga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian belanja pegawai. DAU juga dialokasikan kepada daerah tanpa memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat yang dialihkan kepada daerah yang sepenuhnya menjadi beban daerah..Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai.

4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai

Berdasarkan Tabel diatas yang dilakukan telah membuktikan bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diperoleh Pemerintah daerah akan menetapkan Belanja Pegawai yang besar jika anggaran Dana Bagi Hasil besar, sebaliknya jika kecil Belanja Pegawai yang akan ditetapkan jika anggaran Dana Bagi Hasil kecil. Dana Bagi hasil juga merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran dan Belanja daerah.Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus semakin kecil.Pemerintah Daerah diharapkan lebih mandiri dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memuhi belanja pegawai dan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai setiap pengeluaran khususnya mengenai belanja pegawai.Dengan demikian hipotesis DBH berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai diterima.

4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai

Berdasarkan Tabel diatas yang telah dilakukan membuktikan DAK berpengaruh positif terhadap belanja pegawai. Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, kesehatan, inftasturktur, prasarana pemerintahan kelautan dan perikanan. Pemerintah pusat memebrikan Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mensejahterakan masyarakat misalnya dengan menambah jumlah guru di kebupaten yang masih memerlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menambah akses layanan umum sepeti Rumah sakit dan menambah jumlah dokter untuk kabupaten yang masih kekurangan tenaga medis.Dengan demikian hipotesis DAK berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai diterima.

5. SIMPULAN

5.1 Simpulan

Hasil Pengujian Hipotesis pertama, ketiga dan Keempat menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai.Hasil Pengujian Hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai

5.2 Saran

Sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan Pendapatan Asli daerah dengan cara lebih mengoptimalkan dalam memanfaatkan kekayaan daerah dan menggali potensi sumber daya alam yang ada, begitu juga dengan Dana Bagi Hasil dan Dana alokasi khusus yang diterima pemerintah. Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus semakin kecil.Pemerintah Daerah diharapkan lebih mandiri dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memuhi belanja pegawai dan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai setiap pengeluaran khususnya mengenai belanja pegawai.Bagi Peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak jumlah sampel, menggunakan sektor-sekor lain sebagai objek penelitian dan menambahkan variabel-variabel lainnya., seperti Derajat desentralisasi, Luas Wilayah dan Pendapatan lain-lain. Peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas periode pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

6. REFERENSI

[1] Diah, Retno. 2011. *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK terhadap alokasi belanja daerah: studi kasus pemerintah provinsi se indonesia. Jurnal akuntansi*.Vol2, no 2.

[2] Herniati, Ayungnityas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke-2.Jakarta : Salemba Empat.*

[3] Kalangi, Bintang Josep. 2011. *Statistika ekonomi dan bisnis. Jakarata : Penerbit Salemba empat.*

[4] Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi penelitiian dan bisnis untuk akuntansi. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.*

[5] Sugiono. 2013. *Metode Penelian Kuantitatif dan Kualitatif ekonomi. Jakarta : Penerbit ALFABETA*

[6] _____ . 2014. *Undang-undang No.23 tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

[7] _____ . 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

[8] _____ . 2009. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sipil.*

PENGARUH PMK NO.91/PMK 03/2015 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Muhammad Whisnu Nirwansyah[1], H. Hasan Kuzery[2], Yeni Widyanti[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
whisnunirwansyah@yahoo.com[1]
hasankuzery@binadarma.ac.id[2]
yeniwidyanti@binadarma.ac.id[3]

Abstract

This study aims to determine whether or not Influence PMK 91 / PMK 03/2015 sanctions in the form of reduction or elimination of taxes on tax compliance in an increase in income tax revenue . The object of this study is the STO Lubuk Linggau . Testing in this study using data on the number of taxpayers registered , the number of SPT submitted and the amount of income tax revenue. Results from this study PMK No. 91 / PMK 03/2015 significantly affect tax compliance . Tigkat receipts from income tax also proved influential on kebijaka PMK 91 / PMK 03/2015 this .

***Keywords** : PMK No. 91 / PMK 03/2015 , Reduction or Elimination Sanctions Tax , Income Tax revenue , and the Taxpayer Compliance*

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri.Pajak merupakan penerimaan negara terbesar.Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak.Pada tahn 2015 ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan *sunset policy*.*Sunset policy* adalah suatu kebijakan yang akan berakhir pada waktu yang ditentukan. Kebijakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A Undang-undang KUP diatur masa berkhirnya untuk memudahkan, karena setelah waktu yang ditentukan tidak perlu dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi akan tidak berlaku dengan sendirinya.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terdapat dalam *sunset policy* ini diatur dalam PMK No. 91/PMK 03/2015 Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, sehingga kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Sebagai konsekuensinya , Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, berkewajiban mendukung upaya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalaui pelayanan prima dan penyuluhan intensif. Disisi lain, Direktorat Jenderal Pajak juga berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disinilah peranan pemeriksaan pajak sebagai pengawas dan penjaga agar wajib Pajak tetap patuh berada pada koridor peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada pengamanan penerimaan negara.

Selain dari sisi pemahaman dan pengetahuan wajib pajak akan adanya sanksi pajak terdapat faktor lainnya seperti faktor kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan itu sendiri. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kebijakan PMK No.91/PMK 03/2015 ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan negara terutama dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dan juga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari direktorat jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun tidak.Kantor Pelayanan Pajak Lubuk Linggau adalah objek dari penelitian ini.KPP Pratama Lubuk Linggau beroperasi setiap hari kerja, dari pukul 08.00-17.00.Menyediakan layanan pelaporan pajak, pendaftaran NPWP, serta administrasi pajak lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh PMK No. 91/PMK 03/2015 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau"**

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut para ahli memiliki pengertian yang berbeda- beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut memiliki tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

3. Berdasarkan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths. Pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.
5. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Menurutnya, pajak ialah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2.3 Sunset Policy

Sunset policy adalah kebijakan pemerintah dalam pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi.*Sunset policy* terbagi menjadi 2 (dua) bagian menjadi *tax amnesty* dan PMK No.91/PMK 03/2015

2.4 Tax Amnesty

Tax amnesty adalah pengampunan pajak, penghapusan pajak bagi yang menyimpan dananya diluar negeri untuk ditanam di dalam negeri dengan pajak rendah

2.5 PMK No. 91/PMK 03/2015

PMK No. 91/PMK 03/2015 adalah peraturan mentrei keuangan yang mengatur tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan . Bahwa dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan ditahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrumen kebijakan dibidang perpajakan

2.6 Sanksi pajak

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelangaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensi nya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah siksaan atau penderitaan.

2.7 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Ada 2 dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil.Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materil perpajakan, yakni sesuai sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakankepatuhan ateril juga meiputi kepatuhan formal

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material.Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari: “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan

pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal".

Kepatuhan formal yang dimaksud misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.bDari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau yang beralamat di Jl. Garuda No. 7, Kayu Ara, Lubuk Linggau

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.Menurut sanusi (2013: 104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil interview dengan pihak KPP Pratama Lubuk Linggau. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari data yang telah diolah KPP Pratama Lubuk Linggau berupa target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 serta jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar dan jumlah SPT yang disampaikan di Kota Lubuk Linggau

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan , wawancara, dokumentasi dan studi pustaka

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari Penghapusan sanksi pajak, kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan

1. PMK No.91PMK 03/2015 yaitu yang berisi tentang penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran penyetoran pajak
2. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela

3. Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitaitif. Menurut Sugiyono (2014: 9) menyatakan bahwa, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dmana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif digunakan oleh peneliti karena peneliti melakukan analisis-analisis yang menjelaskan atau mentransformasikan, menterjemahkan, dan menjelaskan makna data atau fenomena-fenomena yang didapati oleh peneliti secara langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan waib pajak dalam penyampaian SPT tahunan di kota Lubuk Linggau.

Dalam penelitian ini penulis meminta data jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar pada KPP Pratama Lubuk Linggau dan jumlah SPT yang telah disampaikan oleh wajib pajak serta dapat diketahui jumlah kenaikan atau penurunan serta dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan adanya pengaruh PMK No.91/PMK 03/2015 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak penghasilan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Instansi

Proses pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2008. Setelah melakukan persiapan baik gedung, sarana dan prasarana, wajib pajak dan lainnya, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau yang berlokasi di Jl. Garuda No. 7, Kayu Ara, Lubuk Linggau**.** Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau telah diresmikan (*launching)* pembentukannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 6 Mei 2008 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Saat Mulai Operasi (SMO) kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Linggau adalah tanggal 8 September 2008, bersamaan dengan 11 (sebelas) Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya yang dibentuk di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel Penerimaan PPh Pasal 21 & Pasal 23

Tahun	PASAL 21		
	Target	Realisasi	Kenaikan/penurunan (%)
2008	10.241.621.938	11.998.701.377	117%
2009	10.862.458.182	11.638.731.809	107%
2010	13.092.620.613	12.521.862.197	95%
2011	13.681.645.301	16.532.963.032	120%
2012	15.925.772.462	17.756.222.399	111%

2013	19.124.520.723	16.226.694.O88	84%
2014	19.648.438.661	20.328.981.340	103%
2015	18.568.021.542	23.099.383.618	124%

Tahun	PSL 23		
	Target	Realisasi	Kenaikan/penurunan (%)
2008	995.685.897	1.923.784.398	193%
2009	1.289.632.695	1.912.365.329	148%
2010	1.843.792.386	2.762.305.689	149%
2011	1.994.384.143	3.469.375.609	173%
2012	2.178.475.152	2.203.718.136	101%
2013	2.487.386.752	2.601.738.753	104%
2014	2.680.358.886	2.363.198.620	88%
2015	3.052.754.690	3.907.194.519	127%

Dilihat dari data penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 pada tahun 2008 sampai 2014 banyak mengalami perubahan rata-rata mencapai Rp 14.359.605.722. sedangkan perubahan kenaikan penerimaan penghasilan pada tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,31%. Pengurangan atau penghapusan sanksi pajak ini sendiri telah 2 (dua) kali diterapkan, yang pertama pada tahun 2008 dan yang kedua pada tahun 2015, pada tahun 2008 penerimaan pajak berhasil melebihi target (*over target)* yaitu dari target 10.241.621.938 menjadi 11.998.701.377 pada realisasi penerimaan tahun 2008.

Pada penerimaan pajak paenghasilan (PPh) pasal 23 juga mengalami *over target* pada tahun 2008. Target penerimaan PPh pasal 23 pada 2008 adalah sebesar 995.685.897 sedangkan realisasi yang terjadi pada tahun 2008 adalah 1.923.784.398. sama seperti penerimaan pajak penghasilan pasal 23 di tahun 2015 juga mengalami *over target* sebesar 129% yaitu dari target penerimaan Rp 3.052.754.690 menjadi Rp 3.907.194.519 pada realisasi penerimaan tahun 2015. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar dan SPT yang disampaikan Tahun 2008 – 2015.Dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Lubuk Linggau, tingkat kepatuhan setiap tahunnya dapat diukur menggunakan rumus

$$\frac{Jumlah\ SPT\ yang\ disampaikan\ tahun\ t}{jumlah\ wajib\ pajak\ orang\ pribadi\ yang\ terdaftar\ thun\ t}\ x\ 100\%$$

Tabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan SPT yang Disampaikan

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar	Jumlah SPT Yang Disampaikan	Tingkat Kepatuhan (%)
2008	6.217	2.286	36%
2009	8.185	7.451	90%
2010	7.695	13.174	171%
2011	7.925	14.242	179%

2012	5.384	17.037	316%
2013	5.003	18.172	363%
2014	4.904	20.985	427%
2015	5.692	24.409	385%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa banyaknya jumlah wajib pajak yang terdaftar di kota Lubuk Linggau mengalami perubahan setiap tahunnnya seperti pada tahun 2008 terdapat sebanyak 6.217 dan sebanyak 2.286 jumlah SPT yang disampaikan. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami penurunan yang cukup banyak dari jumlah awal di tahun 2011 sebanyak 7.925 menjadi 5.384.Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dalam penyampaian SPT tahunan mencapai 2.286 dan sebanyak 6.217 jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2008.Dari data tersebut dapat dilihat tingkat kepatuhan yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebesar 36%.Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dilihat dari data jumlah wajib pajak yang terdaftar cenderung lebih sedikit dari jumlah SPT yang disampaikan, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada wajib pajak itu sendir dapat memiliki lebih dari satu SPT Tahunan, seperti pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar hanya 5.692 sedangkan jumlah SPT yang disampaikan pada tahun 2015 tersebut mencapai 24.409

Tabel Jumlah Wajib Pajak Badan dan SPT yang disampaikan

Tahun	Jumlah wajib pajak Badan yang terdaftar	Jumlah SPT Tahunan yang Disampaikan	Kenaikan atau penurunan (%)
2008	416	190	45%
2009	416	189	45%
2010	434	378	87%
2011	324	411	126%
2012	437	286	65%
2013	484	338	69%
2014	520	289	55%
2015	566	401	71%

Pada data jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di kota Lubuk Linggau mengalami terkadang mengalami kenaikan dan penurunan sampai pada tanggal 4 desember 2015 menurut data yang didapatkan pada jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di KPP Pratama Lubuk, pada jumlah wajib pajak badan juga mengalami kenikan dari 416 jumlah wajib pajak badan di tahun 2014 menjadi 566 jumlah wajib pajak yang terdaftar sampai tanggal 4 desember 2015 ini. Sedangkan untuk jumlah SPT yang disampaikan pada tahun 2008 tercatat sebanyak 190 SPT yang disampaikan dan pada tahun 2015 tercata sebanyak 401 jumlah SPT yang disampaikan

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kpp Pratama Kota Lubuk Linggau, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah untuk pengurangan atau penghapusan sanksi memberikan pengaruh antara lain adalah:

1. Berdasarkan hasil analisis tingkat kepatuhan yang dilakukan menunjukan bahwa dengan adanya Kebijakan pemerintah mengenai PMK No.91/PMK 03/2015 meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar dan juga meningkatkan tingkat penerimaan pajak penghasilan di Kota Lubuk Linggau pada tahun 2015. Untuk tingkat penerimaan pajak penghasilan pasal 21 tercatat meningkat sebanyak 124% di tahun 2015 dari target Rp 18.568.021.542 dan juga tercatat

sebanyak 5.692 jumlah wajib pajak yang terdaftar di tahun 2015 melalui surat teguran yang disebarkan oleh KPP Pratama Lubu Linggau. PMK No.91/PMK 03/2015 juga meningkatkan penerimaan pajak di kota Lubuk Linggau

6. REFERENSI

[1] Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

[2] Maryati, Eka. 2014. *Pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikanterhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada wilayah KPP Bintan).*

[3] Jurnal Ilmiah Universitas Maitim Raja Ali Haji

[4] Muliati, Ni Ketut. *Pengaruh persepsi tetntang sanksi perpajakan dan kesadaranwajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi diKantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.*

[5] Jurnal Ilmiah Universitas Udayana.

[6] PMK No. 91/PMK 03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi pajak

[7] Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

[8] Supriadi, Doni. 2013. *PengaPengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dankesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarPBB (Pada kecamatan selupu rejang).*Jurnal Ilmiah Universitas NegeriPadang.

[9] Surliani. 2012. *Pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajakdan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Ilir barat.*Jurnal Ilmiah STIE MDP

[10] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke-16. Bandung*: Alfabeta Bandung.

[11] Susyanti.2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademia.*Malang. Empatdua

[12] Media

[13] Tiraada, Tryana. 2012. *Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadapkepatuhan WPOP di kabupaten Minahasa selatan.* Jurnal IlmiahUniversitas Sam Ratulangi Manado

[14] UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang pengertian pajak

[15] UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf a tentang rarif pajak penghasilanOrang pribadi

[16] UU No. 18 tahun 2000 tentang tarif Proporsional

[17] UU No. 13 tahun 1985 tentang tarif tetap

[18] www. Pajak.go.id

PENGARUH PENGELOLAAN MODAL KERJA, RASIO KEUANGAN DAN FIRM SIZE TERHADAP PROFITABILITAS

Muhammad Yahya[1], Fitriasuri [2], Muhammad Titan Terzaghi[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Darma
[1]Muhammad.9yahya3@gmail.com
[2]fitriasuri@binadarma.ac.id
[3]Mtitant4@gmail.com

Abstract

This research is aimed to privide an empirical proof abaout the impact of working capital turnover, asset structure, liquidity, financial of working capital and the firm size toword return on invesment. This research occured at 10 companies ofestate sector companies on indonesia stock exchange, which choosen by purposive sampling tecnique and the analysis method which use in this research is a double regression analysis. The resukt of research proves that : working capital turnover have a significant positive impact toward return on invesment, asset structure not significantly have positive impact toward return on invesment, liquidity have significant positive impact toward return on invesment, financial of working capital not significantly have positive impact toward return on invesment and firm size also not significatly have positive impact toward return on invesment.

Keywords: *working capital turnover, asset structure, liquidity, financial of working capital, firm size, return on invesment.*

1. PENDAHULUAN

Pada umumnya setiap perusahaan melakukan kegiatan proses produksi, demi menghasilkan suatu barang jadi yang kemudian dijual kepada konsumen sehingga dari hasil penjualan barang tersebut diharapkan perusahaan dapat memperoleh laba Harahap dalam Anindya (2013:1). Dalam menjalankan operasinya setiap perusahaan selalu diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama perusahaan menurut Brigham dan Houston dalam Yuliati (2013:1) adalah untuk memaksimalkan kekayaan bagi para pemegang sahamnya atau kepada pemilik perusahaan (*stakholde*r).

Salah satu sumber daya yang penting yang dimiliki perusahaan adalah sumber daya keuangan, yaitu modal. Pengertian modal disini memiliki arti yang luas meliputi aspek lain yang ada dalam perusahaan untuk mengukur nilai tambah perusahaan. Modal kerja merupakan masalah pokok dan topik penting yang sering kali dihadapi oleh perusahaan, banyak perusahaan yang gulung tikar karna masalah tersebut. Karena itu, adanya analisis modal kerja perusahaan sangat penting dilakukan guna mengetahui kondisi modal kerjasaat ini kemudian dihubungkan dengan situasi keuangan pada masa yang akan datang.

Modal kerja dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk membelanjai operasinya sehari-hari, misalnya : Untuk memberikan uang muka pembelian bahan mentah, membiayai upah pegawai dan lain-lain, dimana uang atau dana yang dikeluarkan tersebut diharapkan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam waktu singkat melalui hasil penjualan produksinya. Pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan, karena meliputi pengambilan keputusan mengenai jumlah dan komposisi aktiva lancar dan bagaimana membiayai aktiva ini.

Alasan utama mengapa modal kerja penting dibahas dalam usaha meningkatkan profitabilitas perusahaan yaitu pertama, modal kerja merupakan bagian dari pembelanjaan jangka pendek perusahaan, yang sejalan dengan tujuan jangka pendek perusahaan adalah meningkatkan profitabilitas.

Kedua, berdasarkan fungsi kerja, modal kerja bersifat fleksibel, relatif bervariasi, dan berputar cepat Syamsuddin dalam Yuliati (2013:3). Bersifat fleksibel karena modal kerja mudah untuk ditambahkan atau dikurangkan jumlahnya. Bersifat variatif karena modal kerja berasal dari sumber yang beragam. Bersifat berputar cepat karena perputaran modal kerja umumnya kurang dari satu tahun. Ketiga, modal kerja merupakan bidang aktivitas yang berkesinambungan sekaligus menjadi pendukung utama operasional perusahaan.

Profitabilitas perusahaan selalu menjadi perhatian utama bagi para pemilik perusahaan, manajemen perusahaan. Investor atau calon kreditor. Profitabilitas menurut Hanafi dalam Rosyada (2011) adalah kemampuan dalam memperoleh laba yang diukur rmenggunakan presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan *Return on Investment* (ROI).

Pada penelitian ini perusahaan sektor perkebunan yang dipilih sebagai objek penelitian karena berdasarkan data bursa efek indonesia BEI pada perusahaan sektor perkebunanan mengalami penurunan paling tajam sepanjang tahun 2013 sekitar 12,62% ke level 1.802,68 (Wirasatria,2013). Dan untuk saham sektor perkebunan mengalami penurunan indeks saham, penurunan sektor sahan pun berimbas terhadap harga saham perkebunan (Liputan6, 2014). Berdasarkan hal tersebut, penulis akan mengangkat suatu masalah penelitian yang berjudul yaitu "**Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja , Rasio Keuangan dan Firm Size Terhadap Profitabilitas (Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2012 – 2014)"**

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Modal kerja

Mengenai Definisi modal kerja ini dapat dikemukakan adanya beberapa kosep: Menurut Bambang Riyanto (2010 :57**)** mempunyai tiga konsep yang umum digunakan yaitu:

Konsep Kuantitatif

Konsep ini mendasarkan kepada kwantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar dimana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula diman adana yang tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam waktu pendek.

Konsep Kualitatif

Konsep yang jika konsep kuntitatif yang dikaikatkan aktiva lancar saja maka konsep kualitatif adalah modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segerah dibayar.

Konsep Fungsional

Konsep ini mendasarkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan (*income*).

2.2 Perputaran Modal kerja

Perputaran modal kerja (*Working Capital Turnover*) adalah kemampuan modal kerja berputar selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan usaha (Bambang Riyanto, 2010:6).

2.3 Struktur Aktiva

Struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolute maupun dalam artian relatif antar aktiva lancar dan tetap Riyanto dalam Yuliati (2013).

2.4 Likuiditas

Likuiditas menurut Bambang Riyanto (2010;26) adalah kemampuan suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar sedemikian besarnya sehingga mampu memenuhi segala kewajiban yang segera harus di penuhi. Likuiditas diukur dengan Quik ratio QR atau sering juga disebut dengan *acid test ratio*.

2.5 Pendanaan Modal Kerja

Pendanaa modal kerja menurut Riyanto dalam Yuliati (2013) adalah pendanaan hutang yang dipergunakan oleh perusahaan dengan jalan menunjukkan besarnya hutang jangka pendek terhdap keseluruhan pinjaman uang dimiliki perusahaan.

2.6 Firm Size

Perusahan yang besar dapat mengakses pasar modal. Karna itu, mengapa perusahaan besar dapat dengan mudah mendapatkan kemampuan untuk mendapatkan dana. Devi dan Erawati (2014) mengapa total aset lebih di pilih karna, total aset perusahaan di nilai lebih stabil dalam menunjukkan ukuran besar kecilnya perusahaan. Pertumbuhan penualan dapat di hitung dengan *in (total aktiva) bisa juga dengan* menggunakan mesin kalkulator (wikipedia 2012).

2.7 Profitabilitas

Profitabilitas menurut Hanafi dalam Rosyadak (2011) adalah kemampuan dalam memperoleh laba yang diukur menggunakan presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan.

2.8 Hipotesis

H_1 : Perputaran Modal Kerja Berpengaruh Positif Terhadap Profitabilitas.
H_2 : Struktur Aktiva Berpengaruh Positif Terhadap Profitabilitas.
H_3 : Likuiditas Berpengaruh Negatif Terhadap Profitabilitas.
H_4 : Pendanaan Modal Kerja Berpengaruh Negatif Terhadap Profitabilitas.
H_5 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Profitabilitas.
H_6: Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar (Di Bursa Efek Indonesia BEI Tahun 2012 – 2014)

3.2 Variable Penelitian

Variable Dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas dalam penelitian ini di proksikan untuk mengukur profitabilitas dengan Return On Invesment (ROI). *Return On Investment* (ROI) menurut Kasmir, (2010:201) merupakan rasio yang menunjukan hasil atau retrun atas jumlah aktiva yang di gunakan dalam perusahaan.

Variable Independen dalam penelitian ini adalah Perputaran Modal Kerja, Struktur Aktiva, Likuiditas, Pendanaan Modal Kerja, dan Ukuran Perusahaan.

3.3 Penetuan sampel

Penarikan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan penelitian.

3.4 Metode Analisis

Untuk menguji hipotesis, peneliti ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

$Y= a+ \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 +, \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$

Y = Profitabilitas
X_1 = Perputaran modal kerja (variabel terikat / variabel yang memperngaruhi)
X_2 = Struktur Aktiva (variabel terikat / variabel yang memperngaruhi)
X_3 = Liabilitas (variabel terikat / variabel yang memperngaruhi)
X_4 = Pendanaan Modal Kerja (variabel terikat / variabel Yang memperngaruhi)
X_5 = Ukuran Perusahaan (variabel terikat / variabel yang memperngaruhi)

a = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X=0
β = Koefiensi regresi
ε = *error term* atau Faktor Pengganggu

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Regresi Linier Berganda

Adapun hasil regresi linier berganda tersebut disajikan pada Tabel 4.3 berikut ini.

Table 4.1
Hasil Regresi Linier Berganda Variable Perputaran Modal Kerja, Struktur Aktiva, Likuiditas, Pendanaan Modal Kerja, Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Perkebunan di BEI dari tahun 2012-2014

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.066	.042		-1.567	.130
	X_1	.025	.004	.766	6.517	.000
	X_2	.062	.059	.174	1.045	.307
	X_3	.044	.010	.643	4.177	.000
	X_4	.000	.007	.006	.058	.954
	X_5	.001	.002	.077	.566	.576

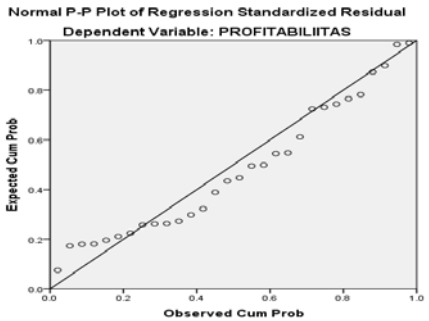
Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dibuat persamaan regresi linier berganda seperti berikut:
$Y = - 0{,}066 + 0{,}766\ X_1 + 0{,}174\ X_2 + 0{,}643\ X_3 + 0{,}006\ X_4 + 0{,}077\ X_5$.

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil dari pengujian Analis Grafik *propibility plot* menunjukkan bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, hal ini mengindikasikan bahwa data menunjukan pola distribusi normal.

G arfik 4.1
Grafik Normalitas Data
Normal P-P Plot Of Regression Standarrdizet Residual



Sumber : Spss 22

Dari hasil pengujian terlihat pada Tabel 4.4 tersebut terlihat besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah 0,127 dan signifikan pada 0,200.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa signifikans 0,200 > 0,05 artinya data residual berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian One Sample Kolmogorov Smirnov Tes

		Unstandardized Residual
N		30
[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,02878187
Most Extreme Differences	Absolute	,127
	Positive	,127
	Negative	-,117
Test Statistic		,127
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

Sumber : Spss 22

4.3 Uji Multikolineritas

Tabel 4.3
Pengujian Multikolinieritas

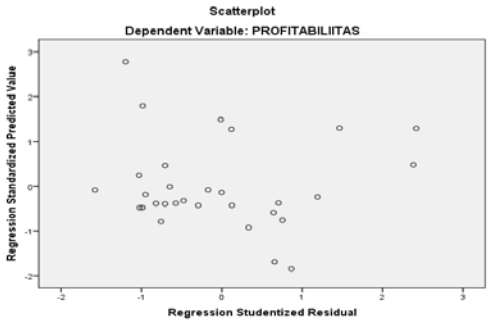
Model	Collinearity Statistics	
Constant	Tolerance	VIF
X_1	0,769	1.300
X_2	0,385	2,595
X_3	0,448	2,231
X_4	0,925	1,081
X_5	0,581	1,721

Sumber: Spss 22

Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan tidak ada varibel independen yang nilainya kurang dari 0,1 (tolerance<0,1), yangberarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%, hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas.

4.4 Uji Heterokedastisitas

Grafik 4.2
Grafik Scatterplot Uji Heterokedastisitas



Sumber : Spss 22

Dari grafik 4.2 *standardized residual* terlihat bahwa data berpencar disekitar 0 nol pada sumbuh Y dan tidak menunjukan pola tertentu. Disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

4.6 Uji Autokolerasi

Tabel 4.6 Nilai Durbin - Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	. 863[a]	.745	.692	.0316382461428	.745	14.010	5	24	.000	1.673

Sumber : outpu spss 22

Pada output SPSS pada table 4.6 didapat angka DW sebesar 1,673 angka tersebut berada diantara 1,54 dengan 2,46 yang berarti tidak terjadi autokolerasi.

4.7 Uji Hipotesis

1. Koefesian determinasi (R^2)

Tabel 4.7 Adjusted R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863[a]	,745	,692	,0316382461428

Sumber : outpu spss 22

Pada tampilan tabel 4.8 model summary besarnya koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai adjusted R^2 yaitu 0,692, hal ini berarti 69,2% variabel profitabilitas yang diproksikan *C-score* dapat dijelaskan oleh variabel Perputaran Modal Kerja, Struktur Aktiva, Likuiditas, Pendanaan Modal Kerja dan Ukuran Perusahaan sedangkan sisanya 30,8% merupakan pengaruh dari sebab-sebab atau faktor lain di luar model penelitian.

2. Uji F (Simultan)

Tabel 4.9 Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.070	5	.014	14.010	.000[b]
	Residual	.024	24	.001		
	Total	.094	29			

Sumber :output spss 22

Berdasarkan hasil uji anova atau F test, di dapat F hitung sebesar 14.010 dengan tingkat profitabilitas 0,000 yaitu hasil uji f (regresi simultan) juga menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dar tingkat signifikan 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa perputaran modal kerja, struktur aktiva, likuiditas, pendanaan modal kerja dan ukuran perusahaan yang berpengaruh secara bersamaan terhadap profitabilitas.

3. Uji Parsial (Uji-T)

Tabel 4.8 Uji T (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.066	.042		-1.567	.130
	X_1	.025	.004	.766	6.517	.000
	X_2	.062	.059	.174	1.045	.307
	X_3	.044	.010	.643	4.177	.000
	X_4	.000	.007	.006	.058	.954
	X_5	.001	.002	.077	.566	.576

Sumber : outpu spss 22

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perputaran modal kerja (*working capital turnover ratio)* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. dengan nilai signifikans 0,000 dimana nilai tersebut kecil dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Hasil ini sesuai dengan pernyataan pada Penelitian Satriya dan lestari (2011) manyatakan bahwa perputaran modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. Hasil pengujian ini memberikan arti bahwa semakin cepat *working capital turnover rattio* berputar semakin banyak penjualan yang di dapat dan semakin banyak pula keuntungan yang di dapatkan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur aktiva memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. dengan nilai signifikansi 0,307 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Hasil ini sesuai dengan pernyataan pada penelitian Hanun, E. L (2008) menemukan *current assets to total assets ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.Hasil pengujian ini memberikan arti bahwa semakin besar struktur aktiva maka semakin tidak efisien penggunaan total aktiva perusahaan untuk mendukung aktiva lancar dalam mencapai laba

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa likuiditas *(quick ratio)* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Hasil ini didukung sesuai dengan pernyataan pada penelitian Hanun (2008) Putri H, dkk (2014) menemukan bahwa adanya hubungan yang positif signifikan antara likuiditas dan profitabilitas. Hasil pengujian ini memberikan arti bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas maka beban bunga perusahaaan semakin rendah sehingga mengakibatkan profitabilitas semakin tinggi

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendanaan modal kerja memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai signifikansi 0,954 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Hasil ini didukung sesuai dengan pernyataan pada penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Khan dkk (2006) dalam Yuliati (2013) menemukan pendanaan modal kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa pendanaan modal kerja berpengaruh positif tidak signifikan dikarenakan kondisi pinjaman pada struktur hutang tidak bisa mendukung tercapainya profitabilitas

Hasil pengujian hipotesis Kelima menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahan tidak memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap integritas profitabilitas. dengan nilai signifikansi 0,576 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Berbeda dengan Ambarwati. dkk (2015), Sari dan Budiasi (2015) bahwa pendanaan modal kerja berpengaruh secara positif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil pengujian ini memberikan arti bahwa perusahaan dengan skala ukuran yang besar belum tentu memiliki jumlah aktivanya dan pendaptan yang besar juga, hal ini biasa disebabkan karena biaya- biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih besar dibandingkan tingkat pendapatannya sehingga perusahaan akan menderita kerugian.

Hasil pengujian hipotesis Keenam menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Struktur Aktiva, Likuiditas, Pendanaan Modal Kerja Dan *Firm Size* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas. dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%).

5. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Pengaruh Pengelolaaan Modal Kerja, Rasio Keuangan Dan Firm Size Pada Perusahaan Sektor Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, , maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Hasil pengujian hipotesis pertama Perputaran Modal Kerja Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Profitabilitas.
2. Hasil pengujian hipotesis Struktur Aktiva Berpengaruh Positif tidak signifikan terhadap profitabilitas.
3. Variabel Likuiditas Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Profitabilitas.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat Pendanaan Modal Kerja Tidak Berpengaruh Positif Tidak Signifikan.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Tidak Signifikan Terhadap Profitabilitas
6. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Struktur Aktiva, Likuiditas, Pendanaan Modal Kerja Dan Firm Size memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas.

SARAN

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian tidak hanya dari sektor perkebunan saja, tetapi juga mencakup sektor-sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar dapat mencerminkan hasil temuan. Menambahkan beberapa variabel lain sebagai faktor yang dapat mempengaruhi profitabiltas, seperti *leverage,* Struktur Kepemilikan.

6. REFRENSI

[1] Anindya, Pramudita Rahajeng. 2013. *Pengaruh Pengelolaan Modal Kerja Dan Struktur Modal*

a. *Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI*. Universitas Diponegoro:Semarang

[2] Ambarwati, Novi Sagita. Yuniarta, Gede Adi dan Ni Kadek Sinarwati 2015. *Pengaruh Modal Kerja*

a. dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Universitas Pendidikan Ganesha : Singaraja

[3] Hanun, E. L. 2008. *Pengaruh Kebijakan Modal Kerja Terhadap Return On Investment Pada Industry*

[4] Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Tesis, Program Pascasarjanan USU

[5] Kasmir.2010. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

[6] Riyanto, Bambang. 2010. Dasar Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.

[7] Rosyadah dan Suhadak. Darminto. 2011. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas*

[8] (Studi Pada Perusahaan Real Estate and Property Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).Jurnal Akuntansi

[9] Putri H, Novita Sari. Evira Safitri dan Trisnadi Wijaya. 2014.*Pengaruh Leverage,Ukuran Perusahaan,*

[10] Perputaran Modal Kerja Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas. STIE MDP : Palembang

[11] Satriya. dan Lestari, putu vivi 2011. *Pengaruh Perputaran Modal Kerja Erhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Property Terdaftar Di BEI. Jurnal Akuntansi*

[12] Yuliati, Ni Wayan 2013. *Pengaruh Kebijakan Modal Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Hotel Dan Restoran Di Bursa Efek Indonesia BEI*. Universitas Udayana: Denpasar.
[13] www.idx.co.id
[14] www.m.liputan6.com
[15] www.bumn.go.id

ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN ADD DUA DESA KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR

Muhammad Yoggy[1], Verawaty[2], Citra Indah Merina[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
muhammad_yoggy@yahoo.co.id[1]
verawaty_mahyudin@yahoo.com[2]
citra_ims@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study was to determine how the mechanism of management of the Village Fund Allocation (ADD) Tanjung Pinang Tanjung Pinang I and II in the District of Ogan Ilir Batu headland. The data collection technique used is the technique of primary and secondary data collection. Data analysis technique used is qualitative descriptive analysis technique. Based on the research results of the analysis to the village officials Tanjung Pinang I to the mechanism of the fund management of the village in the village of Tanjung Pinang I was managed by the village head and village, the statement is not in accordance with the regulations Permendagri 113 of 2014 on the management of village funds which are described for the management of ADD / Dana village needed their implementing agencies consisting of the steering committee, the implementation team, and the team companion also participate in the management of village fund is not managed by the village head and village secretary alone.

Keywords : *Mechanism, the Village Fund Allocation (ADD)*

1. PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan pada pemerintah desa yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selain mengatur beberapa hal tentang desa, juga memberikan angin segar tentang pembangunan desa. Salah satunya adalah tentang program pemerintah berupa Dana Desa yang nilainya cukup besar dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Tetapi pengelolaan Dana Desa tetap harus dilakukan secara tepat, baik tepat sasaran, tepat manajemen maupun tepat dalam pencatatan pelaporan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah, Menurut Undang-Undang tersebut, terdapat aturan bahwa setiap desa akan mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa Rp1 miliar per desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah Undang-Undang yang baru ditandatangani 15 Januari 2014 yaitu menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis anggaran yang telah didapat serta menganalisis anggaran yang sudah maupun yang belum terealisasi. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) biasanya terdapat hambatan atas laporan keuangan desa yang kurang transparan informasi dan pengelolaannya dari perangkat desa baik dari sekretaris desa maupun ketua pelaksana pengalokasian dana desa kepada masyarakat desa, sehingga menimbulkan opini masyarakat pada kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut seperti adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan

maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengeloaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tanjung Pinang I dan Tanjung Pinang II di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

perumusan masalah merupakan pedoman dari suatu kegiatan penelitian. Dari uraian sebelumnya, kemudian penulis mencoba merumuskan masalah yang perlu untuk dikaji dan dibahas. Adapun masalah yang kami rumuskan adalah: Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tanjung Pinang I dan Tanjung Pinang II di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.

2. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

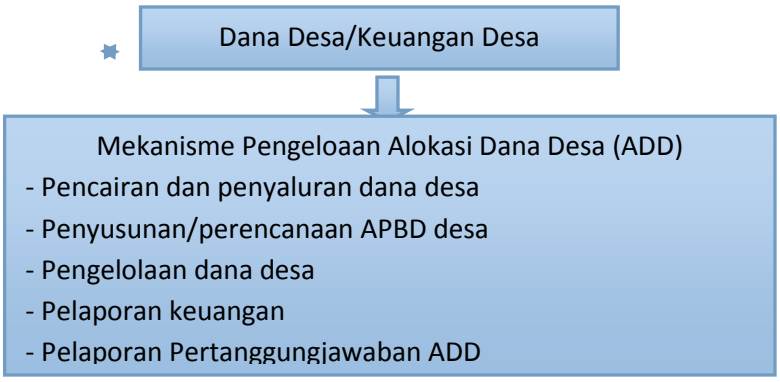
Menurut Pemendagri No 133 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut kamus besar bahasa indonesia desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempuyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelas pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari anggaran belanja pusat non kementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa.

Berikut beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang saya ambil dalam penelitian ini :

Casmidi (2010) dengan judul ketimpangan fiscal horizontal dan permula dana alokasi desa (DAD) hasil penelitian terjadinya ketimpangan fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan pembobotan antara model celah fiskal dengan dana alokasi desa (DAD), Susilo, Aden Andri (2011) dengan judul Formula alokasi dana desa (ADD) di kabupaten kebumen 2011, hasil penelitian ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah terdapat selisih kurang sebesar 3,4% dari jumlah dana yang seharusnya ditransfer ke desa, Susilo,Budi (2010) dengan judul ketimpangan fiskal antar desa dan formulasi alokasi dana desa (ADD) di kabupaten magelang tahun 2010, hasil terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa, Hartono (2012) dengan judul pembangunan partisipatif masyarakat desa implementasinya dalam program alokasi dana desa, hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa belum optimal.

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



3. OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah desa Tanjung Pinang I dan desa Tanjung Pinang II yang beralamat di Kecamatan Tanjung Batu (Jl. Merdeka No.14 Lingkungan V Tanjung Batu Timur) Kabupaten Ogan Ilir.

Menurut Sanusi (2010), Operasional variabel adalah suatu yang diberikan variabel dengan cara memberikan arti atau mengimplementasikan, menspesifikan bagaimana kegiatan variabel tersebut diukur.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder. Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tanjung Pinang I :Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang sumber anggaran dan pendapatan desa dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana dari APBN langsung. Dari pernyataan di atas berdasarkan hasil wawancara terhadap aparatur desa Tanjung Pinang I didapatkanlah mekanisme pencairan dan penyaluran dana desa di mana anggaran ini langsung dikucurkan dari pusat atau APBN melalui kabupaten dan seterusnya di transfer ke rekening desa dan pencairan dananya secara menyeluruh dalam tiga (3) tahap, tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%, pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang sumber anggaran dan pendapatan desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang mekanisme perencanaan di mana sekretaris desa menyusun pencangan peraturan desa tentang APBD desa dan di sampaikan kepada kepala desa serta kepala desa menyampaikan peraturan tersebut kepada badan permusyawaratan desa, pernyataan tersebut juga didapatkan dari hasil wawancara kepada aparatur desa Tanjung Pinang I tetapi tidak begitu detail dalam artian sangat singkat dimana yang merencanakan dari tahap persiapan yaitu sekretaris desa atau badan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara kepada aparatur desa Tanjung Pinang I pengeloaan dana desa di desa Tanjung Pinang I ini dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya dengan musyawarah terlebih dahulu, pernyataan tersebut belum sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dimana dijelaskan untuk pengelolaan ADD/ Dana Desa diperlukan adanya lembaga pelaksana terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan tim pendamping juga ikut dalam pengelolaan dana desa tidak hanya dikelola oleh kepala desa dan sekretaris desa saja. Berdasarkan pernyataan peraturan permendagri di atas dari hasil wawancara kepada aparatur desa Tanjung Pinang I tentang pelaporan keuangan desa didapatkan penjelasan bahwa laporan keuangan yang terealisasi dari program desa nantinya akan dilaporkan kepada camat seterusnya dilaporkan kepada pemerintah kabupaten dan pusat, pernyataan ini sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pelaporan keuangan desa pada poin yang pertama dimana dijelaskan Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota. Berdasarkan pernyataan dari peraturan Permendagri di atas dari hasil wawancara kepada aparatur desa Tanjung Pinang I tentang pelaporan peratnggung jawaban dana desa dimana yang bertanggung jawab dalam pengalokasian dana desa yaitu kepala desa, dan tim pelaksana di awasi oleh kecamatan dan BPD seterusnya laporan di laporkan kepada camat dan seterusnya dilaporkan kekecamatan ke kabupaten, dari hasil pernyataan wawancara tersebut kegiatan pelaporan pertanggung jawaban dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa telah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pertanggungjawaban dana desa.

Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tanjung Pinang II : Berdasarkan hasil penelitian terhadap aparatur desa Tanjung Pinang II didapatkanlah mekanisme pencairan dan

penyaluran dana desa di mana anggaran ini langsung dicairkan atau didapatkan dari pusat atau APBN guna pemerataan bangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana ini digunakan 70% untuk permberdayaan masyarakat dibidang pendidikan atau keagamaan dan sebagainya dan 30% untuk biaya operasional perangkat desa , pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang sumber anggaran dan pendapatan desa dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana dari APBN langsung. Serta laporan pertanggungjawabannya itu berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang mekanisme perencanaan di mana sekretaris desa menyusun pencangan peraturan desa tentang APBDesa dan di sampaikan kepada kepala desa serta kepala desa menyampaikan peraturan tersebut kepada badan permusyawaratan desa, pernyataan tersebut juga didapatkan dari hasil wawancara kepada aparatur desa Tanjung Pinang II, dimana yang merencanakan dari tahap persiapan yaitu sekretaris desa,bendahara desa,dan tim pelaksana.

Menurut peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dimana dijelaskan untuk pengelolaan ADD/ Dana Desa diperlukan adanya lembaga pelaksana terdiri dari tim pegarah, tim pelaksana, dan tim pendamping juga ikut dalam pengelolaan dana desa tidak hanya dikelola oleh kepala desa dan sekretaris desa saja. Berdasarkan hasil wawancara kepada aparatur desa Tanjung Pinang II pengeloaan dana desa di desa Tanjung Pinang II ini dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya seperti bendahara desa, dan tim pelaksana, serta BPD sebagai pengawas. dari pernyataan tersebut sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa.

Berdasarkan pernyataan peraturan permendagri di atas dari hasil wawancara kepada aparatur desa Tanjung Pinang II tentang pelaporan keuangan desa didapatkan penjelasan bahwa laporan keuangan yang terealisasi akan dilaporkan kepada camat seterusnya dilaporkan kepada pemerintah kabupaten untuk di evaluasi dahulu oleh bupati dan seterusnya dilaporkan ke pusat, pernyataan ini sama dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pelaporan keuangan desa dimana dijelaskan Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota.Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban terdiri dari: Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD esa kepada bupati/walikota melaui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan pernyataan dari peraturan Permendagri di atas dari hasil wawancara kepada aparatur desa Tanjung Pinang II tentang pelaporan peratnggung jawaban dana desa dimana yang bertanggung jawab dalam pengalokasian dana desa yaitu kepala desa, dan tim pelaksana di awasi oleh kecamatan dan BPD seterusnya laporan di laporkan kepada camat dan seterusnya dilaporkan kekecamatan ke kabupaten, dari hasil pernyataan wawancara tersebut kegiatan pelaporan pertanggung jawaban dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pertanggungjawaban dana desa.

Tabel 4.1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Aanggaran 2015

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
		PENDAPATAN	
1	17/09/2015	Pendapatan Desa Tanjung Pinang I	Rp. 271.755.000
2	17/09/2015	Pendapatan Desa Tanjung Pinang II	Rp. 261.361.000

Sumber: Desa Tanjung Pinang I Tanjung Pinang II (2015)

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai pendapatan APBD desa atau modal awal desa pada bulan september Desa Tanjung Pinang I mendapatkan anggaran sebesar Rp. 271.755.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Desa Tanjung Pinang II mendapatkan anggaran sebesar Rp. 261. 361.000 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Adapun tingkat kesesuaian antara laporan terealisasi dan peraturan pemerintah di desa Tanjung Pinang I dan Tanjung Pinang II sebagai berikut:

Tabel 4.2
Laporan Terealisasi dan Peraturan Pemerintah
Desa Tanjung Pinang I (2015)

No	Keterangan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Laporan Keuangan Desa	Ada	Tidak Ada
1	Pendapatan dan Perencanaan Anggaran	ada	-
2	Buku Kas Pembantu	ada	-
3	Buku Pajak	ada	-
4	Buku Bank	-	Tidak ada
5	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran.	ada	-

Tabel 4.3
Laporan Terealisasi dan Peraturan Pemerintah
Desa Tanjung Pinang II (2015)

No	Keterangan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Laporan Keuangan Desa	Ada	Tidak Ada
1	Pendapatan dan Perencanaan Anggaran	ada	-
2	Buku Kas Pembantu	-	Tidak ada
3	Buku Pajak	ada	-
4	Buku Bank	-	Tidak ada
5	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran.	ada	-

Berdasarkan data-data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berupa data anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun periode 2015 pada desa Tanjung Pinang I dan Tanjung Pinang II di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Untuk menentukan tingkat kesesuaian antara laporan terealisasi dan peraturan pemerintah di desa Tanjung Pinang I masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangannya seperti tidak adanya penyajian laporan keuangannya yaitu dalam bentuk Buku Bank, Adapun untuk desa Tanjung Pinang II juga terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangannya yaitu dalam bentuk Buku Kas Pembantu dan Buku Bank.

Dimana menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Laporan keuangan desa terdapat lima penyajian bentuk laporan keuangan yaitu laporan Pendapatan dan Perencanaan Anggaran, Buku Kas Pembantu, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran. Terdapatnya kekurangan dalam penyajian laporan keuangan desa pada desa Tanjung Pinang I dan Tanjung Pinang II ini dikarenakan semua aparatur desa yang bertanggung jawab atas keuangan desa pada periode sekarang (2015) masih menggunakan cara penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh aparat desanya yang terdahulu tanpa mengikuti tata cara penyajian laporan keuangan menurut peraturan pemerintah yang terbaru yaitu dijelaskan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang laporan keuangan desa, serta kurangnya pengetahuan aparat desa tentang adanya peraturan pemerintah yang mengatur prosedur panyajian laporan keuangan desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Tanjung Pinang I Tahun 2015, Berdasarkan penelitian kepada aparatur desa Tanjung Pinang I pengeloaan dana desa di desa Tanjung Pinang I ini dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya dengan musyawarah terlebih dahulu, pernyataan tersebut belum sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dimana dijelaskan untuk pengelolaan ADD/ Dana Desa diperlukan adanya lembaga pelaksana terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan tim pendamping juga ikut dalam pengelolaan dana desa tidak hanya dikelola oleh kepala desa dan sekretaris desa saja.
2. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa Tanjung Pinang II Tahun 2015 berdasarkan hasil penelitian, prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang sumber anggaran dan pendapatan desa dan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa tetapi terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangannya.
3. Pada desa Tanjung Pinang I dan Tanjung Pinang II di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015, Untuk menentukan tingkat kesesuaian antara laporan terealisasi dan peraturan pemerintah di desa Tanjung Pinang I masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangannya seperti tidak adanya penyajian laporan keuangannya yaitu dalam bentuk Buku Bank, Adapun untuk desa Tanjung Pinang II juga terdapat kekurangan dalam penyajian laporan keuangannya yaitu dalam bentuk Buku Kas Pembantu dan Buku Bank. Kekurangan dalam proses penyajian laporan kuangan desa pada desa Tanjung Pinang I dan Tanjung Pinang II ini dikarenakan semua aparatur desa yang bertanggung jawab atas keuangan desa pada periode sekarang (2015) masih menggunakan cara penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh aparat desanya yang terdahulu.

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Berdasarkan hasil penelitian kepada aparatur desa Tanjung Pinang I untuk mekanisme pengeloaan dana desa di desa Tanjung Pinang I ini dikelola oleh kepala desa dan perangkat desa, pernyataan tersebut belum sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dimana dijelaskan untuk pengelolaan ADD/ Dana Desa diperlukan adanya lembaga pelaksana terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan tim pendamping juga ikut dalam pengelolaan dana desa tidak hanya dikelola oleh kepala desa dan sekretaris desa saja. Sebaiknya aparatur desa lebih paham lagi dan lebih baik lagi dalam menjalankan dan mengelola baik keuangan desa maupun informasi tata cara pengelolaan keuangan desa serta lebih mengakses lagi peraturan pemerintah yang telah dibuat untuk mengelola keuangan desa.

2. Seharusnya aparatur desa lebih mengutamakan penyajian laporan keuangan menurut peraturan pemerintah dimana menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Laporan keuangan desa terdapat lima penyajian bentuk laporan keuangan yaitu laporan Pendapatan dan Perencanaan Anggaran, Buku Kas Pembantu, Buku Pajak, Buku Bank, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran.
3. Terdapatnya kekurangan dalam penyajian laporan keuangan desa pada desa Tanjung Pinang I dan Tanjung Pinang II ini dikarenakan aparatur desa yang bertanggung jawab atas keuangan desa pada periode sekarang (2015) masih menggunakan cara penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh aparat desanya yang terdahulu tanpa mengikuti tata cara penyajian laporan keuangan menurut peraturan pemerintah yang terbaru yaitu dijelaskan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang laporan keuangan desa, serta kurangnya pengetahuan aparat desa tentang adanya peraturan pemerintah yang mengatur prosedur panyajian laporan keuangan desa. Sebaiknya aparatur desa serta masyarakat desa dapat lebih mengakses dan mencari informasi tentang tata cara penyajian laporan keuangan desa menurut peraturan pemerintah sehingga tidak mengacu kepada opini publik atas kecurangan dengan kurangnya laporan keuangan dalam penyajian.

6. REFERENSI

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. *Tentang Desa Sebagai Dasar Hukum Yang Mengatur*.

[2] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 .*Tentang Desa.*

[3] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*

[4] Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

TERNYATA MANAJEMEN LABA PERBANKAN SYARIAH LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN PERBANKAN KONVENSIONAL

Nadya Ayu Satriani[1], Henni Indriyani[2], Jaka Darmawan[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
nadya.satriani@gmail.com[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
jakadarmawan@yahoo.co.id[3]

Abstract

Earnings management is a hot topic in the accounting world. Earnings management is the creative use of different accounting techniques to make financial statements look better. That doesn't excatly sound like a legal thing to do, does it? But believe it or not, it actually is. Now this study aimed to examine, is islamic banks do earnings management too?As we know that islamic banks follows the Quran and Hadits which manipulation is prohibited. This study also aimed to compare the level of earnings management between islamic banks and conventional banks by using Discretionary Accrual Specific Beaver and Engel (1996). The study population is all banks in Indonesia, while the study sample is divided into two. The first group is all islamic banks and the second group is all conventional banks listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). This study use Mann Whitney Test to compare earnings management of two samples. The result shows that earnings management of islamic banks is lower than earnings management of conventional banks.

Keywords: *earnings management, discretionary accrual, financial reporting, islamic banks, convenstional banks*

1. PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia dewasa ini semakin berkembang, baik itu perbankan konvensonal maupun perbankan syariah. Perbankan konvensional dan perbankan syariah pada dasarnya relatif sama. Keduanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, hanya saja yang membedakan adalah perbankan syariah menjalankan sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits.

Prinsip syariah berlandaskan Al-Quran dan Hadits sangat mudah diterima, mengingat mayoritas masyarakat kita adalah muslim. Perbankan syariah dianggap lebih sehat karena tidak menerapkan sistem bunga layaknya perbankan konvensional, melainkan sistem bagi hasil.Data terakhir menyebutkan pertumbuhan perbankan syariah memang melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih di atas pertumbuhan perbankan konvensional.Perbankan syariah juga sejauh ini mampu menjalankan fungsi intermediasi lebih baik dibandingkan perbankan konvensional.Hal ini kemudian menimbulkan persaingan yang ketat di antara keduanya.

Dalam bersaing tentu pokok utama yang perlu diperhatikan adalah kinerja.Kinerja yang baik umumnya dilihat dari besaran laba yang dihasilkan, karena laba dianggap mencerminkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Selain itu, dijelaskan pula bahwa laba dapat membantu prediksi laba sekaligus resiko di tahun mendatang.Informasi mengenai laba dapat ditemukan dalam laporan keuangan.Laporan keuangan dalam penyusunannya menggunakan dasar akrual. Dasar akrual dinilai lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan secara riil, namun di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan manajemen memodifikasi laporan keuangan dengan cara memilih metode akuntansi yang sesuai untuk menghasilkan jumlah laba yang diinginkan atau sering disebut dengan manajemen laba.

Namun sayangnya, manajemen laba telah terbukti merusak karena laporan keuangan disajikan sedemikian rupa sesuai dengan keinginan manajemen, sehingga menghasilkan laporan

keuangan yang bias.Akibatnya pengguna laporan keuangan salah mengambil keputusan. Skandal manajemen laba atau lebih umum disebut manipulasi laporan keuangan telah banyak terjadi di Indonesia, seperti pada PT Lippo, PT Kimia Farma, PT Ades Alfindo, PT Indofarma bahkan PT KAI yang notabene adalah BUMN. Tidak menutup kemungkinan manajemen laba pun terjadi pada perbankan. Selain karena persaingan perbankan syariah dan perbankan konvensional, ketatnya regulasi perbankan dibandingkan industri lain juga menjadi alasan kemungkinan adanya manajemen laba pada perbankan.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa perbankan memilliki indikasi melakukan manajemen laba. Namun tidak hanya perbankan konvensional saja, ternyata perbankan syariah pun melakukan hal yang sama. Manajemen laba pada kedua perbankan ini menarik untuk diketahui lebih lanjut.Mengingat perbankan syariah berbasis kerja dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits yang tidak membenarkan adanya manipulasi. Penulis tertarik mengembangkan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini menggunakan sekaligus perbankan syariah dan konvensional yang kemudian akan dibandingkan.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Manajemen Laba

Menurut Schipper (1989) manajemen laba adalah *disclosure management* dalam arti intervensi yang disengaja pada proses pelaporan keuangan kepada pihak eksternal yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Healy & Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama, intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan *judgement*, misalnya *judgement* yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan penggunaanya mengenai kinerja ekonomi perusahaan.Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap infomasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar.Manajemen laba menurut Mulford dan Comiskey (2010) adalah *financial numbers game* (permainan angka-angka keuangan) yang dilakukan melalui *creative accounting practises* akibat adanya *flexibility principles* yang dikeluarkan oleh GAAP (*General Accepted Accounting Principles*).Menurut Scott (2003) manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi keuangan yang ada dan secara alamiah dapat memaksimalkan utilitas mereka dan atau nilai pasar perusahaannya.

Scott (2003) juga membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya dari sisi negatif sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan keuntungannya sendiri baik dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, biaya politik maupun untuk meningkatkan bonus yang akan diteirmanya. Apabila demikian, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor.Kedua, dengan memandang manajemen laba dari sisi positif sebagai perilaku manajer yang efisien dalam menghadapi kontrak.Manajemen memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam konttrak.Hal tersebut bertujuan untuk kepentingan pelaporan keuangan eksternal dalam penyampaian informasi internal perusahaan kepada investor dan perjanjian hutang yang lebih efisien serta meningkatkan penilaian bagi perusahaan.Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba dan pertumbuhan laba sepanjang tahun.

2.2 Akrual, Discretionary Accrual dan Non Discretionary Accrual

Akrual adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Akrual seringkali dimanfaatkan dengan cara menggeser pendapatan masa depan menjadi pendapatan sekarang dan biaya

sekarang menjadi biaya masa depan atau sebaliknya sehingga laba periode dilaporakan akan lebih tinggi atau rendah dari seharusnya (Wulandari, 2010).

Jones (1991), Scott (2003) dan Wolk & Tearney (2000) memisahkan akrual menjadi dua yaitu *Discretionary Accrual* dan *Non Discretionary Accrual* sebagai alat untuk mengetahui apakah manajemen laba telah terjadi atau tidak. Akrual digunakan untuk mengukur manajemen laba pada tahap awal, selanjutnya mengkhususkan pada *Discretionary Accrual* sebagai ukuran terhadap manajemen laba.*Discretionary Accrual* adalah akrual yang jumlahnya dapat dikendalikan secara fleksibel oleh manajemen sehingga manajer dapat mengatur atau memanajemen laba sesuai seperti yang diinginkan.Sedangkan *Non Discretionary Accrual* adalah akrual yang tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat manajemen atau manajemen tidak memiliki fleksibilitas untuk mengendalikan jumlahnya. Dengan kata lain*Non Discretionary Accrual* merupakan faktor-faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh manajemen.

2.3 Discretionary Accrual Specific

Model pendeteksian manajemen laba dalam penelitian ini diproksikan oleh *Discretionary Accrual Specific* oleh Beaver dan Engel (1996), karena menurut Rahmawati (2006) pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sesuai dalam mendeteksi manajemen laba pada perbankan. Adapun pendekatan ini dituliskan sebagai berikut:

$$\mathbf{NDA_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 CO_{it} + \alpha_2 LOAN_{it} + \alpha_3 NPA_{it} + \alpha_4 \Delta NPA_{it+1} + \varepsilon_{it}}$$

Dimana:

CO_{it} = *Loan charge offs* (pinjaman yang dihapusbukukan)

$LOAN_{it}$ = *Loan outstanding* (pinjaman yang beredar)

NPA_{it} = *Non performing assets* (aktiva produktif yang bermasalah), terdiri dari aktiva produktif perusahaan, yang berdasarkan tingkat kolektibilitasnya digolongkan menjadi (a) Dalam Perhatian Khusus, (b) Kurang Lancar, (c) Diragukan, dan (d) Macet

ΔNPA_{it+1} = Selisih*non performing assets* t+1 dengan *non performing assets* t.

Semua variabel dideflasi dengan nilai buku ekuitas$_{t-1.}$

Total akrual pada pendekatan ini dihitung berdasarkan total saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian mengenai manajemen laba khususnya penelitian komparatif, yaitu Wiyoga (2010) meneliti mengenai beda manajemen laba antara perusahaan perbankan dan perusahaan non bank yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara *magnitude* manajemen laba perusahaan perbankan dan perusahaan non bank. Nilai mean yang diperoleh menunjukkan bahwa *magnitude* manajemen laba pada perusahaan perbankan lebih kecil dibandingkan perusahaan non bank.

Berbeda dengan Ningsih (2012) dalam penelitiannya mengenai perbedaan praktik manajemen laba pada indeks syariah (JII) dan indeks konvensional (LQ45) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan praktik manajemen laba pada keduanya.Indikasi praktik manajemen laba pada indeks syariah lebih tinggi dibandingkan indeks konvensional.Begitupun dengan Trisnawati (2010), namun dalam penelitiannya menjelaskan bahwa indikasi praktik manajemen laba pada indeks konvensional lebih tinggi dibandingkan indeks syariah.Penelitian terakhir oleh Nurianah (2015) yang menjelaskan bahwa status syariah perbankan berpengaruh terhadap manajemen laba.Selain itu, dalam uji perbedaan menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki manajemen laba lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional.Faradila (2013) dan Padmantyo (2010) dalam penelitiannya membenarkan bahwa perbankan syariah juga melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas mengenai manajemen laba, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah manajemen laba perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian komparatif (*comparative research*). Menurut Sugiyono (2010) penelitian komparatif menggunakan variabel mandiri (satu variabel) seperti halnya dalam penelitian deskriptif, tetapi variabel tersebut berada pada populasi dan sampel yang berbeda, atau pada populasi dan sampel yang sama tetapi pada waktu yang berbeda.

3.2 Operasional Variabel

Adapun variabel mandiri dalam penelitian ini adalah manajemen laba.Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk mengatur tingkat laba melalui pemilihan metode akuntansi dari standar akuntansi keuangan yang ada dengan tujuan agar laporan keuangan terlihat lebih baik. Manajemen laba diproksikan oleh *Discretionary Accrual Specific* oleh Beaver dan Engel (1996), karena menurut Rahmawati (2006) pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling sesuai dalam mendeteksi manajamen laba pada perbankan.

3.3 Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan uji statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai keseluruhan data sampel penelitian, selanjutnya akan dilakukan uji normalitas data menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* dengan signifikansi 0,05. Jika hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi normal maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Independent Sample T-Test*, namun jika hasil uji normalitas menunjukkan data terdistribusi tidak normal maka alternatif pengujian hipotesis yang akan digunakan adalah *Mann Whitney Test.* Hal ini karena *Mann Whiteney Test* tetap dapat digunakan meskipun asumsi normalitas tidak terpenuhi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Manajemen laba dalam penelitian ini diproksikan oleh *Discretionary Accrual Specific* oleh Beaver dan Engel (1996), dimana semua data yang diperlukan masing-masing dari laporan keuangan ditabulasi dan dideflasi terlebih dahulu.Kemudian, mencari koefisien α yang terdapat dalam pendekatan guna mencari *Non Discretionary Accrual* dengan menggunakan SPSS dan dihitung dengan Regresi Linier Berganda. Berikut adalah *Discretionary Accrual* perbankan syariah dan perbankan konvensional tahun 2012-2013:

Tabel 4.1
Discretionary Accrual Perbankan Syariah

No	Kode	TA		NDA		DA	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	BNIS	0,12079	0,16671	0,13849	0,14071	-0,01770	0,02600
2	BMI	0,22658	0,29824	0,20831	0,23191	0,01827	0,06633
3	BSM	0,45987	0,40111	0,24044	0,36126	0,21943	0,03985
4	BSMI	0,32700	0,27874	0,32068	0,32658	0,00632	-0,04784
5	BCAS	0,03733	0,06216	0,06779	0,01945	-0,03046	0,04271
6	PBS	0,01872	0,04939	0,14334	0,06687	-0,12462	-0,01747
7	BRIS	0,24794	0,23527	0,17333	0,24609	0,07461	-0,01082

8	BSB	0,18502	0,25092	0,27109	0,33832	-0,08606	-0,08740
9	BVS	0,07623	0,07585	0,09975	0,08950	-0,02351	-0,01366
10	BJBS	0,23951	0,10101	0,11942	0,07468	0,12009	0,02633
11	MIS	0,03715	0,06335	0,08143	0,03883	-0,04428	0,02453

Sumber: hasil olah data

Tabel 4.2
Discretionary Accrual Perbankan Konvensional

No	Kode	TA		NDA		DA	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	AGRO	0,26839	0,26709	0,13516	0,16048	0,13323	0,10661
2	AGRS	0,00738	0,00480	0,05826	0,06071	-0,05088	-0,05591
3	BABP	0,17529	0,19341	0,21144	0,23019	-0,03615	-0,03678
4	BACA	0,03011	0,01312	0,07140	0,08940	-0,04129	-0,07628
5	BBCA	0,09559	0,10816	0,06556	0,04736	0,03003	0,06080
6	BBKP	0,21400	0,15970	0,11179	0,14312	0,10221	0,01658
7	BBMD	0,01524	0,01431	0,10120	0,06546	-0,08596	-0,05115
8	BBNI	0,18253	0,15807	0,10651	0,08233	0,07603	0,07574
9	BBNP	0,10332	0,11807	0,07873	0,11511	0,02459	0,00296
10	BBRI	0,29460	0,23384	0,12856	0,15369	0,16605	0,08015
11	BBTN	0,10775	0,09801	0,11102	0,13973	-0,00327	-0,04171
12	BCIC	0,20132	0,80670	0,24874	0,32725	-0,04742	0,47945
13	BDMN	0,08867	0,08048	0,12645	0,12879	-0,03778	-0,04832
14	BEKS	0,63836	0,36085	0,40356	0,39748	0,23480	-0,03662
15	BINA	0,01520	0,00747	0,04383	0,04051	-0,02863	-0,03304
16	BJBR	0,11243	0,16967	0,08770	0,12946	0,02473	0,04021
17	BJTM	0,07842	0,09579	0,10012	0,08576	-0,02170	0,01004
18	BKSW	0,01639	0,01258	0,06034	0,08985	-0,04395	-0,07727
19	BMAS	0,01837	0,01377	0,04816	0,04644	-0,02980	-0,03267
20	BMRI	0,22363	0,21828	0,10997	0,12238	0,11366	0,09589
21	BNBA	0,03208	0,01216	0,06428	0,03103	-0,03219	-0,01887
22	BNG	0,19988	0,17140	0,13267	0,14693	0,06721	0,02447

	A						
23	BNII	0,13230	0,10026	0,13293	0,22740	-0,00063	-0,12714
24	BNLI	0,14772	0,11225	0,07772	0,02447	0,07000	0,08778
25	BSIM	0,07124	0,03086	0,20148	0,20051	-0,13024	-0,16965
26	BSWD	0,03713	0,05888	0,08785	0,06152	-0,05072	-0,00264
27	BTPN	0,06840	0,06290	0,07897	0,10611	-0,01057	-0,04321
28	BVIC	0,20040	0,11067	0,10999	0,09864	0,09041	0,01204
29	DNAR	0,00754	0,00127	0,06620	0,01736	-0,05866	-0,01609
30	INPC	0,00884	0,04067	0,34695	0,28326	-0,33811	-0,24259
31	MAYA	0,08246	0,06254	0,13403	0,18553	-0,05156	-0,12299
32	MCOR	0,05844	0,02989	0,10133	0,07259	-0,04290	-0,04269
33	MEGA	0,06888	0,06284	0,14055	0,13851	-0,07167	-0,07566
34	NAGA	0,02122	0,00637	0,06525	0,03976	-0,04404	-0,03339
35	NISP	0,15517	0,14081	0,07249	0,05873	0,08268	0,08208
36	PNBN	0,08237	0,09961	0,07092	0,05467	0,01145	0,04494
37	SDRA	0,12018	0,14592	0,09797	0,17208	0,02221	-0,02616

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan tabel 4.1 dan tabel 4.2 diketahui bahwa perbankan syariah dan perbankan konvensional terindikasi melakukan manajemen laba.Hal ini dapat dibuktikan dengan *Discretionary Accrual* yang positif dan negatif.*Discretionary Accrual* positif menandakan manajemen laba dilakukan dengan menaikkan laba dan negatif menandakan manajemen laba dilakukan dengan menurunkan laba.

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA_Syariah	22	-,12462	,21943	,0073023	,07379138
DA_Konvensional	74	-,33811	,47945	-,0027016	,10268630
Valid N (listwise)	22				

Sumber: hasil output spss

Hasil uji statistik deskriptif yang digambarkan oleh tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada perbankan syariah nilai minimumnya -0,12462, nilai maksimum 0,21943, nilai rata-rata 0,0073023 dan dengan standar deviasi 0,07379138. Sedangkan pada perbankan konvensional nilai minimumnya -0,33811, nilai maksimum 0,47945, nilai rata-rata -0,0027016 dan dengan standar deviasi 0,10268630.

Tabel 4.4
Uji Normalitas
Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov[a]		
	Perbankan	Statistic	df	Sig.
AbsDA	Syariah	,223	22	,006
	Konvensional	,201	74	,000

a. Lilliefors Significance Correction
Sumber: hasil output spss

Berdasarkan uji normalitas pada tabel 4.4 di atas, nilai Sig kedua kelompok sampel tidak melebihi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdistribusi dengan normal. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan *Mann Whitney Test.* Hal ini karena *Mann Whiteney Test* tetap dapat digunakan meskipun asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel 4.5
Mann Whitney Test
Ranks

	Perbankan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
AbsDA	Syariah	22	42,05	925,00
	Konvensional	74	50,42	3731,00
	Total	96		

Test Statistics[a]

	AbsDA
Mann-Whitney U	672,000
Wilcoxon W	925,000
Z	-1,238
Asymp. Sig. (2-tailed)	,216

a. Grouping Variable: Perbankan
Sumber: hasil output spss

Dapat dilihat pada tabel 4.5 di atas, dalam output "Test Statitic" nilai statistik Z yang kecil yaitu -1,238 dan nilai Sig.2-tailed adalah lebih besar (0,216>0,05). Hal ini berarti hasil uji tidak signifikan secara statistik, ini berarti tidak ada perbedaan manajemen laba perbankan syariah dan perbankan kovensional. Namun, dalam output "Ranks" nilai mean perbankan syariah yang lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional (42,05>50,42), dengan demikian ini berarti manajemen laba perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional.

4.2 Pembahasan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah indikasi manajemen laba pada perbankan di Indonesia, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional.Selain itu, penelitian ini juga bermaksud membandingkan manajemen laba pada keduanya dengan asumsi manajemen laba pada perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional.

Hasil pengukuran manajemen laba menunjukkan bahwa pada periode 2012-2013 perbankan syariah dan perbankan konvensional melakukan manajemen laba dengan cara menaikan dan menurunkan laba. Perbandingan manajemen laba dalam hal ini bukan berfokus pada arahnya (positif atau negatif), tetapi pada besarnya pengelolaan laba.Untuk itu pada penelitian ini manajemen laba diukur dengan menggunakan *Absolute Discretionary Accrual*.Hasil perbandingan *Absolute Discretionary Accrual* menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan manajemen laba diantara

keduanya, namun manajemen laba perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional.Hal ini berarti hipotesis yang diajukan didukung.Hasil ini konsisten dengan Nurianah (2015) dan Febriani (2015) yang menyatakan manajemen laba perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional.

Peneliti berasumsi lebih rendahnya manajemen laba perbankan syariah karena operasinya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits, serta adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Meskipun begitu, akan jauh lebih baik jika perbankan syariah dan perbankan konvensional tidak melakukan manajemen laba sama sekali untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan kinerja perusahaan sebenarnya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulakan bahwa perbankan syariah dan perbankan konvensional terindikasi melakukan manajemen laba.Hal ini dibuktikan dengan *Discretionary Accrual* yang positif dan negatif.Hasil uji perbandingan menunjukkan indikasi manajemen laba perbankan syariah lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional.Perbankan syariah dan perbankan konvensional sebaiknya tidak melakukan manajemen laba, karena dapat mengakibatkan informasi yang disampaikan menjadi bias dan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan lain dalam menentukan *Discretionary Accrual* sehingga dapat menentukan manajemen laba dari sudut pandang yang berbeda.

6. REFERENSI

[1] *Bank Sentral Republik Indonesia*. Dipetik November 3, 2015, dari www.bi.go.id

[2] Beaver, H. W., & Engel, E. E. (1996). Discretionary Behavior with Respect to Allowances for Loan Losses and The Behavior of Security Prices. *Journal of Accounting and Economics*, 177-206.

[3] *Bursa Efek Indonesia*. Dipetik November 3, 2015, dari www.idx.co.id

[4] Faradila, A. (2013). *Analisis Manajemen Laba pada Perbankan Syariah.* Bekasi: Universitas Islam 45.

[5] Healy, P., & Wahlen, J. (1999). A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications for Standart Setting. *Accounting Horizon.*

[6] Jones, J. (1991). Earnings Management during Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 193-228.

[7] Mulford, C. W., & Comiskey, E. E. (2010). *Deteksi Kecurangan Akuntansi The Financial Numbers Game.* Jakarta: PPM Manejemen.

[8] Ningsih, S. (2012). *Praktek Manajemen Laba Riil pada Perusahaan Go Publik di Indonesia: Studi Komparasi pada Indeks Syariah dan Indeks Konvensional.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

[9] Padmantyo, S. (2010). *Analisis Manajemen Laba pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

[10] Rahmawati. (2006). Model Pendeteksian Manajemen Laba pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 23-24.

[11] Scott, W. R. (2003). *Financial Accounting Theory.* Toronto: Canada: Prentice - Hall.

[12] Shipper, K. (1989). Comentary Katherine on Earnigns Management. *Accounting Horizon*, 91-102.

[13] Sugiyono. (2011). *Statistika untuk Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

[14] Trisnawati, R. (2010). *Perbedaan Mekanisme Corporate Governance dan Praktik Manajemen Laba: Studi Komparasi Indeks Syariah dan Indeks Konvensional di Bursa Efek Indonesia.* Surakarta: Universitas Surakarta.
[15] Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 1998 (Tentang Perbankan).
[16] Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2008 (Tentang Perbankan Syariah).
[17] Wiyoga, P. G. (2010). *Uji Beda Manajemen Laba antara Perusahaan Perbankan dan Perusahaan Non Perbankan* . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
[18] Wolk, H. I., Michael, G. T., & James, L. D. (2000). *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach.* South-Western: College Publishing.
[19] Wulandari, I. (2010). *The Difference Between Total Discretionary Accrual Banks which have Acquired The Profit and Loss in Indonesia.* Yogyakarta: STIE Nusa Megarkencana.

PENGARUH INVESTASI ASET TETAP TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. KARYA JAYA MANDIRI PERKASA

Nita Liana Sari[1], Siti Nurhayati Nafsiah[2]Andrian Noviardy [3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma P
nitalianasari1990@gmail.com
sititantointanapik@yahoo.co.id
andrian@yahoo.com

ABSTRACT

The concept of investment is crucialfor the company because it involves problem source of funds for investment, ageeconomical, and most importantly is about expected returnof the investment. Investasi conducted byCompanies are investing in fixed assets and capital work. Where the working capitalThe operation to finance day-to-hari, inaddition to working capital investment is also closely related to fixed assets for agar get a largerreturn,and aims to develop products and jasa company must comply with consumer needs. Investments in asset tetap and working capital are expectedto improve profitability. This study aimsto find outdevelopment, comparison andround of investment in fixed assets dan working capital, the development of profitabilit(ROI), and the impact of investments in inactive a fixed and working capital to levels profitability at PT. Karya Jaya mandiri perkasaa, Tbk period 2001 to 2015

Keywords *: Inventory Records, Assessment Inventories, and Inventory Reporting.*

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu perusahaan, selalu terdapat aset tetap untuk menjalankan operasinya. Aset tetap mempunyai kedudukan yang penting dalam perusahaan karena memerlukan dana dalam jumlah yang besar dan tertanam dalam jangka waktu yang lama. karena hal tersebut diatas maka aset tetap harus mendapat perhatian yang memdai dari pimpinan serta segala perlakuan akuntansi terhadapat aset tetap harus sesuai dengan pertanyaan akuntansi keuangan yang meruapakan dasar konsep yang menjadi pedoman dalam menilai, mencatat dan menyajikan harta kewajiban serta modal perusahaan dari neraca serta menentukan biaya dan pendapatan pada laba rugi perusahaan.

Dari fenomena tersebut bisa dilihat ternyata kenaikan tingkat investasi perusahaan tidak selalu menyebabkan laba mengalami kenaikn pula. Mungkin dalam kasus ini, PT. KJMP kurang bisa mengoptimalkan investasi yang telah dilakukan, sehingga laba yang diperoleh pun tidak maksimal.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengadakan penelitian berhubungan dengan masalah investasi aset tetap terhadap profitabilitas suatu perusahaan yang akan dituangkan dalam judul **" Pengaruh Investasi Aset Tetap terhadap Profitabilitas Pada PT. Karya Jaya Mandiri Perkasa palembang".**

2. LANDASAN TOERI

2.1 Pengertian Investasi dan Aset Tetap

2.1.1 Investasi

Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang (Mulyadi, 2001:284). Investsi juga dapat didefinisikan sebagai penanaman modal atau pemilikan sumer-sumber dalam jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang (Supryant, 1987:242). Investasi dapat pula didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang (Halim, 2003:2).

❖ Aset tetap adalah aset terwujud yang :

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedian barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administrasi, dan
2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

2.1.2 Jenis-Jenis Investasi

Investasi dapat dibagi menjadi empat golongan sebagai berikut ini (Mulyadi, 2001) :

1. Investasi yang tidak menghasilkan laba (*non-profit investment*)
2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya (*non-measurable profit investment*)
3. Investasi dalam penggantian ekuipmen (*replacement investment*)
4. Investasi dalam perluasan usaha (*expansion investment*)

2.1.3 Pengertian Investasi Aset Tetap

Menurut Bambang Riyanto (2001:115), Investasi aset Tetap adalah harapan perusahaan untuk dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan dalam aset tetap tersebut. Sedangkan Menurut M. Fuad, dkk (2000:224) investasi dalam aset tetap menyangkutkan harapan terhadap hsil penjualan yang akan datang.dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi aset tetap merupakan suatu bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh perusaahn dengan harapan bahwa suatu saat kegiatanoperasi perusaan tersebut dapat dihasilkan laba atau memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan.

2.1.4 Pentingnya Investasi

Setiap perusahaan memerlukan investasi yang digunakan untuk dapat memperlancar operasi perusahaan. Menurut Sutrisno (2003:139), perencanaan terhadap keputusan investasi ini sangat penting karena beberapa hal sebagai berikut :

a. Dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi sangat besar dan jumlah dana besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus.
b. Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang, sehingga perusahaan harus menunggu selama jangka waktu yang cukup lama untuk bisa memperoleh kembali dana tersebut.
c. Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan terjadinya *over* atau under *invesment*, yang akhirnya akan merugikan perusahaan.
d. Keputusan investasi berjangka panjang, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dan berat, serta kesalahan dalam keputusan ini dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar.

Menurut Sutrisno (2003:139), perencanaan terhadap keputusan investasi ini sangat penting karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Dana yang dikeluarkan untuk keperluan investasi sangat dan jumlah dana yang besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus.
2. Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang, sehingga perusahaan harus lama menunggu selama jangka waktu cukup lama untuk bisa memperoleh kembali dana tersebut.
3. Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan dimasa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan terjadinya *over* atau *under investment*, yang akhir akan merugikan perusahaan.

4. Keputusan investasi berjangka panjang, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dan berat, serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar.

2.1.5 Tujuan Investasi

Tujuan perusahaan mengadakan investasi pada umumnya adalah :

1. Untuk dapat mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan atau kegiatan perusaaan lain.
2. Untuk memperoleh pendapatan yang tepat secara terus menerus.
3. Untuk membentuk suatu dana guna tujuan tertentu.
4. Untuk membina hubungan baik dengan perusahaan lain.
5. Untuk tujuan-tujuan lainnya.

2.1.6 Perputaran Dana Yang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Perputaran dana yang tertanam dalam aset tetap yaitu dalam bentuk mesin, bangunan, kendaraan dan lain-lain akan diterima kembali keseluruhannya oleh perusahaan dalam beberapa tahun secara berangsur-angsur melalui depresiasi.

2.1.7 Penggolongan Usul Investasi dalam Aset Tetap

1. Investasi Penggantian
2. Investasi Penambahan Kapasitas
3. Investasi Penambahan Produk baru

2.2 Definisi Aset Tetap

Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut S. Munawir (2002:30), Aset Tetap adalah sarana atau sumber daya ekonomik yang dimiliki oleh suatu kesatuan atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif.

2.2.1 Karakteristik Aset Tetap

Aset Tetap memiliki beberapa karakteristik, berikut diantaranya:

- Mempunyai wujud fisik
- Tidak ditujukan untuk dijual lagi
- Memiliki nilai yang material, harga aset tersebut cukup signifikan contohnya tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dll.
- Memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu tahun buku dan nilai manfaat ekonominya bisa diukur dengan handal.

2.3 Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2010:122), yang menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut Kasmir (2011:196), yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan

2.3.1 Pengukuran Profitabilitas

Menurut R. Agus Santoso (2001:123-124) maka rasio frofitabilitas akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan, rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolan perusahaan, rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan.

$$\textbf{GPM} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjulan Bersih}}$$

Gross Profit Margin merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih.

2.3.2 Pengaruh Investasi Dalam Aset Tetap Terhadap Profitabilitas

Salah satu diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:283-284), sebagai berikut: Investasi atau penanaman modal pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang, misalnya penambahan mesin dan peralatan untuk peningkatan (kapasitas) produksi dalam rangka memenuhi permintaan terhadap produk perusahaan.

2.3.3 Metode-metode Untuk Menseleksi Usulan Investasi

- ☐ Payback Periode
- ☐ Net Present Value
- ☐ Profitability Index
- ☐ Internal Rate Of Return (IRR)
- ☐ Accounting Rate Of Return (ARR)

2.4 Pengertian Keuangan

Menurut Ridwan S. Sundjaja dan inge Barlian (2002:34), keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.

2.5 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Susan irawati (2006 : 22),definisi laporan keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pda suatu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba-rugi.

2.6 Penelitian terdahulu

Penelitian sehubungan dengan profitabilitas ini telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Diantara nya penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1	Balqis, Redatur Wau Jakarta (2013)	Pengaruh Perputaran Aktiva Lancar terhadap Profitabilitas pada Industri Rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menyatakan bahwa perputran aktiva lancar berpengaruh positif, searah sangat kuat terhadap laba perusahaan. Sehingga keadaan yang menggambarkan baiknya laju pertumbuhan industry rokok di Indonesia menunjukan laju pertumbuhan yang cukup baik, dimana laju pertumbuhannya rata-rata 10% dalam periode 2010-2012, sedangkan pada tahun 2013, pertumbuhan industry meningkat menjadi 155.
2	Mulia prtama,SE (2012)	Analisis Pengaruh Modal Kerja dan Investasi Aktiva Tetap terhadap Profitabilitaspada Bank Muamalat, TBK	Berdasarkan analisis koefisien berganda diperoleh persamaan,artinya bank muamalat mampu memenuhi kecukupan modal untuk menanggung resiko dari setiap aktiva yang berisiko karena besarnya indicator CAR pada tahun 20110-2012 tidak ada yang dibawah ketentuan bank indonesiayaitu sebesar 8%.
3	Lavina , Aryadinata (2011)	Analisis pengaruh Investasi Aktiva Tetap dan Modal Kerja terhdap Profitabilitas pada PT. Martina Berto.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi perkembangan investasi aktiva tetap, modal kerja, dan profitabilitas PT. Martina Berto tahun 2007-2009 cukup baik.
4	Ihyaul Umul MD.,SE.,M.Si. (2010)	Analisis Pengadaan Aktiva Tetap Antara Leasing dengan Pembiayaan Kredit Bank	Hasil evaluasi dari penelitian tersebut yaitu permintaan perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun perusahaan belum bisa memenuhi permintaan tersebut karena terbatasnya kapasitas produksi saat ini, sehingga hal ini sangat merugikan perusahaan apabila perusahaan tidak menambah kapasitasnya produksinya.
5	Noer Sasongko, Nila Wulandari (2012)	Pengaruh EVA dan Rasio-Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham.	Hasil penelitian menyatakan hasil uji t parsial menunjukan bahwa earning per share (EFS) berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini membuktikan dengan hasil uji t yang diterima pada taraf signifikansi 5% ($p<0,05$). Artinya EPS dapat digunkan untuk menentukan nilai perusahaan.

3.1 Objek Penelitian

Objek yang menjadi tempat penelitian dari judulini adalah " Pengaruh Investasi Aset Tetap Terhadap Profitabilitas Pada PT. Karya Jaya Mandiri Perkasa Palembang ". Yang bergerak dibidang manufaktur dan distributor beras raja berlokasi di Jalan Tangga Batu Pasar 16 Ilir No. 648-649 Palembang.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Operasional Variabel

1. Variabel Bebas (X)
   Menurut Sanusi (2012:50), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas (independent variabel) dalam penelitian ini adalah investasi aset tetap.
2. Variabel Terikat (Y)
   Menurut Sanusi (2012:50), variabel terikat atau variabel tergantung (dependent variabel) adalah variabel yang mempengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, profitabilitas perusahaan digunakan sebagai variabel terikat.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Konsep variabel	Indikator	Skala
1	Investasi Aset tetap (X)	Investasi Aset Tetap adalah suatu bentuk penanaman modal dengan harapan perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan melalui operasinya. (pengantar manajemen keuangan, 2005:89)	Pekerjaan dalam pelaksanaan (DPD)	Rasio
2	Profitabiliats (Y)	Profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efektifitas pengeloloaan (manajemen) perusahaan yang yang ditunjukan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. (manajemen Keuangan, 2007:3)	Pendapatan Operasi	Rasio

3.2.3 Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang penulis gunakan sesuai dengan standar penulisan ilmiah yang pernah penulis dapatkan pada saat mengikuti mata kuliah metodologi penelitian. Data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

.

3.3 Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode atau alat tertentu.

3.3.1 Analisis Stastistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (200), Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk data bisnis jangka panjang, seperti hasil produksi, ekspor, impor, dan penjualan sering diperkirakan bergerak menurut pola garis lurus. Persamaan yang diperoleh dari statistik deskriptif adalah :

$$Y = a + bt$$

Dimana :

Y = Nilai proyeksi dari variabel Y pada nilai t tertentu

a = Perpotongan dari Y atau nilai estimasi Y ketika garis lurus memotong sumbu Y (saat t = 0)

b = Kemiringan atau perubahan rata-rata dalam y untuk setiap perubahan dari satu unit t, baik berupa peningkatan atau penurunan

t = Nilai waktu yang dipilih

4. Pembahasan

Mesin Tipe : 6N-80, Dimensi : 59x38x99 cm, Kapasitas : 140-180 kg / jam, Daya : 1500 watt, 220 V, Kecepatan : 1600 rpm, Berat : 46 kg. Dengan masa manfaat 5 tahun. Mesin ini dapat menghasilkan 150 ton dalam satu hari, jika dalam waktu satu bulan mesin dapat memproduksi beras sebanyak 3.750 ton /bulan, sehingga pencapaian dalam satu tahun mesin mesin tersebut dapat memproduksi sebanyak 45.000 ton. (Tahun 1996).

Tabel 4.3
Tabel Mesin Produksi Tahun 1996

Tahun	Masa Manfaat	Kapasitas	Produksi
1996	5 Tahun	150 ton/hari	45.000
1997	5 Tahun	150 ton/hari	37.500
1998	5 Tahun	150 ton/hari	33.750
1999	5 Tahun	150 ton/hari	22.500
2000	5 Tahun	150 ton/hari	22.500
Total			**161.250**

Sumber PT. Karya Jaya Mandiri Perkasa

Mesin Model : HW60-A, Dimensi : 135x79x150 cm, Kapasitas : 1200 kg / jam, Daya : 7 kw, Putaran : 1.050 rpm, Berat : 80 kg, Harga : Rp.100.000.000, Dengan masa manfaat selama 12 tahun, Mesin ini dapat memproduksi 400 ton/hari.(Tahun 2012).

Tabel 4.3
Tabel Mesin Produksi Tahun 2012

Tahun	Masa Manfaat	Kapasitas	Produksi
2012	8 Tahun	400 ton/hari	124.800
2013	8 Tahun	400 ton/hari	120.000
2014	8 Tahun	400 ton/hari	110.000
2015	8 Tahun	400 ton/hari	104.000

Sumber data PT. Karya Jaya Mnadiri Perkasa

4.3.4Metode Garis Lurus (Straight)

Metode garis lurus merupakan metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian yang berjudul Investasi Aset Tetap maka maka akan dibahas mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan yaitupada investasi aset tetap di PT. KJMP, kurang begitu baik cara pengolahannya, terbukti pada tahun 2008 dan 2010 terjadi penurunan investasi aset tetap yang cukup besar karena kurang baiknya pengolahan manajemen dalam perusahaan dan habisnya masa pakai suatu aset tetap tidak dengan cepat ditanggulangi. Sedangkan kenaikan pada tahun 2007,2009, dan 2011 dikarenakan karena naiknya jumlah aset tetap yang akan diinvestasikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai investasi aset tetap dan profitabilitas pada PT. Karya Jaya Mandiri perkasa Palembang maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Investasi aset tetap pada PT. KJMP tahun 2007-2011 kecendrungan nya mengalami ketidakstabilan, ini terbukti pada tahun 2008 dan 2010 mengalami penurunan karena kurang baiknya manajemen dalam menangani kerusakan, pada tahun 2012 -2015 mengalami kenaikan akibat terjadi nya penggunaan aset tetap baru di PT. KJMP.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat penulis berikut adalah sebagai berikut :

Investasi aset tetap pada PT. KJMP akan dapat berjalan dengan baik apabila setiap kerusakan yang terjadi dapat ditangani dan habisnya masa pakai dari suatu aset tetap harus dapat dipantau agar tidak terjadi kerusakan yang dapat merugikan masyarakat dan perusahaan.

6. REFERENSI

[1] Hery, 2013, *Akuntasi Keuangan Menengah*, CPAS, Yogjakarta, 2013.
[2] Kieso, dkk, 2009, *Akuntansi Intermediate Jilid1*, Erlangga, Jakarta, 2009.
[3] Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
[4] Purwanto S.K., Suharyadi,2008.*Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Kedua, Jilid I, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
[5] Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung, 2011.
[6] Warren, 2014, *Pengantar Akuntansi*, Edisi Revisi Kedua, Buku 1, Ikatan Akuntansi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, Palembang, 2014.

Penerapan Target Costing Sebagai Alat Perencanaan Biaya Untuk Meningkatkan Laba Pada Bimbingan Belajar GSC Palembang

Novita Dasmarlina[1)], Verawaty[2)], Yeni Widyanti[3)]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang
[1]email: novita.dasmarlina3@gmail.com
[2]email: verawaty_mahyudin@yahoo.com
[3]email: yeniwidyanti@yahoo.co.id

Abstract

This research was aimed to know the classification of costs incurred in Bimbingan Belajar GSC *services during 2015, by analyzing the application of target costing in the planning of the cost of each student to determine the selling price of the program each student so that they can increase profits by comparing the costs according to the company and the cost according to target costing, as well as doing activities that can lower the cost. Whereas the method of analysis used is the profit margin analysis, comparing the company's profit margin with the profit margin by target costing, thereby increasing profits. Target costing applied in Bimbingan Belajar GSC can increase profits by lowering the cost for each student is between 23% - 25% after application through cost efficiency.*

Keywords*: Target Costing, Cost Planning, Profit Margin*

1. PENDAHULUAN

Perusahaan tidak selalu memiliki kemampuan untuk menentukan harga jual produk seperti yang dikehendakinya, karena sering kali terdapat sejumlah pesaing yang telah menjual produk sejenis dengan harga tertentu. Dengan kondisi seperti ini, perusahaan harus menggunakan pendekatan yang berbeda ketika menentukan harga jual produknya. Perusahaan dapat menggunakan pendekatan penentuan biaya produk terlebih dahulu baru kemudian membuatnya sesuai tingkat biaya yang diinginkan yang disebut dengan *target costing*. Sistem *target costing* membuat perusahaan menjadi kompetitif, karena merupakan bentuk strategi umum dalam persaingan ketika menghadapi persaingan yang sangat ketat di mana perbedaan harga yang kecil saja dapat menggerakkan konsumen untuk berpaling kepada produk lain atau produk substitusinya. Saat ini, bimbingan belajar GSC masih menerapkan metode biaya tradisional. Di mana sistem akuntansi biaya tradisional ini memberikan sedikit ide kepada manajemen ketika harus mengurangi pengeluaran pada waktu yang mendesak. Tentu lebih baik jika bimbingan belajar GSC menerapkan metode *target costing* sebagai alat perencanaan biaya untuk meningkatkan laba.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana penerapan *target costing* sebagai alat perencanaan biaya untuk meningkatkan laba pada Bimbingan Belajar GSC Palembang?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *target costing* sebagai alat perencanaan biaya untuk meningkatkan laba pada Bimbingan Belajar GSC Palembang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Target Costing

Menurut Blocher (2011 : 21), *target costing* menentukan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut dapat memperoleh laba yang diharapkan. Sedangkan menurut Rudianto (2013 : 145), *target costing* adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan

berdasarkan harga pasar kompetitif, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Selain itu, menurut Rudianto (2013 : 146), ada tiga prinsip *target costing*, yaitu:

1. Harga Jual Mendahului Biaya
2. Fokus pada Pelanggan
3. Fokus pada Desain

Untuk mengimplementasikan metode *target costing* dalam perusahaan, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh perusahaan, yaitu:

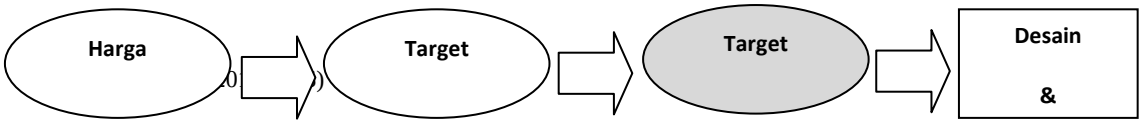
1. Menentukan Harga Jual yang Kompetitif
2. Menentukan Laba yang Diharapkan
3. Menetapkan Target Biaya

Target Biaya = Harga Jual – Laba yang Diharapkan

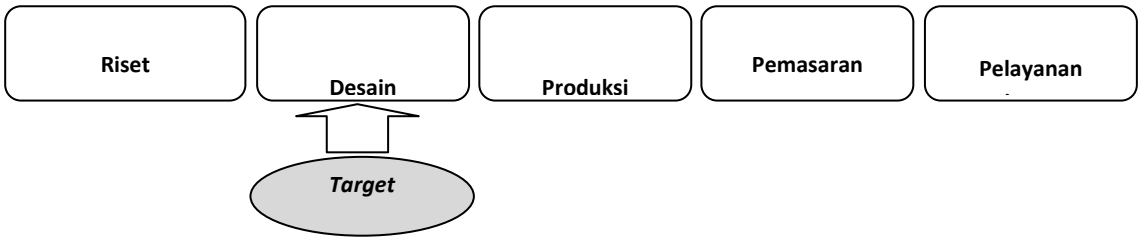
4. Melakukan Rekayasa Nilai
5. Menggunakan *Kaizen Costing* dan Pengendalian Operasi

Perencanaan Biaya

Menurut Widilestaringtyas (2012 : 10), biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.



Bagan Alur "*Target Costing*"



Sumber: Rudianto (2013 : 147)

Siklus Biaya (*The Cost Life Cycle*)

Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Kerangka Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Indikator	Hasil
1	Muhammad Asyhari Rahmat (2013) Universitas Brawijaya Malang	Penerapan *Target Costing* dalam Penentuan Tarif Kamar untuk Mengoptimalkan Laba pada UB Hotel Malang	*Target costing*, Perencanaan laba, Tarif	- Penerapan *target costing* melalui efisiensi biaya, menyebabkan penurunan biaya produksi. - Dengan penggolongan biaya *avoidable*.

2	F. Agung Himawan (2005) Institut Bisnis Nusantara	Analisis Penerapan *Target Costing* dalam Penetapan Harga Bandwidth Dedicated untuk Mengoptimalkan Perencanaan Laba pada PT Generasi Indonesia Digital	*Target costing*, efisiensi biaya	- Dengan penerapan *target costing* melalui efisiensi biaya, menyebabkan penurunan biaya produksi yang akan terjadi.

3. METODE PENELITIAN

Objek dalam melakukan penelitian pada Bimbingan Belajar GSC Palembang yang berlokasi di Jl. MP. Mangkunegara Blok A2 Palembang.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Penerapan T*arget Costing*	*Target Costing* adalah biaya produk yang diinginkan, ditentukan berdasarkan harga persaingan, sehingga dapat mencapai laba yang diharapkan.	- Harga jual Target - Laba Target - Biaya Target	Nominal
Meningkatkan Laba	Laba adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan.	Total Pendapatan dan Total Biaya	Nominal

Berikut beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan:

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Studi Perpustakaan

Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam menerapkan *target costing* terdiri atas lima langkah (Rudianto : 2013 : 148), yaitu:

1. Menentukan Harga Jual yang Kompetitif
2. Menentukan Laba yang Diharapkan
3. Menetapkan Target Biaya
4. Melakukan Rekayasa Nilai
5. Menggunakan *Kaizen Costing* dan Pengendalian Operasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Target Costing* Pada Bimbingan Belajar GSC Palembang

Pada tahun 2015, bimbingan belajar GSC sudah menetapkan persentase laba yang diharapkan, yaitu program reguler 1 tahun sebesar 60%, program 2 in 1 sebesar 60%, dan program 3 in 1 sebesar 60%. Namun bimbingan belajar GSC belum bisa mencapai persentase laba yang diharapkan tersebut. Pada tahun 2016, bimbingan belajar GSC tidak ingin menaikkan harga jual karena harga jual ini sudah sangat kompetitif di pasar. Bimbingan belajar GSC berupaya untuk dapat mencapai persentase laba yang diharapkan pada tahun 2015. Oleh karena itu, *target costing* dapat diterapkan karena tanpa menaikkan harga jual produk, perusahaan tetap dapat memperoleh laba yang diharapkan yaitu dengan cara menekan biaya produksi.

Tahap-Tahap Penerapan *Target Costing*

1. Penentuan Harga Jual

Pada tahun 2015, Bimbingan Belajar GSC telah menetapkan harga jual untuk setiap jenis programnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Harga Jual Prgoram Bimbingan Belajar GSC

No	Jenis Program	Harga Jual
1	Reguler 1 tahun	Rp2.592.000
2	2 in 1	Rp2.805.400
3	3 in 1	Rp3.238.950

Sumber: Bimbingan Belajar GSC (2015)

Perusahaan pesaing Bimbingan Belajar GSC di Palembang sangat banyak tetapi disini hanya mengambil satu pesaing yaitu Bimbingan Belajar Nurul Fikri.

Tabel 4.2
Harga Jual Program Bimbingan Belajar Nurul Fikri

No	Jenis Program	Jenjang	Harga Jual
1	Reguler 1 tahun	4 – 6 SD	Rp2.820.000
		7 – 9 SMP, 10 – 11 SMA	Rp3.120.000
2	3 in 1	12 SMA	Rp4.560.000

Sumber: Bimbingan Belajar Nurul Fikri (2015)

2. Penentuan Laba Target

Tabel 4.3
Laporan Laba Rugi Pada Bimbingan Belajar GSC

Uraian	Jenis Program		
	Regular 1 tahun	2 in 1	3 in 1
Pendapatan	Rp536.544.000,00	Rp154.297.000,00	Rp174.903.300,00
HPP	Rp127.650.502,00	Rp37.059.823,00	Rp41.177.581,00
Laba Kotor	Rp408.893.498,00	Rp117.237.177,00	Rp133.725.719,00
Beban Usaha	Rp156.393.448,00	Rp45.404.549,00	Rp50.449.499,00
Laba kotor	Rp252.500.050,00	Rp71.832.628,00	Rp83.276.220,00

Sumber: Bimbingan Belajar GSC (2015)

Berikut ini merupakan tabel pendapatan dari program Bimbingan Belajar GSC tahun 2015.

Tabel 4.4
Pendapatan dari Program Bimbingan Belajar GSC Tahun 2015

No	Jenis Program	Jumlah Siswa (1)	Harga Jual (2)	Pendapatan Bimbingan Belajar (1) x (2)
1	Reguler 1 tahun	207	Rp2.592.000,00	Rp536.544.000,00
2	2 in 1	55	Rp2.805.400,00	Rp154.297.000,00
3	3 in 1	54	Rp3.238.950,00	Rp174.903.300,00
Jumlah		316	Rp8.636.350,00	Rp865.744.300,00

Sumber: Bimbingan Belajar GSC (2015)

Persentase pendapatan dari masing-masing jenis program terhadap total pendapatan program bimbingan belajar secara keseluruhan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Persentase Pendapatan Program Bimbingan Belajar GSC Tahun 2015

Jenis Program	Pendapatan Bimbingan Belajar (1)	Total Pendapatan Bimbingan Belajar (2)	Persentase Pendapatan (1) : (2) x 100%
Reguler 1 tahun	Rp536.544.000,00	Rp865.744.300,00	62%
2 in 1	Rp154.297.000,00		18%
3 in 1	Rp174.903.300,00		20%
Jumlah	**Rp865.744.300,00**	**Rp865.744.300,00**	**100%**

Sumber: Bimbingan Belajar GSC (2015)

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh persentase alokasi pendapatan pada setiap jenis program terhadap pendapatan program bimbingan belajar secara keseluruhan. Hasil perhitungan tersebut dalam analisis selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan pengeluaran biaya-biaya dengan dasar alokasi pendapatan. Jadi, setiap jenis program akan menanggung beban biaya aktivitas jasa (harga pokok program) sebesar nilai persentase pendapatan yang diperoleh program itu sendiri terhadap perolehan pendapatan jasa program secara keseluruhan.

Biaya Operasi:

a) Biaya Gaji Rp97.373.922,00
b) Biaya Administrasi dan Umum Rp154.873.574,00
c) Biaya Penjualan Rp205.887.906,00
Total Biaya **Rp458.175.402,00**

Adapun perhitungan harga pokok jasa program dengan dasar alokasi pendapatan sebagai berikut.

1. Reguler 1 tahun
   Total biaya semua jenis program = Rp458.175.402,00
   Persentase pendapatan (62% x Rp458.175.402,00) = Rp284.068.749,00
   Harga pokok jasa (Rp284.068.749,00 : 207) = Rp1.372.313,00
2. 2 in 1
   Total biaya semua jenis program = Rp458.175.402,00
   Persentase pendapatan (18% x Rp458.175.402,00) = Rp82.471.573,00
   Harga pokok jasa (Rp82.471.573,00 : 55) = Rp1.499.483,00
3. 3 in 1
   Total biaya semua jenis program = Rp458.175.402,00
   Persentase pendapatan (20% x Rp458.175.402,00) = Rp91.635.080,00
   Harga pokok jasa (Rp91.635.080,00 : 54) = Rp1.696.946,00

Berdasarkan perhitungan harga pokok jasa program di atas maka akan disajikan perhitungan margin laba untuk tiap siswa yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.6
Perhitungan Margin Laba Untuk Tiap Siswa
(Menurut Perusahaan)

Jenis Program	Harga Jual Program	Biaya Tiap Siswa	Margin Laba	
			(Rp)	(%)
Regular 1 tahun	Rp2.592.000,00	Rp1.372.313,00	1.219.687	47,06%
2 in 1	Rp2.805.400,00	Rp1.499.483,00	1.305.917	46,55%
3 in 1	Rp3.238.950,00	Rp1.696.946,00	1.542.004	47,61%

Analisis Penerapan *Target Costing* sebagai Alat Efisiensi Biaya Tiap Siswa

Pada penelitian ini, berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada tabel 4.6, perusahaan belum dapat mencapai margin laba sesuai yang diharapkan yaitu sebesar 60% dari pendapatan. Oleh karena itu akan dilakukan perhitungan *target costing* yang dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Perhitungan *Target Costing* Tiap Jenis Program Bimbingan Belajar GSC

Uraian	Jenis Program		
	Regular 1 tahun	2 in 1	3 in 1
Pendapatan	Rp536.544.000,00	Rp154.297.000,00	Rp174.903.300,00
Laba yang diharapkan 60% dari pendapatan	Rp321.926.400,00	Rp92.578.200,00	Rp104.941.980,00
Total biaya	Rp214.617.600,00	Rp61.718.800,00	Rp69.961.320,00

Berdasarkan tabel 4.7 maka besarnya *target costing* tiap siswa dapat dihitung sebagai berikut.

1) Reguler 1 tahun

Target costing (per siswa) = $\frac{Rp214.627.600,00}{207}$ = Rp1.036.848,00

2) 2 in 1

Target costing (per siswa) = $\frac{Rp61.718.800,00}{55}$ = Rp1.122.160,00

3) 3 in 1

Target costing (per siswa) = $\frac{Rp69.961.320,00}{54}$ = Rp1.295.580,00

Berdasarkan hasil perhitungan *target costing*, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan margin laba tiap siswa yang dapat disajikan melalui tabel 4.8 yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.8
Perhitungan Margin Laba Tiap Siswa (Menurut *Target Costing*)

Jenis Program	Harga Jual Program	Biaya Tiap Siswa	Margin Laba	
			(Rp)	(%)
Regular 1 tahun	Rp2.592.000,00	Rp1.036.848,00	1.555.152	60%
2 in 1	Rp2.805.400,00	Rp1.122.160,00	1.683.240	60%
3 in 1	Rp3.238.950,00	Rp1.295.580,00	1.943.370	60%

Tabel 4.8 yakni hasil perhitungan margin laba dalam penjualan yang menunjukkan bahwa *target costing* yang ditetapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan persentase margin laba yang diharapkan untuk tiap siswa. Oleh karena itu akan disajikan perbandingan kalkulasi biaya menurut perusahaan dan menurut *target costing* yang dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.9
Perbandingan Biaya Menurut Perusahaan dengan Menurut *Target Costing* Untuk Tiap Siswa

Jenis Program	Biaya Menurut Perusahaan	Biaya Menurut *Target Costing*	Penghematan Biaya	
			(Rp)	(%)
Reguler 1 tahun	Rp284.068.749,00	Rp214.617.600,00	69.451.149	24,45%
2 in 1	Rp82.471.573,00	Rp61.718.800,00	20.752.773	25,16%
3 in 1	Rp91.635.080,00	Rp69.961.320,00	21.673.760	23,65%
Total	Rp458.175.402,00	Rp346.297.720,00	111.877.682	

Aktivitas-Aktivitas Untuk Mencapai Target

Pada bimbingan belajar GSC, harga jual sudah termasuk *try out* yang diadakan sebanyak 4 kali dalam setahun. *Try out* ini biasanya dilaksanakan dengan cara perusahaan memperbanyak naskah soal, penyelesaian soal, dan menyediakan lembar jawaban komputer sesuai dengan jumlah siswa yang mengikuti try out tersebut. Dalam hal ini perusahaan dapat menerapkan sistem *try out online* di mana saat ini sudah banyak sekolah yang menerapkan sistem ujian berbasis komputerisasi. *Try out online* ini dapat membantu siswa dalam menghadapi ujian nasional yang berbasis komputerisasi tersebut.

Penerapan Prinsip-Prinsip *Target Costing*

1. Harga Jual Mendahului Biaya

Target Costing dimulai dari penetapan harga jual produk yang kompetitif. Bimbingan Belajar GSC mempunyai 3 jenis program bimbingan belajar yaitu program reguler 1 tahun, program 2 in 1, dan program 3 in 1 di mana harga jual rata-rata program tersebut bervariasi dari program reguler 1 tahun sebesar Rp2.592.000,00, program 2 in 1 sebesar Rp2.805.400,00, dan program 3 in 1 sebesar Rp3.238.950,00. Harga tersebut telah mencakup biaya produksi dan laba yang diinginkan perusahaan.

2. Fokus pada Pelanggan

Untuk dapat menarik minat siswa agar tetap bergabung di bimbingan belajar GSC, maka bimbingan belajar GSC memberikan harga khusus untuk siswa yang telah bergabung di bimbingan belajar GSC, serta mengembangkan metode dan pola pengajaran yang kreatif dan inovatif sehingga siswa dapat selalu unggul dan dapat menjawab setiap permasalahan pelajaran dengan benar, tepat, dan cepat.

3. Fokus pada Desain

Bimbingan belajar GSC menyediakan program-program berkualitas yang mampu meningkatkan prestasi belajar siswa, yakni dengan cara mengembangkan metode dan pola pengajaran, yaitu dengan menggunakan Mind Map. Selain itu siswa juga diberikan trik-trik khusus untuk menjawab soal-soal dengan cepat dan mudah yaitu yang disebut trik G2.

Manfaat Penerapan *Target Costing*

Manfaat dari penerapan *target costing* pada bimbingan belajar GSC adalah bimbingan belajar GSC dapat melakukan pengurangan biaya pada tiap jenis program sehingga bimbingan belajar GSC tetap bisa menggunakan harga program pada tahun 2015 untuk mencapai target laba yang diharapkan pada tahun 2016 dan harga tetap kompetitif di pasar, serta kualitas pelayanan juga bisa ditingkatkan lagi dengan kerjasama pimpinan dan karyawan dari masing-masing divisi untuk mencapai target yang diharapkan.

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian dan pembahasan penulis mengenai penerapan *target costing* sebagai alat perencanaan biaya untuk meningkatkan laba pada Bimbingan Belajar GSC Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan metode *target costing* melalui proses efisiensi biaya dalam penentuan harga jual program pada bimbingan belajar GSC Palembang dapat dilakukan. Hasil analisis perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan menurut *target costing*, menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk program reguler 1 tahun sebesar Rp284.068.749,00, sedangkan menurut *target costing* sebesar Rp214.617.600,00, program 2 in 1 sebesar Rp82.471.573,00 sedangkan menurut *target costing* sebesar

Rp61.718.800,00, dan program 3 in 1 sebesar Rp91.635.080,00 sedangkan menurut *target costing* sebesar Rp69.961.320,00.

2. Dengan penerapan *target costing* melalui efisiensi biaya, menyebabkan penurunan biaya produksi dan memungkinkan perusahaan untuk menetapkan biaya target yang lebih rendah daripada biaya yang diperkirakan akan terjadi. *Target costing* dapat diterapkan di bimbingan belajar GSC untuk meningkatkan laba dengan menurunkan biaya tiap siswa, program reguler 1 tahun mengalami penghematan biaya sebesar 24,45% atau sebesar Rp69.451.149,00, program 2 in 1 mengalami penghematan biaya sebesar 25,16% atau sebesar Rp20.752.773,00, dan program 3 in 1 mengalami penghematan biaya sebesar 23,65% atau sebesar Rp21.673.760,00 setelah menerapkan metode *target costing* melalui efisiensi biaya.

3. Dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mendukung tercapainya *target costing*, maka dapat dengan jelas terlihat penurunan biaya sehingga penghematan biaya dapat terjadi dan laba perusahaan bisa maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Bimbingan Belajar GSC untuk dapat mengendalikan biayanya dan mengoptimalkan laba perusahaan, adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan perlu melakukan analisis secara selektif terhadap biaya-biaya yang muncul dalam proses produksi, sehingga dapat membedakan biaya mana yang dapat dihindari atau diefisiensikan dan biaya yang tidak berpengaruh terhadap kualitas produk dan atau jasa.
2. Pertimbangan manajemen untuk menggunakan *target costing* dalam perencanaan biaya pada bimbingan belajar GSC Palembang agar dapat meningkatkan laba perusahaan.
3. Pada proses *try out* yang dilakukan oleh bimbingan belajar GSC secara berkala lebih banyak menggunakan waktu dan biaya yang besar. Perusahaan dapat menerapkan sistem *try out online* yang dapat mengefisiensikan biaya dan waktu.

6. REFERENSI

[1] Blocher, 2011. *Manajemen Biaya*. Jakarta : Salemba Empat.

[2] Himawan, F. Agung. 2009. *Analisis Penerapan Target Costing dalam Penetapan Harga Bandwidth Dedicated untuk Mengoptimalkan Perencanaan Laba*. ESENSI, Vol.12, No.2, 2009. Skripsi Retrieved November 13, 2015 from http://www.ibn.ac.id/journal/ferdinandus_agung/ferdinandus_agung_analisis_penerapan_target_costing.pdf.

[3] Rahmat, Muhammad Asyhari. 2013. *Penerapan Target Costing dalam Penentuan Tarif Kamar untuk Mengoptimalkan Perencanaan Laba*. Skripsi Universitas Brawijaya Malang. Retrieved November 13, 2015 from http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285252&val=6467&title=Penerapan Target Costing dalam Penentuan Tarif Kamar untuk Mengoptimalkan Perencanaan Laba(Studi Kasus pada UB Hotel Malang).

[4] Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta : Erlangga.

[5] Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.

[6] Widilestariningtyas, Ony. 2011. *Akuntansi Biaya*. Bandung : Graha Ilmu.

ANALISIS PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MELAPORKAN SPT

Novita Sari[1], Hasan Kuzery[2], Septiani Fransisca[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma, Palembang
novit118@gmail.com [1]
hasankuzery@gmail.binadarma.ac.id[2]
septiani.fransisca@binadarma.ac.id [3]

Abstract

This study aimed to analyze the influence of e-spt as the Taxpayer Compliance in reporting SPT in Tax Service office Pratama Palembang Seberang Ulu. The research data was obtained from questionnaires distributed to registered taxpayer in the Tax Office Pratama Palembang Seberang Ulu with Convenience Sampling Technique. The study population was registered taxpayer as the taxpayer e-such as in the Tax Office Pratama Palembang Seberang Ulu. The sample used in this study were 40 respondents. Questionnaire on valditas test and reliability test before the study. Classic assumption test used is the test of normality and heteroscedasticity test. Hypothesis test used is simple linear regression. The results of this study indicate that the implementation of e-spt as positive and significant impact on taxpayer compliance. This is proved by simple linear regression analysis obtained value of R Square of 0.935, which means that the influence of e-spt as the Taxpayer Compliance Board was 93.5%. Statistical t-test produces a value 23 654, and the significant value of 0.000, which means that there is a significant influence on taxpayer compliance.

***Keywords**: Implementation of e-spt, compliance taxpayer*

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Adapun lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

DJP melakukan modernisasi sistem administratif pepajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Moderinisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (*e*-SPT).

Adapun yang dimaksud dengan pelaporan *e*-SPT merupakan SPT dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang digunakan untuk merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta lampirannya, *generate* dan SPT digital serta mencetak SPT dan dilaporkan melalui media elektronik ke kantor pelayanan pajak. Pemerintah berharap dengan adanya Surat Pemberitahuan dalam bentuk Elektronik ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Penerapan *e*-SPT

tidak terlepas berbagai perilaku pemikiran wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan, adapun perilaku wajib pajak badan yang terkait dengan penerapan *e*-SPT dapat dilihat dari manfaat kegunaan sistem, persepsi kemudahan kegunaan, dan kondisi yang memfasilitasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimanakah analisis penerapan *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT (study kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu) ? tahun 2012-2014.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Pajak

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa :"pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memakna berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuan rakya". Menurut S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014 : 1) menyatakan bahwa, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kek yaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

2.2 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pohan (2014 : 76) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak wajib harus mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

2.3 Pengertian Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

Menurut Pohan (2014 : 83) pengertian *e*-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi *e*-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan *e*- filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara on-line yang real time melalui penyedia jasa aplikasi atau *application service provider* (ASP).

2.4 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu kepatuhan Wajib Pajak (2010:138), menyatakan bahwa "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya". Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan, Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.5 Wajib Pajak Badan

UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.6 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh penerapan *e*-spt yaitu Novi Purnama Sari menyatakan bahwa *e*-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT. Untuk mengetahui Pengaruh Signifikan kepatuhan wajib pajak badan dapat dilihat dengan variabel manfaat kegunaan sistem (*usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan *(ease of use)* dan kondisi yang memfasilitasi (*facilitating conditions*) dan variabel presepsi kemudahan penggunaan *(ease of use)* (X2).

Berbeda dengan Ita Salsalina Lingga (2012), meneliti mengenai Pengaruh penerapan e-spt ppn terhadap efisiensi pengisian spt menurut persepsi wajib pajak yang menyatakan bahwa Penerapan e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak sudah baik artinya telah memenuhi 4 aspek yaitu, urgensi, tujuan penerapan, sosialisasi dan kendala. Pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak sudah efisien atau sudah baik artinya telah memenuhi 3 aspek yaitu, kecepatan, keakuratan dan efesien. Debbie Deborah (2014), meneliti mengenai pengaruh penerapan e-spt terhadap efisiensi pemrosesan data menyatkan bahwa kepraktisan, kemudahan perhitungan, kemudahan pelaporan dan keandalan e-SPT secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan pada pengusaha kena pajak. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas mengenai penerapan *e*-spt, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan *e*-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang berlokasi di Jl. jend. Ahmad Yani No. 59. 14 Ulu Palembang 30129.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dan menggunakan metode penelitian survei, penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden, sehingga penulis menyusun kuesioner.

3.3 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Variabel bebas (X) penerapan *e*-SPT	Penerapan adalah perbuatan mempraktekkan suau teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.	Kecepatan pelaporan SPT	Skala Likert
		Lebih hemat	
		Penghitungan lebih cepat	
		Kemudahan pengisian SPT	
		Kelengkapan data pengisian SPT	
		Lebih ramah lingkungan	
		Tidak merepotkan	
Variabel terikat (Y) kepatuhan wajib	Kepatuhan wajib pajak badan adalah suatu keadaan dimana orang yang	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri	
		Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan	

pajak badan	melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliput perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.	(SPT)	
		Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang	
		Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *E*-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu sebanyak 104 Wajib Pajak Badan. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 40 responden sesuai dengan dengan jumlah kuesioner yang dikembalikan dengan metode pengambilan sampel adalah teknik *Convenience Sampling.* Teknik *Convenience Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan dan kemudahan untuk dihubungi, tidak menyusahkan dan mudah untuk mengukur.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari penyebaran kuesioner kepada pengusaha badan yang menggunakan *e*-spt di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Data sekunder yang digunakan bahan pustaka, data-datayang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian.

3.7 Skala Pengukuran Kuesioner

Pengukuran kuesioner bisa dikatakan baik jika memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel. Skala pengukuran kuesioner ini menggunakan instrumen penelitian sari nurhidayah (2015) dari universitas negeri yogyakarta.

3.8 Teknik Analisis

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana terdiri atas dua variabel. Satu variabel yang berupa variabel terikat atau tergantung diberi simbol Y dan variabel lainnya yang berupa variabel bebas diberi simbol X.

3.9 Pengujian Hipotesis

3.9.1 Uji Hipotesis (uji - t)

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji-t karena ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan atau menjelaskan perbedaan antar kelompok dalam suatu situasi yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dengan cara membandingkan *p value* dengan tingkat signifikansi.

Dengan demikian kesimpulan yang diambil berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan H_0 adalah sebagai berikut:

1. H_0 ditolak artinya penerapan e-SPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT.
2. H_o diterima artinya penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT.

3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi R^2 melihat berapa proporsi variasi dari variabel bebas secara bersama dalam mempengaruhi variabel terikat, dengan bantuan *software* statistik SPSS nilai koefisien determinasi (R^2) ini diperoleh. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Apabila koefisien determinasi mendekati satu, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen meberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan (R^2) nol, berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Pembahasan

Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu selama periode 2012-2014. Cara penarikan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada 40 responden (Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu), yang bertindak sebagai sampel.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Tingkat Penerapan *e*-spt

Pernyataan	Jawaban					Total Responden	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
1	0	0	12	29	5	40	4.42
2	0	0	1	25	14	40	4.32
3	0	0	4	24	12	40	4.20
4	0	0	2	25	13	40	4.27
5	0	0	1	29	10	40	4.22
6	0	0	2	21	17	40	4.37
7	0	0	18	19	3	40	3.62
8	0	0	2	25	13	40	4.27
9	0	0	1	16	23	40	4.55
10	0	0	1	19	22	40	4.72
11	0	0	6	29	5	40	3.97
12	0	0	2	26	12	40	4.25
13	0	0	0	19	21	40	4.52
14	0	0	16	21	3	40	3.67
15	0	0	2	25	13	40	4.27
Total	0	0	70	352	186	600	4.25

Sumber : Data primer yang diolah 2016

Rata-rata tingkat penerapan *e*-spt adalah 4,25 dimana nilai 4,25 didapat dari (0 x 1) + (0 x 2) + (3 x 70) + (4 x 352) + (5 x 186) = 2.548 : 600 = 4,25.

Rata-rata penerapan *e*-spt adalah 4,25 dimana dapat disimpulkan bahwa penerapan *e*-spt tergolang baik.

Tabel 4.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pernyataan	Jawaban					Total Responden	Rata-rata
	1	2	3	4	5		
1	0	0	1	29	10	40	4.22
2	0	0	2	20	18	40	4.4
3	0	0	18	18	4	40	3.65
4	0	0	2	25	13	40	4.27
5	0	0	1	16	23	40	4.55
6	0	0	1	17	22	40	4.25
7	0	0	16	21	3	40	3.67
8	0	0	2	26	12	40	4.25
9	0	0	0	19	21	40	4.52
Total	0	0	46	191	126	360	4.25

Sumber : Data primer yang diolah 2016

Rata-rata kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah 4,25 dimana nilai 4,25 dapat dari (0 x 1)+ (0 x 2) + (46 x 3) + (191 x 4) + (126 x 5) = 1.532 = 4,25.

Rata-rata penerapan *e*-spt adalah 4,25 dimana dapat disimpulkan bahwa penerapan *e*-spt tergolang baik.

Tabel 4.3
Hasil Analisis

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.043	.178		.239	.812
	penerapan sistem e-spt	.996	.042	.968	23.654	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sumber : Data primer diolah tahun 2016

Dapat dilihat pada tabel 4.3 di atas hasil analisis untuk hasil regresi sederhana dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 0,043 + 0,996X

Persaman tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 0,043, hal ini menunjukkan bahwa bila variabel X_1 diangap 0, maka nilai variabel Kepatuhan wajib pajak adalah 0,043 satuan. Koefesien regresi X_1 sebesar 0,996 menunjukkan bahwa setiap kenaikkan penerapan *e*-spt sebesar 1 satuan akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,996 satuan. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah regresi ini adalah positif.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, maka dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah variabel penerapan *e*-spt memiliki nilai t_{hitung} 23.654, dan nilai signifikan sebesar 0,000 artinya Ho diterima dan Ha ditolak, bahwa penerapan *e*-spt secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Tabel 4.4
Uji Koefesien Determinasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.968[a]	.936	.935	.10312	2.017
a. Predictors: (Constant), penerapan sistem e-spt					
b. Dependent Variable: kepatuhan Wajib Pajak Badan					

Sumber: Data primer, diolah tahun 2016

Berdasarkan hasil dari tabel 4.4 diatas nilai koefesien korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,968 dan *adjusted* R^2 sebesar 0,935. Hal ini berati penerapan *e*-spt memiliki pengaruh positif sebersar 93,5% terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, sedangkan sisanya sebesar 6,5% dimana 6,5 dari sisanya 100% - 93,5% = 6,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.3 Pembahasan Hasil Pengujian

Hasil uji t menunjukkan bahwa diterima variabel penerapan *e*-spt (independen) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak Badan (dependen). Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *e*-spt memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 23.654 dengan signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu, bedasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,968 dan koefisien determinan (R^2) 0,935 menunjukkan penerapan *e*-spt berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dan mempengaruhi 93,5% terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan sedangkan sisanya sebesar 6,5% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. Penerapan *e*-spt memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan karena penerapan *e*-spt merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

e-spt merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak Badan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *e*-spt diharapkan dapat memberikan kenyaman dan kepuasan bagi Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e*-spt diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan *e*-spt berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Semakin baik Penerapan *e*-spt maka Kepatuhan Wajib Pajak Badan akan semakin meningkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *e*-spt terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada ban IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis data yang dilihat dari statistik deskriptip menunjukkan bahwa tingkat penerapan *e*-spt dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan tingkat penerapan *e*-spt yang bernilai 4,25, nilai 4,25 dapat dikategorikan baik.
2. Dari hasil analisis data yang dilihat dari statistik deskriptip menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang bernilai 4,25, nilai 4,25 dapat dikategorikan baik.
3. Penerapan elektronik surat pemberitahuan (*e*-spt) dibutuhkan oleh Wajib Pajak Badan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap variabel penerapan elektronik surat pemberitahuan

(*e*-spt), mayoritas dari responden manyatakan setuju dalam menyampaikan surat pemberitahuan secara elektronik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e*-spt memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan *e*-spt dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak Badan sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Hendaknya penggunaan sistem *e*-spt lebih disederhanakan supaya sistem *e*-spt mudah dipelajari bagi Wajib Pajak Badan yang belum pernah menggunakan sistem *e*-spt.

6. REFERENSI

[1] Anastasia, Diana dan Lilis setiawan. 2009. *Perpajakan indonesia*. Andi, Yogyakarta.

[2] KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran on-line dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital

[3] Mardiasmo.2010. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.

[4] Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 6/PJ/2009 Mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik.

[5] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.

[6] Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia* "*Konsep dan Aspek Formal*".

a. Graha Ilmu, Yogyakarta.

[7] Sanusi ,anwar. 2014. *Metodologi penelitian Bisnis*. Salembah empat, Jakarta.

[8] Simanjuntak, Hamonangan Timbul, Mukhlis Imam, 2012, *Dimensi Ekonomi*

[9] *Perpajakan dan Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses, Jakarta.

[10] Siregar ,Syofian. *Statistika Deskripti Untuk Penelitian* . 2010. Raja Grafindo, Jakarta.

[11] Resmi, Siti 2014. *Perpajakan: teori dan kasus*. salembah empat, Yogyakarta.

[12] Sony Devano, dan Siti Kurni Rahayu.. 2006. *Perpajakan: Konsep,Teori,dan Isu,*

[13] *Satu*, Jakarta.

[14] Agoes, Sukrisno. *Akuntansi Perpajakan*.2013.Salembah Empat, Jakarta.

[15] Syofian Siregar. Statistika Deskripti untuk penelitian . 2010. Raja Grafindo, Jakarta.

[16] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan menjadi undang –undang.

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

[19] Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP *RETURN ON ASSETS* PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI

Okta Malinda[1], Siti Nurhayati Nafsiah[2], Andrian Noviardy[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisinis, Universitas Bina Darma Palembang
Malindata15@gmail.com[1]
Siti.Nurhayati@binadarma.ac.id[2]
Andrian.noviardy@binadarma.ac.id[3]

Abstract

This Essay is entitled "The Effect of Intellectual Capital to Return on Assets in Banking Company listed in Indonesia Stock Exchange". The objective of this study is to test the effect of Intellectual Capital to Return on Assets (ROA) empirically. The data used in this study include secondary data derived from Indonesia Stock Exchange for the period of 2013 – 2014,and financial statements, they are income statement and balance sheet. In this study, measurement model of intellectual capital uses Pulic Model, they are Value Added Capital Empolyeed (VACA), Value Added Human Capital (VAHU) and Structural Capital Value Added (STVA). The analysis used is multiple linear regression by using variable VACA. The result of hypothesis test from ANOVA test or F test showed that Intellectual Capital (VACA) influences to ROA. The result of Coefficients[a] test or t test showed that from two independent variables, only Variable VACA that influences to ROA and VACA is dominant variable that influences to ROA with high significance.

Keywords *: VACA (Value Added Capital Employeed), VAHU (Value Added Human Capital), ROA (Return on Assets)*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia perekonomian juga mulai muncul industri – industri yang berbasis pengetahuan. Aset yang sangat berharga di era globalisasi ini yakni modal intelektual karena untuk mempertajam daya saing. Hal ini digambarkan dengan semakin kecil investasi yang dialokasikan untuk *Physical Assets* sementara untuk modal intelektual mendapat alokasi investasi yang semakin besar. Hanya sedikit yang familiar dengan istilah modal intelektual, selama ini kita hanya menganggap aset berwujud yang sangat berperan penting dalam perusahaan namun dengan inovasi dan nilai tambah perusahaan pengetahuan menjadi acuan suatu perusahaan untuk menilai keberhasilan bisnisnya. Sehingga modal intelektual adalah pengetahuan informasi yang dimiliki perusahaan dan dikembangkan agar dapat menberikan nilai tambah, inovasi dan laba rugi perusahaan.

Salah satu bagian dari modal intelektual adalah teknologi informasi dimana teknologi merupakan kombinasi pengetahuan yang terhubung langsung dengan pengembangan produk dan jasa Castro dan Sa'ez, (2008) dalam Ulum (2009). Karena itu perusahaan yang operasinya bertumpu pada modal intelektual biasanya adalah perusahaan berteknologi tinggi. Salah satu sektor yang sebagian besar perusahaannya berteknologi tinggi adalah sektor perbankan.

Dari pendahuluan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal inteletual terhadap *Return On Assets* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Modal Intelektual

Beberapa organisasi dan pakar di dunia telah berusaha menguraikan definisi mengenai *intellectual capital* (modal intelektual). Secara general, modal intelektual adalah ilmu pengetahuan atau daya pikir Sumber daya manusia, yang dikuasai/dimliki oleh perusahaan, tidak memiliki bentuk fisik (tidak berwujud), dan dengan adanya modal intelektual tersebut, perusahaan akan mendapatkan tambahan keuntungan atau kemapanan proses usaha serta memberikan perusahaan suatu nilai lebih dibanding dengan kompetitor atau perusahaan lain .

Dari definisi modal intelektual yang telah dikemukakan, secara umum mereka menyetujui dan menyimpulkan bahwa modal intelektual dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu *Human capital, organizational capital* atau *structural capital* dan *customer capital* Santoso (2009).

Pengertian Kinerja Keuangan

Martono dan Harjito (2009) berpendapat bahwa "Kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak (stakeholders) seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri."

Return on Assets (ROA)

Menurut Riyanto, (2010), *Return on Assets* (ROA) merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor

Menurut Chen *et al*, (2005) dalam penelitian Wahdikorin (2010). *Return on total asset* (ROA) mengacu pada total pendapatan, termasuk pendapatan bunga bersih dan non pendapatan bunga, dibagi dari total aset. Indikator ROA yang dipilih sebagai *proxy* untuk pengukuran profitabilitas. ROA merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset.

Dari uraian diatas dapat disimpulka ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang mengacu pada total pendapatan dengan menggunakan rumus total pendapatan dibagi total aktiva. ROA dikalkulasi dengan Formula :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

3. METODE PENELITIAN

Populasi, Teknik Pengambilan Sampel

Penulisan ini menggunakan populasi seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, yang berjumlah 32 perusahaan. Penetapan jumlah sample menggunakan *nonprobability* dengan teknik *purposive sampling.*

Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdapat variabel dependen (Y) adalah *Return On Assets*, variabel independen (X1) *Value Added Capital Employeed* (VACA) (X2) *Value Added Human Capital* (VAHU) (X3) *Structural Capital Value Added* (STVA)

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berdasarkan sumbernya, yakni sumber sekunder. Peneliti mengumpulkan data berupa laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014 melalui media online yang merupakan situs web resmi BEI, yaitu www.idx.co.id.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk mengetahui model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi – asumsi regresi yang mempunyai sifat linear ,tidak bias dan varians minimum.

Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen secara parsila. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen terhadap variabel dependen, maka nilai signifikan dibandingkan dengan derajat kepercayaan.

Uji f

Model regresi berganda diatas, untuk membandingkan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadapa variabel dependen, maka dilakukan uji F, uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel indenpen.

Uji Regresi

Uji koefisien determinasi(R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2009).

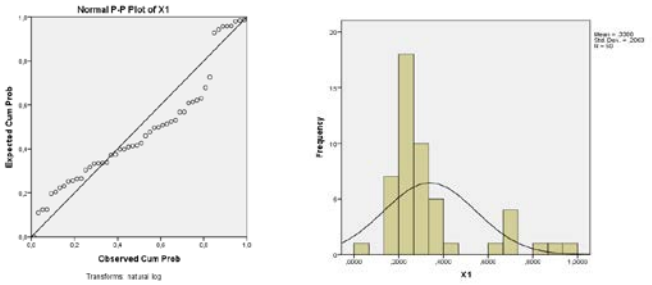
Uji Normalitas Data

Menurut Sanusi (2012:90)" uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak".

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan terdistribusi normal dan menyebar disekitar garis diagonal. Berikut ini data normalitas yang diolah dengan SPSS.



Sumber: *Output* SPSS(data diolah,2016)

Gambar 4.1 Normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual*

Uji t

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil pengelolahan data dengan SPSS pada tabel di bawah ini dapat diketahui hasil Uji-t (Uji Parsial) sebagai berikut.

Tabel 4.9

Uji-t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,101	,014		7,247	,000
	X1	,119	,020	,942	5,932	,000
	X2	-,004	,002	-,526	-2,276	,028
	X3	-,033	,030	-,228	-1,102	,276

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil olahan SPSS Versi 20.0, 2016

Penelitian ini menggunakan sampel (n)=100 dan jumlah variabel independen dan dependen (k)=4. Maka diperoleh df=96. Untuk variabel X1 (VACA) menunjukkan nilai t_{tabel} sebesar 1,980 dan nilai t_{hitung} sebesar 5,932. Berdasarkan nilai t_{tabel} dan t_{hitung} tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (5,932 > 1,980), yang artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 (VACA) berpengaruh terhadap variabel Y (ROA), maka dari itu H_1 diterima.

Untuk variabel X2 (VAHU) menunjukakkan nilai t_{tabel} sebesar 1,980 dan nilai t_{hitung} sebesar -2,276. Berdasarkan nilai t_{tabel} dan t_{hitung} tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-2,276 < 1,980), yang artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X2 (VAHU) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (ROA), maka dari itu H_2 ditolak. Untuk variabel X3 (STVA) menunjukakkan nilai t_{tabel} sebesar 1,980 dan nilai t_{hitung} sebesar -1,102. Berdasarkan nilai t_{tabel} dan t_{hitung} tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1,102 < 1,980), yang artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel X3 (STVA) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (ROA), maka dari itu H_3 ditolak.

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai *unstandardized coefficients* dari variabel *Value Added Capital Employeed* (VACA) adalah sebesar 0,119 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, *Value Added Human Capital* (VAHU) sebesar -0,004 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028 dan *Structural Capital Value Added* (STVA) sebesar -0,033 dengan tingkat signifikan sebesar 0,276. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dominan berpengaruh dari ketiga variabel independen tersebut adalah *Value Added Capital Employeed* (VACA). Karena hasil uji secara parsial menunjukan bahwa *Value Added Capital Employeed* (VACA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dengan nilai signifikan 0,000 < 0,050.

Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Berdasarkan nilai F dan tingkat signifikan, maka dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengelolahan data dengan SPSS pada tabel di bawah ini dapat diketahui hasil Uji-F (Uji Silmutan) sebagai berikut.

Tabel 4.10
Uji-F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,015	3	,005	11,961	,000[b]
	Residual	,019	46	,000		
	Total	,034	49			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
Sumber: Hasil olahan SPSS Versi 20.0, 2016

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11,961 dengan probabilitas 0,000. Nilai F_{hitung} tersebut dibandingkan dengan F_{tabel}, dimana jumlah variabel bebas dan terikat (k) = 4, dan jumlah sampel (n) = 100. Maka diperoleh df1 = 3 dan df2 = 96 yang menghasilkan nilai F_{tabel} sebesar 2,68. Maka hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} memiliki nilai yang lebih besar dari F_{tabel} (11,961 > 2,68). Maka, dengan probabilitas yang kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel VACA, VAHU dan STVA berpengaruh signifikan terhadap ROA, maka dari itu H_4 diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R-Square) digunakan untuk mengetahui besaran nilai korelasi antara variabel X yang terdiri dari VACA (X_1),VAHU (X_2) dan STVA (X_3) terhadap variabel Y (ROA). Berikut ini *output* untuk uji *R-Square* yang diolah dengan program SPSS 20.

Tabel 4.11
Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,662[a]	,438	,402	,020237546	1,879

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil olahan SPSS Versi 20.0, 2016

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11 diketahui bahwa koefisien determinasi (R-Square) adalah sebesar 0,662 atau 66,2%. Artinya kombinasi variabel independen yaitu VACA, VAHU dan STVA mampu menjelaskan variabel dependen (ROA) sebesar 66,2%, sisanya sebesar 33,8% (100%-66,2%) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Pengaruh VACA terhadap *Return on Assets* (ROA)

Dari hasil pengujian dengan program SPSS 20.0, diketahui bahwa variabel (X_1) yang merupakan *Value Added of capital Employed* (VACA) berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan VACA memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} (5,932 > 1,980).

Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Ulum (2008) yang menemukan hubungan positif dan signifikan. Hasil penelitian dari Tan *et al* (2007) juga menemukan hubungan positif dan signifikan antara pengaruh VACA dengan kinerja keuangan di bursa efek Singapore. Begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firrer dan William (2003) yang menemukan hasil signifikan positif antara VACA dengan kinerja perusahaan. Namun, nilai koefisien t *test* yang positif ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Citra (2009) yang menyebutkan bahwa ROA tidak dipengaruhi secara signifikan oleh VACA.

Menurut Firrer dan William (2003) dalam Ulum (2009), hasil ini menunjukkan bahwa pasar memberikan perhatian dan penekanan lebih pada pengembalian aset-aset sumber daya fisik, yang berarti perusahaan yang dapat mengelola secara efektif sumber daya fisiknya maka perusahaan tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi di pasaran.

Pengaruh VAHU terhadap *Return on Assets* (ROA)

Variabel (X_2) yang merupakan *Value Added Human Capital* (VAHU), setelah dilakukan pengujian dengan program SPSS 20.0, menunjukkan hasil bahwa VAHU tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan VAHU memiliki t_{hitung} yang lebih kecil dari pada t_{tabel} (-2,276 < 1,980)

Hasil Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Wahdikorin (2010) yang menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap ROA, Hal ini menunjukkan bahwa HCE nampaknya belum sepenuhnya mendukung bagi peningkatan kinerja perusahaan perbankan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan HCE belum sepenuhnya mampu untuk meningkatkan laba perusahaan. Ada indikasi bahwa gaji dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, belum mampu untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan, tanpa diiringi oleh pengelolaan SDM yang baik seperti pelatihan dan pengembangan karyawan. Sedangkan penelitian ini berlawanan dengan Ulum (2008) yang menunjukkan variabel VAHU berepengaruh secara signifikan terhadap ROA, menurut Ulum (2009 : 70) "*Human Capital* adalah hal penting penting bagi organisasi karena tanpa manusia (karyawan) suatu organisasi tidak dapat berfungsi". *Human capital* menyajikan sebuah *image* perusahaan dimana individu tidak perlu menunggu perintah , mereka terlihat sebagai individu yang mampu mengarahkan dirinya sendiri (Ulum :2009).

Pengaruh STVA terhadap *Return on Assets* (ROA)

Variabel (X_3) yang merupakan *Structural Capital Value Added* (STVA), setelah dilakukan pengujian dengan program SPSS 20.0, menunjukkan hasil bahwa STVA tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini dikarenakan STVA memiliki t_{hitung} yang lebih kecil dari pada t_{tabel} (-1,102 < 1,980).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa STVA tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini menjelaskan bahwa efisiensi modal struktural nampaknya belum mampu meningkatkan kemampuan menghasilkan laba perusahaan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan STVA belum sepenuhnya mampu untuk meningkatkan laba perusahaan. Ada indikasi bahwa jumlah *Structural Capital* (SC) yang dibutuhkan oleh perusahaan belum mampu untuk memenuhi proses rutinitas perusahaan dalam menghasilkan kinerja yang optimal, tanpa diiringi oleh pengelolaan *Structural Capital* yang baik seperti pengelolaan sistem, prosedur, *database*, akan menghambat produktivitas karyawan dalam menghasilkan *Value Added* (VA). Perusahaan belum mampu menciptakan budaya untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja. Organisasi yang memiliki struktur yang kuat akan memiliki budaya yang mendukung yang memungkinkan karyawan mereka untuk mencoba hal-hal baru, untuk belajar dan praktek mereka (Bontis et al., 2000).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Chen et al (2005) dalam Wahdikorin (2010) yang menunjukkan bahwa SCE tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Menurut Chen et al (2005) diduga SCE bukan merupakan indikator yang baik dalam menjelaskan *Structural Capital* perusahaan. *Structural Capital* hanya diukur dengan menggunakan *Value Added* (VA) dikurangi dengan *Human Capital* (HC). Cara pengukuran ini diindikasikan tidak mampu menangkap bentuk keseluruhan dari *Structural Capital*.

Pengaruh VACA, VAHU dan STVA terhadap *Return on Assets* (ROA)

Dari hasil pengujian dengan program SPSS 20.0, diketahui bahwa variabel X_1, X_2 dan X_3 yang masing-masing merupakan *Value Added Capital Employed* (VACA), *Value Added Human Capital* (VAHU) dan *Structural Capital Value Added* (STVA) berpengaruh dan sigifikan terhadap *Return on Assets* (ROA). Hal ini dikarenakan nilai F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} (11,961 > 2,68), dengan signifikasi 0,000 (< 0,05).

Hasil pengujian tersebut sesuai dengan teori menurut Ulum (2009), yang menyatakan, "Perusahaan akan terdorong menunjukkan kapasitas IC nya dalam laporan keuangan untuk memperoleh legitimasi dari publik atas kekayaan intelektual yang dimilikinya". Pengetahuan tak terlihat yang merangkul organisasi. Ini mengenal keberagaman yang sangat besar dari pemenuhan hubungan untuk mengelola perusahaan dalam sebuah cara yang terkoordinasi. Tanpa ini, *intellectual capital* hanya merupakan *human capital*". Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ulum (2008) yang menyatakan secara simultan variabel VACA, VAHU dan STVA berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan Hasil Penelitian ini tidak mendukung penelitian Firrer dan Williams (2003) yang menyatakan tidak seluruh komponen VAIC^{TM} memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang digunakan berkorelasi dengan komponen – komponen VAIC^{TM}. Dari penelitian diatas untuk pengujian menggunakan VACA, VAHU dan STVA maka mendapatkan nilai yang signifikan.

5. SIMPULAN

Simpulan

1. VACA berpengaruh secara *significant* positif terhadap ROA. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu rupiah VACA maka ROA akan mengalami kenaikan sebesar 1 % dan menjelaskan perusahaan dapat menekan pada pengembalian aset-aset sumber daya fisik, yang berarti

perusahaan yang dapat mengelola secara efektif sumber daya fisiknya maka perusahaan tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi di pasaran.

2. VAHU tidak berpengaruh secara *significant* terhadap ROA. Hal ini berarti bahwa setiap penurunan satu rupiah VAHU maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 1 %, dan menjelaskan *human capital* belum mampu untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan, tanpa diiringi oleh pengelolaan SDM yang baik seperti pelatihan dan pengembangan karyawan
3. STVA tidak berpengaruh secara *significant* terhadap ROA. Hal ini berarti bahwa setiap penurunan satu rupiah STVA maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 1 % dan menjelasakan bahwa efisiensi modal struktural nampaknya belum mampu meningkatkan kemampuan menghasilkan laba perusahaan . Sehingga walaupun karyawan memiliki pengetahuan yang tinggi namun bila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka kemampuan karyawan tersebut tidak akan menghasilkan modal intelektual.
4. Secara Simultan (Uji F), *Value Added Capital Employeed* (X1), *Value Added Human Capital* (X2) dan *Structural Capital Value Added* (STVA) terhada*p Return on Assets* (Y), dimana tingkat signifikan variabel ini bernilai dibawah 0,05 yaitu sebesar 0.000 yang artinya ketiga variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) menjelaskan Perusahaan akan mampu mendapatkan kekayaan modal inteletualnya dengan merangkul seluruh organisasi dengan terkoordinasi.

Saran

1. Sebaiknya menggunakan sampel yang lebih luas, dengan mengambil sampel lebih dari dua tahun dan meneliti tidak hanya satu jenis perusahaan saja, namun dapat meneliti seluruh jenis perusahaan, seperti manufaktur, teknologi, komunikasi dan lainnya yang ada di Indonesia, sehingga dapat dievaluasi kinerja modal intelektual secara keseluruhan.
2. Menambahkan variabel kinerja keuangan perusahaan selain rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA, sehingga dapat diketahui besar pengaruh kinerja modal intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan Perbankan dari sisi rasio yang lain, seperti rasio rentabilitas dan rasio solvabilitas secara keseluruhan.
3. Bagi manajer khususnya pada perusahaan berbasis pengetahuan, perlu mengetahui pentingnya modal intelektual sebagai alat untuk meningkatkan nilai perusahaan agar terus dapat berkompetisi di pasar global.

6. REFRENSI

[1] Dwi Prastowo dan Rifka Julianti. 2012. *Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan Aplikasi)*. Edisi Revisi. Yogyakarta : YPKN.

[2] Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro

[3] Gujarati, Damodar, 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan : SUmarno Zain,. Jakarta : Erlangga. Hanafi, Mamdud M. dan Abdul Halim. 2005

[4] Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 19*. Jakarta : Salemba Empat.

[5] 2007. *Standar akuntansi keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

[6] Irham Fahmi, SE., M.Si. & Yovu Lavianti Hadi, S.S., M.M. 2010. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung : Alfabeta

[7] James O. Gill, 2011. Dasar-dasar Analisis Keuangan. PPM: Jakarta

[8] Kamath, G.B. 2010. "The Intellectual Capital Performance of Indian Banking Sector". *Journal of Intellectual Capital*. Vol. 8, No. 1, pp.96-123.
[9] Kasmir. 2011. *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
[10] Kieso et al. (2007) Kieso, et al, 2007. *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat : Jakarta
[11] Lisvery dan Ginting .2004. Aktiva Tak berwujud. *Jurnal Akuntansi Keuangan* Indonesia, Jakarta
[12] Martani, Dwi, Sylvia Veronica NPS, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menegnah Berbasis PSAK*. Jakarta : Salemba Empat
[13] Munawir.2010. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Keempat.* Yogyakarta : Liberty
[14] Mulyadi.(2009). *SistemInformasiAkuntansi*.Jakarta :SalembaEmpat
[15] Riyanto, Bambang. 2010. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan.* Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta
[16] Sarwono, Jonathan.2010. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS.* Edisi 5. Yogyakarta : Penerbit Andi.
[17] Solikhah,B. 2010."*Pengaruh Intelectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan,Pertumbuhan dan Nilai Pasar, Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia*" Tesis : Universitas Diponegoro. Semarang
[18] Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan (R&D)*. Cetakan ketiga belas Maret 2009. Bandung: CV Alfabeta.
[19] Stice dan Skousen. 2009. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keenam Belas, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
[20] Ulum, Ihyaul**.** 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
[21] Wahdikorin. 2010. *Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007 – 2009.*Skripsi : Universitas Dipenogoro. Semarang
[22] Williams, M. 2001. *"Is intellectual capital performance and disclosure practices related?". Journal of Intellectual Capital*, 2(3): 192-203.
[23] www.idx.co.id

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENJUALAN KREDIT DAN PIUTANG PADA PT. BINTANG MULTI SARANA PALEMBANG

Okta Ristia [1], Fitriasuri[2], Septiani Fransisca.[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang.
oktaristia@yahoo.co.id[1]
fitriasuri@binadarma.ac.id[2]
septiani.fransisca@binadarma.ac.id.[3]

Abstract

The objective of this research is to determine and evaluate the internal control credit sales and accounts receivable at PT. Bintang Multi Sarana Palembang. This research used qualitative descriptive method. The data in this research is obtained through observation, interviews and documentation. The result of this research, the internal control credit sales and accounts receivable at PT. Bintang Multi Sarana Palembang that includes organizational structure, system of authorization and record keeping procedures, correct pratice, as well as the quality of employees in accordance with their responsibilities, yet effective compared with the theory Mulyadi. The author recommend that the company makes coupling a document that is used more and more , according to the functions that require the information presented in the document.

Keywords :*internal control systems , credit sales and account receivable.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis yang semakin pesat ini membuktikan adanya peningkatan yang riil atas kegiatan ekonomi yang berlangsung selama ini. Hal tersebut secara langsung memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan penjualan serta laba suatu perusahaan yang mengikuti tren positif atas pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini. Laba yang tumbuh secara positif mengikuti perkembangan bisnis dapat terealisasi jika dipastikan bahwa semua operasional dalam perusahaan berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk tetap dapat memperoleh laba atau profit, maka perusahaan harus tetap berusaha untuk menjaga kelangsungan usahanya pada masa mendatang. Usaha tersebut tentunya dilakukan untuk menghasilkan laba atau profit sehingga sangat berkaitan dengan sistem penjualan dan piutang. Untuk memastikan bahwa penjualan berlangsung dengan baik, perusahaan harus memerhatikan proses pengendalian internal dalam sistem penjualannya. Peran adaptasi terhadap teknologi yang berkembang selama ini juga menjadi hal yang penting untuk meningkatkan pengendalian internal.

Struktur pengendalian internal suatu perusahaan sangat memengaruhi perkembangan serta keberlangsungan suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh pengendalian internal yang sesuai dengan kebutuhan perusahan tersebut. Pengendalian internal yang sesuai dan baik, dapat mengendalikan dan memastikan bahwa proses penjualan sampai dengan penerimaan kas dari hasil penjualan tersebut telah dilakukan dengan baik. Peluang terjadinya penyimpangan menjadi lebih besar jika proses tersebut tidak dilengkapi dengan pengendalian internal yang sesuai dan baik, dan apabila terjadi kecurangan, tingkat profit dan laba yang diharapkan tidak akan tercapai sesuai target.

Oleh karena itu, untuk mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya pengelola atau manajemen yang dapat melakukan perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian aktivitas yang baik serta dapat mendukung operasional bisnis perusahaan sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan. Selain mempunyai pengendalian internal yang baik, untuk memastikan bahwa aktivitas pengendalian internal telah berjalan dengan baik, maka diperlukan

pemeriksaan operasional atas aktivitas pengendalian internal yang ada. Sehingga, prosedur serta kebijakan yang ada dalam pengendalian internal tersebut dapat mencapai tujuan yang dituju.

Penjualan dan piutang merupakan unsur yang sangat penting bagi perusahaan, karena dengan aktivitas inilah sebuah perusahaan dapat memperoleh keuntungan, dari kegiatan ini pula dapat digunakan sebagai sumber biaya untuk kelangsungan hidup perusahaan. Pada umumnya piutang terjadi dikarenakan oleh penjualan yang dilakukan secara kredit. Tindakan yang sangat penting dilakukan oleh manajemen dalam sebuah organisasi adalah pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan, hal terseut merupakan suatu tindakan yang efesien demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, semua itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk dan ancaman yang akan menganggu tercapainya tujuan suatu perusahaan. Oleh karena itu, fungsi penjualan harus berjalan sesuai dengan prosedur serta kebijakan dalam perusahaan sehingga aktivitas pengendalian internal terhadap penjualan dapat berjalan dengan baik.

PT. Bintang Multi Sarana Palembang merupakan satu di antara perusahaan dagang yang memproduksi *furniture* dan barang-barang elektronik. Furniture yang disediakan dan diproduksi, antara lain meja dan bangku untuk ruang tamu, meja makan, lemari, tempat tidur, meja rias, lemari pajangan dan barang-barang elektronik antara lain *air conditioner*, televisi, mesin cuci, kulkas dan peralatan elektronik lainnya. Semua jenis *furniture* tersebut diproduksi dan dipasarkan langsung oleh PT. Bintang Multi Sarana melalui *showroom* yang dimiliki oleh PT. Bintang Multi Sarana Palembang. Sistem penjualan yang dilakukan oleh PT Bintang Multi Sarana Palembang dilakukan secara tunai maupun kredit. Proporsi penjualan yang dilakukan lebih banyak dilakukan secara kredit.

Dari uraian di atas penulis mencoba untuk membahas bagaimana sistem dari pengendalian internal perusahaan tersebut karena keduanya adalah kegiatan yang saling berhubungan dan mempengaruhi tingkat perolehan laba perusahaan. Dan penulis tertarik untuk meneliti permasalahan perusahaan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **" Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penjualan Kredit dan Piutang PT. Bintang Multi Sarana Palembang".**

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan suatu alat yang sangat penting bagi manajemen dalam merancang dan mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi perusahaan, yang akan digunakan sebagai alat komunikasi untuk keperluan manajemen, baik keperluan intern maupun keperluan ekstern perusahaan.

2.2 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Sanyoto Gondodiyoto (2012:122) "sistem informasi akuntansi merupakan struktur yang menyatu dalam suatu entitas yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen lain untuk merubah data transaksi keuangan atau akuntansi menjadi informasi akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna atau pemakainya *(user)*".

2.3 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Menurut AICPA (*American Institute of certified Public Accountans*) oleh Winarno (2010:166) pengawasan internal meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam usaha dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

2.4 Pengertian Penjualan

Pengertian Penjualan Menurut Basu Swastha DH (2010:403) penjualan adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai

atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain. Penjualan dapat diartikan juga sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan atas persetujuan bersama.

2.5 Pengertian Piutang

Menurut Smith dan Skounsen (2010:286) istilah piutang dapat digunakan bagi semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa. Namun untuk tujuan akuntansi istilah ini pada umumnya diterapkan pada istilah yang lebih sempit yaitu berupa klaim yang diharapkan akan diselesaikan melalui penerimaan kas. Menurut Warren, Reeve dan Fess, (2010:404) mendefinisikan "piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya".

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bintang Multi Sarana yang beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim 5 Ulu Darat (Depan Panca Usaha) Kertapati Palembang pada tahun 2015.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

a. Studi Kepustakaan *(library research)* yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, yaitu buku-buku mengenai akuntansi,sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi.

b. Studi lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

1. Metode Observasi atau Pengamatan
   a. Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan evaluasi sistem pengendalian intern atas penjualan kredit dan piutang pada PT. Bintang Multi Sarana Palembang.
   b. Membandingkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan teori.
2. Interview atau Wawancara

   Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Staf di bagian Penjualan dan piutang pada PT. Bintang Multi Sarana Palembang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari PT. Bintang Multi Sarana Palembang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah Kualitatif.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam hal ini data dikumpulkan secara langsung dalam perusahaan melalui wawancara langsung dengan karyawan, catatan dan dokumen yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini penulis peroleh dengan cara membaca buku diperpustakaan dan berbagai laporan yang

dikeluarkan perusahaan berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, jurnal, artikel ilmiah.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data dan menyajikan data dengan tujuan untuk memberikan gambaran karakteristik suatu keadaan objek penelitian dan mengambil kesimpulan dengan menggunakan teori-teori akuntansi,sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBHASAN

4.5 Pembahasan

4.5.1 Evaluasi Sistem Penjualan Kredit/Sewa Beli dan Piutang PT. Bintang Multi Sarana Palembang

4.5.2 Evaluasi Sistem Penjualan Kredit/Sewa Beli PT. Bintang Multi Sarana Palembang

Dari sistem dan prosedur penjualan yang ada di bab 2 maka dapat dievaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi Fungsi yang terkait

Tabel 4.5.2
Evaluasi Fungsi yang terkait dalam Sistem Penjualan Sewa Beli/Kredit
PT. Bintang Multi Sarana Palembang

Menurut teori Mulyadi fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit (2010:464)	Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan sewa beli/ kredit PT. Bintang Multi Sarana Palembang
a. fungsi penjualan b. fungsi kredit c. fungsi gudang d. fungsi pengiriman e. fungsi penagihan f. fungsi akuntansi	a. fungsi penjualan b. fungsi kredit c. fungsi gudang d. fungsi pengiriman e. fungsi penagihan f. fungsi akuntansi

Setelah di evaluasi fungsi yang terkait dalam sistem penjualan sewa beli/penjualan kredit di PT. Bintang Multi Sarana Palembang sudah memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemisahan fungsi sesuai dengan teori sistem akuntansi.

2. Evaluasi Dokumen yang digunakan

Tabel 4.5.2
Evaluasi Dokumen yang terkait dalam Sistem Penjualan Sewa Beli/Kredit
PT. Bintang Multi Sarana Palembang

Menurut teori Mulyadi dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit (2010:463)	Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan sewa beli/kredit PT. Bintang Multi sarana Palembang
a. surat order pengiriman b. faktur penjualan c. rekapitulasi harga pokok penjualan d. bukti memorial	a. rekapan map order (MO) b. faktur penjualan c. formulir sewa beli d. bukti pengeluaran barang konsumen e. kwitansi f. kartu A/R g. daftar posisi piutang (DPP)

	h. Indoor Collection Report (ICR). i. Outdoor Collection Report (OCR). j. Laporan collection harian. k. Daftar Penurunan Kwitansi (DPK). l. Perjanjian pembayaran angsuran (PPA). m. Surat Penerimaan Barang Tarikan (SPBT). n. Surat tugas tarik barang (STTB).

Setelah di evaluasi dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan sewa beli/penjualan kredit di PT. Bintang Multi Sarana Palembang sudah memadai. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen pendukung yang menguatkan membentuk sistem akuntansi.

3. Evaluasi Catatan Akuntansi yang digunakan

Tabel 4.5.2
Evaluasi Catatan Akuntansi yang terkait dalam Sistem Penjualan Sewa Beli/KreditPT. Bintang Multi Sarana Palembang

Menurut teori Mulyadi, Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan kredit (2010:474)	Catatan Akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan sewa beli/kredit PT. Bintang Multi sarana Palembang
a. jurnal penjualan b. kartu piutang c. kartu persediaan d. kartu gudang e. jurnal umum	a. jurnal penjualan b. kartu piutang c. kartu gudang/stock persediaan d. jurnal umum e. jurnal penerimaan kas

Setelah di evaluasi catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penjualan sewa beli/penjualan kredit di PT. Bintang Multi Sarana Palembang Catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan teori sistem akuntansi penjualan kredit.

4.5.3 Evaluasi Sistem Piutang PT. Bintang Multi Sarana Palembang

Dari sistem dan prosedur piutang maka dapat dievaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi Fungsi yang terkait

Tabel 4.5.3
Evaluasi Fungsi yang terkait dalam Piutang PT. Bintang Multi Sarana Palembang

Menurut teori Mulyadi fungsi yang terkait dalam sistem piutang (2010:211)	Fungsi yang terkait dalam sistem piutang PT. Bintang Multi Sarana Palembang
a. fungsi secretariat b. fungsi penagihan c. fungsi kas d. fungsi akuntansi e. fungsi pemeriksaan intern	a. fungsi sekretariat b. fungsi penagihan c. fungsi kas d. fungsi akuntansi e. fungsi pemeriksaan intern

Setelah di evaluasi fungsi yang terkait dalam sistem piutang di PT. Bintang Multi Sarana Palembang yang digunakan sudah sesuai dengan teori sistem akuntansi piutang.

2. Evaluasi Dokumen yang digunakan

Tabel 4.5.3
Evaluasi Dokumen yang terkait dalam Piutang
PT. Bintang Multi Sarana Palembang

Menurut teori Mulyadi dokumen yang digunakan dalam sistem piutang (2010:258)	Dokumen yang digunakan dalam sistem piutang PT. Bintang Multi sarana Palembang
a. surat pemberitahuan b. daftar surat pemberitahuan c. bukti setor bank d. kwitansi	a. surat pemberitahuan b. daftar surat pemberitahuan c. bukti setor bank d. kwitansi

Setelah di evaluasi dokumen yang digunakan dalam sistem piutang di PT. Bintang Multi Sarana Palembang yang digunakan sudah sesuai dengan teori sistem akuntansi piutang.

3. Evaluasi Catatan Akuntansi yang digunakan

Tabel 4.5.3
Evaluasi Dokumen yang terkait dalam Piutang
PT. Bintang Multi Sarana Palembang

Menurut teori Mulyadi Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem piutang (2010:260)	Catatan Akuntansi yang digunakan dalam sistem piutang PT. Bintang Multi sarana Palembang
a. jurnal penjualan b. jurnal retur penjualan c. jurnal umum d. jurnal penerimaan kas e. kartu piutang	a. jurnal penjualan b. jurnal retur penjualan c. jurnal umum d. jurnal penerimaan kas e. kartu piutang

Setelah di evaluasi catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem piutang di PT. Bintang Multi Sarana Palembang yang digunakan sudah sesuai dengan teori sistem akuntansi piutang.

4.5.6 Pembahasan

4.5.6.1 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penjualan Kredit dan Piutang pada PT. Bintang Multi Sarana Palembang

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian intern atas sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang pada PT. Bintang Multi Sarana Palembang belumditerapkan secara efektif oleh perusahaan. Hal ini dapat diketahui dari unsurpengendalian intern yang telah diterapkan oleh perusahaan, yaitu kurangnya rangkapan dokumen yang dipergunakan di dalam sistem penjualan kredit/sewa beli dan piutang pada PT. Bintang Multi Sarana Palembang Seperti tidak adanya rangkapan form sewa beli yang akan diberikan kepada bagian yang membutuhkan, tidak adanya rangkapan kartu A/R didalam prosedur pengolahan kartu A/R dan juga tidak ditemukan rangkapan PPA didalam prosedur pembayaran angsuran melalui collector. Hal ini menyulitkan bagian penjualan untuk memantau proses penelitian serta otorisasi pengajuan pembelian secara sewa beli/kredit.

Berdasarkan teori dari Mulyadi yang ada di bab 2 (dua) sebelumnya PT. Bintang Multi Sarana Palembang, perlu memperbaiki sistem penjualan kredit dan piutang untuk membuat rangkapan

dokumen yang dipergunakan lebih banyak lagi, sesuai dengan fungsi yang membutuhkan informasi yang disajikan di dalam dokumen tersebut.

5. SIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian intern atas sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang pada PT. Bintang Multi Sarana Palembang, maka dapat disimpulkan bahwapengendalian intern atas sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang belumditerapkan secara efektif oleh perusahaan. Hal ini dapat diketahui dari unsurpengendalian intern yang telah diterapkan oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas sudah dilakukan oleh perusahaan yang tergambar pada struktur organisasi perusahaan dan pembagian tugas dan tanggung jawab serta prosedur kerja setiap departemen sudah terinci secara tertulis.
2. Sistem otorisasi pada sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang pada perusahaan sudah dilakukan oleh bagian atau pejabat yang berwenang dan prosedur pencatatan pada sistem penjualan kredit dan piutang belum diterapkan secara efektif oleh perusahaan, karena perusahaan belum mengggunakan beberapa dokumen yang lengkap pada prosedur sistem akuntansi penjualan kredit dan piutang.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi sudah diterapkan oleh perusahaan tetapi belum berjalan secara efektif. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi yang sudah diterapkan oleh perusahaan tersebut.

6. REFERENSI

[1] Azhar, Susanto. 2009. Sistem Informasi Akuntansi. Pendekatan Manual Pratika Metode dan Prosedur. Edisi Kedelapan. Bandung.

[2] Chusing, Barry E. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi Pendekatan Manual Pratika Penyusunan Metode dan Prosedur.* Bandung: Lembaga Informasi Akuntansi.

[3] Gondodiyanto, Sanyoto. 2012. Audit System Informasi. Jakarta.

[4] Indriyo, Gitosudarmo. 2010. Manajemen Pemasaran. Penerbit:BPFE. Yogyakarta.

[5] Krismiaji. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. UPP AMP YKPN.Yogyakarta.

[6] Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Salemba Empat:Jakarta.

[7] Mulyadi. 2009. Sistem Akuntansi. Salemba Empat:Jakarta.

[8] Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Salemba Empat:Jakarta.

[9] Smith, J. dan Skousen, F. K. 2010. Akuntansi Intermediate. Jakarta : Bina Rupa Bandung.

[10] Swastha, Basu. 2010. *Manajemen Penjualan.* BPFE-YOGYAKARTA.Yogyakarta.

[11] Waren S. Carl,James M. Reeve,Philip E. Fess. 2010. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta:Salemba Empat.

[12] Wilkinson, Josep W. ET. Al . 2010. *Accounting Infoemation SystemEsssential Concept and Application.*4 Edition, John Willey dan Sons Inc.New York-USA.

[13] Winarno, Wing Wahyu. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

PENGARUH PENGAWASAN FUNGSIONAL DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH

Oktari Azalea Putri[1], Henni Indriyani[2], Andrian Noviardy[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
oktariazalea_putri@yahoo.co.id[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
andrian.noviardy@binadarma.ac.id[3]

Abstract

This study aimed to determine the effect of functional supervising and implementation accounting system toward the accountability of government. The population were employees inspectorate Ogan Komering Ulu. Technique in taking sampling was a sampling purposive method and abtoined 26 employees. The data sources used was primary data. Data collection method used was by using questionnaires. The analysis used was multiple regression analysis. The results shows the functional supervising significant and positive effect on government accountability and implementation accounting system doesn't significantly on the accountability of government.

Key words : *functional supervising, accounting system, the accountability of governmental.*

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakan citra pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Salah satu elemen yang paling penting dalam tata cara pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik yang transparasi dalam pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu unsur terpenting dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dalam melaksanakan pengawasan fungsional.

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah. Peran aparat pengawasan fungsional pemerintah sangat mendukung proses terwujudnya *good governance* dalam pelaksaan pemerintah dan pembangunan.

Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah konsep yang sangat multikompleks. Untuk meminimalkan dan mengantisipasi timbulnya pemerintahan yang menyimpang tersebut diperlukan suatu sistem akuntabilitas publik. Untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang baik diperlukan saluran-saluran akuntabilitas yang bersistem dengan baik sehingga sistem tersebut mampu mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya manusia, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang.

Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu,akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Rendahnya akuntabilitas instansi pemerintah di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktornya adalah maraknya praktek fraud yaitu korupsi. Selain itu, kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku juga termasuk kedalam faktor yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas pemerintah, hal ini banyak terjadi di daerah-daerah, salah satunya terjadi pada Kabupaten OKU.

Inspektorat Kabupaten OKU merupakan instansi yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah daerah. Adapun masalah yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten OKU pada saat ini disebabkan karena adanya masalah di beberapa SKPD Kabupaten OKU yaitu ketidak seriusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan sejumlah proyek pembangunan sesuai alokasi dana masing-masing dinas, tidak jarang pejabat bermasalah tidak mendapat sangsi atas tindakan yang telah dilakukan dan belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel serta kurangnya kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan ini penulis tertarik untuk mengambil judul **"Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Penerapan Sistem Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kantor Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu)".**

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

2.1 Akuntabilitas Pemerintah

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (Mahmudi, 2015:31).

Menurut Mahmudi (2015:9) akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Kebijakan
5. Akuntabilitas Finansial

2.2 Pengawasan Fungsional

Menurut Wasistiono dalam Wulandari, (2013:10) pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah.

Menurut Halim dalam Wulandari, (2013:11) tahap-tahap pelaksanaan pengawasan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
3. Pelaporan Pemeriksaan
4. Tindak Lanjut Pemeriksaan

2.3 Penerapan Sistem Akuntansi

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Menurut Yuyun dan Siti (2014:13) basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut,tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Penyajian informasi keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual akan menjadi lebih informatif, terutama dalam huungannya dengan pengukuran kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi tertentu, serta dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan. Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Deddy dan Ayuningtyas dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2010 :201) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian mengenai pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas yaitu Indah (2013) meneliti pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada Pemerintahan Kota Padang yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik.

Berbeda dengan Agung (2014) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kejelasan sasarana nggaran, pengawasan fungsional dan pelpaoran kerja terhadap akuntabilitas publik yang menunjukkan bahwa pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Penelitian terakhir oleh Rahmat (2015) dalam penelitiannya dalam penelitannya mengenai pengaruh pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadapakuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sujarweni (2015) data kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

3.2 Operasional variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah pengawasan fungsional, penerapan sistem akuntansi, dan akuntabilitas. Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah. Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikianrupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang yang harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melaksanakan, keleluasaan dan kewenangan.

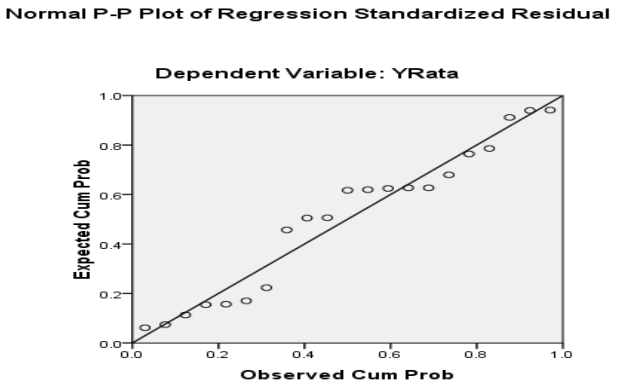
3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, heterokedastisitas), analisis regresi berganda, dan uji hipotesis (uji parsial (uji t) , uji simultan (uji f), dan koefisien determinasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Gambar 4.1 berikut memperlihatkan grafik *probability plot* dengan penyebaran data disekitar garis regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.1 Uji Normalitas

Tabel 4.1
Uji Multikolinearitas

Collinearity Stastitics		
Variabel	Tolerance	VIF
Pengawasan Fungsional	0,875	1,143
Penerapan Sistem Akuntansi	0,875	1,143

Sumber : SPSS (data diolah, 2016)

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi adalah 0,875 > 0,1 sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah1,143 < dari 10 maka variabel tersebut bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.2
Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.911	.811		3.588	.002
	X1Rata	.420	.163	.554	2.572	.019
	X2Rata	-.202	.224	-.194	-.900	.380

a. Dependent Variable: Yrata

Sumber : SPPS (Data diolah,2016)

Berdasarkan output SPPS diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 2.911 + 0.420\ X_1 - 0.202\ X_2$$

Tabel 4.3
Uji Parsial

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.911	.811		3.588	.002
	X1Rata	.420	.163	.554	2.572	.019
	X2Rata	-.202	.224	-.194	-.900	.380

a. Dependent Variable: Yrata

Sumber : SPPS (Data diolah,2016)

Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel pengawasan fungsional diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,019 < 0,05 dan koefisien β adalah 2,572 > 2,093 maka Ho ditolak dan Ha diterima . Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial H1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh pengawasan fungsional (X_1) terhadap akuntabilitas pemerintah diterima.

Berdasarkan uji parsial untuk variabel penerapan sistem akuntansi diperoleh nilai signifikan 0,380 > 0,05 dan koefisien β -0,900 dengan arah negatif maka Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial H2 yang menyatakan bahwa ada pengaruh penerapan sistem akuntansi (X_2) terhadap akuntabilitas pemerintah ditolak.

Tabel 4.4
Uji Simultan

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.516	2	.258	3.307	.060[a]
	Residual	1.406	18	.078		
	Total	1.922	20			

a. Predictors: (Constant), X2Rata, X1Rata

b. Dependent Variable: Yrata

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 3,307 dengan tingkat signifikansi 0,060. Karena probabilitas signifikan jauh lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan H3 yang menyatakan ada pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem terhadap akuntabilitas pemerintah secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pemerintah ditolak.

Tabel 4.5
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.518[a]	.269	.187	.27944

a. Predictors: (Constant), X2Rata, X1Rata

b. Dependent Variable: Yrata

Berdasarkan tabel Model Summary diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,187. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah adalah 18,7% dimana sisanya 100%-18,7% = 81,3% dipengaruhi oleh variabel lain dari penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas Pemerintah Kabupaten OKU.

Berdasarkan pada analisis data dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pengawasan fungsional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah. Hal ini ditunjukkan dari uji parsial yang diperoleh t hitung = 2.572 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 < 0,05. Semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2013) yang menemukan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah. Hal ini dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintah dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta akuntabilitas pemerintah yang baik juga.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah di Inspektorat Kabupaten OKU. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi diperoleh nilai signifikan 0,380 > 0,05 dan koefisien β -0,900 dengan arah negatif, berarti penerapan sistem akuntansi tidak berpangaruh signifikan terhadap akuntabilitas, artinya penerapan sistem akuntansi saja belum dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan rencana dan aturan perundang-undangan. Baik tidaknya penerapan sistem akuntansi dalam instansi pemerintah tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas pemerintah tersebut apabila tidak diiringi dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam melaksanakan dan menerapkan sistem akuntansi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan fungsional dan penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah secara bersamaan. Hal ini ditunjukkan dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 3,307 dengan tingkat signifikansi 0,060. Karena probabilitas signifikan jauh lebih besar dari 0,05,berarti tidak ada pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem terhadap akuntabilitas pemerintah secara bersama-sama.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka daoat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pemerintah. Semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas pemerintah. Penerapan sistem akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah, . Tidak signifkannya penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah menunjukkan adanya faktor pendukung lain dalam sistem akuntansi yang mendorong meningkatnya akuntabilitas pemerintah. Menurut Wibowo dalam Hidayat (2015) Besar kecilnya penerapan sistem akuntansi tidak memiliki pengaruh yang besar apabila tidak diiringi dengan SDM yang berkualitas dalam melaksanakan dan menggunakan sistem akuntansi tersebut. Pengaruh pengawasan fungsional dan penerapan sistem terhadap akuntabilitas pemerintah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap

akuntabilitas pemerintah. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Misalnya variabel audit kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan lain-lain.

6. REFERENSI

[1] Ardiansyah, Andika. 2010. Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Inspektorat Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung. Http.//www.google.co.id*, diunduh 21 November 2015

[2] Hidayat, Rahmat. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. *Http.//www.google.co.id*, diunduh 19 November 2015.

[3] Kurniawan, Albert. 2014. *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta

[4] Laksana, Puja Agung. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Http.//www.madanari.com*,diunduh 20 November 2015

[5] Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen YKPN.

[6] Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

[7] Nordiawan,Deddy dan Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

[8] Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pasal 4 Ayat (2).

[9] Sanusi, Anwar. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat

[10] Sujarweni,Wiratna V. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

[11] Wulandari, Indah.2013. Pengaruh Pengawasan Fungsional Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Http.//www.fcgi.org.id*, diunduh 20 November 2015.

Fenomena *Flypaper Effect* Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Infrastruktur

Reni Pitriah, Verawaty, Citra Indah Merina
[1,2,3]Universitas Bina Darma Palembang
[1]Email: R.pitriah@yahoo.com
[2]Email: Verawaty_mahyudin@yahoo.com
[3]Email: Citra_ims@yahoo.com

Abstract

This study aimed to test whether Balance Funds and Regional Income influential Against Infrastructure Expenditure and determine whether flypaper effect on the balance funds and local revenues to infrastructure Expenditure in 2011-2013, this study used secondary data quantitatively. Based on the partial test results showed that the DAU, DBH has significant positive effect on Infrastructure Expenditure, however, DAK has significant negative effect on Infrastructure Expenditure, positive PAD is not significant to Infrastructure Expenditure. Based on the test results simultaneously show that Balanced Fund and Local Revenue significant flypaper effect on Infrastructure Expenditure. Flypaper effect occurs in the District and City in the province of South Sumatra. It can be seen that the DAU and DBH was significantly influential in determining the amount of infrastructure Expenditure, so it can be stated that the Fund Balance to act more as a source of funds to carry out infrastructure Expenditure compared to the PAD.

***Keywords**: Flypaper Effect, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Local Government Revenue*

1. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan kegiatan daerah, pemerintah daerah memperoleh dana utama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, DBH dibagi menjadi 2 yaitu BDH pajak dan bukan pajak atau sumber daya.

Di saat alokasi dana perimbangan yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar periode berikutnya dana perimbangan diperoleh tetap porsi nominalnya. Ketika sumber dana yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasionalnya diperoleh lebih banyak dari Dana Perimbangan dari pada Pendapatan Asli Daerah, hal ini mengindikasikan terjadinya *flypaper effect* yaitu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak menggunakan dana transfer dari pada menggunakan kemampuan daerah sendiri.

Fenomena yang terjadi pada umumnya adalah komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Dengan kata lain peranan atau kontribusi penerimaan yang berasal dari dana analisis realisasi APBD tahun 2011 yang di publikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, komposisi realisasi pendapatan Kabupaten/Kota di Indonesia sangat didominasi oleh Dana Perimbangan yaitu sebesar 71% di urutan kedua PAD 20%, dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 9%.

Menurut Halim (2002) dalam Maimunah (2006) bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dengan yang di luar Jawa-Bali. selanjutnya Maimunah (2006) menyebutkan bahwa Pulau Sumatera memiliki karakteristik ekonomi dan geografis

yang berbeda dengan Pulau Jawa. Namun pada penelitian Paujiah (2007), Sugiarthi dan Supadmi (2014) bahwa di Provinsi Bali PAD merupakan variabel yang paling dominan diantara variabel lainnya yang mempengaruhi belanja modal karena PAD daerah Bali sangat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah Bali. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Makasar tahun 2013 mengalami kenaikan, yaitu bertambah Rp 400 milyar lebih atau naik dari Rp 2,09 triliun menjadi Rp 2,2 triliun (Tribunnews.com).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Infrastruktur Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?; dan Apakah terjadi *flypaper effect* pada Dana Perimbangan dan PAD terhadap Belanja Infrastruktur Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Terhadap Belanja Infrastruktur; dan mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* pada dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja infrastruktur.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan pengembangan hipotesis penelitian ini ada empat yaitu pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja infrastruktur, pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja infrastruktur, pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja infrastruktur dan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja infrastruktur. *Flypaper effect* tidak menggunakan hipotesis karena *flypaper effect* merupakan suatu fenomena dimana saat pemerintah merespon belanja lebih banyak menggunakan dana transfer daripada pendapatan asli daerah atau kemampuan daerah tersebut.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENEGMBANGAN HIPOTESIS

Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik didanai dari belanja modal. Hasil penelitian Darwanto dan Yulia (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) dalam Hariyanto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Prakosa (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hasil penelitan Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Menurut Sugiarti dan Supadmi (2014) di Bali, Ardhani (2011) di Jawa Tengah dan Solikin (2009) di Jawa Barat variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Namun hal ini berbeda dengan Fitri (2012) di Riau dan Kusnandar dan Siswantoro (2012) variabel DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Dan masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dalam hal ini belanja infrastruktur termasuk dalam belanja modal Sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian belanja infrastruktur ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Infrastruktur

Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir (2009) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Sementara lembaga SMERU menyatakan bahwa DAK merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal. Berdasarkan Penelitian Melasari (2015) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif sedangkan penelitian Darmayasa dan Suandi (2014), DAK memiliki hubungan yang positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap belanaja modal pada

pemerintah provinsi. Sulistyowati (2012) yang melakukan penelitoian di Jawa dan Bali berbeda dari penelitian sebelumnya, menghasilkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap belanaja modal. Dalam hal ini belanja infrastruktur termasuk dalam belanja modal Sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian belanja infrastruktur ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Infrastruktur

Pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik didanai dari belanja modal. Secara teoritis Pemerintah Daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Wandira, 2013). Hal ini didukung dengan penelitian Melasari (2015), berbeda denngan penelitian Jiwatami (2013) menemukan bukti empiris bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negative terhadap belanja modal. Dari penelitian terdahulu masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dalam hal ini belanja infrastruktur termasuk dalam belanja modal Sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian belanja infrastruktur ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Infrastruktur

Darwanto dan Yulia (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sugiarthi dan Fitri (2013), menunjukkan hasil variabel PAD yang berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Yovita (2011) PAD tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan penelitian Adi (2006) PAD maupun pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap belanja pembangunan. Dari penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsitensi Dalam hal ini belanja infrastruktur termasuk dalam belanja modal Sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian belanja infrastruktur ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H4: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Infrastruktur Menentukan *Flypaper Effect*

Dalam Penelitian Kuncoro (2007), untuk menunjukkan kemunginan terjadi atau tidaknya *flypaper effect*, maka hasil yang diperoleh dari uji simultan haruslah menunjukkan salah satu syarat berikut ini:

1. Nilai koefisien DAU, DAK, DBH lebih besar dari nilai koefisien PAD dan seluruhnya signifikan, atau
2. PAD tidak signifikan.

3. METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini seluruh kabupaten/ kota yang telah membuat dan mempublikasikan laporan Realisasi Anggarannya. Populasi dalam penelitan ini adalah sebanyak 17 Kabupaten/ Kota. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling.*

Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 kabupaten dan kota, penelitian ini memiliki dimensi 3 tahun sehingga jumlah amatan berjumlah 15 kabupaten/kota x 3 tahun = 45 amatan. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir dan Kab. Musi Rawas Utara merupakan kabupaten baru di provinsi sumatera selatan, Kab. Penukal Abab dan Kab. Musi Rawas Utara tidak menjadi salah satu

kriteria sampel karena baru mempublikasikan laporan APBD pada tahun 2013 sedangkan pada kriteria harus mempublikasikan pada tahun 2011-2013, jadi sampel penelitian ini menggunakan 45 amatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2013, yang menyajikan data mengenai Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur.

Data penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan 2011 - 2013, diperoleh dari situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah www.djpk.depkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik www.sumsel.bps.go.id.

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan *sofware* SPSS, untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + e$$

dimana Y adalah Total Belanja Infrastruktur, α konstanta, *b1b2b3b4* koefisien regres DAU adalah Jumlah Dana Alokasi Umum, DAK adalah jumlah Dana Alokasi Khusus,
DBH adalah Jumlah Dana Bagi Hasil, PAD adalah Pendapatan Asli Daerah dan e *eror term.*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik seperti Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi dan penelitian ini telah melakukan pengujian pada Uji Normalitas di atas 0,05 atau 5% dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal, Uji Multikolinearitas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas untuk variabel independen tidak ada yang yang signifikan dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi Oleh karena nilai DW lebih besar dari du 1528 dan kurang dari 4-dl(4-1156 =2844), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya atau tidak terdapat autokolerasi. Dan pada pengujian hipotesis menggunakan Uji Koefisien Determinasi menunjukan nilai adjusted R^2 sebesar 0,801 yang memiliki arti bahwa 80,1% perubahan Belanja Infrastruktur dapat disimpulkan oleh variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah. sedangkan sisanya 19,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model dan Uji Statistik F Berdasarkan tabel nilai F hitung sebesar 45,397 dengan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5 maka hipotesis alternatif diterima.

Setelah melakukan analisis regresi liniear berganda, maka nilai-nilai koefisien regresi tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi yang disusun dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$BI = -50794000971.979 + 0.488\ DAU - 1.023\ DAK + 0.209\ DBH - 151\ PAD + e$$

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Variabel Dana Alokasi Umum
   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,000 < *level of significant (α)* = 0,01. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap belanaja infrastruktur.
2. Variabel Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi 0,040 < *level of significant (α)* = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara DAK terhadap belanja infrastruktur.

3. Variabel Dana Bagi Hasil
   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikan 0,000 < *level of significant (α)* = 0,01. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara DBH terhadap belanja infrastruktur.
4. Variabel Pendapatan Asli Daerah
   Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikan 0,289 > *level of significant (α)* = 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara PAD terhadap Belanaja Infrastruktur.

***Flypaper Effect* pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanaja Infrastruktur**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa DAU, DAK, DBH secara simultan berpengaruh terhadap besarnya Belanja Infrastruktur Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan diketahui melalui nilai koefisien DAU sebesar 0,488, DAK sebesar -1,023, dan DBH sebesar 0,209 dan ketiganya signifikan dengan nilai *sig* yaitu 0,000 untuk DAU, 0,040 untuk DAK, 0,000 untuk DBH, sedangkan analisis ini menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belannja infrastruktur yang dikeluarkan pemerintah daerah. variabel PAD memiliki nilai koefisien sebesar 0,289 dan dinyatakan tidak signifikan karena memiliki signifikasi lebih besar dari 0,05.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prakosa (2004) yang menyatakan terjadinya *flypaper effect* dengan signifikansi pengaruh DAU yang lebih tinggi daripada PAD, serta penelitian Maimunah (2006) yang juga membuktikan terjadinya *flypaper effect* terhadap belanja daerah di Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera.

Secara keseluruhan penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja infrastruktur dipergunakan oleh jumlah dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Permasalahan yang perlu dipecahkan agar tidak terjadi *flypaper effect* adalah sikap ketergantungan Pemerintah Kabupaten dan Kota terhadap Pemerintah Pusat, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting.

5. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Terhadap Belanja Infrastruktur; dan mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* pada dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja infrastruktur pada tahun 2011-2013. Berdasarkan hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Infrastruktur, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Infrastruktur Namun, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Infrastruktur, Pendapatan Asli Daerah positif tidak signifikan terhadap Belanja Infrastruktur. Berdasarkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Infrastruktur.

Flypaper Effect terjadi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat bahwa DAU, DAK dan DBH secara signifikan berpengaruh dalam menentukan jumlah belanja infrastruktur, sehingga dapat dinyatakan bahwa Dana Perimbangan lebih berperan sebagai sumber dana dalam melakukan Belanja Infrastruktur dibandingkan dengan PAD. *Flypaper Effect* membawa implikasi dimana salah satunya akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar dari pada

penerimaan transfer itu sendiri serta kecendrungan untuk menanti bantuan dari pusat di bandingka mengelola sumber daya daerah sendiri.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya berdasarkan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian adalah nilai *Adjusted* R^2 dari model yang di uji dalam penelitian ini sebesar % maka ada % variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi Belanja Infrastruktur, sehingga selanjutnya sebaliknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya seperti lain-lain pendapatan yang sah

6. REFERENSI

[1] Adi, Priyo Hadi. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali.* SNA IX. Padang.

[2] Ardhani. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah).* Skripsi. Universitas Diponegoro, semarang

[3] Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatra Selatan*. Palembang

[4] Darmayasa, I Nyoman dan Suandi, I Ketut. 2014. *Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Pemerintah Provinsi*. SNA XVII Darwanti, Yulia Yustikasari. 2007. *"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal"*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.

[5] Darwanto dan Yulia Yustika Sari. 2007. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap pengalokasian belanja modal.* Simposisum nasional akuntansi X Makasar

[6] Fitri, vella kurniasih. 2012 *Pengaruh Rasio Keuangan Daearh, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanaja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Risu Tahun 2009-2012*. Universitas riau. riau

[7] Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

[8] Harianto dan Adi. 2007. *Hubungan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Surabaya: Jurnal Universitas Petra.

[9] Jiwatami, Sandlhyakalaning. 2013. *Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota Do Indonnesia Periode 2008-2012).* Dimposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25-2013

[10] Kementrian keuangan Republik Indonesia. 2015. *Laporan Perimbangan Keuangan*. www.djpk.depkeu.go.id. Diakses pada 10 November 2015.

[11] Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. 1-29.

[12] Maimunah, Mutiara 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi IX. 1-27.

[13] Melasari. 2015. *Determinan Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Universitas Bina Darma. Palembang.

[14] Paujiah, sri puji. 2007. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal*. Universitas siliwangi.

[15] Prokosa, Kesit B. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Emperik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY).* Jurnal Akuntansi & Auduting Indonesia. Vol 8, No 2. 101-118.

[16] Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah.* Jakarta

[17] Situngkir, Anggiat 2009. *Pengaru Pertumbuhan Ekonomi, Pendaptan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggraan Belanaj Mopdal Padakabupaten/Kota Di Sumatera Utara* Universitas Sumatera Utara.

[18] Sugiartini putu dwi eka rini dan supatmi, nil uh 2014. *Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi*. Universitas Udayana.

[19] Solikin, ikin, 2010. *Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Jawa Barat*.

[20] Sulistyowati, diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Universitas Diponegoro. Semarang

[21] Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Universitas Negeri Semarang. Semarang

[22] www.tribunnews.com. Berita APBD makasar. 18 November 2015 Pukul 20.00 WIB

ANALISIS SISTEM PEMBELIAN BAHAN BAKU TERHADAP PROSES PRODUKSI PADA CV. SUMBER TERANG MULIA

Resti Wulan sari[1], Poppy Indriani[2], Andrian Noviardy[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
wulansari.resti43@gmail.com[1]
poppy indriani@binadarma.ac.id[2]
andrian.noviardy@binadarma.ac.id[3]

Abstract

Destination of research to know implement accounting purchase system of raw material performed by CV. SUMBER TERANG MULIA and to know how is system relationship and raw material purchase on production process. Collecting file did by observation, interview and documentation. Analysis technical file utilizes descriptip kualitatif. result of research shows that purchase accoubting system raw material on CV. SUMBER TERANG MULIA PALEMBANG on generally was done with good and with invovle various fuction with task and responsibilityeach and has been equipped with document that can be accountable, But thare are weaknesses in production department by undertaking purchase request that, should have done by warehouse department, finance department and accounting department has been one which mean the fuction operational (payment). and Fuction of registry into one and system purchase is done by contract with supplier has been determined. The contract includes the type of good, Quality of goods,and goods arrival schedule it will be inflicting a problem in corporate, if production activity increases and stock of raw material in warehouse less, while raw material will be transferred on schedule has been determined on the contract and this will hamper production process which can be disadvantage corporate.

Keywords*: accounting system, raw materials*

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan berkembangnya suatu perusahaan, maka masalah-masalah yang timbul juga akan semakin banyak dan kompleks, selain itu juga perusahaan akan menghadapi persaingan yang semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha. Situasi inilah yang menuntut pihak perusahaan agar dapat bersikap lebih aktif dan produktif dalam mengelola usahanya sehingga perusahaan bukan hanya mampu bertahan saja tetapi juga mampu untuk menyeimbangkan diri dalam lingkungan usahanya. Demikian halnya dengan industri tangki air yang ada di Palembang, salah satunya adalah CV. Sumber Terang Mulia Fiberglass, perusahaan yang memproses bahan baku tepung plastik menjadi barang jadi yaitu perusahaan tangki air yang terletak di Kenten Palembang, pembelian bahan baku yang berupa tepung plastik, merupakan langkah aktivitas operasi perusahaan secara keseluruhan yaitu: pembelian-proses produksi-penjualan.

Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi pembelian digunakan perusahaan untuk pengadaan bahan baku dan bahan pembantu. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pembelian adalah, prosedur permintaan pembelian, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang, dan prosedur distribusi pembelian. Pembelian bahan baku merupakan proses tetap yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan manufaktur.

Kegagalan dalam aktivitas pembelian yang menyangkut masalah harga. Kuantitas dan kualitas mempunyai peranan terhadap aktivitas lainnya, misalnya kualitas bahan baku yang salah akan mengakibatkan kualitas hasil produksi juga akan rendah dan hal ini mempunyai dampak yang luas terhadap aktivitas penjualan. Demikian pula apabila nilai pembelian salah dalam arti perolehan cukup tinggi sebagai akibat adanya manipulasi dan lain –lain, akan mengakibatkan harga pokok penjualan

akan tinggi sehingga tidak dapat bersaing dalam pemasaran. Dalam hal –hal seperti inilah peranan pengendalian pembelian bahan baku sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan, yaitu untuk mencegah dan meminimalisasikan kegagalan dalam pembelian bahan baku. Salah satu cara untuk menunjang kelancaran proses produksi adalah dengan menghindari kesalahan yang dapat terjadi waktu pembelian bahan baku, yaitu dengan adanya pengendalian pembelian bahan baku yang memadai.

Pengendalian bahan baku harus mendapat perhatian yang besar dari pihak manajemen perusahaan, karena pengendalian atas pembelian bahan baku yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan. Melalui pengendalian pembelian bahan baku yang baik maka dapat mendukung proses produksi agar dapat berjalan dengan lancar

Selain itu perlu dikemukakan juga bahwa dengan adanya pembelian bahan baku yang melalui jaringan prosedur yang saling berkaitan, bahan baku yang dibeli bisa memenuhi syarat, datang tepat waktu, dan dengan harga yang sesuai dengan rencana. Dengan demikian, prosedur ini bisa mendukung pencapaian produk yang berkualitas. Setiap sistem pembelian mempunyai kelebihan maupun kelemahan. Demikian juga dengan sistem pembelian di CV. Sumber Terang Mulia. Oleh karena itu, perlu diteliti kelebihan dan kelemahan untuk selanjutnya bisa didesain sistem pembelian yang lebih sempurna. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik ini sebagai tulisan ilmiah dengan judul " Analisis Atas Sistem Pembelian Bahan Baku Terhadap Proses Produksi Pada CV. Sumber Terang Mulia Palembang."

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Sistem dan Prosedur

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2014 : 5). Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan,dan laporan yang terdiri drai jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2014 : 3). Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2014 : 5).

2.2 Pembelian

Pembelian adalah usaha pengadaan barang-barang untuk perusahaan. Dalam perusahaan dagang pembelian dilakukan dengan dijual kembali tanpa perubahan bentuk barang, sedangkan pada perusahaan manufaktur pembelian dilakukan dengan merubah kembali dengan merubah bentuk. Pembelian (purchases) adalah harga pembelian (harga pokok) barang dagang yang diperoleh perusahaan selama periode tetentu (Aliminsyah dan Padji, 2010 : 450).

2.3 Bahan Baku

Bahan baku adalah bahan yang menempel menjadi satu dengan barang jadi yang mempunyai nilai relatif lebih tinggi dibanding nilai bahan yang lain dalam pembuatan suatu barang jadi (Hanggana, 2010:14).

2.4 Sistem dan Prosedur

2.4.1 Sistem dan prosedur yang bersangkutan dengan pembelian bahan baku.

Pembelian bahan baku merupakan kegiatan pengadaan barang yang diperlukan bagi operasional perusahaan. Pembelian bahan baku dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit.

Menurut buku sistem akuntansi karangan Mulyadi (2014) elemen pengendalian intern dalam prosedur pembelian barang yaitu :

2.4.1.1 Fungsi yang Terkait

Fungsi yang terkait dalam pembelian bahan baku secara kredit adalah :

a) Fungsi gudang.
b) Fungsi pembelian.
d) Fungsi Akuntansi

2.4.1.2 Dokumen

Pembelian bahan baku dimulai dari adanya kebutuhan atassuatu bahan sampai bahan yang dibeli tersebut diterima secaramemuaskan oleh pihak pembeli. Menurut dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian adalah :

a) Surat Permintaan Pembeliaan.
b) Surat Permintaan Penawaran Harga.
c) Surat Order Pembelian.
d) Laporan Penerimaan Barang.
e) Surat Perubahan Order
f) Bukti Kas Keluar.

2.4.1.3 Catatan Akuntansi

Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah sebagai berikut :, menurut Mulyadi (2010: 308).

a. Bukti Kas Keluar (Voucher Register)
b. Jurnal Pembelian
c. Kartu Utang
d. Kartu Persediaan

2.4.1.4 Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Pembelian

Menurut Mulyadi (2014 : 301) jaringan prosedur yang membentuk system pembelian meliputi :

a. Prosedur Permintaan Pembelian.
b.Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilikan pemasok.
c. Prosedur order pembelian.
d. Prosedur penerimaan barang.
e. Prosedur pencatatan utang.
f. Prosedur distribusi pembelian.

2.5 Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Intern menurut IAPI dikutip oleh Agoes (2011:319) dalam bukunya Auditing bahwa pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efesiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.6 Proses Produksi

Proses Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Menurut Ahyari (2010:78), Proses produksi adalah suatu cara, metode ataupun teknik menambah keguanaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data yang digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa dokumentasi, observasi dan wawancara dan data sekunder berupa data CV. Sumber Terang Mulia Palembang khususnya pada kegiatan tahun 2015. Data dikumpulkan dari instansi terkait dan buku/literature yang relevan.

3.4 *Teknik Analisis Data*

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskritif kualitatif. Menurut Sanusi (2013 : 115) deskritif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis dan menilai semua data yang relevan dan fakta yang diperoleh dari objek yang dipilih serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum kemudian dari hasil analisis tersebut penulis mencoba menarik kesimpulan yang mewakili masalah-masalah yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

CV. Sumber Terang Mulia merupakan perusahaan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Oleh karena itu pembelian bahan baku merupakan unsur penting dalam proses produksi, karena tanpa bahan baku perusahaan tidak dapat melakukan proses produksi.Sistem pembelian yang terdapat pada CV. Sumber Terang Mulia.

1. Fungsi yang terkait dalam sistem pembelian bahan baku pada CV. Sumber Terang Mulia adalah sebagai berikut ;
   a. Fungsi Permintaan Barang
   b. Fungsi Pembelian
   c. Fungsi Penerimaan
   d. Fungsi Pembuatan Tanda Terima Barang.
   e. Fungsi Pembuatan Laporan Penerimaan Barang
   f. Fungsi Akuntansi
   g. Fungsi Pengajuan Rencana Bayar
2. Dokumen yang digunakan dalam pembelian tepung plastik pada CV. Sumber Terang Mulia adalah :
   a. Surat Rencana Kebutuhan Bahan Baku
   b. Surat Permintaan Penawaran Harga
   c. Surat Kontrak Pembelian
   d. Faktur (Nota)
   e. Surat Jalan
   f. Laporan harian Penerimaan atau Pengeluaran Barang
   g. Tanda Terima Barang
   h. Laporan Penerimaan Barang
   i. Bukti Pengeluaran
3. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pembelian tepung plastik pada CV. Sumber Terang Mulia adalah sebagai berikut :
   a. Catatan Persediaan Bahan Baku
   b. Kartu Persediaan
   c. Kartu Utang.
   d. Buku Jurnal (LPB Pembelian)
   e. Kartu Buku Besar Buku Utang
   f. Buku Besar Buku Persediaan
   g. Buku Jurnal (Bukti Pengeluaran)
   h. Kartu Stock Bahan

   4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pembelian bahan baku CV. Sumber Terang Mulia dapat dijabarkan sebagai berikut :
   a. Prosedur Permintaan Pembelian
   b. Prosedur Permintaan Penawaran Harga dan Pemilihan Pemasok
   c. Prosedur Pesanan Pembelian Secara Kontrak

d. Prosedur Penerimaan Barang
e. Prosedur Pembuatan Tanda Terima Barang
f. Prosedur Pembuatan Laporan Penerimaan Barang
g. Prosedur Akuntansi
h. Prosedur Pengajuan Rencana Bayar

4.2 Pembahasan

Fungsi yang Terkait

Pada CV. Sumber Terang Mulia terdapat fungsi pembuatan Tanda Terima Barang, yang dibuat setelah barang diterima dan dokumen penyertaan telah distempel terima oleh fungsi penerimaan. Selain itu juga terdapat fungsi pembuatan Laporan Penerimaan Barang sebagai lanjutan dari pembuatan Tanda Terima Barang. Keberadaan fungsi pembuatan Tanda Terima Barang dirasa memperpanjang aliran sistem pembelian bahan baku di CV. Sumber Terang Mulia.

Pada CV. Sumber Terang Mulia Yang melakukan permintaan pembelian barang adalah bagian produksi, yang seharusnya dilakukan oleh gudang. Hal ini kurang baik karena yang mengetahui jumlah stock barang adalah bagian gudang, apakah masih tersedia atau sudah mencapai titik pesanan kembali.

Pada CV. Sumber Terang Mulia bagian keuangan dan akuntansi jadi satu, yang berarti fungsi operasional (pembayaran) dan fungsi pencatatan jadi satu. Hal ini kurang baik karena dapat menimbulkan tindakan penyelewengan seperti penggelapan uang perusahaan.

Dokumen yang Digunakan

Pada CV. Sumber Terang Mulia, dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian bahan baku adalah surat rencana kebutuhan bahan, surat permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat kontrak pembelian, faktur (nota), surat jalan, laporan harian penerimaan atau pengeluaran barang, tanda terima barang, laporan penerimaan barang, dan bukti pengeluaran.

Pada kasus ini, dokumen yang digunakan pada CV. Sumber Terang Mulia sudah baik. Pada CV. Sumber Terang Mulia, digunakan dokumen yang berotorisasi dan bernomor urut tercetak, sehingga akan mempermudah untuk pertanggungjawaban dan dapat mewujudkan praktik yang sehat. Selain itu terdapat juga dokumen berupa surat kontrak pembelian dengan pemasok, yang artinya apabila terjadi penyelewengan oleh pemasok ataupun sebaliknya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena terdapat perjanjian hitam diatas putih.

Catatan Akuntansi yang Digunakan

Pada CV. Sumber Terang Mulia, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pembelian bahan baku adalah catatan persediaan bahan baku, kartu persediaan, kartu utang, buku jurnal (LPB pembelian), kartu buku besar buku utang, kartu buku besar buku persediaan bahan baku, buku jurnal (bukti pengeluaran), dan kartu stock bahan. Catatan akuntansi yang digunakan oleh CV. Sumber Terang Mulia sudah baik. Terdapat catatan persediaan bahan baku berupa kartu persediaan yang mencantumkan daftar penerimaan atau pengeluaran bahan baku setiap harinya. Hal ini mempermudah perusahaan dalam mengontrol penggunaan bahan baku.

Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem

Pada CV. Sumber Terang Mulia jaringan prosedur yang membentuk system pembelian bahan baku adalah prosedur permintaan pembelian, prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, prosedur pengujian sample, prosedur pesanan pembelian secara kontrak, prosedur

penerimaan barang, prosedur pembuatan tanda terima barang, prosedur pembuatan laporan penerimaan barang, prosedur akuntansi dan prosedur pengajuan rencana bayar.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem pembelian pada CV. Sumber Terang Mulia kurang baik. Dalam kasus pada CV. Sumber Terang Mulia, pesanan pembelian dilakukan secara kontrak dengan pemasok yang telah ditentukan. Dalam kontrak tersebut mencakup jenis barang, kuantitas barang, dan jadwal kedatangan barang. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam perusahaan apabila kegiatan produksi meningkat dan stock
bahan baku kurang, sedangkan bahan baku baru akan dikirim sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pengendalian Intern

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
   Adanya pemisahan fungsi antara fungsi operasional, fungsi penyimpanan, dan fungsi pencatatan. Hal ini dapat mempermudah pengecekan intern dalam pelaksanaan transaksi pembelian, sehingga kekayaan perusahaan terjamin keamanannya dan data akuntansi terjamin ketelitian dan kendalannya.
2. Otorisasi atau wewenang dan prosedur yang tepat
   Setiap transaksi pembelian yang terjadi diotorisasi oleh fungsi yang berwenang dengan transaksi tersebut. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan manager yang memiliki wewenang untuk itu, pada dokumen sumber atau dokumen pendukung.
3. Praktik yang sehat
   Tanda terima barang dan laporan penerimaan barang yang bernomor urut tercetak dan pemeriksaan barang yang dating oleh bagian fungsi dengan menghitung kuantitas dan melihat secara langsung serta membandingkannya dengan faktur pembelian.
4. Karyawan yang cakap
   Karyawan pada CV. Sumber Terang Mulia yang menangani transaksi pembelian bahan baku rata-rata sudah cukup lama bekerja pada perusahaan ini dan berasal dari lulusan yang sesuai dengan konsentrasi bagiannya sehingga sudah berkompeten untuk melaksanakan prosedur-prosedur pembelian bahan baku yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan untuk karyawan yang lain, pada saat seleksi penerimaan karyawan dilakukan tes praktek dan tes wawancara terlebih dahulu untuk menentukan posisi pekerjaannya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulakan bahwa CV. Sumber Terang Mulia melakukan sistem pembelian secara kontrak dengan pemasok yang telah ditentukan. Dalam kontrak tersebut mencakup jenis barang, kuantitas barang, dan jadwal kedatangan barang. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam perusahaan apabila kegiatan produksi meningkat dan stock bahan baku kurang, sedangkan bahan baku baru akan dikirim sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak. Dan hal ini akan menghambat proses produksi yang dapat merugikan perusahaan serta CV. Sumber Terang Mulia bagian produksi melakukan permintaan pembelian yang seharusnya dilakukan bagian gudang, bagian keuangan dan bagian akuntansi jadi satu yang berarti fungsi operasional (pembayaran) dan fungsi pencatatan juga jadi satu.

6. REFERENSI

[1] Agoes, 2012.Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh. Akuntan Publik", Jilid 1, Edisi Keempat, Salemba Empat
[2] Agus, Suprijono. 2010. Cooperative Learning. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

[3] Ahyari, 2010 Manajemen Produksi II. Edisi Ketiga, Badan. Penerbit. FE,Yogyakarta
[4] Aliminsyah dan Padji, 2010 Kamus Istilah Manajemen, Jakarta: CV Yrama Widya
[5] Anwar Sanusi, 2011, Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta
[6] Brown dkk, 2010 Pengertian Pembelian KNKG., Jakarta: Elex Media Komputindo
[7] Hall, James A, 2011, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Empat,Penerbit Salemba Empat, Jakarta
[8] Hanggana, Sri. 2010 Akuntansi Biaya – Teori dan aplikasi. Cetakan 1. Surakarta : LPP UNS dan UNS Press.
[9] Harvarindo, 2010 Teori Praktik Auditing, Jakarta
[10] http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-produksi-faktor-faktor.html
[11] Mardi, 2011 Sistem Informasi Akuntansi, Penerbit: Ghalia Indonesia
[12] Mulyadi, 2014 *Sistem Akuntansi* , Jakarta: Salemba Empat
[13] Nora Dwi Madona.2010. *Evaluasi Sistem Pembelian Bahan Baku PT. Kusuma Putra Santoso (Kab. Karanganyar*.
[14] Irma Mardhiyah Arif.2010. *Analisis Sistem dan Prosedur Pembelian Bahan Baku Perusahaan Tenun Pelangi (Lawang - Malang).*
[15] Sugiarti. 2010. *Sistem Akuntansi Pembelian Bahan Baku Pada CV. Aneka Ilmu Semarang.*

PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY* TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA

Ricky Arbiansyah[1] Siti Nurhayati Nafsiah[2] Jaka Darmawan[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Bina Darma
Rickyarbiansyah5@gmail.com[1]
Siti_nurhayati@binadarma.ac.id[2]
Jakadarmawan@yahoo.co.id[3]

ABSTRACT

The objective of research is to explain the influence of Corporate Social Responbility (CSR) on company performance as represented by Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE). Research type is explantory research with quantitative approach. The populasi of research is 35 people from company and community. Sample is 35 people from company and community. Analysis technique is simple linear regression. In the practice, statistic test is preceded by classical assumption test. Result of research indicates that CSR has significant influence on ROA and ROE.

Keyword: *Corporate Social Responbility, Company Performance, Return on Asset, Return on Equity.*

I. PENDAHULUAN

Corporate Social Responbility saat ini menjadi isu menarik, bahkan marak diterapkan oleh berbagai perusahaan dibelahan dunia. Sekarang CSR dinyatakan lebih tegas lagi dalam undang-undang perseroan terbatas (UUPT) pasal 74 No. 40 tahun 2007. Menurut Prastowo (2011:101) CSR merupakan tanggung jawab sebuah organisasi yang atas dampak-dampak dari keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan, kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

PT. Asuransi Kredit Indonesia adalah satu perusahaan yang bergerak dibidang Jasa. Perusahaan ini melakukan kegiatan CSR berupa Biaya Pelatihan, Perumahan, Kendaraan, Bonus dan insentive, Bina lingkungan Peningkatan pendidikan, Pemberian bea siswa. di mana kegiatan tersebut memberikan beberapa fasilitas yang diberikan kepada karyawan dan masyarakat. awalnya kegiatan ini bersifat filantropik atau yang bersifat spontanitas, akan tetapi kegiatan ini berubah menjadi *strategic philanthropy* yang dikaitkan dengan strategi perusahaan dan dikelola secara professional. Perusahaan memperoleh manfaat dalam kegiatan CSR ini, terutama yang berkaitan dengan manajemen reputasi, pendapatan bagi perusahaan dan mempengaruhi kinerja suatu perusahaan tersebut.

Kegiatan CSR selain memberikan manfaat kepada karyawan dan masyarakat. juga diharapkan mampu memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan yang dapat dilihat melalui kinerja suatu perusahaan. menurut Nurlaila (2010:71) performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran daru suatu proses. Kinerja perusahaan merupakan penilaian tingkat efisiensi dan produktivitas yang dilakukan secara berkala atas dasar laporan manajemen dan laporan keuangan yang merupakan pencerminan prestasi yang dicapai perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakanan rasio keuangan. Dimana dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari ROE dan ROA. Untuk mengukur sejauh mana pengaruh CSR terhadap kinerja

perusahaan dalam suatu perusahaan, dan apakah dari kegiatan CSR tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Di mana kinerja perusahaan mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba, meningkatkan reputasi perusahaan, tingkat kemampuan menciptakan pendapatan, dan dari sisi lain perusahaan sudah melalukan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat yang telah diatur berdasarkan undang-undang.

PT. Asuransi Kredit Indonesia Perusahaan adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi/ penjaminan, dimana peranan dari perusahaan ini tidak dapat dipisahkan dari pembangunan negara. Adapun kegiatan CSR yang dilakukan ini tentunya sangat membantu perusahaan dan lingkungan untuk saling bekerja sama dalam menghasilkan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, dan dari kegiatan csr tersebut tentu saja akan berdampak terhadap perusahaandan lingkungan sehingga akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **"Pengaruh Penerapan *Corporate Sosial Responbility* Terhadap Kinerja Perusahaan pada PT. Asuransi Kredit Indonesia"**

II. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Corporate Social Responbility

Menurut Rachman, (2011:37) "*Corporate Social Responbility* adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan yang saat ini menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, di samping isu kualitas (ISO 9000) dan lingkungan (ISO 14000)". Tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya untuk memenuhi hukum dan aturan yang berlaku, tapi diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna bagi pihak-pihak yang yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan atau kepada stakeholders. Kegiatan CSR selain diharapkan mampu memberikan manfaat kepada stakeholder juga diharapkan dapet memberikan manfaat kepada perusahaan itu sendiri. Manfaat yang diharapkan dengan adanya CSR yaitu mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra mereka perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, meredukasi risiko bisnis perusahaan, Melebarkan askses sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas, meredukasi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

Dalam penelitian ini terdapat dua tipe variable yang digunakan dalam penelitan ini, yaitu variabel independent (X) dan dependent (Y). variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Dalam penelitian ini Penghitungan CSR dilakukan dengna menggunakan variabel Dummy yaitu dengan menggunakan pendekatan dikotomi, di mana setiap item CSR dalam instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa dalam cahyono 2011:35). Rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut:

$$CSDI = \frac{\Sigma xij}{nj}$$

Ket:

CSDI = Corporate social responbility Disclosure index perusahaan

Nj = Jumlah Item untuk perusahaan j, n=79

Xij = 1: jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan.

Dengan demkian, 0 < CSDIt < 1

2. Kinerja Perusahaan

Menurut Sedarmayanti (2011:260) Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang bearti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (Dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Teknik analisis yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah melalui analisis rasio, diantaranya:

a. Rasio Profitabilitas

Rasio *profitabilitas* yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba rugi (Murhadi, 2013:63). Untuk mencapai laba dan membayar biaya overhad pabrik, maupun untuk membeli aktiva tetap. Oleh sebab itu untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan dilakukan dengan cara memperbandingkan antara laba dengan modal, rasio-rasio yang digunakan adalah:

1. Return On Equity

Return On Equity merupakan suatu pengukuran dari pengahasilan (Income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 2008:305)

Return On Equity dapat dihitung dengan formula:

$$Return\ On\ Equity = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Ekuitas}$$

2. Return On Asset

Return On Asset merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis

$$Return\ On\ Asset = \frac{Laba\ bersih}{Total\ Aktiva}$$

III. METODE PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Kredit Indonesia yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1251 A-B Rt. 16 Rw. 05 Kel. Kuto Batu Kec. Ilir Timur. Telpon 0711-5625348 Fax 0711 563534.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Operasional Variabel

Menurut Sanusi (2011:49) variabel benar-benar memiliki makna strategis dalam penelitian sehingga sangatlah tidak mungkin sebuah penelitian dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengenali variabel penelitian tersebut secara benar. Operasional yang dilakukan variabel independent (CSR) dan dependent (Kinerja Perusahaan).

3, Sumber dan Teknik Pengumpulan data

Menurut Sanusi (2011:104) ada dua sumber pengumpulan data yaitu:

1. Data primer yaitu dengan cara Observasi dan Kuisioner

2. Sekunder berupa laporan keuangan PT. Asuransi Kredit Indonesia.

3.1 Populasi penelitian

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (sanusi 2011:87). Populasi penelitian ini terdiri dari karyawan dan masyarakat perusahaan yang terdiri dari 35 orang.

3.2 sampel Penelitian

Menurut sanusi (2011:87) sampel merupakan bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih. Sampel penelitian ini diambil dari seluruh populasi yang terdiri dari karyawan dan masyarakat di lingkungan perusahaan yang berjumlah 35 orang.

4. Teknik Analisis data

Menurut sanusi (2011:115) mendeskripsikan teknis analisis data apa yang akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan, termasuk pengujinya. Dalam melakukan pengolahan data, peneliti akan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Teknik analisis kuantitatif yaitu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan yang dinyatakan dalam bentuk angka, yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran.

5. Uji Asumsi Klasik

Tujuam pengujian ini adalah agar asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linier dapat terpenuhi sehingga dapat menghasilkan penduga yang tidak biasa.

1. Uji Normalitas

   Uji normalitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak (ghozali, 2013). Uji Normalitas dilakukan menggunakan analisis uji statistic dengan kolmogorov-smirnov Z (1-Sample K-S).
2. Uji Autokorelasi

   Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (Sebelumnya) (ghozali, 2012). Jika terdapat korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Sementara model regresi baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan *uji Autokorelasi Durbin watson.*
3. Uji Heteroskedastisitas

   Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Regresi yang baik adalah yang tidak heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

6. Analisis Regresi Sederhana

Menurut Sugiyono (2012:270) Analisis regresi sederhana adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan linier antara satu variabel predictor (independent x) dan satu variabel respon (dependent, Y) hasil dari analisi korelasi hanya untuk mengetahui seberapa besar tingkat keeratan / kekuatan hubungan linier (pengaruh) antara variabel X dan Variabel Y. persamaan umum regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Ket:

Y = Kinerja Perusahaan

a = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X=0

b = Arah Koefisien regresi, yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X bila (+) maka arah garis akan naik, dan bila (-) maka nilai garis akan turun

X = CSR (Variabel terikat/ variabel yang mempengaruhi)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul, secara khusus, statistik ini digunakan untuk menunjukan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan nilai deviasi standar dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang dianalisis antara lain CSR sebagai variable independen dan kinerja perusahaan berupa ROE dan ROA sebagai variabel dependen.

Hasil deskriptif variabel penelitan CSR dan kinerja perusahaan berupa ROE dan ROA terangkum pada table sebagai berikut

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
CSR	35	14	34	824	23.54	4.937	24.373
ROE	35	3	9	190	5.43	1.852	3.429
ROA	35	3	10	269	7.69	1.967	3.869
Valid N (listwise)	35						

Sumber: Data yang diolah

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode kolmogorov- smirnov. Uji ini digunakan untuk mengetahui distribusi normal, residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Hasil untuk uji kolmogorov smirnov dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Kolmogorov-smirnov

Variabel	Sig	Keterangan
CSR Terhadap ROE	0,153	Distribusi Normal
CSR Terhadap ROA	0,225	Distribusi Normal

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan pengujian kolmogorov –smirnov pada tabel tersebut, hasil analisis variabel CSR terhadap ROE dan ROA didapatkan nilai signifikasi lebih besar dari pada α = 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi

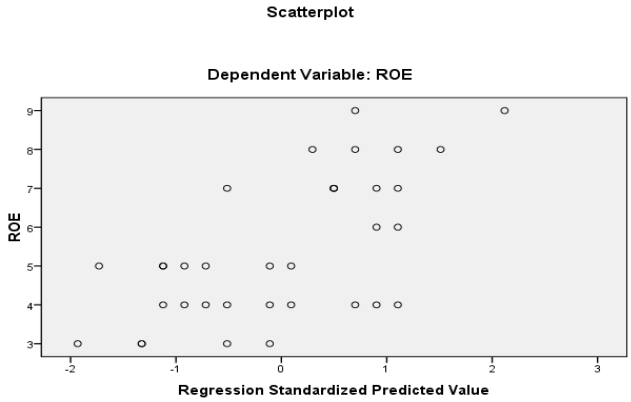
2, Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistic Durbin Watson. Hasil Uji Durbin Watson menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada semua model. Nilai durbin Watson variabel CSR terhadap ROE sebesar 1.832, variabel CSR terhadap ROA sebesar 2.236. pada semua model regresi nilai durbin Watson berada di antara nilai du dan 4-du (dU<d<dU). Sehingga diputuskan tidak terjadi autokorelasi.

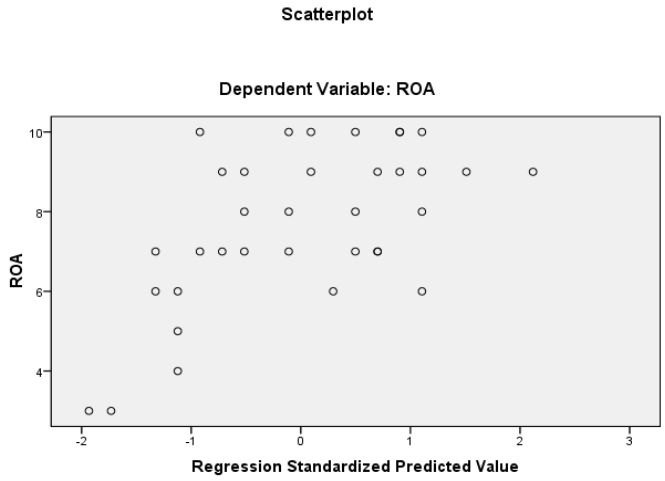
3, Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji scatterplot yaitu salah satu alat untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Scatterplot CSR terhadap ROE



Gambar 2 Scatterplot CSR terhadap ROA



b, Persamaan Regresi Linier

Penelitian ini menggunakn regresi linier sederhana. Berikut ini hasil uji regresi linier sederhana:

1. Pengaruh CSR terhadap ROE

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi pengaruh CSR terhadap ROE

Variabel Dependen	Variabel Independent	Koef B
Kinerja perusahaan (ROE)	CSR	0.335
Konstanta = 0.245		

Sumber: Data yang diolah

Dari hasil analisis pada tabel 3 di atas maka didapatlah susunan model regresi sebagai berikut:

ROE= 0.245 + 0.335 CSR + e

Diketahui nilai konstanta sebesar 0.245 menunjukkan bahwa apabila variabel CSR tidak mengalami penurunan atau 0, maka ROE akan bernilai konstanta 0.245. Koef β = 0.335, artinya bahwa setiap pertambahan 1% pada CSR, maka akan menaikka ROE sebesar 0.335%.

2. Pengaruh CSR terhadap ROA

Tabel 4. Hasil Analisis regresi pengaruh CSR terhadap ROA

Variabel Dependen	Variabel Independent	Koef. B
ROA	CSR	2,061
Konstanta = 0.239		

Sumber: Data yang diolah

Dari hasil analisis pada tabel 3 di atas maka didapatlah susunan model regresi sebagai berikut:

ROE= 0.245 + 0.335 CSR + e

Diketahui nilai konstanta sebesar 0.239 menunjukkan bahwa apabila variabel CSR tidak mengalami penurunan atau 0, maka ROE akan bernilai konstanta 0.239. Koef β = 2,061, artinya bahwa setiap pertambahan 1% pada CSR, maka akan menaikka ROE sebesar 2.061%.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan pengujian determinasi adalah untuk menguji tingkat keeratan variabel dependen dan independen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihati di tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R^2
CSR terhadap ROE	0.653	0.426
CSR terhadap ROA	0.600	0.360

Sumber: Data yang diolah

Dari hasil analisis koefisien determinasi pada tabel di atas, diperoleh nilai determinasi (R^2) pada model regresi CSR terhadap ROE sebesar 0.426, hal ini menjelaskan pengaruh antara variabel X dan Y sebesar 42,6% dan sisanya dijelaskan di variabel lain yang tidak diamati pada penelitian ini. Kemudian nilai determinasi (R^2) pada model regresi CSR terhadap ROA sebesar 0.360, hal ini menjelaskan pengaruh

antara variabel X dan Y sebesar 36% dan sisanya dijelaskan di variabel lain yang tidak diamati pada penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan (ROE)

Berdasarkan hasil pengujian CSR terhadap ROE dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas yang menggunakan kolmogorov smirnov yaitu data yang olah bersifat normal karena nilai sig 0,153 0,225. Yang bearti apabila nilai sig lebih besar dari nilai α = 0,005 maka data dinyatakan normal. Setelah itu melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin Watson dengan ketentuan dU < d < 4-dU. Pengujian yang baik tidak terdapat autokorelasi dan pada pengujian ini tidak terdapat autokorelasi kemudian pengujian yang selanjutnya menggunakan uji heteroskesdastisitas yaitu pengujian yang menggunakan scatterplot yang analisisnya menurut sujarweni (2015:187) Analisisnya adalah: titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sektira 0, titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang hanya di atas dan di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

penyebaran titik-titk data tidak berpola. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji regresi sederhana di mana nilai yang didapat pada pengujian tersebut menemukan ada pengaruh yang signifikan antara CSR dan ROE. variabel CSR terhadap memiliki nilai determinasi (R^2) sebesar 42,6% dapat disimpulkan bahwa secara parsial CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

2. Pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan (ROA)

Berdasarkan hasil pengujian CSR terhadap ROE dengan menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas yang menggunakan kolmogorov smirnov yaitu data yang olah bersifat normal karena nilai sig 0,225. Yang bearti apabila nilai sig lebih besar dari nilai α = 0,005 maka data dinyatakan normal. Setelah itu melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin Watson dengan ketentuan dU < d < 4-dU. Pengujian yang baik tidak terdapat autokorelasi dan pada pengujian ini tidak terdapat autokorelasi kemudian pengujian yang selanjutnya menggunakan uji heteroskesdastisitas yaitu pengujian yang menggunakan scatterplot yang analisisnya menurut sujarweni (2015:187) Analisisnya adalah: titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sektira 0, titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang hanya di atas dan di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

penyebaran titik-titk data tidak berpola. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan uji regresi sederhana di mana nilai yang didapat pada pengujian tersebut menemukan ada pengaruh yang signifikan antara CSR dan ROA. variabel CSR terhadap memiliki nilai determinasi (R^2) sebesar 36% dapat disimpulkan bahwa secara parsial CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan yang terdiri dari ROE dan ROA adalah sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responbility* berpengaruh terhadap kinerja dalam suatu perusahaan. yang dapat dibuktikan melalui ROE dan ROA. *Corporate social responbility* merupakan identifikasi atas kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan,

selain meningkatkan kinerja perusahaan. Kegiatan Corporate Social Responbility juga secara tidak langsung dapat meningkatkan reputasi perusahaan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan, selain itu juga perusahaan telah melaksanakan kewajiban sosialnya yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas (UUPT) pasal 74 No. 40 tahun 2007.

2. Penelitian ini membuktikan bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROE, dengan persentase 42,6%. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan, akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Penelitian ini membuktikan bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA, dengan persentase 36% dan lebih tinggi dari persentase ROE. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa semakin banyak pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan, akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan.

2, Saran

Adapun saran yang bisa peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi praktisi perusahaan, penelitian ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan khusus untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang terdiri dari ROE dan ROA. Akan tetapi ada baiknya beberapa item rasio juga diungkapkan agar perusahaan dapat mengukur sejauh mana tingkat dari kinerja perusahaan tersebut.
2. Bagi dunia usaha, dengan dilakukannya penelitian mengenai penerapan Corporate Social Responbility tidak menjadi sebuah beban dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungannya. Akan tetapi, penerapan *corporate social responbility* dapat menjadi sebuah strategi perusahaan untuk mecapai visi dan misi serta keberlangsungan usaha (sustainability) perusahaan di masa yang akan datang.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang periode penelitian yang lebih lama agar dapat memprediksi hasil penelitian jangka panjang dan menggunakan variabel yang lebih luas dan variatif lagi dan peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis pengungkapan CSR yang lebih mendalam dari sumber-sumber yang lebih lengkap.

VI. DAFTAR PUSTAKA

[1] Mardikanto, Totok. 2014. CSR *(Corporate Social Responbility)* (Tanggungjawab sosial Perusahaan Korporasi). Bandung: Alfabeta

[2] Murhadi. 2013. Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi Valuasi Saham. Jakarta: Salemba Empat

[3] Sanusi. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba 4.

[4] Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG

Rifita Mayasari[1], Henni Indriayani[2], Rolia Wahasusmiah[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina darma
rifita_mayasari@yahoo.com[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
rolia.wahasusmiah@binadarma.ac.id[3]

ABSTRACT

The aims of this research were to analyze the effect of the free cash flow, ownership structure, dividend policy, asset structure, and profitability of the debt policy at a property and real estate on the BEI.This research was classified as quantitative study. The population of this research was property and real estate company registered on the stock exchange in 2010 until 2014. Total sample were 4 companies. The data collected using purposive sampling method. The data was obtained from the www.idx.co.id.The result of research show that free cash flow, managerial ownership, dividend policy, asset strucyure, and profitability hasn't significant effect on debt policy, institusional ownership significant has effet on debt policy.

Keywords: *free cash flow, managerial ownership, institusional ownership, dividend policy, asset structure, profitability, and debt policy.*

1. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan memerlukan dana yang besar untuk dapat tumbuh dan berkembang. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber internal ataupun ekstenal. Sumber dana internal berasal dari laba ditahan sedangkan sumber dana eksternal berasal dari para kreditur dalam bentuk hutang. Hutang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik berasal dari sumber pinjaman, perbankan, *leasing*, penjualan obligasi dan sejenisnya Fahmi (2014:153). Besar kecilnya hutang yang akan digunakan untuk mendanai perusahaan diputuskan oleh pihak perusahaan melalui kebijakan hutang.

Kieso dalam Bansaleng, Parengkuan dan Inovve (2014) mengemukakan bahwa kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil perusahaan untuk melakukan pembiayaan melalui hutang. Kebijakan hutang dapat diputuskan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya dapat dilihat dari besar kecilnya *free cash flow*, struktur kepemilikan, kebijakan deviden, struktur aktiva dan profitabilitas.

Free cash flow atau arus kas bebas merupakan kas yang tersedia di perusahaan yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas Murhadi (2013:48). Dengan kata lain *free cash flow* dapat digunakan untuk membayar hutang yang dimiliki perusahaan. Dengan kata lain *free cash flow* dapat digunakan untuk membayar hutang yang dimiliki perusahaan. Jadi, saat perusahaan memiliki *free cash flow* yang memadai, pihak manajemen perusahaan dapat megambil kebijakan untuk menggunakan hutang yang lebih tinggi dalam mendanai perusahaannya. Jika penggunaan hutang yang tinggi tetapi tidak terkendali,dikarenakan adanya kecenderungan perilaku *opportunistik* manajer yang akan mengakibatkan bertambahnya biaya perusahaan sehingga menurunkan keuntungan yang akan diterima. Berbeda halnya jika kepentingan manajer disejajari dengan kepentingan pemegang saham yang berarti manajer bertindak sekaligus sebagai pemegang saham (kepemilikan manajerial).

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajer yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Ifah dan Murotun dalam Junaidi (2012). Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer membuat manajer akan merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dengan benar dan merasakan kerugian jika keputusan yang

diambil salah, terutama keputusan dalam pengambilan mengenai hutang. Jadi, dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer lebih besar proporsinya, maka manajer akan berusaha untuk memperoleh laba setinggi mungkin dan akan menurunkan tingkat hutang sehingga meminimalisir tingkat risiko yang dialami perusahaan. Untuk memperoleh laba tersebut diperlukanpengawasan yang efektif pada manajer dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan dan mengelola keuangan perusahaan. pengawasan tersebut akan dilakukan oleh pihak institusional (kepemilikan institusional).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimilki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Gusti (2013). Kepemilikan institusional atau pihak institusional akan mengawasi kinerja manajer, sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistik* manajer dalam mengelola keuangan, dan dalam mengambil keputusan mengenai pendanaan, sehingga menggunakan tingkat hutang yang rendah. Dikarenakan pihak pemegang saham tidak ingin adanya kemungkinan resiko dan ketidakpastian yang akan terjadi pada perusahaan yang akan mengkibatkan kebangkrutan. Karena pemegang saham menanamkan dananya kedalam perusahaan bertujuan untuk mencari pendapatan atau *return* yang berupa deviden. Dalam teori *bird in the hand*, dijelaskan bahwa investor atau pemegang saham yang memiliki preferensi lebih besar terhadap deviden, melihat deviden sebagai hal yang lebih pasti dan cenderung relatif stabil dari pada *capital gain.* Hal ini membuat perusahaan akan menentukan dan memutuskan suatu kebijakan, yang disebut dengan kebijakan dividen.

Kebijakan dividen adalah kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan terhadap pembayaran dividen merupakan keputusan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hermuningsih dalam Sukirni (2012) kebijakan ini akan melibatkan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu pihak pertama para pemegang saham dan pihak kedua perusahaan itu sendiri, yang akan berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Besar kecilnya hutang suatu perusahaan tergantung pada struktur aktiva perusahaan tersebut.

Struktur aktiva merupakan perbandingan antara total aktiva tetap bersih yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang, dengan total aktiva. Wahidahwati dalam Junaidi (2012). Struktur aktiva mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang, semakin tinggi nilai aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan mendapatkan pinjaman dalam jumlah besar. Untuk membayar pinjaman tersebut dapat dilihat besar kcilnya laba yang dicapai suatu perusahaan, untuk mengetahui seberapa besar laba pada perusahaan dapat dilihat dari profitablitas perusahaan.

Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat keuntungan penjualan, aset dan modal saham tertentu. Husnan dalam Bansaleng, Parengkuan, dan Inovve (2014).

Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat keuntungan penjualan, aset dan modal saham tertentu. Husnan dalam Bansaleng, Parengkuan, dan Inovve (2014).

Menurut investigasi CDMI, hampir semua perusahaan properti nasional sukses membukukan pendapatan dan laba yang spektakuler. tahun 2012 lalu 16 group perusahaan properti yang memperoleh pendapatan diatas Rp. 1 triliun. Memasuki tahun 2013 pendapatan dan labanya semakin meroket. Perusahaan sukses meningkatkan total aset, pendapatan dan laba yang berlipat. Namun, yang harus diwaspadai perusahaan ini ternyata memiliki hutang yang sangat besar dan jika tidak bisa mengelolanya perusahaan akan menghadapi kesulitan dimasa mendatang. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan objek penelitian perusahaan properti and real estate.

2.KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Hutang

Kewajiban atau hutang meliputi semua tagihan pihak ketiga yang harus dilunasi oleh perusahaan. Samryn (2015:107). Hutang merupakan pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Hery (2012:118).

2.2 Kebijakan Hutang

Mamduh dan Abdul dalam Bansaleng, Parengkuan, dan Inovve (2014) mengemukakan bahwa kebijakan hutang termasuk kebijakan pendanaan perusahaan yang bersumber dari eksternal.Penentuan kebijakan hutang ini berkaitan dengan struktur modal karena hutang merupakan salah satu komposisi dalam struktur modal. Perusahaan bernilai risiko apabila perusahaan memiliki porsi hutang yang besar dalam struktur modal namun sebaliknya jika perusahaan menggunakan hutang yang kecil atau tidak sama sekali maka perusahaan dinilai tidak memanfaaatkan tambahan modal eksternal yang dapat meningkatkan operasional perusahaan.

2.3 Free Cash Flow (Aliran Kas Bebas)

Free cash flow atau arus kas bebas merupakan kas yang tersedia di perusahaan yang dapat digunakan berbagai aktivitas. Konsep *free cash flow* memfokuskan pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi setelah digunakan untuk kebutuhan reinvestasi. Murhadi (2013:48). Selain itu *Free cash flow*dapat didefinisikan sebagai kas perusahaan yang dapat di ditribusikan kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak diperlukan untuk modal kerja dan aset tetap. Tarjo dalam Junaidi (2012:6).

2.4 Struktur Kepemilikan

2.4.1 Kepemilikan Manajerial

Ifah dan Murotun dalam Junaidi (2012) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Wahidahwati dalam Junaidi (2012) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial diukur sesuai porporsi kepemilikan saham yang dimiiki oleh manajemen.

2.4.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Sukirni dalam Gusti (2013). Selain itu Indahningrum dan Handayani dalam Junaidi (2012) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh searah dengan prdiksi kebijakan hutang perusahan.

2.5 Kebijakan Dividen

Hermuningsih dalam Sukirni (2012) menyatakan bahwa kebijakan dividen kebijakan yang terkait dengan penentuan apakan laba yang diperleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan sebagai bentuk laba ditahan. Kebijakan terhadap pembayaran dividen merupakan keputusan yang sangat penting dalam suatu perusahaan.

2.6 Struktur Aktiva

Struktur aktiva merupakan perbandingan antara total aktiva tetap bersih yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang, dengan total aktiva. Wahidahwati dalam Junaidi (2012). Struktur aktiva dapat didefinisikan juga sebagai penetuan seberapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. Syamsudin dalam Junaidi (2012).

2.7 Profitabilitas

Santono dalam Bansaleng, Parengkuan dan Ivonne (2014) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan hubungannya dengan penjualan, total

aktiva maupun modal sendiri, dan menurut Husnan dalam Bansaleng, Parengkuan, dan Inovve (2014) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat keuntungan penjualan, aset dan modal saham tertentu.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu peroses menentukan pengetahuan yang mengunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa apa yang ingin diketahui Sujarweni (2015:88).

3.2 Operasional VAriabel

3.2.1 Variabel Independen (Variabel X)

Menurut Sujarweni (2015:5) variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu

1. *Free cash flow* (X1) disimbulkan dengan FCF, dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{FCF} = \frac{AKO - CapitalExpediture}{TotalAset}$$

2. Kepemilikan manajerial (X2) diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen.
3. Kepemilikan institusional (X3) diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti perusahaan asuransi, bank, maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan-perusahaan lain.
4. Kebijakan dividen (X4) dirumuskan sebagai berikut

$$\text{DPR} = \frac{Dividend}{NetIncome}$$

5. Struktur aktiva (X5) dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Struktur aktiva} = \frac{totalaktivatetapbersih}{totalaktiva}$$

6. Profitabilitas (X3) dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Profitabilitas} = \frac{NetIncome}{Totalasset}$$

3.3 Variabel Dependen

Menurut Sujarweni (2015:75) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah

Kebijakan hutang (Y) bisa dihitung dengan rumus, sebagai berikut

$$\text{Rasio Hutang (DR)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan uji statistic deskriptif untuk mendapatkan gambaranmengenai keseluruhan data sampel penelitian, selanjutnay akan dilakukan uji normalitas data mengggunakan *P-Plot of Regression standardized*. Jika hasil uji normalitas menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga pada model regresi berdistribusi normal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, statistik deskriptif adalah menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang dimasukkan dalam model penelitian. Variabel penelitian ini adalah variabel terkait dengan variabel bebas, yang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut

Tabel 4.1
StatistikDeskriptif

Descriptive Statistics

VARIABEL	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM	20	.0023	.6266	.259585	.2517312
KI	20	.0145	.6678	.382605	.194439
FCF	20	-.0728	.1624	.027345	.0564244
DR	20	.0007	.5225	.164645	.1781919
DPR	20	.1300	.7048	.353985	.1759139
SA	20	.0034	.4012	.091500	.1089217
ROA	20	-.0880	.1027	.032350	.0403904
Valid N (listwise)	20				

Sumber: output spss (data diolah 2016)

Berdasarkan tabel 4.1 nilai standar *deviation* variabel DR lebih tinggi dari *mean* menunjukkan bahwa data variabel DR berdistribusi tidak konstan. Nilai standar *deviation* variabel KM, KI, dan DPR, masih dibawah mean menunjukkan bahwa data-data variabel KM, KI, dan DPR, memiliki variasi data yang lebih rendah atau antara data yang satu dengan yang lain tidak berbeda terlalu jauh atau tidak terjadi penyimpangan data. Sedangkan nilai deviasi dari variabel FCF, SA, dan ROA yang masih diatas *mean* menunjukkan bahwa data-data variabel FCF, SA dan ROA memiliki variasi data yang lebihtinggi antara data yang satu dengan yang lain tidak berbeda terlalu jauh atau terjadi terjadi penyimpangan data.

Tabel 4.2
Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.666	.183		3.636	.003
FCF	.735	.409	.424	1.796	.096
KM	.621	.430	.277	1.442	.173
KI	6.826	2.977	.884	2.293	.039
DPR	.390	.852	.160	.458	.654
SA	-.755	.571	-.305	-1.324	.208
ROA	-2.028	1.154	-.507	-1.758	.102

a. Dependent Variable: DR

Sumber: output spss (data diolah 2016).

Dari pengolahan data statistik di atas maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut

Y=6.66+0.735FCF + 0.621KM + 6.826KI + 0.390DPR + -0.55SA + -2.028ROA

Model persamaan regresi tersebut dapat diperoleh pengertian sebagai berikut Koefisien regresi konstanta sebesar 0.666 artinya apabila variabel FCF, KM, KI, DPR, SA, dan ROA dianggap konstan (bernilai 0), maka nilai perusahaan akan sebesar 0.666.

4.2 Pembahasan

Nilai *free cash flow*, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, struktur aktiva, dan profitabilitas pada perusahaan properti and real estate lebih kecil dari pada nilai hutang perusahaan, sehingga *free cash flow*, kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, struktur aktiva, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang, dengan hasil pengujian hipotesis nilai signifikansi sebesar 0.096 > 0.05 (tidak signifikan) dengan nilai t 1.796 dilihat dari nilai koefisien β 0.424 (positif) untuk *free cash flow*, nilai signifikasi sebesar 0.173 > 0.05 (tidak signifikan) dengan nilai t 1.796 dilihat dari nilai koefisien β 0.277 (positif) untuk kepemilikan manajerial, nilai signifikasi sebesar 0.654 > 0.05 (tidak signifikan) dengan nilai t 4.58 dilihat dari nilai koefisien β0.160 (positif) untuk kebijakan dividen, nilai signifikasi sebesar 0.208 > 0.05 (tidak signifikan) dengan nilai t -1.324 dilihat dari nilai koefisien β-0.305 (negatif) untuk struktur aktiva, dan nilai signifikasi sebesar 0.1.02 > 0.05 (tidak signifikan) dengan nilai t -1.758 dilihat dari nilai koefisien β-0.507 (negatif) untuk profitabilitas, menunjukkan bahwa variabel *free cash flow*,kepemilikan manajerial, kebijakan dividen, struktur aktiva, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.

Jumlah kepemilikan institusional pada perusahaan properti and real estate lebih banyak dimiliki oleh pihak institusional, sehingga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang, dengan hasil pengujian yang dilakukan nilai signifikasi sebesar 0.039 < 0.05 (signifikan) dengan nilai t tabel 2.293 dilihat dari nilai koefisien β0.884 (positif), diperoleh hasil bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang.

Tabel 4.3
Uji Simultan
Anova [b]

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regressin	3.018	6	.503	11	.00
Residual	5.88	13			
Total	3.606	19	.045		

a. Pridictors: (Constant), FCF, KM, KI, DPR, SA, ROA
b. Dependent Variable: DR
Sumber: output spss (data diolah 2016

Berdasarkan table 4.3 diatas, menjelaskan bahwa hasil perhitungan statistik menghasilkan nilai F dihitung sebesar 11. Hal ini menjelaskan bahwa dalam penelitian ini variabel *free cash flow*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur aktiva, dan profitabilitas secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel kebijakan hutang. berdasarkan perhitungan angka signifikansi diperoleh angka signifikansi sebesar F < 0.05 atau 0.00 < 0.005 yang berarti bahwa secara simultan *free cash flow*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur aktiva, dan profitabilitas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis dari permasalahan yang diangkat maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kebijakan hutang, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional, kebijakan dividen, struktur aktiva, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain dalam penelitian ini, yaitu lebih banyak menggunakan faktor eksternal, dan untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memperluas objek penelitian bukan hanya perusahaan properti and real estate. Sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan.

6. REFERENSI

[1] Bansaleng, D.V Resky, Parengkuan Tommy dan Inovve S. S. 2014. *Kebijakan Hutang, Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Food And Beverage DI BEI.*Jurnal EMBA. Vol.2, No.3, Sepetmber 2014. Hal. 817-830.

[2] Cahyo, Dwi Agung.2013. *Pengaruh Laba Bersih, Arus Kas Operai Dan Inventment Opportunity Set Terhadap Kebijakan Deviden Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2012.* Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Dipublikasikan. Kepulauan Riau.

[3] Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar Modal.* Jakarta: Mitra Wancana Media.

[4] Gusti, Firyani Bertha. 2013. *Pengaruh Free Cash Flow, Kepemilikan Saham Terhadap Kebijakan Hutang Dengan Investment Opportunity Set Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI***.** Universitas Negeri Padang. Dipublikasikan. Padang..

[5] Hery. 2012. *Akuntansi. Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi.* Jakarta: Prenada.

[6] Junaidi, Afif Akhmad. 2012. *Analisis Pengaruh Free Cash Flow, Strukutur Kepemilikan, Kebijakan Dividen, Struktur Aktiva, Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan.* Universitas Dian Nuswantoro. Dipublikasikan. Jawa Tengah.

[7] Murhadi, Werner R. 2013. *Analisis Laporan Keuangan. Proyeksi Dan Valuasi Saham.* Jakarta: Salemba Empat.

[8] Samryn, L. M. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Buku 2. Pt. Rajagrafindo Persada: Depok.

[9] Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

[10] Surkirni, Dwi. 2012**.** *Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai Perusahaan.*Accounting Analysis jounal. 1, 2, 2012.

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN BBM TERHADAP EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERN

Ririn Anggraini[1], Henni Indriyani[2], Andrian Noviardy[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
ririnanggraini2404@yahoo.com[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
Andrian.noviardy@binadarma.ac.id [3]

Abstract

This thesis research was conducted at PT . Pertamina Patra Niaga Area Sumbagsel which is engaged in the downstream sector of the oil and gas industry (Oil and Gas) . This thesis discusses the relationship level accounting information system of internal pengendalain sales effectiveness . In addition, the purpose of this study to find out how big the accounting information system sales relationship with the effectiveness of internal pengendalain sales in the company PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Area . The results of this research in general there is a portrait of a strong and positive relationship between accounting information systems sales relationship with the effectiveness of internal control we can see from the research that has a probability value 0.004 <0.05 and having tcount 2,664 . So therefore we conclude that the accounting information system sales have a close relationship with the effectiveness of internal control .

Keywords: *Effect, Internal Audit, Control Iternal, Sales*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi pada saat ini dipengaruhi oleh derasnya sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas, alat, teknologi, media, prosedur dan pengendalian. Hal tersebut bermaksud menata jaringan komunikasi tertentu dan rutin yang bisa membantu manajemen, baik dalam keperluan intern maupun ekstern. Salah satu sistem informasi yang memegang peranan penting dalam organisasi perusahaan adalah sistem informasi akuntansi penjualan. Sistem informasi akuntansi penjualan menyangkut bagaimana organisasi perusahaan dapat merencanakan, mengkoordinasikan, menguasai atau mengontrol berbagai aktivitas penjualan yang dilaksanakan. Sistem informasi akuntansi penjualan juga berperan dalam penyediaan informasi untuk badan atau lembaga keuangan yang mempunyai kepentingan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas perusahaan.

Dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi penjualan yang memadai akan dapat menyajikan informasi akuntansi penjualan yang efektif yang diperlukan oleh pimpinan dan para manager untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi penjualan yang diterapkan harus dapat menciptakan suatu pengendalian intern penjualan yang baik atas adanya aktivitas yang dilakukan perusahaan. Adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi penjualan ini dengan pendapat Azhar Susanto (2010:117), "Pengendalian Intern Penjualan sangat diperlukan untuk menjamin bahwa Sistem Informasi Akuntansi Penjualan bekerja sesuai dengan yang seharusnya sehingga resiko terhadap penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dihindari.

PT Pertamina Patra Niaga adalah salah satu anak perusahaan PT PERTAMINA (Persero) yang bertugas menyalurkan BBM Non Subsidi ke agen – agen baik secara tunai maupun kredit dimana tujuannya ialah mencapai tingkat laba semaksimal mungkin. Sistem informasi pada PT Pertamina Patra Niaga menggunakan sistem aplikasi OSDS dan MySap, sistem ini sudah berjalan dengan cukup baik, dimana manajemen nya telah menyusun tata cara untuk mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan PT. Pertamina Patra Niaga yang berkantor cabang di Jln Jend.A yani ruko KFC

Seberang ulu II. Sebagian besar kegiatan pokoknya untuk menyalurkan BBM Non Subsidi kepada seluruh agen. Maka sangatlah penting suatu pengendalian sistem informasi manajemen terhadap penjualannya sehingga kecenderungan masalah seperti penghambatan penyaluran BBM Non subsidi dapat di atasi. Penulis tertarik mengembangkan penelitian sebelumnya, dimana penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi penjualan BBM terhadap efektifitas pengendalian intern (studi kasus pada PT Pertamina Patra Niaga Area Sumbagsel).

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.5 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Baridwan (2010:27) sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasi, mengola, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi financial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak diluar perusahaan.

2.6 Penjualan

Menurut Komarudin (2010:775) penjualan adalah suatu persetujuan yang menetapkan bahwa penjualan memindahkan milik kepada pembeli untuk sejumlah uang yang disebut harga.

2.3 *Sitem Informasi Akuntansi Penjualan*

menurut Mulyadi (2014:160) penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari penjualan barang atau jasa baik secara kredit maupun secara tunai. Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi dari keseluruhan kegiatan usaha yang terdiri dari penjua lan barang atau jasa agar dapat mencapai tujuan organisasi.

2.4 *Efektifitas*

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya, Kurniawan (2010:109).

2.5 *Pengendalian Intern*

Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah, Mardi (2014:59).

2.6 *Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis*

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh sistem informasi penjualan terhadap efektifitas pengendalian intern, yaitu Fetto Daan Yos (2010) meneliti mengedai engendalian internal yang digunakan sebagai acuan adalah pengendalian internal yang dikeluarkan COSO. Hasil penelitian diperoleh bahwa ditemukan kelemahan dan kebaikan sistem informasi akuntansi yang di pakai oleh PT. Gendish Mitra Kinarya terkait dengan pengendalian internnya sudah memadai.

Berbeda dengan Narinda Via nurjanah (2013) dalam penelitiannya mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi penjualan terhadap pengendalian intern penjualan terletak pada kategori tinggi, bersifat positif dan signifikan. Hal ini berarti apabila sistem informasi akuntansi penjualan diterapkan dengan baik akan dapat meningkatkan pengendalian intern, maka akan berdampak pada kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi terjamin ketelitian serta keandalannya .Begitupun dengan Ahmad Marzuki (2011), dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara hubungan sistem informasi akuntansi penjualan dengan efektifitas penjualan dapat kita lihat dari hasil penelitian yang mempunyai nilai probabilitas. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan sangat erat hubungannya dengan efektifitas pengendalian internal penjualan.

3. METODE PENELITIAN

3.4 Populasi, teknik pengambilan sample

Populasi dalam penelitian ini adalah staff marketing di kantor PT Pertamina Patra Niaga Area Sumbagsel. Responden dalam penelitian ini adalah Staff Marketing di PT Pertamina Patra Niaga Area Sumbagsel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah bentuk sampel jenuh dimana responden adalah seluruh bagian Staff Marketing.

3.2 Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdapat variabel dependen (Y) adalah efektifitas pengendalian intern, variabel independen (X) Sistem Informasi Akuntansi Penjualan.

3.5 Sumber dan Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber primer, yaitu menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likret (1-5). Kuesioner yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu seluruh staff Marketing.

Setelah dilakukan uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu koesioner, selanjutnya akan dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen dengan nilai signifikan <0.005.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.3 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukan sistem informasi akuntansi penjualan (X), terhadap efektifitas pengendalian intern (Y) adalah signifikan. Pengaruh yang signifikan ini terlihat dari koefisien regresi dari seluruh komponen variabel independen dengan nilai t hitung sebesar 2.664 dan signifikan terhadap efektifitas pengendalian internal, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.484	.608		5.736	.000
	X1	.903	.256	.524	2.664	.004

Berdasarkan uji statistik pada tabel 4.1 tersebut di atas dapat dilihat tingkat signifikansi untuk masing-masing variabel bebas/independen. Dari variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi ternyata variabel sistem informasi akuntansi penjualan (X) memilki nilai signifikansi dibawah 0,05 (p <0,05) yang berarti variabel efektifitas pengendalian internal dapat dipengaruhi oleh variabel X. Untuk variabel bebas kedua mengenai sistem informasi akuntamsi penjualan nilai t_{hitung} = 2,664. (lebih besar dari t_{tabel}). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ho diterima dan H_a ditolak dengan nilai signifikan sebesar 0,004, yang artinya secara parsial sistem informasi akuntansi penjualan berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian internal pada PT Pertamina Patra Niaga area Sumbagsel. Hipotesis (H) diterima.

4.4 Pembahasan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh sistem informasi akuntansi penjualan BBM Non Subsidi terhadap efektifitas pengendalian intern. Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh yang signifikan, berarti koefisien persamaan regresi sesuai dengan teori bahwa sistem informasi akuntansi penjualan, adalah searah dengan terhadap efektifitas pengendalian intern. Dengan kata lain sistem informasi akuntansi penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian intern. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Ahmad Marzuki (2011) yang sistem informasi akuntansi penjualan sangat erat hubungannya dengan efektifitas pengendalian internal penjualan.

5. SIMPULAN

sistem informasi akuntansi penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian intern. Hubungan ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 (p <0,05) dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ho diterima dan H_a ditolak dengan nilai signifikan sebesar 0,004, yang artinya secara parsial sistem informasi akuntansi penjualan berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian internal pada PT Pertamina Patra Niaga area Sumbagsel dan Sistem informasi akuntansi penjualan yang digunakan pada PT Pertamina Patra Niaga telah cukup memadai dimana setiap aktivitas nya telah menggunakan sistem komputerisasi yang dapat menghasilkan informasi yang andal, mudah dipahami serta relevan.

6. REFERENSI

[1] Ahmad Marzuki, 2011. *Analisis hubungan sistem informasi akuntansi penjualan dengan efektifitas pengendalian internal penjualan*. Jurnal Ilmiah. universitas maritim raja ali haji tanjungpinang.

[2] Bodnar ,2011 *Sistem Informasi*. Galileo: Bogor

[3] Dody Syafatra Surya, 2010. *Analisi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan BBM di Depot Kertapati PT Pertamina UPMS II Palembang*. Jurnal Ilmiah. Universitas Sriwijaya

[4] Fetto Daan Yos. 2010. *Analisis sistem informasi akuntansi penjualan tunai untuk meningkatkan pengendalian intern*. Jurnal Ilmiah. Universitas Gunadarma.

[5] IAI 2013 *Pengantar Akuntansi*. Sriwijaya Grafik Mandiri : Sumatera Selatan

[6] Krismiaji 2010 *Akuntasni*. C.V Andi Offset: Yogyakarta

[7] Kurniawan 2010 *Transformasi Pelayanan Publik*. Ghalia Indonesia :Bogor

[8] Mardi 2014 *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta

[9] Mulyadi 2014 *Sistem Akuntansi*. Selemba Empat: Jakarta

[10] Narinda Via nurjanah, 2013. *Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi penjualan Terhadap peningkatan pengendalian intern penjualan perusahaan pada acb swalayan banjarsari***.** Jurnal Ilmiah. Universitas Galuh Ciamis.

[11] Oemar Hamalik 2010 *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta

[12] Sanusi 2014 *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat: Jakarta

[13] Septian Firma Yandi, 2010. *Peranan sistem informasi akuntansi penjualan dalam menunjang efektifitas pengendalian internal penjualan pada PT Tarumatex*. Jurnal Ilmiah. Universitas Mulawarman.

[14] Sukrisno 2012 *Auditing*. Salemba Empat: Jakarta

[15] Wilkinson 2010 *Sistem Informasi*. Salemba Empat : Jakarta

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Rista Bella[1], Hasan Kuzery[2], Yeni Widyanti[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
ristabella_13@yahoo.com[1]
hasan_kuzery@mail.binadarma.ac.id[2]
yeniwidyanti@binadarma.ac.id[3]

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of income tax collection by the Warning Letter and Letter Forced to income tax revenue in the Tax Office Primary Palembang Ilir Barat. This study use quantitative descriptive analysis method, the data source is primary and secondary data sources. The results of this research show that the collection of income tax with a letter of reprimand and forced letter in 2012, 2013 and 2014 on the Tax Office Pratama Palembang Ilir Barat relatively ineffective and contribution collection of tax revenue by Warning Letter and Letter Forced to income tax revenue on 2012, 2013, and 2014 on the Tax Office Pratama Palembang Ilir Barat relatively very less. Advice can be given is that the KPP Pratama Palembang Ilir Barat have to socialize with counseling and activities that can increase awareness of the taxpayers to pay their tax debts. So that taxpayers can know the importance of paying taxes that affect state revenues.

Keywords: *Effectiveness Billing, Warning Letter, Letter Forced Liquidation Tax Arrears*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang melaksanakan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus, pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut. Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, kontribusi pajak dalam penerimaan negara dapat dilihat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Indonesia menjadikan pajak sebagai tumpuan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri dan salah satu harapan besar tertumpu pada pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan.

Penerimaan pajak penghasilan mempunyai peranan yang cukup penting bagi terselenggaranya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya penerimaan pajak penghasilan maka pembangunan dapat tercapai. Namun di dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan ini masih dijumpai adanya Wajib Pajak yang tidak taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini mungkin dikarenakan Wajib Pajak yang tidak mempunyai kesadaran, ketidaktahuan dan lalai untuk membayar pajak yang berakibat tidak dilunasinya utang pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat.

Maka pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU nomor 19 tahun 2000, yaitu : ”Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat bertujuan agar Wajib Pajak dapat segera membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak penghasilan dapat bertambah. Dalam melaksanakan

kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, KPP Pratama Palembang Ilir Barat harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang berpotensi pada pencairan tunggakan pajak. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang terakhir telah diubah dengan undang–undang nomor 36 tahun 2008, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2 Pengertian Efektivitas

Menurut Nordiawan (2010:161) menyatakan bahwa efektifitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan memenuhi tujuan dan sasaran yang diharapkan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.3 Pengertian Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak penghasilan. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak penghasilan periode tertentu dengan penerimaan pajak penghasilan melalui penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan juga kecil (Mahmudi, 2010:145).

2.4 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini.Terdapat beberapa penelitian mengenai Penagihan Pajak yaitu Nana Adriana Erwis (2010-2011) meneliti mengenai Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak menyatakan bahwa Penagihan pajak dengan surat paksa tergolong tidak efektif dan kontribusinya tergolong sangat kurang. Sama halnya dengan
Hasbi Rifqiansyah, Muhammad Saifi, Devi Farah Azizah (2011-2013) meneliti mengenai Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak menyatakan bahwa Penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif juga.

Ernawati Sulistyaningsih (2007-2008) meneliti mengenai Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak menyatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tahun 2008 lebih efektif bila dibandingkan dengan tahun 2007. Begitu juga pencairan tunggakannya, di tahun 2008 Surat Paksa yang cair lebih banyak dalam hal nominalnya dari pada tahun 2007. Sedangkan menurut Mala Rizkika Velayati, Siti Ragil Handayani,Achmad Husaini (2010-2012) mengenai Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak menyatakan bahwa Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif tergolong dalam kriteria sangat

kurang efektif. Dan Helsy Amelia Saputri (2010-2014) mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak menyatakan bahwa Kondisi Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa masih belum efektif

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamat di Jl. Tasik Kambang Iwak Palembang.

3.2 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Agar penelitian lebih jelas, maka perlu ditetapkan operasional variabel sebagai berikut:

1. Variabel Independen (Variabel X)

Menurut Sugiyono (2012:59) variabel bebas atau *independent variable* (X) adalah variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen (X_1) yaitu efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa dan (X_2) yaitu kontribusi realisasi penagihan pajak penghasilan.

2. Variabel Dependen (Variabel Y)

Menurut Sugiyono (2012:59) variabel terikat atau *dependent variable* (Y) adalah variabel dependen merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) yaitu tingkat penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan fakta dengan angka-angka menggunakan rumus-rumus rasio atau persentase.

3.4 Perhitungan Analisis

a) Rasio efektivitas penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa

Untuk mengetahui apakah suatu kinerja dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat rasio efektivitas pembayaran Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa digunakan rumus sebagai berikut:

Efektivitas penyampaian Surat Teguran dihitung dengan rumus rasio sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{Realisasi\ \ yang\ dibayar\ \ dengan\ \ Surat\ \ Teguran}{Target\ \ yang\ \ dibayar\ \ dengan\ \ Surat\ \ Teguran}\ x\ 100\%$$

Efektivitas penyampaian Surat Paksa dihitung dengan rumus rasio sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{Realisasi\ \ yang\ dibayar\ \ dengan\ \ Surat\ \ Paksa}{Target\ \ yang\ \ dibayar\ \ dengan\ \ Surat\ \ Paksa}\ x\ 100\%$$

Untuk mengukur keefektifan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Efektivitas

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996)

b) Rasio kontribusi realisasi Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP.

Rumus untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) dengan Surat Teguran yaitu:

Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan

$$= \frac{Realisasi\ \ Penerimaan\ \ \ Pph\ Dengan\ \ Surat\ \ Teguran}{Penerimaan\ \ \ Pph\ di\ KPP}\ x\ 100\%$$

Rumus untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) dengan Surat Paksa yaitu:

Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan

$$= \frac{Realisasi\ \ Penerimaan\ \ \ Pph\ Dengan\ \ Surat\ \ Paksa}{Penerimaan\ \ \ Pph\ di\ KPP}\ x\ 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Semakin besar persentas dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 tahun 1996)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Tabel 4.1
Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran
Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai
11.818	Rp 14.612.762.122	938	Rp 48.258.180.786	2.279	Rp 16.439.336.092

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Berdasarkan tabel 4.1, Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran pada tahun 2012 sebanyak 11.818 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 14.612.762.122,- sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 938 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 48.258.180.786,- berarti ada penurunan dari jumlah lembar dan mengalami peningkatan dari nilai nominalnya dari penagihan pajak dengan Surat Teguran tersebut. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah lembar sebanyak 2.279 dengan jumlah nilai nominal Rp 16.439.336.092,- hal ini berarti penagihan pajak penghasilan dengan Surat Teguran di tahun 2014 mengalami peningkatan dari jumlah lembarnya dan mengalami penurunan dari lembar nominalnya dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini disebabkan sebagian besar Wajib Pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar hutang pajaknya. Itulah yang menyebabkan penagihan Surat Teguran pada tahun 2012, 2013 dan 2014 secara umum masih mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar maupun dari jumlah nominal.

4.2 Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Tabel 4.2
Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa
Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai
5.668	Rp 12.532.841.630	1.372	Rp 43.820.720.892	2.262	Rp 12.659.464.743

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Berdasarkan tabel 4.2, Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa pada tahun 2012 sebanyak 5.668 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 12.532.841.630,- sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 1.372 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 43.820.720.892,- berarti ada penurunan dari jumlah lembar dan mengalami peningkatan dari nilai nominalnya dari penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah lembar sebanyak 2.262 dengan jumlah nilai nominal Rp 12.659.464.743,- hal ini berarti penagihan pajak penghasilan dengan Surat Paksa di tahun 2014 mengalami peningkatan dari jumlah lembarnya dan mengalami penurunan dari lembar nominalnya dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini disebabkan sebagian besar Wajib Pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar hutang pajaknya. Itulah yang menyebabkan penagihan Surat Paksa pada tahun 2012, 2013 dan 2014 secara umum masih mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar maupun dari jumlah nominal.

4.3 Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, terutama pada pajak penghasilan.

Tabel 4.3
Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran
Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai
867	Rp 2.101.705.315	376	Rp 5.416.019.367	224	Rp 4.470.131.836

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Dari tabel 4.3 diatas penerimaan tunggakan pajak penghasilan untuk tahun 2012 sebesar 867 lembar dengan nilai nominalnya Rp 2.101.705.315,-. Pada tahun 2013 sebesar 376 lembar dengan nilai nominalnya Rp 5.416.019.367,- dan tahun 2014 sebesar 224 lembar dengan nilai nominalnya Rp 4.470.131.836,-. Jadi dilihat dari jumlah lembar, tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Dan dilihat dari nilai nominalnya tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012.

4.4 Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Penerimaan tunggakan pajak merupakan pelunasan utang pajak atau tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak atau penanggung pajak. Dengan penerimaan tunggakan pajak, penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat akan mengalami peningkatan, sehingga membantu pencapaian target penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, terutama pada pajak penghasilan.

Tabel 4.4
Penerimaan Tunggakan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa
Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai	Lmbr	Nilai
630	Rp 5.101.546.981	503	Rp 3.747.776.318	773	Rp 5.441.923.248

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Dari tabel 4.4 diatas penerimaan tunggakan pajak penghasilan untuk tahun 2012 sebesar 630 lembar dan dari nilai nominalnya Rp 5.101.546.981,-. Pada tahun 2013 sebesar 503 lembar dan dari nilai nominalnya Rp 3.747.776.318,- dan tahun 2014 sebesar 773 lembar dan dari nilai nominalnya Rp 5.441.923.248,-. Jadi dilihat dari jumlah lembar, tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 dan tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013. sedangkan dilihat dari nilai nominalnya tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 dan tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013.

4.5 Analisis Efektivitas

4.5.1 Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran Pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat

Tabel 4.5
Pembayaran Surat Teguran
Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun	Surat Teguran Terbit	Surat Teguran Bayar	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2012	Rp 14.612.762.122	Rp 2.101.705.315	14,38 %	Tidak Efektif
2013	Rp 48.258.180.786	Rp 5.416.019.367	11,22 %	Tidak Efektif
2014	Rp 16.439.336.092	Rp 4.470.131.836	27,19 %	Tidak Efektif

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Dari tabel 4.5, penerbitan Surat Teguran pada tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat tercatat Rp 14.612.762.122,- dan yang dibayar menurun sebesar Rp 2.101.705.315,- atau sekitar 14,38 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2012 tergolong tidak efektif.

Tahun 2013 mengalami peningkatan penerbitan Surat Teguran sebanyak Rp 48.258.180.786,- namun yang dibayar menurun dengan nilai nominalnya sebesar Rp 5.416.019.367,- didapat tingkat efektivitas sebesar 11,22%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2013 tergolong tidak efektif

Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013 penerbitan Surat Teguran sebanyak Rp 16.439.336.092,- namun yang dibayar menurun dengan nilai nominalnya sebesar Rp 4.470.131.836,- didapat tingkat efektivitas sebesar 27,19 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2014 tergolong tidak efektif.

4.5.2 Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Tabel 4.6
Pembayaran Surat Paksa
Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun	Surat Paksa Terbit	Surat Paksa Bayar	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2012	Rp 12.532.841.630	Rp 5.101.546.981	40,7 %	Tidak Efektif
2013	Rp 43.820.720.892	Rp 3.747.776.318	8,55 %	Tidak Efektif
2014	Rp 12.659.464.743	Rp 5.441.923.248	42,98 %	Tidak Efektif

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Dari tabel 4.6 diatas, penerbitan Surat Paksa pada tahun 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat tercatat Rp 12.532.841.630,- dan yang dibayar menurun sebesar Rp 5.101.546.981,- atau sekitar 40,7 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2012 tergolong tidak efektif.

Tahun 2013 mengalami peningkatan penerbitan Surat Paksa sebanyak Rp 43.820.720.892,- namun yang dibayar menurun dengan nilai nominalnya hanya sebesar Rp 3.747.776.318,- didapat tingkat efektivitas sebesar 8,55 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2013 tergolong tidak efektif

Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013 penerbitan Surat Paksa sebanyak Rp 12.659.464.743,- namun yang dibayar menurun dengan nilai nominalnya

sebesar Rp 5.441.923.248,- didapat tingkat efektivitas sebesar 42,98 %. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2014 tergolong tidak efektif.

4.6 Analisis Kontribusi

4.6.1 Kontribusi Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Pratama Palembang Ilir Barat.

Tabel 4.7
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran
Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun	Pencairan Tunggakan PPh	Penerimaan PPh	Tingkat Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2012	Rp 2.101.705.315	Rp 314.927.085.769	0,67 %	Sangat Kurang
2013	Rp 5.416.019.367	Rp 302.674.710.121	1,79 %	Sangat Kurang
2014	Rp 4.470.131.836	Rp 382.705.430.378	1,17 %	Sangat Kurang

(Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2012 sebesar 0,67 %. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp 2.101.705.315,- dibagi dengan penerimaan pajak penghasilan yang sebesar Rp 314.927.085.769,- dikali 100% diperoleh kontribusi hanya 0,67 % atau sangat kurang.

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2013 sebesar 1,79%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp 5.416.019.367,- dibagi dengan penerimaan pajak penghasilan yang sebesar Rp 302.674.710.121,- dikalikan 100% diperoleh kontribusi hanya 1,79% atau sangat kurang.

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2014 sebesar 1,17%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp 4.470.131.836,- dibagi dengan penerimaan pajak penghasilan yang sebesar Rp 382.705.430.378,- dikalikan 100%, diperoleh Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh kontribusi hanya 1,17% atau kontribusinya masih sangat kurang.

4.6.2 Kontribusi Penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Pratama Palembang Ilir Barat.

Tabel 4.8
Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa
Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun	Pencairan Tunggakan PPh	Penerimaan PPh	Tingkat Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2012	Rp 5.101.546.981	Rp 314.927.085.769	1,62%	Sangat Kurang
2013	Rp 3.747.776.318	Rp 302.674.710.121	1,24%	Sangat Kurang
2014	Rp 5.441.923.248	Rp 382.705.430.378	1,42%	Sangat Kurang

(Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Palembang Ilir Barat)

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2012 sebesar 1,62%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp

5.101.546.981,- dibagi dengan penerimaan pajak penghasilan yang sebesar Rp 314.927.085.769,- dikali 100% diperoleh kontribusi hanya 1,62% atau sangat kurang.

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2013 sebesar 1,24%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp 3.747.776.318,- dibagi dengan penerimaan pajak penghasilan yang sebesar Rp 302.674.710.121,- dikalikan 100% diperoleh kontribusi hanya 1,24% atau sangat kurang.

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak penghasilan dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat pada tahun 2014 sebesar 1,42%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak penghasilan sebesar Rp 5.441.923.248,- dibagi dengan penerimaan pajak penghasilan yang sebesar Rp 382.705.430.378,- dikalikan 100%, diperoleh Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh kontribusi hanya 1,42% atau kontribusinya masih sangat kurang.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rendahnya efektifitas pembayaran tunggakan pajak dengan Surat Teguran sekitar antara 11,22% sampai dengan 27,19% untuk tahun 2012, 2013 dan 2014 dan Surat Paksa sekitar antara 8.55% sampai dengan 42,98% untuk tahun 2012, 2013, dan 2014, semuanya masih dikategorikan tidak efektif. Demikian pada rendahnya kontribusi realisai penerimaan tunggakan pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP untuk Surat Teguran dalam tahun 2012, 2013, dan 2014 yaitu antara 0,67% sampai dengan 1,79%, dan Surat Paksa dalam tahun 2012. 2013 dan 2014 yaitu antara 1,24% sampai dengan 1,62% semuanya masih dikategorikan sangat kurang kontribusinya. Keadaan tersebut diatas disebabkan:

a. Kurang kesadaran dari wajib pajak untuk membayar utang pajaknya.
b. Beberapa alamat wajib pajak tidak diketahui.
c. Terdapat wajib pajak yang telah meninggal dunia.
d. Berkas penagihan pajak kepada wajib pajak tidak lengkap, belum diadministrasikan dengan baik sehingga sulit melaksanakan tindak lanjutnya.

Saran yang penulis bisa berikan yaitu untuk meningkatkan Wajib Pajak dalam melunasi hutang pajaknya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat harus melakukan sosialisasi dengan penyuluhan-penyuluhan dan kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mereka sebagaimana mestinya. Sehingga wajib pajak bisa mengetahui pentingnya membayar pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan negara.

6. REFERENSI

[1] Erwis Nana Adriana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Skripsi. Universitas Hassanudin. Makasar.

[2] Fitriandi, Primandita. dkk. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap:* Salemba Empat.

[3] Ilyas, Wirawan B. 2010, *Panduan Komprehensif dan Pratis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.

[4] Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

[5] Saputri Amelia Hesly. 2014. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Bandung Cibeunying.* Skripsi. Universitas Telkom.

[6] Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.*

[7] _____*Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.*

[8] _____*Undang-Undang No.28 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

[9] Resmi, Siti. 2014. *PerpajakanTeori dan Kasus*: Salemba Empat.

[10] Rifqiansyah Hasbi, dkk. 2013. *Analisis Efektifitas dan kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Malang Utara.* Skripsi. Universitas Brawijaya.

[11] Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.* Bandung: Alfabeta.CV.

[12] Soemitro, Rochmat. (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.

[13] Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

[14] Sulistyaningsih Ernawati. 2009. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Surakarta.* Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

[15] Siahaan, Marihot P, SE. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

PENGARUH PROFITABILITAS, *FREE CASH FLOW, LEVERAGE* DAN KESEMPATAN INVESTASI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN

Rizki Aditya Putra[1)], Verawaty[2)], Ade Kemala Jaya[3)]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
rizkiadityaputra17@yahoo.com[1)], verawaty_mahyudin@yahoo.com[2)], jaya_ade@yahoo.com[3)]

Abstract

Dividend policy is a decision which applied in a company to determine the amount of profit which shared to shareholder as a dividend or will be hold as a retain earnings which will use as an investment funding in the future. This research is purposed to provide an empirical proof about the impact of profitability, free cash flow, leverage and investment opportunity set toward dividen policy of the financial companies which listed in Indonesian Stock Exchange on the pheriod 2014. This research is occurs on 36 companies of 86 financial companies which choosen by purposive sampling method. The result of the analysis shows that profitabilty and free cash flow is not positively influencial toward dividend policy, leverage is not negatively influencial toward dividend policy and investment opportunity set is positively and significantly influencial toward a dividend policy.

Keywords: *profitability, free cash flow, leverage, investment opportunity set and dividend policy.*

1. PENDAHULUAN

Pasar modal berperan penting sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi (IDX, 2010). Pada kebanyakan negara pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi finansial, fungsi ekonomi maksudnya menyalurkan dana dari investor ke perusahaan, sehingga memperlancar akses perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan investasinya dan fungsi finansial yaitu *reward* bagi investor atas hasil investasinya yang berupa keuntungan untuk memaksimalkan kekayaan.

Keuntungan yang ingin diperoleh oleh para investor ketika menanamkan dananya pada sebuah perusahaan adalah *return* berupa pendapatan dividen (*dividend yield*) maupun pendapatan yang diperoleh dari selisih harga jual saham terhadap harga beli saham (*capital gain*). Laba yang diperoleh suatu perusahaan akan ditahan sebagai laba ditahan (*retained earnings*) dan sisanya inilah akan dibayar kepada investor berupa dividen.

Dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan kepada investor tentunya dipengaruhi oleh kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan. Para investor umumnya menginginkan pembagian dividen yang relatif stabil, di mana stabilitas dividen tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan karena akan mengurangi ketidak pastian investor dalam menanamkan dananya. Tetapi di sisi lain perusahaan juga dihadapkan dalam berbagai macam kebijakan seperti perlunya menahan sebagian laba untuk reinvestasi yang mungkin lebih menguntungkan, likuiditas perusahaan, sifat pemegang saham, target tertentu yang berhubungan dengan rasio pembayaran dividen dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan dividen.

Fenomena yang terjadi pada perusahaan-perusahaan sektor keuangan salah satunya PT Bank Bukopin Tbk yang termasuk perusahaan di sektor keuangan yang bergerak di bidang perbankan. Selama tiga periode berturut-turut dari 2011-2013 cenderung mebagikan dividen yang semakin turun padahal perusahaan memperoleh laba yang cenderung meningkat pada periode tersebut yaitu Rp 747,2 Miliar pada tahun 2011, lalu meningkat menjadi Rp. 838,5 Miliar di tahun 2012, dan terakhir sukses meraup Rp. 884,6 Miliar di tahun 2013. Oleh karena itu pada penelitian ini akan menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kebijakan dividen yaitu tingkat profitabilitias, *free cash flow,*

leverage, dan *investment opportunity set*. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan yang hendak diteliti dalam penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh profitabilitas, *free cash flow*, *leverage*, dan *investment opportunity set* terhadap kebijakan dividen.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Pradana dan Sanjaya (2014) teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang dimaksud adalah kontrak antara prinsipal (pemberi kerja, misalnya pemegang saham atau pimpinan perusahaan) dengan agen (penerima perintah, misalnya manajemen atau bawahan). Teori keagenan menjelaskan bahwa kepentingan prinsipal dan agen seringkali bertentangan, sehingga bisa terjadi konflik diantara keduanya.

Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisma pengawasan (*monitoring*) yang dapat mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut. Namun dengan munculnya mekanisma pengawasan ini menyebabkan timbulnya suatu *cost* yang disebut biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* yang muncul tersebut dapat diminimalkan dengan membagi dividen kas. Dengan kata lain, kebijakan dividen dapat menjadi salah satu bentuk mekanisme pengawasan pemegang saham terhadap pihak manajemen.

2.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Bhattcharya (1979) dalam Difah (2011) teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam kebijakan dividen adalah teori *signalling.* Teori *signalling* dikembangkan untuk memperhitungkan kenyataan bahwa orang dalam (*insider*) perusahaan pada umumnya memiliki informasi yang lebih baik dan lebih cepat berkaitan dengan kondisi terbaru dari perusahaan, serta prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor luar. Teori ini mendasari dugaan bahwa perubahan *cash dividend* mempunyai kandungan informasi yang mengakibatkan munculnya reaksi harga saham. Teori ini menjelaskan bahwa informasi tentang *cash dividend* yang dibayarkan dianggap investor sebagai sinyal prospek perusahaan di masa mendatang.

2.3 Pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen

Profitabilitas merupakan variabel yang penting sebagai perimbangan para manajer perusahaan dalam rangka menentukan kebijakan dividen. Menurut Murhadi (2013) profitabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan dividen merupakan bagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham (Difah, 2011). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2013) serta Pradana dan Sanjaya (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas mempengaruhi dividen secara positif. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini adalah semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen

2.4 Pengaruh *free cash flow* terhadap kebijakan dividen

Brigham dan Houston (2010) Menyatakan bahwa arus kas bebas (*free cash flow*) adalah arus kas yang benar-benar tersedia untuk dibayarkan kepada investor (pemegang saham dan pemilik utang) setelah perusahaan melakukan investasi dalam aset tetap, produk-produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosdini (2009) yang menyatakan bahwa *free cash flow* berpengaruh positif

terhadap kebijakan dividen. Sehingga semakin besar *Free Cash Flow* yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang tersedia untuk pertumbuhan, pembayaran hutang dan pembayaran dividen.

H2: Free cash flow berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen

2.5 Pengaruh *leverage* terhadap kebijakan dividen

Menurut Murhadi (2013) Rasio *leverage* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajibannya. *Leverage* adalah faktor krusial yang mempengaruhi perilaku dividen suatu perusahaan. Jika tingkat *leverage* tinggi berarti perusahaan lebih berisiko dalam arus kas. Struktur permodalan yang lebih tinggi dimiliki oleh hutang menyebabkan pihak manajemen akan memprioritaskan pelunasan kewajiban terlebih dahulu sebelum membagikan dividen. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mawarni dan Ratnadi (2014) serta Devi dan Erawati (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap Kebijakan Dividen. Dengan demikian semakin besar rasio *leverage* akan semakin kecil rasio pembayaran dividen yang diterima investor.

H3: Leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen

2.6 Pengaruh *investment opportunity set* terhadap kebijakan dividen

Ningrum (2011) menyatakan bahwa *Investment Opportunity Set* (IOS) menggambarkan tentang luasnya kesempatan atau peluang investasi bagi suatu perusahaan, namun sangat tergantung pada pilihan expenditure perusahaan untuk kepentingan di masa yang akan datang. Hal ini memotivasi pihak manajerial untuk melakukan reinvestasi dalam jumlah besar terutama ketika kondisi perusahaan saat baik maka pihak manajemen akan cenderung lebih memilih investasi baru daripada membayar dividen yang tinggi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni dan Ratnadi (2014) yang menyatakan bahwa *investment opportunity set* berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian banyaknya kesempatan investasi akan membuat perusahaan mengalokasikan dananya untuk membiayai peluang tersebut dari pada membayarkan dividen.

H4: Investment opportunity set berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan *finance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah populasi penelitian ini adalah 86 perusahaan *finance*. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yang bertujuan agar memperoleh sampel yang *representatif* (mewakili) sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria penentuan dalam sampel ini yaitu Perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan (*finance*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2014 yang telah diaudit serta Perusahaan *finance* yang selama tahun 2014 membagikan dividen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Peneliti memperoleh data mengenai jumlah dividen kas yang diperoleh dari laporan keuangan auditan pada tahun 2014. Data mengenai *earning after tax, total assets, cash flow from operations, capital expenditure, total debt, total equity*, harga saham dan jumlah saham beredar diperoleh dari laporan keuangan auditan tahun 2013 yang diperoleh dari website BEI (www.idx.co.id).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan untuk membagi keuntungan kepada pemegang saham yang akan dibagikan dalam bentuk

dividen dan besarya laba ditahan untuk kebutuhan perkembangan usaha. Dalam penelitian ini kebijakan dividen diproksikan oleh *dividend payout ratio*. Menurut Murhadi, (2013) Menyatakan bahwa *dividend payout ratio* (DPR) merupakan rasio yang menggambarkan besarnya proporsi dividen yang dibagikan terhadap pendapatan bersih perusahaan

Variabel bebas yang digunakan adalah Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on assets* (ROA). Rasio ini diukur dengan membagi *earning after tax* dengan *total assets*. *Free cash flow* (FCF) dalam penelitian ini diukur dengan nilai bersih kenaikan atau penurunan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan (*Cash Flow from Operations*) yang dikurangi dengan pembelian atau investasi aset tetap secara tunai (*Capital Expenditure*). Peneliti kemudian membagi *free cash flow* dengan *total assets* pada periode yang sama dengan tujuan agar dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain.

Leverage diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), Rasio ini diukur dengan membagi *total debt* dengan *total equity*. Yang terakhir *Investment Opportunity Set* dalam penelitian ini akan diproksikan sebagai *market tobook value of equity* (MVE/BVE). Rasio ini dihitung dengan cara membagi kapitalisasi pasar (harga saham penutupan dikalikan dengan jumlah lembar saham beredar) dengan total ekuitas.

3.3 Teknik Analisis

Penelitian ini meliputi uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Untuk uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$DPR = \alpha + \beta 1ROA + \beta 2FCF + \beta 3DER + \beta 4IOS + e$$

Keterangan:
α : konstanta
DPR : Kebijakan Dividen
β1ROA : Profitabilitas
β2FCF : *Fre Cash Flow*
β3DER : *Leverage*
β4IOS : *Investment Opportunity Set*
e : koefisien eror

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	36	.002	.144	.04000	.032472
FreeCashFlow	36	.003	.256	.05533	.063514
Leverage	36	.140	10.739	4.24764	3.253669
InvestmentOpportunitySet	36	.196	9.395	1.68025	1.624633
KebijakanDividen	36	.016	.735	.28297	.183233
Valid N (listwise)	36				

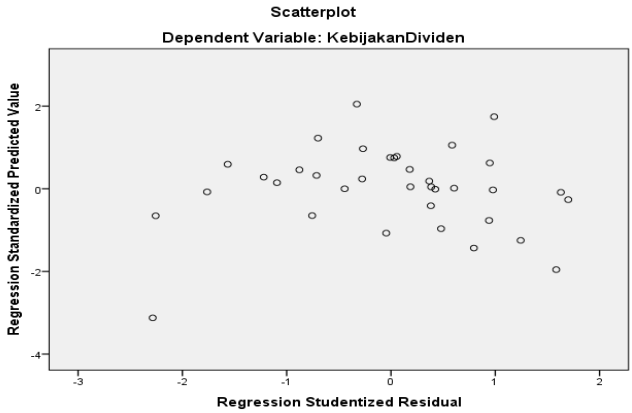
Berdsarkan tabel 4.1 di atas maka dapat dilihat statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian:

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Profitabilitas	.602	1.660
FreeCashFlow	.900	1.111
Leverage	.599	1.668
InvestmentOpportunitySet	.925	1.081

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.2 terlihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi yang diajukan bebas dari multikolinieritas.

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar 4.1 grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebut terlihat tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.73134515
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.058
	Negative	-.094
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, terlihat bahwa nilai signifikan yaitu 0,200 diatas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi normal.

Tabel 4.4
Adjusted R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.454[a]	.206	.104	.77710

a. Predictors: (Constant), InvestmentOpportunitySet, Leverage, FreeCashFlow, Profitabilitas
b. Dependent Variable: KebijakanDividen

Pada tampilan tabel 4.4 model summary besarnya koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai adjusted R^2 yaitu 0,104, hal ini berarti 10,4% variabel kebijakan dividen yang diproksikan dengan *dividend payout ratio* dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, *free cash flow*, *leverage* dan *investment opportunity set* sedangkan sisanya 89,6% merupakan pengaruh dari sebab-sebab atau faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 4.5
Hasil Regresi Simultan
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.858	4	1.215	2.011	.117[b]
	Residual	18.720	31	.604		
	Total	23.578	35			

a. Dependent Variable: KebijakanDividen
b. Predictors: (Constant), InvestmentOpportunitySet, Leverage, FreeCashFlow, Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau F test di atas, didapat F hitung sebesar 2,011 dengan tingkat probabilitas 0,117. Hal ini menunjukan bahwa nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, *free cash flow*, *leverage* dan *investment opportunity set* tidak berpengaruh secara bersama terhadap kebijakan dividen.

Tabel 4.6
Hasil Regresi Parsial
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.035	.702		-2.898	.007
	Profitabilitas	-.130	.194	-.138	-.671	.507
	FreeCashFlow	.037	.115	.055	.324	.748
	Leverage	.092	.150	.127	.612	.545
	InvestmentOpportunitySet	.426	.185	.384	2.306	.028

a. Dependent Variable: KebijakanDividen

Setelah melakukan analisis regresi berganda dari tabel 4.6 diatas, maka nilai-nilai koefisien regresi tersebut dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi yang disusun dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

DPR = -2,035 – 0,130 ROA + 0,037 FCF + 0,092 DER + 0,426 IOS + e

Berdasarkan hasil pengujian uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,671 dengan nilai signifikansi sebesar 0,507. Karena nilai t hitung (-0,671) lebih kecil dari t_{tabel} (1,309) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,507 maka hipotesis 1 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Sehingga meskipun keuntungan perusahaan sedang tinggi belum tentu perusahaan membayarkan dividen. Hal ini bisa disebabkan karena manajemen perusahaan lebih memilih laba tersebut ditahan di dalam perusahaan untuk tujuan investasi bagi perusahaan agar di masa depan perusahaan dapat meraup laba yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Ross et al, 2008) dalam Hartini (2009) tentang *residual theory of dividend* yang menyatakan bahwa selama perusahaan memiliki proyek investasi yang menghasilkan *return* lebih tinggi dari *required return* maka perusahaan akan mempergunakan laba untuk membelanjai investasi itu.

Hasil pengujian uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,324 dengan nilai signifikansi sebesar 0,748. Karena nilai t hitung (0,324) lebih kecil dari t_{tabel} (1,309) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,748 maka hipotesis 2 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel *free cash flow* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini berarti meskipun *free cash flow* yang tersedia di perusahaan cukup tinggi belum tentu *free cash flow* tersebut digunakan untuk pembayaran dividen. Hal ini bisa disebabkan karena perusahaan-perusahaan *finance* memanfaatkan *free cash flow* yang tinggi untuk menjaga kecukupan modalnya agar ketika sewaktu-waktu perusahaan memiliki peluang investasi yang menguntungkan perusahaan bisa menggunakan dana yang tersedia di dalam perusahaan.

Hasil pengujian uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,612 dengan nilai signifikansi sebesar 0,545. Karena nilai t hitung (0,612) lebih kecil dari t_{tabel} (1,309) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,545 maka hipotesis 3 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan *finance* memiliki tingkat hutang yang tinggi, perusahaan akan tetap membayarkan sebagian kasnya kepada para pemegang saham. Hal ini bisa saja terjadi apabila perusahaan berusaha memberi sinyal positif bagi investor dengan menambah hutang, yang kemudian dapat meningkatkan laba perusahaan.Temuan ini sesuai dengan teori sinyal (*signalling theory*) yang dikemukakan oleh Bhattcharya (1979) dalam Difah (2011) yang menjelaskan bahwa informasi tentang *cash dividend* yang dibayarkan dianggap investor sebagai sinyal prospek perusahaan di masa mendatang.

Hasil pengujian uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,306 dengan nilai signifikansi sebesar 0,028. Karena nilai t hitung (2,306) lebih besar dari t_{tabel} (1,309) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,028 maka hipotesis 4 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel *investment opportunity set* berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika adanya peluang investasi yang menguntungkan maka manajemen perusahaan yakin dengan tingkat pengembalian atas investasi tersebut, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor atas investasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lang and Litzenberger (1989) dalam Rosdini (2009) yang menyatakan bahwa bagi perusahaan kenaikan dividen mengimplikasikan pengurangan kebijakan manajemen atas investasi yang telah *overinvesting* sehingga respon pemegang saham positif terhadap kenaikan dividen tersebut.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka profitabilitas dan *free cash flow* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. *Leverage* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen. *Investment opportunity set* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Peneliti menyarankan agar perusahaan-perusahaan *finance* lebih mempertimbangkan risiko atas hutang yang ada di perusahaan karena bagaimanapun pendanaan eksternal yang tinggi akan memiliki risiko yang tinggi pula. Dalam hal ini perusahaan bisa memanfaatkan pendanaan internal ketika sewaktu-waktu perusahaan memiliki peluang investasi yang menguntungkan, sehingga investor akan memberikan sinyal positif atas laba yang tidak dibagikan. Sedangkan peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat menjelaskan kebijakan dividen seperti kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional karena terdapat dugaan adanya pengambilan keputusan atas kebijakan dividen (dividen dibagi atau ditahan) yang dilakukan di RUPS.

6. REFERENSI

[1] Ayu, Titie Kharisma. 2013. *Pengaruh Profitabilitas, Investment Opportunity Set, Leverage, dan Growht Terhadap Kebijakan Dividen (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).* Jurnal. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

[2] Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi 11, Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta.

[3] Devi, Ni Putu Yunita. dan Erawati, Ni Made Adi. 2014. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur*. Jurnal. Universitas Udayana. Bali.

[4] Difah, Siti Syamiroh. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2009.* Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.

[5] Hartini, Pri. 2009. *Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Future Abnormal Return dan Future Profitability.* Skripsi. Universitas Indonesia.

[6] Mawarni, Luh Fajarini Indah dan Ratnadi, Ni Made Dwi. (2014). *Pengaruh Kesempatan Investasi, Leverage dan Likuiditas Pada Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Idonesia.* Jurnal. Universitas Uadayana. Bali.

[7] Murhadi, Werner R. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.

[8] Ningrum, Khairunnisa Indah. 2011. *Analisis Pengaruh Investment Opportunity Set Terhadap Return Saham Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2009).* Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

[9] Pradana, Salvatore Wika Lingga dan Sanjaya, I Putu Sugiartha. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow, dan Investment Opportunity Set terhadap Dividend Payout Ratio (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI).* Simposium Nasional Akuntansi XVII. Universitas Mataram. Lombok.

[10] Putri, Dithi Amanda. 2013. *Pengaruh Investment Opportunity Set, Kebijakan Utang dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).* Jurnal. Universitas Negeri Padang.

[11] Rosdini, Dini. 2009. *Pengaruh Free Cash Flow Terhadap Dividend Payout Ratio*. Jurnal. Universitas Padjajaran. Bandung.

[12] http://www.idx.co.id

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PBB-P2 TERHADAP PAJAK DAERAH PADA DISPENDA KOTA PALEMBANG

Sinta Nurdiana [1)], H. Hasan Kuzery [2)], Jaka Darmawan [3)]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
dwiketut91@gmail.com [1]
hasankuzery@binadarma.ac.id [2]
jakadarmawan@yahoo.com[3]

Abstract

the purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of tax revenue land and building rural and urban areas to local tax revenue on services revenue the city of Palembang in order to know the shortcomings and weaknesses in the collection of property tax in rural and urban areas so as to make suggestions that are considered necessary for the development department of Palembang city revenues. the data used are primary and secondary. measurement using the formula effectiveness and contribution. the processed data is the target of property tax in rural and urban areas. The analysis technique used is descriptive analysis and quantitative descriptive kulalitatif. based on research results and the results for the effectiveness of property tax overall rural and urban areas always hit the target, while the contribution of property tax in rural and urban areas contribute only moderate, moderate, and less.

Keywords: *Local Tax, Hotel Tax, Hotel Tax Boarding House, Inhibitors Factors of Withholding Hotel Tax of Boarding House*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah yang demokratis telah terbuka lebar sejak adanya reformasi di Indonesia hal ini juga berpengaruh pada berkurangnya peran pemerintah pusat dan bertambahnya peran pemerintah daerah, dimana berbagai urusan pemerintah pusat akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah akan memiliki otonomi yang luas. Otonomi diberikan kepada suatu daerah dengan tujuan agar daerah tersebut dapat mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan daerah dalam rangka pelayanan masyarakat dan pembanguanan suatu daerah. Sebagai konsekuensi pemberian otonomi daerah, pemerintah daerah harus berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan dana yang berasal dari Pajak Daerah. Masalah utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khusus untuk meningkatkan realisasi target penerimaan pajak khususnya tentang PBB-P2. Hal tersebut akan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih menggali potensi penerimaan Pajak Daerah dari sektor PBB-P2 daerahnya.

Setelah melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Kota Palembang melakukan semua kegiatan perpajakan terkait tentang PBB-P2. Data dari Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kota Palembang menunjukan target penerimaan PBB-P2 dan realisasi pencapainnya dari tahun 2012-2014 serta prosentase keberhasilan pencapaian target penerimaan.

Namun dalam penerimaan PBB-P2 sering kali penerimaannya tidak efektif atau tidak mencapi target, jika penerimaan PBB-P2 tidak efektif maka akan menghambat perkembangan penerimaan

daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, karena pajak PBB-P2 memiliki kontibusi cukup besar terhadap Pajak Daerah. Maka dari itula penulis ingin mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 apakah sudah mencapai target apa belum dan seberapa besar kontribusi PBB-P2 terhadap Penerimaan Pajak Daerah (PD) serta perbandingan efektivitas dan kontribusi PBB-P2.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut: **"efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap realisasi pajak daerah pada dispenda kota palembang.**

2. KAJIAN LITERATUR

Efektivitas

Menurut Deddi dalam Elbi (2010:25) Efektivitas menunjukan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan / kebijakan di mana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Mahmudin dalam Elbi (2013:26) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely)*. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

$$\text{EfektivitasPBB-P2} = \frac{Realisasi\ \ Penerimaan\ \ PBB-P2}{Target\ \ Penerimaan\ \ PBB-P2} X100\%$$

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuanagn

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman

Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Siahaan (2010 :553-555) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutaan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah kontruksi tehnik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan perdalaman dan atau laut. PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

OBJEK PBB-P2

Menurut Siahaan (2010:555-556) Objek Pajak PBB berdasarkan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi atau banguna yang miliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,

keuakawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan . Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan Perkebunan, Perhutaan, dan Pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha Perkebunan, tanah yang diberi hak perusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilaya usaha Pertambangan.

SUBJEK PBB-P2

Menurut Siahaan (2010:559-560) Subjek Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang Pribadi atau badan yang secara nyata mempuntai suatu hak atas bumi dan atau pemperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara itu, wajib pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan dan secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoeh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, mengasai dan atau memperoleh manfaat atas banguan. Hal ini berarti pada pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sma.

KONTRIBUSI

Kata Kontribusi Menurut Alwi dalam Elbi (2013 :26) berarti iuran uang atau sumbangan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak Daerah. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pajak Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pajak Daerah juga kecil (Mahmudi dalam Elbi, 2013 :27).

KontribusiPBB-P2

$$= \frac{Realisasi\ \ Penerimaan\ \ \ PBB-P2}{Realisasi\ \ Penerimaan\ \ \ Pajak\ \ Daera\,h} \text{x}100\%$$

Kriteria Penerimaan Kontribusi PBB-P2 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Rasio	Kemampuan keuangan Daerah
00,00%-10,00%	Sangat kurang
10,01%-20,00%	Kurang
20,01%-30,00%	Sedang
30,01%-40,00%	Cukup
40,01%-50,00%	Baik
>50,00%	Sangat baik

Sumber : Dasri Munir (2002:24)

3. METODEPENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskripstif Kualitatif dan analisis deskriptif Kuantitatif. Deskriptif Kualitatif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan menyususn teori, memandang teori sebagai hasil proses induksi dari wawancara terhadap fakta yang disusun melalui proses pengumpulan data, kategorisasi data, dan pengembangan pola atau susunan teori. Sedangkan Deskriptif Kuantitatif merupakan analisis mengambarkan, penjelasan suatu keadaan yang diperoleh dari hasil perhitungan data angka-angka yang kemudian akan ditarik kesimpulannya dari hubungan yang relavan dengan masalah yang ada, kemudian dari kesimpulan tersebut dapat dijadikan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan Instansi.

Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi :

1. Analisis Efektifitas

Besarnya peningkatan efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus :

Tingkatefektivitas

$$= \frac{Realisasi\ \ Penerimaan\ \ \ PBB-P2}{Target\ \ Penerimaan\ \ \ PBB-P2} x\ 100\%$$

2. Analisis kontribusi PBB P2

Kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

TingkatKontribusiPBBP2

$$= \frac{Realisasi\ \ Penerimaan\ \ \ PBB\ P2}{Realisasi\ \ Penerimaan\ \ \ Pajak\ \ Daera\ h} x\ 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Target penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan Dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, pada tahun 2012 pemungutannya sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah dengan target pada Tahun anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp83.562.750.000, tahun anggaran 2013 Rp83.562.750.000, dan tahun anggaran 2014 Rp95.000.000.000, sedangkan realisasinya untuk tahun anggaran 2012 Rp76.134.848.215, tahun anggaran 2013 Rp79.673.835.193, dan tahun anggaran 2014 RP83.810.426.995.

Maka tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah :

Tingkatefektivitas 2012= $\frac{\text{Rp } 76.134.848.215}{\text{Rp } 83.562.750.000}$ x 100%

= 91,11 %

Tingkatefektifitas 2013= $\frac{\text{Rp } 79.673.835.193}{\text{Rp}\,83.562.750.000}$ x 100%

= 95,35 %

Tingkatefektivitas 2014= $\frac{\text{Rp}\,83.810.426.995}{\text{Rp}\,95.000.000.000}$ x 100%

= 88,22 %

Berdasarkan analisis di atas maka dapat diketahui pada tahun 2012 tingkat efektivitas pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 91,11% dengan kriteria efektif, dan pada tahun 2013 tingkat efektivitas PBB-P2 mengalami peningkatan sebesar 95,35% dengan kriteria efektif, sedangkan di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 88,22% dengan kriteria cukup efektif, walaupun ditahun 2013 mengalami peningkatan tapi ditahun 2014 mengalami penurunan sehingga masih dikatakan tidak mencapai target atau yang telah ditetapkan dengan kriteria cukup efektif, ini disebabkan karena terlalu tingginya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palembang dari target yang sebelumnya ditetapkan sewaktu masih dipungut oleh pemerintah pusat yang hanya Rp40.000.000.000 sampai Rp50.000.000.000, dan masih kurangnya tenaga ahli dibidang PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

A**NALISIS KONTRIBUSI**

Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, pada Tahun 2012 sudah diserahkan pemungutannya ke pemerintah daerah dengan Realisasi pada Tahun 2012 Rp76.134.848.215, Tahun anggaran 2013 Rp79.673.835.193, dan Tahun anggaran 2014 Rp83.810.426.995, sedangkan Realisasi penerimaan pendapatan Pajak daerah Tahun anggaran 2012 Rp333.104.821.406, Tahun anggaran 2013 Rp357.230.028.259, dan Tahun anggaran 2014 Rp463.574.599.151.

Maka tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap penerimaan Pajak Daerah adalah :

tkontribusi tahun 2012= $\frac{Rp\ 76.134.848.215}{Rp\ 333.104.821.406}$X100%

=22,85 %

kontribusi tahun 2013 = $\frac{Rp\ 79.673.835.193}{Rp\ 357.230.028.259}$X 100%

=22,30 %

kontribusi tahun 2014 = $\frac{Rp\ 83.810.426.995}{Rp\ 463.574.599.151}$X 100%

=18,07 %

Berdasarkan analisis di atas maka dapat diketahui kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap penerimaan pajak daerah, Tahun anggaran 2012 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kontribusi sebesar 22,85 %, Tahun anggaran 2013 sebesar 22,30%, dan Tahun anggaran 2014 sebesar 18,07 %.dari tahun 2012 sampai 2013 kontibusi PBB-P2 kriteria kontribusi adalah Sedang walaupun di Tahun 2014 Kriteria Kontribusi adalah Kurang, Karena pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga terjadinya perubahan pada Pendapatan Daerah.

5. SIMPULAN

Simpulan

1. Analisis efektivitas, setelah melakukan analisis efektivitas bahwa dapat diketahui secara keseluruhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2012 sampai 2013 selalu mencapai target (efektif), namun untuk tingkat efektivitas pada tahun 2014 (cukup efektif).
2. Analisis kontribusi, setelah melakukan analisis kontribusi bahwa dapat diketahui secara keseluruhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2012 samapai tahun 2013 dikatakan sedang berkontribusi, atau kontribusi lebih dari 20 % dengan kriteria kontribusi adalah sedang, namun untuk tahun 2014 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sangat kecil karena memberikan tingkat kontribusi sebesar 18,07% dengan kriteria (kurang).

Saran

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang harus memperhatikan penetapan target penerimaan PBB Perdesaan dan perkotaan untuk tahun berikutnya sesuai dengan pencapai target realisasinya (secara realistis) sehingga pencapaian target penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan akan tercapai, Kepalak Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang juga harus menggunakan setrategi yang lebih dari strategi Gebyar Hadiah.

2. Secara keseluruhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kontribusinya sedang (antara 20%-30%). Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang agar meningkatkan penerimaan PBB-P2 sehingga kontribusinya meningkat terhadap penerimaan pajak daerah minimum kriterianya cukup (antara 30,01%-40%).

6. REFERENSI

[1] Nordiawan, Deddy dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

[2] Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

[3] Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi, Besaran Tarif dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

[4] Rismawati.2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta:Empat Dua

[5] Sanusi, Anwar.2014.*Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta :Salemba Empat

[6] Siahaan.2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta : PT. Raja Grafindo

[7] Fitriandi, Dkk. 2014 Undang- Undang Perpajakan . Jakarta : Salembang Empat

[8] Siti Resmi.2013. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Jakarta : Salembang Empat

[9] Suhadak.2007. *Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.

[10] Suparmo&Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi

[11] Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,* Penerbit Andi, Jogjakarta

[12] Halim. 2008. *Pengertian Intensifikasi* Edisi Revisi. Penerbit Salembang Empat . Jakarta

[13] Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

[14] Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

[15] Wijaya, Haw. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : Rajawali Pers.

[16] http://dhiasitsme.Wordpress.com/2013/06/30/pendapatan-asli-daerah-sebagai-cermianan-ekonomi-daerah/

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN LQ45 TERDAFTAR DI BEI 2014

Siti Sahara[1], Poppy Indriani[2], Titan Terzagi[3]
[1,2,3]*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma P*
[1]sitisahara283@ymail.com
[2]Poppy.Indriani@binadarma.ac.id
[3]m.titan4@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the factors company size, company profitability, company solvency, audit opinion, earning per share, and total commitee size that affect audit delay partially or simultane on the company LQ45 listed in the Indonesian Stock Exchange in 2014. This study used quantitative data, sampling using purposive sampling. The total numbers of samples were 39 companies. Then, data were analyzed using descriptive statistics, classical assumption test and multiple linier regression analysis. The result of this study shows that :(1)The size of the Company has not significant effect on Audit Delay (2) Profitability Company has not a significant effect on Audit Delay(3)Solvency Company has not significant effect on Audit Delay(4) Opinion Auditor has not significant effect on the Audit (5)Earning Per Share has a significant effect on the audit Delay(6)Total audit committee has not significant effect on Audit Delay(7) Company Size, Profitability, Solvency, Auditor Opinion, Earning Per Share , and Total Audit Committee simultane has affect the Audit Delay.

Keywords: *Company Size, profitability, Solvency , EPS, Audit Delay.*

1. PENDAHULUAN

Kegiatan operasi bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya berdampak pada meningkatnya aktivitas para investor dalam memantau kinerja perusahaan *go public*.Oleh karena itu, setiap perusahaan *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan.Ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia guna menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bapepam No. X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-346/BL/2011 yang berlaku mulai taggal 5 juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Pada peraturan tersebut tertulis bahwa setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Pasar Modal wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, meskipun demikian dari tahun ketahun masih banyakperusahaan publik yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan LQ45 karena perusahaan yang sahamnya paling aktif diperjualbelikan, seharusnya perusahaan LQ45 mematuhi peraturan dari BEI yaitu menerbitkan laporan keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup buku. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Sebagai contoh: Di Indonesia, Pada tahun 2013 terdapat 91 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan tahun 2012, dari 91 perusahaan tersebut terdapat 5 perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ45 yaitu PT Borneo Lumbung Energi & Metal, PT Bakrieland Development Tbk, PT Krakatau

Steel (Persero) Tbk, PT Trada Maritime Tbk, dan PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk. Pada tahun 2014 dari 548 perusahaan yang terdaftar di BEI terdapat 31 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan tahun 2013 (www.idx.co.id).

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul ”Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014.”

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Audit Delay

Menurut Subekti dan Novi dalam Esynasali (2014), *Audit Delay* adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang menunjukkan mengenai lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Lamanya *audit delay* tergantung dari jangka waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit.Pelaksanaan audit memerlukan adanya perencanaan audit berupa penyusunan anggaran waktu *(time budget)* yang merupakan suatu pedoman audit tetapi tidak absolut. Menurut Dyer dan Mchugh (1975) dalam Sari (2011) menggunakan tiga kriteria keterlambatan pelaporan yaitu sebagai berikut :

1. *Preliminary lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan keuangan pendahulu oleh bursa;
2. *Auditor’s report lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani;
3. *Total lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan di bursa.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang sanksi bagi perusahaan terdaftar yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi.

2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay

2.2.1. Ukuran Perusahaan

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan *total assets* yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan rumus:

Ukuran Perusahaan = Log (Total Aktiva)

2.2.2. ProfitabilitasPerusahaan

Dalam penelitian ini tingkat profitabilitas diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\ \%$$

2.2.3. Solvabilitas Perusahaan

Dalam penelitian ini tingkat solvabilitas diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\ \%$$

2.2.4. Opini Auditor

Terdapat enam jenis opini yang diberikan oleh auditor yang terdiri dari (Mulyadi, 2013: 19-22), dalam penelitian ini digunakan metode ordinal dengan pemberian skor :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) skor 5
b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion Report with Explanatory Language*) skor 4
c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*) skor 3
d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*) skor 2
e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*) skor 1

2.2.5. *Earning Per Share (EPS)*

Dalam Penelitian ini dengan menggunakan rumus :

$$\textbf{EPS} = \frac{\textbf{Laba bersih setelah pajak}}{\textbf{Jumlah saham beredar}}$$

2.2.6 Jumlah Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Bapepam no. IX.I.5 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No: Kep- 29/PM/2004 yang diterbitkan pada 24 September 2004 mensyaratkan jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tidak kurang dari 3 (tiga) orang yang diketuai satu orang komisaris independen dan 2 (dua) orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan.

2.2.7. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah ringkasan proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan. Empat karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI, yaitu (Baridwan, 2004: 5-7):

a. Dapat Dipahami
b. Relevan
c. Keandalan

2.2.8 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Kartika 2009	"Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap*Audit Delay"*. (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan LQ 45 Yang TerdaftarDi Bursa Efek Jakarta)	Ukuran Perusahaan, Laba/ rugi perusahaan, Opini Auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan variabel Profitabilitas dan Reputasi Auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay.*
2	Dewi Lestari (2010)	"Analisis Faktor-	Profitabilitas perusahaan,

		Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay"* (Studi Empiris pada Perusahaan *Consumer Goods* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).	Solvabilitas perusahaan, dan Kualitas Auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan Variabel Ukuran Perusahaan dan Opini Auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay.*
3	Ani Yuliyanti (2011)	"Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap *Audit Delay"*. (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2007-2008).	Ukuran perusahaan dan Ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan Variabel Opini Auditor, Solvabilitas Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*
4	Novelia Sagita Dicky 2012	"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Perusahaan *Go Public* di Indonesi'. (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2008	Variabel Ukuran KAP dan Umur Perusahaan secara signifikan mempengaruhi *audit delay*, sedangkan Variabel Ukuran Perusahaan dan ROA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay.*

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data objek kuantitatif yang bersumberdari data sekunder yaitu data dari laporan keuangan auditan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 yang telah di publikasikan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari *homepage* BEI yaitu www.idx.co.id, www.sahamok.com, www.ojk.go.id

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini tentang Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Opini Auditor, *Earning Per Share*, Komite Audit, *Audit Delay* Laporan Keuangan Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014.

3.3. Definisi Variabel Operasinal

Variabel Ukur	Definisi	Indikator	Skala
Audit Delay (Y)	Selisih tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal laporan keuangan auditan	Jarak laporan penutupan tahun buku dengan Penerbitan laporan audit	Rasio
Ukuran Perusahaan (X1)	besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dinilai dari *total assets* yang dimiliki oleh perusahaan	Ln = Total Aktiva	Nominal
Profitabilitas (X2)	Kemampuanperusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri	ROA = Laba Bersih 100 % ———— Total Aktiva	Rasio
Solvabilitas (X3)	kemampuan suatuperusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi	DAR= Total Utang 100 % ———— Total Aktiva	Rasio
Opini Audit (X4)	pendapat yang diberikan oleh auditor independen atas laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan	Opini Auditor	Ordinal
Earning Per Share (X5)	Keuntungan yang di peroleh oleh investor atas lembar saham yang terjual.	Laba Saham Jumlah Saham yang beredar	Rasio
Komite Audit (X6)	Dewan Komite Audit yang ada di perusahaan.	Jumlah dewan komisasris komite audit	Nominal

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Perusahaan LQ 45 yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling.*

3.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan bantuan program aplikasi komputer SPSS 16, Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas. normal atau tidaknya suatu data dapat dilihat dengan menggunakan uji *One Sampel Kolmogorov Smirnov*. Penelitian ini menggunakan taraf signifikasi 5%, maka distribusi data penelitian dinyatakan normal apabila memiliki nilai probabilitas (sig) > 0,05.

3.5.1. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5 % maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas

3.5.2. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dengan niai VIP<10 maka variabel independen yang digunakan terlepas dari permasalahan mutikolinearitas.

3.6. Uji Hipotesis

Regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y= a + b1X1 + b2X2+ b3X3 + b4X4 + b5X5+ B6X6 + e$$

Keterangan :

Y	= *Audit Delay*	X4	= Opini Audit
α	= Konstanta	X5	= Earning Per Share
b1,b2,b3,b4,b5,b6	= Koefisien regresi	X6	= Jumlah Komite Audit
X1	= Ukuran Perusahaan	e	= Variabel Pengganggu
X2	= Profitabilitas Perusahaan		
X3	= Solvabilitas Perusahaan		

3.6.1. Uji Regresi Parsial (Uji T)

Uji Statistik T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai Pr < α = 5% ; maka H_0 diterima dan Jika nilai Pr > α = 5% ; maka H_0 di tolak.

3.6.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.Jika nilai Pr <α = 5% ; maka H_0 diterima dan Jika nilai Pr > α = 5 % ; maka H_0 di tolak.

3.6.3. Koefisisen Determinasi (R2)

Koefisisen determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisisen determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Uji Statistik

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,590 dengan signifikansi sebesar 0,877. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada *understandardized residual* lebih besar dari 0,05 (0,877>0,05), sehingga dapat diartikan data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal, Uji Heteoskedastisitas menunjukkan tingkat signifikan semua variable independen lebih besar dari taraf signifikan 0,05.Hal ini berarti bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan Uji Heteoskedastisitas menunjukkan tingkat signifikan variable ukuran perusahaan sebesar 0,566, profitabilitas sebesar 0,773, solvabilitas sebesar 0.928, opini audit sebesar 0,926, *earning per share*sebesar 0.760, dan jumlah komite audit sebesar 0.644 lebih besar dari taraf signifikan 0,05.Hal ini berarti bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas**.**Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi X1 sebesar -8.064, koefisien regresi X2 sebesar -10.690, koefisien regresi X3 sebesar – 5.951, koefisien regresi X4 sebesar 49.927, koefisien regresi X5 sebesar 0.000, koefisien regresi X6 sebesar – 37.427, dan nilai konstanta sebesar 182.334.

Y= 182.334 X1 + 8.064 X2 + 10.690 X3 + 5.951 X3 – 49.927 X4 – 0.000 X5 + 37.427 X6

4.2. PEMBAHASAN

Pada Penelitian ini Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Berdasarkan tabel hasil bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,109>0.05), maka hipotesis ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diklakukan oleh Lestari (2010), Sagita dan Dicky (2012) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay* karenaauditor menganggap bahwa dalam proses pengauditan berapapun jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan diperiksa dengan cara yang sama, sesuai dengan prosedur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Profitabilitas Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Berdasarkan tabel hasil bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.083>0.05), maka hipotesis ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliyanti (2011) dan Kartika (2009) yang menyatakan bahwa Profitabilitas Perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay* karena tuntutan dari pihak-pihak yang berkepentingan tidak terlalu besar sehingga tidak memicu perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan dengan lebih cepat.

Solvabilitas Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Berdasarkan tabel hasil bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.730>0.05), maka hipotesis ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Yulianti (2011) yang menyatakan Solvabilitas Perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay*, karena standar pekerjaan auditor yang telah diatur dalam SPAP menyatakan bahwa pelaksanaan prosedur audit perusahaan baik yang memiliki total utang besar dengan jumlah *debt holder* yang banyak atau perusahaan dengan utang yang kecil dan jumlah *debt holder* sedikit tidak akan mempengaruhi proses penyelesaian audit laporan keuangan. Opini Auditor tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014, Berdasarkan tabel bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.738>0.05), maka hipotesis ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti (2011) yang menyatakan bahwa Opini Auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay*, Karena pendapat yang dikeluarkan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang

dimiliki suatu perusahaan ternyata tidak mempengaruhi *Audit Delay* karena jenis pendapat auditor merupakan *bad news* atau *good news* atas kinerja manajerial perusahaan dalam setahun bukan merupakan faktor penentu dalam ketepatan waktu pelaporan audit karena opini auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Audit Delay*.

Earning Per Share Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Berdasarkan tabel hasil bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0.030<0.05), maka hipotesis diterima. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lianto dan Kusuma (2010) menyatakan bahwa EPS berpengaruh terhadap *audit delay*. perusahaan dengan EPS yang lebih tinggi memiliki *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan perusahaan dengan EPS yang rendah.dalam penelitian ini adalah Jumlah Komite Audit Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan LQ 45 yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014.Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.431>0,05), maka hipotesis ditolak.Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hasyim dan Rahman (2011) yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah komite audit perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*.

4.3. Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi ganda, diperoleh nilai F hitung sebesar 3.862 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,005< 0,05) dan nilai F hitung lebih besar dari F tabel (3.862>2.34) maka hipotesis diterima, artinya Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahaan, Opini Auditor, *Earning Per Share* dan Jumlah Komite Audit memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *Audit Delay* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014.

4.4. Uji Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini sebesar 0,311 atau 31,1%, yang berarti bahwa semua variable indenpenden secara bersama-sama dapat menentukan besarnya perubahan *Audit Delay* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sebesar 31,1 %, sedangkan 69,9 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Opini Auditor, dan Jumlah Komite Audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Delay, sedangkan Earning Per Share* mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0,030 terhadap *Audit Delay* pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014, sedangkan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan, Solvabilitas Perusahahaan, Opini Auditor, *Earning Per Share*, dan Jumlah Komite Audit secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0,005 terhadap *Audit Delay* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Peneliti dapat memberikan saran agar Penelitian selanjutnya disarankan memperbanyak variabel independen seperti Kualitas Auditor, Umur Perusahaan, Ukuran KAP, Independensi Komite Audit, Probabilitas Kebangkrutan, dan Anak Perusahaan Multinasional atau mengganti variabel independen yang tidak signifikan dari penelitian ini dengan variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi *Audit Delay* guna memperoleh penjelasan lebih baik mengenai fenomena tersebut , Memperpanjang periode penelitian mulai dari 3-4 tahun sehingga dapat melihat perbandingan yang terjadi dalam setiap tahun

sehingga akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi dan mendapatkan hasil yang akurat dan bervariasi.

6. REFERENSI

[1] Ghozali, Imam. 2009. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 16"*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

[2] Hartono. 2008. Edisi I, Cetakan I. "Analisis Data Statistika dan Penelitian dengan program spss 16.0'. Penerbit: Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

[3] Kartika, Andi. 2009."Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan LQ 45 Yang TerdaftarDi Bursa Efek Jakarta). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2009, Hal. 1 - 17 Vol. 16, No.1

[4] Lestari, Dewi. 2010. "AnalisisFaktor –Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang.

[5] Murhadi, Werner. 2013."Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Evaluasi Saham". Penerbit :Salemba Empat. Jakarta.

[6] Mulyadi. 2013. *"Auditing"*, Buku Dua, Edisi Keenam. Salemba Empat. Jakarta.

[7] Putri, Carmelia. 2011. " Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi: Universitas Gunadarma. Jakarta.

[8] Sanusi, Anwar. 2014.''Metodologi Penelitian Bisnis ". Penerbit:Salemba Empat. Jakarta

[9] Subekti, Imam dan Novita sagita. 2004. "Faktor -Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Audit Delay di Indonesia*". Simposium Nasional Akuntansi VII.

[10] Suyanto, Danang. 2014. Cetakan Pertama. "Auditing Pemeriksaan Akuntansi". Penerbit: Center Of Academic Publishing Service.Yogyakarta

[11] Yulianti, Ani. 2011. "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2007- 2008. Skripsi : Universitas Negeri Yogyakarta.

[12] www.idx.co.id

[13] www.ojk.go.id

PENGARUH KOMPENSASI BONUS DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN LABA PT. TUNAS CIPTA PROFITA (TCP) PADA PENGOPERASIAN CONTACT CENTER PLN 123 PALEMBANG

Syafrial[1)], Siti Nurhayati Nafsiah[2)], dan Jaka Darmawan[3)]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma Palembang
[1]Email: syafrialmars@ymail.com
[2]Email: siti_nurhayati@binadarma.ac.id
[3]Email: jakadarmawan@yahoo.co.id

ABSTRAK

This study aimed to examine: 1). The effect of bonus plan to earnings management, 2). The effect of leverage to the earnings management. The study population to all employee customer services officer at PT. Tunas Cita Profita for operating Contact Center PLN 123 Palembang. Samples was determined by purposive sampling method, a total of 35 employee. Techniques of data analysis using multiple linear regression analysis with earnings management as the dependent variable, bonus plan and leverage as an independent variable. Data processing with SPSS version 16.0 for windows. Result show that (1) Bonus planhas effect to earnings management (2) Leverage has no effect to earning management.

Keywords*: earnings management, bonus plan, leverage.*

1. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan pasti memiliki karyawan, dimana karyawan merupakan sumber daya manusia yang paling kompeten. Dilihat dari kemajuan dibidang sumber daya manusia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari segi kualitas dan kuantitas diperhitungkan kemampuannya dalam suatu perusahaan. Sering dengan pertumbuhannya yang sangat pesat itulah terjadi perubahan, peningkatan peran dan fungsi suatu sumber daya manusia itu dilihat dari pengukuran yang ditentukan dari keberhasilan yang dicapai. Dengan demikian, sumber daya manusia merupakan aset organiasi yang paling penting yang harus dikelola dengan baik, karena mereka memegang peranan penting dalam membentuk dan mencapai setiap tujuan organisasi. Dari situlah, sumber daya manusia merupakan aset yang sepantasnya mendapatkan perlakuan sewajarnya, dalam memperoleh hak dan kewajibannya sesuai dengan tingkat kemampuan. Untuk menunjang kualitas hidup manusia tersebut, adanya rasa puas dari dalam diri manusia apabila pekerjaan yang dilakukan mempunyai hasil yang terbaik, sehingga mendapatkan pengakuan dari orang lain, pengakuan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk *reward* apabila dianggap hasilnya baik dan memuaskan dan mendapatkan *punishment* apabila hasilnya tidak sesuai dengan apa yang semestinya atau bertentangan dengan apa yang diharapkan. Tindakan oportunis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikan maupun dituntun sesuai dengan keinginannya. Prilaku menajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya ini dikenal dengan istilah manajemen laba (*earnings management*). Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu "Pengaruh Kompensasi Bonus dan *Laverage* Terhadap Manajemen Laba PT. Tunas Cita Profita Pada Pengoperasian Contact Center PLN 123 Palembang" dan Adapun tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh Kompensasi Bonus dan *Laverage* Terhadap Manajemen Laba PT. Tunas Cita Profita Pada Pengoperasian Contact Center PLN 123 Palembang.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian Pemberian Kompensasi

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja meraka, Burhanuddin (2015:235). Sedangkan menurut Malayu (2011:118) kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang , barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan balas jasa yang diberikan perusahaan.

2.2 Jenis-jenis Kompensasi

1. Kompensasi Langsung adalah kompensasi yang langsung dirasakan oleh penerimannya, yakni berupa gaji, upah, insentif merupakan hak karyawan dan kewajiban perusahaan yang pasti : Gaji, Upah dan Insentif/Bonus
2. Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang tidak dapat langsung dirasakan oleh karyawan, yakni *benefit* dan *services* (tunjangan pelayanan).

2.3 Tujuan dan Pentingnya Kompensasi

Kompensasi menurut Burhanuddin (2015:241) tujuan diberikannya kompensasi yaitu:Pemenuhan kebutuhan ekonomi, Meningkatkan produktivitas kerja, Memajukan organisasi atau perusahaan dan Menciptakan keseimbangan dan keadilan.

2.4 Laverage (Hutang)

Laverage yang juga dikenal dengan *solvabilitas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, Rasio ini melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai dengan hutang atau pinjaman dari pihak luar dengan kemapuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Perusahaan yang baik mestinya memiliki modal yang lebih besar dari pada hutang.

2.5 Pengukuran *Laverage*

Pengukuran *laverage* dapat menggunakan *Debt Ratio* (DR), dari hasil rasio ini menunjukan bahwa total aktiva yang dimiliki perusahaan dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semangkin tinggi. *Debt Rasio* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt Rasio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

2.6 Manajemen Laba

Manajeman laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajeman yang menaikan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya, yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan *profitabilatas* perusahaan untuk jangka panjang. Manajeman laba menjadi menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usahannya pada suatu periode tertentu.

2.7 Teknik Manaejemen Laba

Beberapa pola atau alasaman manajeman melakukan manajen laba yaitu:*Income smoothing* dimana menyebutkan bahwa laporan keuangan dapat mempengaruhi pasar modal. Ini berarti menunjukan betapa pentinganya peranan laporan keuangan. Biasannya laba yang stabil dimana tidak

banyak fluaktasi atau *variance* dari satu priode ke priode lain disebut *income smoothing*. Biasannya dilakukan dengan cara: Mengatur waktu kejadian transaksi, Memilih prinsip atau metode alokasi dan Mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang bukan dari operasi normal. Tidak hanya mempengaruhi laba rugi priode berjalan, tetapi juga priode yang lalu.

2.8 Pengaruh Kompensasi Bonus dan Leverage Terhadap Manajemen Laba

Dari uraian teori-teori di atas maka dapat ditarik hipotesis sementara diamana dapat digambarkan jika Tiadak ada kompensasi bonus maka tidak ada pengaruh terhadap manajeman laba perusahaan dan sebeliknya jika kompensasi ada akan berpengaruh terhadap manajeman laba perusahaan. Maka peneliti sedikit menjelaskan bahwa, kompensasi bonus merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh perusahaan atas jasa karyawan. Kompensasi ini dihitung serta diberikan kepada karayawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi/perusahaan tempat ia bekerja. Pada umumnya, tujuan setiap organisasi dalam merancang sistem kompensasi adalah untuk memikat karyawan dan menahan karyawan yang kompeten. Selain itu kompensasi harus bisa memotivasi para karyawan serta mematuhi sesuai peraturan hukum.

2.9 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
01	Wisnu (2010)	Pengaruh kepemilikan *institusional*, *Leverage*, ukuran perusahaan dan *profitabilitas* terhadap manajemen laba.	Kepemilikan instutisional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba, leverage dan profitablitas berpengaruh signifikanpositif terhadap manajemen laba, sedangakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.
02	Halima (2010)	*Corporate govermance*, struktur, struktur kepemilikan, dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba.	*Corporate govermance* struktur kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba sedangkan kompensasi bonus berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.
03	Andiany (2010)	Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, praktek *corporate govermance* dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba.	Struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, praktek *corporate govermance* berpengaruh signifikan negatif tehadap manajemen laba dan kompensasi bonus berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.
04	Anoki Herdian Dito (2010)	Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Slamet Langgeng Purbalingga dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel *Intervening.*	Kompensasi bepengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, sehingga adanya peningkatan pemberian kompensasi akan meningkatkan kinerja karyawan serta Kompensasi berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja melalui motivasi kerja, sehingga dapat disimpulkan

			bahwa motivasi kerja menjadi variabel yang memediasi antara kompensasi terhadap kinerja.
05	Anisa Elfira (2014)	Pengaruh kompensasi bonus dan *leverage* terhadap manajemen laba.	Jika kompensasi mengalami peningkatan, maka tindakan manajemen laba juga akan meningkat, begitupun sebaliknya sedangkan leverage tidak perpengaruh signifakan terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan bahwa jika perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi, maka tindakan manajemen laba yang dilakukan manajer juga akan tetap atau konstan.

2.10 Kerangka Pemikiran

Salah satu yang menjadi dasar untuk pemberian kompensasi bonus yaitu mengenai bagaimana seorang manajer melihat dampak dari pemberian kompensasi tersebut berdampak kepada manajemen laba perusahaan, juga dimana tingkat tinggi/rendahnya laba perusahaan berkaitan erat dengan sistem pembelian kompensasi yang dilihat dari tercerminnya tingkat kualitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Selain kompensasi bonus, manajemen laba juga dipengaruhi oleh *laverage* (utang) perusahaan terhadap kreditor.*Laverage* merupakan total utang dibagi dengan total asset. Jika *laverage* menggambarkan tanggungan utang perusahaan maka semakin tinggi tingkat *leverage* berarti juga semakin tinggi tingkat hutang perusahaan. Hubungan pemberian kompensasi bonus dan *laverage* terhadap manajemen laba, pemberian kompensasi dilihat input dan output yang diberikan oleh karyawan. Dalam hal ini pemberian kompensasi harus dilakukan sesuai dengan sistem yang berlaku. Dalam setiap perusahaan, sistem dalam pemberian kompensasi berbeda satu sama lain, karena setiap pemberian kompensasi dilakukan secara satuan. Serta *laverage* yang harus diselesaikan atau dilunasi oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu atau yang telah disepakati.

3 METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada PT. Tunas Cita Profita (Contact Center PLN 123 Palembang) yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No.170A Palembang.

3.2 Metode Penelitian

1. Variabel Independen (variabel bebas)
   Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel dependen (terkait).
2. Variabel Dependen (variabel terikat)
   Sering disebut dengan variabel output , kriteria, konsekuen. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti,

1. Wawancara, Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada bagian keuangan PT. Tunas Cita Profita Pada Pengoperasian Contact Center PLN 123 Palembang.
2. Kuesioner (Angket), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan deri responden. Dalam hal ini peneliti memberikan kuesioner kepada keryawan PT. Tunas Cita Profta (TCP) Pada pengoperasian Contact Center PLN 123 Palembang.
3. Observasi, Dalam hal ini peneliti langsung mengamati cara kerja, melihat laporan keuangan, menganalisasi masalah yang ada dan mendatangi PT. Tunas Cita Profta (TCP) Pada pengoperasian Contact Center PLN 123 Palembang

b. Data Skunder

"Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan". Menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah pihak PT. Tunas Cita Profita Pada Pengoperasian Contact Center PLN 123 Palembang.

3.4 Teknik Analisis Data

1. Skala Pengukuran

Berbagai macam skala pengukuran yang dapat digunakan dalam bukunya Sugiyono (2012:132), namun peneliti lebih memfokuskan menggunakan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

2. Populasi dan Sample

Menurut Sugiyono dalam bukunya Metode penelitian bisnis, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menentukan populasi dalam penelitian ini adalah di PT. Tunas Cita Profita (TCP) pada pengoperasian Contact Center PLN 123 Palembang yang jumlah karyawanya 109 orang.

3. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terkait dapat dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliabel dengan instrumen yang valid dan reabel. Hasil penelitian yang valid bila terdepat kesamaa antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, Sugiyono (2012:172).

4 Uji Realibilitas

Suatu alat pengukuran menunjukan konsistensi hasil pengukuran sekitarnya alat pengukuran itu digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau digunakan oleh orang yang berlainan dalam bersamaan atau waktu yang berlainan.

5 Uji F (F-Test)

Uji F dilakukan untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variable bebas terhadap variable terkait serta untuk menguji apakah model yang digunakan sudah fix atau tidak. Patokan yang digunakan dengan membandingkan nilai sig yang didapat dengan derajat siginifikan a=0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari derajat signifikan maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan (sudah fix).

6 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Nugroho (2010:100) menyatakan bahwa untuk menguji hubugan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau pervariabel digunakan uji t. Langkah-langkah uji t sebagai berikut :

1. Menentukan formula hipotesis, Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
2. Menentukan level of significant. Dengan $\alpha = 5\%$
3. Tingkat pengujian : Jika – ttabel > thitung > ttabel, maka Ho ditolak dengan Ha diterima, Jika – ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak
4. Menentukan nilai thitung dengan menggunakan SPSS
5. Menentukan Ho diterima atau ditolak

Untuk menentukan Ho diterima atau ditolak dilihat dari tingkat signifikansi.Apabila tingkat signikansi dibawah 0.05 maka Ho diterima atau berpengaruh secara signifikan.

3.5 Analisis Regresi Ganda

Analisis regresi gandadigunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunya) variable dependen (kriterium) bila dua atau lebih variable independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaikan diturunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variable devendennya minimal 2.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan *estimator linier* yang baik. Jika telah memenuhi asumsi klasik, berarti model regresi ideal *(Best Linier Ubblas Estimator/BLUE).*

a. Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak.Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastis

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residula suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah adalah model yang heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka dapat melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residuanya (SDRESID).

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Dengan menggunakan responden sebanyak 35 maka r table dapat diperoleh melaui table r *product moment person* dengan df (*degree of freedom*) = n-2, jadi df=35-2=33, maka r table=0.282. Untuk mencari r tabel penliti mencari menggunakan sitem SPSS, dengan cara mengklik menu Transform>Compute Variabel (hanya bagian yang penting yang ditampilkan) padam kotak numberic Expression, Dengan rumus :

IDF.T(0.95,VAR00001)/SQRT(VAR00001+(IDF.T(0.95,VAR00001))**2)>kemudian klik OK. Menggunakan rumus pada sistem aplikasi Butir pertanyaan diaktakan valid jika nilai r hitung > r table. Dapat dilihat dari *corrected item total correlation.*

2. Uji Realibilitas

Uji Realibilitas dalat dilihat pada nilai Cronbach's Alpha, jika nilai Alpha > 0,60 maka kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah rliabel. Nilai Cronbatch's Alpha adalah 0,677 jadi di atas 0,60 maka reliabel.

3. Uji F (F-Test)

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa signifikan yaitu 0.012 < 0.05. Kemudian DF (degree freedom) atau derajat kebebasan yang berfungsi sebagai satu sisi nilai t-nya Karena nilah signifikan kecil dari 0.05 maka model regresi yang digunakan *fix*, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variable-variabel penelitian.

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai sig untuk kompensasi bonus sebesar 0.550 lebih besar dari 0.05 hal ini berarti bahwa Ho diterima sehingga Ha ditolak yang berarti variabel kompensasi bonus tidak terlalu berpengaruh terhadap variabel manajemen laba, sedangkan sig untuk Leverage sebesar 0.107 lebih besar dari 0.05 hal ini berarti bahwa Ho diterima sehingga Ha ditolak yang berarti variable leverage tidak terlalu berpengaruh terhadap variable manajemen.

4.2 Pengukuran Leverage

Dalam pengukuran Leverage ini menggunakan *Debt Ratio* (DR) dari rasio ini akan menunjukan bahwa total aktiva yang dimili perusahaan dibiayai dengan hutang.

$$\textit{Debt Rasio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

$$\frac{2.214.000.000}{5.714.000.000}$$

$$0.38746 \times 100 = 38.74\%$$

Dari pengukuran yang dilakukan dapat dilihat bahwa 38,74 % aktiva yang dimiliki perusahan dibiaya hitung, dapat disimpulkan bahwa persentasi yang didapat tidak terlalu signifikan atau mempengaruhi akiva bahkan laba nantinya.

4.3 Uji Asumsi Klasik

1 Uji Normalitas

Jika sig > 0.05 maka data berdistribusikan normal, Jika sig < 0.05 maka data tidak berdistribusikan normal. Berdasarkan dari tabel diatas terlihat bahwa hasil uji SPSS Sig data untuk menejemen laba adalah 0.330 maka lebih besar dari 0.05 sehingga data berdistribusi normal, data nilai kolnogorov smirnov kompensasi bonus adalah 1.016 masih dalam berdistribusikan normal dan nilai kolnogorov smirnov kompensasi laverage 0.812. Dengan demikian dapat dinyatakan data dari dua variabel penelitian telah terdistribusi normal sehingga layak pakai untuk analisis berganda, karena nilai siginfikansi untuk masing-masing varibel lebih besar.

2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji terjadi tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji Glatser. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas. Dalam uji ini, apabila sig >0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, maka model yang baik adalah tidak terjadai heteroskedastisitas. Dari hasil uji statistik ditampilkan bahwa variable independent yaitu X1 (kompensasi bonus) adalah 0.420 dan X2 (Laverage) adalah 0.112. Maka dapat disimpulkan Variabel X1 dan X2 semuanya > 0.05 sehingga

tidak signifikan semuannya sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Dimana Y : Manajemen Laba, X1 : Kompensasi Bonus, X2: *Laverage*, Dari hasil tabelSPSS tersebut didapatkan sig adalah 0.146 maka > 0.05 sehingga Ho diterima.Sehingga kompensasi bonus dan laverage tdak berpengaruh terhadap menajeman laba. Dari penlitian diatas dapat disimpulkan bahwa sig adalah 0.550 maka Ho diterima. Sehingga tidak ada pengaruh kompensasi bonus terhadap laverage.Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : Persamaan regresinya adalah Y= 6.784 + 0.106 X1 + 0.329 X2, Keterangan : Secara parsial Kompensasi Bonus dan Laverage berpengaruh. Jika kompensasi bonus naik 1 satuan maka laverage akan naik 0.106 dengan asumsi variable lain konstan. Jika nilai laverage naik 1 satuan maka komnsasi bonus akan naik sebesar 0.329 dengan asumsi variable lain konstan R Squere adalah 0.113. hal ini berarti 11,3% nilai manajeman laba dipengaruhi oleh variabel kompensasi bonus dan laverage (positif).

4.5 Pembahasan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba

Jika dikaitkan data kompensasi bonus dengan hasil olahan data statistik dengan program SPSS maka dapat disimpulkan bahwa dengan sedikitnya persentase dari perusahaan yang memberikan bonus untuk manajer sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan, tentunnya setiap manjaer itu menginginkan tercapainya batas pemberian kompensasi sehingga perusahaan memberikan bonus manajernya. Manajer akan berupaya agar laba yang dijadikan tolek ukur untuk dasar pemberian bonus mencapai tingkatan dimana laba perusahaan berada diantara batas bawah dan batas pemberian bonus. Oleh karena itu manajer melakukan praktek manajemen laba yang diinginkan sehingga manajer akan memperoleh dan menerima bonus dari perusahaan pada periode yang bersangkutan.

4.6 Pembahasan Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba

Jika dikaitkan data dan hasil pengukuran *leverage*dengan hasil olahan data statistik dengan program SPSS, maka dapat disimpulkan bahwa karena rata-rata perusahaan memiliki *leverage*yang aman dalam arti perusahaan mampu membayar hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan, maka manajer tidak tertarik atau tidak termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba. Ini disebabkan karena perusahaan tidak membutuhkan tindakan-tindakan yang akan membantu perusahaan dalam situasi tertentu. Perusahaan berada pada keadaan yang baik atau aman dan mampu untuk membayar hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.

5 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahsan pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagi berikut : Kompensasi bonus berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti jika kompensasi bonus mengalami peningkatan, maka tindakan manajemen laba juga akan meningkat begitupun sebaliknya dan Laverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan bahwa jika perusahaan memiliki laverage yang tinggi, maka tindakalan manajemen laba yang dilakukan manajer juga akan tetap atau konstan. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran: Diharapkan agar perusahaan mengelolah keuangan terutama laba yang didapat diolah baik sehingga kinerja keungan di masa yang akan datang selalu dalam kondisi yang baik sehingga perusahaan emberikan hak-hak karyawan terutamata kompensasi yang diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan karyawan dan Diharapkan perusahaan mempertahankan leverage yang ada pada perbankan dan pada pihak-pihak lain agar laba yang dikekelolah oleh menajemen dapat

memaksimalkan laba yang diharapkan oleh perusahaan. Singga antara tujuan perusahaan dan karyawan tercapai.

6 REFERENSI

[1] Andiany. 2010. *Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, praktek coporate govermance dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba*.

[2] Dito, Anoki Herdi. 2010. *Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Slamet Langgeng Purbalingga dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening.*

[3] Elfira, Analisa. 2014. *Pengaruh Kompensasi Bonus dan Leverage Terhadap Manajemen Laba.*

[4] Halima. 2010. *Corporate Govermance, Struktur, Struktur Kepemilikan dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen laba.*

[5] Harahap, Sofyan. 2011. *"Teori Akuntansi"*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

[6] Hasibuan, Malayu. 2011. *"Manajemen Sumber Daya Manusia"*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara

[7] Sugiyono. 2012. *"Metode Penelitian Binis"*, Edisi Revisi. Jakarta: Alfabeta.

[8] Yusuf, Burhanuddin. 2015. "*Manajeman Sumber Daya Manusia"*. Jakarta: Rajawali Pers.

[9] Wisnu. 2010. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba.*

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN PUBLIK, UKURAN PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP KONSERVATISME DI BEI

Tri Dewi Astuty[1], Henni Indryani[2], Yeni Widyanti[3]
[1,2,3]Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
[1]Email: astutytridewi@yahoo.com
[2]Email: henniinayah@yahoo.com
[3]Email: yeniwidyanti@binadarma.ac.id

Abstract

This study discusses the variables that affect the conservatism at LQ45 companies in Indonesia Stock Exchange (IDX). The variables are institusional ownership, public ownership, firm size and leverage. The population of this research is LQ45 companies listed on Indonesia Stock Exchange for 2013-2014. The sample used are 26 by using specified criterias. The hypothesis results show that institusional ownership, public ownership, firm size and leverage do not have significant influences to the conservatism. The adjusted R^2 is at 6,5%, meaning that there is 93,5% of other variables that explains the value of conservatism.

Keywords*: institusional ownership, public ownership, firm size and leverage.*

1. PENDAHULUAN

Keterbatasan laporan keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia dalam Harahap (2012:251) yaitu laporan keuangan bersifat historis, laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material, adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan dan laporan keuangan yang bersifat konservatisme.

Konservatisme merupakan suatu prinsip kehati-hatian dengan cara menyajikan nilai aset dan pendapatan secara rendah dan menyajikan kewajiban dan beban secara tinggi (Ardina, 2012). Konservatime mengakui adanya kerugian ketika ditemukan, akan tetapi menunda pengakuan laba hingga terverifikasi (Sun dan Liu, 2011 dalam Astuti, 2015:1).

Konservatisme banyak dipraktikkan dalam pembuatan laporan keuangan untuk mencegah manager melakukan penggelembungan dana yang berasal dari pendapatan yang cepat diakui dan beban yang terlalu lama diakui. Konservatisme dilakukan karena akuntansi menyajikan laporan keuangan perusahaan menggunakan basis akrual.

Basis akrual menyertakan pencatatan nilai transaksi mengenai kemungkinan arus kas masuk dan arus kas keluar di masa mendatang sehingga nilai akuntansi yang terbentuk bukan hanya dari transaksi riil (Handojo, 2012 dalam Astuti, 2015:1).

Berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya mengenai konservatisme, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada hal yang sama. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pemilihan LQ45 sebagai objek pada penelitian ini dikarenakan LQ45 merupakan perusahaan dengan likuiditas tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Pertama yaitu masuk dalam peringkat 60 besar dari total transaksi saham.

Kriteria kedua adalah keadaan keuangannya dan pertumbuhannya. Ini artinya LQ45 merupakan perusahaan dengan keadaan keuangan tertinggi dan pertumbuhan yang baik di Bursa Efek Indonesia

sehingga LQ45 termasuk perusahaan besar. Kriteria ketiga yaitu penentuan peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar dan kriteria yang terakhir perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia minimum tiga bulan.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa hal. Pertama, kebutuhan akan informasi yang relevan dan dapat diandalkan yang dapat membantu para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Kedua, memberikan informasi mengenai tinggi rendahnya prinsip konservatisme pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, konservatisme telah dihapuskan dari IFRS namun masih tetap diterapkan di perusahaan LQ45.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Positive Accounting Theory

Menurut Watts dan Zimmerman (1990) terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dapat menjelaskan keputusan manajemen untuk bertindak konservatif atau tidak. Pertama *plan bonus hypothesis* (hipotesis rencana bonus), hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, akan membuat manajer perusahaan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini, sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Sehingga manajer cenderung melakukan manajemen laba agar target laba dapat terpenuhi. Tindakan manajemen laba dalam membuat pelaporan laba cenderung optimis sehingga tingkat konservatisme menjadi rendah.

Hipotesis kedua yaitu *debt covenant hypothesis* (hipotesis kontrak hutang). Jika perusahaan mempunyai hutang yang tinggi, maka kreditor juga mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, kreditor akan meminta agar perusahaan melakukan pelaporan secara konservatif agar perusahaan tidak berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Sedangkan *political cost hypothesis* (hipotesis biaya politik) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung akan melakukan rekayasa penurunan laba yang bertujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung perusahaan. Biaya politik dapat timbul dari konflik kepentingan antara manajer dengan pemerintah, dimana manajer berusaha untuk meminimalkan laba agar terhindar dari biaya politik yang tinggi dan pemerintah berharap laba yang maksimal agar perusahaan dapat berkontribusi dalam kepentingan sosial masyarakat.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat dijadikan contoh untuk hal tersebut adalah pembayaran pajak. Cara penghitungan pajak yaitu semakin besar pendapatan perusahaan maka pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Usaha yang dilakukan manajer untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi dengan cara melaporkan laba yang rendah, dapat dikatakan bahwa terjadi pelaporan laba yang konservatif.

2.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian mengenai konservatisme yaitu Widayati (2011) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan perusahaan terhadap konservatisme akuntansi yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan publik, kepemilikan manajerialdan litigasi tidak berpengaruh terhadap konservatisme.

Berbeda dengan penelitian Deviyanti (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap konservatisme sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadapkonservatisme. Resti (2012) menyatakan bahwa kontrak hutang dan growth opportunities berpengaruh terhadap konservatisme, sedangkan Shintawati (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap

konservatisme, karakteristik dewan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, *debt covenant* yang diproksikan dengan *leverage* berpengaruh terhadap konservatisme.

Penelitian terakhir yaitu Nurrahmawati (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, *firm size* dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap konservatisme sedangkan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap konservatisme.

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Konservatisme

Deviyanti (2012) menyatakan kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba namun cenderung lebih konservatif.

H_1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Konservatisme

Kepemilikan publik merupakan persentase jumlah saham yang dimliki oleh publik dibandingkan dari seluruh saham yang beredar (Deviyanti, 2012). Kepemilikan publik yang tinggi menyebabkan pendanaaan dari luar meningkat sehingga memperlancar jalannya perusahaan. Artinya manajer harus menunjukkan bahwa ia mampu menjalankan perusahaan dengan baik dan sesuai dengan harapan para pemegang saham sehingga perusahaan melaporkan laporan keuangan secara berhati-hati atau secara konservatisme.

H_2: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme.

2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme

Perusahaan yang berukuran besar akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perusahaan dengan laba tinggi akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengeluaran *corporate social responsibility* (CSR). Oleh karena semakin besar perusahaan akan mempengaruhi manajer lebih konservatif dalam menyajikan laporan keuangannya. Menurut Lo (2005) dalam Deviyanti (2012:30) menyatakan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung akan melaporkan laba yang lebih rendah secara relatif permanen dengan menyelenggarakan akuntansi yang konservatif.

H_3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme.

2.2.4 Pengaruh Leverage Terhadap Konservatisme

Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, akan semakin tinggi juga pengawasan yang dilakukan pihak kreditor untuk memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Partisipasi aktif yang dilakukan oleh kreditor menyebabkan manajer lebih konservatif dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. Konservatisme yang diterapkan oleh perusahaan sangat membantu untuk memberikan informasi mengenai prediksi keuangan dimasa mendatang.

H_4: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014.

3.2 Operasional Variabel

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservatisme. Konservatisme diproksikan dengan *accrual measure* oleh Givoly dan Hayn (2002). apabila akrual bernilai negatif, maka laba

digolongkan konservatif, dan sebaliknya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan publik,ukuran perusahaan dan *leverage.* Kepemilikan Institusional diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusi seperti pemerintah, institusi keuangan dan institusi berbadan hukum. Kepemilikan publik diukur dengan jumlah saham yang dimiliki pihak *eksternal* (publik) kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan dengan melihat total aset perusahaan yang disajikan dalam neraca pada akhir tahun. *Leverage* (tingkat hutang) atau debt ratio yang merupakan perbandingan antara nilai buku seluruh hutang (*total debt*) dengan total aktiva (*total assets*).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan LQ45, yaitu perusahaan yang paling liquid di Bursa Efek Indonesia. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Menurut sugiyono (2014:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria penentuan dalam sampel ini adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada Agustus 2014, perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember selama periode pengamatan, perusahaan yang memberikan informasi tentang adanya kepemilikan saham institusi dan kepemilikan saham publik dan laporan keuangan dinyatakan dalam rupiah.

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, karena menyangkut empat variabel independen dan satu variabel dependen. Setelah dilakukan uji statisk deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai keseluruhan data sampe, selanjutnya akan dilakukan uji normalitas, ujimultikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Setelah semua uji dilakukan dan tidak terdapat masalah, akan dilanjutkan dengan uji koefisien determinasi, uji simultan dan uji parsial. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

4 HASILDAN PEMBAHASAN

Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan seluruh variabel diatas $\alpha = 0{,}05$ yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Hasil uji autokorelasi menyatakan nilai Durbin Watson berada diantara nilai -2 dan 2 yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,463[a]	,214	,065

a. Predictors: (Constant), lev, firmsize, publik, institusional

b. Dependent Variable: konservatisme

Pada tampilan tabel 4.1 *model summary* yang dapat dilihat dari *adjusted* R^2 yaitu 0,065. Artinya variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan *leverage* mampu menjelaskan variabel dependen yaitu konservatisme sebesar 6,5% sedangkan sisanya 93,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

4.1.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

Tabel 4.2 Hasil Regresi Simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4419751,829	4	1104937,957	1,433	,258[b]
	Residual	16195493,287	21	771213,966		
	Total	20615245,115	25			

a. Dependent Variable: konservatisme

b. Predictors: (Constant), lev, firmsize, publik, institusional

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikan sebesar 0,258 yang artinya nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan (bersama-sama) tidak mempengaruhi konservatisme.

4.1.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial (masing-masing) berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen.

Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Parsial

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3974,542	3869,760		-1,027	,316
	Institusional	3888,496	4098,049	,404	,949	,353
	Publik	3281,956	3883,362	,358	,845	,408
	Firmsize	,010	,006	,319	1,584	,128
	Lev	743,718	777,294	,204	,957	,350

a. Dependent Variable: konservatisme

Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai signifikan (sig) sebesar 0,353. Nilai sig sebesar 0,353 lebih besar dari 0,05 sehingga penelitian ini menolak H1 dan menerima H0 yang berarti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap konservatisme.

Kepemilikan publik memiliki nilai signifikan (sig) sebesar 0,408. Nilai sig sebesar 0,408 lebih besar dari 0,05 sehingga penelitian ini menolak H1 dan menerima H0 yang berarti bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap konservatisme.

Ukuran Perusahaan memiliki nilai signifikan (sig) sebesar 0,128. Nilai sig sebesar 0,128 lebih besar dari 0,05 sehingga penelitian ini menolak H1 dan menerima H0 yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme.

Leverage memiliki nilai signifikan (sig) sebesar 0,350. Nilai sig sebesar 0,350 lebih besar dari 0,05 sehingga penelitian ini menolak H1 dan menerima H0 yang berarti bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap konservatisme.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Konservatisme

Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusi yang besar belum dapat menjadikan pihak institusi menjalankan dengan baik fungsi pengawasan atau monitoring terhadap manajemen dalam menjalankan prinsip konservatisme dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini akan mendorong manajemen untuk melaporlan laba yang konservatif agar pembagian deviden tinggi.

4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Konservatisme

Hasil ini menunjukkan bahwa pihak eksternal selalu mengharapkan *return* yang tinggi atas saham yang mereka investasikan di perusahaan. Hal ini membuat manajer berusaha untuk menaikkan laba agar mendapatkan bonus karena kinerjanya dinilai bagus. Kepemilikan publik yang menyebar juga dapat mengakibatkan kontrol yang kurang bagi manajemen. Kurangnya kontrol terhadap manajemen dapat menyebabkan perusahaan melaporkan laba dengan tidak hati-hati. Dengan demikian semakin tinggi kepemilikan publik maka perusahaan semakin tidak konservatif dalam menyajikan laporan keuangan.

4.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme

Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang besar maka semakin rendah prinsip konservatisme yang diterapkan. Hal ini dikarenakan perusahaan berukuran besar akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sehingga perusahaan menyajikan laporan keuangan dengan sebenarnya atau secara riil.

4.2.4 Pengaruh Leverage Terhadap Konservatisme

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin rendah penerapan konservatisme. Hal ini disebabkan karena perusahaan membutuhkan dana dari kreditor, sedangkan kreditor tidak sembarangan dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan. Kreditor hanya akan tertarik pada perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar untuk menjamin dana yang ia pinjamkan. Hal ini akan mendorong manajer dalam melaporkan laba yang optimis dan tidak bersikap konservatif agar mendapatkan pinjaman dari kreditor.

5 SIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap konservatisme pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan, publik, ukuran

perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap konservatisme. Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menambahkan variabel-variabel independen yang lain yang mungkin berpengaruh lebih besar terhadap konservatisme, menambahkan sampel penelitian dengan cara menambahkan periode penelitian yang lebih lama agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan menggunakan perhitungan konservatisme selain ukuran akrual, seperti *earning/stock returns relation measure* dan *net asset measures* agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

6. REFERENSI

[1] Alhayati, Fajri. 2013. *Pengaruh Tingkat Hutang (Leverage) dan Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi.* Universitas Negeri Padang. Padang.

[2] Astuti, Elly. 2015. *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusional, Tingkat Hutang, Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris Perusahaan-Perusahaan Listing di BEI 2011-2012).* Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

[3] Belkaoui, Ahmed Riahi. 2012. *TeoriAkuntansi*. Penerbit: SalembaEmpat. Jakarta.

[4] Brilianti, Dinny Prastiwi. 2013. *Pengaruh Kepemlikian Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage dan Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi.* Universitas Negeri Semarang. Semarang.

[5] Bursa Efek Indonesia. 2015. *LQ45 Agustus 2014* www.idx.co.id (diakses 7 November 2015).

[6] Bursa Efek Indonesia. 2015. *Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan LQ45* www.idx.co.id (diakses 7 November 2015).

[7] Deviyanti, Dyahayu Artika. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme dalam Akuntansi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.* Universitas Diponegoro. Semarang.

[8] Handojo, Irwanto. 2012. *Sekelumit Konservatisme Akuntansi.* STIE TRISAKTI. Jakarta

[9] Kurniawati, irra. 2015. *Analisis Pengembangan Corporate Value berdasarkan Keputusan Investasi dan Pendanaan, Struktur Kepemilikan Serta Kebijakan Deviden pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.* Universitas Bina Darma. Palembang.

[10] Kuspratiwi, Indhira. 2014. *Pengaruh Konvergensi IFRS dan Kepemilikan Saham Asing terhadap Konservatisme Akuntansi.* Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

[11] Novikasari, Tri. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme dalam Akuntansi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011).* Universitas Riau. Riau.

[12] Nurrahmawati, An. 2015. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, Leverage dan Firm Size Terhadap Konservatisme Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.* Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

[13] Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Paragraf ke 7 revisi 2009.

[14] Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Salemba Empat. Jakarta.

[15] Septian, Ardo dan Yane Devi Anna. 2014. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Debt Covenant dan Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi pada Sektor Industri Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012).* Universitas Telkom.

[16] Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian.* Alfabeta. Bandung.

[17] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta. Bandung.
[18] Sujarweni, V. Wiratna.2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.* PUSTAKABARUPRES. Yogyakarta.
[19] Watts, Ross L. 2003. *Conservatism in Accounting-Part I: Explanations and Implications.* University of Rochester. New York.
[20] Watts, Ross L dan Jerold L. Zimmerman. 1990. *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective.* University of Rochester. New York.

PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, ASIMETRI INFORMASI, KESESUAIAN KOMPENSASI, SPI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI

Tri Heri Mulyo[1], Henni Indriyani[2], M. Titan Terzagi[3]

[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
mulyofahri@yahoo.co.id[1]
henniinayah@yahoo.com[2]
Mtitant4@gmail.com[3]

Abstract

*The fraud is not only happen in Company but also in government sector especially service and agencies. The factor that affect the fraud are, individual morality, information asymmetry, compliance compensation, effectiveness of the internal control. This research aimed to examine influence of the fraud in official communications and informatics (*Dishubkominfo) *South Sumatra. The kind of the research in quantitative descriptive with the case studies. Criteria respondent used in the study nomely government officials working on the related to the study variabel. Population and sample in this study is apparatus official communications and informatics South Sumatra especially the field with the responden 31 people. This study use sampling technique quota sampling. The data was collected by distributing questionnaires to the respondents directly concerned. The data were analysis technique used validity test and reliability test, classical test consisting normality test, multicolinearity test, and heteroscetasticity, and the test of hypothesis consisting of multiple regression test, coefficient of determination, T test and F test.*

Keywords: *Morality, Information Asymetry, Compliance compensation, SPI, KKA*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi, dan semakin terbukanya peluang usaha menyebabkan risiko terjadinya kecurangan pada perusahaan semakin tinggi. Kecurangan bisa diartikan seperti sikap seseorang yang tidak mau berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tidak dengan cara bekerja keras melainkan untuk mendapatkan apa yang diinginkanya itu, seseorang akan menggunakan jalur jalan pintas ini dapat diartikan sebagai kecurangan karena bisa berupa pencurian, penggelapan, penyembunyian, KKN dan masih banyak lainnya.

Masalah dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Dinas Perhubungan dan Informatika (Dishubkominfo) Sumatera Selatan salah satu kasus terbesar yaitu kasus Jembatan Timbangan pos pelayanan terpadu (PPT) di desa Pematang Panggang Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (SUMSEL), ditenggarai dijadikan ajang praktik punggutan liar (pungli) oleh oknum dinas perhubungan dan kominfo Sumatera Selatan. Uang miliyaran rupiah yang seharusnya masuk ke kas daerah diduga kuat masuk ke kantong pribadi.

Terjadinya kecendrungan kecurangan akuntansi karena adanya 1) *Greed* (Keserakahan), 2) *Opportunity* (Kesempatan), 3) *Need* (Kebutuhan), 4) *Exposure* (Pengungkapan) yang bisa diungkapkan seperti moralitas individu, asimetri informasi kesesuaian kompensasi dan keefektifan sistem pengensalian internal.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh moralitas individu, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*FRAUD*) akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Informatika (Dishubkominfo) Sumatera Selatan.

2 KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kecurangan Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam tesis Dewi (2014) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia.

2.2 Moralitas Individu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) http://kbbi.web.id/ yang diakses 17 November 2015 Moralitas adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika untuk mempengaruhi faktor-faktor moralitas individu adalah model Kohlberg dalam buku Arfan (2010:336) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional*. Kolherg menyamakan tiga tingkatan ini dengan tiga jenis hubungan yang berbeda antara diri, aturan, dan harapan masyarakat.

2.3 Asimetri Informasi

Menurut Tuanakotta (2013:166) asimetri informasi adalah ketidaksetaraan antara informasi yang dimiliki manajemen perusahaan Tbk. atau pemilik-pengelola perusahaan tertutup di suatu pihak, dengan pengetahuan mengenai akurat/tidaknya dan lengkap/tidaknya informasi tersebut yang dimiliki pengguna laporan keuangan di pihak lain.

2.4 Kesesuaian Kompensasi (Compensation)

Kesesuaian kompensasi adalah semua bentuk pendapatan baik berupa uang maupun non uang yang diterimalangsung atau tidak langsung oleh karyawan sebagai imbalan atas balas jasa atas apayang telah diberikan karyawan kepada perusahaan tempatnya bekerja Hasibuan (2007:118) dalam Adriani (2013:9). Tujuan kompensasi secara umum menurut Rivai (2010:743) dalam Zainal (2013:09) adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal.

2.5 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Personal entitas lain yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) Keandalan pelaporan keuangan (b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku Menurut Tunggal (2010:195).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian mengenai kecenderungan kecurangan (FRAUD) akuntansi, penelitian yang di lakukan oleh Kurniawan (2013) meneliti tentang pengaruh moralitas, motivasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kecurangan laporan keuangan dan hasilnya moralitas, motivasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kemudian Zainal (2013) juga melakukan penelitian tentang pengaruh efektivitas pengendalian intern, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi

(*FRAUD*) dan mempunyai hasil yang sama yakni efektivitas pengendalian intern, asimetri informasi dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi (*FRAUD*). Begitupun dengan Ariani (2014) dan Prawira (2014) juga membenarkan bahwa moralitas individu, asimetri informasi, dan keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*FRAUD*) akuntansi. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) mempunyai hasil yang berbeda tentang pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal pada kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh level moral individu, dan adanya pengendalian internal mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas mengenai kecenderungan kecurangan (FRAUD) akuntansi, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh moralitas individu, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (FRAUD) akuntansi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Menurutu Sigiono (2010) metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati, dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitianya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statisik.

3.2 Operasioanl variabel

a. *Variabel Independen (X)*

Moralitas individu, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal yang kesemuanya terdiri dari enam pertanyaan dalam setiap instrumen pertanyaan mewakili sebuah indikator. Respons dari responden diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5.

b. *Variabel Dependent (Y)*

Kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi terdiri dari enam item pertanyaan dalam setiap instrumen pertanyaan mewakili sebuah indikator. Respons dari responden diukur dengan menggunakan skala Likert 1-5.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik kuantitatif. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, kemudian uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan relibilitas. Uji asumsi klasik yakni uji heterokedatisitas autokorelasi, dan multikolinearitas. Uji hipotesis menggunakan uji koofisien determinasi (R_2), uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F).

4. PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Moralitas Individu Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan persamaan regresi berganda $Y = 42{,}766 + (-\ 0{,}067X_1\ ) + 0{,}561\ X_2 + -0{,}016X_3 + (-\ 0{,}220\ X_4\ )$. Untuk hasil pengujian hipotesis nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} $2{,}827 > t_{tabel}$ 1.706 maka H0 ada di daerah penolakan, berarti H1 diterima artinya artinya Moralitas Individu berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan. Selain itu dilihat dari nilai signifikansi pada uji t variabel Moralitas Individu lebih kecil daripada nilai signifikan yang ditetapkan ($0{,}009 < \alpha\ 0{,}05$) sehingga H1 diterima dengan koefisien regresi (β) moralitas individu bernilai negatif yaitu -0.077

menunjukkan bahwa moralitas individu mempunyai arah pengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan, dan pengaruhnya signifikan artinya apabila Moralitas individu pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan semakin meningkat, bisa menurunkan Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan dan penurunannya sangat signifikan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2014) membuktikan bahwa moralitas individu mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian dari Dewi (2014) Studi Eksperimen pada Pemerintah Kota Denpasar dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi antara individu yang memiliki level penalaran moral rendah dan level penalaran moral tinggi. Individu dengan level moral yang tinggi cenderung tidak melakukan kecurangan akuntansi jika dibandingkan dengan individu dengan level moral yang rendah.

4. 2 Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan persamaan regresi berganda $Y = 42{,}766 + (-\ 0{,}067X_1) + 0{,}561\ X_2 + (-0{,}016\ X_3) + (-\ 0{,}220\ X_4)$. Untuk hasil pengujian hipotesis nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2{,}624 > t_{tabel}\ 1.706$) maka H0 ada di daerah penolakan, berarti H2 diterima artinya artinya asimetri informasi berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan. Selain itu dilihat dari nilai signifikansi pada uji t variabel Asimetri Informasi lebih kecil daripada nilai signifikan yang ditetapkan ($0{,}014 < \alpha\ 0{,}05$) sehingga H2 diterima dengan koefisien regresi (β) asimimetri informasi bernilai negatif yaitu -1,024 menunjukkan bahwa asimetri informasi mempunyai arah pengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan , dan pengaruhnya signifikan artinya apabila asimetri informasi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan semakin meningkat, bisa meningkatkan Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan dan penurunannya sangat signifikan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2014) pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng membuktikan bahwa asimetri informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2014) bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecendrungan kecurangan akuntasi.

4.3 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan persamaan regresi berganda $Y = 42{,}766 + (-\ 0{,}067X_1) + 0{,}561\ X_2 + (-0{,}016\ X_3) + (-\ 0{,}220\ X_4)$. Untuk hasil pengujian hipotesis nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3{,}612 > t_{tabel}\ 1.706$) maka H0 ada di daerah penolakan, berarti H3 diterima artinya artinya kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan. Selain itu dilihat dari nilai signifikansi pada uji t variabel Kesesuaian Kompensasi lebih kecil dari pada nilai signifikan yang ($0{,}001 < \alpha\ 0{,}05$) sehingga H3 diterima dengan koefisien regresi (β) kesesuaian kompensasi bernilai positif yaitu

1,085 menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi mempunyai arah positif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan, dan pengaruhnya signifikan negatif artinya apabila kesesuaian kompensasi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan meningkat, maka Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan dan akan mengalami peningkatan kearah signifikan.

Hasil penelitian ini konsisten dan juga didukung dari penelitian yang telah dilakukan oleh Meliany (2013) bahwa kesesuaian kompensasi secara statistik memiliki pengaruh secara positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sejalan dengan pernyataan tersebut penelitian yang telah dilakukan oleh Zainal (2013) studi empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah dan Swasta di Kota Padang menyebutkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh siginifikan positif terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi.

4.4 Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan

Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan persamaan regresi berganda $Y = 42{,}766 + (-\ 0{,}067X_1) + 0{,}561\ X_2 + (-0{,}016\ X_3) + (-\ 0{,}220\ X_4)$. Untuk hasil pengujian hipotesis nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (0,173 > α 0,05) maka H0 ada di daerah penolakan, berarti H4 diterima artinya artinya keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan. Selain itu dilihat dari nilai signifikansi pada uji t variabel Partisipasi Anggaran lebih kecil dari pada nilai signifikan yang ditetapkan ($-1{,}400 < t_{tabel}$ 1.706) sehingga H3 diterima dengan koefisien regresi (β) kesesuaian kompensasi bernilai negatif yaitu -0,701 menunjukkan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal mempunyai arah pengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan, dan pengaruhnya signifikan artinya apabila keefektifan sistem pengendalian internal pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan semakin meningkat, bisa menurunkan Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi pada Dinas Perhubungan dan Informatika Sumatera Selatan dan penurunannya sangat signifikan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Prawira (2014) hasilnya menunjukan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan negati. Senada dengan pernyataan tersebut penelitian yang telah dilakukan oleh Ariani (2014) pada PDAM Kabupaten Bangli juga menunjukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecendrungan kecurangan kecurangan akuntansi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disumpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
2. Asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.
3. Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

4. Keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
5. Moralitas individu, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal bepengaruh secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraiakan, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan evaluasi

1. Untuk moralitas individu dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan seperti *training* ESQ, dan Pelatihan Etika dan Moralitas.
2. Untuk asimetri informasi untuk menghindarinya bisa dilakukan dengan melakukan penghindaran *adverse selection dan moral hazard.*
3. Untuk kesesuaian kompensasi sebaiknya mempertimbangkan lagi dengan mengetahui setiap pengeluaran oleh tiap-tiap pegawaai baru kemudian melakukan kesesuaian kompensasi.
4. Keefektifan sistem pengendalian internal bisa dilakukan dengan melakukan audit *Fraud*, tindakan pendeteksian, dan tindakan pencegahan terhadap tingkat kecendrungan kecurangan (*Fraud*) akuntansi.
5. Penelitian ini masih terbatas pada moralitas individu, asimtetri informasi, kesesuaian kompensasi, dan keefektifan sistem pengedalian internal terhadap kecendrungan kecurangan (*Fraud*) akuntansi. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah variabel penelitian seperti loyalitas pegawai, budaya etis organisasi, ketaatan aturan akuntansi.

6. REFERENSI

[1] Adriani, Novi, 2013. *Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Rotasi Pekerjaan Terhadap Kinerja Karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daaerah Operasi IX Jember. Skripsi*. Universitas Jember.

[2] Ariani, Ketut Sulasmi, 2014. *Analisis Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi di PDAM KABUPATEN BANGLI*. Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha (volume 2 No. 1, Tahun 2014.

[3] *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), 2013. *Internal Control – Integrated Framework*. http://www.coso.org/. diakses pada 12/11/2015.

[4] Dewi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari, 2014. *Pengaruh Moralitas Individu, dan Pengendalian Internal Pada Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali). Tesis*. Universitas Udayana.

[5] Harian Lidik. *Kasus Jembatan timbangan pos pelayanan terpadu (PPT) di desa pematang panggang Mesuji*. Melalui (http://harianlidik.com/?p=2408) diakses 12/11/2015.

[6] Ikatan Akuntan Indonesia, 2011, Standar Profesional Akuntan Publik, Salemba Empat, Jakarta.

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Pengertian Moralitas. Melalui http://kbbi.web.id/ yang diakses 17/11/2015.

[8] Krismiaji, 2010. Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Ketiga, Akademi Manajemen. Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

[9] Kurniawan, Gusnardi, 2013. *Pengaruh Moralitas, Motivasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok)*. Artikel Akuntansi. Universitas Negeri Padang.

[10] Mulyadi, 2010. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.

[11] Tunggal. Amin Wijaya, 2010. Dasar-dasar audit internal pedoman untuk auditor baru, Harvarindo, Jakarta.

[12] Meliany, Lia, 2013. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Akuntansi. Jurnal Akuntansi*. UPN "Veteran" Jakarta.

[13] Prawira, I Made Darma, 2014. *Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecendrungan Kecurangan (FRAUD) Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng)*. Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha (volume 2 No. 1, Tahun 2014.

[14] Sanusi, Anwar, 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta Selatan

[15] Sumsel Post Online. *Dishub Kota Palembang diselimuti kasus.* (*http://sumselpostonline.comdishub-kota-palembang-diselimuti-kasus.phd*) diakses 06/11/2015.

[16] Wetboek, Bulgerlijk, 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. WIPRESS. Jakarta.

[17] Zainal, Rizki, 2013. *Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenrungan Kecurangan Akuntansi (FRAUD) (Studi Empiris Kantor Cabang Bank Pemerintah dan Swasta di Kota Padang).* Artikel Akuntansi. Universitas Negeri Padang.

[18] Tuanakotta, Theorodus M, 2013. *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta

PENERAPAN PSAK 109 ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Utari Indriani[1], Fitriasuri[2], Ade Kemala Jaya[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma
utari.indriani28@gmail.com[1]
fitriasuri@binadarma.ac.id[2]
Ade.kemala.jaya@binadarma.ac.id[3]

Abstract

*The zakat is a nonprofit institution that elevates the dignity, social humanitarian of the poor with ZISWAF's funds (Zakat, donation, charity, endowments) and other funds which legitimate and from laws of individuals, groups, companies / institutions. The activity is to collect and distribute funds of ZISWAF to the poor. This study aims to determine how is the application of accounting that used at the institution of rumah zakat Branch Palembang. The method used is qualitative method, which analyzes and describes the application of accounting on the financial report of institution rumah Zakat branch Palembang which includes an analysis of the recognition, measurement, disclosure Presentation and then in compare with SFAS(*statement offinancial accounting standardssharia*) no 109, Accounting for Zakat and Infak / Alms. The results of this study show that the application of accounting rumah zakat branch Palembang used methods Cash Basic or cash basis, namely the recording of all transactions is only done when issuing cash and receiving cash, while the financial statements that applied by the manager of the zakat organization refers to SFAS 109 about accounting for zakat, infal / alms more detailed and unrestricted. Mechanism of financial is the recording of rumah Zakat and releasing of funds which sent to the center and managed by the center, then reporting of financial center using only the balance sheet, the report of changes in funding, and the changes in assets under management, while a financial report according to SFAS 109 using the financial statements namely: the balance sheet, report of changes in funds, changes in assets under management, cash report and notes to financial statements.*

Keywords *:*zakataccounting, *financial reporting*, SFAS(statement offinancial accounting standardssharia*)*No.109

1. PENDAHULUAN

Akuntasi syariah adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati: 2011). Lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pension dan lain sebagainya) pada masa sekarang ini berkembang dengan pesatnya. Volume dan nilai transaksi berbasis syariah sangat tinggi sehingga meningkatkan pula kebutuhan akan akuntansi syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah pertamakali adalah adanya bank syariah muamalat pada tahun 1992, kemudian diikuti dengan adanya asuransi syariah pada tahun 1994, yaitu asuransi Takaful.Jumlah lembaga keuangan yang berbasis syariah terus menerus berkembang dengan pesatnya.Perkembangan lembaga keuangan yang berasis syariah ini juga diikuti oleh aturan akntansi untuk transaksi syariah.

Ikatan Akuntan Akuntansi (IAI) telah mengeluarkan PSAK 109 untuk akuntansi zakat, infak/sedekah. PSAK 109 ini akan meneyeragamkan pencatatan pada lembaga pengola zakat yang selama ini sebagian besar menggunakan PSAK 45 untuk organisasi non laba. Sebelum ada PSAK 109, lembaga penglola zakat telah membuat laporan keuangan tetapi tidak ada keseragaman antara satu lembaga pengelola zakat yang lain. Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 adalah laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan

catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, penngeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengola zakat. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan- kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka – angka dalam laporan keuangan tersebut.

Tujuan pengelolahan zakat, antara lain, meningkatkan pelayan bagi masyrakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranatakeagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Hasan: 2011). Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat bertanggung jawab (amanah) dari para *muzaki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efesien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyrakat dan mencapai tujuan.Sementara itu, penyaluran zakat secara efesien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik.

2. KAJIAN LITERATUR

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.Tetapi *maraji"* yang kuat yaitu menurut Wahadi dan lain-lain, kata dasar zakat, berarti bertambah dan tumbuh, banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Qardhawi, 2007: 34).Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Makna zakat dapat juga diartikan menyucikan karena zakat akan mnegembangkan pahala pelaku dan membersihkan dosa. Menurut syariat, hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan makna zakat menurut istilah sejumlah harta yang khusus, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula (Mu'is, 2011: 22)

Menurut PSAK 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya *(mustahiq*). Infak adalah mengelurkan harta yang mencakup zakat dan non zakat.Infak ada yang wajib dan ada yang Sunnah.Infak yang wajib diantarnya adalah zakat, kafarat, dan nazari. Sedangkan infak yang Sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusian.
Menurut PSAK 109, infak/sedekah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Sedekah adalah pemberian harta pada orang – orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak – pihak lain yang berhak atau menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapun jumlahnya (Mu'is, 2011: 23)

2.1 Defenisi Akuntansi Zakat

Pengertian akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan (Haryono, 2011:5). Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Weygandt, 2007:4).

Pengertian akuntansi tersebut dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu pengertian dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi, dandari sudut pandang proses kegiatannya. Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk:

a) Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh menajemen

b) Pertanggungjawaban organisasi kepada para *muzakki*, badan pemerintah untuk kepentingan pajak, dan pihak-pihak lain yang terkait.

2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 109 untuk akuntansi zakat, infak/sedekah. PSAK 109 ini akan menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola zakat yang Selma ini sebagian besar menggunakan PSAK 45 untuk organisasi non laba. Sebelum ada PSAK 109, lembaga pengelola zakat telah membuat laporan keuangan tetapi tidak ada keseragaman antara satu lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat lainnya.Hal ini tentu menyulitkan bagi berbagai kalangan untuk memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan seharusnya informatif dan dapat dibandingkan antara laporan keuangan lembaga pengelola zakat satu dengan pengelola zakat lainnya.

Laporan keuangan amil menurut PSAK 10 adalah laporan keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan keuangan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan keuangan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga mejadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambar kondisi keuangan organisasi pengolahan zakat. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan – kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga angka – angka dalam laporan keuangan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan kumpulan data non angka yang bersifat deskriptif, seperti gambaran umum perusahaan (LAZIS Rumah Zakat Palembang) dan dokumen – dokumen yang relavan dengan masalah pokok penelitian.

3.2 Sumber Data

Adapun data yang akan di olah dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer
2. Data sekunder

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik atau cara-cara yang digunakan melalui:

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*, yaitu penelitian dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat terselesaikan.
2. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang relavan dengan permasalahan penelitian yang dapat berupa buku, majalah, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah untuk mendapatkan kejelasan konsep.
3. Penelitian dengan internet, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.4 Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif.Menurut Sanusi (2011) deskriptif komparatif adalah mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis

tentang penerapan akuntansi zakat objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada.Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Rumah Zakat Palembang.Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diterapkan pada LAZIS Rumah Zakat Palembang dengan PSAK 109.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Evaluasi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Rumah Zakat Palembang

Penerapan akuntansi di Rumah Zakat Palembang ini penyusunan laporan keuangannya tidak lepas dari proses pengumpulan bukti pembayaran, bukti penerimaan dan bukti yang lainnya kemudian bukti tersebut dicacat dalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan untuk masing – masing jenis dana. Karena laporan itu merupakan laporan gabungan dari keseluruhan jenis laporan keuangan untuk mengetahui laporan keuangan Rumah Zakat Palembang secara keseluruhan. Siklus pecatatan tersebut dilakukan pada saat penerimaan dan muzaki, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai:

1. Nama pemberi dana zakat
2. Tanggal penerimaan dana zakat
3. Alamat pemberi dana zakat
4. Tanda tangan pemberi dana zakat
5. Jumlah dana yang diberikan

Proses pencatatan akuntansi pada Rumah Zakat Palembang dimulai dengan membuat dalam jurnal, buku besar kemudian dibuat laporan keuangan, dengan pengumpulan bukti-bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Kemudian dibuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang merupakan laporan gabungan dari keseluruhan.

Laporan keuangan yang dibuat Rumah Zakat Palembang adalah harian dan bulanan yang bertujuan untuk melihat kinerja pengelola yang meliputi sirkulasi dana yang terkumpul dan juga laporan mengenai kedisplinan kerja manajemen selama ini, sedangkan laporan tahunan merupakan laporan menginformasikan seluruh jumlah penerimaan dana dan penyalurannya selama satu tahun penuh dan sekaligus sebagai evaluasi lembaga amil terhadap kinerjanya.

4.2 Pembahasan

PSAK 109 tidak hanya mengatur standar pelaporan keuangan lembaga amil zakat, namun mengatur tujuan akuntansi zakat lainnya yaitu, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah .

A. Pengakuan

Dalam PSAK 109, disebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan oleh Rumah Zakat berdasarkan nilai dasar tunai (cash basic), yaitu pencatatan transaksi dilakukan apabila ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan. Pencatatan penerimaan pad akas apabila aliran uang ke dalam kas yang diperlukan sebagai pendapatan dan pengeluaran kas apabila ada aliran uang ke luar dari kas diperlukan sebagai beban atau biaya. Pengakuan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Palembang sudah sesuai dengan PSAK nomor 109.

B. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan kedalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Umumnya Ziswaf yang diterima oleh Rumah Zakat berbentuk kas dan diukur sebesar jumlah Ziswaf yang diterima.Adapun infak/sedekah yang diterima oleh Rumah Zakat

berbnetuk barang berupa aset tetap diukur sesuai nilai wajar saat penerimanya. Pengukuran dana yang dilakukan oleh Rumah Zakat sesuai dengan PSAK nomor 109.

C. Penyajian

Rumah Zakat pusat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan mekanisme penyajian laporan dicabang hanya mencatat penerimaaan dan pengeluaran secara berkala setelah itu dikirim ke pusat dan diolah di pusat.

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
   Rumah Zakat menyajikan saldo dana yang terakumulasi dari total seluruh dana yang meliputi dana zakat , infak/sedekah, dan dana lain-lain.
b. Laporan Perubahan Dana
   Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal sesuai dg pos-pos nya.
c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Penyajian yang diterapkan oleh Rumah Zakat Palembang belum sesuai dengan PSAK 109 karena seluruh penyajian diserahkan oleh pusat dan Rumah Zakat Palembang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran yang dicatat dalam jurnal dan buku besar.

D. Pengungkapan

Pengungkapan laporan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Dalam penyajian amil harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dlam neraca. Pengungkapan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Palembang sudah sesuai dengan PSAK nomor 109

E. Audit Terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan Rumah Zakat Palembang secara berkala diaudit oleh auditor internal dari kantor pusat di Bandung , dan hingga saat ini laporan keuangan yang disajikan oleh Rumah Zakat Palembang belum pernah di audit oleh auditor independen. Maka sebaiknya Rumah Zakat tidak hanya di audit dari auditor internal tetpai juga diauditor independen.Hal tersebut untuk membuktikan kepada masyarakat umum atas kewajaran laporan keuangannya, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para donator/muzzaki.

5. SIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Rumah Zakat Palembang, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Rumah Zakat mulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi. Bukti - bukti tersebut dicatat kedalam jurnal dan buku besar, sedangkan pencatatan harian dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai: Nama pemberi dana zakat, tanda tangan pemberi dana zakat, jumlah dana yang diberikan. Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dan lain-lain oleh Rumah Zakat dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai*(cahs basis)*, yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan.
2. Pembagian dana zakat diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan. Penyajian laporan keuangan Rumah Zakat sepenuhnya diserahkan kepada Rumah Zakat pusat di Bandung karena cabang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja adapun penyajianya terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan

Perubahan aset kelolaan. Pada prinsipnya Rumah Zakat Palembang kurang sesuai dengan PSAK 109, karena untuk laporan arus kas sendiri tidak dicantumkan, padahal pada PSAK 109 terkait dengan komponen laporan keuangan yang lengkap yang terdiri dari: Laporan posisi keuangan (neraca), Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Keuangan Rumah Zakat Palembang secara berkala diaudit oleh auditor internal dari kantor pusat di Bandung dan laporan keuangan Rumah Zakat Palembang belum pernah diaudit oleh auditor indenpenden.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran untuk meningkatkan system pengelolaan dana zakat, infak/sedekah di Rumah Zakat Palembang yaitu:

1. Penerapan akuntansi dilakukan oleh Rumah Zakat Palembang harus lebih di tingkatkan lagi khususnya di dalam penyajian laporan keuangannya. Penerapan akuntansi untuk lembaga amil zakat sebaiknya mengacu kepada PSAK nomor 109 dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat serta sesuai dengan syariah. Hal tersebut dilakukan untuk menyeragamkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga amil zakat.
2. Rumah Zakat merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya untuk disalurkan kepada kaum dhuapa dalam bentuk program-program kerja yang telah ditetapkan. Maka sebaiknya lembaga ini melakukan audit yang bukan hanya di lakukan oleh auditor internal lembaga, tetapi juga di audit oleh auditor independen. Hal tersebut membuktikan kepada masyarakat umum atas kewajaran laporan keuangannya. Sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama pada donator/muzzaki.

6. REFERENSI

[1] Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

[2] Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

[3] Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi*

[4] Indriyani, Rina, Isnah Yuningsih dan Salma Pattisahasiwa. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan shodaqah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat(LAZ DPU).* Samarinda

[5] Ipansyah, Nor, Nispan Rahmi dan Rahman Helmi.2013. *Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BASNAZ Banjarmasin.* Banjarmasin

[6] Istutik. 2013. *Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah(PSAK 109)pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang*. Malang

[7] *Keuangan No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/ sedekah*.Jakarta: IAI

[8] Haryono. Jusuf Al. 2011. *Dasar- Dasar Akuntansi*, jilid 1, Yogyakarta: YKPN

[9] Kartika Sari, Elsi. 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf.* Jakarta: Grasindo

[10] Keiso, Donald. E., Jerry J Weygandt dan Terry D. Warfield. 2010. *Intermediate Accounting IFRS Edition.* Edisi 1.Volume 1. Jon Wiley dan Sons

[11] Kristin P, Ari dan Umi Khoriul Umah. 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat(Studi LAZ DPU DT Cabang Semarang.* Semarang

[12] Mahmudi.2010. *Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Tehnik Fund Accounting.*

[13] Megawati, devi dan Fenny Trisnawati. 2014. *Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru.* Pekanbaru

[14] Metari, Andi. 2013. *Analisis penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada LAZ Dompet Dhuafa cabang semarang*. Semarang

[15] Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta.Kencana
[16] Muhamad, Hasan. 2011. *Pengantar Akuntansi Syariah.* Jakarta: Salemba Empat
[17] Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat.* Solo: Tinta Medina
[18] Nurhayati, Sri.2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat
[19] Pedeoman Standar Akuntansi Keuangan No 109 tentang *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*
[20] Pernyataan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109)
[21] Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat.* Bogor. Pustaka Litera AntarNusa .Cet 10
[22] Sanusi, Anwar. 2011. *Metodelogi Penelitian Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat
[23] Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
[24] Weygandt, Jerry J dan Terry D. Warfield. 2010. *Intermediate Accounting IFRS Edition.* Edisi 1.Volume 1. Jon Wiley dan Sons
[25] Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. 2010. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat.* Jakarta. Institute Manajemen Zakat
[26] www.Rumah Zakat.org

PENERAPAN PSAP KE 2 DALAM PP NO 71 TAHUN 2010 TENTANG LRA ATAS BELANJA PEGAWAI

Wahyu Eka Putra[1], Verawaty[2],Ade Kemala Jaya[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
wahyukazynagato@yahoo.com[1]
verawaty_mahyudin@yahoo.com[2]
jaya_ade@yahoo.com[3]

Abstract

Value Realization Report has useful information in predicting economic resource that will be accepted to pay the central government's activity in the future by giving the report comparatively. Value Realization Report can give some information to the report user about the result indication dan economic resource aplication that have been performed efficiency, effectively, and economy, have been performed based on it's value (APBN/APBD), and have been performed based on the law. A major issue to be discussed in this journal is On PSAP No. 02 Year 2010 Regarding the Budget Realization Report and in specified Against personnel expenditures aim to prove Empirical whether the Budget Realization Report on shopping Employees Palembang prepared are in accordance with the PSAP No. 71 Year 2010 Annex 02, type of data that are used in this research is data Primary and Secondary data collection This research uses descriptive kuallitatif,method.

Keyword : *APBD, Realization and value,PSAP No.02 in 2010*

1. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki standar akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan, terutama dalam laporan keuangan Pemerintah. Dan Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang yaitu Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara memiliki PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan agar ada kesamaan Pencatatan akuntansi di semua Pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.

Namun adanya peraturan tersebut, pada kenyataannya BPK masih banyak menemukan penyimpangan dalam realisasi anggaran pendapatan belanja daerah, salah satu contoh penemuan BPK RI perwakilan Sumatera Selatan yang menemukan penyimpangan dalam laporan realisasi anggaran kini tengah mengaudit dan menginvestigasi keuangan Pemerintah Kota Palembang terkait realisasi anggaran (unaudited) TA 2013 terhadap belanja pegawai.

Menurut BPK RI perwakilan Sumatera Selatan terdapat pembayaran tunjangan anak yang seharusnya dibayar untuk 2 orang anak, tetapi dibayarkan untuk 3 orang anak sebesar Rp296.103.418,00, terdapat pembayaran tunjangan beras yang seharusnya dibayar untuk 4 jiwa, tetapi dibayarkan untuk 5 jiwa sebesar Rp260.683.920,00, perhitungan atas kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras tersebut dilakukan dengan melakukan pemeriksaan atas backup data gaji pegawai dari bulan Januari s.d Desember 2013, berdasarkan konfimasi BPK RI dengan staf *verifikasi* dan gaji, perhitungan tunjangan anak dan tunjangan beras seharusnya berdasarkan KP4 tersebut. Hingga akhirnya BPK RI perwakilan Sumatera Selatan menyimpulkan kondisi tersebut tidak sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan belanja Negara Pasal 53.

Dan mengakibatkan timbulnya potensi kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras sebesar Rp 556.787.338,00 (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk membuktikan secara *empiris* apakah laporan realisasi anggaran atas belanja pegawai kota Palembang yang disusun sudah sesuai dengan PSAP No 71 Tahun 2010 lampiran 02 membandingkan data dan fenomena yang ada.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2012), akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada dominan publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antaralain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintahan Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah) perusahaan milik Negara dan daerah (BUMN dan BUMD) yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

2.2 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa. Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan.

2.3 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Pengertian Akuntansi pada umumnya sama antara Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Pihak Swasta. Dimana disana sama-sama melakukan kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksitransaksi ekonomi yang terjadi. Namun, yang membedakannya adalah harusdiperhatikannya penekanan dalam hal siapa yang mengelola sumber dananya dandarimana sumber dana tersebut apakah dari perseorangan atau entitas pelaporan lain atau organisasi lain.

2.4 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Fakhrurazi (2012) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

2.5 Belanja

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), oganisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas.

2.6 Penelitian Terdahulu

Pengarang dan Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Debora (2013)	Penerapan Pernyataan SAP Nomor 02 Tentang LRA Atas Belanja Operasi.	Melihat Penerapan LRA di Tanah Karo Atas PP No 71 Tahun 2010 Berdasarkan Fenomene	Laporan Keuangan Menunjukan Tidak Sesuai Dengan PP No 71 Tahun 2010
Made (2015),	Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruak Di Kabupaten Gianyar	Untuk, mengetahui kesiapan pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilihat dari kesiapan Sumber Daya Manusia,	kesiapan pemerintah Kabupaten Gianyar dilihat dari kualitas sumber daya manusia (SDM) belum sepenuhnya menguasai basis akrual karena dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) masih
Melly (2014)	Penerapan Pernyataan SAP Ke 02 Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam penyajian Laporan realisasi anggaran Atas belanja Operasi Pemerintah kota medan	Untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Pemerintah Kota Medan sudah sesuai atau belum sesuai dengan SAP No 71 Tahun 2010.	Hasil dalam penelitian mengatakan bahwa Penerapan LRA Pemerintah kota medan sudah sesuai dengan SAP No 71 Tahun 2010 Lampiran Ke dua
Iriana (2014)	Analisis Pemahaman Aparat pemerintah dan mahasiswa Akuntansi Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah PP No 71 tahun 2010	Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?	Menggunakan Independent T-test Dan Mendapatkan Nilai Signifikan bahwa masih banyak Aparat Pemerintah Dan mahasiswa yang tidak paham Tentang SAP PP No 71 Tahun 2010

2.7 Kerangka Pemikiran

Dalam Penelitian ini yang berjudul Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran terhadap belanja pegawai (studi kasus di pemkot Kota Palembang) peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif* sehingga tidak akan ada pemecahan antara variable *indepen* dan *dependen,* kerangka berfikir yang peneliti buat dan telah di sesuaikan dengan teori yang ada, dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel Kerangka Berfikir



3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Palembang fokus penelitian dikonsentrasikan pada fakor faktor yang mempengaruhi penerapan realisasi anggaran sesuai dengan perumusan masalah yang ada, sehingga peneliti di harapkan dapat memberikan jawaban yang sifatnya ilmiah, untuk itu maka digunakan model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh (Kuncoro) sebagai petunjuk (guidance) teoritis.

3.2 Desain Penelitian

Desain riset yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

3.3 Populasi Dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah adalah 8 orang pegawai yang berkerja di bagian pegawai pada Kantor Walikota Pemerintah Kota Palembang dan 4 orang pegawai yang bekerja di Badan pengelola keuangan daerah Kota Palembang.

3.4 Sumber, Teknik Pengumpulan, dan Analisis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara, pencarian data melalui kontak langsung, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. metode analisis data menggunakan. Triangulasi data (Kuncoro) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas Internal), *transferability* (validitas External) *dependability* (Reliabilitas) dan *corfirmability* (objektivitas) yang dikenal dengan Triangulasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian Wawancara Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan enam narasumber penelitian yang sifatnya kredibel, mereka beranggapan bahwa belanja pegawai di tahun yang penulis teliti yang ada di laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Palembang dalam pencatatannya mereka yakini ini sudah sesuai dengan SAP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran ke dua tentang laporan realisasi anggaran atas belanja pegawai.

Pokok pembahasan yang bisa penulis berikan terhadap hasil wawancara adalah karena faktor kenaikan jumlah pegawai dan program reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang. Data dari Palembang go.id mencatat bahwa di tahun 2013 Pemerintah Kota Palembang

memiliki pegawai negeri sipil sebanyak 17.590 orang dan harus mengeluarkan dana APBD kurang lebih Senilai Rp.126.320.000.000 perbulannya untuk membayar semua jenis belanja pegawai mulai dari gaji dan semua tunjangan yang memang harus diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja di ruang lingkup kota Palembang. Sehingga dengan adanya 17.590 pegawai negeri sipil yang bekerja di kota Palembang, gangguan seperti kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan akan pasti terjadi sehingga perlu adanya sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan baik di bidangnya untuk mencegah kesalahan pemberian dan pencatatan gaji dan tunjangan yang penulis sebut human error dalam pencatatan keuangan. Seperti yang penulis katakan dilatar belakang permasalahan bahwa tunjangan yang menjadi permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah tunjangan anak dan tunjangan beras yang merugikan pemerintah kota Palembang senilai Rp556.787.338,- dan permasalahan seperti ini penulis yakin akan sering terjadi. Sehingga Pemerintah Kota Palembang harus memberikan pemahaman dan pelatihan tentang bagaimana Pencatatan laporan keuangan yang baik.

Perbedaan nilai Realisasi antara kedua laporan keuangan yaitu LRA lampiran kedua tentang belanja pegawai kota palembang yang menyatakan Realisasinya senilai 91,87% dengan realisasi belanja pegawai di laporan kinerja keuangan pemerintah (LAKIP) di tahun yang sama yaitu tahun 2013 yang menyatakan Realisasi belenja pegawai 92,16. Sehingga menimbulkan perbedaan realisasi belanja pegawai di kedua laporan keuangan ini senilai 0,26%. Sehingga penerapan realisasi anggaran di tahun 2013 tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP no 71 tahun 2010 lampiran kedua.

4.2 Hasil akhir Data Sekunder

Perbedaan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Palembang atas belanja pegawai dan kesamaannya dengan SAP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Palembang di tahun 2013 yang menceritakan bagaimana laporan atas anggaran dibuat melaporkan anggaran dana sebesar Rp.1.520.138.759.175,70 dan Realisasinya yaitu sekitar Rp1.396.493.396.478,90 sehingga mengalami defisit 91,87%. Sedangkan kenyataan yang berbeda yaitu akuntabilitas belanja daerah Kota Palembang atas laporan kinerja Pemerintah Kota Palembang di tahun yang sama mencatat bahwa belanja pegawai Pemerintah Kota Palembang Rp.1.416.504.464.296,70 dan realisasinya sekitar Rp.1.305.421.750.880,90 sehingga mengalami defisit 92,16%.

Penulis beranggapan perbedaan nilai di antara kedua laporan Pemerintah Kota Palembang atas belanja pegawai di tahun yang sama diperkuat oleh data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Selatan. Sehingga peneliti menyakni bahwa adanya ketidaksesuaian nilai mata uang dalam Laporan realisasi anggaran yang dibuat. Karena PP No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa nilai rupiah yang ada pada laporan realisasi anggaran akan selalu sama dengan laporan keuangan lain. Sehingga jika ada perbedaan nilai rupiah di kedua laporan ini maka jelas untuk belanja pegawai kota Palembang tahun 2013 tidak sesuai dengan SAP Nomor 71 tahun 2010 lampiran kedua.

4.3 Hasil Audit Bpk Terhadap Belanja Pegawai

Hasil yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan staf verifikasi dan gaji, penghitungan tunjangan anak dan tunjangan beras seharusnya berdasarkan KP4 tersebut. Hingga akhirnya BPK RI menyimpulkan kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 53. Dan permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya potensi kelebihan pembayaran tunjangan anak dan beras sebesar Rp 556.787.338,00 (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan juga menyebutkan bahwa kekuatan hukum terhadap APBD diatur dengan Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tentang APBD menjelaskan bahwa Setiap pejabat pengelola keuangan yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ditetapkan dalam, pasal-pasal pemidanaan dalam KUHP adalah : 209, 210, 387, 388, 415, 416,417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.; dan tentang gratifikasi yakni pada pasal 418, 419 dan 420 K.U.H.P.

Pembahasan atas audit yang dilakukan oleh badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan tentang laporan realisasi anggaran yang berjalan atas belanja pegawai, peneliti menyakini bahwa BPK sudah memberikan hasil yang audit yang kredibel dan disesuaikan dengan fakta yang ada walau banyak permasalahan yang cukup membingungkan. Hasil audit pendapat wajar dengan pengecualian terhadap LRA itu terjadi karena belanja pegawai di tahun yang bersangkutan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dilihat dari keseluruhan laporan. Namun ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diterima oleh akuntan yang sifatnya material tetapi tidak sampai merusak kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa realiasi anggaran atas belanja pegawai masih adanya kejanggalan dalam perhitungan dan penyusunan yang tidak transparan dan bisa dikatakan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP No 71 tahun 2010.

4.4 Pencatatan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Pemerintah Kota Palembang Belum Sesuai Dengan Sap No 71 Tahun 2010 Lampiran Ke Dua

Kebutuhan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi pemerintah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja pegawai tersebut. Pengeluaran untuk belanja pegawai dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dikeluarkan oleh bendahara umum atau melalui bendahara pengeluaran. Jika pengeluaran dilakukan oleh bendahara umum Pemerintah Kota Palembang maka belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas belanja Daerah. Sedangkan jika pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan belanja pegawai dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Sehingga dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran atas belanja pegawai peneliti menyatakan penerapan basis akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Palembang sebenarnya memadai karena basis yang digunakan basis kas, tetapi salah saji dalam bentuk material rupiah membuat belanja pegawai ditahun 2013 tidak sesuai dengan beberapa item peraturan yang ada di Standar Akuntansi Pemerintah di dukung dengan hasil dari analisis yang peneliti buat yang menyatakan bahwa realisasi belanja pegawai Pemerintah Kota Palembang kurang baik dalam pencatatan nilai rupiah di karnakan human error (kesalahan saji material). Hal ini berarti penerapan basis akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Palembang atas belanja pegawai tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran ke dua.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulakan bahwa, dilihat dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Palembang Atas belanja pegawai sudah tidak memadai karena data sekunder menunjukan bahwa beberapa hasil wawancara berbeda dengan fakta yang ada, sehingga menimbulkan kerugian APBD Pemerintah Kota Palembang di tahun 2013 senilai Rp 556.787.338,00 atas dua tunjangan yaitu tunjangan beras dan tunjangan anak, dilihat dari hasil akhir data sekunder, penyajian

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Palembang atas belanja pegawai cukup memadai dimana karakteristik kualitatif yang digunakan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami serta memenuhi kualitas yang dikehendaki dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tapi mengalami kesalahan di sisi Pencatatan Realisasi Belanja pegawai yang berbeda di dua laporan keuangan yaitu LRA dan LKPD yaitu 0,26%, secara keseluruhan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kota Palembang Atas Belanja Pegawai tidak cukup memadai dan bisa penulis simpulkan bahwa ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran Ke dua. diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan lain dalam menentukan memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi. Serta dapat membuat penelitian ini bukan hanya kualitatif tapi juga kuantitatif karena kekurangan waktu, saya sebagai penulis tidak bisa melakukan hal itu.

6. REFERENSI

[1] Binpers. *Bpk RI Perwakilan Sumatera temukan penyimpangan belanja pegawai dalam laporan realisasi pemkot kota Palembang*. Melalui (http://Binpers.com)diakses 12/10/2015.

[2] Hartianti dan Nordiawan, 2012. Akuntansi Sektor Publik Edisi ke 2. Salemba Empat. Jakarta

[3] Heriawati, Melly Simanahuruk, 2014. *Penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah Nomor 02 peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan realisasi anggaran atas belanja operasi pemerintah kota Medan. Skripsi*. Universitas Medan

[4] Ikatan Akuntan Indonesia, 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat, Jakarta.

[5] Iriana Mayan, 2014. *Analisis Pemahaman Aparat pemerintah dan mahasiswa Akuntansi*. Jurnal. Universitas Indonesia

[6] Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Melalui (www.google.co.id)diakses 12/10/2015.

[7] Kuncoro, 2011. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan Ketiga. Bumi Aksara, Jakarta.

[8] Palembang, Laporan keuangan tahun, 2013. *Tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota palembangI*. Melalui www.palembang go.id di akses pada tanggal 1/1/15 jam 20.00 Wib

[9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2013. *Tentang Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*. Melalui www.google.co.id diakses tanggal 1/1/15

[10] Sanusi, Anwar, 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta Selatan

[11] Sembiring, Debora Elvila Rosa, 2013. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 terhadap belanja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Tanah Karo. Skripsi*. Universitas Sumatera Utara

[12] Silaban dan Hamonangan, 2012. Teori Akuntansi, Edisi Kedua. Universitas HKBP Nommensen, Medan.

[13] Simanjuntak dan Elvis, 2011. Metode Penelitian, Edisi Kedua. Universitas HKBP Nommensen, Medan.

[14] Standar Akuntansi Pemerintahan, 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Melalui www.google.co.id diakses tanggal 1/1/15

[15] Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung

EFEKTIVITAS PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KAYU AGUNG TAHUN 2013-2014

Wiwid Ega Mentari[1], Hasan Kuzery[2], Yeni Widyanti[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
mentariwiwidega@yahoo.com[1]
hasan_kuzery@gmail.binadarma.ac.id[2]
yeniwidyanti@binadarma.ac.id[3]

ABSTRACT

The goals of study is to determining the effectiveness of active tax billing actions which includes the warning leter, forced letter, and seizure letter to disbursement of tax arrears in Tax Office Pratama Kayu Agung 2013-2014. The type of research used in this study is a descriptive kuantitatif. Data collected through interviews and documentation. The results of the study indicate that the effectiveness of tax billing rate is still not effective. The factors is a lack of public awareness, taxpayer compliance in paying his tax debt and less optimal active tax collection process.

Keyword: *Tax Debt, Warning Letter, Forced Letter, Seizure Letter*

1. PENDAHULUAN

Tunggakan pajak timbul ketika aparat pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dalam ajaran materil pada sistem *self assesment* yang dianut oleh Indonesia menuntut agar wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Sehingga ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, dan tidak melaporkan dirinya sebagai wajib pajak karena alasan tertentu. Cara yang ditempuh aparat pajak dalam menghadapi wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, yaitu dengan melakukan penagihan pajak.

Penagihan pajak timbul karena adanya tunggakan pajak. Salah satu ujung tombak dari penerimaan pajak Negara adalah hasil penagihan pajak yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan. Penagihan pajak ada dua macam, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif.

Pada penagihan aktif, langkah awal yang dilakukan aparat seksi penagihan yaitu menerbitkan Surat Teguran 7 hari setelah jatuh tempo. Jika dalam waktu 21 hari setelah penerbitan Surat Teguran, penanggung pajak masih tidak membayar hutang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2x24 jam setelah diterbitkan surat paksa, maka akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Jika sampai jangka waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang untuk melakukan Lelang terhadap barang yang telah disita. Penagihan aktif yang dilakukan oleh aparat seksi penagihan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong masyarakat agar bertanggung jawab dan mau membayar pajaknya yang terutang, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung.

Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, karena masih ada masyarakat yang merasa rugi bila membayar pajak, dan juga ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajaknya, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Cara yang

ditempuh oleh aparat pajak dalam mengatasi tunggakan pajak tersebut yaitu dengan melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana tingkat efektivitas penagihan aktif terhadap penerimaan pajak? Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan aktif terhadap penerimaan pajak.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Utang Pajak

Berdasarkan UU PPSP pasal 1 ayat (8), hutang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasiberupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 Penagihan Pajak

Pengertian Penagihan Pajak menurut UU No. 19 tahun 2000 Pasal 1 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

2.3 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Aktif

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, makaakan diterbitkan Surat paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi olehpenanggung pajak seteelah lewat waktu 2×24 jam sejak Surat Paksadiberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan (SPMP).
4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasioleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejaktanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumumanlelang.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasioleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejakpengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

2.4 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 pasal 22 ayat (2) (2014:50), daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

1. Diterbitkan Surat Paksa.
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

2.5 Pengertian Efektivitas

Menurut Raharjo (2011) dalam Tunas (2013:6), efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN

Operasional variabel adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu :

a. Variabel Independen ini sering juga disebut variabel bebas. Menurut Sanusi (2011:50), variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Penelitian ini terdapat 4 variabel independen (X), yaitu : Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X_3), Lelang (X_4).

b. Variabel Dependen sering disebut variabel terikat. Menurut Sanusi (2011:50), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian ini terdapat 1 variabel dependen (Y), yaitu Penerimaan Pajak (Y).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif.* Penulis menggambarkan efektivitas penagihan aktif terhadap penerimaan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai penagihan aktif yang terbit tahun 2013 dan tahun 2014. Karena keterbatasan data, penulis hanya membandingkan data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penagihan aktif dan penerimaan pajaknya. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penagihan aktif dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kayu Agung.

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{Realisasi\ \ pencairan\ \ \ tungga\ kan\ \ pajak}{Target\ \ pencairan\ \ \ tunggakan\ \ \ pajak}\ x\ 100\%$$

Pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan melihat indikator sebagai berikut:

Tabel 3
Indikator Pengukuran Efektivitas

Klasifikasi Efektivitas	Kriteria
>100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber ; Departemen Dalam Negeri, Kepdagri No.690.900.327 Tahun 1996

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara menghitung tingkat efktivitas penagihan aktif yaitu drngan cara membandingkan relisasi pencairan tunggakan pajak dengan target pencairan tunggakan pajak. Hasil perhitungan efektivitas penagihan aktif pada KPP Pratama Kayu Agung tahun 2013-2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif
Melalui Surat Teguran Tahun 2013 – 2014

Tahun	Surat Teguran	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2013	311	59.774.181	44.109.025	73,79%	Kurang Efektif
2014	49	49.612.828	37.305.088	75.19%	Kurang Efektif

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 melalui surat teguran berfluktuasi. Tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran pada tahun 2013 yaitu 73,79% atau pada kriteria kurang efektif. Pada tahun 2014 persentase efektivitas surat teguran meningkat yaitu sebesar 75,19% atau pada kriteria kurang efektif. Hasil perhitungan efektivitas penagihan aktif melalui surat teguran pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 belum bisa dinyatakan efektif karena persentase minimal efektivitas dinyatakan cukup efektif adalah 80%-90%. Belum efektifnya penagihan aktif dengan surat teguran bukan berarti cara kerja aparat pajak dari seksi penagihan belum efektif juga, akan tetapi penerbitan surat teguran yang dilakukan KPP Pratama Kayu Agung belum cukup untuk menyadarkan penanggung pajak, sehingga KPP Pratama Kayu Agung harus menerbitkan surat paksa sebagai tindakan selanjutnya.

Berdasarkan data pada KPP Pratama Kayu Agung terlihat bahwa selama dua tahun terakhir, realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran di KPP Pratama Kayu Agung tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Alamat dari Penanggung Pajak tidak ditemukan, atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga Surat Teguran kembali ke KPP Pratama Kayu Agung.
2. Penanggung Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.
3. Penanggung Pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya.
4. Ketidaktahuan wajib pajak untuk membayar pajak

Berdasarkan hasil rekapan data yang diperolah dapat dilihat tingkat efektivitas penagihan pajak aktif melalui surat paksa pada KPP Pratama Kayu Agung sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif
Melalui Surat Paksa Tahun 2013-2014

Tahun	Surat Paksa	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2013	346	603.324.588	451.575.706	74,85%	Kurang Efektif
2014	544	2.069.827.257	3.455.723.896	166.96%	Sangat Efektif

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui hasil Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 cenderung meningkat. Persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa terbesar dicapai pada tahun 2014 yaitu 166,96% atau pada kriteria sangat efektif. Kemudian pada tahun 2013 persentase efektivitas penagihan melalui surat paksa sebesar 74,85% atau pada kriteria kurang efektif. Menyadari pada tahun 2014 persentese efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa sudah mencapai kriteria sangat efektif, sedangkan tahun-tahun berikutnya selalu mengalami penurunan, menunjukkan bahwa perlu adanya usaha perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak aktif melalui surat paksa, baik dari sisi kinerja KPP Pratama Kayu Agung maupun dari Wajib Pajak.

Tingkat efektivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2014. Hal ini ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Penanggung Pajak bersikap kooperatif saat dipaksa untuk membayar utang pajaknya.
2. Penanggung Pajak mengakui memiliki utang pajak dan bersedia untuk melunasinya.

Berdasarkan hasil rekapan data yang diperolah dapat dilihat tingkat efektivitas penagihan pajak aktif melalui sitaan pada KPP Pratama Kayu Agung sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif
Melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Tahun 2013-2014

Tahun	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2013	0	0	0	0	-
2014	1	682.272.864	580.991.891	85.16%	Cukup Efektif

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa pada tahun 2013 di KPP Pratama Kayu Agung tidak dilakukan penyitaan dikarenakan ada sedikit kesalahan dari aparat pajak seksi penagihan, pada tahun 2013 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan belum terealisasi dan mungkin akan terealisasi pada tahun berikutnya. Persentase efektivitas penagihan pajak melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan pada tahun 2014 yaitu 85.16% atau pada kriteria cukup efektif.

Pada tindakan penagihan pajak melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas penagihan pajak melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, yaitu Penanggung Pajak tidak bertindak kooperatif dengan jurusita pajak, hingga menolak penyitaan atas asetnya dengan segala cara, termasuk dengan kekerasan sehingga untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, pihak KPP Pratama Kayu Agung seringkali membatalkan tindakan penyitaan.

Meskipun dalam penagihan pajak aktif terdapat penagihan dengan lelalng tetapi dalma penelitian ini hanya berfokus pada pengihan dengan surat teguran, surat paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dikarenakan bahwa penagihan aktif pada lokasi penelitian hanya sampai pada tahapan penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sehingga tidak memenuhi data yang dibutuhkan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Efektivitas penagihan aktif melalui surat teguran pada tahun 2013 sebesar 73,39% dengan kriteria kurang efektif dan pada tahun 2014 sebesar 75,19% dengan kriteria kurang efektif.

2. Persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa pada tahun 2013 sebesar 74,85% dengan kriteria kurang efektif dan pada tahun 2014 sebesar 166,96% dengan kriteria sangat efektif.
3. Pada tahun 2013 di KPP Pratama Kayu Agung tidak dilakukan sitaan sehingga tidak diketahui tingkat efektifitasnya. Persentase efektivitas penagihan pajak melalui SPMP pada tahun 2014 yaitu 85.16% atau pada kriteria cukup efektif.

5.2 Saran

1. Kepada KPP Pratama Kayu Agung perlu melakukan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang keutamaan membayar pajak. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk membuat semenarik mungkin.
2. Kepada KPP Pratama Kayu Agung perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.
3. Kepada KPP Pratama Kayu Agung perlu mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak, misalnya dengan pemerintah daerah untuk menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan, atau dengan kepolisian untuk melindungi juru sita pajak dalam proses penyitaan.

6. REFERENSI

[1] Agoes, Sukrisno. 2013. *Akuntansi Perpajakan.* Jakarta, Salemba Empat.

[2] Anwar, Pohan Chairil. 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus.* Jakarta, Mitra Wacana Media.

[3] Erwis, Nana Adriana. 2013. Efektivitas Penagihan Pajaka dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan..Jurnal Universitas Hasanuddin. Makassar

[4] Fitriadi, Primandita, Yudha Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2014. *Undang-undang Perpajakan.* Jakarta, Salemba Empat.

[5] Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Fungsi Pajak.* Jakarta.

[6] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun2007. *Pengertian Pajak.* Jakarta.

[7] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. *Pengertian Penagihan Pajak.* Jakarta.

[8] Republik Indonesia, Kepdagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang indikator pengukuran efektivitas.

[9] Republik Indonesia, KMK-561/KMK.04/2000 tentang jadwal dan waktu penagihan aktif.

[10] Republik Indonesia, KMK-562/KMK.04/2000 tentang juru sita pajak.

[11] Republik Indonesia, PMK.206.2/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak.

[12] Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: teori dan kasus.* Edisi ke-8 Buku 1. Jakarta, Salemba Empat.

[13] Rifqiansyah, Hasbi, Muhammad Saifi dan Devi Farah Azizah. 2014. Analisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak (studi pada kantor pelayanan pajak pratama malang utara). Jurnal Universitas Brawijaya. Surabaya.

[14] Saputri, Helsy Amelia. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Jurnal Universitas Telkom. Bandung.

[15] Sanusi,A. 2014. *metodelogi Penelitian Bisnis.* Edisi ke-5. Jakarta, Salemba Empat.

[16] Tunas, Derlina Sutria. 2013. Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Universitas Sam Ratulangi. Manado.

[17] Velayati, Mala Rizkika, Siti Ragil Handayani, dan Achmad Husaini. 2013. Analisis efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan Tunggakan pajak. Jurnal Universitas Brawijaya. Surabaya.

DETERMINAN KINERJA BPD DI PULAU SUMATERA

Yolanda Widiati[1],Verawaty[2], Ade Kemala Jaya[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
Yolanwidia382@yahoo.co.id[1]
Verawaty_mahyudin@yahoo.com[2]
jaya_ade@yahoo.com[3]

Abstract

The purpose of this study was to obtain empirical evidence about the effect of credit risk, liquidity, operational efficiency and the performance of the macro-economic level Development Bank on the island of Sumatera. This study population as much as 8 regional development banks in Sumatera Island 2011-2014 with sampling methods sampling methods saturated. Analysis technique used is multiple linear regression. The results showed simultaneous independent variable affect the dependent variable. Partially credit risk and efficiency negatively affect the performance of the bank. Another variable liquidity and macro-economic level is not a positive influence on the bank's performance.

Keywords: *the performance of banks, credit risk, liquidity, operational efficiency and macro-economic level*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan program pembangunan Indonesia diadakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan pendapatan dengan berbagai kegiatan yang produktif untuk menciptakan perekonomian yang stabil. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah lembaga keuangan bank Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayananan dalam bentuk jasa perbankan.

Perbankan yang kuat dan sehat sangat dibutuhkan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia yang tentunya dimulai dari daerah-daerah hingga sampai ke pusat. Bank Pembangunan Daerah adalah bank milik pemerintah yang sangat strategis untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di daerah. Bank Pembangunan Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki pemerintah daerah dan penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Jika kinerja Bank Pembangunan Daerah meningkat dari profitabilitas maka menambah pendapatan asli daerah. Dimana Bank Pembangunan Daerah yang ada di Pulau Sumatera ada 8 Bank Pembangunan Daerah.

Beberapa faktor keuangan yang mempengaruhi kinerja bank diantaranya resiko kredit, likuiditas dan efisiensi operasional. Hal yang mempengaruhi kinerja bank tersebut merupakan rasio-rasio keuangan sekaligus sebagai alat ukur penilaian kinerja bank. Kondisi kinerja bank tidak hanya dipengaruhi dari kinerja keuangan tapi dari tingkat ekonomi makro. Faktor tingkat ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja bank adalah suku bunga BI.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu apakah faktor keuangan berpengaruh terhadap kinerja bank?; apakah tingkat ekonomi makro berpengaruh terhadap kinerja bank?; apakah rasio keuangan dan tingkat ekonomi makro berpengaruh secara bersama terhadap kinerja bank.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh resiko kredit, likuiditas, efisiensi operasional dan tingkat ekonomi makro terhadap kinerja Bank Pembangunan di Pulau Sumatera.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan pengembangan hipotesis penelitian ini ada lima yaitu pengaruh resiko kredit terhadap kinerja bank, pengaruh likuiditas terhadap kinerja bank,

pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja bank, pengaruh tingkat ekonomi makro terhadqap kinerja bank dan pengaruh resiko kredit, likuiditas, efisiensi operasional dan tingkat ekonomi makro secara bersama terhadap kinerja bank.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengaruh Resiko Kredit, Likuiditas, Efisiensi Operasional Dan Tingkat Ekonomi Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Bank

Penggunaan ROA sebagai proksi profitabilitas pada perusahaan perbankan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia NO.13/24/DPNP 2011. *Return on assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return on assets* adalah rasio yang menunjukan perbandingan laba (sebelum pajak) dengan total aset bank. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian *(return)* semakin besar. Pencapaian laba yang tinggi dari industri perbankan penting untuk penilaian ukuran prestasi. Kinerja bank juga dapat menunjukan kekuatan dan kelemahan bank. Dengan mengetahui kekuatan bank, maka dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha bank. Sedangkan kelemahannya dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dimasa mendatang. Beberapa faktor keuangan yang mempengaruhi kinerja bank diantaranya resiko kredit, likuditas dan efisiensi operasional. Kondisi kinerja bank tidak hanya dipengaruhi dari kinerja keuangan tapi dari tingkat ekonomi makro.

H1: resiko kredit, likuiditas, efisiensi operasional dan tingkat ekonomi makro berpengaruh secara bersama terhadap kinerja bank.

2.2 Pengaruh Resiko Kredit Terhadap Kinerja Bank

Kualitas aset dari portofolio kredit yang digunakan sebagai proksi dari resiko kredit yaitu *non performing loan.* Rasio *non performing loan* (NPL) diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Resiko kredit semakin besar bila bank tidak mampu meningkatkan atau memperbaiki kualitas kredit yang disalurkan, menunjukan kinerja bank yang buruk. Berdasarkan penelitian Mawardi (2005) dan Puspitasari (2009) rasio NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun penelitian Matindas dkk, (2012) menunjukan hasil NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. Hasil penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten, maka peneliti ingin menguji kembali hubungan efisiensi operasional terhadap kinerja bank ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H2: Resiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja bank

2.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Kinerja Bank

Rasio likuiditas diwakilkan rasio *loan to deposit ratio* yang menyatakan seberapa jauh bank telah mengunakan uang para penyimpan (*depositor*) untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Semakin tinggi *loan to deposit ratio* (LDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *loan to deposit ratio* (LDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. (Dendawijya dalam Syarir, 2012). Penelitian Sukarno dan Syaicu (2006) serta penelitian Puspitasari menunjukan LDR berpengaruh positif terhadap ROA. Namun ppenelitian Yuliani (2007) dan Sudiyatno dan Fatmawati (2013) LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Hasil penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten, maka peneliti ingin menguji kembali hubungan efisiensi operasional terhadap kinerja bank ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H3: Likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja bank

2.4 Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Bank

Mengukur efisiensi bank, salah satu indikator yang dipakai adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan (BOPO). Semakin besar rasio BOPO maka semakin tidak efisien suatu bank, efisiensi bank dikatakan membaik ditunjukan oleh penurunan nilai BOPO. Penelitian Mawardi (2007) dan Matindas, dkk (2012) menunjukan hasil BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun penelitian penelitian Nusantara (2009) menunjukan hasil BOPO tidak berpengaruh negatif terhadap ROA. Hasil penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten, maka peneliti ingin menguji kembali hubungan efisiensi operasional terhadap kinerja bank ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H4: efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja Bank

2.5 Pengaruh Tingkat Ekonomi Makro Terhadap Kinerja Bank

Faktor tingkat ekonomi makro yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah suku bunga. Kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia mendorong terjadinya kenaikan tingkat suku bunga kredit. Kenaikan suku bunga kredit menyebabkan biaya bunga pinjaman ikut meningkat, sehingga pendapatan yang diterima bank dari bunga pinjaman kredit akan ikut meningkat. Penelitian Kurniasih (2012) menunjukan hasil suku bunga berpengaruh positif terhadap ROA. Namun penelitian Puspitasari (2009) suku bunga tidak berpenagruh positif terhadap ROA. Hasil penelitian terdahulu masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten, maka peneliti ingin menguji kembali hubungan efisiensi operasional terhadap kinerja bank ke dalam hipotesis sebagai berikut:\

H5: tingkat ekonomi makro berpengaruh positif terhadap kinerja bank

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling* jenuh yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai anggota. dari jumlah populasi sebanyak 8 Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera, maka yang diambil sampel sebanyak 8 Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera.

Data penelitian ini adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan tahun 2011 sampai 2014 yang terdapat dalam *website* BPD, *www.BI.go.id* dan *www.OJK.go.id*. Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik seperti Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi dan penelitian ini telah melakukan pengujian pada Uji Normalitas di atas 0,05 atau 5% dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal, Uji Multikolinearitas menyatakan nilai *tolerance* untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas untuk variabel independen tidak ada yang yang signifikan dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas dan uji autokorelasi Oleh karena nilai DW lebih besar dari 1,73 dan kurang dari 4-dl(4-1,73=2,82), maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya atau tidak terdapat autokolerasi.

Pengujian hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi menunjukan nilai menunjukan nilai adjusted R^2 sebesar 0,362 yang memiliki arti bahwa 36,2% variabel kinerja bank yang diproksikan *return on assets* (ROA) dijelaskan oleh variabel resiko kredit (NPL), likuiditas (LDR),

efisiensi operasional (BOPO) dan tingkat ekonomi makro (suku bunga BI). Sedangkan sisanya 63,8% merupakan pengaruh dari sebab-sebab atau faktor lain di luar model penelitian.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Resiko Kredit, Likuiditas, Efisiensi Operasional Dan Tingkat Ekonomi Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Bank

Perhitungan dengan program SPSS diperoleh F-hitung sebesar 5,401 lebih besar dari F-tabel 2,728 dan tingkat signifikannya 0,003 kurang dari 0,05 (. Hasil penelitian menunjukan variabel bebas mempengaruhi variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel bebas yaitu resiko kredit, likuiditas, efisiensi operasional dan tingkat ekonomi makro secara simultan atau bersama-sama akan berpengaruh pada kinerja bank.

Keempat faktor tersebut menimbulkan masalah keagenan jika pihak bank menjalankan operasinya tidak efektif dan efisien. Masalah keagenan menimbulkan *agency problem*, sedangkan *agency problem* adalah permasalahan yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan atas pihak yang berkepentingan di perusahaan, hal ini berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dan kinerja bank yang dibawah pengawasan Bank Indonesia. Konflik keagenan pada bank tidak dapat dihilangkan tapi pihak bank hanya bisa menguranginya. Kinerja bank juga dapat menunjukan kekuatan dan kelemahan bank. Dengan mengetahui kekuatan bank, maka dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha bank. Sedangkan kelemahannya dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dimasa mendatang.

4.2.2 Pengaruh Resiko Kredit Terhadap Kinerja Bank

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh t-hitung sebesar 2,226 lebih dari t-tabel 1,703 dan tingkat signifikannya 0,035 kurang dari 0,05 dan 0,1. Hasil penelitian membuktikan bahwa resiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Dengan demikian secara parsial hipotesis pertama diterima, artinya dalam penelitian ini semakin tinggi resiko kredit suatu bank mengurangi manajemen bank untuk memperoleh laba. Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Mawardi (2005) dan Puspitasri (2009) menyatakan hasil resiko kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja bank.

Hasil penelitian ini menunjukkan resiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Resiko kredit semakin tinggi artinya bank banyak mengalami kredit bermasalah. Jika pihak bank tidak memberikan solusi terhadap kredit bermasalah menyebabkan besarnya piutang tak tertagih dan tertahannya dana bank di pihak debitur yang merugikan kegiatan operasional bank.

4.2.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Kinerja Bank

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh t-hitung sebesar 0,122 kurang dari t-tabel 1,703 dan tingkat signifikannya 0,904 lebih besar dari 0,05 dan 0,1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Dengan demikian secara parsial hipotesis kedua ditolak. Hasil analisis konsisten dengan penelitian yang dilakukan Yuliani (2007) dan Sudiyatno dan Fatmawati (2013) menunjukan hasil likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja bank.

Hasil penelitian menunjukan likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Alasannya bank sebagai lembaga yang berfungsi intermediasi belum efektif dengan penyaluran kredit dan penggunaan dana serta mencerminkan kemampuan bank dalam kewajiban atas dana pihak ketiga belum berjalan optimal padahal semakin tinggi likuiditas bank, maka dana pihak ketiga yang disalurkan bentuk kredit semakin besar. Pengunaan dana tidak tepat mengunakan menimbulkan masalah keagenan pada saat manajer memutuskan untuk melakukan investasi yang berisiko tinggi.

Keputusan semacam itu bila berjalan baik akan sangat menguntungkan bagi bank, namun jika gagal akan sangat merugikan bagi deposan.

4.2.4 Pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Bank

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh t-hitung sebesar 1,795 lebih dari t-tabel 1,314 dan tingkat signifikannya 0,085 kurang dari 0,1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Dengan demikian hipotesis ketiga secara parsial diterima. Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Mawardi (2005) dan Matindas, dkk (2012) efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja bank.

Hasil penelitian efisiensi berpengaruh negatif terhadap kinerja bank artinya semakin besar nilai efisiensi operasional maka menurunkan profitabilitas bank. Jika kegiatan operasional bank efisien maka menurunkan nilai efisiensi operasional serta meningkatkan pendapatan bank yang dihasilkan bank akan naik. Efisiensi operasional melibatkan kebijakan manajemen bank. Manajemen bank yang buruk menimbulkan konflik hubungan konflik keagenan dengan principal (pemegang saham).

4.2.5 Pengaruh Tingkat Ekonomi Makro Terhadap Kinerja Bank

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS diperoleh t-hitung sebesar 1,082 kurang dari t-tabel 1,703 dan tingkat signifikannya 0,289 lebih dari 0,05 dan 0,1. Dengan demikain secara parsial menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hasil analisis konsisten dengan penelitian yang dilakukan Puspitasari (2009) menunjukan hasil tingkat ekonomi makro (suku bunga BI tidak berpengaruh terhadap kinerja bank.

Hasil penelitian ini tingkat ekonomi makro tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Alasannya kenaikan suku bunga Bank Indonesia akan meningkatkan suku bunga kredit pinjaman dan meningkatkan juga biaya bunga kreditnya, tetapi selisih peningkatan bunga kreditnya dengan pendapatan bunga kreditnya kecil, dan fluktuasi pertahunnya juga kecil atau rendah. Hal inilah yang menyebabkan pada penelitian ini suku bunga BI tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hipotesis kinerja bank berdasarkan resiko kredit investasi, likuiditas, efisiensi operasional dan tingkat ekonomi makro pada Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera, hasil pengujian secara parsial menunjukan resiko kredit dan efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja bank, likuiditas dan tingkat ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Pengujian simultan menunjukan bahwa resiko kredit, likuiditas, efisiensi operasional dan tingkat ekonomi makro berpengaruh secara bersama terhadap kinerja bank makro tidak berpengaruh terhadap kinerja bank dan hasil pengujian secara simultan.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perusahaan dan penelitian berikutnya berdasarkan keterbatasan penelitian

1. Diharapkan Bank Pembangunan menjaga standar kinerja bank sesuai dengan standar Bank Indonesia. Dalam pemberian kredit seharusnya pihak bank menyeleksi calon debitur layak diberi pinjaman dan harus memiliki agunan sesuai syarat pemberian kredit sehingga mengurangi kredit bermasalah. Bank harus seefisien mungkin dalam kegiatan operasional caranya menyeleksi biaya-biaya yang dikeluarkan, dimana semakin besarnya nilai operasional bank mempengaruhi pendapatan bank dan menurunkan kinerja bank.

2. Keterbatasan penelitian adalah nilai *Adjusted* R^2 dari model yang di uji dalam penelitian ini sebesar 36,2 % maka ada 63,8% variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kinerja bank sehingga selanjutnya sebaliknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya seperti giro wajib minimum

6. REFERENSI

[1] Bank Indonesia,Surat Edaran Nomor 13/24/DPNP 2011.*Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.* Jakarta.

[2] Kurniasih, Erni. 2012. *Pengaruh capital adequacy ratio* (CAR),*non performing financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR), *biaya operasional pendapatan operasional (BOPO),suku bunga dan inflasi terhadap profitabilitas (Perbandingan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional periode 2007-2011).* Skripsi.Yogyakarta**,** Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

[3] Nusantara, Adnan Buyung. 2009. *Analisis Pengaruh NPL, CAR, LDR, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank (Perbandingan Bank Umum Go Publik dan Bank Umum Non Go Publik di Indonesia Periode Tahun 2005-2007).* Tesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.

[4] Matindas, Anggria Maya, Pangemanan, Sifrid S dan Saerang, David P.E. 2012. *Pengaruh capital adequacy ratio (CAR),BOPO dan non performing loan (NPL) terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Magister Akuntansi Universitas Sam Ratulangi. Manado.

[5] Mawardi, Wisnu, 2005. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank umum dengan Total Assets Kurang dari 1 Trilliun).* Jurnal bisnis Strategi, Vol.14, No. 1.

[6] Puspitasari, Diana. 2009. *Analisis Pengaruh CAR, NPL, PDN, NIM, BOPO, LDR, dan suku bunga SBI terhadap* ROA *(Studi Pada Bank Devisa di Indonesia Perioda 2003-2007).* Thesis Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.

[7] Sudiyatno, Bambang dan Asih Fatmawati. 2013. *Pengaruh Risiko Kredit Dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Bank (Studi Empiris Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).* Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol.9 No.1. STIE Stikubank.

[8] Sukarno, Kartika Wahyu dan Syaicu, Muhamad. 2006. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank umum di Indonesia.* Jurnal Organisasi dan Manajemen,Vol 3 No.2.

[9] Syarir, Asdini Andi. 2012. *Analisis Pengaruh LDR, NPL dan CAR Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Pembangunan* Syarir *Daerah (BPD) SE-Indonesia Tahun 2007-2011*. Skripsi. Universitas Hasanudin. Makassar.

[10] Yuliani. 2007. *Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Infobank.* Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 5, No 10. Palembang.

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 13/1/PBI/2011 TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Zainal Heripin[1], Poppy Indriani[2], Andrian Noviardy[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma
zainalheripin@gmail.com[1]
poppy.indriani@binadarma.ac.id[2]
andrian.noviardy@binadarma.ac.id[3]

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the impact of tje rules at Bank Indonesia which consist of credit risk, market risk, liquidity risk, good corporate governance, earning and capital toward the value of company. This research use purposive sampling method in choosing sample and obtained 23 companies which become the object of research in a year. Data analysis technique which use is a double linier regression. Variable of NPL and NIM have a significant impact toward value of company, meanwhile PDN, LDR, KMI, KKI, KTA, CAR don't have any significant positive impact toward value of company.

***Keywords**: NPL, PDN, LDR, KMI, KKI, KTA, NIM, CAR and price book value*

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan sektor perbankan merupakan institusi masyarakat yang diharapkan mampu melancarkan perekonomian negara. Hal ini ditunjukkan pada fenomena tahun 1998, ketika perbankan Indonesia mengalami masa-masa kritis, sejumlah bank umum bermasalah, maka stabilitas sektor-sektor riilpun ikut terpuruk. Sejumlah perusahaan besar dalam negeri mengalami kebangkrutan dan yang masih mampu survive-pun sulit melakukan pengembangan usaha akibat menipisnya cadangan dana untuk investasi dari perbankan.

Krisis keuangan global yang terjadi memberi pelajaran bahwa inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen resiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Perbankan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam memajukan perekonomian Negara, karena bank mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan produk-produk lainnya. Khaerunnisa Said (2012 dalam utami, 2015) menyatakan Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan.

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Dalam surat edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin maupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Kemudian

dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

Menurut Juwenda, 2014 perbankan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah sangat memperhatikan nilai perusahaan. Kegagalan bank dalam menjaga nilai perusahaannya akan menyebabkan kepercayaan dari nasabah beserta lembaga-lembaga yang menyimpan dana atau menginvestasikan modalnya di Bank berkurang, sehingga dana yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan pun berkurang. Hal ini menyebabkan bank harus menjaga setiap kegiatannya demi meningkatkan nilai perusahaan.

Penilaian kesehatan bank dengan metode baru untuk menilai kesehatan bank. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/*RBRR) baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan formulasi atau matriks penilaian berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Nilai Perusahaan

Menurut Salvatore (2005 dalam Haerani 2015), nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Tujuan utama perusahaan menurut *theory of the firm* adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan *(value of the firm).*

Manajer perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Resiko (*Risk-based Bank Rating/*RBRR) baik secara individual namun secara konsolidasi yang berdampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan umum dari suatu perusahaan adalah untuk mengembangkan usahanya dan memberikan kemakmuran yang maksimal kepada para pemegang sahamnya serta mengoptimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan pemilik perusahaan, sebab dengan nilai perusahaan yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham.

2.2 Risk profil

Resiko kredit, menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adalah resiko kredit akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Resiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan *(counterparty)*, penerbit *(issuer)*, atau kinerja peminjam dana *(borrower).* Resiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Pihak debitur tidak selamannya dapat mengembalikan uangnya kepada bank, misalnya saja jika debitur tersebut mengalami kerugian.

Resiko pasar, menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 resiko pasar adalah pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option.*

Resiko likiditas, menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

2.4 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Penelitian mengenai *corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan shareholders. Ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit.

Komisaris Independen adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan (Sutedi, 2015:130). Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan memberikan kewenangan tertentu. Kewenangan ini, antara lain memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi dan memeriksa dokumen perseroan, menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki direksi (Sutedi, 2015:130).

Komite Audit, Sutedi 2015 menyatakan Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk melakukan hal-hal berikut seperti meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit (SPI) ataupun eksternal audit, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Kepemilikan Institusional, Hardiningsih 2010 menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun diluar negeri serta saham pemerintah dalam dan luar negeri. Dengan adanya kepemilikan institusional oleh perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain seperti perusahaan-perusahaan akan mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer.

2.3 Earning

Menurut Munawir (2010 dalam Arisanti, 2014) *earning* adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu. Kegunaan rentabilitas juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan.

2.4 Capital

Menurut Fahmi (2013 dalam Sadiah, 2015) menyatakan bahwa struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang *(long-tern liabilities)* dan modal sendiri *(shareholders' equity)* yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. tujuan struktur modal adalah memadukan sumber dana permanen yang selanjutnya digunakan oleh perusahaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan.

2.5 Variabel penelitian

Variabel Dependen dalam Penelitian ini adalah Nilai perusahaan, dalam penelitian ini diproksikan untuk mengukur nilai perusahaan dengan *Price Book Value* (PBV). Menurut Murhadi (2013:66) PBV adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara harga saham dan nilai buku ekuitas sebagaimana yang ada di laporan posisi keuangan. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah NPL. PDN, LDR, KMI, KKI, KTA, NIM, DAN CAR.

2.6 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian mengenai nilai perusahaan, yaitu Juwenda (2014) meneliti mengenai hal yang sama dalam penelitian ini tentang peraturan BI terhadap nilai perusahaan yang menyatakan bahwa rentabiltas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Haerani (2015) dalam penelitiannya mengenai tingkat kesehatan perbankan menunjukkan bahwa rentabilitas sama dengan hasil penelitian Juwenda (2014) terdapatterdapat pengaruh signifikan terhadap *price book value* namun dalam penelitian Haerani menunjukan variabel lainnya yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *price book value* yaitu variabel CAR.

3. METODE PENELITIAN

3.2 Jenis Penelitian

Teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Menurut sugiono 2010, analisis regresi berganda (*Multivariate Regression*) merupakan suatu model dimana variabel terikat tergantung pada dua atau lebih variabel bebas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.3 Operasional Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini dari variabel independen resiko profil dengan kerugian akibat kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya dengan proksi NPL, resiko pasar pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option* dengan proksi PDN, resiko likuiditas akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank dengan proksi LDR, untuk komisaris independen dan komite audit menggunakan skala nominal berbeda dengan kepemilikan konstitutional presentase saham yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada dalam maupun luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri dengan skala jumlah saham yang dimiliki perbandingan dengan saham yang beredar, *earning* kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu yang diproksikan dengan skala ukur NIM, *capital* merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dengan modal yang cukup yang menggunakan proksi CAR.

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan uji statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai keseluruhan datasampel penelitian, selanjutnya akan dilakukan uji normalitas data menggunakan normalitas propability plot. Yang menunjukan hasil penelitian ini bahwa penyebaran data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, hal ini mengindikasikan bahwa data menunjukan pola distribusi normal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.5 Hasil Penelitian

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa *annual report* sebanyak 23 perusahaan perbankanyang *listing* di Bursa Efek Indonesia hinggga tanggal 31 Desember 2014. Berikut ini tabel statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian:

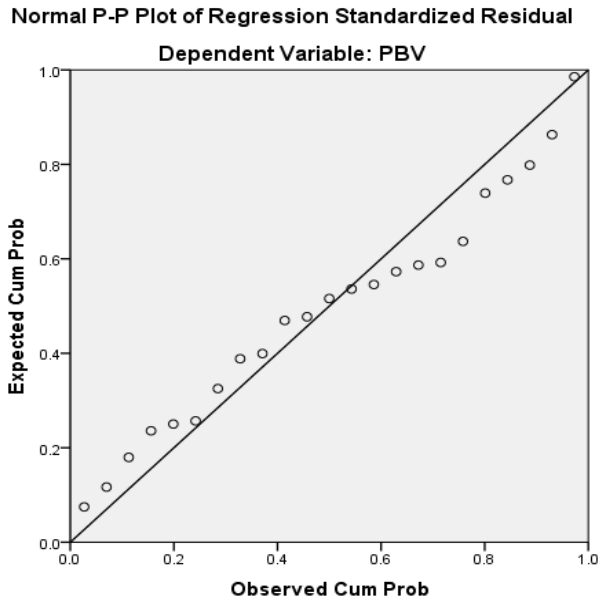
Tabel 4.3
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPL	23	.31	5.88	2.5500	1.47049
PDN	23	.18	5.58	1.9222	1.52746
LDR	23	58.13	108.61	84.7843	10.13097
KMI	23	2.0	5.0	3.087	.9960
KKKI	23	14.29	99.90	57.7183	22.71139
KTA	23	2.0	6.0	3.652	1.1123
RB	23	2.4	9.65	5.4287	2.12470
CP	23	10.50	26.66	17.3335	3.54266
PBV	23	.64	4.33	1.6122	.90398
Valid N (listwise)	23				

Sumber: hasil output spss

Berdasarkan table 4.2 *descriptive statistics* penelitian, terlihat bahwa dari 23 perusahaan perbankan yang menjadi sampel penelitian, variabel NPL mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 2,5500 dengan standar deviasi sebesar 1,47049 dimana nilai standar deviasi ini lebih kecil dari nilai rata-rata NPL. Pada nilai minimum sebesar 0,31 dari nilai rata-ratanya, berbeda dengan nilai maksimum sebesar 5,88 yang lebih besar dari nilai rata-ratanya.

Tabel 4.4
Uji Normalitas



Sumber: hasil output spss

Uji normalitas data menggunakan normalitas propability plot. Yang menunjukan hasil penelitian ini bahwa penyebaran data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, hal ini mengindikasikan bahwa data menunjukan pola distribusi normal.

4.2 Pembahasan

Tabel 4.5
Regresi parcial

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.112	2.063		.539	.598
	NPL	-.256	.142	-.416	-1.807	.092
	PDN	.152	.147	.256	1.031	.320
	LDR	-.022	.022	-.242	-.990	.339
	KMI	.253	.189	.279	1.335	.203
	KKI	.007	.008	.187	.964	.351
	KKKTA	.044	.158	.054	.278	.785
	NIM	.166	.090	.391	1.849	.086
	CAR	.024	.054	.094	.445	.663

a. Dependent Variable: PBV

Sumber: hasil output spss

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa resiko kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,092 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,1 (α = 10%). Hasil analisis ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Haerani dan Karnawati (2015) yang menyatakan bahwa resiko kredit tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Semakin sedikit resiko kredit yang dimiliki oleh bank maka akan memberikan sinyal kepada investor bahwa bank dapat mengelola perusahaan dengan baik. Hal ini dapat dijadikan acuan oleh investor dalam menganalisa suatu nilai perusahaan sebelum berinvestasi.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa resiko pasar memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,320 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Resiko pasar adalah pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option.* Menurut Prasidha (2015), Berdasarkan surat edaran BI Nomor 13/24/DPNP, indikator yang digunakan untuk mengukur resiko pasar yaitu Posisi Devisa Neto (PDN). Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin beresiko suatu bank karena tidak bisa menjaga pengelolaan manajemen valuta asing dengan memonitor perdagangan valuta asing dalam posisi yang terkendali. Dengan kondisi yang sedemikian rupa tentunya prediksi kondisi bermasalah bank juga akan meningkat pula.

Hasil pengujian ketiga menunjukkan bahwa resiko likuiditas memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,339 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Resiko Likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan

Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Resiko ini disebut juga resiko likuiditas pendanaan *(funding liquidity risk).* Resiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar *(market disruption)* yang parah. Risiko ini disebut sebagai resiko likuiditas pasar *(market liquidity risk).* Resiko Likuiditas menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Almilia dan Herdiningtyas (dalam Prasidha, 2015) LDR merupakan rasio untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi total kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi masing-masing dari indikator komisaris independen, kepemilikan institutional dan komite audit adalah 0,203 0,351 dan 0,785 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Haerani dan karnawati (2015), yang menyatakan bahwa GCG tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Menurut Haerani, hal ini dikarenakan GCG merupakan alat untuk menyelaraskan antara kepentingan principal dengan agen sehingga bias sejalan dengan tujuan yang sama yaitu mencapai laba dan berkesinambungan yang dilihat oleh calon investor dan investor yaitu factor lain seperti kepercayaan dari masyarakat terhadap bank tersebut dan juga profitabilitasnya.

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *earning* (NIM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,086 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Hasil analisis tersebut konsisten dengan penelitian Haerani dan Karnawati (2015) yang menyatakan bahwa *earning* (NIM) memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Munawir (2010 dalam Arisanti, 2014) Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu. Kegunaan rentabilitas juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan. Rentabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena kalau kemampuan perusahaan menghasilka labanya tinggi maka nilai perusahaannya menjadi tinggi.

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *capital* (CAR) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan nilai signifikansi 0,663 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan 0,1 (α = 5% dan 10%). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan penelitian Haerani dan Karnawati (2015) yang menyatakan bahwa *capital* (CAR) tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu dengan ketentuan BI yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Jadi permodalan pada perusahaan perbankan tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena memang perhitungan minimum bank itu sudah ditentukan oleh peraturan sehingga nilai perusahaan tidak dapat dipengaruhi oleh permodalan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Variabel NPL dan NIM berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. PDN, LDR,

komisaris independen, komite audit, Kepemilikan institusional, NIM, DAN CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukan bahwa kegiatan kredit di bank sangat mempengaruhi nilai perusahaan karena jika bank tidak mampu meminimalkan resiko kredit maka akan menurunkan nilai perusahaan dan kemampuan bank menghasilkan laba juga memiliki peran untuk nilai perusahaan karena semakin tinggi bank meninkatkan penghasilkan maka menunjukan nilai perusahaan yang tinggi.

6. REFERENSI

[1] _____*Bank Sentral Republik Indonesia*. Dipetik November 3, 2015, dari www.bi.go.id

[2] _____2011. *Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.* Jakarta: Bank Indonesia.

[3] _____2011. *Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Kodifikasi peraturan Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.

[4] _____2013. *Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.* Jakarta: Bank Indonesia.

[5] _____1998. *Undang-Undang Perbankan N0. 10 tentang Pengertian Perbankan.* Jakarta: Bank Indonesia.

[6] Arisanti, Rizqi. 2014. *Pengaruh Modal Terhadap Tingkat Rentabilitas Pada Koperasi KPRI PALEMBANG periode 2010-2012.* Politeknik Negeri Sriwijaya. Palembang.

[7] *Bursa Efek Indonesia*. Dipetik November 3, 2015, dari www.idx.co.id

[8] Haerani, Rini. 2015. *Pengaruh Risk Profil, Good Corporate Governance, Earning dan Capital Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Esa Unggul. Jakarta.

[9] Juwenda, I KT Galih Mitra. 2014. *Analisi Peerapan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Terhadap Nilai Perusahaan*. Universitas Mataram. Mataram.

[10] Murhadi, Werner R. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

[11] Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

[12] Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.* Yogyakarta.

[13] Supriyono, Maryanto. 2010. *Buku Pintar Perbankan dilengkapi dengan studi kasus dan kamus istilah perbankan.* Bandung: Penerbit Andi.

[14] Sutedi, Andrian.2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses. Jakarta.

[15] Utami, Santi Budi. 2015. *Perbandingan Analisis Camels dan RGEC Dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Unit Usaha Syariah Milik Pemerintah (Studi Kasus: PT.BANK NEGARA INDONESIA, TBK Tahun 2012-203)*. Universitas Negeri. Yogyakarta.